



**HIMPUNAN
PIDATO/PENGARAHAN MENTERI PERTANIAN
JANUARI s/d MEI 1991**

BUKU I

**DEPARTEMEN PERTANIAN
BIRO TATA USAHA**



Daftar : Pidato Menteri Pertanian

Bulan Januari 1991 s/d . M E I. 1991.

BUKU I

1. Kata Sambutan Menteri Pertanian pada Pameran " INDO PRODUCT " 1991.

2. Sambutan Menteri Pertanian pada Upacara Pelantikan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian, Staf Ahli Menteri Pertanian bidang Pengkajian Peranan Usaha Pertanian, Direksi Perum Prasarana Perikanan Samudera dan Pengukuhan PT.Perkebunan XVIII dan Dekom PT.Perkebunan XVIII sebagai Direksi dan Dekom PT.Perkebunan XIX Jakarta 5 Januari 1991.

3. Pokok-pokok Pengarahan Menteri Pertanian pada Rakor Bimas di Propinsi Lampung, tanggal 5 Januari 1991.

4. Pengarahan Menteri Pertanian pada Rakor Bimas Propinsi Jawa Barat,-tanggal 8 Januari 1991. di Bandung.

5. Pengarahan Menteri Pertanian pada Rakor Bimas Propinsi Jawa Tengah, tanggal 8 Januari 1991 di Semarang.

6. Pengarahan Menteri Pertanian pada Rakor Bimas Propinsi Sumatera Utara, tanggal 9 Januari 1991 di Medan.

7. Pengarahan Menteri Pertanian pada Rakor Bimas Propinsi Kalimantan Selatan, tanggal 10 Januari 1991. di Banjarmasin.

8. Pengarahan Menteri Pertanian pada Rakor Bimas Propinsi Jawa Timur, tanggal 10 Januari 1991 di Surabaya.

9. Pengarahan Menteri Pertanian pada Rakor Bimas Propinsi Bali, tanggal 12 Januari 1991 di Bali.

10. Pengarahan Menteri Pertanian pada Rakor Bimas Propinsi DI Yogyakarta tanggal 12 Januari 1991 di Yogyakarta.

11. Laporan Menteri Pertanian pada Upacara Pemberian Hadiah/Penghargaan Presiden pada Kelompok Tani Penenang Perlombaan Insus Pola Tanam, Supra Insus , Tebu Rakyat intensifikasi, Kelompok Tani Ternak dan Satuan Pembina Bimas Pemenang Perlombaan Tingkat Karya Bimbingan intensifikasi di Istana Negara tanggal 14 Januari 1991.

12. Pengarahan Menteri Pertanian pada Diklat Kader Fungsional Tani-Nelayan tanggal 14 Januari 1991.

13. Pokok-pokok Arahan Menteri Pertanian pada Temu Wicara dengan Kelompok tani Juara Perlombaan Intensifikasi Pertanian tingkat Nasional 1989/1990 Jakarta 15 Januari 1991.

14. Sambutan Menteri Pertanian pada Upacara Penutupan Seminar dalam rangka Catur Windu Institut Pertanian STIPER tanggal 16 Januari 1991.

15. Pengarahan Menteri Pertanian pada Rakor Bimas Propinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Januari 1991 di Padang.

16. Pengarahan Menteri Pertanian pada Rakor Bimas Propinsi Sumatera Selatan, tanggal 21 Januari 1991 di Palembang.

17. Pengarahan Menteri Pertanian pada Rakor Bimas Propinsi Bengkulu, tanggal 22 Januari 1991 di Bengkulu.

18. Pengarahan Menteri Pertanian pada Rakor Bimas Propinsi Sulawesi Utara, tanggal 22 Januari 1991 di Manado.

19. Pengarahan Menteri Pertanian pada Rakor Bimas Propinsi DI Aceh, tanggal 23 Januari 1991 di Banda Aceh.

20. Sambutan Menteri Pertanian pada Pembukaan Musyawarah Besar ke-V Persatuan Purnakaryawan Perkebunan Republik Indonesia (P3RI) di Yogyakarta, tanggal 23 Januari 1991.

21. Pengarahan Menteri Pertanian pada Rakor Bimas Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 25 Januari 1991 di Mataram.

22. Kata Sambutan Menteri Pertanian pada Pameran "Visit & INDO EXPO 1991" Jakarta, 26 Januari - 6 Februari 1991.

23. Pengarahan Menteri Pertanian pada Rakor Bimas Propinsi Kalimantan Barat tanggal 28 Januari 1991 di Pontianak.

24. Minister Of Agriculture Republic of Indonesia at The Opening Ceremony of the International Courses on Agricultural Extension Methodology and Pest Surveillance and Forecasting Jakarta, Januari 28, 1991.

25. Prasarana Menteri Pertanian pada Seminar Agronomi Nasional Fakultas Pertanian Universitas Andalas di Padang 4-6 Pebruari 1991.

25. Sambutan Menteri Pertanian pada Pelantikan Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, Sekretaris Badan Pengendalian Bimas, Staf Ahli Menteri Pertanian, Eselon II dan Direksi BUMN Lingkup Departemen Pertanian Jakarta, 7 Pebruari 1991.

27. Kata Sambutan Menteri Pertanian pada Pameran Sea Food Aquatech & Poultry International 1991.

28. Sambutan Menteri Pertanian pada Pameran Indonesia Today di Singapura (untuk buku panduan).

29. Sambutan Menteri Pertanian pada Pameran Indonesia Today 1991 (Show Directory).

30. Kata Sambutan Menteri Pertanian pada Acara Syukuran Peringatan 1/3 Abad Ambil Alih Perkebunan dan Seminar Peningkatan Peran Perkebunan pada Era Tinggal Landas Pembangunan Nasional tanggal 20 Pebruari 1991.

31. Sambutan Menteri Pertanian dalam menyambut Terbitnya buku Pedoman Penerangan Pelestarian Lingkungan Hidup.

32. Sambutan Menteri Pertanian pada Penanda tangan Perjanjian Kerjasama Departemen Pertanian dengan Bank Rakyat Indonesia, Bank Bumi Daya dan Bank Negara Indonesia 1946.

33. The Role of Agribusiness in Agricultural Development, Paper presented at the IEU Institute of Management at the Fifth Graduation Ceremony of its MBA Program, Jakarta 27 Pebruari 1991.

34. Pengembangan Agribisnis Dalam Pembangunan Pertanian, Bahan Ceramah Menteri Pertanian dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun V IEU Institute of Management, Jakarta 27 Pebruari 1991.

35. Pidato Penutupan Rapat Kerja Nasional Departemen Pertanian Jakarta 25 Pebruari 1991 - 1 Maret 1991.

36. Sambutan Menteri Pertanian pada Acara Pengukuhan Pimpinan Saka Taruna-bumi Tingkat Nasional Jakarta 1 Maret 1991.

37. Sambutan Pengarahan Menteri Pertanian dalam Konvensi Gugus Kendali Mutu ke 2 Jajaran PT.Perkebunan VII di Bah Jambi tanggal 4 Maret 1991.

38. Address by The Minister of Agriculture At The Closing Ceremony of Technical Cooperation on Veterinary Drug Control project Ata-297 At President Hotel Jakarta on Marct 6, 1991.

39. Pengarahan Menteri Pertanian dalam Rapat Kerja Nasional Departemen Koperasi Jakarta tanggal 7-9 Maret 1991.

40. Sambutan Menteri Pertanian pada Peresmian Selesaiannya Rahabilitasi Sosial Daerah Kumuh dalam rangka Peringatan HKS N 1990 dan Pencanangan dimulainya Gerakan Nasional Peningkatan Penggunaan Asi tanggal, 11 Maret 1991.

41. Sambutan Menteri Pertanian pada Acara Wisuda Angkatan ke 2 Program Diploma III Ahli Penyuluhan Pertanian (D3 APP) Yogyakarta 12 Maret 1991.

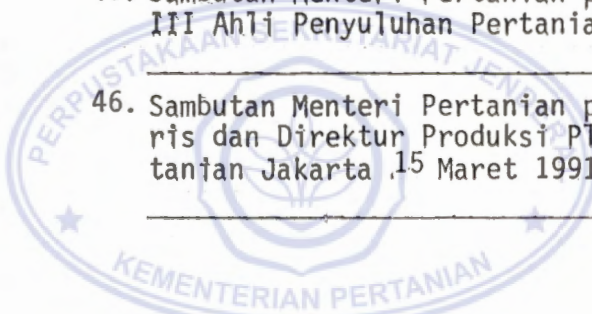
42. Sambutan Menteri Pertanian pada Acara Wisuda Angkatan ke 2 Program Diploma III Ahli Penyuluhan Pertanian (D3 APP) 12 Maret 1991.

43. Sambutan Menteri Pertanian pada Acara Wisuda Angkatan ke 2 Program Diploma III Ahli Penyuluhan Pertanian (D3 APP) 12 Maret 1991. di Malang.

44. Sambutan Menteri Pertanian pada Acara Wisuda Angkatan ke 2 Program Diploma III Ahli Penyuluhan Pertanian (D3 APP) 12 Maret 1991. di Medan.

45. Sambutan Menteri Pertanian pada Acara Wisuda Angkatan ke 2 Program Diploma III Ahli Penyuluhan Pertanian (D3 APP) 13 Maret 1991. di Yogyakarta.

46. Sambutan Menteri Pertanian pada Pelantikan Pejabat Eselon II Dewan Komisaris dan Direktur Produksi PT.Perkebunan XXXI, BUMN lingkup Departemen Pertanian Jakarta 15 Maret 1991.



47. Sambutan Menteri Pertanian dalam rangka Peresmian beberapa Proyek PU di Sulawesi Selatan tanggal 26 Maret 1991.

48. Sambutan Menteri Pertanian pada Peresmian Peluncuran dan Pengoperasian - Kapal Kayu Laminasi Tipe Tuna Long Line 45 GT Milik PT.Perikanan Samodra Besar tanggal 26 Maret 1991.

49. Sambutan Menteri Pertanian pada Upacara Apel Bendera tanggal 18 April 1991..

50. Pidato Menteri Pertanian pada Upacara penyerahan Kapal Penangkap Ikan - dari PT.Djayanti Group kepada Nelayan Anggota KUD Mina Ilham Dalam Rangka Pola PIR.

51. Sambutan Menteri Pertanian pada Kongres V Ikatan Ahli Gula Indonesia 29 - April 1991.

52. Sambutan Menteri Pertanian pada Upacara Wisuda Program Diploma III Akademi Perikanan Yogyakarta, 30 April 1991.

53. Sambutan Menteri Pertanian pada Upacara Penandatanganan perjanjian Kerjasama Deptan dengan Bank Rakyat Indonesia, Bank Bumi Daya dan Bank Negara Indonesia 1946.

54. Sambutan Menteri Pertanian pada Rakernas ke-18 HKTI, tanggal 3 Mei 1991 di Ciawi Bogor.

55. Sambutan Menteri Pertanian pada Peresmian Masjid Jami Nurul Fallah Komplek Perumahan BALITRO Bogor, tanggal 3 Mei 1991.

56. Sambutan Menteri Pertanian pada Pelantikan Eselon II Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara di Jakarta, 4 Mei 1991.

57. Sambutan Menteri Pertanian pada Upacara Bendera untuk memperingati Ulang - Tahun ke-20 Berdirinya Perusahaan Umum Sang Hyang Seri di Jakarta, 5 Mei 1991.

58. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian dalam Era Lepas Landas. 8 Mei 1991.

59. Sambutan Menteri Pertanian pada Pameran INDO-INVEST FAIR 91, 10-14 Mei 1991.

60. Keynote Address by the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia at the Second World Tuna Trade Conference Bali, 13-15 May 1991.

61. Sambutan Menteri Pertanian pada Acara Seminar Sehari IKA-SPP Daerah DKI Jakarta tanggal 18 Mei 1991.

62. Penyerahan sebagian Urusan Pertanian kepada Daerah, Ceramah Menteri Pertanian dalam forum Penataran Sistem dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.



64. Pidato Pengarahan Menteri Pertanian RI pada Pembukaan Konvensi ke-I GKM Group Charoen Pokphand Indonesia di Jakarta, tanggal 18 Mei 1991.

65. Sambutan Menteri Pertanian pada Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Jakarta, tanggal 20 Mei 1991.

66. Pidato Sambutan Menteri Pertanian pada Resepsi HUT ke-XVIII HNSI tahun 1991 di Jakarta, tanggal 21 Mei 1991.

67. Peranan BUMN dalam Jaringan Departemen Pertanian dalam Membina Pengusaha Ekonomi Lemah, Sambutan Menteri Pertanian pada Rakernas II Himpunan Pengusaha Lemah Indonesia di Jakarta, tanggal 21- Mei 1991.

68. Kata Sambutan Menteri Pertanian pada Pererbitan Euku Gelora Pembangunan Dalam Pelita V.

69. Sambutan Menteri Pertanian pada Pameran Kerajinan Indonesia dalam Interrip IV, tanggal 23 Mei 1991 di Jakarta.



1





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA PAMERAN "INDOPRODUCT '91"

Saya menghargai upaya PT KOMPASS INDONESIA yang secara reguler mengadakan pameran "INDO PRODUCT" sebagai kegiatan yang dapat menunjang pengembangan produksi dalam negeri dan pemasarannya, khususnya komoditi non migas di pasaran internasional.

Perkembangan ekspor komoditi pertanian Indonesia dipengaruhi oleh keadaan pasar internasional, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi persaingan negara pemasok lainnya. Karena itu, dukungan sektor pertanian terhadap kegiatan ekspor tidak cukup dilihat dari sisi peningkatan produk domestik saja tetapi sisi perkembangan pasar internasional perlu senantiasa turut diperhatikan.

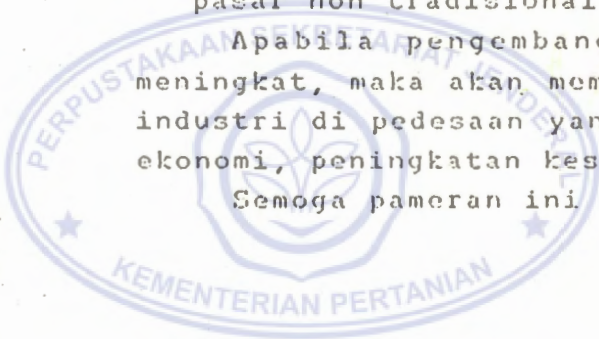
Pengembangan ekspor komoditas pertanian harus dilihat tidak hanya dalam peningkatan volume dan nilainya saja, tetapi perlu dilakukan reorientasi dalam pengembangan ekspornya yang mencakup :

1. Ekspor komoditas pertanian harus dapat meningkatkan nilai tambah dari komoditi tersebut. Dengan mengembangkan teknologi pengolahan, ekspor komoditi pertanian diarahkan pada barang setengah jadi dan barang jadi.
2. Peningkatan ekspor komoditi pertanian harus didasarkan atas keunggulan komparatif. Untuk ini mata dagangan ekspor komoditi pertanian perlu diperluas dengan komoditi baru atau bentuk baru yang tidak sekedar bahan mentah seperti selama ini.
3. Peningkatan ekspor komoditas pertanian harus disertai dengan pengembangan diversifikasi pasar ekspor. Kalau selama ini hampir semua ekspor komoditas pertanian ditujukan pada satu atau dua pasar saja, maka pada masa datang perlu disertai dengan usaha penetrasi pada pasar-pasar non tradisional.

Apabila pengembangan ekspor komoditas pertanian ini meningkat, maka akan memberi pengaruh pada pengembangan agro-industri di pedesaan yang selanjutnya akan memacu pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan petani.

Semoga pameran ini berhasil dengan sukses.

Menteri Pertanian



2





**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN PADA UPACARA PELANTIKAN
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERTANIAN, STAF AHLI
MENTERI PERTANIAN BIDANG PENGKAJIAN PERANAN USAHA PERTANIAN,
DIREKSI PERUM PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA, DAN PENGUKUHAN
PT PERKEBUNAN XVIII DAN DEWAN KOMISARIS PT PERKEBUNAN XVIII
SEBAGAI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT PERKEBUNAN XIX
JAKARTA, 5 JANUARI 1991**

Saudara Menteri Muda yang Terhormat,
Saudara-saudara Pejabat Eselon I dan II yang Terhormat,
Saudara Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian,
Saudara Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Pengkajian Peranan
Usaha Pertanian,
Saudara Direksi Perum Prasarana Perikanan Samudera,
Saudara Direksi dan Dewan Komisaris PT Perkebunan XIX,
Ibu-ibu dan Undangan yang Saya Hormati.

Assalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh,

Pada kesempatan yang baik ini marilah kita panjatkan puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan berkat, rahmat dan ridho-Nya kita dapat berkumpul dan menyaksikan upacara pelantikan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Pengkajian Usaha Pertanian, Direksi Perum Prasarana Perikanan Samudera, pengukuhan Direksi dan Dewan Komisaris PT Perkebunan XVIII sebagai Direksi dan Dewan Komisaris PT Perkebunan XIX.



Hadirin yang Saya Hormati,

Pada tahun 1990 telah diambil langkah penataan di bidang organisasi struktural Departemen Pertanian melalui Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1990. Penataan tersebut dimaksudkan agar Departemen Pertanian mampu menghadapi tantangan pembangunan pertanian yang semakin kompleks, di mana ketangguhan aparat yang menangani merupakan syarat mutlak. Penataan juga di maksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi aparat yang diharapkan dapat menolong pembangunan pertanian.

Dalam kaitan itu Badan Pendidikan Latihan dan Penyuluhan Pertanian (BPLPP) diubah menjadi Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian (Badan Diklat). Sejalan dengan itu Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Agribisnis Pertanian diubah menjadi Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Pengkajian Peranan Usaha Pertanian.

Upaya pembenahan organisasi dalam rangka meningkatkan efisiensi diterapkan juga pada Badan Usaha Milik Negara lingkup Departemen Pertanian. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1990 Perusahaan Negara Perkebunan XIX diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), sedangkan untuk pengelolaan dan pengawasannya diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris PTP XVIII.

Selanjutnya telah dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pengusahaan 9 (sembilan) pelabuhan perikanan yang meliputi:

- Pelabuhan Perikanan Samudera di Jakarta,
- Pelabuhan Perikanan Nusantara di Pekalongan, Belawan, Brondong (Jawa Timur),
- Pelabuhan Perikanan Pantai di Lampulo (Aceh), Pemangkat (Kalimantan Barat), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Tarakan (Kalimantan Timur) dan Prigi (Jawa Timur).



Hadirin yang Saya Hormati,

Pelantikan yang kita saksikan hari ini mengandung makna yang penting bagi terciptanya manajemen yang mapan dan dinamik yang berkaitan dengan tugas Departemen Pertanian, suatu kebutuhan dalam rangkaian proses pelaksanaan tugas pokok Departemen Pertanian yang dari hari ke hari selalu dituntut untuk selalu bertindak dan berbuat lebih berdayaguna dan berhasilguna. Semuanya itu dimaksudkan untuk semakin memberi arti di dalam mengemban misi kita sebagai bagian integral dalam Pembangunan Nasional untuk mewujudkan cita-cita yang dikandung dalam jiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam mencapai masyarakat adil dan makmur.

Hadirin yang Saya Hormati,

Pertama-tama ingin saya tegaskan pada kesempatan ini bahwa dalam rangka penyegaran inilah kita berusaha menata kembali salah satu kegiatan Pembangunan Pertanian, khususnya penyuluhan pertanian. Penyuluhan Pertanian yang merupakan kegiatan yang sangat penting dalam proses alih teknologi dan dalam memantapkan peranan dan keikutsertaan dari petani/nelayan dalam proses pembangunan, perlu kita telusuri kembali sehingga setiap gerak langkah dan isi kegiatannya lebih sesuai dengan perubahan-perubahan yang kita alami sekarang ini. Dalam bidang organisasi struktural kita hendaknya mengacu kepada Keppres 4 dan 5 tahun 1990, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 560/Kpts/OT.210/8/1990 dan 561/Kpts/OT.210/8/1990. Selain itu juga kita hendaknya dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan berbagai peraturan pemerintah yang mengatur pelimpahan urusan pusat kepada daerah.

Kedua, peningkatan efisiensi hendaknya menjadi kiat kerja dan menjadi pegangan dalam pelaksanaan setiap usaha kita. Efisiensi tidak saja diperlukan dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan oleh para pejabat di lingkungan departemen, tetapi juga oleh para pejabat lingkup BUMN. Efisiensi dapat dimulai dari pemanfaatan organisasi struktural sebaik-baiknya, merampingkan bentuknya, dan menghindarkan unit kerja yang tidak diperlukan.



Peningkatan efisiensi juga harus dilihat dari pemanfaatan sumberdaya sebaik-baiknya untuk memperoleh keluaran yang sebesar-besarnya.

Jadi dalam pelaksanaan tugasnya, Perum Prasarana Perikanan Samudera hendaknya tidak saja dapat menyediakan pelayanan yang lebih baik bagi kemanfaatan umum tetapi juga sekaligus dapat mendapatkan keuntungan berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan dengan efisien. Perum juga berperan untuk meningkatkan pendapatan nelayan melalui penyediaan dan perbaikan sarana dan atau prasarana Pelabuhan Perikanan, mengembangkan kewiraswastaan perikanan untuk merangsang dan atau mendorong usaha industri perikanan dan pemasaran hasil perikanan serta untuk memperkenalkan dan mengembangkan teknologi pengolahan hasil perikanan dan sistem rantai dingin dalam perdagangan dan distribusi hasil perikanan.

Kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT Perkebunan XIX, saya minta supaya kesinambungan usaha pengelolaan produksi dan pemasaran tembakau Vorstenland hendaknya dikelola secara profesional dan efisien.

Sebelum PN Perkebunan XIX dijadikan Persero, Pemerintah telah melakukan upaya untuk meningkatkan DORA ini, antara lain dengan melakukan restrukturisasi keuangan, perampingan organisasi, pelepasan asset yang tidak produktif dan konsentrasi produksi di beberapa kebun. Dengan demikian Direksi PT Perkebunan XIX sudah dibekali dengan landasan usaha yang cukup terarah untuk mengelola perusahaan ini sebagai perusahaan yang sehat.

Hadirin yang Saya Hormati,

Mengingat sekarang ini kita sedang memasuki tahun baru (1991), maka saya atas nama Pimpinan Departemen Pertanian dan atas nama keluarga mengucapkan selamat tahun baru 1991, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

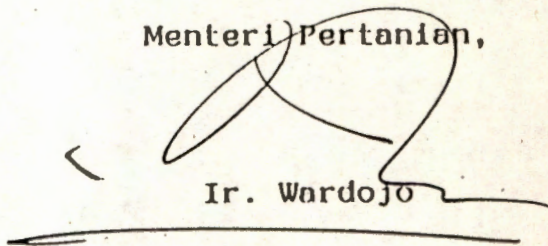
Akhirnya kepada Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Pengkajian Peranan Usaha Pertanian, Direksi Perum Prasarana Perikanan Samudera saya



mengucapkan selamat bekerja, khusus kepada mantan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas serta Anggota Direksi PN Perkebunan XIX saya mengucapkan terima kasih atas darma bakti Saudara-saudara selama menjalankan tugas, dan kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT Perkebunan XVIII yang diangkat sebagai Direksi dan Dewan Komisaris PT Perkebunan XIX saya mengucapkan selamat bekerja. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita.

Wassalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh,

Menteri Pertanian,


Ir. Wardoyo

-asp/s.



3





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

POKOK-POKOK PENGARAHAN
MENTERI PERTANIAN
PADA RAPAT KOORDINASI BIMAS
DI PROPINSI LAMPUNG
Tanggal 5 Januari 1991

Assalamu'alaikum Warakhmatullohi Wabarakatuh,

Saudara Peserta Rapat Koordinasi Satuan Pembina Bimas dan Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten se Propinsi Lampung yang saya hormati.

Pertama-tama saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Sdr. Gubernur dan Bupati serta segenap aparat Bimas di Propinsi Lampung atas kesungguhan dan ketekunannya dalam melaksanakan program Bimas sehingga produksi beras propinsi Lampung tahun 1990 berdasarkan angka Ramalan III Biro Pusat Statistik telah meningkat sebesar 52.678 ton atau 4,1% bila dibandingkan produksi tahun 1989.

Walaupun Propinsi Lampung pada tahun 1990 telah berhasil meningkatkan produksinya sebesar 4,1%, namun secara nasional produksi padi yang dicapai pada tahun 1990 kenaikannya hanya mencapai 241.071 ton atau 0,5 persen bila dibandingkan dengan produksi yang pernah dicapai pada tahun 1989. Dan apabila dibandingkan dengan sasaran produksi padi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian tahun 1990 sebesar 45,362 juta ton gkg, maka produksi yang telah dicapai pada tahun 1990 berada 0,395 juta ton gkg dibawah sasaran SK. Menteri Pertanian tahun 1990, yang hal ini akan menyebabkan menurunnya cadangan pangan nasional kita pada tahun 1991 ini.

Dalam upaya untuk tetap melestarikan swasembada beras yang sekaligus upaya untuk berswasembada pangan pada tahun 1991 ini, kelihatannya tugas kita masih cukup berat, oleh karena pada musim tanam 1990/1991 ini, kita dihadapkan banyak masalah yang menuntut kita untuk bekerja lebih giat dan tidak bersifat rutin.

Saudara-Saudara sekalian,
Beberapa faktor yang telah menghadang upaya kita di dalam meningkatkan produksi beras pada tahun 1991 ini antara lain :

1. Keadaan iklim yang kurang menguntungkan sehingga bergeser mundurnya waktu tanam MT 1990/1991 di seluruh propinsi sampai 1 - 2 bulan.



Data realisasi tanam MT 1990/1991 di propinsi Lampung selama bulan Oktober, Nopember dan Desember 1990 yang lalu, apabila dibandingkan dengan realisasi tanam pada periode yang sama tahun sebelumnya menunjukkan keadaan masih rendahnya realisasi tanam, seperti terlihat pada tabel dibawah ini

Bulan	Musim Tanam			% thdp 88/89	% thdp 898/90
	1988/89 Ha	1989/90 Ha	1990/91 Ha		
Oktober	2.621	6.060	-	-	-
Nopember	25.549	23.769	20.089	78	85
Desember	96.501	129.806	93.817	97	72

2. Akibat keadaan iklim yang kurang normal ini, diawatirkan akan meningkatnya hama dan penyakit tanaman padi MT 1990/1991.
3. Masih cukup besarnya tunggakan KUT pada MT sebelumnya sehingga menyebabkan rendahnya realisasi KUT pada MT 1990/1991 dan akan besarnya jumlah petani yang berswadana dalam penggunaan saprodi yang akan berpengaruh pada mutu intensifikasi.
4. Masih besarnya jumlah kelompok tani pelaksana program intensifikasi yang berstatus Pemula, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan mutu intensifikasi.
5. Masih kecilnya jumlah KUD yang mampu menyalurkan saprodi dan belum berperannya sebagian kelompok tani sebagai TPK (Tempat Pelayanan Koperasi).

Saudara Gubernur, Saudara Bupati dan hadirin sekalian,
Keadaan MT 1990/1991 ini, akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran produksi tahun 1991, apabila tidak kita lakukan upaya-upaya untuk mengantiisipasinya pada saat sekarang ini dan peluang untuk mencapai sasaran produksi tahun 1991 sesuai dengan target pada SK Mentan yang telah kita tetapkan akan kita titik beratkan pada usaha-usaha berikut :

1. Peningkatan mutu Supra Insus, yaitu dengan mengupayakan agar seluruh kelas petani pelaksana Supra Insus menerapkan 10 unsur teknologi, sehingga target produksi 9 ton gkp per hektar dapat dicapai.
2. Peningkatan mutu Insus Paket D, yaitu mengupayakan agar seluruh kelompok tani peserta Insus menerapkan 7 unsur paket teknologi secara penuh.



3. Meningkatkan luas areal tanam intensifikasi padi gogo baik dalam pelaksanaan Opsus padi gogo pada lahan usahatani konservasi maupun pada lahan kering lainnya yang telah biasa ditanami padi.

Untuk dapat melaksanakan usaha-usaha tersebut kita memerlukan kerja keras dari seluruh aparat Satuan Pembina Bimas Propinsi dan Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten, Kecamatan dan Desa dengan mewujudkan gerakan-gerakan berikut :

1. Meningkatkan aktivitas kerja para aparat pelayanan sarana produksi, kredit dan penyuluhan dengan cara Waskat oleh Saudara Gubernur, Bupati, Instansi-instansi anggota Bimas kepada petugas/bawahannya.
2. Meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian oleh masing-masing POSKO secara kontinu setiap 2 minggu sekali.
3. Menyiapkan kebutuhan petani dalam pelaksanaan Supra Insus dan Insus Paket D serta Opsus usahatani pada lahan konservasi seperti :
 - 1) benih berlabel
 - 2) pupuk lengkap dan berimbang (Urea, TSP, KCl dan ZA)
 - 3) penyediaan PPC/ZPT
 - 4) penyediaan pestisida dan herbisida
 - 5) meningkatkan gerakan tabungan kelompok melalui Simpe-des agar setiap Ha petani mempunyai tabungan minimal Rp. 200.000.-
4. Mengupayakan agar kelompoktani yang masih membutuhkan KUT dapat mendapatkannya dengan cara menginventarisasi kembali KUD yang layak menyalurkan KUT dan jumlah kelompoktani yang membutuhkan KUT.
5. Menyediakan pupuk secara lengkap oleh KUD dan menerapkan penyaluran bagi petani swadana agar bila membeli pupuk jumlah dan komposisinya sesuai dengan anjuran.
6. Menumbuhkan dan mengaktifkan semua Posko aparat maupun Posko kelembagaan petani agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, mengfungsikan Posko A1, A2, A3, B1, B2 Posko I, II, III dan IV.
7. Memberikan motivasi, berupa penghargaan bagi aparat yang berprestasi didalam kegiatan Bimas seperti KUD, Penyuluh, Petugas BRI dan lain-lain di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi, serta melaksanakan perlombaan antar kelompoktani dalam melaksanakan Insus, Supra Insus dan tanaman padi gogo dengan memberikan hadiah yang menarik.



8. Meningkatkan kampanye dan penerangan yang gencar dan meluas tentang program Intensifikasi Pertanian (Supra Insus, Insus Paket D, Opsus Kedelai dll) agar seluruh masyarakat mengetahuinya dan sadar untuk melaksanakannya.

Peningkatan produksi kedelai dalam rangka memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri dilakukan, melalui peningkatan mutu intensifikasi, peningkatan intensitas panen dan perluasan areal, dimanana untuk TA. 1990/91 direncanakan pada 18 propinsi dengan luas areal tanam 300.000 ha. Pada areal ini akan diberi bantuan berupa benih kedelai seluas 300.000 ha dan rhizobium untuk 200.000 ha oleh Ditjen. Pertanian Tanaman Pangan dan kebutuhan lainnya diperoleh melalui KUT.

Dalam menyelenggarakan Opsus Kedelai ini pendekatan yang telah ditempuh adalah pendekatan Operasi Khusus (opsus) yang diintegrasikan dengan opsus-opsus yang sekarang sedang berjalan, antara lain Opsus Supra Insus, Insus Paket D, dan Opsus Usahatani konservasi di lahan kering, dimana azas yang kita anut adalah azas konsentrasi untuk memudahkan pembinaan yang lebih intensif dan berfungsinya Posko-Pokso. Persyaratan minimal teknologi produksi yang digunakan yaitu sebagai berikut :

Kegiatan upaya khusus peningkatan produksi kedele	P o l a	Teknologi produksi minimal
1. Peningkatan mutu Insus di sawah	Supra Insus	8 unsur
2. a. Peningkatan intensitas panen disawah	Supra Insus	8 unsur
b. Peningkatan intensitas panen disawah diluar Insus	Insus	Sapta Usaha
3. Peningkatan Intensitas panen di lahan kering di daerah Opsus Usahatani konservasi	Insus	Hasta Usaha
4. Perluasan areal kedelai pada lahan kering bukaan baru	Inmum	- benih bermutu - rhizobium - alley cropping - pengendalian hama



Dengan menerapkan teknologi produksi tersebut diatas diharapkan produktivitas yang dihasilkan melalui pola Supra Insus yaitu 15,36 ku/ha, Insus 13,33 ku/ha dan Inmum 8,7 ku/ha.

Disamping peningkatan produksi tanaman pangan, propinsi Lampung juga merupakan propinsi pelaksana program TRI yang dilaksanakan sejak tahun 1987/1988.

Andil produksi gula dari Propinsi Lampung dalam produksi gula Nasional yang dihasilkan dari program TRI pada tahun giling 1989/1990 yaitu sebesar 11.086,8 ton hablur atau baru mencapai 0,71 % dari produksi gula Nasional.

Melihat besarnya potensi lahan dan fasilitas yang telah tersedia saat ini seperti tenaga pembimbing dari pabrik Gula, para Penyuluh yang telah tersedia dan fasilitas KUT serta dengan persediaan sarana produksi yang tepat, maka kami yakin ditahun 1990/1991 ini propinsi Lampung dapat lebih meningkatkan andilnya dalam produksi gula Nasional melalui program TRI ini.

Demikianlah upaya-upaya yang perlu kita laksanakan sesuai dengan amanat Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, yaitu beliau berpesan agar :

- a. Swasembada beras harus dipertahankan dan dilestarikan
- b. Produksi kedelai agar ditingkatkan melalui perluasan areal tanam dan peningkatan teknologi.
- c. Kredit Usahatani sebagai modal usahatani bagi petani harus disalurkan secara intensif, demikian juga pengembaliannya sehingga tidak mengganggu penyaluran untuk musim tanam berikutnya.

Atas perhatian Saudara-saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Menteri Pertanian


Ir. Wardono



4





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGARAHAN MENTERI PERTANIAN
PADA RAPAT KOORDINASI BIMAS PROPINSI JAWA BARAT
TANGGAL 8 JANUARI 1991 DI BANDUNG

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saudara Gubernur.

Saudara-saudara Bupati.

Saudara-saudara para Kakanwil.

Saudara-saudara para Kepala Dinas.

Saudara-saudara anggota Satdem Bimas.

Saudara-saudara anggota Salpel Bimas.

dan Hadirin sekalian Yth.

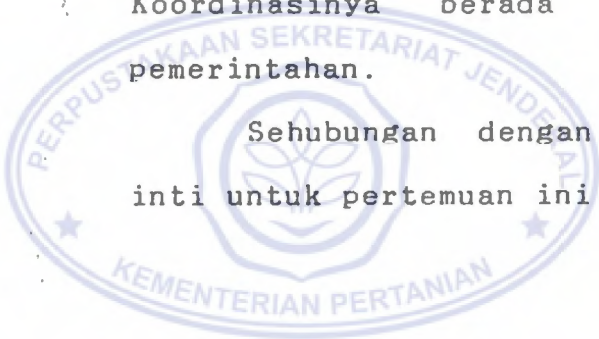
Pada kesempatan ini, marilah pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas rahmat dan karuniaNya lah hari ini kita bisa berkumpul dalam pertemuan yang penting ini untuk bersama-sama melakukan evaluasi terhadap posisi kita bersama dalam mengupayakan lestarinya swasembada pangan. Kita bersyukur bahwa selama ini kita selalu mendapat berkah dan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga sampai saat ini kita tetap dapat mempertahankan swasembada beras yang sudah kita raih sejak tahun 1984 itu. Disamping untuk mengevaluasi posisi kita masing-masing serta posisi kita bersama, pertemuan inipun dimaksudkan sebagai suatu pertemuan untuk mengkonsolidasi segenap aparatur dan kekuatan masyarakat yang terkait dengan kiprah produksi pangan, agar segenap tantangan dan peluang tahun ini serta tahun-tahun yang akan datang dapat selalu kita respons dengan melakukan/melaksanakan tindakan

Dengan iringan ucapan Selamat Tahun Baru 1991, dan Selamat Natal kepada mereka yang merayakannya, saya ingin menyampaikan beberapa informasi dan beberapa pesan dalam menyongsong tahun 1991 ini.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Swasembada pangan adalah tekad atau komitmen nasional yang terus menerus harus kita amankan dan kita jamin realisasinya dengan mengerahkan pikiran, perhatian serta segala potensi sumberdaya (manusia, alam, daya, dana) secara optimal sesuai dengan kebutuhan operasional di setiap lokasi. Pangan adalah hasil kegiatan petani, yang berada menyebar diseluruh peloksok wilayah tanah air kita yang luas dan beraneka ragam ini. Oleh karena itu program peningkatan produksi pangan, khususnya usaha pokok intensifikasi dan diversifikasi merupakan program yang keberhasilannya ditentukan oleh tekad, semangat, kegairahan dan kemampuan petani diseluruh wilayah pedesaan. Pengalaman kita selama ini menunjukkan bahwa tekad, semangat, gairah dan kemampuan petani untuk berpartisipasi dalam gerakan peningkatan produksi pangan dengan menerapkan Sapta Usaha adalah refleksi dari tekad, semangat, gairah dan kemampuan aparatur pengaturan, pelayanan, pembinaan dan kepemimpinan yang digelar dipedesaan dibawah pembinaan jajaran instansi pemerintah maupun Badan Usaha yang Simpul-simpul Koordinasinya berada diberbagai tingkat administrasi pemerintahan.

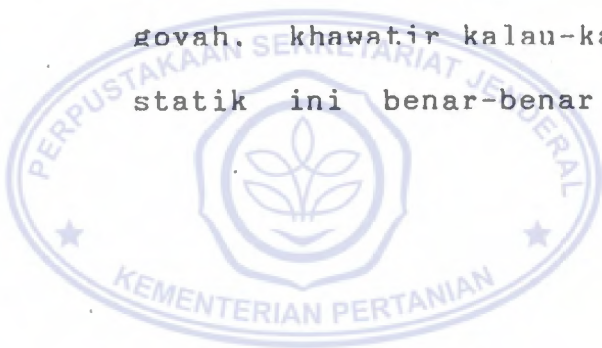
Sehubungan dengan kenyataan itu, maka sebagai pesan inti untuk pertemuan ini saya ingin sekali lagi menyampaikan



dan menyegarkan pesan yang selalu ditekankan oleh Bapak Presiden kepada kita sekalian, ialah agar kita tidak dan jangan bersikap rutin dalam menanggapi berbagai gejala, hambatan, gangguan dan kendala yang dapat mengurangi peluang keberhasilan kita melestarikan swasembada pangan. Karena secara operasional tolok ukur dari pelestarian swasembada pangan itu adalah tercapainya sasaran produksi musiman dan tahunan (baik areal tanam/panennya maupun hasil per hektarnya), pesan Presiden itu berarti bahwa kita harus mencari dan menemukan jalan dan langkah, kiat atau jurus yang tepat untuk memecahkan segala masalah yang dihadapi di lapangan. Kita tidak bisa bersikap rutin apalagi berpuas diri, karena setiap masalah yang tidak terpecahkan merupakan ancaman potensial yang berbahaya bagi kelestarian swasembada pangan.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Bertolak dari sikap dinamik, yang saya percaya kita miliki, maka segala gejala rutinitas yang selama ini masih sering kita jumpai perlu benar-benar kita waspadai jangan sampai menjadi penyakit kronis yang membuat masyarakat kita statik. Dan gejala statik ini secara nalar sederhana tercermin dari rendahnya laju peningkatan produksi beras pada tahun yang lalu, yang menurut Ramalan III hanya naik 0,54 % dibanding tahun 1989. Oleh karena itu kami benar-benar prihatin dan kepercayaan diri serta optimisme kami menjadi goyah, khawatir kalau-kalau penyakit rutinitas yang membuat statik ini benar-benar sudah mulai melanda pribadi kita.



Maka melalui pertemuan ini saya ingin berbagi rasa dan berbagi tanggung jawab dengan saudara-saudara sekalian, dan saya akan sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa apabila setelah dari pertemuan ini apa yang saya khawatirkan itu ternyata tidak benar. Saya ingin agar kita semua sekembalinya dari pertemuan ini benar-benar mempunyai kondisi mental dinamik yang bebas dari penyakit rutinitas.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Gejala menguatnya rutinitas yang mengakibatkan perkembangan statik dan melemahnya sikap dinamik kreatif yang tahun-tahun sebelumnya telah berhasil kita gelarkan, merupakan kondisi awal yang harus segera kita koreksi kalau kita memang bertekad untuk melestarikan swasembada pangan. Menghadapi tugas tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang sebagaimana sudah dicantumkan dalam buku Repelita V, yang khusus untuk kedelai ditambah lagi dengan sasaran khusus percepatan peningkatan produksi kedelai karena importnya terus meningkat, kita benar-benar dihadapkan dengan misi yang berat dan pelik. Secara kuantitatif dan kualitatif sasaran yang harus kita capai tahun 1991 ini hanya mungkin dapat kita capai apabila kita mampu memanfaatkan peluang yang sempit. MT 1990/1991 ini dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya dan MT 1991 berhasil kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin, dengan sasaran ganda (padi dan kedelai) yang kita utamakan.

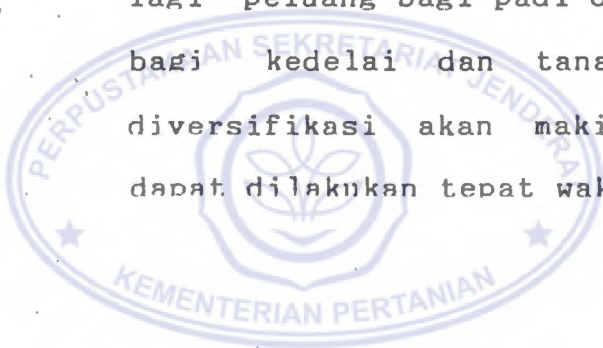
Sebagaimana sudah kita ketahui dan kita alami bersama, hujan dalam MT 1990/1991 ini datangnya terlambat 1 - 2 bulan.



Ini berarti bahwa kita tidak bisa mengharapkan produksi dari tambahan areal (karena kemungkinan besar malah areal panennya akan lebih kecil dari tahun yang lalu dan dari sasaran). Peningkatan produksi padi MT 1990/1991 hanya mungkin kita capai dari peningkatan mutu intensifikasi yang akan memberikan hasil per hektar yang lebih tinggi. Ini berarti tambahan produksi padi itu harus kita capai dari peningkatan mutu intensifikasi pada hamparan Supra Insus, Insus paket D dan perluasan Insus paket C.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Untuk bahan penjabaran rencana operasional yang dapat memanfaatkan sumber daya lahan dan iklim secara optimal dalam tahun 1991 ini, pada kesempatan ini saya sampaikan informasi yang kita dapat dari BMG tentang perkiraan sifat hujan di berbagai wilayah Indonesia dalam MT 1990/1991 dan Mt 1991 yang akan datang. Dari informasi itu dapat kita simpulkan bahwa pada umumnya curah hujan itu secara kualitatif dan kuantitatif kondisinya kurang menguntungkan (perkiraan kemarau lebih kering, lebih panjang) dibandingkan dengan tahun 1989 dan tahun 1990 yang lalu. Ditinjau dari sudut inipun maka jawaban yang harus kita tampilkan sebagai respons terhadap kondisi lingkungan atau iklim yang kurang menggembirakan itu adalah ilmu dan teknologi tepat guna, yaitu penerapan Sapta Usaha secara penuh dan disiplin. Sekali lagi peluang bagi padi dari segi areal makin terbatas, tapi bagi kedelai dan tanaman palawija lain dalam rangka diversifikasi akan makin besar peluang perluasannya, asal dapat dilakukan tepat waktu.



Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Di Jawa Barat selama ini kami amati adanya :

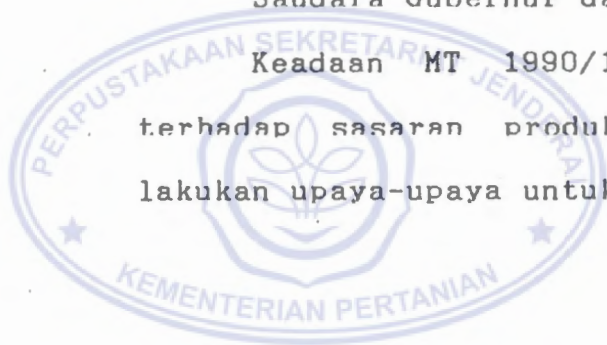
1. Keadaan iklim yang kurang menguntungkan sehingga terjadi pergeseran/mundurinya waktu tanam MT 1990/1991 sampai 1 - 1,5 bulan dibandingkan dengan MT 1989/1990. Akibat dari mundurnya waktu tanam ini maka terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Data realisasi tanam untuk komoditi padi MT 1990/1991 di Propinsi Jawa Barat menunjukkan keadaan yang masih sangat rendah. Sampai pertengahan Desember 1990 realisasi Supra Insus mencapai 105.640 Ha (26,48 %), Insus mencapai 195.072 Ha (25,22 %) dan Inmum mencapai 35.164 Ha (36,82 %) sehingga seluruh areal intensifikasi realisasinya baru mencapai 335.876 Ha (26,56 %).
 - b. Kemungkinan akan terjadinya akumulasi areal tanam yang tinggi pada bulan Desember 1990 dan Januari 1991. Hal ini akan mengakibatkan kebutuhan sarana dan fasilitas usahatani terutama pupuk dan KUT terakumulasi pada periode yang sangat singkat.
 - c. Kemungkinan semakin mengecilnya kemampuan modal yang dimiliki petani sehingga dukungan KUT menjadi semakin besar peranannya dalam upaya meningkatkan mutu penerapan teknologi usahatani.
 - d. Petani pelaksana intensifikasi lahan kering, yang juga pada umumnya mengusahakan lahan sawah, akan terganggu/terpengaruh oleh keterlambatan pengelolaan sawah sehingga realisasi tanam padi pada lahan kering



- tidak bisa atau kecil peluangnya untuk meningkat.
- e. Kemungkinan meningkatnya serangan hama dan penyakit khususnya serangan hama penggerek batang di Jalur Pantura.
 - f. Kemungkinan waktu panen akan jatuh pada saat curah hujan masih tinggi.
2. Penerapan teknologi masih lemah terutama penggunaan pupuk KCl, penggunaan ZPT/PPC, penggunaan benih berlabel dan pengendalian hama terpadu.
 3. Tunggakan KUT dari MT sebelumnya, sehingga menyebabkan rendahnya realisasi KUT pada MT 1990/1991 dan akan menyebabkan besarnya jumlah petani yang berswadana sehingga akan berpengaruh pada mutu intensifikasi.
 4. Jumlah kelompok tani pemula dan lanjut yang besar kurang mendukung diterapkannya mutu intensifikasi yang tinggi.
 5. Keterbatasan jumlah KUD yang mampu menyalurkan KUT dan saprodi serta belum berperannya sebagian besar kelompok tani sebagai TPK (Tempat Pelayanan Koperasi).
 6. Kepemimpinan Kepala Desa yang dalam melaksanakan tugasnya belum sepenuhnya menampilkan dinamika operasional gerakan terpadu yang melibatkan aktivitas kelompok tani yang terkait secara melenbaga dengan KUD, akan menyulitkan proses pemasyarakatan pembudayaan berusahatani secara berencana dan dengan orientasi program yang kuat.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian,

Keadaan MT 1990/1991 ini, akan sangat berpengaruh terhadap sasaran produksi tahun 1991. Apabila tidak kita lakukan upaya-upaya untuk mengantisipasinya pada saat ini

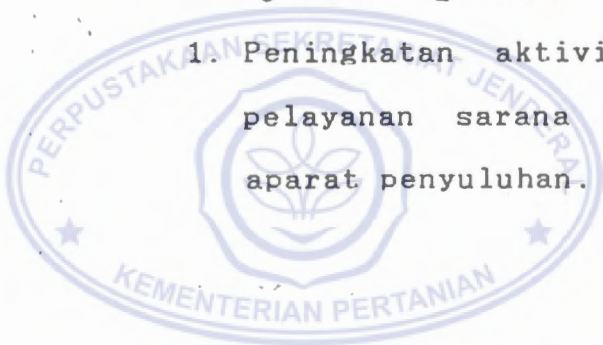


maka peluang untuk mencapai sasaran produksi tahun 1991 sebanvak 46.450 g.k.g akan sangat kecil. Oleh karena itu, usaha-usaha perlu kita tingkatkan dengan memberikan prioritas kepada :

1. Peningkatan mutu Supra Insus, yaitu dengan mengupayakan agar seluruh petani pelaksana Supra Insus menerapkan 10 unsur teknologi sehingga target 9 ton g.k.p per hektar dapat dicapai. Yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian adalah teknologi dalam pengolahan tanah, penggunaan benih berlabel, penggunaan KCl dalam pemupukan berimbang, penggunaan ZPT/PPC dan penggunaan karbofuran secara tepat dan bijaksana.
2. Peningkatan mutu Insus paket D, yaitu mengupayakan agar seluruh kelompoktani peserta Insus menerapkan 7 unsur paket teknologi secara penuh.
3. Meningkatkan luas areal tanam intensifikasi padi gogo baik dalam pelaksanaan Opsus padi gogo pada lahan usahatani konservasi maupun pada lahan kering lainnya yang telah biasa ditanami padi.

Bapak Presiden Suharto pada sidang kabinet lengkap tanggal 31 Desember 1990 menekankan pentingnya koordinasi antar berbagai instansi terkait. Karena itu peranan Bupati dan Camat serta Kepala Desa sangat menentukan keberhasilan mempertahankan swasembada pangan. Oleh karena itu perlu diwujudkan gerakan - gerakan sebagai berikut:

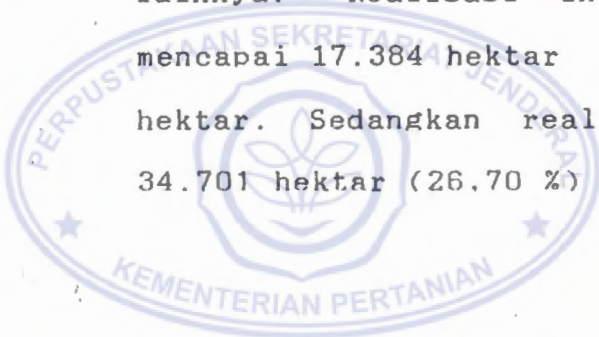
1. Peningkatan aktivitas kerja semua aparat, baik aparat pelayanan sarana produksi, aparat perkreditan dan aparat penyuluhan.



2. Diskusi dan musyawarah petani dalam kelompoktaninya; musyawarah antar Kontaktani dalam himpunan INSUS dan Supra Insus serta musyawarah berbagai instansi yang terkait di desa, kecamatan dan kabupaten sebagai forum pos simpul koordinasi merupakan titik titik yang sangat menentukan keberhasilan program intensifikasi.
3. Meningkatkan gerakan pengumpulan telur penggerek batang di pesemaian khususnya di daerah Supra Insus Jalur Pantura.
4. Mengamalkan azas 6 tepat dalam melayani kebutuhan petani dalam pelaksanaan Supra Insus dan Insus Paket D serta Opsus Intensifikasi Usahatani Konservasi di lahan kering, berupa :
 - 1). benih unggul bermutu.
 - 2). pupuk lengkap dan berimbang (Urea, TSP, KCl dan ZA).
 - 3). penyediaan PPC/ZPT
 - 4). penvediaan pestisida (khususnya karbofuran) dan herbisida.
 - 5). KUT dan gerakan tabungan kelompoktani melalui simpedes agar setiap hektar petani mempunyai tabungan minimal Rp.200.000,00.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Disamping melestarikan swasembada beras yang harus kita pertahankan, tugas kita juga harus mengusahakan peningkatan produksi kedelai dan jagung beserta komoditas palawija lainnya. Realisasi intensifikasi kedelai MT 1990/1991 mencapai 17.384 hektar (42.38 %) dari sasaran seluas 41.020 hektar. Sedangkan realisasi intensifikasi jagung mencapai 34.701 hektar (26.70 %) dari sasaran seluas 130.000 hektar.



Untuk mencapai produktivitas kedelai sebesar 15,36 kuintal per hektar pada Supra Insus dan 13,3 kuintal per hektar pada Insus serta 8,7 kuintal per hektar pada Inmum, maka upaya-upaya yang harus dilaksanakan adalah :

1. Pada daerah Supra Insus diterapkan minimal 8 unsur teknologi baik pada kegiatan peningkatan mutu intensifikasi dan peningkatan intensitas panen disawah.
2. Pada daerah Insus sawah (diluar Supra Insus) sebaiknya diterapkan minimal 7 Usaha (Sapta Usaha) produksi dengan kegiatan Peningkatan intensitas panen.
3. Pada daerah Opsus intensifikasi usahatani konservasi dilahan kering diterapkan Hasta Usaha melalui kegiatan peningkatan intensitas panen dengan pola Insus.
4. Pada daerah Inmum di lahan kering termasuk lahan bukaan bar diterapkan teknologi penggunaan benih bermutu, penggunaan rhizobium , alley cropping dan pengendalian hama/penyakit.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian,

Disamping melaksanakan upaya peningkatan produksi tanaman pangan. Propinsi Jawa Barat juga melaksanakan upaya peningkatan produksi gula melalui program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). peningkatan produksi peternakan melalui Intensifikasi Ayam bukan Ras (INTAB) dan Intensifikasi Ternak Kerja (INTEK) serta peningkatan produksi perikanan melalui Intensifikasi Mina Padi (INMINDI).

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa realisasi areal tanam TRI belum mencapai sasaran yang diinginkan yaitu baru mencapai 15.448 Ha (86,79 %) dari sasaran seluas 17.800 Ha.



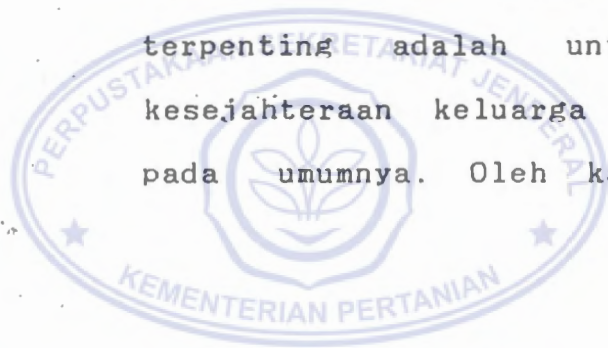
Hal ini disebabkan ada hubungannya dengan kurang menariknya budidaya tebu bagi petani, produktivitas tebu yang masih rendah yang mengakibatkan pendapatan dari tebu belum dapat bersaing dengan hasil yang diperolehnya apabila lahannya ditanami tanaman pangan. Rendahnya produktivitas tebu tersebut antara lain disebabkan oleh tingkat penerapan teknologi yang belum sempurna. Oleh karena itu berbagai kegiatan pembinaan dari seluruh aparat perlu ditingkatkan.

Mengenai realisasi populasi Intab dan Intek sudah cukup baik. akan tetapi pelaksanaan vaksinasi Intab masih rendah. Rendahnya realisasi vaksinasi antara lain disebabkan tingkat kesadaran para petani masih rendah akan manfaat vaksinasi dan karena masih dirasakan sulitnya mendapatkan vaksin. Untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan peningkatan kegiatan pembinaan dan penyederhanaan pola penyaluran vaksin yang dibutuhkan oleh para petani.

Realisasi Intensifikasi Mina Padi baru mencapai 3.711,5 hektar (30.93 %) dari sasaran seluas 12.000 hektar. Kenyataan realisasi mina padi yang belum menggembirakan itu ada hubungan dengan masih sulitnya memperoleh bibit ikan yang unggul. Sehubungan dengan itu pengembangan Penangkar Benih Ikan perlu ditingkatkan dan digalakkan.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian,

Pelaksanaan intensifikasi pertanian tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi, akan tetapi yang terpenting adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga tani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu penyelenggaraannya perlu



mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari seluruh aparat yang terkait. Peranan para Camat dan Kepala Desa dibawah kepemimpinan Bupati Kepala Daerah akan sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan intensifikasi pertanian tersebut diwilayah kerjanya.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Produksi pangan adalah hasil dari sistem produksi pangan nasional, yang pada saat ini sudah mencapai bentuk dan formatnya yang cukup handal. Ini berarti berbagai subsistem yang menjadi perangkat dan bagian dari sistem sudah bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam suatu tatanan dan tata hubungan kerja yang menjamin sinkronisasi dan koordinasi yang serasi. Perangkat kebijakan politik, ekonomi, teknologi, prasarana dan administrasi benar-benar telah ada dalam kondisi yang dibutuhkan dan menggerakkan para petani. Tetapi sistem ini tidak semua kehandalannya diberbagai subsistem wilayah, karena itu kita saksikan sekarang masih terdapat variabilitas produktivitas antar wilayah yang cukup tinggi. Karena proses pemantapan pengembangan sistem ini wilayah demi wilayah sangat tergantung dari unsur manusia dan kegiatannya yang khas harus dikembangkannya sendiri setempat (karena kepemimpinan dan kualitas manusia tidak bisa didatangkan dari luar), maka pada saat ini keberhasilan program pangan tidak lagi ditentukan oleh aktivitas kepemimpinan pada eselon kepemimpinan nasional dan propinsi, tetapi ditentukan oleh dinamika kepemimpinan dan sistem ditingkat kabupaten ke bawah.

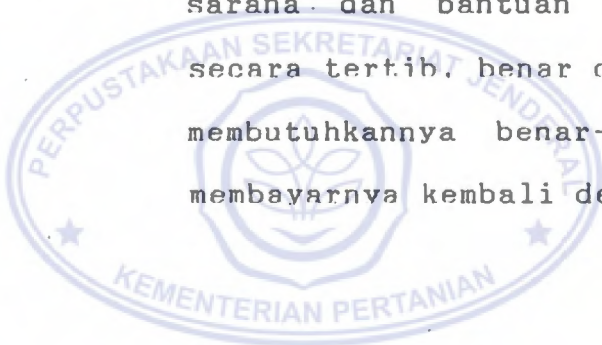


Oleh karena itu pada tempatnyalah, apabila kami saat ini meminta Saudara-saudara Bupati untuk memimpin aparatur Satuan Pelaksana Bimas didaerah secara dinamik dan sistematik. Agar makin lama keberhasilan program itu makin ditentukan oleh sistem dan kemampuan orang-orangnya semata-mata, kami meminta dengan sungguh-sungguh agar para Bupati memusatkan perhatian kepada perkembangan organisasi dan mekanisme kerja berbagai Pos Simpul Koordinasi (POSKO A1, A2, A3, B1, B2, I, II dan III). Maka metode Opsus kami minta agar benar-benar diamalkan sebagai normalisasi ketatalaksanaan dan kepemimpinan operasional lapangan. Pengamatan kami selama ini menunjukkan bahwa para Bupati yang selalu memantau dan sering berada di lapangan sangat besar peluangnya untuk berhasil memimpin rakyatnya berpartisipasi dalam program pangan nasional.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Sekali lagi saya mengingatkan bahwa upaya-upaya yang perlu kita laksanakan sesuai dengan amanat Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu adalah :

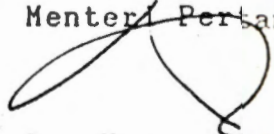
1. Swasembada beras harus tetap dipertahankan dan dilestarikan.
2. Produksi kedelai agar ditingkatkan baik melalui perluasan areal tanam maupun peningkatan mutu intensifikasi.
3. Penyaluran dan pembayaran kembali Kredit usahatani sebagai sarana dan bantuan modal usahatani, harus diusahakan secara tertib, benar dan aman, sehingga semua petani yang membutuhkannya benar-benar bisa memperolehnya dan dapat membayarnya kembali dengan lancar.



Demikian uraian kami mengenai upaya yang perlu Saudara-saudara perhatikan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Menteri Pertanian



Ir. Wardoyo



5





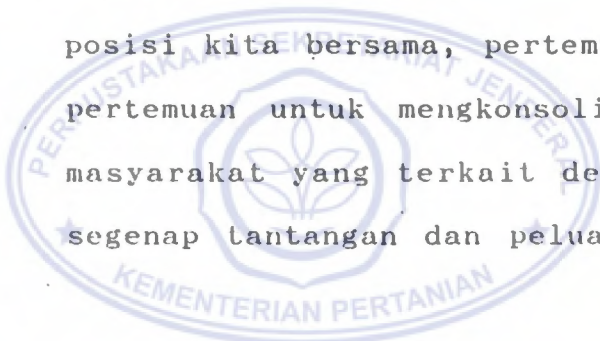
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGARAHAN MENTERI PERTANIAN
PADA RAPAT KOORDINASI BIMAS PROPINSI JAWA TENGAH
TANGGAL 8 JANUARI 1991 DI SEMARANG

Saudara Gubernur,
Saudara-saudara Bupati,
Saudara-saudara para Kakanwil,
Saudara-saudara Para Kepala Dinas,
Saudara-saudara Anggota Satpem Bimas,
Saudara-saudara Anggota Satpel Bimas,
dan hadirin sekalian Yth.

Assalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarakatuh.

Pada kesempatan yang jarang terjadi ini, marilah pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wataala, karena atas rahmat dan karunia Nya lah hari ini bisa berkumpul dalam pertemuan yang penting ini untuk bersama-sama melakukan evaluasi terhadap posisi kita bersama dalam mengupayakan lestarinya swasembada pangan. Kita bersyukur bahwa selama ini kita selalu mendapat berkah dan Ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga sampai saat ini kita tetap dapat mempertahankan swasembada beras yang sudah kita raih sejak tahun 1984 itu. Disamping untuk mengevaluasi posisi kita masing-masing serta posisi kita bersama, pertemuan inipun dimaksudkan sebagai suatu pertemuan untuk mengkonsolidasi segenap aparatur dan kekuatan masyarakat yang terkait dengan kiprah produksi pangan, agar segenap tantangan dan peluang tahun ini serta tahun-tahun yang



akan datang dapat selalu kita respons dengan melakukan/melaksanakan tindakan operasional yang tepat, efektif dan efisien.

Dengan iringan ucapan Selamat Tahun Baru 1991, dan Selamat Natal kepada mereka yang merayakannya, saya ingin menyampaikan beberapa informasi dan beberapa pesan dalam menyongsong tahun 1991 ini.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Swasembada pangan adalah tekad atau komitmen nasional yang terus menerus harus kita amankan dan kita jamin realisasinya dengan mengerahkan pikiran, perhatian serta segala potensi sumberdaya (manusia, alam, daya, dana) secara optimal sesuai dengan kebutuhan operasional di setiap lokasi. Pangan adalah hasil kegiatan petani, yang berada menyebar diseluruh pelosok wilayah tanah air kita yang luas dan beraneka ragam ini. Oleh karena itu program peningkatan produksi pangan, khususnya usaha pokok intensifikasi dan diversifikasi, merupakan program yang keberhasilannya ditentukan oleh tekad, semangat, kegairahan dan kemampuan petani diseluruh wilayah pedesaan.

Pengalaman kita selama ini menunjukkan bahwa tekad, semangat, gairah, dan kemampuan petani untuk berpartisipasi dalam gerakan peningkatan produksi pangan dengan menerapkan Sapta Usaha adalah refleksi dari tekad, semangat, gairah, dan kemampuan aparatur pengaturan, pelayanan, pembinaan dan kepemimpinan yang digelar di pedesaan dibawah pembinaan jajaran instansi pemerintah maupun badan usaha yang simpul-simpul koordinasinya berada diberbagai tingkat administrasi pemerintahan.



Sehubungan dengan kenyataan itu, maka sebagai pesan inti untuk pertemuan ini saya ingin sekali lagi menyampaikan dan menyegarkan pesan yang selalu ditekankan oleh Bapak Presiden kepada kita sekalian, ialah agar kita tidak dan jangan bersikap rutin dalam menanggapi berbagai gejala hambatan, gangguan dan kendala yang dapat mengurangi peluang keberhasilan kita melestarikan swasembada pangan. Karena secara operasional tolok ukur dari pelestarian swasembada pangan itu adalah tercapainya sasaran produksi musiman dan tahunan (baik areal tanam/panennya maupun hasil perhektarnya). Pesan Bapak Presiden itu berarti bahwa kita harus selalu mencari dan menemukan jalan dan langkah, kiat atau jurus yang tepat untuk memecahkan segala masalah yang dihadapi di lapangan. Kita tidak bisa bersikap rutin apalagi berpuas diri, karena setiap masalah yang tidak terpecahkan akan merupakan ancaman potensial yang berbahaya bagi kelestarian swasembada pangan.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Bertolak dari sikap dinamik yang saya percaya kita miliki, maka segala gejala rutinitas yang selama ini masih sering kita jumpai perlu benar-benar kita waspadai agar jangan sampai menjadi penyakit kronis yang membuat masyarakat kita statik. Dan gejala statik ini secara nalar sederhana tercermin dari rendahnya laju peningkatan produksi beras kita pada tahun yang lalu, yang menurut Ramalan III hanya naik 0,54% dibanding tahun 1989. Oleh karena itu kami benar-benar prihatin dan kepercayaan diri serta



optimisme kami menjadi goyah, khawatir kalau-kalau penyakit rutinitas yang membuat statik itu benar-benar sudah mulai melanda pribadi kita. Maka melalui pertemuan ini saya ingin berbagi rasa dan berbagi tanggung jawab dengan saudara-saudara sekalian dan saya akan sangat berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa apabila setelah dari pertemuan ini apa yang saya khawatirkan itu ternyata tidak benar. Saya ingin agar kita semua sekembalinya dari pertemuan ini benar-benar mempunyai kondisi mental dinamik yang bebas dari penyakit rutinitas.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Gejala menguatnya rutinitas yang mengakibatkan perkembangan statik dan melemahnya sikap dinamik kreatif yang tahun-tahun sebelumnya telah berhasil kita gelarkan, merupakan kondisi awal yang harus segera kita koreksi kalau kita memang bertekad untuk melestarikan swasembada pangan. Menghadapi tugas tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang sebagaimana sudah dicantumkan dalam Buku Repelita V, yang khusus untuk kedelai ditambah lagi dengan sasaran khusus percepatan peningkatan produksi kedelai, karena impornya terus meningkat, kita benar-benar dihadapkan dengan misi yang berat dan pelik. Secara kuantitatif dan kualitatif sasaran yang harus kita capai Tahun 1991 ini, hanya mungkin dapat kita capai apabila kita mampu memanfaatkan peluang yang sempit MT 1990/1991 ini dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya dan MT 1991 berhasil kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin, dengan sasaran ganda (padi dan kedelai) yang kita utamakan.



Sebagaimana sudah kita ketahui dan kita alami bersama, MT 1990/1991 ini hujannya terlambat 1 - 2 bulan. Ini berarti bahwa kita tidak mengharapkan produksi dari tambahan areal (karena kemungkinan besar malahan areal panennya akan lebih kecil dari tahun yang lalu dan dari sasaran). Peningkatan produksi padi MT 1990/1991 hanya mungkin kita capai dari peningkatan mutu intensifikasi yang akan memberikan hasil perhektar yang lebih tinggi. Ini berarti tambahan produksi itu harus kita capai dari peningkatan mutu intensifikasi pada hamparan Supra Insus, Insus paket D, dan perluas Insus paket C.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Untuk bahan penjabaran rencana operasional yang dapat memanfaatkan sumberdaya lahan dan iklim secara optimal dalam tahun 1991 ini pada kesempatan ini saya sampaikan Informasi yang kita dapat dari BMG tentang perkiraan sifat hujan diberbagai wilayah Indonesia dalam MT 1990/1991 dan MT 1991 yang akan datang. Dari informasi itu dapat kita simpulkan bahwa pada umumnya curah hujan itu secara kualitatif dan kuantitatif kondisinya lebih kurang menguntungkan (kemarau lebih kering, lebih panjang) dibandingkan dengan tahun 1989 dan tahun 1990 yang lalu. Ditinjau dari sudut inipun maka jawaban yang harus kita tampilkan sebagai respons terhadap kondisi lingkungan atau iklim yang kurang menggembirakan itu adalah ilmu dan teknologi tepat guna, yaitu penerapan sapta usaha secara penuh dan disiplin. Sekali lagi peluang bagi padi dari segi areal makin terbatas,



tapi bagi kedelai dan tanaman palawija lainnya dalam rangka diversifikasi akan makin besar peluang perluasannya, asal dapat dilakukan tepat waktu.

Saudara Gubernur dan saudara sekalian.

Khusus untuk Jawa Tengah Ramalan III BPS Tahun 1990 menunjukkan pencapaian produksi padi sebesar 7.889 juta ton gkg yang berarti meningkat sebesar 0,9% dibandingkan Tahun 1989. Lebih detail dapat saya kemukakan bahwa pada Tahun 1990 areal panen di Jawa Tengah diperkirakan menurun seluas 10.103 hektar.

Walaupun produksi padi Tahun 1990 yang dihasilkan oleh Jawa Tengah cukup menggembirakan, namun saya berkeyakinan masih dapat lebih ditingkatkan lagi melalui berbagai upaya guna menggairahkan masyarakat tani dalam perbaikan mutu intensifikasi khususnya dalam pola Supra Insus dan Insus.

Melalui perbaikan mutu intensifikasi itulah, berdasarkan Ramalan III Tahun 1990 Jawa Tengah dapat meningkatkan rata-rata hasil sebesar 0,79 Ku/Ha. Namun mengingat bahwa Supra Insus dan Insus merupakan bagian terbesar dari program intensifikasi di Jawa Tengah maka dengan perbaikan mutu pada kedua pola tersebut kita mempunyai harapan besar dalam musim-musim mendatang kenaikan rata-rata hasil perhektar dapat diupayakan lebih tinggi. Sedangkan peningkatan produksi kedelai dapat lebih ditingkatkan lagi melalui baik perluasan areal tanam melalui peningkatan intensitas



pertanaman, perluasan areal, maupun memperbaiki mutu penerapan teknologinya.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Beberapa faktor yang menghadang upaya kita di dalam meningkatkan produksi beras Tahun 1991 ini, antara lain :

- a. kondisi iklim yang kurang menguntungkan sehingga awal musim hujan MT 1990/1991 mundur 1 - 2 bulan,
- b. sebagai akibatnya maka kemungkinan terjadi kekurangan tenaga kerja pengolahan tanah, tanam dan panen karena pertanaman dan panen yang lebih serempak. Juga dikhawatirkan arus pemasok benih dan pupuk dalam jumlah yang besar akan mempengaruhi 6 tepat.
- c. dikhawatirkan terjadi peningkatan serangan hama dan penyakit pada tanaman padi pada MT 1990/1991,
- d. masih cukup besarnya tunggakan KUT yang akan berakibat pada rendahnya realisasi KUT pada MT 1990/1991,
- e. masih besarnya kelompok tani yang termasuk kelas pemula,
- f. rendahnya KUD yang layak dalam penyaluran KUT dan masih kecilnya jumlah kelompok tani yang ditunjuk sebagai TPK.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Peningkatan produksi beras pada Tahun 1991 sangat strategis artinya tidak saja dalam upaya melestarikan swasembada pangan (beras) namun juga untuk menghadapi Tahun 1992 yang diperkirakan akan mengalami siklus kering. Dengan demikian saya harapkan kita



sekalian benar-benar memperhatikan dan mengupayakan semaksimal mungkin upaya yang mengarah pada peningkatan produksi baik beras, palawija khususnya kedelai, serta komoditi lainnya.

Pergeseran iklim sekarang ini hendaknya tidak semata-mata diterima sebagai kodrat, tetapi ikhtiar kita bersama yang diringi doa misalnya menjadi tugas kita dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada.

Beberapa hal yang kiranya perlu kita perhatikan bersama guna menunjang upaya pelestarian swasembada beras adalah :

1. meningkatkan mutu pelaksanaan Supra Insus, Insus Paket D serta Insus lainnya sehingga para petani melalui kelompoknya benar-benar dapat menerapkan teknologi yang telah dianjurkan secara penuh.
2. meningkatkan luas areal tanam intensifikasi padi gogo baik yang terkait dengan Opsus Padi Gogo pada lahan usahatani konservasi maupun pada lahan kering lainnya yang biasa ditanami padi, dengan mengupayakan tersedianya benih yang bermutu dan penyediaan sarana produksi lainnya.
3. meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan peningkatan serangan berbagai jasad pengganggu maupun terjadinya gangguan alam.
4. meningkatkan gerakan perbaikan penanganan pasca panen, terutama pada fase panen dan fase perontokan yang tingkat kehilangan hasilnya masih besar,



5. menjaga terjaminnya air pengairan serta pemakaian air pengairan secara efisien,
6. menjamin kelancaran penyaluran sarana produksi dengan memenuhi syarat 6 tepat serta kelancaran penyaluran dan pengembalian kredit.

Guna menjamin terlaksananya hal-hal yang disebutkan tadi, maka dalam kesempatan ini saya masih mengharapkan dari Saudara-saudara sekalian kegairahan untuk memacu pelaksanaannya secara terkoordinasi dan terkendali, serta menjauhkan rutinitas dalam bekerja dari seluruh aparat Satuan Pembina Bimas Propinsi, Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten, Kecamatan dan Desa dibawah kepemimpinan Saudara Gubernur, Saudara-saudara Bupati, Camat, dan Kepala Desa guna mewujudkan berbagai gerakan-gerakan berikut :

- a. meningkatkan aktivitas para aparat pelayanan sarana produksi, kredit dan penyuluhan melalui gerakan pembinaan oleh seluruh instansi yang terkait,
- b. meningkatkan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, kemampuan mengevaluasi situasi dan pemecahan masalah secara dini oleh masing-masing POSKO, terlebih Posko III tingkat Kabupaten yang mempunyai posisi strategis digaris depan,
- c. menyiapkan secara definitif kebutuhan petani dalam pelaksanaan Supra Insus, Insus Paket D serta Opsus Intensifikasi Usahatani konservasi seperti : benih berlabel, pupuk lengkap, PPC/ZPT, Pestisida, KUT, dan sebagainya,



- d. mengupayakan agar kelompok tani yang membutuhkan KUT dapat terlayani dengan sebaik-baiknya, serta pengamanan pengembaliannya,
- e. penyediaan pupuk secara tepat oleh KUD serta penunjukan kelompok tani selaku TPK dan terlayannya kebutuhan petani swadana melalui pembinaan tabungan kelompok tani.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian

Berbicara tentang peningkatan produksi kedelai maka segala daya dan upaya harus kita lakukan. Kita harus mencari peluang-peluang yang memungkinkan dalam meningkatkan produksi kedelai, seperti penyediaan benih bermutu, pengaturan pola tanam, tumpang sari antara tanaman perkebunan dengan kedelai, penggunaan mulsa dan r hizobium dan berbagai sarana lainnya yang menjamin peningkatan hasil per hektar. Kerjasama antara kelompok tani dengan pihak swasta yang bertindak sebagai perusahaan pembimbing, perlu dikembangkan seperti contoh rintisan yang terjadi di Kabupaten Subang Jawa Barat dan Bone di Sulawesi Selatan.

Di dalam hal peningkatan produksi kedelai perlu ditempuh pula mekanisme kerja koordinatif dengan memanfaatkan piranti-piranti yang sudah ada, serta tetap menganut azas konsentrasi untuk memudahkan pembinaan yang lebih intensif serta berfungsinya satuan kerja pengendalian (POSKO).

Dengan demikian kita harapkan bahwa petani/kelompok tani penanam kedelai akan mampu meningkatkan mutu intensifikasi, sehingga peningkatan produksi kedelai tidak saja diperoleh melalui



perluasan areal tanam melainkan juga peningkatan produktivitas per hektar.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian,

Walaupun kita memusatkan kembali perhatian kita pada upaya peles-tarian swasembada beras dan peningkatan produksi kedelai, namun kiranya pelaksanaan program TRI, Intek, Intab dan lainnya perlu kita upayakan secara seimbang dan serasi.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Produksi pangan adalah hasil dari sistim produksi pangan nasional, yang pada saat sudah mencapai bentuk dan formatnya yang cukup handal. Ini berarti berbagai sub sistem yang menjadi perangkat dan bagian dari sistem sudah bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam suatu tatanan dan tata hubungan kerja yang menjamin sinkronisasi dan koordinasi yang serasi. Perangkat kebijakan politik, ekonomi, teknologi, prasarana dan administrasi benar-benar telah ada dalam kondisi yang dibutuhkan dan menggerakkan para petani. Tetapi sistem ini tidak sama kehandalannya diberbagai sub sistem wilayah, karena itu kita saksikan sekarang masih terdapat variabilitas produktivitas antar wilayah yang cukup tinggi. Karena proses pemantapan pengembangan sistem ini wilayah demi wilayah sangat tergantung dari unsur manusia dan kegiatannya yang khas harus dikembangkannya sendiri setempat (karena kepemimpinan dan kualitas manusia tidak bisa didatangkan dari luar), maka pada saat ini keberhasilan program pangan tidak lagi ditentukan oleh aktivitas kepemimpinan pada



eselon kepemimpinan nasional dan propinsi, tetapi ditentukan oleh dinamika kepemimpinan dan sistem ditingkat kabupaten dibawah.

Oleh karena itu pada tempatnyalah apabila kami saat ini meminta Saudara-saudara Bupati untuk memimpin aparatur Satuan Pelaksana Bimas di daerah secara dinamis dan sistematis. Agar makin lama program itu makin ditentukan oleh sistem dan bukan oleh orang-orangnya semata-mata, kami meminta dengan sungguh-sungguh agar para Bupati memusatkan perhatian pada perkembangan organisasi dan mekanisme kerja berbagai Pos Simpul Koordinasi (POSKO A1, A2, A3, B1, B2, I, II, dan III). Maka metode Opsus kami minta agar benar-benar diamalkan sebagai normalisasi ketatalaksanaan dan kepemimpinan operasional lapangan. Pengamatan kami selama ini menunjukkan bahwa para Bupati yang selalu memantau dan sering berada di lapangan sangat besar peluangnya untuk berhasil memimpin rakyatnya berpartisipasi dalam program pangan nasional.

Demikianlah upaya-upaya yang perlu kita laksanakan sesuai dengan amanat Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, yaitu beliau berpesan agar :

- a. Swasembada beras harus dipertahankan dan dilestarikan,
- b. Produksi kedelai agar ditingkatkan baik melalui perluasan areal tanam maupun melalui peningkatan penerapan teknologi,



c. Kredit Usahatani sebagai salah satu sumber modal usahatani harus disalurkan secara intensif, demikian juga pengembaliannya sehingga tidak mengganggu penyaluran untuk musim tanam berikutnya.

Atas perhatian Saudara-saudara, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pertanian,


Ir. Wardoyo



6





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGARAHAN MENTERI PERTANIAN
PADA RAPAT KOORDINASI BIMAS PROPINSI SUMATERA UTARA
TANGGAL 9 JANUARI 1991 DI MEDAN

Saudara Gubernur,
Saudara-saudara Bupati,
Saudara-saudara Kakanwil,
Saudara-saudara Para Kepala Dinas,
Saudara-saudara Anggota Satpem Bimas,
Saudara-saudara Anggota Satpel Bimas,
dan hadirin sekalian Yth.

Assalamu'alaikum warokhmatullahi wabarakatuh.

Pada kesempatan yang jarang terjadi ini, marilah pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wataala, karena atas rahmat dan karunia Nya lah hari ini bisa berkumpul dalam pertemuan yang penting ini untuk bersama-sama melakukan evaluasi terhadap posisi kita bersama dalam mengupayakan lestarnya swasembada pangan. Kita bersyukur bahwa selama ini kita selalu mendapat berkah dan Ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga sampai saat ini kita tetap dapat mempertahankan swasembada beras yang sudah kita raih sejak tahun 1984 itu. Disamping untuk mengevaluasi posisi kita masing-masing serta posisi kita bersama, pertemuan inipun dimaksudkan sebagai suatu pertemuan untuk mengkonsolidasi segenap aparatur dan kekuatan masyarakat yang terkait dengan kiprah produksi pangan, agar segenap tantangan dan peluang tahun ini serta tahun-tahun yang

akan datang dapat selalu kita respons dengan melakukan/melaksanakan tindakan operasional yang tepat, efektif dan efisien.

Dengan iringan ucapan Selamat Tahun Baru 1991, dan Selamat Natal kepada mereka yang merayakannya, saya ingin menyampaikan beberapa informasi dan beberapa pesan dalam menyongsong tahun 1991 ini.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Swasembada pangan adalah tekad atau komitmen nasional yang terus menerus harus kita amankan dan kita jamin realisasinya dengan menggerakkan pikiran, perhatian serta segala potensi sumberdaya (manusia, alam, daya, dana) secara optimal sesuai dengan kebutuhan operasional di setiap lokasi. Pangan adalah hasil kegiatan petani, yang berada menyebar diseluruh pelosok wilayah tanah air kita yang luas dan beraneka ragam ini. Oleh karena itu program peningkatan produksi pangan, khususnya usaha pokok intensifikasi dan diversifikasi, merupakan program yang keberhasilannya ditentukan oleh tekad, semangat, kegairahan dan kemampuan petani diseluruh wilayah pedesaan.

Pengalaman kita selama ini menunjukkan bahwa tekad, semangat, gairah, dan kemampuan petani untuk berpartisipasi dalam gerakan peningkatan produksi pangan dengan menerapkan Sapta Usaha adalah refleksi dari tekad, semangat, gairah, dan kemampuan aparatur pengaturan, pelayanan, pembinaan dan kepemimpinan yang digelar di pedesaan dibawah pembinaan jajaran instansi pemerintah maupun badan usaha yang simpul-simpul koordinasinya berada diberbagai tingkat administrasi pemerintahan.



Sehubungan dengan kenyataan itu, maka sebagai pesan inti untuk pertemuan ini saya ingin sekali lagi menyampaikan dan menyegarkan pesan yang selalu ditekankan oleh Bapak Presiden kepada kita sekalian, ialah agar kita tidak dan jangan bersikap rutin dalam menanggapi berbagai gejala hambatan, gangguan dan kendala yang dapat mengurangi peluang keberhasilan kita ^{dalam} melestarikan swasembada pangan. Karena secara operasional tolak ukur dari pelestarian swasembada pangan itu adalah tercapainya sasaran produksi musiman dan tahunan (baik areal tanam/panennya maupun hasil perhektarnya), pesan Bapak Presiden itu berarti bahwa kita harus selalu mencari dan menemukan jalan dan langkah, kiat atau jurus yang tepat untuk memecahkan segala masalah yang dihadapi di lapangan. Kita tidak bisa bersikap rutin apalagi berpuas diri, karena setiap masalah yang tidak terpecahkan akan merupakan ancaman potensial yang berbahaya bagi kelestarian swasembada pangan.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Bertolak dari sikap dinamik yang saya percaya kita miliki, maka segala gejala rutinitas yang selama ini masih sering kita jumpai perlu benar-benar kita waspadai agar jangan sampai menjadi penyakit kronis yang membuat masyarakat kita statik. Dan gejala statik ini secara nalar sederhana tercermin dari rendahnya laju peningkatan produksi beras kita pada tahun yang lalu, yang menurut Ramalan III hanya naik 0,54% dibanding tahun 1989. Oleh karena itu kami benar-benar prihatin dan ^{ke}percaya diri serta



optimisme kami menjadi goyah, khawatir kalau-kalau penyakit rutinitas yang membuat statik itu benar-benar sudah mulai melanda pribadi kita. Maka melalui pertemuan ini saya ingin berbagi rasa dan berbagi tanggung jawab dengan saudara-saudara sekalian dan saya akan sangat berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa apabila setelah dari pertemuan ini apa yang saya khawatirkan itu ternyata tidak benar. Saya ingin agar kita semua sekembalinya dari pertemuan ini benar-benar mempunyai kondisi mental dinamik yang bebas dari penyakit rutinitas.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Gejala menguatnya rutinitas yang mengakibatkan perkembangan statik dan melemahnya sikap dinamik kreatif yang tahun-tahun sebelumnya telah berhasil kita gelarkan, merupakan kondisi awal yang harus segera kita koreksi kalau kita memang bertekad untuk melestarikan swasembada pangan. Menghadapi tugas tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang sebagaimana sudah dicantumkan dalam Buku Repelita V, yang khusus untuk kedelai ditambah lagi dengan sasaran khusus percepatan peningkatan produksi kedelai, karena impornya terus meningkat, kita benar-benar dihadapkan dengan misi yang berat dan pelik. Secara kuantitatif dan kualitatif sasaran yang harus kita capai Tahun 1991 ini, hanya mungkin dapat kita capai apabila kita mampu memanfaatkan peluang yang sempit MT 1990/1991 ini dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya dan MT 1991 yang berhasil kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin dengan sasaran ganda (padi dan kedelai) yang kita utamakan.



Sebagai sudah kita ketahui dan kita alami bersama, MT 1990/1991 ini hujannya terlambat 1 - 2 bulan. Ini berarti bahwa kita tidak ^{bisa} mengharapkan produksi dari tambahan areal (karena kemungkinan besar malahan areal panennya akan lebih kecil dari tahun yang lalu dan dari sasaran). Peningkatan produksi padi MT 1990/1991 hanya mungkin ^{kita capai} lebih cepat dari peningkatan mutu intensifikasi yang akan memberikan hasil perhektar yang lebih tinggi. Ini berarti tambahan produksi itu harus kita capai dari peningkatan mutu intensifikasi di daerah Supra Insus, Insus paket D, dan perluas Insus paket C.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Untuk bahan penjabaran rencana operasional yang dapat memanfaatkan sumberdaya lahan dan iklim secara optimal dalam tahun 1991 ini pada kesempatan ini saya sampaikan informasi yang kita dapat dari BMG tentang perkiraan sifat hujan diberbagai wilayah Indonesia dalam MT 1990/1991 dan MT 1991 yang akan datang. Dari informasi itu dapat kita simpulkan bahwa pada umumnya curah hujan itu secara kualitatif dan kuantitatif kondisinya lebih kurang menguntungkan (^{kemungkinan} ~~perkiraan~~ lebih kering, lebih panjang) dibandingkan dengan tahun 1989 dan tahun 1990 yang lalu. Ditinjau dari sudut inipun maka jawaban yang harus kita tampilkan sebagai respons terhadap kondisi lingkungan iklim yang kurang menggembirakan itu adalah ilmu dan teknologi tepat guna, yaitu penerapan sapta usaha secara penuh dan disiplin. Sekali lagi peluang bagi padi dari segi areal makin terbatas, tetapi bagi



kedelai dan tanaman palawija lainnya dalam rangka diversifikasi akan makin besar peluang perluasannya, asal dapat dilakukan tepat waktu.

Saudara Gubernur dan saudara sekalian.

Propinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan program pangan produksi beras Tahun 1990 berdasarkan angka ramalan III Biro Pusat Statistik berhasil ditingkatkan sebesar 522 ton atau 0,02% dibanding dengan produksi tahun 1989. Secara Nasional kenaikan produksi padi hanya mencapai 241.071 ton atau 0,54%.

Namun sasaran produksi Sumatera Utara tahun 1990 menurut SK Menteri Pertanian sebesar 2,795 juta ton, sedangkan produksi yang dicapai sebesar 2,541 juta ton (91,0%). Keadaan ini terutama disebabkan karena mutu pelaksanaan intensifikasi belum sesuai seperti yang diharapkan.

Dalam upaya untuk tetap melestarikan swasembada beras yang sekaligus upaya untuk berswasembada pangan pada tahun 1991 ini, kelihatannya tugas kita semakin berat.

Beberapa faktor yang menghadang upaya kita didalam meningkatkan produksi pangan khususnya beras pada tahun 1991 ini antara lain adalah :

1. Keadaan iklim yang kurang menguntungkan, karena terjadi pergeseran waktu tanam pada MT 1990/1991 selama 1 - 2 bulan. Menurut BMG, curah hujan di Sumatera Utara dibagian Timur dibawah normal.
2. Fasilitas KUT yang disediakan Pemerintah untuk mendukung petani tidak dapat dimanfaatkan karena KUD yang tidak memenuhi



persyaratan penyaluran KUT. Demikian pula peran KUD sebagai penyalur/pengecer pupuk dimana kelompok tani belum ditetapkan sebagai TPK.

Menghadapi keadaan demikian jelaslah tidak dapat diatasi secara rutin saja, tetapi memerlukan tindakan pemecahan yang lebih konkrit. Jika perlu dengan tindakan terobosan untuk menjamin terwujudnya penerapan teknologi, sekaligus produktivitas. Untuk mengoperasionalkannya peran Posko disemua tingkat penting artinya sehingga setiap masalah yang timbul dapat dipecahkan secara dini selagi masalahnya belum terlalu berat.

Pelaksanaan program intensifikasi yang memerlukan kesempurnaan dan pengamalan teknologi produksi dengan tepat hanya mungkin dilaksanakan dengan sempurna bila unsur-unsur pelayanan (delivery system) dan unsur-unsur penerima (receiving system) dapat berfungsi secara baik.

Tugas utama Satuan Pembina Bimas dan Satuan Pelaksana Bimas adalah untuk menggerakkan unsur-unsur pelayanan. Pembinaan KUD bertujuan agar KUD mampu mengamalkan kerjasama yang melembaga dengan kelompok tani dan mampu memanfaatkan peluang kemudahan-kemudahan ekonomi yang disediakan Pemerintah maupun Swasta dalam bentuk KUT atau kredit lainnya, sarana produksi pertanian dan pemasaran hasil untuk kepentingan masyarakat petani. Meskipun tantangan demi tantangan akan kita hadapi, namun kita harus tetap dapat mempertahankan swasembada beras pada tahun 1991 ini yang akan ditentukan oleh pelaksanaan intensifikasi MT 1990/1991 dan MT 1991 mendatang. Mempertahankan swasembada beras berarti



mempertahankan stabilitas Nasional untuk menghadapi Pemilu 1992.

Oleh karena itu kita harus bekerja lebih keras lagi dibandingkan dengan tahun yang lalu. Pola kerja yang selama ini telah terbina dengan menerapkan pola Opsus, sudah mulai mengendor lagi kearah rutin. Kita membutuhkan upaya-upaya terobosan untuk mengatasi permasalahan yang semakin berat. Kegiatan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompoktani dan KUD sebagai "Pelaku Utama Pembangunan", harus selalu didukung dan dipantau secara cermat oleh Bupati KDH Tingkat II selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten dengan dukungan Sekretariat Satuan Pelaksana Bimas, sehingga Bupati/Ketua Satuan Pelaksana Bimas selalu memperoleh informasi yang aktual untuk dapat melaksanakan tindakan korektif secara dini. Ditingkat petani, pembinaan kelompoktani dalam melaksanakan kegiatan musyawarah untuk menetapkan dan menyusun RDK/RDKK yang digerakkan oleh Kepala Desa serta perangkat teknis dalam Satuan Pelaksana Bimas di tingkat desa.

Dari laporan-laporan yang saya terima khususnya dalam pelaksanaan Supra Insus, masalah yang selalu dihadapi adalah penyaluran sarana produksi yang terlambat, penyaluran KUT tidak dapat direalisir oleh KUD karena tunggakan kredit oleh KUD maupun oleh petani, Posko-posko yang tidak atau belum berfungsi dan penyuluhan yang semakin kurang dalam upaya membina kelompoktani.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian,

Untuk itulah saya utus para eselon I dari Badan Pengendali Bimas untuk mengadakan rapat Koordinasi secara lengkap bersama-sama dengan Saudara-saudara sehingga melalui rapat ini akan dapat



disimpulkan suatu pola kerja dalam mengatasi permasalahan-permasalahan secara lokal spesifik.

Berdasarkan data keragaan di Sumatera Utara perkembangan produksi tanaman padi perlu mendapat perhatian secara khusus. Produktivitas rata-rata propinsi dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1990 cenderung menurun. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kurangnya mutu intensifikasi bila dibandingkan dengan rata-rata Nasional.

Untuk komoditi jagung, produktivitas berada diatas rata-rata produktivitas Nasional, tetapi untuk kedelai pada dua tahun terakhir mulai menurun.

Gambaran pelaksanaan intensifikasi untuk komoditi padi, jagung dan kedelai MT 1990 dan MT 1990/1991 (keadaan minggu kedua bulan Desember 1990) adalah sebagai berikut :

Realisasi Tanam Intensifikasi Padi, Jagung dan Kedelai
MT 1990 dan MT 1990/1991 di Sumatera Utara

U r a i a n	MT 1990			MT 1990/1991		
	Target (Ha)	Reals (Ha)	%	Target (Ha)	Reals (Ha)	%
1. Padi (Total)						
- Supra Insus	92.130	113.122	123	112.500	58.493	52
- I n s u s	116.050	86.528	75	151.860	61.708	25
- I n m u m	48.760	37.137	50	69.060	2.370	3
2. Jagung (Total)						
- I n s u s	45.270	40.109	87	43.000	15.759	37
- I n m u m	15.780	22.727	144	10.570	8.647	82
3. Kedelai (Total)						
- I n s u s	27.000	20.704	77	16.000	2.547	16
- I n m u m	8.000	7.098	89	7.060	490	7



Realisasi pelaksanaan intensifikasi komoditi padi Supra Insus MT 1990 mencapai 123% dari target areal yang telah ditetapkan dalam SK Mentan Tahun 1990/1991.

Sedangkan untuk pelaksanaan Insus dan Inmum berada dibawah target yang telah ditetapkan.

Demikian juga untuk komoditi jagung dan kedelai pelaksanaannya dibawah target yang telah ditetapkan kecuali untuk Insus Jagung pada MT 1990.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Produksi pangan adalah hasil dari sistem produksi pangan Nasional, yang pada saatⁱⁿⁱ sudah mencapai bentuk dan formatnya yang cukup handal. Ini berarti berbagai sub sistem sudah bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam suatu tatanan dan tata hubungan kerja yang menjamin sinkronisasi dan koordinasi yang serasi. Perangkat kebijakan politik, ekonomi, teknologi, prasarana dan administrasi benar-benar telah ada dalam kondisi yang dibutuhkan dan menggerakkan para petani. Tetapi sistem ini tidak ~~sama~~ kehandalannya diberbagai sub sistem wilayah, karena itu kita saksikan sekarang masih terdapat variabilitas produktivitas antara wilayah yang cukup tinggi. Karena proses pemantapan pengembangan sistem ini wilayah demi wilayah sangat tergantung dari unsur manusia dan kegiatannya yang khas harus dikembangkannya sendiri setempat (karena kepemimpinan dari kualitas manusia tidak bisa didatangkan dari luar), maka pada saat ini keberhasilan program pangan tidak lagi ditentukan oleh aktivitas kepemimpinan pada eselon kepemimpinan nasional dan



propinsi, tetapi ditentukan oleh dinamika kepemimpinan dan sistem ditingkat kabupaten kebawah.

Oleh karena itu pada tempatnyalah apabila kami^{meminta} saat ini meminta Saudara-saudara Bupati untuk memimpin aparatur Satuan Pelaksana Bimas di daerah secara dinamik dan sistimatik. Agar makin lama keberhasilan program itu makin ditentukan oleh sistem dan ~~kemampuan~~^{dukun oleh} orang-orangnya,^{suata-mata} kami meminta dengan sungguh-sungguh agar para Bupati memusatkan perhatian kepada perkembangan organisasi dan mekanisme kerja berbagai Pos Simpul Koordinasi (Posko A1, A2, A3, B1, B2, I, II, dan III). Maka metode Opsus kami minta agar benar-benar diamalkan sebagai normalisasi ketatalaksanaan dan kepemimpinan operasional lapangan. Pengamatan kami selama ini menunjukkan bahwa para Bupati yang selalu memantau dan sering berada di lapangan sangat besar peluangnya untuk berhasil memimpin rakyatnya berpartisipasi dalam program pangan Nasional.

Demikian upaya-upaya yang perlu kita laksanakan sesuai dengan amanat Bapak Presiden bebarapa waktu yang lalu, yaitu beliau berpesan agar :

- a. Swasembada beras harus dipertahankan dan dilestarikan,
- b. Produksi kedelai agar ditingkatkan baik melalui perluasan areal tanam maupun melalui peningkatan penerapan teknologi,



- c. Kredit Usahatani sebagai salah satu sumber modal usahatani harus disalurkan secara intensif, demikian juga pengembaliannya sehingga tidak mengganggu penyaluran untuk musim tanam berikutnya.

Atas perhatian Saudara-saudara, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pertanian,


Ir. Wardoyo



7





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGARAHAN MENTERI PERTANIAN
PADA RAPAT KOORDINASI BIMAS PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
TANGGAL 10 JANUARI 1991 DI BANJARMASIN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saudara Gubernur.

Saudara-saudara Bupati.

Saudara-saudara para Kakanwil.

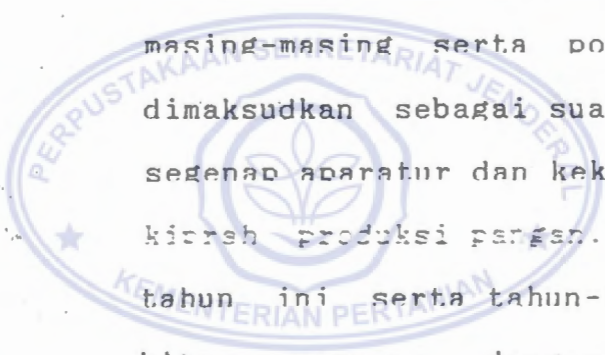
Saudara-saudara para Kepala Dinas.

Saudara-saudara anggota Satdem Bimas.

Saudara-saudara anggota Salpel Bimas.

dan Hadirin sekalian Yth.

Pada kesempatan yang ini, marilah pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas rahmat dan karuniaNya lah hari ini kita bisa berkumpul dalam pertemuan yang penting ini untuk bersama-sama melakukan evaluasi terhadap posisi kita bersama dalam mengupayakan lestarnya swasembada pangan. Kita bersyukur bahwa selama ini kita selalu mendapat berkah dan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga sampai saat ini kita tetap dapat mempertahankan swasembada beras yang sudah kita raih sejak tahun 1984 itu. Disamping untuk mengevaluasi posisi kita masing-masing serta posisi kita bersama, pertemuan inipun dimaksudkan sebagai suatu pertemuan untuk mengkonsolidasi segenap aparatur dan kekuatan masyarakat yang terkait dengan kisrah produksi pangan, agar segenap tantangan dan peluang tahun ini serta tahun-tahun yang akan datang dapat selalu kita respons dengan melakukan/melaksanakan tindakan

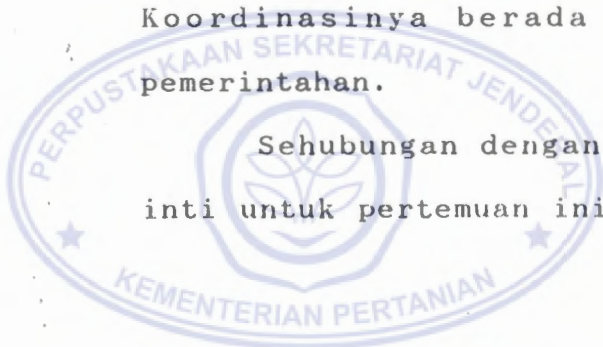


Dengan iringan ucapan Selamat Tahun Baru 1991, dan Selamat Natal kepada mereka yang merayakannya, saya ingin menyampaikan beberapa informasi dan beberapa pesan dalam menyongsong tahun 1991 ini.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Swasembada pangan adalah tekad atau komitmen nasional yang terus menerus harus kita amankan dan kita jamin realisasinya dengan mengerahkan pikiran, perhatian serta segala potensi sumberdaya (manusia, alam, daya, dana) secara optimal sesuai dengan kebutuhan operasional di setiap lokasi. Pangan adalah hasil kegiatan petani, yang berada menyebar di seluruh pelosok wilayah tanah air kita yang luas dan beraneka ragam ini. Oleh karena itu program peningkatan produksi pangan, khususnya usaha pokok intensifikasi dan diversifikasi merupakan program yang keberhasilannya ditentukan oleh tekad, semangat, kegairahan dan kemampuan petani diseluruh wilayah pedesaan. Pengalaman kita selama ini menunjukkan bahwa tekad, semangat, gairah dan kemampuan petani untuk berpartisipasi dalam gerakan peningkatan produksi pangan dengan menerapkan Sapta Usaha adalah refleksi dari tekad, semangat, gairah dan kemampuan aparatur pengaturan, pelayanan, pembinaan dan kepemimpinan yang digelar dipedesaan dibawah pembinaan jajaran instansi pemerintah maupun Badan Usaha yang Simpul-simpul Koordinasinya berada diberbagai tingkat administrasi pemerintahan.

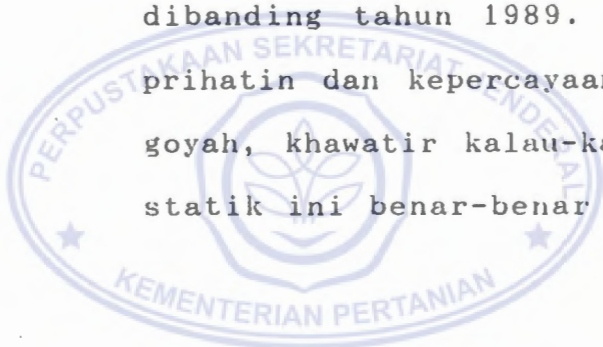
Sehubungan dengan kenyataan itu, maka sebagai pesan inti untuk pertemuan ini saya ingin sekali lagi menyampaikan



dan menyegarkan pesan yang selalu ditekankan oleh Bapak Presiden kepada kita sekalian, ialah agar kita tidak dan jangan bersikap rutin dalam menanggapi berbagai gejala, hambatan, gangguan dan kendala yang dapat mengurangi peluang keberhasilan kita melestarikan swasembada pangan. Karena secara operasional tolok ukur dari pelestarian swasembada pangan itu adalah tercapainya sasaran produksi musiman dan tahunan (baik areal tanam/panennya maupun hasil per hektarnya), pesan Presiden itu berarti bahwa kita harus mencari dan menemukan jalan dan langkah, kiat atau jurus yang tepat untuk memecahkan segala masalah yang dihadapi dilapangan. Kita tidak bisa bersikap rutin apalagi berpuas diri, karena setiap masalah yang tidak terpecahkan merupakan ancaman potensial yang berbahaya bagi kelestarian swasembada pangan.

Saudara Gubernur dan saudara-saudarâ sekalian.

Bertolak dari sikap dinamik, yang saya percaya kita miliki, maka segala gejala rutinitas yang selama ini masih sering kita jumpai perlu benar-benar kita waspadai jangan sampai menjadi penyakit kronis yang membuat masyarakat kita statik. Dan gejala statik ini secara nalar sederhana tercermin dari rendahnya laju peningkatan produksi beras pada tahun yang lalu, yang menurut Ramalan III hanya naik 0,54 % dibanding tahun 1989. Oleh karena itu kami benar-benar prihatin dan kepercayaan diri serta optimisme kami menjadi goyah, khawatir kalau-kalau penyakit rutinitas yang membuat statik ini benar-benar sudah mulai melanda pribadi kita.

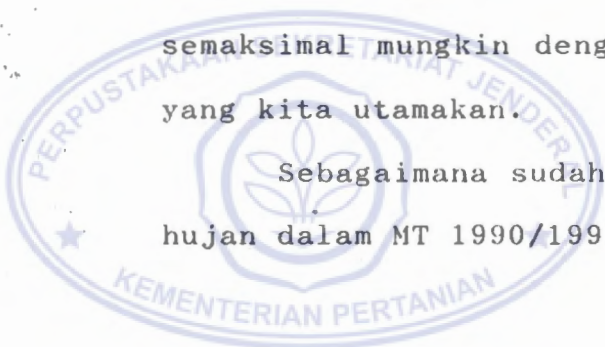


Malahan melalui pertemuan ini saya ingin berbagi rasa dan berbagi tanggung jawab dengan saudara-saudara sekalian dan saya akan sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa apabila setelah dari pertemuan ini apa yang saya khawatirkan itu ternyata tidak benar. Saya ingin agar kita semua sekembalinya dari pertemuan ini benar-benar mempunyai kondisi mental dinamik yang bebas dari penyakit rutinitas.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Gejala menguatnya rutinitas yang mengakibatkan perkembangan statik dan melemahnya sikap dinamik kreatif yang tahun-tahun sebelumnya telah berhasil kita gelarkan, merupakan kondisi awal yang harus segera kita koreksi kalau kita memang bertekad untuk melestarikan swasembada pangan. Menghadapi tugas tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang sebagaimana sudah dicantumkan dalam buku Repelita V, yang khusus untuk kedelai ditambah lagi dengan sasaran khusus percepatan peningkatan produksi kedelai karena importnya terus meningkat, kita benar-benar dihadapkan dengan misi yang berat dan pelik. Secara kuantitatif dan kualitatif sasaran yang harus kita capai tahun 1991 ini hanya mungkin dapat kita capai apabila kita mampu memanfaatkan peluang yang sempit MT 1990/1991 ini dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya dan MT. 1991 berhasil memanfaatkan dengan semaksimal mungkin dengan sasaran ganda (padi dan kedelai) yang kita utamakan.

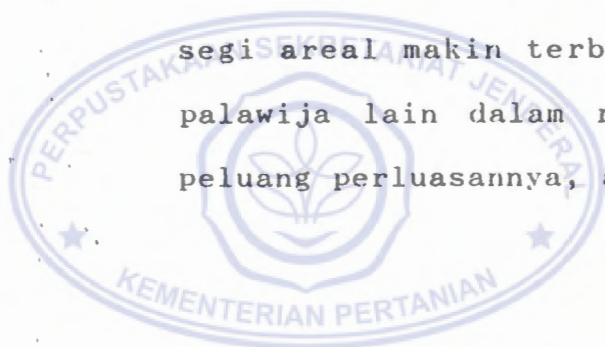
Sebagaimana sudah kita ketahui dan kita alami bersama, hujan dalam MT 1990/1991 ini datangnya terlambat 1 - 2 bulan.



Ini berarti bahwa kita tidak bisa mengharapkan produksi dari tambahan areal (karena kemungkinan besar malah areal panennya akan lebih kecil dari tahun yang lalu dan dari sasaran). Peningkatan produksi padi MT 1990/1991 hanya mungkin kita capai dari peningkatan mutu intensifikasi yang akan memberikan hasil per hektar yang lebih tinggi. Ini berarti tambahan produksi padi itu harus kita capai dari peningkatan mutu intensifikasi pada hamparan Supra Insus, Insus paket D dan perluasan Insus paket C.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Untuk bahan penjabaran rencana operasional yang dapat memanfaatkan sumber daya lahan dan iklim secara optimal dalam tahun 1991 ini pada kesempatan ini saya sampaikan informasi yang kita dapat dari BMG tentang perkiraan sifat hujan diberbagai wilayah Indonesia dalam MT 1990/1991 dan Mt 1991 yang akan datang. Dari informasi itu dapat kita simpulkan bahwa pada umumnya curah hujan itu secara kualitatif dan kuantitatif kondisinya kurang menguntungkan (kemarau lebih kering, lebih panjang) dibandingkan dengan tahun 1989 dan tahun 1990 yang lalu. Ditinjau dari sudut inipun maka jawaban yang harus kita tampilkan sebagai respons terhadap kondisi lingkungan dan iklim yang kurang menggembirakan itu adalah ilmu dan teknologi tepat guna, yaitu penerapan Sapta Usaha secara penuh dan disiplin. Sekali lagi peluang bagi padi dari segi areal makin terbatas, tapi bagi kedelai dan tanaman palawija lain dalam rangka diversifikasi akan makin besar peluang perluasannya, asal dapat dilakukan tepat waktu.



Saudara-Gubernur dan Saudara-saudara sekalian;

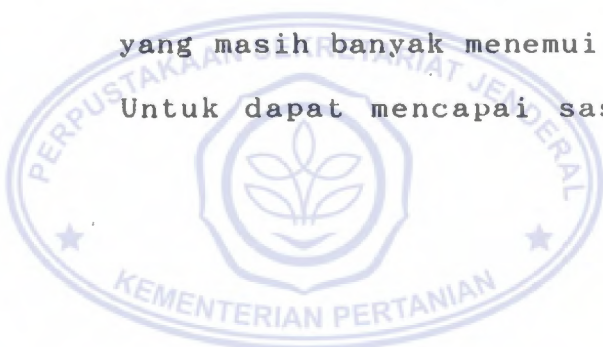
Gambaran produksi padi di Propinsi Kalimantan Selatan memperlihatkan bahwa secara umum telah mengalami peningkatan. Produksi padi tahun 1990 berdasarkan angka ramalan III Biro Pusat Statistik telah meningkat sebesar 50.062 ton GKG atau 5,4 %, bila dibandingkan dengan produksi tahun 1989.

Meskipun Propinsi Kalimantan Selatan pada tahun 1990 telah berhasil meningkatkan produksi padi sebesar 0,54 %, namun secara Nasional memperlihatkan bahwa produksi padi yang dicapai pada tahun 1990 seperti yang disinggung sebelumnya kenaikannya hanya mencapai 241.070 ton atau 0.5 % bila dibandingkan dengan produksi yang pernah dicapai pada tahun 1989.

Selanjutnya bila dibandingkan dengan sasaran produksi padi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian tahun 1990 sebesar 45.362 juta ton GKG, maka produksi padi yang telah dicapai pada tahun 1990 adalah 0,395 juta ton GKG dibawah sasaran SK.Menteri Pertanian tahun 1990. Situasi yang terjadi seperti ini akan membawa akibat menurunnya cadangan pangan Nasional pada tahun 1991.

Sesuai dengan isi pengarahan kami ini maka dalam upaya melestarikan swasembada beras, sekaligus berupaya untuk swasembada pangan pada tahun 1991 ini, nampaknya kita dihadapkan kepada tugas-tugas yang semakin berat. Hal ini terlihat pada pelaksanaan program intensifikasi MT.1990/1991 yang masih banyak menemui masalah-masalah.

Untuk dapat mencapai sasaran produksi tahun 1991 termasuk



kontribusi propinsi Kalimantan Selatan akan sangat ditentukan oleh keberhasilan pencapaian produksi MT.1990/1991 (pertanaman periode Oktober 1990 sampai dengan periode Maret 1991) dan produksi MT.1991 (pertanaman periode April 1991 sampai dengan September 1991).

Beberapa faktor yang menjadi permasalahan yang kami amati di Propinsi Kalimantan Selatan dalam upaya meningkatkan produksi beras pada tahun 1991 ini dapat diinventarisir sebagai berikut:

1. Keadaan iklim sama dengan propinsi lain yang kurang menguntungkan sehingga bergeser mundurnya waktu tanam MT.1990/1991 sampai 1 - 2 bulan.

Data realisasi tanam padi MT.1990/1991 di Propinsi Kalimantan Selatan pada bulan Nopember 1990 bila dibandingkan dengan MT.1988/1989 dan MT.1989/1990 memperlihatkan angka yang masih rendah yaitu : MT.1988/1989 seluas 73.937 Ha, MT. 1989/1990 seluas 16.927 Ha dan MT. 1990/1991 seluas 13.540 Ha. Seandainya data bulan desember sudah masuk, diharapkan angka realisaasi MT 1990/1991 dapat lebih meningkat lagi.

Akibat keadaan iklim yang kurang normal ini, dikhawatirkan akan meningkatnya hama dan penyakit tanaman padi pada MT.1990/1991.

2. Besarnya tunggakan KUT yang terjadi pada MT. sebelumnya sehingga menyebabkan rendahnya realisasi KUT pada MT. 1990/1991.



3. Besarnya jumlah kelompok tani pelaksana program intensifikasi yang berstatus Pemula. Di Propinsi Kalimantan Selatan tercatat sebagai berikut: Pemula 2.838(48,69%), Lanjut 2.603(44,66%), Madya 371(6,36%) dan Utama 17 kelompok tani. Kondisi seperti ini akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan mutu intensifikasi.
4. Jumlah KUD yang ditunjuk sebagai penyalur sarana produksi masih kecil, selain itu jumlah TPK masih sangat terbatas.
5. Mutu pelaksanaan Supra Insus dan Insus Paket D yang masih rendah antara lain tingkat penggunaan pupuk, penggunaan benih bermutu/berlabel.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian;

Berdasarkan permasalahan yang kita hadapi seperti diungkapkan diatas, maka jelas apabila tidak kita lakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi pada saat sekarang ini akan sangat mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran produksi tahun 1991 seperti yang telah ditetapkan dalam SK.Mentan.

Upaya pencapaian sasaran produksi komoditi prioritas baik padi maupun lainnya pada pokoknya akan dititik beratkan pada usaha-usaha sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu Supra Insus, yaitu dengan mengupayakan agar seluruh kelas petani pelaksana Supra Insus menerapkan 10 unsur teknologi, sehingga target produksi 9 ton GKP per hektar dapat dicapai.
2. Peningkatan mutu Insus Paket D, yaitu mengupayakan agar seluruh kelompok tani peserta Insus menerapkan 7 unsur paket teknologi secara penuh.



3. Peningkatan kampanye dan penerapan secara meluas tentang program intensifikasi (Supra Insus, Insus Paket D, intensifikasi jagung, kedelai, Intab, Intek, TRI), agar seluruh masyarakat mengetahui dan sadar melaksanakannya.
4. Meningkatkan luas areal tanam padi gogo pada lahan kering lainnya, atau peningkatan luas areal padi dengan basis ekologi pasang surut, lebak dll.
5. Meningkatkan luas tanaman, peningkatan indeks pertanaman (IP) kedelai dilahan kering dan peningkatan produktivitas.

Untuk dapat melaksanakan usaha-usaha tersebut kita perlu menjaga dan selalu memotivasi kerja yang optimal dari seluruh aparat Satuan Pembina Bimas Propinsi dan Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang secara bersama dan konsisten mewujudkan gerakan-gerakan berikut :

1. Meningkatkan aktivitas kerja para aparat pelayanan sarana produksi, kredit dan penyuluhan dengan cara Waskat oleh Saudara Gubernur, Bupati, Instansi-instansi anggota Bimas kepada petugas/bawahannya.
2. Meningkatkan pengertian penyelenggaraan Supra Insus seperti pedoman yang sudah ada bagi seluruh aparat pelaksana, sehingga terdapat kesatuan persepsi yang sama.
3. Meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian oleh masing-masing POSKO secara kontinyu setiap 2 minggu sekali.
4. Menyiapkan kebutuhan petani dalam pelaksanaan Supra Insus

dan Insus Paket D :

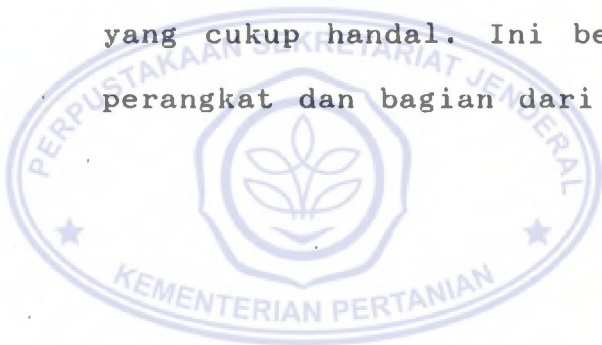
- a) benih berlabel



- b) pupuk lengkap dan berimbang (Urea, TSP, KCl dan ZA)
 - c) penyediaan PPC/ZPT
 - d) penyediaan pestisida dan herbisida
 - e) meningkatkan gerakan tabungan kelompok melalui Simpedes, agar setiap petani mempunyai tabungan minimal Rp.200.000,- /ha.
5. Meningkatkan kelas kelompok tani secara terencana dan terkoordinasi agar tercapai peningkatan mutu intensifikasi secara luas.
 6. Meningkatkan pembinaan KUD secara terencana dan terkoordinasi, agar dapat berperan dalam melayani keperluan program intensifikasi.
 7. Menyediakan keperluan pupuk secara terencana oleh KUD dan memberikan kemudahan bagi petani swadana agar dapat membeli pupuk dengan jumlah dan dosis sesuai dengan anjuran.
 8. Memberikan motivasi, berupa penghargaan bagi aparat yang berprestasi didalam kegiatan Bimas seperti KUD, Penyuluh, Petugas BRI dan lain-lain di Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi, serta melaksanakan perlombaan antar kelompok tani dalam melaksanakan Insus, Supra Insus dan tanaman padi gogo dengan memberikan hadiah yang menarik.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian

Produksi pangan adalah hasil dari sistem produksi pangan nasional, yang pada saat telah mencapai bentuk dan formatnya yang cukup handal. Ini berarti berbagai subsistem yang menjadi perangkat dan bagian dari sistem sudah berkerja sesuai dengan



fungsinya masing-masing dalam suatu tatanan dan tata hubungan kerja yang menjamin sinkronisasi dan koordinasi yang serasi. Perangkat kebijakan politik, ekonomi, teknologi, prasarana dan administrasi benar-benar telah ada dalam kondisi yang dibutuhkan dan menggerakkan para petani. Tetapi sistem ini tidak sama kehandalannya di berbagai subsistem wilayah, karena itu kita saksikan sekarang masih terdapat variabilitas produktivitas antar wilayah yang cukup tinggi. Karena proses pemantapan pengembangan sistem ini wilayah demi wilayah sangat tergantung dari manusia dan kegiatannya yang khas harus dikembangkan sendiri setempat (karena kepemimpinan dan kualitas manusia tidak bisa didatangkan dari luar), maka pada saat ini keberhasilan program pangan tidak lagi ditentukan oleh aktivitas kepemimpinan pada eselon kepemimpinan nasional dan propinsi, tetapi ditentukan oleh dinamika kepemimpinan dan sistem ditingkat kabupaten ke bawah.

Oleh karena itu pada tempatnyalah, apabila kami saat ini meminta saudara-saudara Bupati untuk memimpin Satuan Pelaksana Bimas di daerah secara dinamik dan sistematik. Agar makin lama keberhasilan program itu makin ditentukan oleh sistem dan bukan oleh orang-orangnya semata-mata, kami meminta dengan sungguh-sungguh agar para Bupati memusatkan perhatian kepada perkembangan organisasi dan mekanisme kerja berbagai pos simpul koordinatif (Posko A1, A2, A3, B1, B2, I, II dan III). Maka metode Opsus diminta agar benar-benar diamalkan sebagai normalisasi ketatalaksanaan dan kepemimpinan operasional



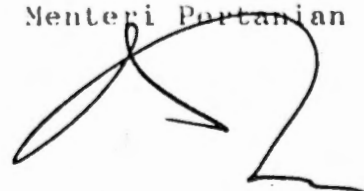
lapangan. Pengamatan kami selama ini menunjukan bahwa Bupati yang selalu memantau dan sering berada dilapangan sangat besar peluangnya untuk berhasil memimpin rakyatnya berpartisipasi dalam program pangan Nasional.

Demikianlah upaya-upaya yang perlu kita laksanakan sesuai dengan amanat Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, yaitu Beliau berpesan agar :

- a. Swasembada beras harus dipertahankan dan dilestarikan
- b. Produksi kedelai agar ditingkatkan melalui perluasan areal tanam dan peningkatan penerapan teknologi.
- c. Kredit Usahatani sebagai modal usahatani bagi petani harus disalurkan secara berdaya guna dan berhasil guna, demikian juga pengembaliannya sehingga tidak mengganggu penyaluran untuk musim tanam berikutnya.

Atas perhatian Saudara-Saudara kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Menteri Pertanian



Ir. Wardoyo



8





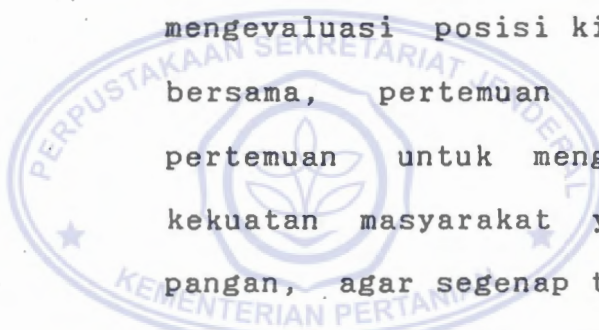
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGARAHAN MENTERI PERTANIAN
PADA RAPAT KOORDINASI BIMAS PROPINSI JAWA TIMUR
TANGGAL 10 JANUARI 1991 DI SURABAYA

Saudara Gubernur,
Saudara - Saudara Bupati,
Saudara - Saudara Para Kakanwil,
Saudara - Saudara Para Kepala Dinas,
Saudara- Saudara anggota Satpem Bimas,
Saudara - Saudara anggota Satpel Bimas
dan hadirin sekalian Yth.

Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakhatuh

Pada kesempatan ~~yang jarang terjadi~~ ini, marilah pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wataala, karena atas rahmat dan karunia-NYA lah hari ini kita bisa berkumpul dalam pertemuan yang penting ini untuk bersama-sama melakukan evaluasi terhadap posisi kita bersama dalam mengupayakan lestarnya swasembada pangan. Kita bersyukur bahwa selama ini kita selalu mendapat berkah dan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga sampai saat ini kita tetap dapat mempertahankan swasembada beras yang sudah kita raih sejak tahun 1984 itu. Disamping untuk mengevaluasi posisi kita masing-masing serta posisi kita bersama, pertemuan inipun dimaksudkan sebagai suatu pertemuan untuk mengkonsolidasi segenap aparatur dan kekuatan masyarakat yang terkait dengan kiprah produksi pangan, agar segenap tantangan dan peluang tahun ini serta tahun-tahun yang akan datang dapat selalu kita respons



Dengan iringan ucapan Selamat Tahun Baru 1991 dan Selamat Natal kepada mereka yang merayakan, saya ingin menyampaikan beberapa informasi dan beberapa pesan dalam menyongsong tahun 1991 ini.

Saudara Gubernur dan Saudara - Saudara sekalian.

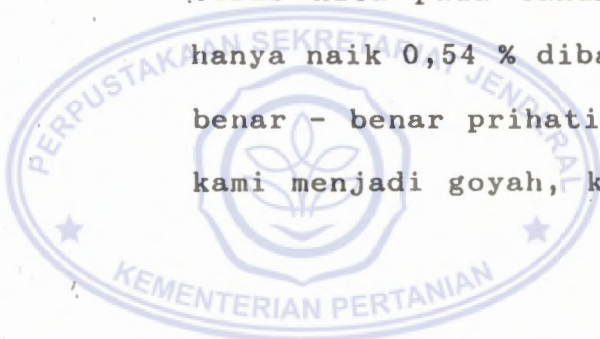
Swasembada pangan adalah tekad atau komitmen nasional yang terus-menerus harus kita amankan dan kita jamin realisasinya dengan mengerahkan pikiran, perhatian serta segala potensi sumber daya (manusia, alam, daya, dana) secara optimal sesuai dengan kebutuhan operasional di setiap lokasi. Pangan adalah hasil kegiatan petani yang berada menyebar di seluruh pelosok wilayah tanah air kita yang luas dan beraneka ragam ini. Oleh karena itu program peningkatan produksi pangan, khususnya usaha pokok intensifikasi dan diversifikasi, merupakan program yang keberhasilannya ditentukan oleh tekad, semangat, kegairahan dan kemampuan petani di seluruh wilayah pedesaan. Pengalaman kita selama ini menunjukkan bahwa tekad, semangat, gairah dan kemampuan petani untuk berpartisipasi dalam gerakan peningkatan produksi pangan dengan menerapkan Sapta Usaha, adalah refleksi dari tekad, semangat, gairah dan kemampuan aparatur pengaturan, pelayanan, pembinaan dan kepemimpinan yang digelar di pedesaan dibawah pembinaan jajaran instansi pemerintah maupun badan usaha yang simpul-simpul koordinasinya berada diberbagai tingkat administrasi pemerintahan.



Sehubungan dengan kenyataan itu, maka sebagai pesan inti untuk pertemuan ini saya ingin sekali lagi menyampaikan dan menyegarkan pesan yang selalu ditekankan oleh Bapak Presiden kepada kita sekalian, ialah agar kita tidak dan jangan bersikap rutin dalam menanggapi berbagai gejala hambatan, gangguan dan kendala yang dapat mengurangi peluang keberhasilan kita melestarikan swasembada pangan. Karena secara operasional tolok ukur dari pelestarian swasembada pangan itu adalah tercapainya sasaran produksi musiman dan tahunan (baik areal tanam/panennya maupun hasil per hektarnya), pesan Presiden itu berarti bahwa kita harus selalu mencari dan menemukan jalan dan langkah, kiat atau jurus yang tepat untuk memecahkan segala masalah yang dihadapi di lapangan. Kita tidak bisa bersikap rutin apalagi berpuas diri, karena setiap masalah yang tidak terpecahkan akan merupakan ancaman potensial yang berbahaya bagi kelestarian swasembada pangan.

Saudara Gubernur dan Saudara - Saudara sekalian.

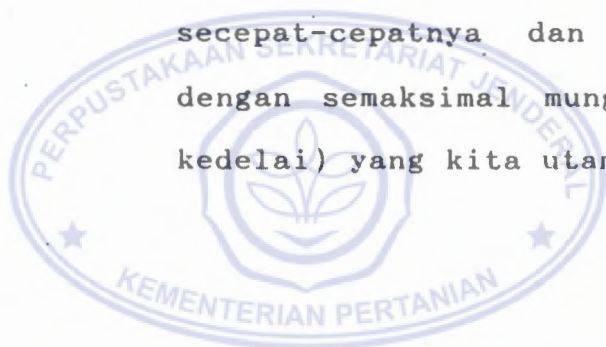
Bertolak dari sikap dinamik, yang saya percaya kita miliki, maka segala gejala rutinitas yang selama ini masih sering kita jumpai perlu benar-benar kita waspadai agar jangan sampai menjadi penyakit kronis yang membuat masyarakat kita statik. Dan gejala statik ini secara nalar sederhana tercermin dari rendahnya laju peningkatan produksi beras kita pada tahun yang lalu, yang menurut Ramalan III hanya naik 0,54 % dibanding tahun 1989. Oleh karena itu kami benar - benar prihatin dan kepercayaan diri serta optimisme kami menjadi goyah, khawatir kalau-kalau penyakit rutinitas



yang membuat statik itu benar-benar sudah mulai melanda pribadi kita. Maka melalui pertemuan ini saya ingin berbagi rasa dan berbagi tanggung jawab dengan saudara-saudara sekalian dan saya akan berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa apabila setelah dari pertemuan ini apa yang saya khawatirkan itu ternyata tidak benar. Saya ingin agar kita semua sekembalinya dari pertemuan ini benar-benar mempunyai kondisi mental dinamik yang bebas dari penyakit rutinitas.

Saudara Gubernur dan Saudara-Saudara sekalian.

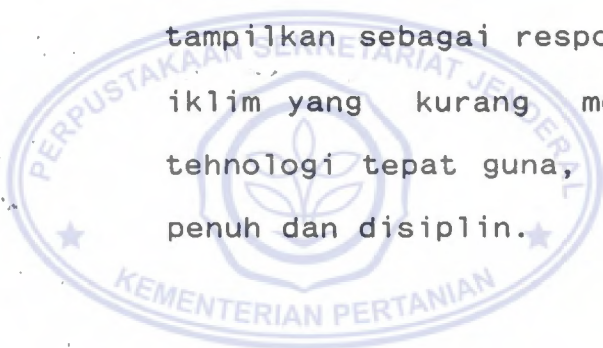
Gejala menguatnya rutinitas yang mengakibatkan perkembangan statik dan melemahnya sikap dinamik kreatif yang tahun-tahun sebelumnya telah berhasil kita gelarkan, merupakan kondisi awal yang harus segera kita koreksi kalau kita memang bertekad untuk melestarikan swasembada pangan. Menghadapi tugas tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang sebagaimana sudah dicantumkan dalam Buku Repelita V, yang khusus untuk kedelai ditambah lagi dengan sasaran khusus percepatan peningkatan produksi kedelai, karena importnya terus meningkat, kita benar-benar dihadapkan dengan misi yang berat dan pelik. Secara kuantitatif dan kualitatif sasaran yang harus kita capai tahun 1991 ini hanya mungkin dapat kita capai apabila kita mampu memanfaatkan peluang yang sempit MT 1990/1991 ini dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya dan MT 1991 berhasil kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin, dengan sasaran ganda (padi dan kedelai) yang kita utamakan.



Sebagaimana sudah kita ketahui dan kita alami bersama hujan dalam MT 1990/91 ini datangnya terlambat satu sampai dua bulan. Ini berarti bahwa kita tidak bisa mengharapkan produksi dari tambahan areal (karena kemungkinan besar malah areal panennya akan lebih kecil dari tahun yang lalu dan dari sasaran). Peningkatan produksi padi MT 1990/91 hanya mungkin kita capai dari peningkatan mutu intensifikasi yang akan memberikan hasil per hektar yang lebih tinggi. Ini berarti tambahan produksi padi itu harus kita capai dari peningkatan mutu intensifikasi pada hamparan Supra Insus, Insus Paket D dan perluasan Insus paket C.

Saudara Gubernur dan Saudara-Saudara sekalian.

Untuk bahan penjabaran rencana operasional yang dapat memanfaatkan sumber daya lahan dan iklim secara optimal dalam tahun 1991 ini pada kesempatan ini saya sampaikan informasi yang kita dapat dari BMG tentang perkiraan sifat hujan di berbagai wilayah Indonesia dalam MT 1990/91 dan MT 1991 yang akan datang. Dari informasi itu dapat kita simpulkan bahwa pada umumnya curah hujan itu secara kualitatif dan kuantitatif kondisinya lebih kurang menguntungkan (perkiraan kemarau lebih kering, lebih panjang) dibandingkan dengan tahun 1989 dan tahun 1990 yang lalu. Ditinjau dari sudut ini pun maka jawaban yang harus kita tampilkan sebagai respon terhadap kondisi lingkungan atau iklim yang kurang menggembirakan itu adalah ilmu dan teknologi tepat guna, yaitu penerapan Sapta Usaha secara penuh dan disiplin.

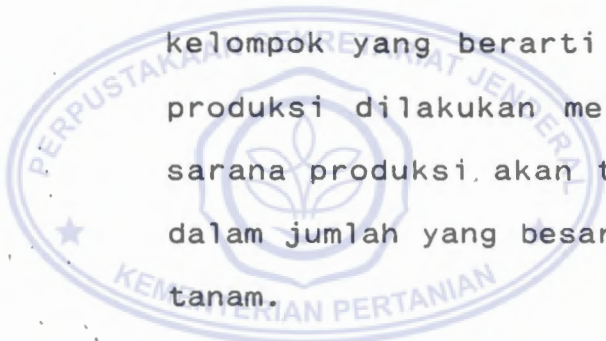


Sekali lagi peluang bagi padi dari segi areal makin terbatas, tapi bagi kedelai dan tanaman palawija lain dalam rangka diversifikasi akan makin besar peluang perluasannya, asal dapat dilakukan tepat waktu.

Saudara Gubernur dan Saudara-Saudara sekalian.

Propinsi Jawa Timur berdasarkan data per 15 Desember 1990 menunjukkan bahwa realisasi tanam intensifikasi padi baru mencapai 101.845,4 Ha atau 8,86 % dari rencana 1.150.000 Ha yang baru dimulai pada bulan Nopember 1990, dan untuk kedelai baru mencapai 12.181 Ha atau 7,88 % dari rencana 154.640 Ha. Penerapan teknologi Supra Insus dan Insus Paket D terutama penggunaan pupuk KCl dan PPC/ZPT masih rendah. Bila dibandingkan dengan MT. 1989/1990 mengalami penurunan seluas 157.139,6 Ha dengan indeks 37 dan untuk kedelai yaitu 40.120 ha dengan indeks 44.

Realisasi penggunaan KUT MT. 1990/1991 untuk kegiatan Opsus Supra Insus baru mencapai 6.981,6 Ha atau 19,96 % dari realisasi tanam dan Insus Paket D baru mencapai 128 Ha atau 0,68 % dari realisasi tanam, bila dibandingkan dengan MT. 1989/1990 masih mengalami penurunan dengan indeks masing-masing yaitu 35 dan 97. Pencairan KUT MT. 1990/1991 per 30 Nopember 1990 baru mencapai Rp.2.624.553.000,- atau 50,58 % dari pembukaan CO yang dilakukan Rp.5.188.826.000,- dengan plafond Rp.37.887.000.000,- dan jumlah kelompok tani yang menyusun RDKK yaitu 26.020 kelompok atau 66,85 % dari 38.925 kelompok yang berarti minimal 33,15 % pengadaan sarana produksi dilakukan melalui swadana, sehingga pengadaan sarana produksi akan terfokus pada waktu yang bersamaan dalam jumlah yang besar, karena terjadinya kemunduran musim tanam.



Disamping penyelenggaraan produksi pangan, Propinsi Jawa Timur merupakan Propinsi penghasil utama gula, melalui program TRI. Untuk musim tanam tahun 1989/1990 direncanakan 1.276.941 ton hablur atau 62,34 % dari rencana hablur nasional. Sampai dengan keadaan 31 Oktober 1990 terealisasi sebanyak 901.258,3 ton (70,57 %) atau 62,57 % produksi hablur nasional TRI Nasional MTT 1989/1990.

Melihat besarnya peran yang harus diemban Propinsi Jawa Timur tersebut, berarti seluruh potensi lahan dan fasilitas yang tersedia saat ini seperti tenaga pembimbing dari pabrik gula, para penyuluh yang telah tersedia dan fasilitas KUT serta dengan persediaan sarana produksi yang tepat, maka kami yakin di tahun 1990/1991 ini Propinsi Jawa Timur dapat lebih meningkatkan andilnya dalam produksi gula Nasional melalui program TRI.

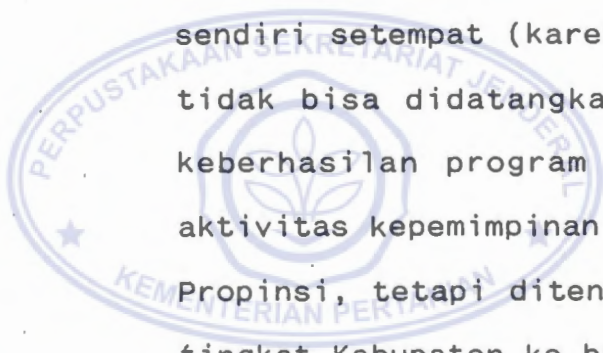
Selain program intensifikasi pertanian yang menjadi prioritas nasional seperti diungkapkan di atas, saat ini juga dipersiapkan Proyek Pertanian Lahan Kering dengan total anggaran US \$ 35,56 juta terdiri dari : IFAD loan sebesar US \$ 20 juta, Bantuan Pemerintah Belanda (khusus TA Grand) US \$ 3,45 juta, PBB (FAO/WFP) US \$ 2,88 juta dan Pemerintah Indonesia US \$ 9,23 juta ; untuk kegiatan selama 7 tahun dengan sasaran proyek 13.000 Ha (Full Benefi Cireis) dan sasaran program (dampak) seluas 127.000 Ha dengan aneka komoditi (pangan, perkebunan dan peternakan).

Proyek ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani di lahan-lahan marginal (lahan kritis) di propinsi Jawa Timur bagian Selatan yaitu Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar dan Lumajang.

Proyek tersebut walaupun dilaksanakan di lahan-lahan marginal, saya harapkan dapat memberikan sumbangan yang nyata terhadap program peningkatan produksi pertanian khususnya di wilayah Jawa Timur. Untuk dapat memberikan sumbangan dalam mencapai sasaran produksi khususnya padi dan kedelai, maka saya harapkan agar intensifikasi padi gogo dan kedelai di lahan proyek dapat ditangani secara sungguh-sungguh dengan memprioritaskan pengadaan benih unggul termasuk upaya penumbuhan dan pengembangan kelompok tani.

Saudara Gubernur dan Saudara-Saudara sekalian

Produksi pangan adalah hasil dari sistem produksi pangan Nasional, yang pada saat ini sudah mencapai bentuk dan formatnya yang cukup handal. Ini berarti bertagai subsistem yang menjadi perangkat dan bagian dari sistem sudah bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam suatu tatanan dan tatahubungan kerja yang menjamin sinkronisasi dan koordinasi yang serasi. Perangkat kebijakan politik, ekonomi, teknologi, prasarana dan administrasi benar-benar telah ada dalam kondisi yang dibutuhkan dan mengerakkan para petani. Tetapi sistem ini tidak sama kehandalannya di berbagai subsistem wilayah, karena itu kita saksikan sekarang masih terdapat variabilitas antar wilayah yang cukup tinggi. Karena proses pemantapan pengembangan sistem ini wilayah demi wilayah sangat tergantung dari unsur manusia dan kegiatannya yang khas harus dikembangkannya sendiri setempat (karena kepemimpinan dan kualitas manusia tidak bisa didatangkan dari luar), maka pada saat ini keberhasilan program pangan tidak lagi ditentukan oleh aktivitas kepemimpinan pada eselon kepemimpinan Nasional dan Propinsi, tetapi ditentukan oleh kepemimpinan dan sistem di tingkat Kabupaten ke bawah.



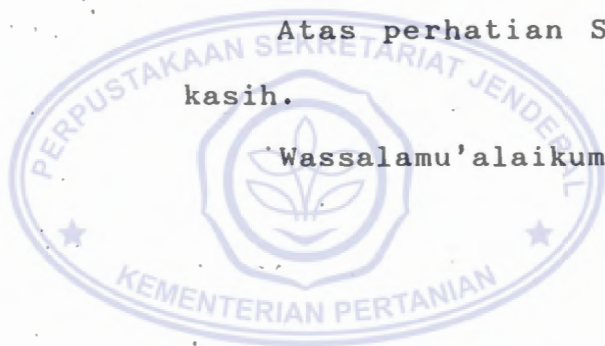
Oleh karena itu pada tempatnyalah, apabila kami saat ini meminta Saudara - Saudara Bupati untuk memimpin aparatur Satuan Pelaksana Bimas di daerah secara dinamik dan sistimatik. Agar makin lama keberhasilan program itu makin ditentukan oleh sistem dan bukan oleh orang-orangnya, semata-mata kami meminta dengan sungguh-sungguh agar para Bupati memusatkan perhatian kepada perkembangan organisasi dan mekanisme kerja berbagai Pos Simpul Koordinasi (Posko A1, A2, A3, B1, B2, I, II dan III). Maka Metode Opsus kami minta agar benar-benar diamalkan sebagai normalisasi ketatalaksanaan dan kepemimpinan operasional lapangan. Pengamatan kami selama ini menunjukkan bahwa para Bupati yang selalu memantau dan sering berada di lapangan sangat besar peluangnya untuk berhasil memimpin rakyatnya berpartisipasi dalam program pangan nasional. Demikian upaya-upaya yang perlu kita laksanakan sesuai dengan amanat Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, yaitu beliau berpesan agar:

- a. Swasembada beras harus dipertahankan dan dilestarikan.
- b. Produksi kedelai agar ditingkatkan melalui perluasan areal tanam dan peningkatan teknologi.
- c. Kredit Usahatani sebagai modal usahatani bagi petani harus disalurkan secara intensif, demikian juga pengembaliannya sehingga tidak mengganggu penyaluran untuk musim tanam berikutnya.

Atas perhatian Saudara-Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Menteri Pertanian,



9





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGARAHAN MENTERI PERTANIAN
PADA RAPAT KOORDINASI BIMAS PROPINSI BALI
TANGGAL 12 JANUARI 1991 DI BALI

Saudara Gubernur,
Saudara-saudara Kakanwil,
Saudara-saudara Bupati,
Saudara-saudara Kepala Dinas,
Saudara-saudara anggota Satpem Bimas,
Saudara-saudara anggota Satpel Bimas dan hadirin sekalian yang
terhormat,

Assalamu'alaikum Warokhmatullohi Wabarokatuh,

Pada kesempatan ini, marilah pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wataala, karena atas rahmat dan karunia NYA lah hari ini kita bisa berkumpul dalam pertemuan yang penting ini untuk bersama-sama melakukan evaluasi terhadap posisi kita bersama dalam mengupayakan lestarinya swa sembada pangan. Kita bersyukur bahwa selama ini kita selalu mendapat berkah dan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga sampai saat ini kita tetap dapat mempertahankan swa sembada beras yang sudah kita raih sejak tahun 1984 itu. Disamping untuk mengevaluasi posisi kita masing-masing serta posisi kita bersama, pertemuan inipun dimaksudkan sebagai suatu pertemuan untuk mengkonsolidasi segenap aparatur dan kekuatan masyarakat yang terkait dengan kiprah produksi pangan, agar segenap tantangan dan peluang tahun ini serta tahun-tahun yang

akan datang dapat selalu kita respons dengan melakukan/ melaksanakan tindakan operasional yang tepat, efektif dan efisien.

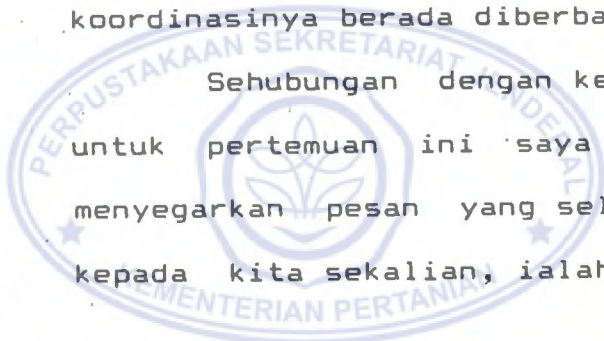
Dengan iringan ucapan Selamat Tahun Baru 1991, dan Selamat Natal kepada mereka yang merayakannya, saya ingin menyampaikan beberapa informasi dan beberapa pesan dalam menyongsong tahun 1991 ini.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Swa sembada pangan adalah tekad atau komitmen nasional yang terus-menerus harus kita amankan dan kita jamin realisasinya dengan mengerahkan pikiran, perhatian serta segala potensi sumber daya (manusia, alam, daya, dana) secara optimal sesuai dengan kebutuhan operasional di setiap lokasi. Pangan adalah hasil kegiatan petani, yang berada menyebar diseluruh pelosok wilayah tanah air kita yang luas dan beraneka ragam ini. Oleh karena itu program peningkatan produksi pangan, khususnya usaha pokok intensifikasi dan diversifikasi, merupakan program yang keberhasilannya ditentukan oleh tekad, semangat, kegairahan, dan kemampuan petani diseluruh wilayah pedesaan.

Pengalaman kita selama ini menunjukkan bahwa tekad, semangat, gairah, dan kemampuan petani untuk berpartisipasi dalam gerakan peningkatan produksi pangan dengan menerapkan sapta usaha, adalah refleksi dari tekad, semangat, gairah, dan kemampuan aparaturnya pengaturan, pelayanan, pembinaan, dan kepemimpinan yang digelar dipedesaan dibawah pembinaan jajaran instansi pemerintah maupun badan usaha yang simpul-simpul koordinasinya berada diberbagai tingkat administrasi pemerintahan.

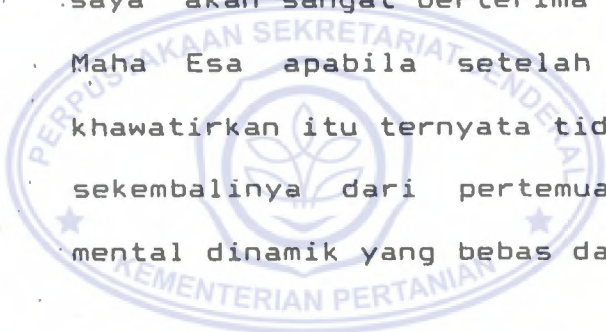
Sehubungan dengan kenyataan itu, maka sebagai pesan inti untuk pertemuan ini saya ingin sekali lagi menyampaikan dan menyegarkan pesan yang selalu ditekankan oleh Bapak Presiden kepada kita sekalian, ialah agar kita tidak dan jangan bersikap



rutin dalam menanggapi berbagai gejala hambatan, gangguan, dan kendala yang dapat mengurangi peluang keberhasilan kita melestarikan swasembada pangan. Karena secara operasional tolok ukur dari pelestarian swasembada pangan itu adalah tercapainya sasaran produksi musiman dan tahunan (baik areal tanam/panennya maupun hasil per hektarnya), pesan Bapak Presiden itu berarti bahwa kita harus selalu mencari dan menemukan jalan dan langkah, kiat atau jurus yang tepat untuk memecahkan segala masalah yang dihadapi di lapangan. Kita tidak bisa bersikap rutin apalagi berpuas diri, karena setiap masalah yang tidak terpecahkan akan merupakan ancaman potensial yang berbahaya bagi kelestarian swasembada pangan.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Bertolak dari sikap dinamik yang saya percaya kita miliki, maka segala gejala rutinitas yang selama ini masih sering kita jumpai perlu benar-benar kita waspadai agar jangan sampai menjadi penyakit kronis yang membuat masyarakat kita statik. Dan gejala statik ini secara nalar sederhana tercermin dari rendahnya laju peningkatan produksi beras kita pada tahun yang lalu, yang menurut ramalan III hanya naik 0,54 % dibanding tahun 1989. Oleh karena itu kami benar-benar prihatin dan kepercayaan diri serta optimisme kami menjadi goyah, khawatir kalau-kalau penyakit rutinitas yang membuat statik itu benar-benar sudah mulai melanda pribadi kita. Maka melalui pertemuan ini saya ingin berbagi rasa dan berbagi tanggung jawab dengan saudara-saudara sekalian dan saya akan sangat berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa apabila setelah dari pertemuan ini apa yang saya khawatirkan itu ternyata tidak benar. Saya ingin agar kita semua sekembalinya dari pertemuan ini benar-benar mempunyai kondisi mental dinamik yang bebas dari penyakit rutinitas.



Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Gejala menguatnya rutinitas yang mengakibatkan perkembangan statik dan melemahnya sikap dinamik kreatif yang tahun-tahun sebelumnya telah berhasil kita gelarkan, merupakan kondisi awal yang harus segera kita koreksi kalau kita memang bertekad untuk melestarikan swa sembada pangan. Menghadapi tugas tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang sebagaimana sudah dicantumkan dalam buku Repelita V, yang khusus untuk kedelai ditambah lagi dengan sasaran khusus percepatan peningkatan produksi kedelai, karena importnya terus meningkat, kita benar-benar dihadapkan dengan misi yang berat dan pelik. Secara kuantitatif dan kualitatif sasaran yang harus kita capai tahun 1991 ini, hanya mungkin dapat kita capai apabila kita mampu memanfaatkan peluang yang sempit MT.1990/1991 ini dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya dan MT. 1991 berhasil kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin, dengan sasaran ganda (padi dan kedelai) yang kita utamakan.

Sebagaimana sudah kita ketahui dan kita alami bersama hujan dalam MT.1990/1991 ini datangnya terlambat satu sampai dua bulan. Ini berarti bahwa kita tidak bisa mengharapkan produksi dari tambahan areal (karena kemungkinan besar malah areal panennya akan lebih kecil dari tahun yang lalu dan dari sasaran). Peningkatan produksi padi MT. 1990/1991 hanya mungkin kita capai dari peningkatan mutu intensifikasi yang akan memberikan hasil perhektar yang lebih tinggi. Ini berarti tambahan produksi padi itu harus kita capai dari peningkatan mutu intensifikasi pada hamparan Supra Insus, Insus paket D dan perluasan Insus paket C.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Untuk bahan penjabaran rencana operasional yang dapat



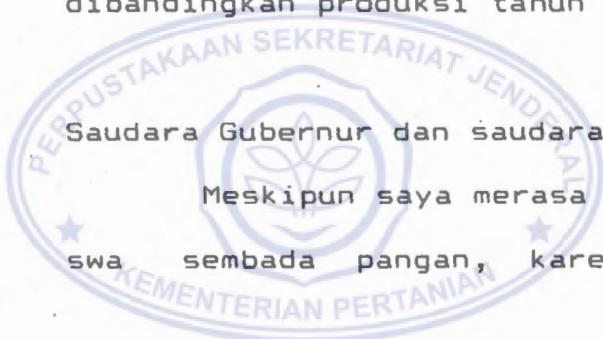
memanfaatkan sumber daya lahan dan iklim secara optimal dalam tahun 1991 ini, pada kesempatan ini saya sampaikan informasi yang kita dapat dari BMG tentang perkiraan sifat hujan diberbagai wilayah Indonesia dalam MT.1990/1991 dan MT.1991 yang akan datang. Dari informasi itu dapat kita simpulkan bahwa pada umumnya curah hujan itu secara kualitatif dan kuantitatif kondisinya lebih kurang menguntungkan (perkiraan kemarau lebih kering, lebih panjang) dibandingkan dengan tahun 1989 dan tahun 1990 yang lalu. Ditinjau dari sudut inipun maka jawaban yang harus kita tampilkan sebagai respon terhadap kondisi lingkungan dan iklim yang kurang menggembirakan itu adalah ilmu dan teknologi tepat guna yaitu penerapan sapa usaha secara penuh dan disiplin. Sekali lagi peluang bagi padi dari segi areal makin terbatas, tapi bagi kedelai dan tanaman palawija lain dalam rangka diversifikasi akan makin besar peluang perluasannya, asal dapat dilakukan tepat waktu.

Saudara Peserta Rapat Koordinasi Satuan Pembina Bimas dan Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten se Propinsi Bali yang saya hormati.

Pada kesempatan ini saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Saudara Gubernur dan Bupati serta segenap aparat Bimas di Propinsi Bali atas kesungguhan dan ketekunannya dalam melaksanakan program Bimas sehingga produksi beras propinsi Bali tahun 1990 berdasarkan angka Ramalan III Biro Pusat Statistik telah meningkat sebesar 22.785 ton atau 2,6% bila dibandingkan produksi tahun 1989.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

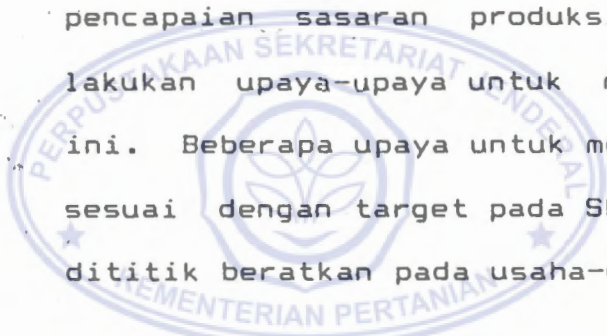
Meskipun saya merasa khawatir akan terancamnya kelestarian swa sembeda pangan, karena keadaan-keadaan yang dihadapi



sekarang, saya masih mempunyai keyakinan bahwa daerah ini masih akan dapat memberikan andilnya terhadap kelestarian swa sembada pangan tersebut. Hal ini saya ungkapkan karena Daerah ini berdasarkan ramalan III BPS pada tahun 1990 produksi padinya masih meningkat sebanyak 22.785 ton setara 2,6 % bila dibandingkan dengan produksi tahun 1989. Demikian pula mengenai peningkatan produksi palawija khususnya kedelai. Pada tahun 1990 produksi kedelai mencapai 30.728 ton atau meningkat 4.955 ton setara 19,23 % bila dibandingkan terhadap produksi tahun 1989. Namun demikian bila saya nilai keragaan intensifikasi pada MT.1990/1991 samapi dengan bulan Desember baik padi atau palawija realisasinya masih jauh dari harapan yaitu intensifikasi padi seluas 9.190 Ha atau 9 % dari sasaran MT.1990/1991 terdiri dari Supra Insus 4.186 Ha atau 9 %, Insus 4.832 Ha atau 13 %, Inmum 172 Ha atau 1 % dan palawija khususnya kedelai seluas 581 Ha atau 8 % padahal MT.1990/1991 sudah berjalan selama tiga bulan.

Saya percaya dan yakin saudara-saudara sekalian akan dapat menimba pengalaman yang baik dari musim tanam yang lalu sehingga realisasi intensifikasi tersebut dapat dipacu dengan sebaik-baiknya, sehingga pada akhir Musim Tanam (MT) akan mencapai sasaran baik areal maupun mutunya sesuai yang diharapkan dan andil Daerah ini terhadap produksi pangan nasional akan lebih meningkat lagi.

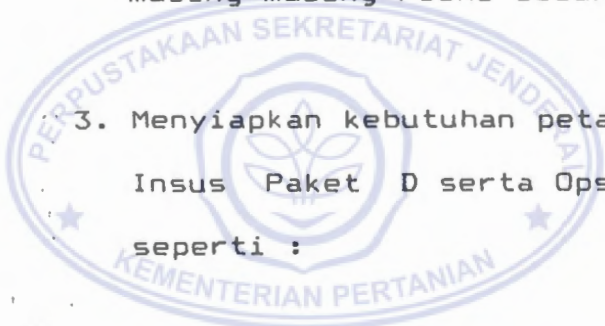
Saudara Gubernur, Saudara Bupati dan hadirin sekalian, keadaan MT 1990/1991 ini, akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran produksi tahun 1991, apabila tidak kita lakukan upaya-upaya untuk mengantisipasinya pada saat sekarang ini. Beberapa upaya untuk mencapai sasaran produksi tahun 1991 sesuai dengan target pada SK Mentan yang telah ditetapkan akan dititik beratkan pada usaha-usaha berikut :



1. Peningkatan mutu Supra Insus, yaitu dengan mengupayakan agar seluruh kelas petani pelaksana Supra Insus menerapkan 10 unsur teknologi, sehingga target produksi 9 ton gkp per hektar dapat dicapai.
2. Peningkatan mutu Insus Paket D, yaitu mengupayakan agar seluruh kelompok petani peserta Insus menerapkan 7 unsur paket teknologi secara penuh.
3. Meningkatkan luas areal tanam intensifikasi padi gogo baik dalam pelaksanaan Opsus padi gogo pada lahan usahatani konservasi maupun pada lahan kering lainnya yang telah biasa ditanami padi.

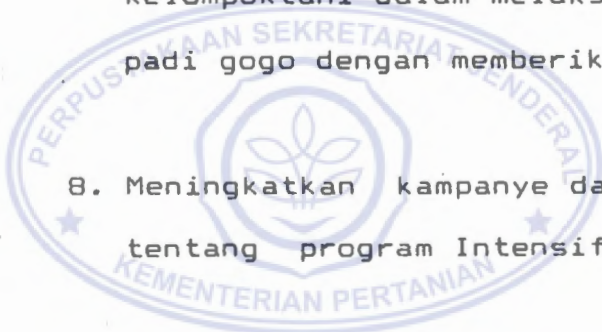
Untuk dapat melaksanakan usaha-usaha tersebut kita memerlukan kerja keras dari seluruh aparat Satuan Pembina Bimas Propinsi dan Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten, Kecamatan dan Desa dengan mewujudkan gerakan-gerakan berikut :

1. Meningkatkan aktivitas kerja para aparat pelayanan sarana produksi, kredit dan penyuluhan dengan cara Waskat oleh Saudara Gubernur, Bupati, Instansi-instansi anggota Bimas kepada petugas/bawahannya.
2. Meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian oleh masing-masing POSKO secara kontinyu setiap 2 minggu sekali.
3. Menyiapkan kebutuhan petani dalam pelaksanaan Supra Insus dan Insus Paket D serta Opsus usahatani pada lahan konservasi seperti :



- 1) benih berlabel
- 2) pupuk lengkap dan berimbang (Urea, TSP, KCl dan ZA).
- 3) penyediaan PPC/ZPT
- 4) penyediaan pestisida dan herbisida
- 5) meningkatkan gerakan tabungan kelompok melalui Simpedes agar setiap Ha petani mempunyai tabungan minimal 200 Kg gabah.

4. Mengupayakan agar kelompoktani yang masih membutuhkan KUT dapat mendapatkannya dengan cara menginventarisasi kembali KUD yang layak menyalurkan KUT dan jumlah kelompoktani yang membutuhkan KUT.
5. Menyediakan pupuk secara lengkap oleh KUD dan menerapkan penyaluran bagi petani swadana agar bila membeli pupuk jumlah dan komposisinya sesuai dengan anjuran.
6. Menumbuhkan dan mengaktifkan semua Posko aparat maupun Posko kelembagaan petani agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, mengfungsikan Posko A1,A2, A3, B1, B2 Posko I, II, III dan IV.
7. Memberikan motivasi, berupa penghargaan bagi aparat yang berprestasi didalam kegiatan Bimas seperti KUD, Penyuluh, Petugas BRI dan lain-lain di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi, serta melaksanakan perlombaan antar kelompoktani dalam melaksanakan Insus, Supra Insus dan tanaman padi gogo dengan memberikan hadiah yang menarik.
8. Meningkatkan kampanye dan penerangan yang gencar dan meluas tentang program Intensifikasi Pertanian (Supra Insus, Insus



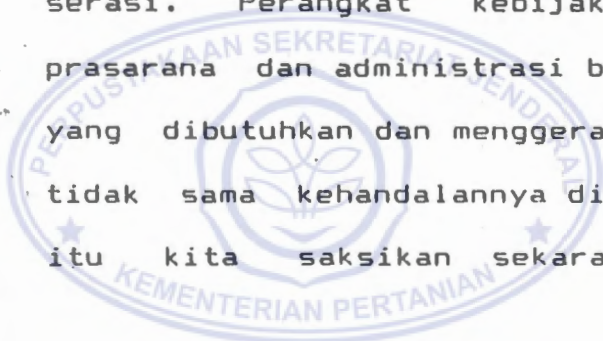
Paket D, Opsus Kedelai dll) agar seluruh masyarakat mengetahuinya dan sadar untuk melaksanakannya.

Peningkatan produksi kedelai dalam rangka memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri, dilakukan melalui peningkatan mutu intensifikasi, peningkatan intensitas panen dan perluasan areal, dimana untuk TA. 1990/1991 direncanakan pada 18 propinsi dengan luas areal tanam 300.000 ha. Pada areal ini diberi bantuan berupa benih kedelai seluas 300.000 ha dan rhizobium untuk 200.000 ha oleh Ditjen. Pertanian Tanaman Pangan dan kebutuhan lainnya diperoleh melalui KUT.

Dalam menyelenggarakan Opsus Kedelai ini pendekatan yang telah ditempuh adalah pendekatan Operasi Khusus (Opsus) yang diintegrasikan dengan Opsus-opsus yang sekarang sedang berjalan, antara lain Opsus Supra Insus, Insus Paket D, dan Opsus Usahatani konservasi di lahan kering, dimana azas yang kita anut adalah azas konsentrasi untuk memudahkan pembinaan yang lebih intensif dan berfungsinya Posko-Posko.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Produksi pangan adalah hasil dari sistem produksi pangan nasional, yang pada saat sudah mencapai bentuk dan formatnya yang cukup handal. Ini berarti berbagai subsistem sudah bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam suatu tatanan dan tata hubungan kerja yang menjamin sinkronisasi dan koordinasi yang serasi. Perangkat kebijakan politik, ekonomi, teknologi, prasarana dan administrasi benar-benar telah ada dalam kondisi yang dibutuhkan dan menggerakkan para petani. Tetapi sistem ini tidak sama kehandalannya di berbagai subsistem wilayah, karena itu kita saksikan sekarang masih terdapat variabilitas

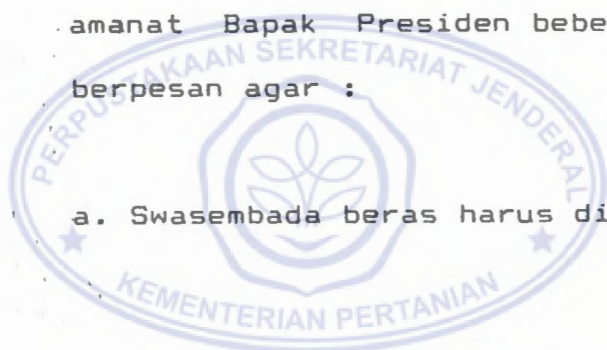


produktivitas antar wilayah yang cukup tinggi. Karena proses pemantapan pengembangan sistem ini wilayah demi wilayah sangat tergantung dari unsur manusia dan kegiatannya yang khas harus dikembangkannya sendiri setempat (karena kepemimpinan dari kualitas manusia tidak bisa didatangkan dari luar), maka pada saat ini keberhasilan program pangan tidak lagi ditentukan oleh aktivitas kepemimpinan pada Eselon kepemimpinan nasional dan propinsi, tetapi ditentukan oleh dinamika kepemimpinan dan sistem di tingkat kabupaten ke bawah.

Oleh karena itu pada tempatnyalah, apabila kami saat ini meminta Saudara-saudara Bupati untuk memimpin aparatur Satuan Pelaksana Bimas di daerah secara dinamik dan sistematik. Agar makin lama keberhasilan program itu makin ditentukan oleh sistem dan bukan oleh orang-orangnya semata-mata, kami meminta dengan sungguh - sungguh agar para Bupati memusatkan perhatian kepada perkembangan organisasi dan mekanisme kerja berbagai Pos Simpul Koordinasi (Posko A1, A2, A3, B1, B2, I, II, dan III). Maka metode opus kami minta agar benar-benar diamalkan sebagai normalisasi ketatalaksanaan dan kepemimpinan operasional lapangan. Pengamatan kami selama ini menunjukkan bahwa para Bupati yang selalu memantau dan sering berada di lapangan sangat besar peluangnya untuk berhasil memimpin rakyatnya berpartisipasi dalam program pangan nasional.

Demikianlah upaya-upaya yang perlu kita laksanakan sesuai dengan amanat Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, yaitu beliau berpesan agar :

- a. Swasembada beras harus dipertahankan dan dilestarikan



- b. Produksi kedelai agar ditingkatkan melalui perluasan areal tanam dan peningkatan teknologi.

- c. Kredit Usahatani sebagai bantuan modal usahatani bagi petani harus disalurkan secara berdayaguna dan tertib, demikian juga pengembaliannya sehingga tidak mengganggu penyaluran untuk musim tanam berikutnya.

Atas perhatian Saudara-saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warochmatullohi Wabarokatuh.

Menteri Pertanian



Ir. Wardoyo



10





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGARAHAN MENTERI PERTANIAN

PADA RAPAT KOORDINASI BIMAS PROPINSI D.I. YOGYAKARTA

TANGGAL 12 JANUARI 1971 DI YOGYAKARTA

Saudara Gubernur,

Saudara-saudara Bupati,

Saudara-saudara para Kakanwil,

Saudara-saudara para Kepala Dinas,

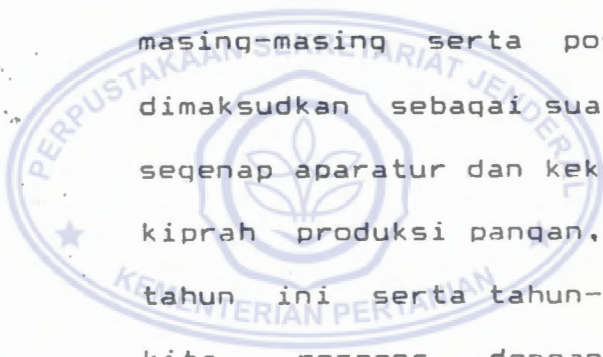
Saudara-saudara anggota Satpem Bimas,

Saudara-saudara anggota Satpel Bimas,

dan Hadirin sekalian Yth.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pada kesempatan ini, marilah pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas rahmat dan karuniaNya lah hari ini kita bisa berkumpul dalam pertemuan yang penting ini untuk bersama-sama melakukan evaluasi terhadap posisi kita bersama dalam menqupayakan lestarnya swasembada pangan. Kita bersyukur bahwa selama ini kita selalu mendapat berkah dan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, sehinqqa sampai saat ini kita tetap dapat mempertahankan swasembada beras yang sudah kita raih sejak tahun 1984 itu. Disamping untuk mengevaluasi posisi kita masing-masing serta posisi kita bersama, pertemuan inipun dimaksudkan sebaqai suatu pertemuan untuk mengkonsolidasi segenap aparatur dan kekuatan masyarakat yang terkait dengan kiprah produksi pangan, agar segenap tantangan dan peluang tahun ini serta tahun-tahun yang akan datang dapat selalu kita respons dengan melakukan/melaksanakan tindakan

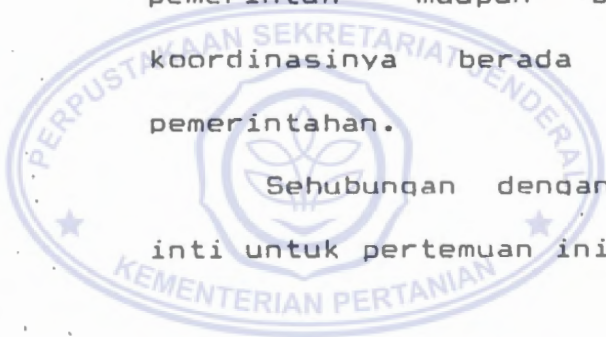


Dengan iringan ucapan Selamat Tahun Baru 1991, dan Selamat Natal kepada mereka yang merayakannya, saya ingin menyampaikan beberapa informasi dan beberapa pesan dalam menyongsong tahun 1991 ini.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Swasembada pangan adalah tekad atau komitmen nasional yang terus menerus harus kita amankan dan kita jamin realisasinya dengan mengerahkan pikiran, perhatian serta segala potensi sumberdaya (manusia, alam, daya dan dana) secara optimal sesuai dengan kebutuhan operasional di setiap lokasi. Pangan adalah hasil kegiatan petani, yang berada menyebar di seluruh pelosok wilayah tanah air kita yang luas dan beraneka ragam ini. Oleh karena itu program peningkatan produksi pangan, khususnya usaha pokok intensifikasi dan diversifikasi merupakan program yang keberhasilannya ditentukan oleh tekad, semangat, kegairahan dan kemampuan petani diseluruh wilayah pedesaan. Pengalaman kita selama ini menunjukkan bahwa tekad, semangat, gairah dan kemampuan petani untuk berpartisipasi dalam gerakan peningkatan produksi pangan dengan menerapkan Sapta Usaha adalah refleksi dari tekad, semangat, gairah dan kemampuan aparatur pengaturan, pelayanan, pembinaan dan kepemimpinan yang digelar dipedesaan dibawah pembinaan jajaran instansi pemerintah maupun badan usaha yang simpul-simpul koordinasinya berada diberbagai tingkat administrasi pemerintahan.

Sehubungan dengan kenyataan itu, maka sebagai pesan inti untuk pertemuan ini saya ingin sekali lagi menyampaikan



dan menyoqarkan pesan yang selalu ditekankan oleh Bapak Presiden kepada kita sekalian, ialah agar kita tidak dan jangan bersikap rutin dalam menanggapi berbagai gejala hambatan, qanqquan dan kendala yang dapat mengurangi peluang keberhasilan kita melestarikan swasembada pangan. Karena secara operasional tolok ukur dari pelestarian swasembada pangan itu adalah tercapainya sasaran produksi musiman dan tahunan (baik areal tanam/panen maupun hasil per hektarnya), pesan Bapak Presiden itu berarti bahwa kita harus selalu mencari dan menemukan jalan dan langkah, kiat atau jurus yang tepat untuk memecahkan segala masalah yang dihadapi dilapangan. Kita tidak bisa bersikap rutin apalagi berpuas diri, karena setiap masalah yang tidak terpecahkan merupakan ancaman potensial yang berbahaya bagi kelestarian swasembada pangan.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Bertolak dari sikap dinamik, yang saya percaya kita miliki, maka segala gejala rutinitas yang selama ini masih sering kita jumpai perlu benar-benar kita waspadai jangan sampai menjadi penyakit kronis yang membuat masyarakat kita statik. Dan gejala statik ini secara nalar sederhana tercermin dari rendahnya laju peningkatan produksi beras pada tahun yang lalu, yang menurut Ramalan III hanya naik 0,54 % dibanding tahun 1989. Oleh karena itu kami benar-benar prihatin dan kepercayaan diri serta optimisme kami menjadi goyah. khawatir kalau-kalau penyakit rutinitas yang membuat statik ini benar-benar sudah mulai melanda pribadi kita.

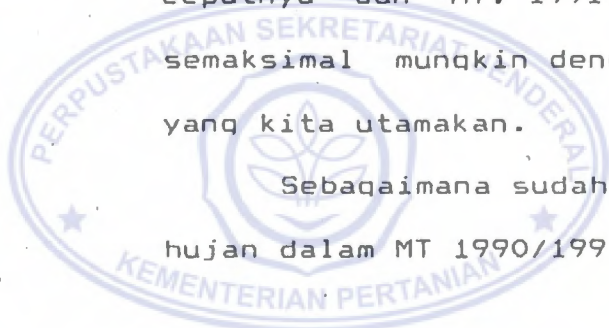


Maka melalui pertemuan ini saya ingin berbagi rasa dan berbagi tanggung jawab dengan saudara-saudara sekalian dan saya akan sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa apabila setelah dari pertemuan ini apa yang saya khawatirkan itu ternyata tidak benar. Saya ingin agar kita semua sekembalinya dari pertemuan ini benar-benar mempunyai kondisi mental dinamik yang bebas dari penyakit rutinitas.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Gejala menguatnya rutinitas yang mengakibatkan perkembangan statik dan melemahnya sikap dinamik kreatif yang tahun-tahun sebelumnya telah berhasil kita gelarkan, merupakan kondisi awal yang harus segera kita koreksi kalau kita memang bertekad untuk melestarikan swasembada pangan. Menhadapi tugas tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang sebagaimana sudah dicantumkan dalam buku Repelita V, yang khusus untuk kedelai ditambah lagi dengan sasaran khusus percepatan peningkatan produksi kedelai karena importnya terus meningkat, kita benar-benar dihadapkan dengan misi yang berat dan pelik. Secara kuantitatif dan kualitatif sasaran yang harus kita capai tahun 1991 ini hanya mungkin dapat kita capai apabila kita mampu memanfaatkan peluang yang sempit MT 1990/1991 ini dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya dan MT. 1991 berhasil kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin dengan sasaran ganda (padi dan kedelai) yang kita utamakan.

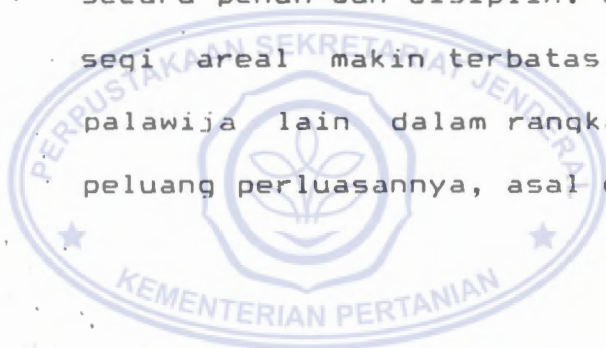
Sebagaimana sudah kita ketahui dan kita alami bersama, hujan dalam MT 1990/1991 ini datangnya terlambat 1 - 2 bulan.



Ini berarti bahwa kita tidak bisa mengharapkan produksi dari tambahan areal (karena kemungkinan besar malah areal panennya akan lebih kecil dari tahun yang lalu dan dari sasaran). Peningkatan produksi padi MT 1990/1991 hanya mungkin kita capai dari peningkatan mutu intensifikasi yang akan memberikan hasil per hektar yang lebih tinggi. Ini berarti tambahan produksi padi itu harus kita capai dari peningkatan mutu intensifikasi pada hamparan Supra Insus, Insus paket D dan perluasan Insus paket C.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Untuk bahan penjabaran rencana operasional yang dapat memanfaatkan sumber daya lahan dan iklim secara optimal dalam tahun 1991 ini pada kesempatan ini saya sampaikan informasi yang kita dapat dari BMG tentang perkiraan sifat hujan diberbagai wilayah Indonesia dalam MT 1990/1991 dan Mt 1991 yang akan datang. Dari informasi itu dapat kita simpulkan bahwa pada umumnya curah hujan itu secara kualitatif dan kuantitatif kondisinya kurang menguntungkan (kemarau lebih kering dan lebih panjang) dibandingkan dengan tahun 1989 dan tahun 1990 yang lalu. Ditinjau dari sudut inipun maka jawaban yang harus kita tampilkan sebagai respons terhadap kondisi lingkungan dan iklim yang kurang menggembirakan itu adalah ilmu dan teknologi tepat guna, yaitu penerapan Sapta Usaha secara penuh dan disiplin. Sekali lagi peluang bagi padi dari segi areal makin terbatas, tapi bagi kedelai dan tanaman palawija lain dalam rangka diversifikasi akan makin besar peluang perluasannya, asal dapat dilakukan tepat waktu.



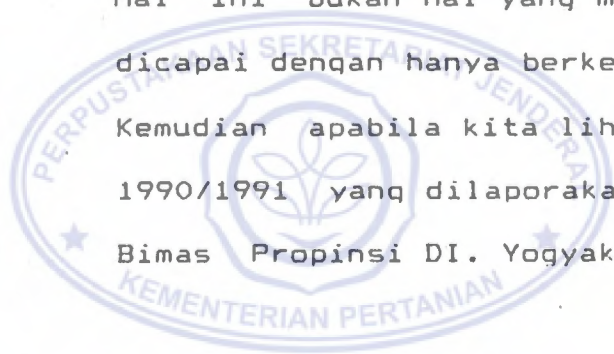
Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati.

Khusus untuk daerah Istimewa Yogyakarta menurut Ramalan III BPS tahun 1990 produksi padi mencapai 639.818 ton GKG, yang berarti hanya meningkat 2.576 ton GKG dari produksi tahun 1989 sebesar 637.342 ton GKG atau hanya meningkat 0,4 %, yang berarti di bawah peningkatan produksi padi secara Nasional sebesar 0,54 %.

Hal ini disebabkan karena di Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi penurunan luas panen padi dari tahun 1989 seluas 142.235 Ha menjadi 140.770 ha di tahun 1990, berarti menurun seluas 1.465 ha atau menurun 1,03 %.

Penurunan tersebut hanya dikompensasi oleh peningkatan produktivitas dari 44,81 ku/HA pada tahun 1989 menjadi 45,46 ku/ha pada tahun 1990, berarti hanya meningkat 0,65 ku/ha atau 1,45 %. Perlu kita ketahui bersama bahwa untuk tetap lestarnya swasembada beras tahun 1991 produksi Nasional harus mencapai 46,451 juta ton GKG dan sasaran produksi padi tahun 1991 untuk D.I. Yogyakarta sesuai dengan SK. Mentan No. 14/SK/Mentan/Bimas/XII/1990 sebesar 710.800 ton GKG dengan luas panen 142.683 Ha dan produktivitas 49,82 ku/ha. Berarti DI.Yogyakarta harus meningkatkan produksi padi dari produksi tahun 1989 sebesar 70.882 ton GKG atau 11,08 %. Hal ini bukan hal yang mudah dan tidak mungkin akan bisa dicapai dengan hanya berkerja secara rutin.

Kemudian apabila kita lihat keragaan intensifikasi padi MT. 1990/1991 yang dilaporkan oleh Sekretariat Pembina Harian Bimas Propinsi DI. Yogyakarta keadaan s/d 30 November 1990



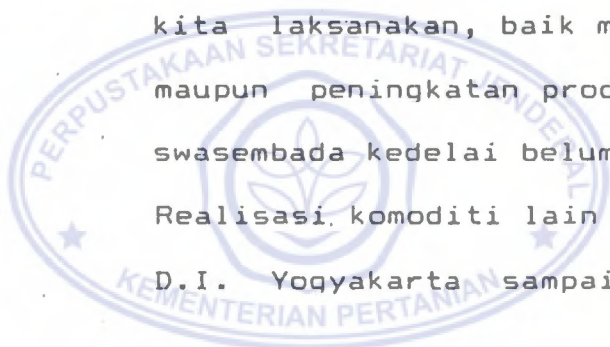
realisasi intensifikasi padi baru mencapai 48.810 Ha yang berada 9.387 Ha dibawah MT.1989/1990 pada periode yang sama. Untuk produksi kedelai tahun 1990 mencapai 67.718 ton biji kering yang berarti naik 2.347 ton biji kering dibanding produksi tahun 1989 sebesar 65.371 ton biji kering, atau naik 3,59 %. Kenaikan tersebut diakibatkan oleh kenaikan luas panen dari tahun 1989 seluas 54.203 Ha menjadi 55.112 Ha pada tahun 1990 berarti naik 909 Ha atau 1,68 %, disamping juga dari kenaikan produktivitas sebesar 0,23 ku/ha.

Walaupun peningkatan produksi kedelai tahun 1990 di Yogyakarta cukup menggembarakan bukan berarti tidak ada tantangan. Meningkat mundurnya waktu tanam padi MT. 1990/1991 sehingga apabila tidak diambil langkah-langkah khusus dan konkrit ada kemungkinan beberapa areal indeks pertanamannya akan turun dan ada kemungkinan yang tergeser (yang hilang) pertanaman kedelai.

Bila kita lihat realisasi tanam intensifikasi kedelai MT. 1990/1991 yang dilaporkan oleh Sekretariat Pembina Harian Bimas Daerah Istimewa Yogyakarta s/d 30 November 1990 baru mencapai 13.227 Ha atau 28,51% dari sasaran seluas 46.400 Ha. Realisasi ini jauh dibawah realisasi MT. 1989/1990 pada periode yang sama seluas 44.774 Ha atau 99,4 % dari sasaran seluas 45.000 Ha.

Disamping itu upaya peningkatan produksi kedelai harus terus kita laksanakan, baik melalui peningkatan areal pertanaman maupun peningkatan produktivitas, mengingat sampai saat ini swasembada kedelai belum bisa kita capai.

Realisasi komoditi lain yang diprogramkan melalui Bimas untuk D.I. Yogyakarta sampai dengan 30 November 1990 juga masih



perlu mendapat perhatian yang serius dari kita semua.

Realisasi tersebut adalah sbb. :

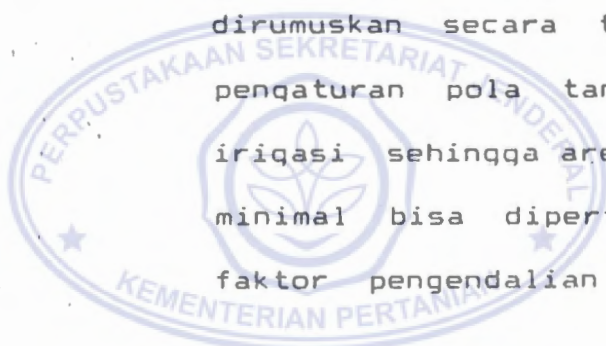
- Intensifikasi jagung MT. 1990/91 baru mencapai 1.406 Ha atau 2,7 % dari sasaran 52.000 Ha.
- TRI MTT. 1990/91 mencapai 5.423 Ha atau 90,38 % dari rencana 6000 Ha.
- Intensifikasi Ayam Bukan Ras (INTAB) TA. 1990/91.
Vaksinasi strain F baru mencapai 116.405 dosis atau 7,76 % dari rencana 1.500.000 dosis.
Vaksin strain K baru mencapai 176.768 dosis atau 11,768 % dari rencana 1.500.000 dosis.
- Intensifikasi mina padi TA. 1990/91 realisasinya 0 dari rencana 600 Ha.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati.

Untuk menghadapi kondisi dan tantangan-tantangan tersebut dalam upaya pencapaian sasaran produksi padi dan kedelai tahun 1991 di D.I. Yogyakarta tentunya saudara-saudara sekalian yang mengetahui kiat - kiat atau terobosan operasional yang harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah/wilayah kerjanya masing-masing.

Walaupun demikian kami ingin memberikan sumbangan pemikiran untuk mendapatkan perhatian saudara-saudara sebagai berikut :

1. Dengan mundurnya waktu tanam MT. 1990/91 agar segera dirumuskan secara terpadu kebijaksanaan Gubernur untuk pengaturan pola tanam dan optimalisasi pemanfaatan air irigasi sehingga areal panen padi dan kedelai tahun 1991 minimal bisa dipertahankan dengan tetap mengindahkan faktor pengendalian hama secara terpadu. Dan yang lebih



diutamakan lagi adalah peningkatan mutu intensifikasi, sehingga semua pertanaman padi bisa mencapai tingkat produktivitas yang tinggi (Supra Insus, Insus paket D, Insus paket C dan Insus padi gogo).

2. Mengerahkan seluruh potensi aparat penyuluhan, pelayanan sarana produksi dan kredit melalui simpul-simpul koordinasi dimasing-masing tingkatan dibawah kepemimpinan Kepala Daerah/Kepala Wilayah yang sekaligus sebagai penggerak utama di wilayahnya.

Pengerahan potensisi tersebut kiranya dapat diwujudkan dalam :

- a. Gerakan penyuluhan pertanian sehingga petani/kelompok-tani mau menerapkan unsur-unsur teknologi produksi yang direkomendasikan. Dilaksanakan oleh para penyuluh dan didukung oleh Satpem dan Satpel Bimas.
- b. Gerakan pelayanan saprodi sehingga kebutuhan sarana produksi yang diperlukan untuk menerapkan teknologi usahatani dapat terpenuhi secara 6 tepat.

Dilaksanakan oleh unsur-unsur pelayanan dan dipantau secara terus menerus oleh Satpem dan Satpel Bimas melalui simpul-simpul koordinasi dimasing-masing tingkatan.

- c. Gerakan pelayanan KUT, sehingga petani/kelompok-tani yang memerlukan tambahan modal untuk melaksanakan intensifikasi usaha taninya dapat terlayani dengan baik. Karena bila dilihat dari data tunggakan KUT Musim tanam sebelumnya tidak menjadi hambatan untuk menyalurkan KUT, tetapi penyaluran KUT MT. 1990/1991 masih nihil.

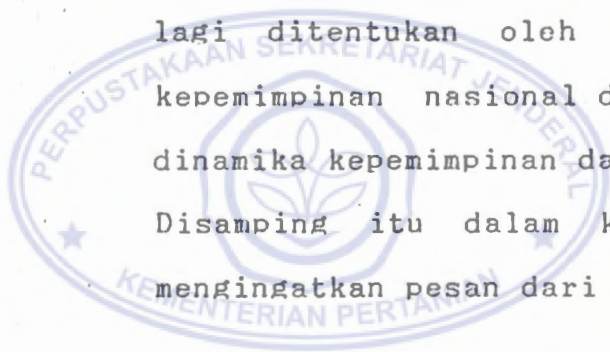


Dalam pelaksanaan upaya-upaya tersebut tentu akan dihadapi berbagai permasalahan dan kami harapkan semua permasalahan dapat diatasi secara terkoordinasi sehingga sasaran produksi tahun 1991, khususnya padi dan kedelai dapat tercapai.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Produksi pangan adalah hasil dari sistem produksi pangan nasional, yang pada saat ini sudah mencapai bentuk dan formatnya yang cukup handal. Ini berarti berbagai sub sistem yang menjadi perangkat dan bagian dari sistem sudah berkerja sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam suatu tatanan dan tata hubungan kerja yang menjamin sinkronisasi dan koordinasi yang serasi.

Perangkat kebijakan politik, ekonomi, teknologi prasarana dan adminitrasi benar-benar telah ada dalam kondisi yang dibutuhkan dan menggerakkan para petani. Tetapi sistem ini tidak sama kehandalannya diberbagai sub sistem wilayah, karena itu kita saksikan sekarang masih terdapat variabilitas produktivitas antar wilayah yang cukup tinggi. Karena proses pemantapan pengembangan sistem ini wilayah demi wilayah sangat tergantung dari unsur manusia dan kegiatannya yang khas harus dikembangkannya sendiri dan setempat (karena kepemimpinan dan kualitas manusia tidak bisa didatangkan dari luar). maka pada saat ini keberhasilan program pangan tidak lagi ditentukan oleh aktivitas kepemimpinan pada eselon kepemimpinan nasional dan propinsi, tetapi ditentukan oleh dinamika kepemimpinan dan sistem ditingkat kabupaten kebawah. Disamping itu dalam kesempatan yang baik ini kami ingin mengingatkan pesan dari Bapak Presiden RI. kepada kita semua



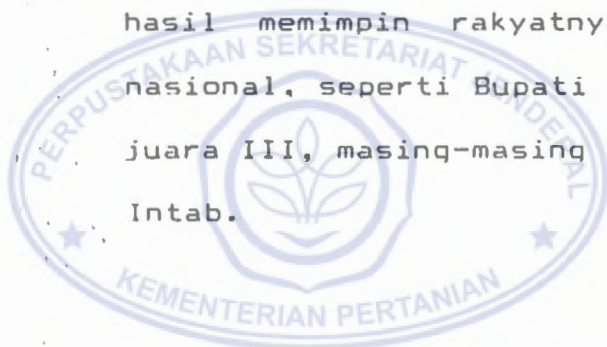
yang disampaikan beberapa waktu yang lalu sebagai berikut :

pertama : Swasembada beras harus dapat dipertahankan dan dilestarikan.

kedua : Produksi kedelai agar ditingkatkan melalui perluasan areal tanam dan peningkatan penerapan teknologinya.

ketiga : Kredit usahatani (KUT) sebagai salah satu sumber modal usahatani harus disalurkan secara intensif, demikian juga pengembaliannya sehingga tidak mengganggu penyaluran untuk musim tanam berikutnya.

Oleh karena itu pada tempatnyalah, apabila kami saat ini meminta saudara-saudara Bupati memimpin aparatur Satuan Pelaksana Bimas di daerah secara dinamik dan sistematik. Agar makin lama keberhasilan program itu makin ditentukan oleh sistem dan bukan oleh orang-orangnya semata-mata, kami meminta dengan sungguh-sungguh agar para Bupati memusatkan perhatian kepada perkembangan organisasi dan mekanisme kerja berbagai Pos Simpul koordinasi (Posko A1, A2, A3, B1, B2, I, II dan III). Maka metode Opsus kami minta agar benar-benar diamalkan sebagai normalisasi ketatalaksanaan dan kepemimpinan operasional lapangan. Pengamatan kami selama ini menunjukkan bahwa para Bupati yang selalu memantau dan sering berada di lapangan sangat besar peluangnya untuk berhasil memimpin rakyatnya berpartisipasi dalam program pangan nasional, seperti Bupati Bantul dan Gunung Kidul yang meraih juara III, masing-masing untuk program Insus Pola Tanam dan Intab.



Meningat waktunya yang sempit dimana MT. 1990/91 tinggal lebih kurang dua setengah bulan lagi maka kami harapkan kesempatan yang baik sekarang ini dapat dimanfaatkan untuk merumuskan langkah-langkah operasional yang diperlukan, sehingga sepulangnya dari pertemuan ini saudara-saudara sudah dapat langsung mengoperasionalkan langkah-langkah tersebut . Saya yakin bahwa dengan tekad yang kuat dan kerja keras dari saudara-saudara sekalian, sasaran - sasaran peningkatan produksi pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dapat dicapai.

Atas perhatian saudara-saudara kami ucapkan terima kasih.
Wasálamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pertanian



(Ir. Wardoyo)



11





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN MENTERI PERTANIAN
PADA UPACARA PEMBERIAN HADIAH/PENGHARGAAN
PRESIDEN PADA KELOMPOKTANI PEMENANG
PERLOMBAAN INSUS POLA TANAM, SUPRA INSUS,
TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI, KELOMPOKTANI TERNAK
DAN SATUAN PEMBINA BIMAS PEMENANG PERLOMBAAN
TINGKAT KARYA SIMBINGAN INTENSIFIKASI
DI ISTANA NEGARA
TANGGAL 14 JANUARI 1991

Bapak Presiden beserta Ibu Soeharto yang kami hormati,
Yang terhormat Saudara-saudara Menteri beserta Isteri,
serta para hadirin yang kami hormati.

Assalamu'alaikum Warokhmatullohi Wabarokatuh.

Dengan iringan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami menghaturkan terima kasih kepada Bapak Presiden beserta Ibu Soeharto, Saudara-saudara Menteri beserta Isteri serta Saudara-saudara sekalian atas kehadirannya pada upacara penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba intensifikasi pertanian hari ini.



Selanjutnya, perkenankanlah kami melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa pada saat ini telah hadir para kelompok tani yang berprestasi dalam meningkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian usaha tani secara dinamis sehingga berhasil menjadi juara tingkat Nasional pelaksanaan Intensifikasi pertanian tahun 1989/1990.

Selain itu, hadir pula Satuan Pembina Bimas Jawa Tengah yang telah berhasil menjadi pemenang perlombaan Tingkat Karya Bimbingan Intesifikasi tahun 1989/1990 dan meraih piala bergilir Presiden Republik Indonesia.

Secara terinci anggota kelompok tani, pembina dan pembimbing yang hadir adalah sebagai berikut :

1. Wakil-wakil kelompok tani "Tunggul Makmur" dari desa Tunggul Wulung (Wilayah KUD Sumber Jaya) Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur, sebagai pemenang pertama perlombaan intensifikasikhusus pola tanam tahun 1989/1990, beserta wanita tani dan pembinanya sebanyak 38 orang.
2. Wakil-wakil kelompok tani "Harapan Tani" dari desa Jatidi (Wilayah KUD Abdi Tani) Kabupaten Probolinggo Propinsi Jawa Timur, sebagai pemenang pertama perlombaan Tebu Rakyat Intensifikasi Musim Tanam tahun 1988/1989, beserta wanita tani dan pembinanya sebanyak 32 orang.



3. Para kontaktani pengelola Himpunan Supra Insus Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah sebagai pemenang pertama perlombaan Supra Insus tahun 1990 beserta beberapa petani anggota dan pembinanya sebanyak 31 orang.
4. Wakil-wakil kelompok tani "Bina Warga" dari desa Kedung Wuluh (Wilayah KUD Padaherang III) Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat sebagai juara pertama perlombaan kelompok tani ternak tahun 1990 beserta pembinanya sebanyak 16 orang.
5. Wakil-wakil penyuluh pertanian lapangan, Sinder kebun, Kepala BPP, Pengurus KUD yang telah membimbing dan bekerjasama dengan para pemenang pertama dari tiap jenis perlombaan sebanyak 19 orang.
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/ Ketua Satwa Pembina Bimas Propinsi Jawa Tengah sebagai pemenang pertama perlombaan Tingkat Karya Bimbingan Intensifikasi, tahun 1989/1990 beserta anggotanya sebanyak 11 orang.
7. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/ Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Barat dan juga Propinsi Jawa Tengah yang mendampingi para kelompok- tani pemenang I.



8. Para kontaktani yang mewakili pemenang II, III, Harapan I dan harapan II dari setiap jenis lomba beserta para Pembinaanya termasuk para Bupati Kepala Daerah Tingkat II selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten dari pemenang I sampai dengan Harapan II.

Jumlah seluruh anggota kelompokani beserta Pembinaanya yang menghadap Bapak Presiden pada hari ini adalah 330 orang.

Bapak Presiden dan Ibu Soeharto yang kami hormati,

Tujuan utama penyelenggaraan berbagai jenis perlombaan intensifikasi pertanian tersebut dimuka, tidak lain adalah untuk merangsang tumbuh dan berkembangnya kemampuan kelompokani dalam bekerjasama menerapkan Sapta Usaha Pertanian. Kerjasama tersebut tidak terbatas dalam satu kelompok saja tetapi juga antar kelompok dalam wadah KUD dan dengan Lembaga-lembaga lainnya sehingga pelaksanaan inovasi-inovasi sosial, ekonomi dan teknologi dalam berusaha tani dapat semakin berkembang.

Disamping itu juga untuk mendorong peningkatan kemampuan aparat Satuan Pembina dan Satuan Pelaksana Bimas dalam mengkoordinasikan bimbingan dan pelayanan sehingga pelaksanaan pembangunan pertanian benar-benar bisa terpadu baik dilihat dari segi wilayah, komoditas maupun usaha tani.



Bapak Presiden dan Ibu Soeharto yang kami hormati,

Sehubungan dengan kegiatan itu, kami mohon dengan hormat perkenan Bapak Presiden untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang tingkat Nasional perlombaan Insus Pola Tanam tahun 1989/1990, lomba Tebu Rakyat Intensifikasi Musim Tanam tahun 1988/1989, lomba Supra Insus tahun 1990, lomba Intensifikasi Ternak tahun 1990 dan menyampaikan Piala Bergilir Presiden Republik Indonesia kepada Satuan Pembina Bimas Jawa Tengah sebagai pemenang Lomba Tingkat Karya Bimbingan Intensifikasi tahun 1989/1990.

Selanjutnya kami mohon pula perkenan Bapak Presiden untuk menyampaikan amanat kepada kami semua yang hadir dan terutama kepada segenap masyarakat tani di Pedesaan.

Kepada Ibu Soeharto, kami mohon kiranya Ibu berkenan pula menyampaikan penghargaan kepada Wanita Tani dari kelompok tani Juara. Harapan kami dengan penghargaan Ibu tersebut maka para Wanita Tani semakin terdorong semangatnya untuk meningkatkan peranannya dalam pembangunan pertanian di pedesaan dewasa ini.

Handwritten signature



Demikian laporan kami, atas perkenan Bapak Presiden beserta Ibu Soeharto kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warokhmatullohi Wabarokatuh.

Menteri Pertanian,



Wardoyo



12





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGARAHAN MENTERI PERTANIAN

PADA

DIKLAT KADER FUNGSIONAL TANI-NELAYAN

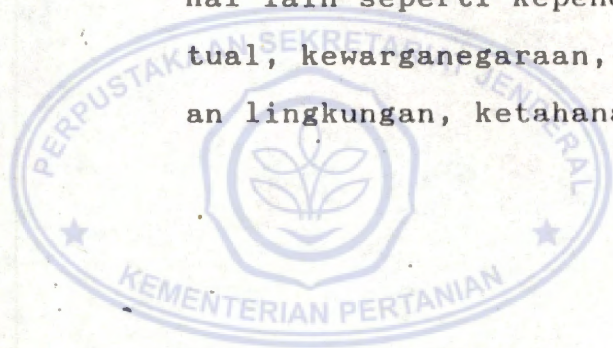
TANGGAL 14 JANUARI 1991

Yang terhormat Saudara Para Anggota DPP Golkar,
Para peserta DIKLAT KADER FUNGSIONAL TANI-NELAYAN yang saya
cintai,

Assalamualaikum Warochmatullohi Wabarokatuh,

Pertama-tama marilah kita penjatkan puji dan syukur ke-
hadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya kita sekalian dapat
berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat wal afiat.
Dengan modal kesehatan ini kita memiliki kesempatan melaksa-
nakan tugas-tugas kita masing-masing, karena sebagai bangsa
yang sedang giat membangun, kita dituntut bekerja keras me-
laksanakan tugas pembangunan.

Pembangunan adalah usaha atau proses terjadinya peru-
bahan secara sadar dan terencana guna mencapai perbaikan ke-
sejahteraan atau kualitas hidup masyarakat. Perubahan-
perubahan yang dikehendaki dalam program pembangunan bukan
semata-mata perubahan ekonomi akan tetapi juga mencakup hal-
hal lain seperti kependudukan, sosial politik, mental spiri-
tual, kewarganegaraan, etos kerja, sosial budaya, kelestari-
an lingkungan, ketahanan sosial, disiplin nasional dan lain



sebagainya. Pembangunan juga harus dinamis dalam arti aktual sesuai dengan masa dimana pembangunan itu dilaksanakan dan harus dapat dirasakan manfaatnya untuk masa depan. Pembangunan pertanian pada periode Pembangunan Jangka Panjang ke I telah diarahkan untuk dapat mewujudkan pertanian yang maju, efisien dan tangguh. Tujuan pembangunan pertanian diantaranya adalah meningkatkan produksi berbagai hasil pertanian, meningkatkan pendapatan petani-nelayan, memantapkan swasembada pangan khususnya beras dengan meningkatkan nilai gizi masyarakat, menyediakan bahan baku industri dalam negeri serta meningkatkan devisa. Selanjutnya dalam periode pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun ke II pembangunan pertanian ditujukan untuk membentuk sumberdaya manusia pertanian yang berkualitas, yang mampu lebih meningkatkan lagi produksi dan produktifitas pertanian guna meningkatkan pendapatan devisa negara, memenuhi kebutuhan dalam negeri baik bagi masyarakat maupun kepentingan pembangunan sektoral, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani-nelayan dan keluarganya.

Sumberdaya manusia yang utama dalam pembangunan disektor pertanian adalah petani-nelayan. Dengan kata lain, pembangunan pertanian tidak akan terwujud tanpa peran serta petani-nelayan.

Keperan sertaan petani-nelayan dalam pembangunan pertanian harus dilandasi oleh kesadaran dan kesukarelaan. Keperansertaan harus direalisasikan kedalam kegiatan nyata sesuai dengan bidangnya yaitu pertanian.



Didalam merealisasikan keperan sertaan kedalam kegiatan-kegiatan yang nyata, petani-nelayan memerlukan 3 unsur pokok yaitu : kesempatan, kemampuan dan kemauan berperanserta.

Kesempatan diartikan sebagai kesempatan untuk berpartisipasi antara lain dalam bentuk kesempatan memperoleh informasi, kesempatan memanfaatkan sumberdaya dan teknologi, serta kesempatan berorganisasi dan mengembangkan kepemimpinan.

Kemampuan diartikan sebagai kemampuan untuk berpartisipasi antara lain dalam bentuk kemampuan mencari dan memanfaatkan peluang-peluang untuk memperbaiki hidupnya, kemampuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan menerapkan inovasi dan teknologi, serta kemampuan memecahkan masalah dengan menggunakan sumberdaya dan peluang yang tersedia secara optimal.

Kemauan diartikan sebagai kemauan untuk berpartisipasi yang didasari oleh sikap positif yaitu kemauan meninggalkan nilai-nilai yang menghambat, kemauan untuk maju dan tidak lekas puas diri, kemauan untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan, serta kemauan untuk mandiri dan percaya atas kemampuannya.

Pemenuhan ketiga unsur pokok partisipasi tersebut perlu diciptakan agar gerakan pembangunan oleh masyarakat khususnya petani-nelayan dapat tumbuh dan berkembang secara membudaya dan berkesinambungan.



Saudara-saudara hadirin sekalian,

Dengan tekad kebersamaan dalam pembangunan, kita ter-
panggil untuk membantu petani-nelayan dalam meningkatkan ke-
mampuan dan kemandiriannya mengembangkan usaha-taninya baik
dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarganya, kepentingan ma-
syarakat maupun kepentingan negara.

Dalam sistem pembinaan, melalui kegiatan penyuluhan per-
tanian, petani-nelayan dibantu dan dibimbing untuk dapat
mengorganisasikan diri kedalam kelompok-kelompok tani-
nelayan yang dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari,
oleh dan untuk mereka sendiri atas dasar hasil musyawarah
kelompok yang disebut Kontaktani-Nelayan.

Peningkatan kemampuan kelompok tani-nelayan diantaranya
berupa kemampuan manajerial, terutama menyangkut peningkat-
an a) kemampuan kepemimpinan kontaktani-nelayan untuk menja-
min tumbuh dan berkembangnya dinamika kelompok tani-nelayan,
termasuk menggalang kerjasama antar anggota kelompok b) ke-
mampuan melaksanakan tertib organisasi, administrasi dan di-
siplin kelompok c) kemampuan mengembangkan kegiatan-kegiatan
pertemuan kelompok guna menetapkan kesepakatan dalam pengam-
bilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan pe-
nilaian sehubungan dengan pengelolaan usahatani nelayan.

Dalam rangka meningkatkan peranserta petani nelayan da-
lam pembangunan pertanian dan meningkatkan kesejahteraannya
maka Kelompok tani-nelayan menerapkan Tri fungsi kelompok
tani-nelayan yaitu 1) sebagai kelas belajar 2) sebagai unit



produksi dan 3) sebagai wahana kerjasama baik antar anggota kelompok, antar kelompok satu dengan kelompok lainnya maupun antara kelompok tani-nelayan dengan pihak lain seperti lembaga ekonomi/koperasi, perbankan, pengusaha baik pemerintah maupun swasta dan lain-lain.

Peranan Kontaktani Nelayan telah diyakini keampuannya dalam pembangunan pertanian. Ada empat peranan mereka yang dikenal dengan Catur peranan kontaktani-nelayan yaitu sebagai 1) pemimpin kelompok tani-nelayan yang mengorganisir, menggerakkan membimbing dan mengarahkan kegiatan kelompoknya 2) ketua kelas belajar yang menampung, menggali, merumuskan dan menyampaikan keperluan belajar para anggotanya kepada penyuluh pertanian selaku pembina 3) pembaharu dan pelopor pembangunan di desanya dengan menyebarkan dan menerapkan teknologi baru baik dalam usahanya sendiri maupun dilingkungannya 4) mitra kerja pemerintah dalam kegiatan penyuluhan pertanian yang dicirikan dengan saling memberi informasi yang sekaligus berperan sebagai penyuluh pertanian swakarsa.

Unsur yang mendasar didalam pembinaan petani-nelayan adalah peningkatan kemampuan petani-nelayan untuk bekerjasama dengan berbagai pihak didalam penerapan teknologi/inovasi sosial, ekonomi untuk menuju kearah pengelolaan usahatani-nelayan yang kuat dan efisien. Keterkaitan usaha antara sektor swasta/pengusaha dengan petani nelayan perlu dikembangkan kearah kerjasama dalam ruang lingkup agrobisnis yang sehat dan saling menguntungkan.



Hadirin yang saya hormati,

Pemasaran hasil pertanian merupakan salah satu masalah dalam pengembangan agribisnis saat ini. Dalam agribisnis penanganan komoditas perlu dilakukan secara tuntas sejak proses produksi pra panen sampai dengan pasca panen dan pemasarannya. Ini berarti ada tiga sub sistem yang secara tuntas harus ditangani secara serempak yaitu sub sistem penyediaan sarana produksi, sub sistem pengolahan hasil dan sub sistem pemasaran. Oleh karenanya guna meningkatkan daya saing agribisnis, perlu adanya informasi pasar yang luas dan berkesinambungan, agar dapat memberikan signal yang tepat pada petani, pedagang dan eksportir mengenai kuantitas, kualitas dan waktu serta harga yang tepat dari komoditi yang diusahakan.

Dewasa ini dalam sub sektor agro industri masih terdapat kesenjangan antara industri pengolahan dan petani penghasil bahan baku. Lemahnya kaitan antara industri pengolahan dan petani penghasil bahan baku merupakan salah satu penyebab belum optimalnya pengembangan industri pengolahan terhadap peningkatan produksi pertanian dan pendapatan petani penghasil bahan baku.

Di bidang ketenagakerjaan, meskipun dewasa ini (tahun 1990) sektor pertanian telah menyerap angkatan kerja yang cukup tinggi (> 50%), dalam Repelita V ini sektor pertanian masih diharapkan mampu menyerap tambahan angkatan kerja sebesar 4,059 juta. Penanganan masalah kesempatan kerja sektor pertanian berjalan seiring dengan pengembangan sektor pertanian, baik pada pra panen maupun pasca panen. Dalam pra pa-



nen, tambahan kesempatan kerja ini dimulai sejak perluasan jaringan irigasi, adaptasi dari varietas-varietas, penggunaan pupuk, pola usaha tani baik pada lahan kering maupun basah dan beberapa kegiatan lainnya. Tetapi dari sisi ini untuk masa mendatang sudah tidak besar lagi tambahannya. Oleh karenanya diperlukan adanya percepatan pengalihan pada kegiatan agrobisnis, mulai dari penyediaan bahan input sampai dengan prosesing hasil-hasil pertanian. Hal ini mutlak harus dilaksanakan supaya dapat terjadi tambahan kesempatan kerja, sekaligus untuk menjaga agar nilai tambah lebih banyak dinikmati oleh para petani.

Perlu kiranya dicatat bahwa usaha peningkatan produksi pertanian dewasa ini maupun di masa mendatang dihadapkan pada masalah penggunaan sumber daya alam yang melebihi potensi lestari, pembangunan non pertanian yang kurang memperhatikan pola tata ruang, banyaknya limbah industri dan rumah tangga, yang semuanya sebagai menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya alam. Apabila hal ini tidak ditangani secara terpadu antar berbagai instansi terkait tidak mustahil apabila kemerosotan kualitas sumber daya alam akan menjadi masalah yang lebih rawan di masa mendatang.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Skala usahatani petani-nelayan di Indonesia umumnya kecil-kecil. Karena itu perlu dibina secara terencana dan menyatu dalam rangka mencapai skala ekonomi yang efisien dan menguntungkan, misalnya wadah koperasi. Sehingga dengan



berkoperasi petani-nelayan memiliki kedudukan yang kuat dalam kontak bisnis dengan pihak lain.

Pembinaan kelompok petani-nelayan dilaksanakan sejalan dengan pembangunan koperasi yaitu bahwa dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Koperasi perlu didorong pengembangannya agar mampu melaksanakan fungsinya sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang mandiri dan tumbuh berakar dalam masyarakat. Karenanya kehidupan berkoperasi dari petani-nelayan perlu mendapat perhatian kita semua untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Keberhasilan pembangunan koperasi dapat ditentukan oleh makin meluas dan meratanya partisipasi masyarakat pedesaan, khususnya petani-nelayan. Oleh karena itu pembangunan KUD memerlukan upaya guna meningkatkan partisipasi masyarakat pedesaan khususnya para petani-nelayan yang didasari atas kesadaran, kegairahan serta kemampuan didalam berkoperasi.

Hubungan melembaga Kelompok Tani-nelayan dengan KUD memberi gambaran adanya keterkaitan fungsional antara Kelompok tani-nelayan dan KUD sebagai lembaga masyarakat dipedesaan yang menjadi pilar penyangga utama sistem ekonomi pedesaan yang dinamis sebagai bagian integral dari sistem ekonomi nasional.

Upaya untuk memantapkan hubungan melembaga kelompok tani-nelayan dengan KUD melalui sistem dorong dan tarik yaitu mendorong agar para anggota kelompok tani-nelayan secara



sadar menjadi anggota dan berperan aktif dalam KUD, serta meningkatkan kemampuan KUD dalam melayani kebutuhan dan mengembangkan usaha para anggota sehingga menarik bagi anggota.

Pembinaan kerjasama antara usahatani-nelayan dengan pihak lain menuju skala ekonomi yang saling menguntungkan, dikembangkan melalui Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), Perusahaan Pengelola dan Perusahaan Penghela yang telah dapat kita lihat keberhasilannya dalam rangka meningkatkan peran serta petani-nelayan dalam pembangunan pertanian.

Demikian pula berbagai upaya pemerintah untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesempatan serta partisipasi petani-nelayan dalam pembangunan telah dilaksanakan melalui upaya-upaya terobosan dengan input dan pengelolaan khusus antara lain seperti pola Opsus, Pembinaan Petani Nelayan Kecil, Petani Nelayan di Daerah Transmigrasi, Petani Nelayan di Daerah Pantai, memacu pembangunan pertanian di wilayah Indonesia bagian timur dan lain-lain. Upaya terobosan akan lebih ditingkat lagi dalam tahun 1991/1992 dan tahun-tahun selanjutnya, dengan berbagai program terobosan antara lain Program swasembada kedelai melalui upaya intensifikasi, Program pengembangan horti-kultura pada sentra sentra produksi yang ada maupun bukaan baru, Program Pembinaan Petani/Wanita tani nelayan kecil/berpenghasilan rendah melalui pembinaan Usaha Bersama dengan sistem perkreditan, Program Pengembangan Lahan Kering dan Lahan Pasang Surut pada daerah transmigrasi, Program Pembangunan Perikanan Terpadu di daerah pantai dan waduk melalui paket-paket bantuan prasarana, peralatan dan sarana produksi, Program Pengembangan Perikanan



skala kecil, pengembangan budidaya laut, dan Program Pengembangan Aneka Ikan. Program-program terobosan diupayakan agar dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Saudara-saudara hadirin sekalian,

Penyelenggaraan DIKLAT KADER FUNGSIONAL PETANI-NELAYAN ini merupakan realisasi dari keperan sertaan Golkar dalam pembangunan yaitu mempersiapkan kader-kader pembangunan khususnya di bidang pertanian yang berkualitas, baik fisik maupun mental ideologis sehingga mereka akan lebih mampu menikmati hak serta sadar melaksanakan kewajibannya selaku warga-negara dari negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai kader Golkar kita telah mempunyai pendirian yang sama dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat. Pendirian kita ialah untuk tetap mengacu kepada Pancasila, UUD 1945, GBHN, Kebijakanaksanaan Pemerintah, Program Umum Golkar serta Kebijakanaksanaan Politik yang ditetapkan oleh DPP Golkar. Dengan berpedoman kepada 6 (enam) konsepsi dasar ini maka kader-kader Golkar akan mampu menghayati dan menghadapi dinamika kehidupan politik dilapangan. Penyelenggaraan DIKLAT ini penting artinya yaitu untuk menyerap dan menjabarkan pedoman-pedoman tadi kedalam kegiatan nyata pembangunan.

Selaku kader fungsional kita dituntut untuk meningkatkan kepekaan terhadap masalah-masalah sosial dan masalah-masalah pelaksanaan pembangunan, yang selanjutnya diharapkan



mampu menterjemahkan kedalam rencana kerja dan langkah langkah yang diperlukan untuk menolong petani-nelayan dipedesaan keluar dari keterbelakangan, keterbatasan kehidupannya serta kebodohan.

Sebagai kader fungsional tani dan nelayan Saudara-saudara perlu mengetahui seluk-beluk penyuluhan pertanian, sehingga dapat memahami sistem pembinaan yang dilakukan oleh Departemen Pertanian dengan seluruh jajarannya terhadap masyarakat, dan para petani beserta keluarganya.

Penyuluhan pertanian pada tahun 1990 dilaksanakan oleh para penyuluh pertanian yang berjumlah 35.378 orang, terdiri dari tenaga di lapangan, yang tersebar di desa, dan dibantu oleh Dinas-dinas Tingkat II, Tingkat I dan Lembaga-lembaga lainnya. Di samping itu kegiatan penyuluhan didukung pula oleh lembaga-lembaga penunjang seperti Balai Penyuluhan Pertanian, Balai Informasi Pertanian, Pos Keswan, tempat Pendaratan Ikan, Unit Pelaksana Proyek Perkebunan dan Balai-balai Penelitian.

Penyuluhan pertanian adalah sistem pendidikan luar sekolah di bidang pertanian untuk petani/nelayan dan keluarganya serta anggota masyarakat pertanian agar dinamika dan kemampuannya dapat memperbaiki kesejahteraannya.

Untuk mencapai efisiensi dalam penyuluhan, dilakukan dengan pendekatan melalui kelompok. Kelompok-kelompok ini yang merupakan sarana utama dari kegiatan penyuluhan pertanian, dimana para petani bekerjasama dan belajar bersama,



melalui latihan, karya wisata, sarasehan dan adanya kunjungan-kunjungan dari PPL dan PPS. Dewasa ini jumlah kelompok tani yang telah dibentuk sebanyak 244.376 kelompok dengan anggota sebanyak 19.779.109 orang. Di luar kelompok ini masih banyak kelompok-kelompok masyarakat yang dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian seperti kelompok PKK, kelompok capir dan P3A.

Di samping itu terdapat organisasi Profesi seperti HKTI, HNSI, PERHEPI, PERAGI dan lain-lain serta organisasi asosiasi seperti PAI, PERHOPTI, PMT, ASPENI dan lain-lain yang berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Peranan ini cukup besar dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan dalam memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah menyampaikan informasi-informasi tentang kebijaksanaan pemerintah kepada organisasi profesi untuk diteruskan kepada masyarakat.

Saudara-saudara hadirin sekalian,

Pada hakekatnya semua pembangunan berlokasi pada tingkat desa. Karenanya masalah-masalah yang dihadapi yang perlu segera ditangani sebenarnya adalah masalah pembangunan yang ada di tingkat desa.

Maka upaya pemecahan masalah yang dituangkan kedalam perencanaan untuk masa mendatang ialah perencanaan yang merupakan jawaban atas aspirasi dan masalah nyata serta kepentingan riil petani-nelayan dan masyarakat pedesaan. Perencanaan dari bawah perlu dibudayakan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional secara menyeluruh.



Proses meningkatkan ketangguhan lembaga pedesaan melalui mekanisme perencanaan dari bawah tidak akan berjalan lancar tanpa kehadiran kader yang memiliki wawasan cukup, terampil, cakap dan berwatak terpuji. Oleh karena itu, sudah pada tempatnyalah bila Kader-Kader Fungsional Tani Nelayan mempersiapkan diri menjadi fungsional dalam kepemimpinan tani-nelayan di daerahnya nanti. Kita harus siap memperjuangkan hak dan peran petani dalam kegiatan pembangunan.

Saya telah menguraikan kegiatan pembinaan petani-nelayan sehubungan dengan keberadaan kader-kader fungsional petani-nelayan dari Golkar. Mudah-mudahan uraian ini dapat memberi kejelasan kepada kita sekalian tentang peranan dan hubungan timbal balik diantara keduanya. Kita tentu saja mengharapkan bahwa kader-kader ini memiliki peranan yang sejalan dengan Kontaktani didalam masyarakatnya nanti, yaitu :

1. Menjadi pemimpin yang mengorganisir, menggerakkan, membimbing dan mengarahkan kegiatan masyarakat lingkungannya.
2. Menjadi andalan dalam kegiatan-kegiatan peningkatan pengetahuan, wawasan maupun ketrampilan.
3. Menjadi pembaharu dan pelopor pembangunan didesanya melalui kegiatan penyebaran, penerapan teknologi baru baik dalam usahanya sendiri maupun dilingkungannya.
4. Menjadi mitra kerja pemerintah dalam upaya mendidik masyarakat dan sekaligus menjadi pelaku/guru/teladan bagi masyarakat lingkungannya.



Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Pemilu 1992 telah diambang pintu. Seyogyanyalah kita selaku kader-kader Golkar telah mempersiapkan diri guna menyongsong pesta demokrasi ini. Hari pemungutan suara akan ditetapkan oleh Bapak Presiden/Mandataris MPR. Azas pemilihan umum kita adalah azas pemilihan umum yang demokratis. Dalam melakukan pemilihannya, setiap warga negara bebas dan siapa yang dipilihnya menjadi rahasia pribadi yang bersangkutan.

Tentang sasaran Golkar dalam Pemilu 1992, kita perlu memperhatikan bahwa merebut kemenangan adalah sulit tetapi akan lebih sulit lagi mempertahankannya. Maka sepatutnyalah kader-kader Golkar dengan matang mempersiapkan diri secara terarah dan terkoordinasi sedini mungkin untuk mempertahankan kemenangan itu. Hal ini didorong oleh tanggung jawab kita sebagai insan Golkar yang telah bertekad untuk meneruskan gerak pembangunan nasional. Kita harus sama-sama menjaga kesinambungan pembangunan dalam arti terus memikirkannya untuk mencari peluang melanjutkan pembangunan antara lain melalui upaya penyuksesan Pemilu 1992.

Upaya nyata dalam melaksanakan kegiatan yang terarah dan terkoordinasi antara lain ialah melalui pembinaan yang intensif bagi petani-nelayan dan keluarganya. Mereka perlu disadarkan bahwa pembangunan perlu terus dilaksanakan untuk mencapai cita-cita negara yang makmur, adil, sejahtera lahir dan bathin. Hal ini hanya dapat dicapai bila Pemilu 1992 dapat sukses.



Kontaktani-nelayan selaku tokoh masyarakat di daerahnya perlu terus dipacu untuk menjadi kader pembangunan yang berkualitas. Mereka perlu dibina untuk meningkatkan kerjasama diantara mereka sendiri, dengan anggota kelompoknya maupun dengan kelompok-kelompok tetangganya sehingga merupakan satu kesatuan yang masif yang sulit dimasuki pengaruh-pengaruh yang tidak menguntungkan bagi pembangunan.

Wanita tani-nelayan disamping perlu diberi pengertian tentang peranan mereka dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya juga perlu dibina dalam meningkatkan kesadaran pentingnya berpartisipasi dalam kesinambungan pembangunan

Pemuda tani-nelayan perlu dibina karena mereka adalah pendatang baru yang memiliki hak pilih. Mereka umumnya masih memiliki jiwa yang labil disertai gejolak jiwa muda yang masih memerlukan bimbingan kearah kedewasaan berpolitik. Karenanya pembinaan pemudatani-nelayan di pedesaan sifatnya adalah strategis. Baik bagi jangkauan jangka pendek menuju kemenangan Pemilu 1992 maupun jangka panjang selaku generasi penerus. Penggalangan pemuda tani-nelayan perlu diadakan secara hati-hati melalui program-program pendidikan baik dengan fasilitas yang diadakan oleh DPP Golkar sendiri maupun melalui kerjasama dengan berbagai fihak serta swadaya masyarakat Golkar.

Pembinaan pemuda tani-nelayan melalui jalur pendidikan formal antara lain pada Sekolah-sekolah Pertanian Pembangunan ditujukan untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang mampu menjadi petani terdidik yang mandiri untuk mengisi kesempatan



an kerja melalui pengembangan usahatani-nelayan. Pengembangan usahatani nelayan diarahkan untuk mewujudkan keterkaitan yang erat dan saling menguntungkan dalam bentuk kerjasama didalam koperasi, assosiasi dan keterkaitan usaha dengan perusahaan pertanian dan agroindustri serta sektor ekonomi lain.

Saudara-saudara hadirin sekalian,

Melalui pembinaan yang terarah dan terkoordinasi secara dini kepada petani nelayan, maka suksesnya pemilu 1992 akan berada di tangan kita, pembangunan dapat kita yakini berlanjut dan cita-cita kita menuju negara yang makmur adil sejahtera lahir dan bathin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat kita raih.

Sekian dan terima kasih.

Wasalmualaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Jakarta, 14 Januari 1991

MENTERI PERTANIAN,

Ir. Wardoyo



13

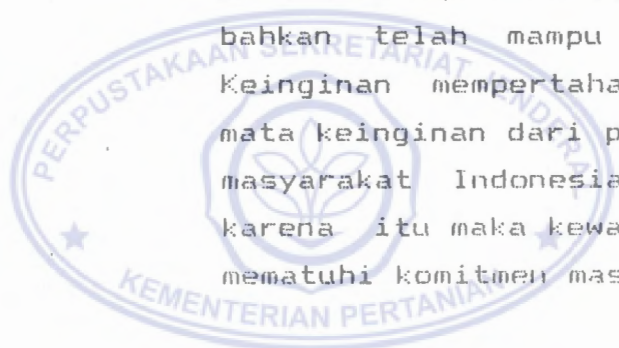




**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**POKOK-POKOK ARAHAN MENTERI PERTANIAN
PADA TEMU WICARA DENGAN KELOMPOKTANI
JUARA PERLOMBAAN INTENSIFIKASI PERTANIAN
TINGKAT NASIONAL 1989/1990**

1. Pertama sekali mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat Rachmat dan Karunianya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Selanjutnya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas keberhasilan Saudara-Saudara dalam meraih predikat juara perlombaan intensifikasi pertanian. Penghargaan ini saya sampaikan juga karena Saudara-Saudara termasuk para petani yang mau dan mampu menerapkan inovasi baru sehingga mencapai apa yang dikehendaki oleh masyarakat, pemerintah dan oleh Saudara sendiri.
2. Keberhasilan yang Saudara-Saudara raih adalah merupakan hasil jerih payah Saudara-Saudara sendiri serta peran serta dari para pembimbing Saudara-Saudara sekalian. Saya sangat mengharapkan bahwa Saudara-Saudara akan mampu mempertahankan keberhasilan ini, bahkan mampu meningkatkan kualitas dari keberhasilan ini. Wujud keberhasilan secara Nasional yang kita persembahkan kepada Nusa dan Bangsa antara lain adalah kita telah meraih Swasembada beras dan bahkan telah mampu mempertahankan predikat tersebut. Keinginan mempertahankan swasembada beras bukan semata-mata keinginan dari pemerintah, tetapi merupakan keinginan masyarakat Indonesia yang dituangkan dalam GBHN. Oleh karena itu maka kewajiban kita semua untuk memenuhi dan mematuhi komitmen masyarakat dengan pemerintah.



3. Saudara-saudara yang saya hormati, tantangan membangun pertanian dimasa-masa mendatang memang cukup berat terutama yaitu semakin menyempitnya lahan usahatani yang subur, semakin ketatnya persaingan pasar luar negeri, semakin besarnya ancaman-ancaman hama/penyakit, dan semakin kecilnya nilai tukar produk-produk pertanian. Menghadapi tantangan yang cukup berat ini diperlukan adanya ketangguhan dari petani maupun aparat pembina. Saya yakin bahwa Saudara-saudara yang hadir pada kesempatan ini adalah para petani dan pembina teladan yang mendapat predikat juara akan mampu menghadapi tantangan tsb.

4. Upaya dalam meningkatkan produksi berbagai komoditas pertanian perlu terus kita pacu, terutama untuk komoditas padi, kedelai, gula tebu, jagung dan hortikultura. Produksi beras tahun 1990 berdasarkan angka ramalan III BPS secara nasional hanya meningkat sebesar 0,54% dari produksi tahun 1989, suatu kenaikan yang sangat kecil bila dibandingkan dengan kenaikan produksi tahun 1989 dari produksi tahun sebelumnya sebesar 7,4%. Salah satu upaya peningkatan produksi di tahun mendatang dapat kita lakukan dengan menekan kehilangan hasil pada waktu panen. Dewasa ini kita masih kehilangan hasil pada waktu panen sebesar $\pm 20\%$. Apabila kita mampu menekan kehilangan hasil sebesar 3% misalnya, artinya produksi beras kita naik 3%.

5. Peningkatan produksi kedelai juga perlu terus kita upayakan, walaupun produksi kedelai sudah meningkat, tetapi permintaan kedelai lebih besar dari peningkatan produksi yang dihasilkan. Dewasa ini kita masih mengimpor kedelai sebesar ± 600.000 ton, sedangkan peluang untuk meningkatkan produksi kedelai masih sangat besar sekali.



Tetapi peluang ataupun kondisi yang telah diciptakan untuk mengembangkan berbagai komoditas pertanian belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah telah menyediakan Kredit Usaha Tani (KUT) ternyata penyerapannya masih sedikit sekali, padahal sebenarnya para petani sangat membutuhkan modal untuk mengembangkan usahatani.

6. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kebahagiaan yang saudara-saudara rasakan sekarang ini juga dirasakan oleh saya kebahagiaan itu. Saya merasa bahwa dimasa-masa mendatang akan semakin bertambah para petani tangguh seperti saudara-saudara, bahkan lebih jauh dari itu bahwa saudara-saudara akan menjadi suri tauladan bagi petani-petani lainnya sehingga saudara-saudara dapat meringankan beban para penyuluh atau saudara-saudara akan dapat menjadi penyuluh swakarsa. Khusus untuk para pembina (Gubernur, Bupati, Camat dan Kepala Desa), saya sangat mengharapkan peran kepemimpinan saudara-saudara dalam mengkoordinasikan maupun menggerakkan partisipasi petani untuk menerapkan teknologi yang dianjurkan.
7. Sebagai kata pengantar yang terakhir dari saya, mudah-mudahan saudara-saudara dapat memanfaatkan forum ini sebaik-baiknya sehingga permasalahan yang kita hadapi dapat dipecahkan bersama.

Jakarta, 15 Januari 1991

Menteri Pertanian

Ir. Wardoyo



14





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA UPACARA PENUTUPAN SEMINAR DALAM RANGKA
CATUR WINDU INSTITUT PERTANIAN STIPER
TANGGAL 16 JANUARI 1991

Bapak Prof.Dr.Ir.Sumantri Sastrosudarjo, Rektor InStiper yang
saya hormati,

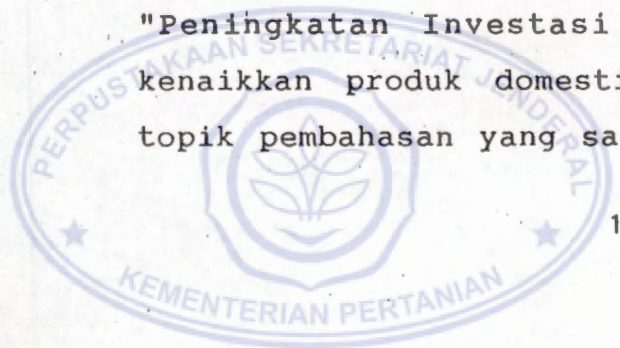
Yang terhormat, Keluarga besar InStiper

Yang terhormat, para undangan dan hadirin sekalian.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pertama-tama marilah kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua sehingga Seminar yang diadakan dalam rangka Catur Windu Institut Pertanian Stiper yang dilaksanakan selama 2 hari, semenjak kemarin telah dapat terlaksana dengan baik dan telah membuahkan hasil sebagai mana yang telah disampaikan oleh panitia seminar kepada kita semua.

Saya merasa bahwa seminar yang diadakan dengan topik "Peningkatan Investasi Sektor Pertanian dalam menunjang kenaikan produk domestik bruto nasional" adalah merupakan topik pembahasan yang sangat penting dan sangat relevan pada



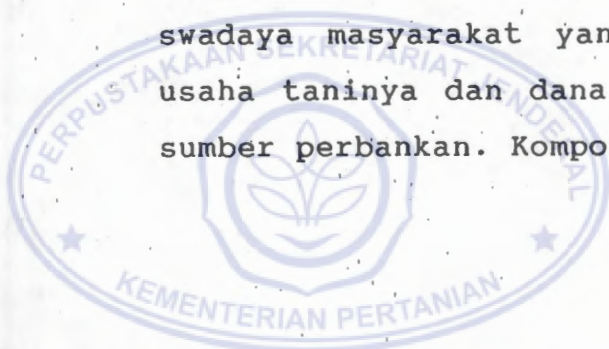
waktu ini. Hal ini saya kemukakan oleh karena masalah investasi adalah merupakan hal yang strategis dalam pembangunan, termasuk untuk sektor pertanian. Kita sangat memerlukan peningkatan investasi untuk memperoleh suatu pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlukan ekspansi untuk menyediakan dan menciptakan asset-asset produksi dan penggantian dari asset produksi yang telah menjadi tua atau sudah ketinggalan teknologinya.

Dalam peningkatan produksi hasil pertanian memang sudah kita rakit dan kita ciptakan berbagai teknologi oleh berbagai Balai Penelitian Pertanian. Para penyuluh kita dengan berbagai metode dan pendekatan-pendekatan tertentu telah dapat memotivasi dan menggerakkan partisipasi petani untuk meningkatkan produksi berbagai hasil pertanian.

Namun untuk menerapkan teknologi yang telah kita ciptakan itu, beserta merealisasikan dari keinginan petani yang sudah dimobilisasi itu agar benar-benar terwujud dilapangan, sebagian besar petani kita sangat memerlukan dana baik sebagai modal kerja maupun untuk melakukan investasi. Disinilah pentingnya peranan dari pada pembahasan mengenai kegiatan investasi untuk sektor pertanian, dan bahkan lebih luas lagi yaitu mengenai pembiayaan kegiatan pembangunan pertanian.

Para hadirin yang terhormat,

Kegiatan pembangunan pertanian khususnya yang menyangkut pembiayaan usaha tani akan bersumber sebagian dari dana swadaya masyarakat yang secara langsung dioperasikan dalam usaha taninya dan dana kredit yang diharapkan dari berbagai sumber perbankan. Komponen dana pemerintah yang jumlahnya akan

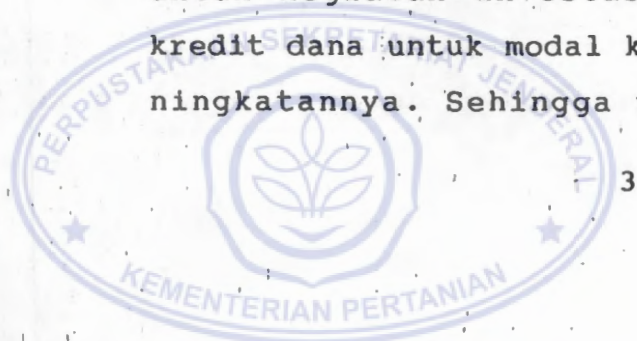


sangat terbatas hanya merupakan sumber dana pelengkap bagi pembangunan.

Kalau kita simak laporan mingguan Bank Indonesia mengenai penyaluran kredit untuk berbagai sektor di Indonesia baik untuk investasi maupun untuk modal kerja memberikan gambaran bahwa dari Rp 91 trilyun kredit yang disalurkan, hanya Rp 7 trilyun untuk sektor pertanian Rp 0,6 trilyun untuk pertambangan Rp 26,7 trilyun untuk perindustrian Rp 29,4 trilyun untuk perdagangan, Rp 16,6 trilyun untuk sektor jasa dan Rp 10,8 trilyun untuk sektor lainnya, menurut keadaan September 1990 ini berarti bahwa sektor pertanian memperoleh kredit sebesar 7% dari total penyaluran kredit.

Jika disimak posisi pinjaman perbankan yang secara khusus untuk kegiatan investasi saja yang jumlahnya menurut keadaan bulan September 1990 sebesar Rp 18,8 trilyun maka untuk sektor pertanian adalah sebesar Rp 4,2 trilyun, untuk sektor pertambangan Rp 0,4 trilyun, untuk sektor perindustrian adalah sebesar Rp 7,3 trilyun, untuk sektor perdagangan sebesar Rp 2,3 trilyun, untuk sektor jasa sebesar Rp Rp 4,4 trilyun dan sektor lainnya Rp 0,3 trilyun. Ini berarti bahwa kredit investasi untuk sektor pertanian, 22% dari penyaluran kredit investasi yang hampir imbang dengan pangsa produk domestik bruto sektor pertanian yang berada disekitar 21%.

Atas dasar keadaan demikian, selain harus dicari upaya-upaya untuk tetap mempertahankan tingkat penyerapan kredit untuk kegiatan investasi maka upaya-upaya untuk menyerap kredit dana untuk modal kerja harus dicarikan jalan untuk peningkatannya. Sehingga teknologi yang telah kita ciptakan



tersebut dan petani yang telah kita motivasi itu dapat menerapkan kegiatan-kegiatan peningkatan produksi di lapangan.

Para hadirin yang terhormat,

Sebelum kebijaksanaan Pakjan tahun lalu berbagai skim kredit secara khusus telah disediakan untuk sektor pertanian seperti kredit Bimas untuk berbagai komoditas dan tersedianya kredit likuiditas untuk berbagai perusahaan disektor itu telah ditiadakan. Yang masih tinggal saat ini skim kredit yang jumlahnya sangat terbatas.

Walaupun tidak dikhususkan untuk sektore pertanian, disegi lain terdapat peluang untuk memanfaatkan kredit yang lebih besar yaitu skim Kredit Usaha Kecil (KUK) yang jumlahnya cukup besar yaitu 20% dari penyaluran seluruh kredit dari perbankan.

Dengan demikian upaya untuk memanfaatkan KUK tersebut, kita menetahui bahwa saat ini "biaya uang" yang berasal dari masyarakat cukup tinggi. Selain itu "biaya transaksi" yaitu biaya bank dalam menyalurkan kredit terhadap para nasabah yang kecil-kecil juga mahal. Bahkan pernah diungkapkan bahwa biaya transaksi terhadap petani kecil ini mencapai 19%. Ini sudah terang akan menyebabkan beban bunga kepada petani akan menjadi sangat tinggi.

Salah satu upaya untuk meringankan beban petani ini subsektor perkebunan telah mencobanya melalui pendekatan pelaksanaan berbagai proyek sebagai berikut :



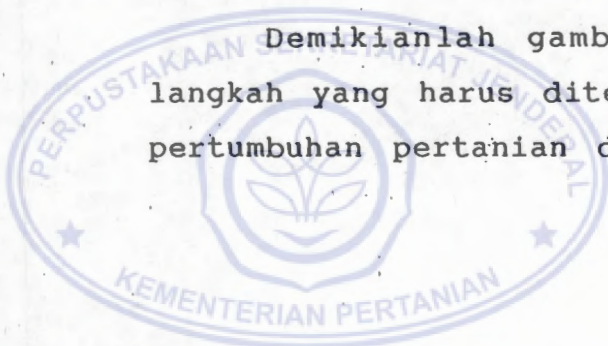
- a. Dalam rangka intensifikasi tanaman, proyek-proyek perkebunan menyediakan anggaran pemerintah untuk biaya benih dan biaya penanaman dalam bentuk grant.
- b. Kegiatan persatuanusaha tani cukup besar, dan kegiatan per lokasi diarahkan untuk mencapai skala ekonomis.
- c. Diupayakan agar setiap lokasi itu mempunyai perusahaan inti yang diharapkan dapat mengajukan kredit investasi dan lanjutan kepada pihak perbankan, dan setelah tanaman berproduksi akan menampung hasil petani, mengolah dan memasarkan hasil.
- d. Setiap lahan petani diusahakan untuk disertifikatkan.

Rangkaian kegiatan itu dimaksudkan sebagai penciptaan prakondisi sehingga berbagai hambatan mengenai penyediaan kredit dapat teratasi dan biaya transaksi kredit menjadi lebih rendah. Selain itu dengan pemberian grant berarti kebutuhan kredit akan turun sehingga masing-masing usaha tani mempunyai proyeksi arus dana yang lebih baik.

Bentuk-bentuk pendekatan seperti ini, ataupun berbagai modifikasi ataupun penciptaan skim-skim pembangunan harus dapat dilakukan untuk berbagai komoditas lain, dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembangan kondisi perkreditan yang akan selalu mengadakan penyesuaian-penyesuaian dimasa yang akan datang.

Para hadirin yang terhormat,

Demikianlah gambaran mengenai perlunya kedinamisan langkah yang harus ditempuh untuk dapat mempertahankan laju pertumbuhan pertanian dimasa datang. Berbagai hasil rumusan



seminar yang sudah kita dengan tadi akan merupakan masukan-masukan yang sangat berarti bagi Departemen Pertanian dalam menciptakan berbagai konsep mengenai kegiatan investasi dimasa mendatang.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh peserta seminar dan lebih-lebih pada panitia penyelenggara yang telah dapat melaksanakan seminar ini dengan baik.

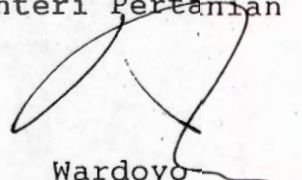
Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan YME dan dengan ucapan "Alhamdulillah hirobil allamin" seminar nasional peningkatan investasi sektor pertanian dalam menunjang kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional ini, saya nyatakan dengan resmi ditutup.

Semoga Tuhan selalu memberikan petunjuk kepada kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 16 Januari 1991

Menteri Pertanian


Wardoyo



15





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGARAHAN MENTERI PERTANIAN
PADA RAPAT KOORDINASI BIMAS PROPINSI SUMATERA BARAT
TANGGAL 17 JANUARI 1991 DI PADANG

Saudara Gubernur,
Saudara-saudara Bupati,
Saudara-saudara Kakanwil,
Saudara-saudara Para Kepala Dinas,
Saudara-saudara Anggota Satpem Bimas,
Saudara-saudara Anggota Satpel Bimas,
dan hadirin sekalian Yth.

Assalamu'alaikum warokhmatullahi wabarakatuh.

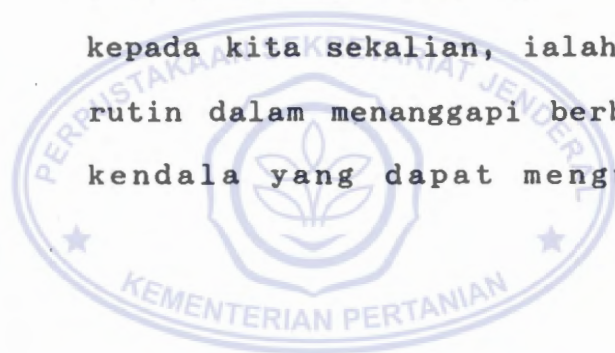
Pada kesempatan ini, marilah pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wataala, karena atas rahmat dan karunia Nya lah hari ini bisa berkumpul dalam pertemuan yang penting ini untuk bersama-sama melakukan evaluasi terhadap posisi kita bersama dalam mengupayakan lestarnya swasembada pangan. Kita bersyukur bahwa selama ini kita selalu mendapat berkah dan Ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga sampai saat ini kita tetap dapat mempertahankan swasembada beras yang sudah kita raih sejak tahun 1984 itu. Disamping untuk mengevaluasi posisi kita masing-masing serta posisi kita bersama, pertemuan inipun dimaksudkan sebagai suatu pertemuan untuk mengkonsolidasi segenap aparatur dan kekuatan masyarakat yang terkait dengan kiprah produksi pangan, agar segenap tantangan dan peluang tahun ini serta tahun-tahun yang akan datang dapat selalu kita respons dengan melakukan/melaksana-kan tindakan operasional yang tepat, efektif dan efisien.

Dengan iringan ucapan Selamat Tahun Baru 1991, saya ingin

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Swasembada pangan adalah tekad atau komitmen nasional yang terus menerus harus kita amankan dan kita jamin realisasinya dengan mengerahkan pikiran, perhatian serta segala potensi sumberdaya (manusia, alam, daya, dana) secara optimal sesuai dengan kebutuhan operasional di setiap lokasi. Pangan adalah hasil kegiatan petani, yang berada menyebar diseluruh pelosok wilayah tanah air kita yang luas dan beraneka ragam ini. Oleh karena itu program peningkatan produksi pangan, khususnya usaha pokok intensifikasi dan diversifikasi, merupakan program yang keberhasilannya ditentukan oleh tekad, semangat, kegairahan dan kemampuan petani diseluruh wilayah pedesaan. Pengalaman kita selama ini menunjukkan bahwa tekad, semangat, gairah, dan kemampuan petani untuk berpartisipasi dalam gerakan peningkatan produksi pangan dengan menerapkan Sapta Usaha adalah refleksi dari tekad, semangat, gairah, dan kemampuan aparatur pengaturan, pelayanan, pembinaan dan kepemimpinan yang digelar di pedesaan dibawah pembinaan jajaran instansi pemerintah maupun badan usaha yang simpul-simpul koordinasinya berada diberbagai tingkat administrasi pemerintahan.

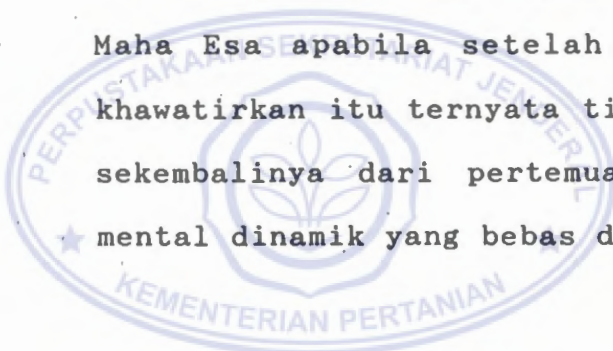
Sehubungan dengan kenyataan itu, maka sebagai pesan inti untuk pertemuan ini saya ingin sekali lagi menyampaikan dan menyegarkan pesan yang selalu ditekankan oleh Bapak Presiden kepada kita sekalian, ialah agar kita tidak dan jangan bersikap rutin dalam menanggapi berbagai gejala hambatan, gangguan dan kendala yang dapat mengurangi peluang keberhasilan kita



dalam melestarikan swasembada pangan. Karena secara operasional tolok ukur dari pelestarian swasembada pangan itu adalah tercapainya sasaran produksi musiman dan tahunan (baik areal tanam/panennya maupun hasil perhektarnya), pesan Bapak Presiden itu berarti bahwa kita harus selalu mencari dan menemukan jalan dan langkah, kiat atau jurus yang tepat untuk memecahkan segala masalah yang dihadapi di lapangan. Kita tidak bisa bersikap rutin apalagi berpuas diri, karena setiap masalah yang tidak terpecahkan akan merupakan ancaman potensial yang berbahaya bagi kelestarian swasembada pangan.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Bertolak dari sikap dinamik yang saya percaya kita miliki, maka segala gejala rutinitas yang selama ini masih sering kita jumpai perlu benar-benar kita waspadai agar jangan sampai menjadi penyakit kronis yang membuat masyarakat kita statik. Dan gejala statik ini secara nalar sederhana tercermin dari rendahnya laju peningkatan produksi beras kita pada tahun yang lalu, yang menurut Ramalan III hanya naik 0,54% dibanding tahun 1989. Oleh karena itu kami benar-benar prihatin dan kepercayaan diri serta optimisme kami menjadi goyah, khawatir kalau-kalau penyakit rutinitas yang membuat statik itu benar-benar sudah mulai melanda pribadi kita. Maka melalui pertemuan ini saya ingin berbagi rasa dan berbagi tanggung jawab dengan saudara-saudara sekalian dan saya akan sangat berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa apabila setelah dari pertemuan ini apa yang saya khawatirkan itu ternyata tidak benar. Saya ingin agar kita semua sekembalinya dari pertemuan ini benar-benar mempunyai kondisi mental dinamik yang bebas dari penyakit rutinitas.



Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Gejala menguatnya rutinitas yang mengakibatkan perkembangan statik dan melemahnya sikap dinamik kreatif yang tahun-tahun sebelumnya telah berhasil kita gelarkan, merupakan kondisi awal yang harus segera kita koreksi kalau kita memang bertekad untuk melestarikan swasembada pangan. Menghadapi tugas tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang sebagaimana sudah dicantumkan dalam Buku Repelita V, yang khusus untuk kedelai ditambah lagi dengan sasaran khusus percepatan peningkatan produksi kedelai, karena impornya terus meningkat, kita benar-benar dihadapkan dengan misi yang berat dan pelik. Secara kuantitatif dan kualitatif sasaran yang harus kita capai Tahun 1991 ini, hanya mungkin dapat kita capai apabila kita mampu memanfaatkan peluang yang sempit MT 1990/1991 ini dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya dan MT 1991 yang berhasil kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin dengan sasaran ganda (padi dan kedelai) yang kita utamakan.

Sebagai sudah kita ketahui dan kita alami bersama, MT 1990/1991 ini hujannya terlambat 1 - 2 bulan. Ini berarti bahwa kita tidak bisa mengharapkan produksi dari tambahan areal (karena kemungkinan besar malahan areal panennya akan lebih kecil dari tahun yang lalu dan dari sasaran). Peningkatan produksi padi MT 1990/1991 hanya mungkin kita capai dari peningkatan mutu intensifikasi yang akan memberikan hasil perhektar yang lebih tinggi. Ini berarti tambahan produksi itu harus kita capai dari peningkatan mutu intensifikasi di daerah Supra Insus, Insus paket D, dan perluas Insus paket C.



Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Untuk bahan penjabaran rencana operasional yang dapat memanfaatkan sumberdaya lahan dan iklim secara optimal dalam tahun 1991 ini pada kesempatan ini saya sampaikan Informasi yang kita dapat dari BMG tentang perkiraan sifat hujan diberbagai wilayah Indonesia dalam MT 1990/1991 dan MT 1991 yang akan datang. Dari informasi itu dapat kita simpulkan bahwa pada umumnya curah hujan itu secara kualitatif dan kuantitatif kondisinya lebih kurang menguntungkan (kemarau lebih kering, lebih panjang) dibandingkan dengan tahun 1989 dan tahun 1990 yang lalu. Khusus untuk propinsi Sumatra Barat sifat hujan bulan Desember 1990 dibawah normal dan bulan Januari 1991 diatas normal. Ditinjau dari sudut inipun maka jawaban yang harus kita tampilkan sebagai respons terhadap kondisi lingkungan iklim yang kurang menggembirakan itu adalah ilmu dan teknologi tepat guna, yaitu penerapan sapta usaha secara penuh dan disiplin. Sekali lagi peluang bagi padi dari segi areal makin terbatas, tetapi bagi kedelai dan tanaman palawija lainnya dalam rangka diversifikasi akan makin besar peluang perluasannya, asal dapat dilakukan tepat waktu.

Saudara Gubernur dan saudara sekalian.

Propinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan program pangan produksi beras Tahun 1990 berdasarkan angka ramalan III Biro Pusat Statistik berhasil ditingkatkan sebesar 35.603 ton atau 2.26% dibanding dengan produksi tahun 1989. Secara Nasional kenaikan produksi padi hanya mencapai 241.071 ton atau 0,54%. Namun sasaran produksi Sumatera Barat tahun 1990 menurut SK Menteri Pertanian sebesar 1,801 juta ton, sedangkan produksi yang

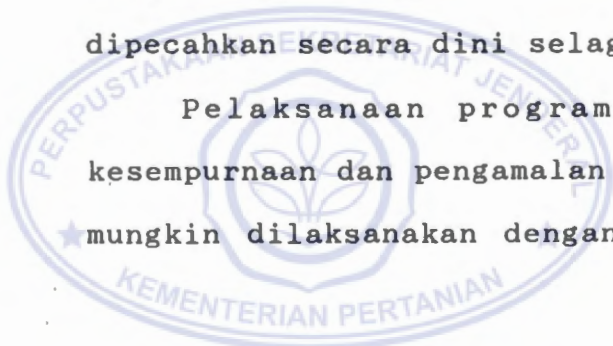
dicapai sebesar 1,610 juta ton (89,4%). Keadaan ini terutama disebabkan karena mutu pelaksanaan intensifikasi belum sesuai seperti yang diharapkan.

Dalam upaya untuk tetap melestarikan swasembada beras yang sekaligus upaya untuk berswasembada pangan pada tahun 1991 ini, kelihatannya tugas kita semakin berat. Beberapa faktor yang menghadang upaya kita didalam meningkatkan produksi pangan khususnya beras pada tahun 1991 ini antara lain adalah :

1. Keadaan iklim yang kurang menguntungkan, karena terjadi pergeseran waktu tanam pada MT 1990/1991 selama 1 - 2 bulan. Menurut BMG, curah hujan di Sumatera bulan Desember 1990 dibawah normal, dan bulan Januari 1991 diatas normal.
2. Fasilitas KUT yang disediakan Pemerintah untuk mendukung kegiatan petani tidak dapat dimanfaatkan karena KUD yang tidak memenuhi persyaratan penyaluran KUT. Demikian pula peran KUD sebagai penyalur/pengecer pupuk dimana kelompok tani belum seluruhnya ditetapkan sebagai TPK.

Menghadapi keadaan demikian jelaslah tidak dapat diatasi secara rutin saja, tetapi memerlukan tindakan pemecahan yang lebih konkrit. Jika perlu dengan tindakan terobosan untuk menjamin terwujudnya penerapan teknologi, sekaligus produktivitas. Untuk mengoperasionalkannya peran Posko disemua tingkat penting artinya sehingga setiap masalah yang timbul dapat dipecahkan secara dini selagi masalahnya belum terlalu berat.

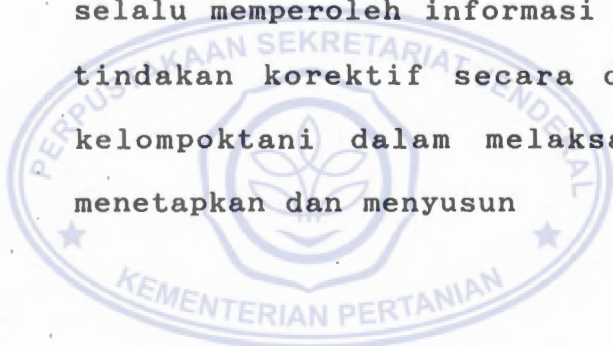
Pelaksanaan program intensifikasi yang memerlukan kesempurnaan dan pengamalan teknologi produksi dengan tepat hanya mungkin dilaksanakan dengan sempurna bila unsur-unsur pelayanan



(delivery system) dan unsur-unsur penerima (receiving system) dapat berfungsi secara baik.

Tugas utama Satuan Pembina Bimas dan Satuan Pelaksana Bimas adalah untuk menggerakkan unsur-unsur pelayanan. Pembinaan KUD bertujuan agar KUD mampu mengamalkan kerjasama yang melembaga dengan kelompok tani dan mampu memanfaatkan peluang kemudahan-kemudahan ekonomi yang disediakan Pemerintah maupun Swasta dalam bentuk KUT atau kredit lainnya, sarana produksi pertanian dan pemasaran hasil untuk kepentingan masyarakat petani. Meskipun tantangan demi tantangan akan kita hadapi, namun kita harus tetap dapat mempertahankan swasembada beras pada tahun 1991 ini yang akan ditentukan oleh pelaksanaan intensifikasi MT 1990/1991 dan MT 1991 mendatang.

Oleh karena itu kita harus bekerja lebih keras lagi dibandingkan dengan tahun yang lalu. Pola kerja yang selama ini telah terbina dengan menerapkan pola Opsus, sudah mulai mengendor lagi ke arah rutin. Kita membutuhkan upaya-upaya terobosan untuk mengatasi permasalahan yang semakin berat. Kegiatan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok tani dan KUD sebagai wadah kerjasama "Pelaku Utama Pembangunan", harus selalu didukung dan dipantau secara cermat oleh Bupati KDH Tingkat II selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten dengan dukungan Sekretariat Satuan Pelaksana Bimas, sehingga Bupati/Ketua Satuan Pelaksana Bimas selalu memperoleh informasi yang aktual untuk dapat melaksanakan tindakan korektif secara dini. Ditingkat petani, pembinaan kelompok tani dalam melaksanakan kegiatan musyawarah untuk menetapkan dan menyusun



RDK/RDKK yang digerakkan oleh Kepala Desa serta perangkat teknis dalam Satuan Pelaksana Bimas di tingkat desa.

Dari laporan-laporan yang saya terima khususnya dalam pelaksanaan Supra Insus, masalah yang selalu dihadapi adalah penyaluran sarana produksi yang terlambat, penyaluran KUT tidak dapat direalisasikan oleh KUD karena tunggakan kredit pada KUD maupun pada petani, Posko-posko yang tidak atau belum berfungsi dan penyuluhan yang masih perlu ditingkatkan dalam upaya membina kelompok tani.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian,

Untuk itulah saya utus para eselon I anggota dari Badan Pengendali Bimas untuk mengadakan rapat Koordinasi secara lengkap bersama-sama dengan Saudara-saudara, sehingga melalui rapat ini akan dapat disimpulkan langkah-langkah operasional nyata dalam mengatasi permasalahan-permasalahan secara lokal spesifik.

Berdasarkan data keragaan di Sumatera Barat perkembangan produksi padi cukup menggembirakan. Produktivitas rata-rata propinsi dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1990 meningkat. Kondisi ini agar dapat selalu dipertahankan, baik melalui peningkatan luas tanam / panen, maupun melalui peningkatan mutu intensifikasi. Mutu intensifikasi yang masih ada peluang untuk ditingkatkan adalah penggunaan benih berlabel, pupuk berimbang dan pemakaian PPC/ZPT.

Untuk komoditi jagung, produktivitas berada diatas rata-rata produktivitas Nasional, tetapi untuk kedelai selalu dibawah produktivitas nasional.

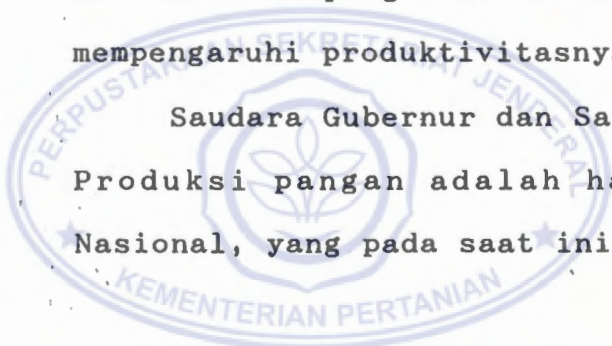
Berdasarkan laporan yang masuk ke pusat sampai dengan awal Desember 1990, keragaan intensifikasi MT 1990/1991 masih jauh dari rencana semusim yaitu untuk komoditas padi, Supra Insus baru

mencapai 22%, Insus 5%, Inmum 5% dan jumlah intensifikasi padi baru mencapai 9%. Sedangkan untuk komoditas jagung, insus mencapai 17%, Inmum 12% dan jumlah intensifikasi jagung baru mencapai 14%. Selanjutnya untuk komoditas kedelai, Insus mencapai 2%, Inmum 10% dan jumlah intensifikasi jagung baru mencapai 5%. Apabila kita bandingkan realisasi ini pada periode yang sama, terutama realisasi tanam untuk padi lebih rendah 32% dan kedelai lebih rendah 7%, sedangkan untuk jagung meningkat 17%.

Disamping program intensifikasi pangan, di Sumatra Barat dilaksanakan juga program Intab dan Intek serta Inmindi, realisasi Intab dan Intek cukup baik, sedangkan Inmindi belum ada realisasi. Penyaluran KUT ternyata akhir-akhir ini juga semakin mengecil, terutama pada MT 1990/1991 ini. KUT MT 1990/1991 baru disalurkan oleh 11 KUD yang jumlahnya jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan jumlah KUD yang menyalurkan KUT pada MT 1989/1990 (MT sebelumnya) yaitu 113 KUD. Rendahnya KUD yang menyalurkan KUT disebabkan karena banyaknya KUD yang tidak memenuhi syarat untuk menyalurkan KUT (KUD tidak eligible) sebagai akibat dari besarnya tunggakan pada MT-MT yang lalu. Melihat kondisi demikian, maka upaya pengembalian kredit perlu dilakukan semaksimal mungkin melalui gerakan-gerakan Tim pengembalian kredit /Tim Inpres 9/1989. Sebab kurangnya dukungan KUT akan mempengaruhi mutu intensifikasi dan pada gilirannya mempengaruhi produktivitasnya.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Produksi pangan adalah hasil dari sistem produksi pangan Nasional, yang pada saat ini sudah mencapai bentuk dan formatnya



yang cukup handal. Ini berarti berbagai sub sistem sudah bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam suatu tatanan dan tata hubungan kerja yang menjamin sinkronisasi dan koordinasi yang serasi. Perangkat kebijakan politik, ekonomi, teknologi, prasarana dan administrasi benar-benar telah ada dalam kondisi yang dibutuhkan dan menggerakkan para petani. Tetapi sistem ini tidak sama kehandalannya diberbagai sub sistem wilayah, karena itu kita saksikan sekarang masih terdapat variabilitas produktivitas antara wilayah yang cukup tinggi. Karena proses pematapan pengembangan sistem ini wilayah demi wilayah sangat tergantung dari unsur manusia dan kegiatannya yang khas harus dikembangkannya sendiri setempat (karena kepemimpinan dan kualitas manusia tidak bisa didatangkan dari luar), maka pada saat ini keberhasilan program pangan tidak lagi ditentukan oleh aktivitas kepimpinan pada eselon kepemimpinan nasional dan propinsi, tetapi ditentukan oleh dinamika kepemimpinan dan sistem ditingkat kabupaten kebawah. Oleh karena itu pada tempatnyalah apabila saat ini kami meminta Saudara-saudara Bupati untuk memimpin aparatur Satuan Pelaksana Bimas di daerah secara dinamik dan sistematis. Agar makin lama keberhasilan program itu makin ditentukan oleh sistem dan bukan oleh orang-orangnya semata-mata. Kami meminta dengan sungguh-sungguh agar para Bupati memusatkan perhatian kepada organisasi dan mekanisme kerja berbagai Pos Simpul Koordinasi (Posko A1, A2, A3, B1, B2, I, II, dan III). Maka metode Opsus kami minta agar benar-benar diamalkan sebagai normalisasi ketatalaksanaan dan kepemimpinan operasional lapangan. Pengamatan kami selama ini menunjukkan bahwa para Bupati yang selalu memantau dan sering berada di lapangan sangat besar

peluangnya untuk berhasil memimpin rakyatnya berpartisipasi dalam program pangan nasional.

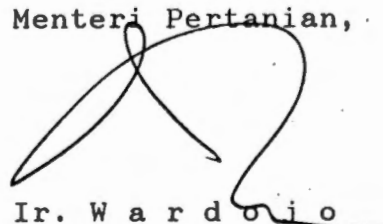
Demikian upaya-upaya yang perlu kita laksanakan sesuai dengan amanat Bapak Presiden bebarapa waktu yang lalu, yaitu:

- a. Swasembada beras harus dipertahankan dan dilestarikan,
- b. Produksi kedelai agar ditingkatkan baik melalui perluasan areal tanam maupun melalui peningkatan penerapan teknologi,
- c. Kredit Usahatani sebagai salah satu sumber modal usahatani harus disalurkan secara intensif, demikian juga pengembaliannya sehingga tidak mengganggu penyaluran untuk musim tanam berikutnya.

Atas perhatian Saudara-saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pertanian,



Ir. Wardjo



16





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGARAHAN MENTERI PERTANIAN
PADA RAPAT KOORDINASI BIMAS PROPINSI SUMATERA SELATAN
TANGGAL 21 JANUARI 1991 DI PALEMBANG

Saudara Gubernur,
Saudara-saudara Bupati,
Saudara-saudara Kakanwil,
Saudara-saudara Para Kepala Dinas,
Saudara-saudara Anggota Satpem Bimas,
Saudara-saudara Anggota Satpel Bimas,
dan hadirin sekalian Yth.

Assalamu'alaikum warokhmatullahi wabarakatuh.

Pada kesempatan ini, marilah pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wataala, karena atas rahmat dan karunia Nya lah kita pada hari ini dapat berkumpul dalam pertemuan yang penting ini untuk bersama-sama melakukan evaluasi terhadap posisi kita bersama dalam mengupayakan lestarnya swasembada pangan. Kita bersyukur bahwa selama ini kita selalu mendapat berkah dan Ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga sampai saat ini kita tetap dapat mempertahankan swasembada beras yang sudah kita raih sejak tahun 1984. Disamping untuk mengevaluasi posisi kita masing-masing serta posisi kita bersama, pertemuan inipun dimaksudkan sebagai suatu pertemuan untuk mengkonsolidasi segenap aparatur dan kekuatan masyarakat yang terkait dengan kiprah produksi pangan, agar segenap tantangan dan peluang tahun ini serta tahun-tahun yang akan datang kita selalu dapat respons dengan melakukan/melaksanakan tindakan operasional yang tepat, efektif dan efisien.

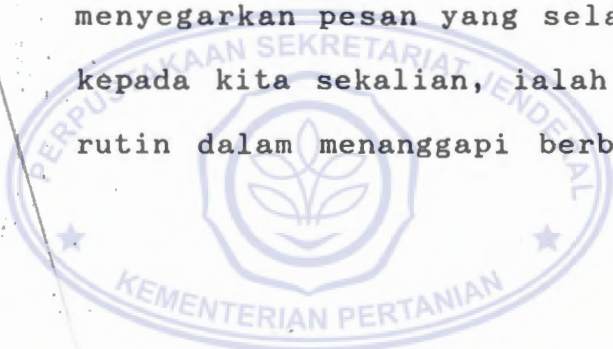
Dengan iringan ucapan Selamat Tahun Baru 1991, saya ingin menyampaikan beberapa informasi dan beberapa pesan dalam menyongsong tahun 1991 ini.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Swasembada pangan adalah tekad atau komitmen nasional yang terus menerus harus kita amankan dan kita jamin realisasinya dengan mengerahkan pikiran, perhatian serta segala potensi sumberdaya manusia, alam, daya dan dana secara optimal sesuai dengan kebutuhan operasional disetiap lokasi. Pangan adalah hasil kegiatan petani, yang berada menyebar diseluruh pelosok wilayah tanah air kita yang luas dan beraneka ragam ini. Oleh karena itu program peningkatan produksi pangan, khususnya usaha pokok intensifikasi dan diversifikasi, merupakan program yang keberhasilannya ditentukan oleh tekad, semangat, kegairahan dan kemampuan petani diseluruh wilayah pedesaan.

Pengalaman kita selama ini menunjukkan bahwa tekad, semangat, gairah, dan kemampuan petani untuk berpartisipasi dalam gerakan peningkatan produksi pangan dengan menerapkan Sapta Usaha adalah refleksi dari tekad, semangat, gairah, dan kemampuan aparatur pengaturan, pelayanan, pembinaan dan kepemimpinan yang digelar di pedesaan dibawah pembinaan jajaran instansi pemerintah maupun badan usaha yang simpul-simpul koordinasinya berada diberbagai tingkat administrasi pemerintahan.

Sehubungan dengan kenyataan itu, maka sebagai pesan inti untuk pertemuan ini saya ingin sekali lagi menyampaikan dan menyegarkan pesan yang selalu ditekankan oleh Bapak Presiden kepada kita sekalian, ialah agar kita tidak dan jangan bersikap rutin dalam menanggapi berbagai gejala hambatan, gangguan dan



kendala yang dapat mengurangi peluang keberhasilan kita melestarikan swasembada pangan. Karena secara operasional tolok ukur dari pelestarian swasembada pangan adalah tercapainya sasaran produksi musiman dan tahunan, baik areal tanam/panen maupun hasil perhektarnya, pesan Bapak Presiden itu berarti bahwa kita harus selalu mencari dan menemukan jalan dan langkah, kiat atau jurus yang tepat untuk memecahkan segala masalah yang dihadapi di lapangan. Kita tidak bisa bersikap rutin apalagi berpuas diri, karena setiap masalah yang tidak terpecahkan akan merupakan ancaman potensial yang berbahaya bagi kelestarian swasembada pangan.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Bertolak dari sikap dinamik yang saya percaya kita miliki, maka segala gejala rutinitas yang selama ini masih sering kita jumpai perlu benar-benar kita waspadai agar jangan sampai menjadi penyakit kronis yang membuat masyarakat kita statik. Dan gejala statik ini secara nalar sederhana tercermin dari rendahnya laju peningkatan produksi beras kita pada tahun yang lalu, yang menurut Ramalan III hanya naik 0,54% dibanding tahun 1989. Oleh karena itu kami benar-benar prihatin dan kepercayaan diri serta optimisme kami menjadi goyah, khawatir kalau-kalau penyakit rutinitas yang membuat statik itu benar-benar sudah mulai melanda pribadi kita. Maka melalui pertemuan ini saya ingin berbagi rasa dan berbagi tanggung jawab dengan saudara-saudara sekalian dan saya akan sangat berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa apabila setelah dari pertemuan ini apa yang saya



khawatirkan itu ternyata tidak benar. Saya ingin agar kita semua sekembalinya dari pertemuan ini benar-benar mempunyai kondisi mental dinamik yang bebas dari penyakit rutinitas.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Gejala menguatnya rutinitas yang mengakibatkan perkembangan statik dan melemahnya sikap dinamik kreatif yang tahun-tahun sebelumnya telah berhasil kita gelarkan, merupakan kondisi awal yang harus segera kita koreksi kalau kita memang bertekad untuk melestarikan swasembada pangan. Menghadapi tugas tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang sebagaimana sudah dicantumkan dalam Buku Repelita V, yang khusus untuk kedelai ditambah lagi dengan sasaran khusus percepatan peningkatan produksi kedelai, karena importnya terus meningkat, kita benar-benar dihadapkan dengan misi yang berat dan pelik. Secara kuantitatif dan kualitatif sasaran yang harus kita capai Tahun 1991 ini hanya mungkin dapat kita capai apabila kita mampu memanfaatkan peluang yang sempit MT 1990/1991 ini dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya dan MT 1991 berhasil kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin dengan sasaran ganda (padi dan kedelai) yang kita utamakan.

Sebagai yang sudah kita ketahui dan kita alami bersama, MT 1990/1991 ini hujannya terlambat 1 - 2 bulan. Ini berarti bahwa kita tidak mengharapkan produksi dari tambahan areal (karena kemungkinan besar malahan areal panennya akan lebih kecil dari tahun yang lalu dan dari sasaran). Peningkatan produksi padi MT 1990/1991 hanya mungkin kita capai melalui peningkatan mutu intensifikasi yang akan memberikan hasil perhektar yang lebih



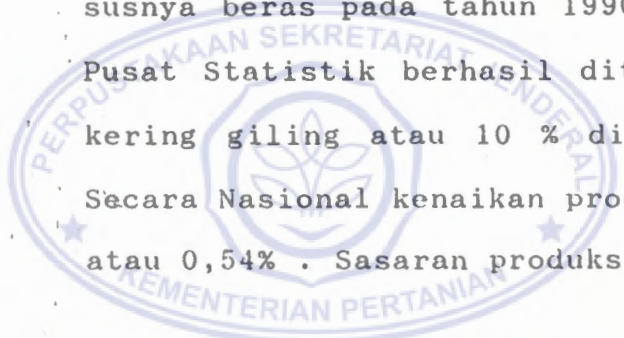
tinggi. Ini berarti tambahan produksi itu harus kita capai dari peningkatan mutu intensifikasi di daerah Supra Insus, Insus paket D, dan perluasan Insus paket C.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Untuk bahan penjabaran rencana operasional sebagai upaya memanfaatkan sumberdaya lahan dan iklim secara optimal pada tahun 1991 ini pada kesempatan ini saya sampaikan Informasi yang kita peroleh dari BMG tentang perkiraan sifat hujan diberbagai wilayah Indonesia dalam MT 1990/1991 dan MT 1991 yang akan datang. Dari informasi itu dapat kita simpulkan bahwa pada umumnya curah hujan secara kualitatif dan kuantitatif kondisinya kurang menguntungkan (kemarau lebih kering dan lebih panjang) dibandingkan dengan tahun 1989 dan tahun 1990 yang lalu. Ditinjau dari sudut ini maka jawaban yang harus kita tampilkan sebagai respons terhadap kondisi lingkungan iklim yang kurang menggembirakan itu adalah ilmu dan teknologi tepat guna, yaitu penerapan sapta usaha secara penuh dan disiplin. Sekali lagi peluang untuk padi dari segi areal makin terbatas, tetapi bagi kedelai dan tanaman palawija lainnya dalam rangka diversifikasi akan makin besar peluang perluasannya, asalkan waktu tanam dilakukan tepat pada waktunya.

Saudara Gubernur dan saudara sekalian.

Propinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan program pangan khususnya beras pada tahun 1990 berdasarkan angka ramalan III Biro Pusat Statistik berhasil ditingkatkan sebesar 133.848 ton gabah kering giling atau 10 % dibanding dengan produksi tahun 1989. Secara Nasional kenaikan produksi padi hanya mencapai 241.071 ton atau 0,54% . Sasaran produksi Sumatera Selatan tahun 1990 menurut



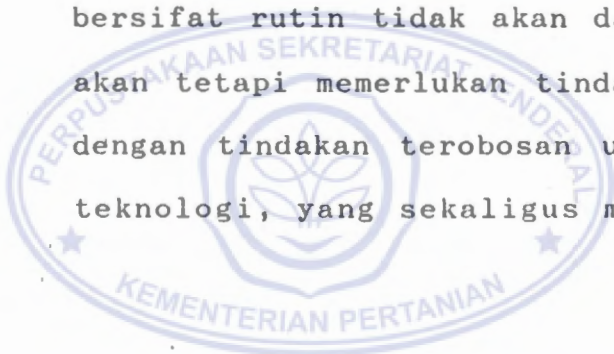
SK Menteri Pertanian sebesar 1.402.470 ton, sedangkan produksi yang dicapai sebesar 1.471.715 ton atau 104,9 % . Untuk itu saya atas nama Pemerintah menyampaikan penghargaan dan terima kasih karena Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan telah berhasil dalam membantu upaya melesterikan swasembada pangan Nasional. Namun kita tidak boleh terlena dengan keberhasilan yang telah kita capai tersebut.

Dalam upaya untuk tetap melestarikan swasembada beras yang sekaligus upaya untuk berswasembada pangan pada tahun 1991 ini, kelihatannya tugas kita semakin berat.

Beberapa faktor yang menghadang upaya kita didalam meningkatkan produksi pangan khususnya beras pada tahun 1991 ini antara lain adalah :

1. Keadaan iklim yang kurang menguntungkan, yang menyebabkan pergeseran waktu tanam pada MT 1990/1991 selama 1 - 2 bulan.
2. Fasilitas KUT yang disediakan Pemerintah untuk mendukung petani tidak dapat dimanfaatkan karena KUD yang tidak memenuhi persyaratan penyaluran KUT. Demikian pula peran KUD sebagai penyalur/pengecer pupuk belum seperti yang diharapkan, antara lain pengadaan sarana produksi dengan prinsip 6 tepat belum terjamin disemua lini dan kelompok tani belum seluruhnya ditunjuk sebagai TPK.

Menghadapi keadaan yang demikian jelaslah cara kerja yang bersifat rutin tidak akan dapat mengatasi permasalahan tersebut akan tetapi memerlukan tindakan yang lebih konkrit. Jika perlu dengan tindakan terobosan untuk menjamin terwujudnya penerapan teknologi, yang sekaligus meningkatkan produktivitas, dengan

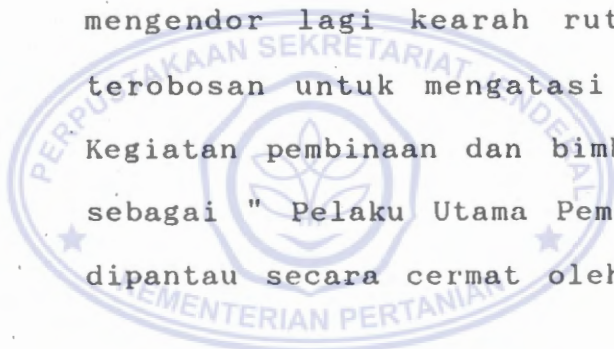


mengoperasionalkan peran Posko disemua tingkat sangat penting artinya sehingga setiap masalah yang timbul dapat dipecahkan secara dini.

Pelaksanaan program intensifikasi yang memerlukan kesempurnaan dan pengamalan teknologi produksi dengan tepat hanya mungkin dilaksanakan dengan sempurna bila unsur-unsur pelayanan (delivery system) dan unsur-unsur penerima (receiving system) dapat berfungsi secara baik.

Tugas utama Satuan Pembina Bimas dan Satuan Pelaksana Bimas adalah untuk menggerakkan unsur-unsur pelayanan. Pembinaan KUD bertujuan agar KUD mampu mengamalkan kerjasama yang melembaga dengan kelompok tani dan mampu memanfaatkan peluang kemudahan-kemudahan ekonomi yang disediakan Pemerintah maupun Swasta dalam bentuk KUT atau kredit lainnya, sarana produksi pertanian dan pemasaran hasil untuk kepentingan masyarakat petani. Meskipun tantangan demi tantangan akan kita hadapi, namun kita harus tetap dapat mempertahankan swasembada beras pada tahun 1991 ini yang akan ditentukan oleh pelaksanaan intensifikasi MT 1990/1991 dan MT 1991 mendatang. Mempertahankan swasembada beras berarti mempertahankan stabilitas Nasional untuk menghadapi Pemilu 1992.

Oleh karena itu kita harus bekerja lebih keras lagi dibandingkan dengan tahun yang lalu. Pola kerja yang selama ini telah terbina dengan menerapkan pola Opsus, jangan sampai mengendor lagi ke arah rutin. Kita membutuhkan upaya-upaya terobosan untuk mengatasi permasalahan yang semakin berat. Kegiatan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok tani dan KUD sebagai "Pelaku Utama Pembangunan", harus selalu didukung dan dipantau secara cermat oleh Bupati KDH Tingkat II selaku Ketua



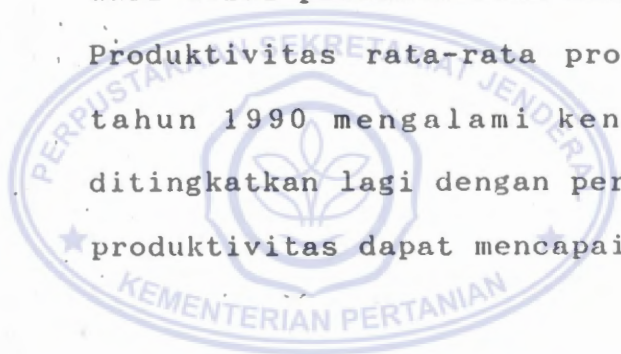
Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten dengan dukungan Sekretariat Satuan Pelaksana Bimas, sehingga Bupati/Ketua Satuan Pelaksana Bimas selalu memperoleh informasi yang aktual untuk dapat melaksanakan tindakan korektif secara dini. Ditingkat petani, pembinaan kelompok tani dalam melaksanakan kegiatan musyawarah untuk menetapkan dan menyusun RDK/RDKK yang digerakkan oleh Kepala Desa serta perangkat teknis dalam Satuan Pelaksana Bimas di tingkat desa.

Dari laporan-laporan yang saya terima khususnya dalam pelaksanaan Supra Insus, masalah yang selalu dihadapi adalah penyaluran sarana produksi yang terlambat, penyaluran KUT tidak dapat direalisasikan oleh KUD karena tunggakan kredit oleh KUD maupun oleh petani, Posko-posko yang tidak atau belum berfungsi dan penyuluhan yang semakin kurang dalam upaya membina kelompok tani.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian,

Untuk itulah saya utus para eselon I anggota dari Badan Pengendali Bimas untuk mengadakan rapat Koordinasi secara lengkap bersama-sama dengan Saudara-saudara sehingga melalui rapat ini akan dapat disimpulkan suatu pola kerja dalam mengatasi permasalahan-permasalahan secara lokal spesifik.

Berdasarkan data keragaan di Sumatera Selatan untuk musim tanam 1990, pencapaian areal tanam padi cukup baik, akan tetapi dari nilai produktivitas masih berada dibawah rata-rata Nasional. Produktivitas rata-rata propinsi dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1990 mengalami kenaikan . Kondisi ini masih dapat ditingkatkan lagi dengan perbaikan mutu intensifikasi sehingga produktivitas dapat mencapai rata-rata Nasional.



Untuk komoditi jagung, produktivitas masih berada dibawah rata-rata produktivitas Nasional, tetapi untuk kedelai pada tahun 1990 mengalami peningkatan.

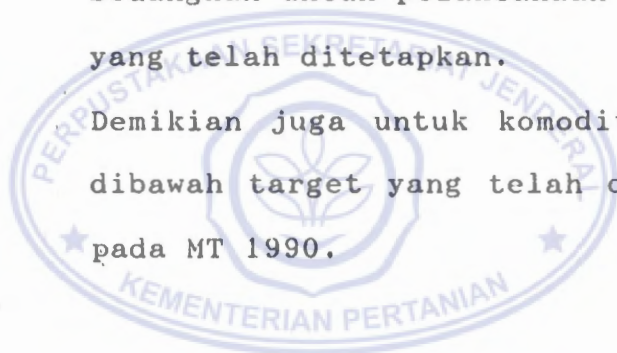
Gambaran pelaksanaan intensifikasi untuk komoditi padi, jagung dan kedelai MT 1990/1991 yang dibandingkan dengan MT 1989/1990 pada periode yang sama (keadaan 31 Desember 1990) adalah sebagai berikut :

- Realisasi tanam intensifikasi padi menunjukkan peningkatan, yaitu untuk MT 1990/1991 realisasi mencapai 113.124 Ha atau 52% dari target, sedangkan untuk MT 1989/1990 pada periode yang sama hanya mencapai 38.301 Ha atau 19,29% dari target.
- Realisasi tanam intensifikasi jagung MT 1990/1991 adalah sebesar 7.693 Ha atau 43% dari target, sedangkan untuk MT 1989/1990 pada keadaan yang sama hanya mencapai 874 Ha atau 4,86% dari target.
- Realisasi tanam intensifikasi kedelai MT 1990/1991 adalah sebesar 6.139 Ha atau 23% dari target, sedangkan untuk MT 1989/1990, pada keadaan yang sama hanya mencapai 569 Ha atau 2,32% dari target.

Realisasi pelaksanaan intensifikasi komoditi padi Supra Insus MT 1990 mencapai 123% dari target areal yang telah ditetapkan dalam SK Mentan Tahun 1990/1991.

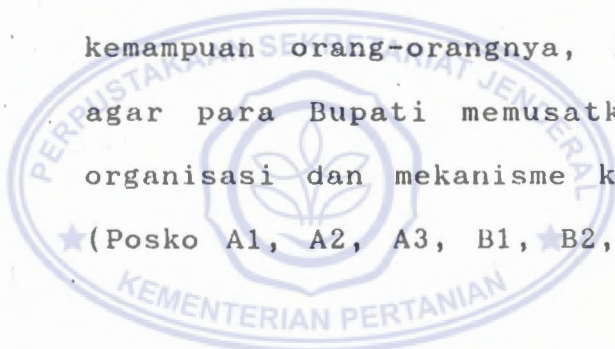
Sedangkan untuk pelaksanaan Insus dan Inmum berada dibawah target yang telah ditetapkan.

Demikian juga untuk komoditi jagung dan kedelai pelaksanaannya dibawah target yang telah ditetapkan kecuali untuk Insus Jagung pada MT 1990.



Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Produksi pangan adalah hasil dari sistem produksi pangan Nasional, yang pada saat sudah mencapai bentuk dan formatnya yang cukup handal. Ini berarti berbagai sub sistem sudah bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam suatu tatanan dan tata hubungan kerja yang menjamin sinkronisasi dan koordinasi yang serasi. Perangkat kebijakan politik, ekonomi, teknologi, prasarana dan administrasi benar-benar telah ada dalam kondisi yang dibutuhkan dan menggerakkan para petani. Tetapi sistem ini tidak semua kehandalannya diberbagai sub sistem wilayah, karena itu kita saksikan sekarang masih terdapat variabilitas produktivitas antara wilayah yang cukup tinggi. Karena proses pemantapan pengembangan sistem ini wilayah demi wilayah sangat tergantung dari unsur manusia dan kegiatannya yang khas harus dikembangkan suatu sistem yang sesuai dengan kondisi setempat (karena kepemimpinan dari kualitas manusia tidak bisa didatangkan dari luar), maka pada saat ini keberhasilan program pangan tidak lagi ditentukan oleh aktivitas kepemimpinan pada eselon kepemimpinan nasional dan propinsi, tetapi ditentukan oleh dinamika kepemimpinan dan sistem ditingkat kabupaten kebawah. Oleh karena itu pada tempatnyalah apabila kami saat ini meminta Saudara-saudara Bupati untuk memimpin aparatur Satuan Pelaksana Bimas di daerah secara dinamik dan sistimatik. Agar makin lama keberhasilan program itu makin ditentukan oleh sistem dan kemampuan orang-orangnya, kami meminta dengan sungguh-sungguh agar para Bupati memusatkan perhatian kepada perkembangan organisasi dan mekanisme kerja berbagai Pos Simpul Koordinasi (Posko A1, A2, A3, B1, B2, I, II, dan III). Maka metode Opsus

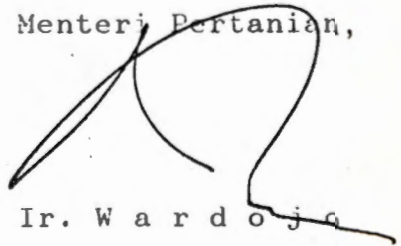


kami minta agar benar-benar diamalkan sebagai normalisasi ketatalaksanaan dan kepemimpinan operasional lapangan. Pengamatan kami selama ini menunjukkan bahwa para Bupati yang selalu memantau dan sering berada di lapangan sangat besar peluangnya untuk berhasil memimpin rakyatnya berpartisipasi dalam program pangan Nasional. Demikian upaya-upaya yang perlu kita laksanakan sesuai dengan amanat Bapak Presiden bebarapa waktu yang lalu, yaitu beliau berpesan agar :

- a. Swasembada beras harus dipertahankan dan dilestarikan,
- b. Produksi kedelai agar ditingkatkan baik melalui perluasan areal tanam maupun melalui peningkatan penerapan teknologi,
- c. Kredit Usahatani sebagai salah satu sumber modal usahatani harus disalurkan secara intensif, demikian juga pengembaliannya sehingga tidak mengganggu penyaluran untuk musim tanam berikutnya.

Atas perhatian Saudara-saudara, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pertanian,


Ir. Wardaja



17





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGARAHAN MENTERI PERTANIAN
PADA RAPAT KOORDINASI BIMAS PROPINSI BENGKULU
TANGGAL 22 JANUARI 1991 DI BENGKULU

Saudara Gubernur,
Saudara-saudara Kakanwil,
Saudara-saudara Bupati,
Saudara-saudara Kepala Dinas,
Saudara-saudara anggota Satpem Bimas,
Saudara-saudara anggota Satpel Bimas dan hadirin sekalian yang
terhormat,
Assalamu'alaikum Warokhmatullohi Wabarokatuh,

Pada kesempatan ini, marilah pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wataala, karena atas rahmat dan karunia NYA lah hari ini kita bisa berkumpul dalam pertemuan yang penting ini untuk bersama-sama melakukan evaluasi terhadap posisi kita bersama dalam mengupayakan lestarinya swasembada pangan. Kita bersyukur bahwa selama ini kita selalu mendapat berkah dan Ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga sampai saat ini kita tetap dapat mempertahankan swasembada beras yang sudah kita raih sejak tahun 1984 itu. Disamping untuk mengevaluasi posisi kita masing-masing serta posisi kita bersama, pertemuan inipun dimaksudkan sebagai suatu pertemuan untuk mengkonsolidasi segenap aparatur dan kekuatan masyarakat yang terkait dengan kiprah produksi pangan, agar tantangan dan peluang tahun ini serta tahun-tahun yang akan datang dapat selalu kita respons dengan melakukan/melaksanakan tindakan operasional yang tepat, efektif dan efisien.

Dengan iringan ucapan Selamat Tahun Baru 1991, saya ingin menyampaikan beberapa informasi dan beberapa pesan dalam menyongsong tahun 1991 ini.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Swasembada pangan adalah tekad atau komitmen nasional yang terus-menerus harus kita amankan dan kita jamin realisasinya dengan mengerahkan pikiran, perhatian serta segala potensi sumber daya (manusia, alam, daya dan dana) secara optimal sesuai dengan kebutuhan operasional di setiap lokasi. Pangan adalah hasil kegiatan petani, yang berada menyebar diseluruh pelosok wilayah tanah air kita yang luas dan beraneka ragam ini. Oleh karena itu program peningkatan produksi pangan, khususnya usaha pokok intensifikasi dan diversifikasi, merupakan program yang keberhasilannya ditentukan oleh tekad, semangat, kegairahan, dan kemampuan petani diseluruh wilayah pedesaan.

Pengalaman kita selama ini menunjukkan bahwa tekad, semangat, gairah, dan kemampuan petani untuk berpartisipasi dalam gerakan peningkatan produksi pangan dengan menerapkan sapta usaha, adalah refleksi dari tekad, semangat, gairah, dan kemampuan aparatur pengaturan, pelayanan, pembinaan, dan kepemimpinan yang digelar dipedesaan dibawah pembinaan jajaran instansi pemerintah maupun badan usaha yang simpul-simpul koordinasinya berada diberbagai tingkat administrasi pemerintahan.

Sehubungan dengan kenyataan itu, maka sebagai pesan inti untuk pertemuan ini saya ingin sekali lagi menyampaikan dan menyegarkan pesan yang selalu ditekankan oleh Bapak Presiden kepada kita sekalian, ialah agar kita tidak dan jangan bersikap rutin dalam menanggapi berbagai gejala hambatan, gangguan, dan

kendala yang dapat mengurangi peluang keberhasilan kita melestarikan swasembada pangan. Karena secara operasional tolok ukur dari pelestarian swasembada pangan itu adalah tercapainya sasaran produksi musiman dan tahunan (baik areal tanam / panen maupun hasil per hektarnya), pesan Bapak Presiden itu berarti bahwa kita harus selalu mencari dan menemukan jalan dan langkah, kiat atau jurus yang tepat untuk memecahkan segala masalah yang dihadapi di lapangan. Kita tidak bisa bersikap rutin apalagi berpuas diri, karena setiap masalah yang tidak terpecahkan akan merupakan ancaman potensial yang berbahaya bagi kelestarian swasembada pangan.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Bertolak dari sikap dinamik yang saya percaya kita miliki, maka segala gejala rutinitas yang selama ini masih sering kita jumpai perlu benar-benar kita waspadai agar jangan sampai menjadi penyakit kronis yang membuat masyarakat kita statik. Dan gejala statik ini secara nalar sederhana tercermin dari rendahnya laju peningkatan produksi beras kita pada tahun yang lalu, yang menurut ramalan III hanya naik 0,54 % dibanding tahun 1989. Oleh karena itu kami benar-benar prihatin dan kepercayaan diri serta optimisme kami menjadi goyah, khawatir kalau-kalau penyakit rutinitas yang membuat statik itu benar-benar sudah mulai melanda pribadi kita. Maka melalui pertemuan ini saya ingin berbagi rasa dan berbagi tanggung jawab dengan saudara-saudara sekalian dan saya akan sangat berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa apabila setelah dari pertemuan ini apa yang saya khawatirkan itu ternyata tidak benar. Saya ingin agar kita semua seimbang dari pertemuan ini benar-benar mempunyai kondisi mental dinamik yang bebas dari penyakit rutinitas.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Gejala menguatnya rutinitas yang mengakibatkan perkembangan statik dan melemahnya sikap dinamik kreatif yang tahun-tahun sebelumnya telah berhasil kita gelarkan, merupakan kondisi awal yang harus segera kita koreksi kalau kita memang bertekad untuk melestarikan swasembada pangan. Menghadapi tugas tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang sebagaimana sudah dicantumkan dalam buku Repelita V, yang khusus untuk kedelai ditambah lagi dengan sasaran khusus percepatan peningkatan produksi kedelai, karena importnya terus meningkat, kita benar-benar dihadapkan dengan misi yang berat dan pelik. Secara kuantitatif dan kualitatif sasaran yang harus kita capai tahun 1991 ini, hanya mungkin dapat kita capai apabila kita mampu memanfaatkan peluang yang sempit MT.1990/1991 ini dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya dan MT. 1991 berhasil kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin, dengan sasaran ganda (padi dan kedelai) yang kita utamakan.

Sebagaimana sudah kita ketahui dan kita alami bersama MT.1990/1991 ini di beberapa daerah hujannya terlambat satu sampai dua bulan. Ini berarti bahwa kita tidak bisa mengharapkan produksi dari tambahan areal (karena kemungkinan besar malahan areal panennya akan lebih kecil dari tahun yang lalu dan dari sasaran). Peningkatan produksi padi MT. 1990/1991 hanya mungkin kita capai dari peningkatan mutu intensifikasi yang akan memberikan hasil perhektar yang lebih tinggi. Ini berarti tambahan produksi itu harus kita capai dari peningkatan mutu intensifikasi di daerah Supra Insus, Insus paket D dan perluasan Insus paket C.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Untuk bahan penjabaran rencana operasional yang dapat

memanfaatkan sumber daya lahan dan iklim secara optimal dalam tahun 1991 ini, pada kesempatan ini saya sampaikan informasi yang kita dapat dari BMG tentang perkiraan sifat hujan diberbagai wilayah Indonesia dalam MT.1990/1991 dan MT.1991 yang akan datang. Dari informasi itu dapat kita simpulkan bahwa pada curah hujan itu secara kualitatif dan kuantitatif kondisinya lebih kurang menguntungkan (kemarau lebih kering, lebih panjang) dibandingkan dengan tahun 1989 dan tahun 1990 yang lalu. Ditinjau dari sudut inipun maka jawaban yang harus kita tampilkan sebagai respon terhadap kondisi lingkungan iklim yang kurang menggembirakan itu adalah ilmu dan teknologi tepat guna yaitu penerapan sapta usaha secara penuh dan disiplin. Sekali lagi peluang bagi padi dari segi areal makin terbatas, tapi bagi kedelai dan tanaman palawija lainnya dalam rangka diversifikasi akan makin besar peluang perluasannya, asal dapat dilakukan tepat waktu.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Propinsi Bengkulu dalam melaksanakan program pangan produksi padi tahun 1990 berdasarkan angka ramalan III Biro Pusat Statistik ternyata menurun sebesar 6.929 ton (GKG) atau 2,56 % dibanding dengan produksi tahun 1989. Secara Nasional kenaikan produksi padi hanya mancapai 241.071 ton atau 0,54 %.

Sasaran produksi Bengkulu tahun 1990 menurut SK. Menteri Pertanian sebesar 295 ribu ton, sedangkan produksi yang dicapai sebesar 263 ribu ton. Keadaan ini terutama disebabkan karena pelaksanaan intensifikasi belum sesuai yang diharapkan.

Dalam upaya untuk tetap melestarikan swasembada beras yang sekaligus upaya untuk berswasembada pangan pada tahun 1991 ini, kelihatannya tugas kita semakin berat.

Beberapa faktor yang menghadang upaya kita didalam meningkatkan produksi pangan khususnya beras pada tahun 1991 ini antara lain adalah :

1. Mekanisme kerja berbagai Pos Simpul Koordinasi (POSKO) belum berfungsi secara mantap.
2. Fasilitas KUT yang disediakan Pemerintah untuk mendukung kegiatan petani tidak dapat dimanfaatkan karena KUD tidak memenuhi persyaratan untuk menyalurkan KUT. Demimikian pula peran KUD sebagai penyalur/pengecer pupuk belum mampu melayani kebutuhan petani sesuai dengan prinsip 6 tepat, serta kelompoktani belum seluruhnya ditetapkan sebagai TPK.

Menghadapi keadaan demikian jelaslah tidak dapat diatasi secara rutin saja, tetapi memerlukan tindakan pemecahan yang lebih konkrit. Jika perlu dengan tindakan terobosan untuk menjamin terwujudnya penerapan teknologi, sekaligus produktivitas. Untuk mengoperasionalkannya peranan Posko disemua tingkat penting artinya sehingga setiap masalah yang timbul dapat dipecahkan secara dini selagi masalahnya belum terlalu berat.

Pelaksanaan program intensifikasi yang memerlukan kesempurnaan dan pengamalan teknologi produksi dengan tepat hanya mungkin dilaksanakana dengan sempurna bila unsur-unsur pelayanan (delivery system) dan unsur-unsur penerima (receiving system) dapat berfungsi secara baik.

Tugas utama Satuan Pembina Bimas dan Satuan Pelaksana Bimas adalah untuk menggerakkan unsur-unsur pelayanan. Pembinaan KUD bertujuan agar KUD mampu mengamalkan kerjasama yang melembaga dengan kelompoktani dan mampu memanfaatkan peluang kemudahan-kemudahan ekonomi yang disediakan pemerintah maupun swasta dalam

bentuk KUT atau kredit lainnya, sarana produksi pertanian dan Pemasaran hasil untuk kepentingan masyarakat petani. Meskipun tantangan demi tantangan akan kita hadapi, namun kita harus tetap dapat mempertahankan swasembada beras pada tahun 1991 ini yang akan ditentukan oleh pelaksanaan intensifikasi MT. 1990/1991 dan MT.1991 mendatang.

Oleh karena itu kita harus bekerja lebih keras lagi dengan tahun yang lalu. Pola kerja yang selama ini telah terbina dengan menerapkan pola Opsus, sudah mulai mengendor lagi kearah rutin. Kita membutuhkan upaya-upaya terobosan untuk mengatasi permasalahan yang semakin berat. Kegiatan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok tani dan KUD sebagai wadah kerjasama " Pelaku Utama Pembangunan ", harus selalu didukung dan dipantau secara cermat oleh Bupati KDH Tingkat II selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten dengan dukungan Sekretariat Satuan Pelaksana Bimas, sehingga Bupati/Ketua Satuan Pelaksana Bimas selalu memperoleh informasi yang aktual untuk dapat melaksanakan tindakan korektif secara dini. Ditingkat petani, pembinaan kelompok tani dalam melaksanakan kegiatan musyawarah untuk menetapkan dan menyusun RDK/RDKK yang digerakan oleh Kepala Desa serta perangkat teknis dalam Satuan Pelaksana Bimas di tingkat desa.

Dari Laporan-laporan yang saya terima khususnya dalam pelaksanaan Insus, masalah yang selalu dihadapi adalah penyaluran sarana produksi yang terlambat, penyaluran KUT tidak dapat direalisasi oleh KUD karena tunggakan kredit pada KUD maupun pada petani, Posko-posko yang tidak atau belum berfungsi dan penyuluhan yang masih perlu ditingkatkan dalam upaya membina kelompok tani.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Untuk itulah saya utus para eselon I dari anggota Badan pengendali Bimas untuk mengadakan rapat Koordinasi secara lengkap bersama-sama dengan Saudara-saudara sehingga melalui rapat ini akan dapat disimpulkan langkah-langkah operasional nyata mengatasi permasalahan-permasalahan secara lokal dan spesifik.

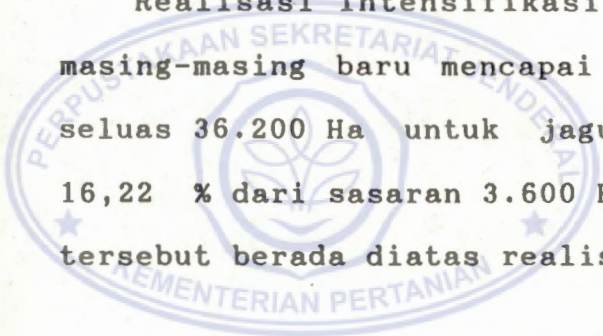
Berdasarkan data keragaan di Bengkulu perkembangan produksi tanaman padi perlu mendapat perhatian secara khusus.

Produktivitas rata-rata, luas areal panen dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1990 cenderung menurun. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya mutu intensifikasi.

Untuk komoditi jagung dan kedelai produktivitas berada dibawah produktivitas Nasional.

Realisasi intensifikasi padi MT. 1990/1991 keadaan s/d minggu ke II November 1990 baru mencapai 15.190 Ha atau 29,21 % dari sasaran MT. 1990/1991 seluas 52.000 Ha. Bila dibanding dengan realisasi intensifikasi padi MT. 1989/1990 pada periode yang sama seluas 3.854 Ha berarti ada kenaikan seluas 11.336 Ha atau 294 %. Kondisi yang baik ini harus diikuti dengan gerakan penerapan teknologi secara lengkap sesuai dengan rekomendasi, sehingga pada akhir musim akan tercapai sasaran areal intensifikasi maupun sasaran produktivitas dan produksi padi yang telah ditetapkan.

Realisasi intensifikasi jagung dan kedelai MT. 1990/1991 masing-masing baru mencapai 1.602 Ha atau 4,43 % dari sasaran seluas 36.200 Ha untuk jagung dan baru mencapai 584 Ha atau 16,22 % dari sasaran 3.600 Ha untuk kedelai. Walaupun realisasi tersebut berada diatas realisasi MT.1990/1991 pada periode yang



sama, tetapi bila kita lihat realisasi tanam pada akhir musim tanam sebelumnya kita masih meragukan tercapainya sasaran MT. 1990/1991 tanpa adanya upaya-upaya khusus.

Realisasi pelaksanaan intensifikasi komoditi padi MT. 1990 masih dibawah target areal yang telah ditetapkan dalam SK. Menteri Pertanian tahun 1990/1991 hanya mencapai 45,77 % , khusus untuk Panduan Supra Insus baru mencapai 46,83 %. Demikian juga pelaksanaan komoditi jagung hanya mencapai 70,53 %, sedangkan komoditi kedelai berada diatas target areal yang telah ditetapkan pada MT. 1990, mencapai 101,03 %.

Saudara Gubernur dan Saudara-Saudara sekalian

Produksi pangan adalah hasil dari sistem produksi pangan Nasional, yang pada saat ini sudah mencapai bentuk dan formatnya yang cukup handal. Ini berarti berbagai sub sistem sudah berkerja sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam suatu tatanan dan tata hubungan kerja yang menjamin sinkronisasi dan koordinasi yang serasi. Perangkat kebijakan politik, ekonomi, teknologi, prasarana dan administrasi benar-benar telah ada dalam kondisi yang dibutuhkan dan menggerakkan para petani. Tetapi sistem ini tidak sama kehandalannya diberbagai sub sistem wilayah karena itu kita saksikan sekarang masih terdapat variabilitas produktivitas antara wilayah yang cukup tinggi. Karena proses pemantapan pengembangan sistem ini wilayah demi wilayah sangat tergantung dari unsur manusia dan kegiatannya yang khas harus dikembangkannya sendiri setempat (karena kepemimpinan dari kualitas manusia tidak bisa didatangkan dari luar), maka pada saat ini keberhasilan program pangan tidak lagi ditentukan oleh aktivitas kepemimpinan pada eselon kepemimpinan nasional dan propinsi, tetapi ditentukan oleh dinamika kepemimpinan dan sistem

ditingkat kabupaten kebawah. Oleh karena itu pada tempatnyalah apabila kami saat ini kami minta Saudara-saudara Bupati untuk memimpin aparatur Satuan Pelaksana Bimas didaerah secara dinamik dan sistematik. Agar makin lama keberhasilan program itu makin ditentukan oleh sistem dan bukan oleh orang-orangnya semata-mata kami meminta dengan sungguh-sungguh agar para Bupati memusatkan perhatian kepada organisasi dan mekanisme kerja berbagai Pos Simpul Koordinasi (Posko A1, A2, A3, B1, B2, I, II dan III). Maka metode Opsus kami minta agar benar-benar diamalkan sebagai normalisasi ketatalaksanaan dan kepemimpinan operasional lapangan. Pengamatan kami selama ini menunjukkan bahwa para Bupati yang selalu memantau dan sering berada dilapangan sangat besar peluangnya untuk berhasil memimpin rakyatnya berpartisipasi dalam program pangan Nasional.

Demikian upaya-upaya yang perlu kita laksanakan sesuai dengan amanat Bapak Presiden, yaitu :

- a. Swasembada beras harus dipertahankan dan dilestarikan.
- b. Produksi kedelai agar ditingkatkan baik melalui perluasan areal tanam maupun melalui peningkatan penerapan teknologi.
- c. Kredit usahatani sebagai salah satu sumber modal usahatani harus disalurkan secara intensif, demikian juga pengembaliannya tidak mengganggu penyaluran untuk musim tanam berikutnya.

Atas perhatian Saudara-saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warokhmatullohi Wabarokatuh.

Menteri Pertanian

Ir. W a n d o j o



18





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGARAHAN MENTERI PERTANIAN/ KETUA BADAN PENGENDALI BIMAS

PADA RAPAT KOORDINASI BIMAS PROPINSI SULAWESI UTARA

TANGGAL 22 JANUARI DI MENADO

Saudara Gubernur,
Saudara - saudara Bupati,
Saudara - saudara para Kakanwil,
Saudara - saudara para Kepala Dinas,
Saudara - saudara anggota Satpem Bimas,
Saudara - saudara anggota Satpel Bimas,
dan hadirin sekalian Yth.

Assalamu'alaikum Warakhmatullohi Wabarokatuh.

Pada kesempatan ini marilah pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wataala, karena atas rahmat dan karunia Nya lah hari ini kita bisa berkumpul dalam pertemuan yang penting ini untuk bersama - sama melakukan evaluasi terhadap posisi kita bersama dalam mengupayakan lestarnya swasembada pangan. Kita bersyukur bahwa selama ini kita selalu mendapat berkah dan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga sampai saat ini kita tetap dapat mempertahankan swasembada beras yang sudah kita raih sejak tahun 1984 itu.



Disamping untuk mengevaluasi posisi kita masing - masing serta posisi kita bersama, pertemuan inipun dimaksudkan sebagai suatu pertemuan untuk mengkonsolidasi segenap aparatur dan kekuatan masyarakat yang terkait dengan kiprah produksi pangan, agar segenap tantangan dan peluang tahun ini serta tahun - tahun yang akan datang dapat selalu kita respons dengan melakukan/ melaksanakan tindakan operasional yang tepat, efektif dan efisien.

Dengan iringan ucapan Selamat Tahun Baru 1991, dan Selamat Natal kepada mereka yang merayakannya, saya ingin menyampaikan beberapa informasi dan beberapa pesan dalam menyongsong tahun 1991 ini.

Saudara Gubernur dan saudara - saudara sekalian.

Swasembada pangan adalah tekad atau komitment nasional yang terus - menerus harus kita amankan dan kita jamin realisasinya dengan mengerahkan pikiran, perhatian serta segala potensi sumberdaya (manusia, alam, daya, dana) secara optimal sesuai dengan kebutuhan operasional disetiap lokasi. Pangan adalah hasil kegiatan petani, yang berada menyebar diseluruh pelosok wilayah tanah air yang luas dan beraneka ragam ini. Oleh karena itu program peningkatan produksi pangan, khususnya usaha pokok intensifikasi dan diversifikasi, merupakan program yang keberhasilannya ditentukan oleh tekad, semangat, kegairahan dan kemampuan petani diseluruh wilayah pedesaan. Pengalaman kita selama ini menunjukkan bahwa tekad, semangat, gairah, dan kemampuan petani untuk berpartisipasi dalam gerakan peningkatan produksi pangan dengan menerapkan Sapta Usaha, adalah refleksi dari tekad, semangat, gairah, dan kemampuan aparatur pengaturan,



pelayanan, pembinaan dan kepemimpinan yang digelar di pedesaan dibawah pembinaan jajaran instansi pemerintah maupun badan usaha yang simpul-simpul koordinasinya berada diberbagai tingkat administrasi pemerintahan.

Sehubungan dengan kenyataan itu, maka sebagai pesan inti untuk pertemuan ini saya ingin sekali lagi menyampaikan dan menyegarkan pesan yang selalu ditekankan oleh Bapak Presiden kepada kita sekalian, ialah agar kita tidak dan jangan bersikap rutin dalam menanggapi berbagai gejala hambatan, gangguan, dan kendala yang dapat mengurangi peluang keberhasilan kita melestarikan swasembada pangan. Karena secara operasional tolok ukur dari pelestarian swasembada pangan itu adalah tercapainya sasaran produksi musiman dan tahunan (baik areal tanam/panennya maupun hasil perhektarnya), pesan Bapak Presiden itu berarti bahwa kita harus selalu mencari dan menemukan jalan dan langkah, kiat atau jurus yang tepat untuk memecahkan segala masalah yang dihadapi di lapangan. Kita tidak bisa bersikap rutin apalagi berpuas diri, karena setiap masalah yang tidak terpecahkan akan merupakan ancaman potensial yang berbahaya bagi kelestarian swasembada pangan.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Bertolak dari sikap dinamik yang saya percaya kita miliki, maka segala gejala rutinitas yang selama ini masih sering kita jumpai perlu benar-benar kita waspadai agar jangan sampai menjadi penyakit kronis yang membuat masyarakat kita statik. Dan gejala statik ini secara nalar sederhana tercermin dari rendahnya laju



peningkatan produksi beras kita pada tahun yang lalu, yang menurut Ramalan III hanya naik 0,54% dibanding tahun 1989. Oleh karena itu kami benar-benar prihatin dan kepercayaan diri serta optimisme kami menjadi goyah, khawatir kalau-kalau penyakit rutinitas yang membuat statik itu benar-benar sudah mulai melanda pribadi kita. Maka melalui pertemuan ini saya ingin berbagi rasa dan berbagi tanggung jawab dengan Saudara-saudara sekalian dan saya akan sangat berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa apabila setelah dari pertemuan ini apa yang saya khawatirkan itu ternyata tidak benar. Saya ingin agar kita semua sekebalinya dari pertemuan ini benar-benar mempunyai kondisi mental dinamik yang bebas dari penyakit rutinitas.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Gejala menguatnya rutinitas yang mengakibatkan perkembangan statik dan melemahnya sikap dinamik kreatif yang tahun-tahun sebelumnya telah berhasil kita gelarkan, merupakan kondisi awal yang harus segera kita koreksi kalau kita memang bertekad untuk melestarikan swasembada pangan. Menghadapi tugas tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang sebagaimana sudah dicantumkan dalam buku Repelita V, yang khusus untuk kedelai ditambah lagi dengan sasaran khusus percepatan peningkatan produksi kedelai karena importnya terus meningkat, kita benar-benar dihadapkan dengan misi yang berat dan pelik. Secara kuantitatif dan kualitatif sasaran yang harus kita capai tahun 1991 ini hanya mungkin dapat kita capai apabila kita mampu memanfaatkan peluang yang sempit MT 1990/1991 ini dengan sebaik - baiknya dan secepat - cepatnya dan MT 1991 yang berhasil kita manfaatkan dengan



semaksimal mungkin dengan sasaran ganda (padi dan kedelai) yang kita utamakan.

Sebagaimana sudah kita ketahui dan kita alami bersama, MT 90/91 ini hujannya terlambat satu sampai dua bulan. Ini berarti bahwa kita tidak bisa mengharapkan produksi dari tambahan areal (karena kemungkinan besar areal panennya akan lebih kecil dari tahun yang lalu dan dari sasaran). Peningkatan produksi padi MT 90/91 hanya mungkin kita capai dari peningkatan mutu intensifikasi yang akan memberikan hasil per hektar yang lebih tinggi. Ini berarti tambahan produksi padi itu harus kita capai dari peningkatan mutu intensifikasi di daerah Supra Insus, Insus paket D dan perluasan Insus paket C.

Saudara Gubernur dan saudara - saudara sekalian.

Untuk bahan penjabaran rencana operasional yang dapat memanfaatkan sumberdaya lahan dan iklim secara optimal dalam tahun 1991 ini pada kesempatan ini saya sampaikan informasi yang kita dapat dari BMG tentang prakiraan sifat hujan diberbagai wilayah Indonesia dalam MT 90/91 dan MT 91 yad. Dari informasi itu dapat kita simpulkan bahwa pada umumnya curah hujan itu secara kualitatif dan kuantitatif kondisinya lebih kurang menguntungkan (kemarau lebih kering, lebih panjang) dibandingkan dengan tahun 1989 dan tahun 1990 yang lalu. Ditinjau dari sudut ini pun, maka jawaban yang harus kita tampilkan sebagai respon terhadap kondisi lingkungan iklim yang kurang menggembirakan itu adalah ilmu dan teknologi tepat guna, yaitu penerapan Sapta Usaha secara penuh dan disiplin. Sekali lagi



peluang bagi padi dari segi areal makin terbatas, tapi bagi kedelai dan tanaman palawija lainnya dalam rangka diversifikasi akan makin besar peluang perluasannya, asal dapat dilakukan tepat waktu.

Saudara Gubernur dan saudara saudara sekalian.

Pada kesempatan ini, marilah kita tinjau secara rinci hasil - hasil yang dicapai sampai saat ini oleh tingkat nasional dan oleh Propinsi Sulawesi Utara.

Produksi beras tahun 1990. berdasarkan angka Ramalan III BPS, secara nasional hanya meningkat 0,64% dari produksi tahun 1989, suatu kenaikan yang sangat kecil bila dibandingkan dengan kenaikan produksi tahun 1989 dari produksi tahun sebelumnya (7,32 %).

Untuk Propinsi Dati I Sulawesi Utara produksi padi yang dicapai dalam tahun 1990, berdasarkan angka Ramalan III BPS, mencapai 321.078 ton GKG, yang berarti terdapat kenaikan sebanyak 6.115 ton GKG (1,94 %) dari produksi padi tahun 1989.

Dalam produksi palawija, khususnya jagung dan kedelai, secara nasional produksi jagung dan kedelai tahun 1990 meningkat dibandingkan dengan produksi tahun 1989. Untuk Propinsi Dati I Sulawesi Utara, produksi jagung tahun 1990 mencapai 197.478 ton pipilan kering dan produksi kedelai sebesar 36.380 ton biji kering, atau masing-masing terdapat kenaikan 27,46% dan 49,10% dari produksi tahun sebelumnya.

Walaupun terdapat kenaikan produksi, tetapi tingkat produktivitas per Ha Sulawesi Utara khususnya untuk padi dan jagung masih di bawah produktivitas per Ha rata - rata nasional. Untuk padi



perbedaannya 4,09 Ku/Ha (9,46%), jagung 0,49 Ku/Ha (2,27%). Khusus untuk kedelai produktivitas/Ha Sulawesi Utara berada 0,28 Ku di atas rata - rata nasional (2,53%).

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Sasaran produksi tahun 1991 yang harus kita capai dalam rangka peningkatan produksi dan pelestarian swasembada pangan cukup besar yaitu untuk padi sebesar 46,45 juta ton GKG, jagung 6,79 juta ton pipilan kering dan kedelai 1,72 juta ton biji kering. Dari produksi ini diharapkan Sulawesi Utara minimal menetapkan sasaran produksinya untuk padi 455.260 ton GKG, jagung 240.250 ton pipilan kering dan kedelai 36.340 ton biji kering.

Melihat kondisi produksi beras tahun 1990 yang naik hanya 0,54% dari tahun sebelumnya dan perkiraan kondisi iklim, sosial, dan aparatur dewasa ini maka pencapaian sasaran produksi padi tahun 1991 yang telah ditetapkan meningkat 3,30% dari tahun 1990, akan merupakan tantangan berat bagi kita, yang harus kita upayakan pencapaiannya.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Pada kesempatan ini, marilah kita coba mengkaji keragaan Intensifikasi yang merupakan tumpuan utama dalam usaha peningkatan produksi khususnya keragaan di Sulawesi Utara, yaitu sebagai berikut :

- 1) Keragaan areal Intensifikasi MT 1990 untuk padi mencapai 34.485 Ha (77% dari target), jagung 36.122 Ha (51%) dan kedelai 13.902 Ha (106%). Dari areal intensifikasi tersebut,



tercatat areal Insus padi seluas 18.724 Ha (50 % dari target),
Inmum padi 15.761 Ha (113%).

- 2) Keragaan Intensifikasi MT 1990/1991 (berdasarkan pemantauan sampai dengan minggu II Desember 1990) untuk padi baru tercatat 8 % dari target, jagung 8 % dan kedelai telah mencapai 7 %.
- 3) Dalam segi mutu Intensifikasi, khususnya untuk keragaan intensifikasi MT 1990 baik untuk padi, jagung dan kedelai belum begitu menggembirakan. Penggunaan benih berlabel, penggunaan pupuk berimbang baru 35% dari rekomendasi, dan pemakaian PPC/ ZPT oleh petani masih kurang. Disamping itu petani yang memanfaatkan KUT sangat kecil (\pm 4 % dari areal intensifikasi). Permasalahan tersebut disebabkan karena membengkaknya tunggakan kredit, bertambahnya jumlah KUD tidak layak menyalurkan KUT, banyaknya Kelompok tani yang berkemampuan kelompok Pemula, serta belum lancarnya pelaksanaan Posko terutama ditingkat Kecamatan dan Desa.
Saya berharap agar permasalahan yang telah terjadi pada MT 1990 tersebut diatas benar-benar dapat diatasi dan dicarikan jalan pemecahannya, sehingga tidak banyak mempengaruhi pelaksanaan intensifikasi MT 1990/1991.

Saudara Gubernur dan saudara saudara sekalian.

Untuk lebih menjamin peningkatan mutu intensifikasi, pola Insus terutama Insus paket D dan paket C, dan pola Supra Insus (untuk dikembangkan dikemudian hari) harus menjadi tumpuan upaya dalam menjamin gerakan partisipasi masyarakat. Berdasarkan data



Biro Pusat Statistik, produktivitas padi yang tinggi hanya dicapai oleh Supra Insus dan Insus. (terutama Supra Insus dan Insus yang menggunakan kredit). Perbedaan produktivitas padi per hektar dalam tahun 1989 antara Supra Insus dengan Insus adalah \pm 5 ku/Ha GKG dan Supra Insus dengan Inmum adalah 11 ku GKG/Ha. Sedangkan perbedaan produktivitas Insus dengan Inmum adalah \pm 6 ku/Ha.

Untuk mendukung keberhasilan ini, saya mengharap Saudara Gubernur dan para Bupati mengambil langkah langkah sebagai berikut :

- 1) Menggerakkan POSKO (baik Posko aparat maupun Posko petani), terutama Posko ditingkat Kecamatan dan Desa untk menjamin penerapan penuh rekomendasi teknologi, memantau : pelayanan sarana produksi, penyaluran kredit dan pengembaliannya. Saya harapkan para Bupati Kepala Daerah Tk I/ Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten untuk lebih menggerakkan dan memotivasi para Camat dan Kepala Desa supaya selalu tampil sebagai unsur penggerak utama dalam melaksanakan program intensifikasi dan mampu melakukan tindakan korektif secara dini dan mampu memecahkan masalah dalam menjamin peningkatan mutu intensifikasi.
- 2) Melakukan gerakan penyuluhan dan pelayanan sarana produksi dan kredit untuk memenuhi kebutuhan petani dengan jalan :
 - a. Melakukan kampanye penyuluhan teknologi untuk mendorong para petani agar bersedia dan mampu mengamalkan teknologi yang dianjurkan.



- b. Mendorong dan membantu Kelompoktani yang belum menyusun RDKK, untuk segera menyusun dan menyampaikannya kepada KUD.
 - c. KUD aktif mengumpulkan RDKK, dan melayani Kelompoktani yang membutuhkan KUT secara cepat dan tepat sesuai dengan permintaan RDKK nya.
 - d. Penyediaan sarana produksi (benih berlabel, pupuk, pestisida/ZPT) pada kios kios KUD sesuai dengan prinsip 6 tepat (tepat : mutu, jenis, jumlah, waktu, tempat dan harga) Selain itu diupayakan agar Kelompoktani dapat ditunjuk sebagai TPK oleh KUD.
 - e. Meningkatkan pembinaan Kelompoktani termasuk pembinaan tabungan Kelompoktani.
- 3) Meningkatkan pemantauan dan pengendalian dari setiap tingkatan Satuan Pelaksana Bimas, sehingga permasalahan dapat dipecahkan secara dini.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Produksi pangan adalah hasil dari sistem produksi pangan nasional yang pada saat ini sudah mencapai bentuk dan formatnya yang cukup handal. Ini berarti berbagai sub sistem yang menjadi perangkat dan bagian dari sistem sudah bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam suatu tatanan dan tata hubungan kerja yang menjamin sinkronisasi dan koordinasi yang serasi. Perangkat kebijakan politik, ekonomi, teknologi, prasarana dan administrasi benar-benar telah ada dalam kondisi yang dibutuhkan untuk menggerakkan para petani. Tetapi sistem ini tidak sama kehandalannya diberbagai sub sistem wilayah, karena itu kita saksikan sekarang masih terdapat variabilitas produktivitas antar



wilayah yang cukup tinggi. Karena proses pemantapan pengembangan sistem ini wilayah demi wilayah sangat tergantung dari unsur manusia dan kegiatannya yang khas harus dikembangkan sendiri setempat (karena kepemimpinan dan kualitas manusia tidak bisa didatangkan dari luar), maka pada saat ini keberhasilan program pangan tidak lagi ditentukan oleh aktivitas kepemimpinan pada Eselon kepemimpinan nasional dan propinsi, tetapi ditentukan oleh dinamika kepemimpinan dan sistem ditingkat kabupaten ke bawah. Oleh karena itu sudah pada tempatnyalah, apabila saya saat ini meminta Saudara Saudara Bupati untuk memimpin aparatur Satuan Pelaksana Bimas di daerah secara dinamik dan sistimatik. Agar makin lama keberhasilan program itu makin ditentukan oleh sistem dan bukan oleh orang-orangnya semata-mata, saya meminta dengan sungguh-sungguh agar para Bupati memusatkan perhatian kepada perkembangan organisasi dan mekanisme kerja berbagai Pos Simpul Koordinasi (Posko : A1, A2, A3, B1, B2, Posko : I dan II serta III). Oleh karena itu saya minta agar metode Opsus benar-benar diamalkan sebagai normalisasi ketatalaksanaan dan kepemimpinan operasional lapangan. Pengamatan saya selama ini menunjukkan bahwa para Bupati yang selalu memantau dan sering berada dilapangan sangat besar peluangnya untuk berhasil memimpin rakyatnya berpartisipasi dalam program pangan nasional.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Walaupun kita lebih memusatkan perhatian kita pada upaya pelestarian swasembada beras dan peningkatan produksi kedelai serta jagung, namun kiranya program lainnya yang ada di Sulawesi



Utara seperti Intensifikasi Ternak Kerja, Ayam Bukan Ras, Mina Padi dan TRI, harus pula diupayakan pelaksanaannya secara seimbang dan serasi.

Marilah pesan Bapak Presiden untuk selalu mengupayakan pelestarian swasembada beras dan peningkatan produksi kedelai yang dilakukan secara dinamik dan sistimatik dapat kita laksanakan dengan penuh dedikasi dan kita wujudkan secara nyata.

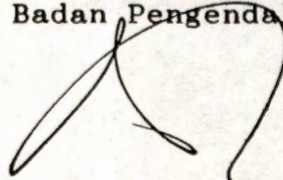
Demikianlah beberapa pokok arahan saya dan semoga kiranya kita sekalian diberikan kekuatan lahir dan batin untuk dapat melaksanakan tugas untuk mewujudkan cita cita tujuan nasional.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warakhmatullohi Wabarokatuh.

Menado, 22 Januari 1991

Menteri Pertanian/
Ketua Badan Pengendali Bimas


Ir. W a r d o j o



19





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGARAHAN MENTERI PERTANIAN
PADA RAPAT KOORDINASI BIMAS PROPINSI D.I. ACEH
TANGGAL 23 JANUARI 1991 DI BANDA ACEH

Saudara Gubernur,
Saudara-saudara Bupati,
Saudara-saudara para Kakanwil,
Saudara-saudara para Kepala Dinas,
Saudara-saudara anggota Satpem Bimas,
Saudara-saudara anggota Satpel Bimas,
dan Hadirin sekalian Yth.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pada kesempatan ini, marilah pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas rahmat dan karuniaNya lah hari ini kita bisa berkumpul dalam pertemuan yang penting ini untuk bersama-sama melakukan evaluasi terhadap posisi kita bersama dalam mengupayakan lestarinya swasembada pangan. Kita bersyukur bahwa selama ini kita selalu mendapat berkah dan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga sampai saat ini kita tetap dapat mempertahankan swasembada beras yang sudah kita raih sejak tahun 1984 itu. Disamping untuk mengevaluasi posisi kita masing-masing serta posisi kita bersama, pertemuan inipun dimaksudkan sebagai suatu pertemuan untuk mengkonsolidasi segenap aparatur dan kekuatan masyarakat yang terkait dengan kiprah produksi pangan, agar segenap tantangan dan peluang

Dengan iringan ucapan Selamat Tahun Baru 1991, saya ingin menyampaikan beberapa informasi dan beberapa pesan dalam menyongsong tahun 1991 ini.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Swasembada pangan adalah tekad atau komitmen nasional yang terus menerus harus kita amankan dan kita jamin realisasinya dengan mengerahkan pikiran, perhatian serta segala potensi sumberdaya (manusia, alam, daya dan dana) secara optimal sesuai dengan kebutuhan operasional di setiap lokasi. Pangan adalah hasil kegiatan petani, yang berada menyebar di seluruh pelosok wilayah tanah air kita yang luas dan beraneka ragam ini. Oleh karena itu program peningkatan produksi pangan, khususnya usaha pokok intensifikasi dan diversifikasi merupakan program yang keberhasilannya ditentukan oleh tekad, semangat, kegairahan dan kemampuan petani diseluruh wilayah pedesaan. Pengalaman kita selama ini menunjukkan bahwa tekad, semangat, gairah dan kemampuan petani untuk berpartisipasi dalam gerakan peningkatan produksi pangan dengan menerapkan Sapta Usaha adalah refleksi dari tekad, semangat, gairah dan kemampuan aparatur pengaturan, pelayanan, pembinaan dan kepemimpinan yang digelar di pedesaan dibawah pembinaan jajaran instansi pemerintah maupun badan usaha yang simpul-simpul koordinasinya berada diberbagai tingkat administrasi pemerintahan.

Sehubungan dengan kenyataan itu, maka sebagai pesan inti untuk pertemuan ini saya ingin sekali lagi menyampaikan



dan menyegarkan pesan yang selalu ditekankan oleh Bapak Presiden kepada kita sekalian, ialah agar kita tidak dan jangan bersikap rutin dalam menanggapi berbagai gejala hambatan, gangguan dan kendala yang dapat mengurangi peluang keberhasilan kita melestarikan swasembada pangan. Karena secara operasional tolok ukur dari pelestarian swasembada pangan itu adalah tercapainya sasaran produksi musiman dan tahunan (baik areal tanam/panen maupun hasil per hektarnya), pesan Bapak Presiden itu berarti bahwa kita harus selalu mencari dan menemukan jalan dan langkah, kiat atau jurus yang tepat untuk memecahkan segala masalah yang dihadapi dilapangan. Kita tidak bisa bersikap rutin apalagi berpuas diri, karena setiap masalah yang tidak terpecahkan merupakan ancaman potensial yang berbahaya bagi kelestarian swasembada pangan.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Bertolak dari sikap dinamik, yang saya percaya kita miliki, maka segala gejala rutinitas yang selama ini masih sering kita jumpai perlu benar-benar kita waspadai jangan sampai menjadi penyakit kronis yang membuat masyarakat kita statik. Dan gejala statik ini secara nalar sederhana tercermin dari rendahnya laju peningkatan produksi beras pada tahun yang lalu, yang menurut Ramalan III hanya naik 0,54 % dibanding tahun 1989. Oleh karena itu kami benar-benar prihatin dan kepercayaan diri serta optimisme kami menjadi goyah, khawatir kalau-kalau penyakit rutinitas yang membuat statik ini benar-benar sudah mulai melanda pribadi kita.

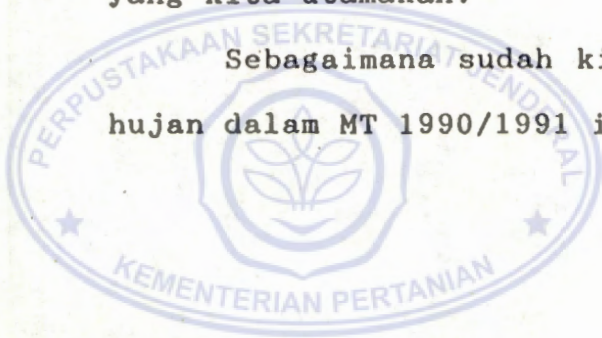


Maka melalui pertemuan ini saya ingin berbagi rasa dan berbagi tanggung jawab dengan saudara-saudara sekalian dan saya akan sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa apabila setelah dari pertemuan ini apa yang saya khawatirkan itu ternyata tidak benar. Saya ingin agar kita semua sekembalinya dari pertemuan ini benar-benar mempunyai kondisi mental dinamik yang bebas dari penyakit rutinitas.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Gejala menguatnya rutinitas yang mengakibatkan perkembangan statik dan melemahnya sikap dinamik kreatif yang tahun-tahun sebelumnya telah berhasil kita gelarkan, merupakan kondisi awal yang harus segera kita koreksi kalau kita memang bertekad untuk melestarikan swasembada pangan. Menghadapi tugas tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang sebagaimana sudah dicantumkan dalam buku Repelita V, yang khusus untuk kedelai ditambah lagi dengan sasaran khusus percepatan peningkatan produksi kedelai karena importnya terus meningkat, kita benar-benar dihadapkan dengan misi yang berat dan pelik. Secara kuantitatif dan kualitatif sasaran yang harus kita capai tahun 1991 ini hanya mungkin dapat kita capai apabila kita mampu memanfaatkan peluang yang sempit MT 1990/1991 ini dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya dan MT. 1991 berhasil kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin dengan sasaran ganda (padi dan kedelai) yang kita utamakan.

Sebagaimana sudah kita ketahui dan kita alami bersama, hujan dalam MT 1990/1991 ini datangnya terlambat 1 - 2 bulan.



Ini berarti bahwa kita tidak bisa mengharapkan produksi dari tambahan areal (karena kemungkinan besar malah areal panennya akan lebih kecil dari tahun yang lalu dan dari sasaran). Peningkatan produksi padi MT 1990/1991 hanya mungkin kita capai dari peningkatan mutu intensifikasi yang akan memberikan hasil per hektar yang lebih tinggi. Ini berarti tambahan produksi padi itu harus kita capai dari peningkatan mutu intensifikasi pada hamparan Supra Insus, Insus paket D dan perluasan Insus paket C.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Untuk bahan penjabaran rencana operasional yang dapat memanfaatkan sumber daya lahan dan iklim secara optimal dalam tahun 1991 ini pada kesempatan ini saya sampaikan informasi yang kita dapat dari BMG tentang perkiraan sifat hujan diberbagai wilayah Indonesia dalam MT 1990/1991 dan MT. 1991 yang akan datang. Dari informasi itu dapat kita simpulkan bahwa pada umumnya curah hujan itu secara kualitatif dan kuantitatif kondisinya kurang menguntungkan (kemarau lebih kering dan lebih panjang) dibandingkan dengan tahun 1989 dan tahun 1990 yang lalu. Ditinjau dari sudut inipun maka jawaban yang harus kita tampilkan sebagai respons terhadap kondisi lingkungan dan iklim yang kurang menggembirakan itu adalah ilmu dan teknologi tepat guna, yaitu penerapan Sapta Usaha secara penuh dan disiplin. Sekali lagi peluang bagi padi dari segi areal makin terbatas, tapi bagi kedelai dan tanaman palawija lain dalam rangka diversifikasi akan makin besar peluang perluasannya, asal dapat dilakukan tepat waktu.



Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Di Daerah Istimewa Aceh, selama ini kami amati adanya :

1. Keadaan iklim yang kurang menguntungkan sehingga terjadi pergeseran/mudurnya waktu tanam MT. 1990/1991 selama 1 - 2 bulan dibandingkan dengan MT. 1989/90.

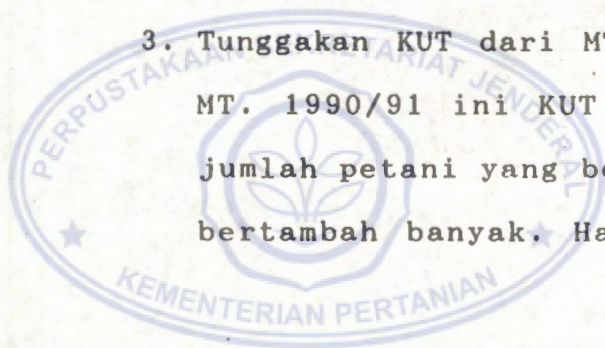
Akibat mudurnya waktu tanam itu, maka data realisasi tanam untuk komoditi padi MT. 1990/1991 di D.I. Aceh menunjukkan keadaan yang masih sangat rendah. Sampai akhir November 1990 realisasi Supra Insus mencapai 367 Ha (1,22 %), Insus 18.854 Ha (19,34 %) dan Inmum 21.768 Ha (38,26 %, sehingga realisasi seluruh areal intensifikasi baru mencapai 40.989 Ha (22,23 %).

Dari keragaan Supra Insus dan Insus paket D, sampai dengan pertengahan Desember 1990, realisasi tanam pada Supra Insus mencapai 1.420 Ha (7 %) dan Insus Paket D 3.337 Ha (33 %).

2. Fasilitas KUT yang disediakan pemerintah untuk mendukung petani tidak dapat dimanfaatkan/diknikmati oleh petani/Kelompoktani, karena semua KUD yang ada di daerah ini, tidak memenuhi persyaratan untuk penyaluran KUT.

Bantuan Pemda setempat, dalam mensubsidi KUD melunasi tunggaknya dengan maksud agar KUD tersebut dapat bertindak sebagai penyalur KUT pada musim tanam berikutnya, nampaknya tidak mencapai sasaran.

3. Tunggakan KUT dari MT - MT sebelumnya, menyebabkan pada MT. 1990/91 ini KUT tidak dapat terealisasi, sehingga jumlah petani yang berswadana dengan modal kecil, akan bertambah banyak. Hal ini akan berpengaruh pada mutu



intensifikasi, disamping adanya jumlah kelompok tani pemula dan lanjut yang besar.

4. Faktor pengairan (irigasi dan drainase) nampaknya juga merupakan masalah yang utama di daerah ini, sehingga pada waktu musim kemarau, bahaya kering tidak dapat di hindari karena debit air yang sangat rendah, bahkan mencapai nol, dan pada musim hujan, keadaan kembali menjadi sebaliknya, sehingga terjadi banjir.

5. Kalau kita lihat, D.I. Aceh ini dijuluki sebagai kandang sapi/kerbau yang terpanjang di dunia. Karena sepanjang perjalanan dari Banda Aceh sampai ke Langsa, sapi dan kerbau berkeliaran disepanjang jalan bahkan di tengah jalan. Tetapi suatu hal yang kontradiksi adalah, terjadi pengolahan tanah yang terlambat karena hanya mengandalkan traktor yang tersedia dalam jumlah terbatas.

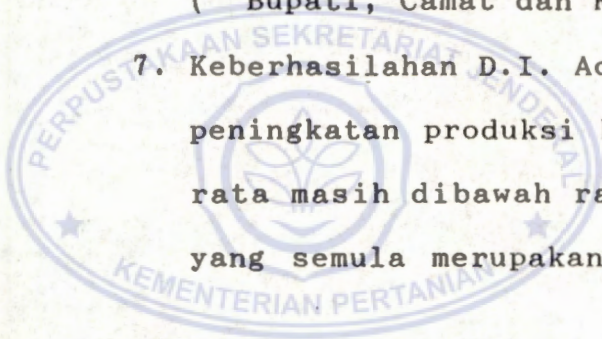
Ternak kerja yang ada dalam jumlah yang banyak di daerah ini, kurang dimanfaatkan untuk mengolah tanah.

Penerapan teknologi masih lemah, terutama penggunaan pupuk KCL, penggunaan ZPT/PPC, penggunaan benih berlabel dan pengendalian hama terpadu.

6. Posko-posko, terutama posko I, II, III, A1, A2, A3, B1, dan B2 tidak atau belum berfungsi sebagaimana diharapkan.

Disinilah peranan kepemimpinan kepala daerah setempat (Bupati, Camat dan Kepala Desa) ditantang.

7. Keberhasilan D.I. Aceh yang nyata sampai saat ini adalah peningkatan produksi kedelai meskipun produktivitas rata-rata masih dibawah rata-rata nasional. Beberapa daerah yang semula merupakan daerah bera sepanjang tahun selama



puluhan tahun, pada akhir-akhir ini petani/kelompoktani sudah mampu menanaminya dengan kedelai. Hanya petani/kelompoktani masih perlu pembinaan lebih lanjut tentang waktu yang tepat untuk penanaman itu.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati.

Berdasarkan data keragaan D.I. Aceh, produksi tanaman padi perlu mendapat perhatian secara khusus. Produktivitas rata-rata propinsi dari tahun 1988 sampai dengan 1990 (angka Ramalan III BPS), berada dibawah rata-rata nasional. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya mutu intensifikasi bila dibandingkan dengan rata-rata Nasional.

Begitu pula dengan komoditi jagung dan kedelai, pada tahun 1988, 1989 dan 1990, produktivitas yang dicapai berada di bawah rata-rata Nasional.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

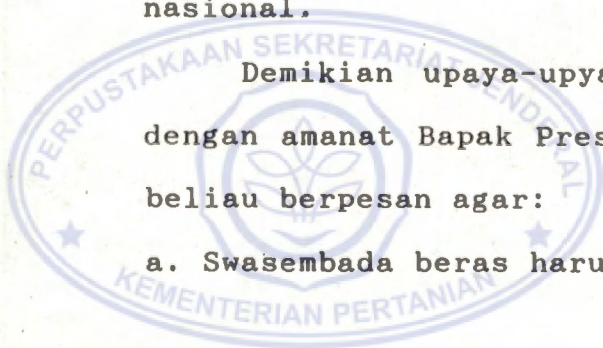
Produksi pangan adalah hasil dari sistem produksi pangan nasional, yang pada saat ini sudah mencapai bentuk dan formatnya yang cukup handal. Ini berarti berbagai sub sistem yang menjadi perangkat dan bagian dari sistem sudah berkerja sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam suatu tatanan dan tata hubungan kerja yang menjamin sinkronisasi dan koordinasi yang serasi.

Perangkat kebijakan politik, ekonomi, teknologi prasarana dan administrasi benar-benar telah ada dalam kondisi yang dibutuhkan dan menggerakkan para petani. Tetapi sistem ini tidak sama kehandalannya diberbagai sub sistem wilayah, karena itu kita saksikan sekarang masih terdapat variabilitas produktivitas antar wilayah yang cukup tinggi. Karena proses

pemantapan pengembangan sistem ini wilayah demi wilayah sangat tergantung dari unsur manusia dan kegiatannya yang khas harus dikembangkannya sendiri dan setempat (karena kepemimpinan dan kualitas manusia tidak bisa didatangkan dari luar), maka pada saat ini keberhasilan program pangan tidak lagi ditentukan oleh aktivitas kepemimpinan pada eselon kepemimpinan nasional dan propinsi, tetapi ditentukan oleh dinamika kepemimpinan dan sistem ditingkat kabupaten kebawah. Oleh karena itu pada tempatnyalah, apabila kami saat ini meminta saudara-saudara Bupati memimpin aparatur Satuan Pelaksana Bimas di daerah secara dinamik dan sistimatik. Agar makin lama keberhasilan program itu makin ditentukan oleh sistem dan bukan oleh orang-orangnya semata-mata, kami meminta dengan sungguh-sungguh agar para Bupati memusatkan perhatian kepada perkembangan organisasi dan mekanisme kerja berbagai Pos Simpul Koordinasi (Posko A1, A2, A3, B1, B2, I, II dan III). Maka metode Opsus kami minta agar benar-benar diamalkan sebagai normalisasi ketatalaksanaan dan kepemimpinan operasional lapangan. Pengamatan kami selama ini menunjukkan bahwa para Bupati yang selalu memantau dan sering berada di lapangan sangat besar peluangnya untuk berhasil memimpin rakyatnya berpartisipasi dalam program pangan nasional.

Demikian upaya-upaya yang perlu kita laksanakan sesuai dengan amanat Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, yaitu beliau berpesan agar:

- a. Swasembada beras harus dipertahankan dan dilestarikan.

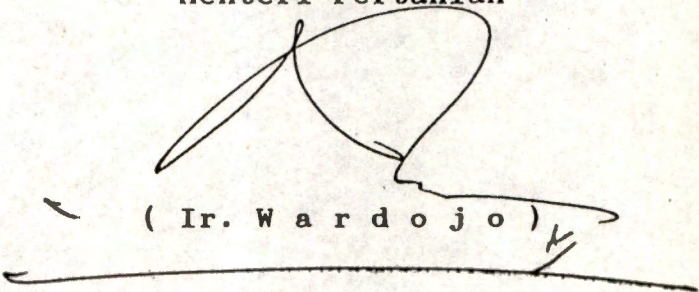


- b. Produksi kedelai agar ditingkatkan baik melalui perluasan areal tanam maupun peningkatan penerapan teknologi.
- c. Kredit Usahatani sebagai salah satu sumber modal usahataninya harus disalurkan secara intensif, demikian juga pengembaliannya sehingga tidak mengganggu penyaluran untuk musim tanam berikutnya.

Demikian uraian kami mengenai upaya yang perlu saudara-saudara perhatikan.

Atas perhatian saudara-saudara, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warokhmatllahi wabarakatuh

Menteri Pertanian



(Ir. W a r d o j o)



20





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

Sambutan Menteri Pertanian
Pada
Pembukaan Musyawarah Besar ke-V
Persatuan Purnakaryawan Perkebunan
Republik Indonesia (P3RI)
di Yogyakarta, 23 Januari 1991.

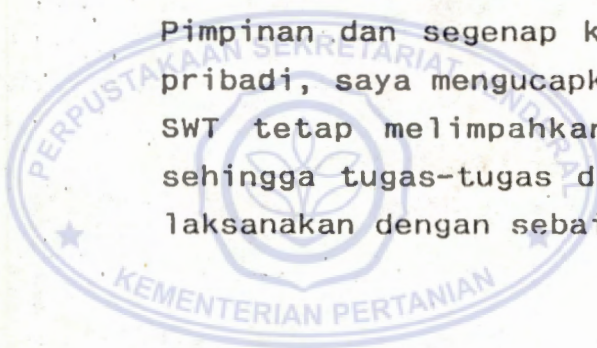
Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh,

Saudara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang saya hormati,

Saudara-saudara Pengurus Besar dan para Anggota Persatuan Purnakaryawan Perkebunan Republik Indonesia serta para undangan yang saya hormati,

Sebagai insan Pancasila, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini terlebih dahulu kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala atas rahmat dan hidayahNya yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga masih berkesempatan hadir di dalam Musyawarah Besar P3RI ke-V ini, dalam keadaan sehat wal afiat.

Musyawarah Besar P3RI ke-V ini diselenggarakan di awal tahun 1991 dan oleh karena itu walaupun sekarang kita sudah berada dalam minggu keempat bulan Januari 1991 kiranya belum terlalu terlambat apabila dalam kesempatan yang baik ini, atas nama Pimpinan dan segenap karyawan Departemen Pertanian serta secara pribadi, saya mengucapkan "Selamat Tahun Baru 1991", semoga Allah SWT tetap melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita, sehingga tugas-tugas dalam tahun 1991 dan seterusnya dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya.



Menurut laporan yang disampaikan oleh Sdr. Ketua Umum P3RI tadi, di dalam musyawarah ini akan dibahas sejumlah pokok permasalahan dan kemudian merumuskannya menjadi hasil musyawarah besar.

Kita patut bersyukur bahwa menurut laporan itu Pengurus Besar P3RI telah dapat merealisasikan program kerjanya. Di dalam Musyawarah Besar ini hendaknya dilakukan evaluasi atas pertanggungjawaban pengurus yang merupakan pelaksanaan program kerjanya itu.

Bagi program kerja yang belum dapat dilaksanakan agar dikaji lagi kemungkinan-kemungkinannya untuk disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi.

Organisasi para Pensiunan Karyawan Perusahaan Perkebunan Milik Negara ini didirikan pada awal tahun 1979 sebagai salah satu hasil musyawarah besarnya yang pertama yang diselenggarakan dari tanggal 29 s/d 31 Januari 1979 di Semarang. Dengan demikian hingga saat ini P3RI baru berusia 13 tahun, suatu usia yang masih sangat muda.

Walaupun P3RI berusia masih sangat muda, namun anggota-anggotanya sebagian besar adalah mantan Anggota Direksi dan mantan Pejabat Teras PN/PT Perkebunan bahkan kebanyakan telah bekerja sejak sebelum masa ambil alih perkebunan-perkebunan milik Belanda, dalam rangka perjuangan merebut kembali wilayah Irian Barat masuk ke dalam pangkuan Republik Indonesia. Oleh karena itu usia muda tentunya bukan merupakan hambatan untuk memajukan dan mengembangkan organisasi serta merealisasikan program kerjanya.



Pada kesempatan yang berbahagia ini saya minta kepada seluruh jajaran Pengurus Besar, Pengurus Cabang dan seluruh Peserta Musyawarah agar memfokuskan secara konkrit dan nyata peningkatan Tujuan dan Usaha Organisasi seperti tercantum dalam Anggaran Dasar Pasal 3, Pasal 4 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 2 dan Pasal 3, mencakup 3 (tiga) hal penting dan mendasar yaitu:

1. Menghimpun kekuatan idiil, moril dan materiil dari seluruh Purnakaryawan Perkebunan.
2. Mendirikan usaha-usaha Koperasi dan usaha-usaha komersil lainnya yang sekaligus bisa menciptakan lapangan kerja bagi para pensiunan yang masih potensial maupun bagi keluarga para pensiunan.
3. Turut berperan lebih aktif dan lebih profesional dalam pengelolaan Yayasan Dana Pensiun Perkebunan dengan cara menempatkan wakil-wakil dalam Badan Pengawas Yayasan.

Hadirin yang saya hormati,

Di dalam Pasal 3 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga P3RI dinyatakan bahwa sebagai salah satu usaha organisasi ini adalah turut mengelola Yayasan Dana Pensiun Perkebunan dengan cara menempatkan wakil-wakil P3RI dalam Kepengurusan Yayasan Dana Pensiun Perkebunan seperti saya singgung diatas tadi.

Dalam hubungan ini saya minta agar P3RI melalui wakil-wakilnya yang duduk di dalam Kepengurusan Yayasan Dana Pensiun Perkebunan dapat memberikan sumbangan yang nyata bagi pengembangan dan kemajuan Yayasan Dana Pensiun Perkebunan.



Sumbangan yang diharapkan dari Saudara-saudara antara lain berupa pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang sangat diperlukan untuk mengembangkan beberapa Badan Usaha Milik Yayasan Dana Pensiun Perkebunan yang menjadi tulang punggung di dalam pengembangan dana yayasan.

Pengalaman dan keahlian Saudara-saudara, para Anggota P3RI merupakan modal yang sangat berharga di dalam upaya turut membantu pengembangan Yayasan Dana Pensiun Perkebunan tersebut.

Dengan keadaan yayasan yang berkembang dan semakin maju, diharapkan dana milik para peserta yang dikelola oleh yayasan akan terus bertambah, sehingga dapat mendukung program kerja serta kewajiban yayasan untuk kepentingan peserta itu sendiri.

Dukungan dana yang diharapkan dari PT Perkebunan berupa angsuran Kekurangan Dana Program Pensiun, walaupun hal ini merupakan kewajiban bagi PT Perkebunan sebagai pemberi kerja, nampaknya tidak dapat terpenuhi 100% mengingat pemasaran komoditi PT Perkebunan itu sendiri baik dalam maupun luar negeri sejak beberapa waktu yang lalu mengalami banyak hambatan, disamping itu harga jualnyapun tidak menentu dan bahkan cenderung menurun.

Hambatan-hambatan yang dihadapi di dalam pemasaran komoditi PT Perkebunan di luar negeri terutama berupa pagar proteksi yang sengaja dipasang oleh negara-negara maju atau negara-negara industri.



Menyinggung sekilas mengenai peranan BUMN Sektor Pertanian khususnya Sub Sektor Perkebunan di dalam pembangunan nasional, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Tugas Departemen Pertanian di Sub Sektor Perkebunan semakin berat, mengingat Sub Sektor ini ditetapkan menjadi salah satu andalan penghasil devisa non migas dalam upaya peningkatan devisa negara dan perluasan lapangan kerja khususnya bagi rakyat pedesaan melalui program Perkebunan Inti Rakyat (PIR).
2. Dalam melaksanakan pembangunan pertanian khususnya perkebunan, Badan Usaha Milik Negara lingkup pertanian yang banyak bergerak pada perkebunan mempunyai peranan penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan pertanian tersebut, terutama dalam meningkatkan ekspor dan memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.
3. BUMN selain sebagai perusahaan milik negara adalah juga berfungsi sebagai agen pembangunan. Oleh karena itu selain berfungsi untuk meningkatkan produksi, dengan tujuan seperti tersebut diatas juga harus menjadi pendorong, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya serta meningkatkan peran mereka dalam pembangunan.

Keadaan pemasaran komoditi perkebunan yang kurang menggembirakan diatas dan peranan yang diharapkan dari Sub Sektor Perkebunan di dalam mewujudkan pembangunan nasional tersebut, hendaknya merupakan tantangan untuk mendorong dan memotivasi kita khususnya yang masih aktif bekerja di Sektor Pertanian untuk lebih berprestasi.



Hadirin yang saya hormati,


Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan pembukaan Musyawarah Besar P3RI ke-V ini, semoga dengan rahmat dan ridho Allah SWT musyawarah berjalan lancar dan dapat membuahakan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi para Anggotanya serta masyarakat pada umumnya.

Selamat bermusyawarah,

terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pertanian,



Ir Wardojo.



21





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
PENGARAHAN MENTERI PERTANIAN

PADA RAPAT KOORDINASI BIMAS PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
TANGGAL 25 JANUARI 1991 DI MATARAM

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saudara Gubernur,

Saudara-saudara Bupati,

Saudara-saudara para Kakanwil,

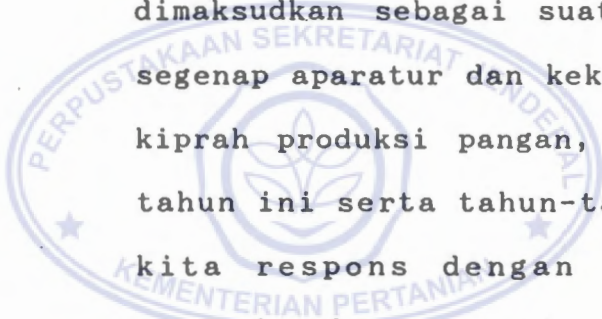
Saudara-saudara para Kepala Dinas,

Saudara-saudara anggota Satpem Bimas,

Saudara-saudara anggota Salpel Bimas,

dan Hadirin sekalian Yth.

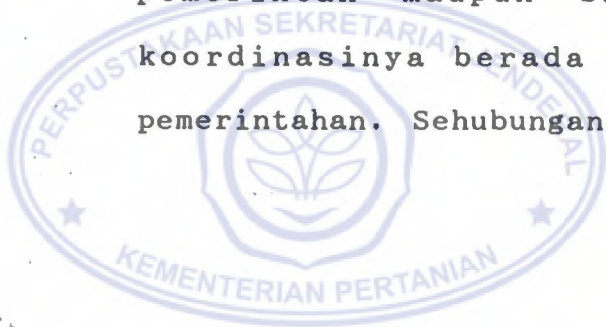
Pada kesempatan ini, marilah pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas rahmat dan karuniaNya lah hari ini kita bisa berkumpul dalam pertemuan yang penting ini untuk bersama-sama melakukan evaluasi terhadap posisi kita bersama dalam mengupayakan lestarnya swasembada pangan. Kita bersyukur bahwa selama ini kita selalu mendapat berkah dan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga sampai saat ini kita tetap dapat mempertahankan swasembada beras yang sudah kita raih sejak tahun 1984 itu. Disamping untuk mengevaluasi posisi kita masing-masing serta posisi kita bersama, pertemuan inipun dimaksudkan sebagai suatu pertemuan untuk mengkonsolidasi segenap aparatur dan kekuatan masyarakat yang terkait dengan kiprah produksi pangan, agar segenap tantangan dan peluang tahun ini serta tahun-tahun yang akan datang dapat selalu kita respons dengan melakukan/melaksanakan tindakan operasional yang tepat, efektif dan efisien.



Dengan iringan ucapan Selamat Tahun Baru 1991, dan Selamat Natal kepada mereka yang merayakannya, saya ingin menyampaikan beberapa informasi dan beberapa pesan dalam menyongsong tahun 1991 ini.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

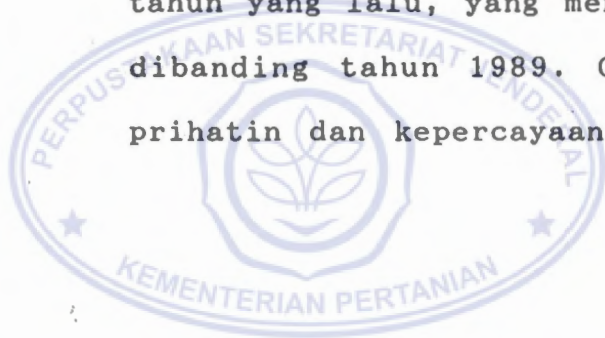
Swasembada pangan adalah tekad atau komitmen nasional yang terus menerus harus kita amankan dan kita jamin realisasinya dengan mengerahkan pikiran, perhatian serta segala potensi sumberdaya (manusia, alam, daya, dana) secara optimal sesuai dengan kebutuhan operasional di setiap lokasi. Pangan adalah hasil kegiatan petani, yang berada menyebar diseluruh peloksok wilayah tanah air kita yang luas dan beraneka ragam ini. Oleh karena itu program peningkatan produksi pangan, khususnya usaha pokok intensifikasi dan diversifikasi, merupakan program yang keberhasilannya ditentukan oleh tekad, semangat, kegairahan dan kemampuan petani diseluruh wilayah pedesaan. Pengalaman kita selama ini menunjukkan bahwa tekad, semangat, gairah dan kemampuan petani untuk berpartisipasi dalam gerakan peningkatan produksi pangan dengan menerapkan Sapta Usaha adalah refleksi dari tekad, semangat, gairah dan kemampuan aparatur pengaturan, pelayanan, pembinaan dan kepemimpinan yang digelar dipedesaan dibawah pembinaan jajaran instansi pemerintah maupun badan usaha yang simpul-simpul koordinasinya berada diberbagai tingkat administrasi pemerintahan. Sehubungan dengan kenyataan itu, maka sebagai



pesan inti untuk pertemuan ini saya ingin sekali lagi menyampaikan dan menyegarkan pesan yang selalu ditekankan oleh Bapak Presiden kepada kita sekalian, ialah agar kita tidak dan jangan bersikap rutin dalam menanggapi berbagai gejala, hambatan, gangguan dan kendala yang dapat mengurangi peluang keberhasilan kita dalam melestarikan swasembada pangan. Karena secara operasional tolok ukur dari pelestarian swasembada pangan itu adalah tercapainya sasaran produksi musiman dan tahunan (baik areal tanam/panennya maupun hasil per hektarnya), pesan Bapak Presiden itu berarti bahwa kita harus mencari dan menemukan jalan dan langkah, kiat atau jurus yang tepat untuk memecahkan segala masalah yang dihadapi dilapangan. Kita tidak bisa bersikap rutin apalagi berpuas diri, karena setiap masalah yang tidak terpecahkan merupakan ancaman potensial yang berbahaya bagi kelestarian swasembada pangan.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Bertolak dari sikap dinamik, yang saya percaya kita miliki, maka segala gejala rutinitas yang selama ini masih sering kita jumpai perlu benar-benar kita waspadai jangan sampai menjadi penyakit kronis yang membuat masyarakat kita statik. Dan gejala statik ini secara nalar sederhana tercermin dari rendahnya laju peningkatan produksi beras pada tahun yang lalu, yang menurut Ramalan III hanya naik 0,54 % dibanding tahun 1989. Oleh karena itu kami benar-benar prihatin dan kepercayaan diri serta optimisme kami menjadi



goyah, khawatir kalau-kalau penyakit rutinitas yang membuat statik ini benar-benar sudah mulai melanda pribadi kita. Maka melalui pertemuan ini saya ingin berbagi rasa dan berbagi tanggung jawab dengan saudara-saudara sekalian, dan saya akan sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa apabila setelah dari pertemuan ini apa yang saya khawatirkan itu ternyata tidak benar. Saya ingin agar kita semua sekembalinya dari pertemuan ini benar-benar mempunyai kondisi mental dinamik yang bebas dari penyakit rutinitas.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Gejala menguatnya rutinitas yang mengakibatkan perkembangan statik dan melemahnya sikap dinamik kreatif yang tahun-tahun sebelumnya telah berhasil kita gelarkan, merupakan kondisi awal yang harus segera kita koreksi kalau kita memang bertekad untuk melestarikan swasembada pangan. Menghadapi tugas tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang sebagaimana sudah dicantumkan dalam buku Repelita V, yang khusus untuk kedelai ditambah lagi dengan sasaran khusus percepatan peningkatan produksi kedelai karena importnya terus meningkat, kita benar-benar dihadapkan dengan misi yang berat dan pelik. Secara kuantitatif dan kualitatif sasaran yang harus kita capai tahun 1991 ini hanya mungkin dapat kita capai apabila kita mampu memanfaatkan peluang yang sempit MT 1990/1991 ini dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya dan MT 1991 berhasil kita manfaatkan dengan



semaksimal mungkin, dengan sasaran ganda (padi dan kedelai) yang kita utamakan.

Sebagaimana sudah kita ketahui dan kita alami bersama, MT 1990/1991 ini hujannya terlambat 1 - 2 bulan. Ini berarti bahwa kita tidak bisa mengharapkan produksi dari tambahan areal (karena kemungkinan besar malah areal panennya akan lebih kecil dari tahun yang lalu dan dari sasaran). Peningkatan produksi padi MT 1990/1991 hanya mungkin kita capai dari peningkatan mutu intensifikasi yang akan memberikan hasil per hektar yang lebih tinggi. Ini berarti tambahan produksi padi itu harus kita capai dari peningkatan mutu intensifikasi pada hamparan Supra Insus, Insus paket D dan perluasan Insus paket C.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Untuk bahan penjabaran rencana operasional yang dapat memanfaatkan sumber daya lahan dan iklim secara optimal dalam tahun 1991 ini, pada kesempatan ini saya sampaikan informasi yang kita dapat dari BMG tentang perkiraan sifat hujan di berbagai wilayah Indonesia dalam MT 1990/1991 dan Mt 1991 yang akan datang. Dari informasi itu dapat kita simpulkan bahwa pada umumnya curah hujan itu secara kualitatif dan kuantitatif kondisinya kurang menguntungkan (perkiraan kemarau lebih kering, lebih panjang) dibandingkan dengan tahun 1989 dan tahun 1990 yang lalu. Ditinjau dari sudut inipun maka jawaban yang harus kita tampilkan sebagai respons terhadap kondisi lingkungan atau iklim yang kurang



menggembirakan itu adalah ilmu dan teknologi tepat guna, yaitu penerapan Sapta Usaha secara penuh dan disiplin. Sekali lagi peluang bagi padi dari segi areal makin terbatas, tapi bagi kedelai dan tanaman palawija lain dalam rangka diversifikasi akan makin besar peluang perluasannya, asal dapat dilakukan tepat waktu.

Saudara Gubernur dan saudara - saudara sekalian.

Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan program pangan, berdasarkan angka ramalan III Biro Pusat Statistik produksi beras tahun 1990, berhasil meningkatkan 24.773 ton atau 2,23 % dibanding dengan produksi tahun 1989. Secara nasional kenaikan produksi beras hanya mencapai 241.071 juta ton atau 0,54 %. Namun demikian, produksi beras Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 1990 sebesar 1.135.291 ton masih belum mencapai sasaran berdasarkan SK Menteri Pertanian sebesar 1.649.500 ton, yang berarti baru dicapai 68,8 %. Keadaan belum tercapainya sasaran berdasarkan SK Menteri Pertanian ini, terutama disebabkan karena mutu pelaksanaan intensifikasi belum sesuai dengan yang direkomendasikan.

Dalam upaya untuk tetap melestarikan swasembada beras yang sekaligus upaya untuk berswasembada pada tahun 1991 ini, kelihatannya tugas kita semakin berat. Beberapa faktor yang menghadang upaya kita didalam meningkatkan produksi pangan khususnya beras pada tahun 1991 ini antara lain adalah :



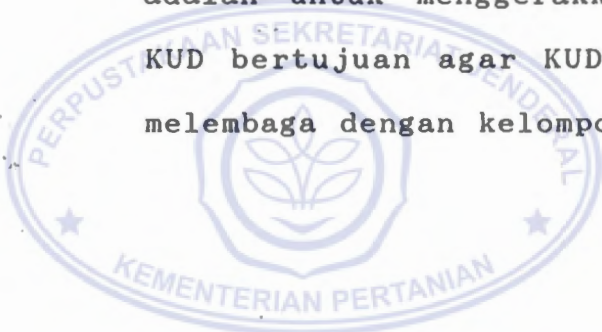
1. Keadaan iklim yang kurang menguntungkan sehingga terjadi pergeseran/munduranya waktu tanam MT 1990/1991 selama 1 - 2 bulan. Menurut Badan Metereologi dan Geofisika, curah hujan di Nusa Tenggara Barat dibawah normal.
2. Fasilitas KUT yang disediakan pemerintah untuk mendukung petani tidak dapat dimanfaatkan karena KUD yang tidak memenuhi persyaratan penyaluran KUT. Demikian pula belum berperannya KUD sebagai penyalur/pengecer saprodi dimana kelompok tani belum seluruhnya ditetapkan sebagai TPK.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Menghadapi keadaan demikian jelaslah tidak dapat diatasi secara rutin saja, tetapi memerlukan tindakan pemecahan yang lebih konkrit. Jika perlu dengan tindakan terobosan untuk menjamin terwujudnya penerapan teknologi. Juga mengoperasionalkan peran Posko disemua tingkat, sangat penting artinya sehingga setiap masalah yang timbul dapat dipecahkan secara dini selagi masalahnya belum terlalu berat.

Pelaksanaan program intensifikasi yang memerlukan kesempurnaan dan pengamalan teknologi produksi dengan tepat hanya mungkin dilaksanakan dengan sempurna bila unsur-unsur pelayanan (delivery system) dan unsur-unsur pengelola (receiving system) dapat berfungsi secara baik.

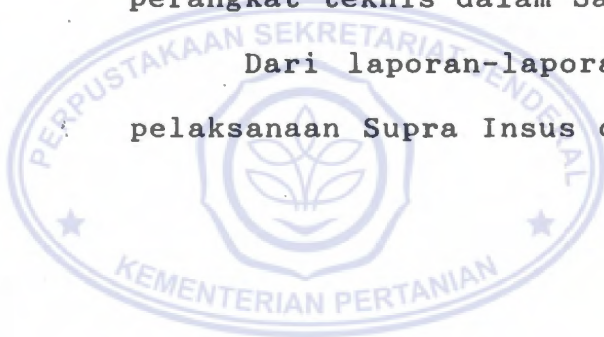
Tugas utama Satuan Pembina dan Satuan Pelaksana Bimas adalah untuk menggerakkan unsur-unsur pelayanan. Pembinaan KUD bertujuan agar KUD mampu mengamalkan kerjasama yang melembaga dengan kelompok tani dan mampu memanfaatkan peluang



kemudahan-kemudahan ekonomi yang disediakan pemerintah maupun swasta dalam bentuk KUT atau kredit lainnya, sarana produksi pertanian dan pemasaran hasil untuk kepentingan masyarakat petani. Meskipun tantangan demi tantangan akan kita hadapi, namun kita harus tetap dapat mempertahankan swasembada beras pada tahun 1991 ini yang akan ditentukan oleh pelaksanaan intensifikasi MT 1990/1991 dan MT 1991 mendatang. Mempertahankan swasembada beras berarti mempertahankan stabilitas Nasional untuk menghadapi Pemilu 1992.

Oleh karena itu kita harus bekerja lebih keras lagi dibandingkan dengan tahun yang lalu. Pola kerja yang selama ini telah terbina dengan menerapkan pola Opsus, sudah mulai mengendor lagi kearah rutin. Kita membutuhkan upaya-upaya terobosan untuk mengatasi permasalahan yang semakin berat. Kegiatan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok tani dan KUD sebagai "Pelaku Utama Pembangunan", harus selalu didukung dan dipantau secara cermat oleh Bupati selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten dengan dukungan Sekretariat Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten, sehingga Bupati selalu memperoleh informasi yang aktual untuk dapat melaksanakan tindakan korektif secara dini. Ditingkat petani, pembinaan kelompok tani dalam kegiatan musyawarah untuk menetapkan dan menyusun RDK/RDKK harus digerakkan oleh Kepala Desa serta perangkat teknis dalam Satuan Pelaksana Bimas ditingkat Desa.

Dari laporan-laporan yang saya terima khususnya dalam pelaksanaan Supra Insus di Nusa Tenggara Barat, masalah yang



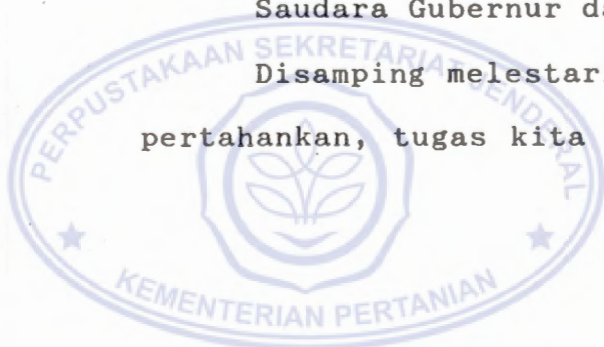
dihadapi adalah penyaluran sarana produksi yang terlambat, penyaluran KUT tidak direalisir oleh KUD karena tunggakan kredit oleh KUD maupun oleh petani, Posko-posko yang tidak atau belum berfungsi dan penyuluhan yang semakin kurang dalam upaya membina kelompok tani.

Untuk itulah saya mengutus para eselon I sebagai Badan Pengendali Bimas untuk mengadakan rapat Koordinasi secara lengkap bersama-sama dengan Saudara-saudara sehingga melalui rapat ini akan dapat disimpulkan suatu pola kerja dalam mengatasi permasalahan-permasalahan secara lokal spesifik.

Berdasarkan data keragaan di Nusa Tenggara Barat sampai awal Desember 1990, realisasi tanam intensifikasi padi MT 1990/1991 baru mencapai 14.571 hektar atau 7,12 % dari sasaran yang direncanakan seluas 204.650 hektar. Realisasi tanam Supra Insus baru dicapai 2,36 % yaitu seluas 1.366,380 hektar dari rencana 58.000 hektar ; realisasi tanam Insus mencapai 4.394,270 hektar atau 3,74 % dari rencana 117.380 hektar sedangkan realisasi tanam Inmum mencapai 30,1 % atau seluas 8.810,350 hektar dari rencana 29.270 hektar. Dari data keragaan tersebut, maka sangatlah diperlukan upaya-upaya khusus untuk menangani perkembangan kegiatan intensifikasi itu.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Disamping melestarikan swasembada beras yang harus kita pertahankan, tugas kita juga harus mengusahakan peningkatan

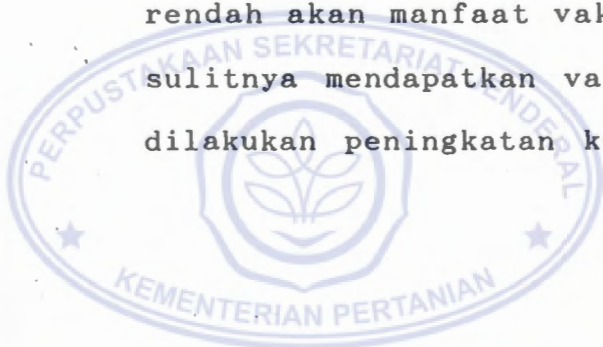


produksi kedelai dan jagung beserta komoditas palawija lainnya. Realisasi intensifikasi kedelai MT 1990/1991 mencapai 478 hektar (1,33 %) dari sasaran seluas 36.000 hektar. Sedangkan realisasi intensifikasi jagung mencapai 1.513 hektar (12,61 %) dari sasaran seluas 12.000 hektar. Yang perlu mendapat perhatian pada komoditi jagung dan kedelai ini adalah peningkatan mutu intensifikasi sebab dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1990, produktivitas jagung dan kedelai selalu dibawah produktivitas nasional. Oleh karena itu maka kegiatan peningkatan mutu intensifikasi pada daerah Supra Insus dan daerah Insus perlu mendapat perhatian yang lebih khusus.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian,

Disamping melaksanakan upaya peningkatan produksi tanaman pangan, Propinsi Nusa Tenggara Barat juga melaksanakan upaya peningkatan produksi peternakan melalui Intensifikasi Ayam bukan Ras (INTAB) dan Intensifikasi Ternak Kerja (INTEK) serta peningkatan produksi perikanan melalui Intensifikasi Mina Padi (INMINDI).

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa realisasi populasi Intab dan Intek sudah cukup baik, akan tetapi pelaksanaan vaksinasi Intab masih rendah. Rendahnya realisasi vaksinasi antara lain disebabkan tingkat kesadaran para petani masih rendah akan manfaat vaksinasi dan karena masih dirasakan sulitnya mendapatkan vaksin. Untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan peningkatan kegiatan pembinaan dan penyederhanaan



pola penyaluran vaksin yang dibutuhkan oleh para petani.

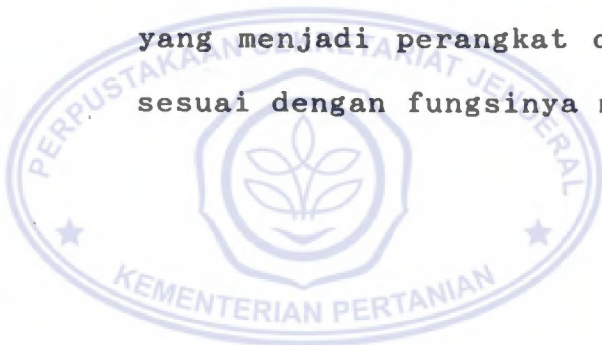
Realisasi Intensifikasi Mina Padi untuk MT 1990/1991 sampai akhir Desember 1991 belum ada realisasinya (0 %) dari sasaran areal 300 hektar. Belum terealisirnya Inmindi ini dimungkinkan karena petani belum menyadari akan kegunaan dari Inmindi tersebut dan juga dimungkinkan masih sulitnya memperoleh bibit ikan yang unggul. Sehubungan dengan itu kegiatan pembinaan melalui kegiatan penyuluhan dan penangkaran benih ikan perlu mendapat perhatian semua pihak.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian,

Pelaksanaan intensifikasi pertanian tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi, akan tetapi yang terpenting adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga tani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu penyelenggaraannya perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari seluruh aparat yang terkait. Peranan para Camat dan Kepala Desa dibawah kepemimpinan Bupati Kepala Daerah akan sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan intensifikasi pertanian tersebut diwilayah kerjanya.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Produksi pangan adalah hasil dari sistem produksi pangan nasional, yang pada saat ini sudah mencapai bentuk dan formatnya yang cukup handal. Ini berarti berbagai subsistem yang menjadi perangkat dan bagian dari sistem sudah bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam suatu tatanan dan



tata hubungan kerja yang menjamin sinkronisasi dan koordinasi yang serasi. Perangkat kebijakan politik, ekonomi, teknologi, prasarana dan administrasi benar-benar telah ada dalam kondisi yang dibutuhkan dan menggerakkan para petani. Tetapi sistem ini tidak sama kehandalannya diberbagai subsistem wilayah, karena itu kita saksikan sekarang masih terdapat variabilitas produktivitas antar wilayah yang cukup tinggi. Karena proses pemantapan pengembangan sistem ini wilayah demi wilayah sangat tergantung dari unsur manusia dan kegiatannya yang khas harus dikembangkannya sendiri setempat (karena kepemimpinan dan kualitas manusia tidak bisa didatangkan dari luar), maka pada saat ini keberhasilan program pangan tidak lagi ditentukan oleh aktivitas kepemimpinan pada eselon kepemimpinan nasional dan propinsi, tetapi ditentukan oleh dinamika kepemimpinan dan sistem ditingkat kabupaten ke bawah.

Oleh karena itu maka pada tempatnyalah, pada saat sekarang ini kami meminta Saudara-saudara Bupati untuk memimpin aparatur Satuan Pelaksana Bimas didaerah secara dinamik dan sistematik. Agar makin lama keberhasilan program itu makin ditentukan oleh sistem dan kemampuan orang-orangnya, kami meminta dengan sungguh-sungguh agar para Bupati memusatkan perhatian kepada perkembangan organisasi dan mekanisme kerja berbagai Pos Simpul Koordinasi (POSKO A1, A2, A3, B1, B2, I, II dan II). Maka metode Opsus kami minta agar benar-benar diamalkan sebagai normalisasi ketatalaksanaan dan



kepemimpinan operasional lapangan. Pengamatan kami selama ini menunjukkan bahwa para Bupati yang selalu memantau dan sering berada di lapangan sangat besar peluangnya untuk berhasil memimpin rakyatnya berpartisipasi dalam program pangan nasional.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Sekali lagi saya mengingatkan bahwa upaya-upaya yang perlu kita laksanakan sesuai dengan amanat Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu adalah :

1. Swasembada beras harus tetap dipertahankan dan dilestarikan.
2. Produksi kedelai agar ditingkatkan baik melalui perluasan areal tanam maupun peningkatan mutu intensifikasi.
3. Penyaluran dan pembayaran kembali Kredit usahatani sebagai sarana bantuan modal usahatani, harus diusahakan secara tertib, benar dan aman, sehingga semua petani yang membutuhkannya benar-benar bisa memperolehnya dan dapat membayarnya kembali dengan lancar.

Demikianlah uraian kami mengenai upaya yang perlu Saudara - saudara perhatikan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Menteri Pertanian

Ir. Wardoyo



22





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA PAMERAN "VISIT & INDO EXPO 1991"
Jakarta, 26 Januari - 6 Februari 1991

Saya menyambut baik penyelenggaraan Pameran "Visit & Indonesia Export Product 1991" ini. Karena melalui pameran ini diharapkan akan memantapkan upaya pemasaran komoditi pertanian dalam negeri untuk menunjang laju pertumbuhan industri nasional serta meningkatkan ekspor dan pariwisata Indonesia.

Dalam rangka memberikan dukungan terhadap pengembangan industri, pilihan strategi ialah mengembangkan agri-industri di pedesaan. Pengembangan agri-industri ini selain memacu pertumbuhan ekonomi, juga sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan petani. Pengembangan industri di pedesaan ini perlu didasarkan atas prinsip keunggulan komparatif, mempunyai pola keterkaitan antara industri skala kecil dengan industri skala besar yang menggunakan teknologi canggih, mempertimbangkan tingkat ketrampilan masyarakat setempat dalam memantapkan jenis industri pengolahan yang telah dikenal lingkungannya dan tersedianya bahan baku yang berkesinambungan.

Perkembangan ekspor komoditi pertanian tidak saja hanya peningkatan volume dan nilainya saja, tetapi juga harus dapat meningkatkan nilai tambah, mengadakan diversifikasi komoditi dengan memunculkan komoditi baru maupun dengan menganekaragamkan jenis produk ekspor dan pengembangan diversifikasi pasar ekspor. Kegiatan reorientasi ekspor ini perlu dilandasi oleh kajian keunggulan komparatif dan telaahan peluang pasar internasional, sehingga pengembangan ekspor tersebut berwawasan jangka panjang.

Sebagai negara agraris salah satu sumber dari potensi wisata Indonesia adalah di sektor pertanian. Agro-wisata adalah suatu bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro sebagai obyek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha di bidang agro.

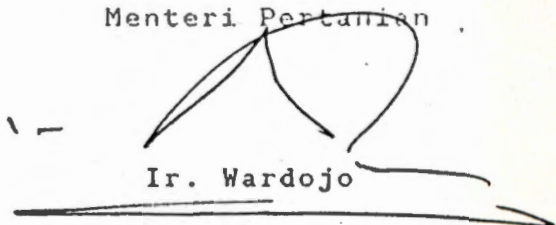
Secara umum daya tarik agro-wisata terletak pada berbagai



indah. Di pantai yang elok dapat dipertontonkan bagaimana para nelayan bekerja menangkap ikan secara tradisional, perahu uyang unik. Indonesia juga menghasilkan buah-buahan yang eksotik seperti mangga, manggis bahkan buah matoa yang khas dari Irian Jaya. Potensi lain yang berkaitan dengan sejarah adalah perkebunan tebu dan pabrik gulanya. Semua potensi agrowisata ini dapat dipromosikan yang berpedoman kepada Sapta Pesona.

Semoga sukses.

Menteri Pertanian



Ir. Wardoyo



23





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGARAHAN MENTERI PERTANIAN
PADA RAPAT KOORDINASI BIMAS PROPINSI KALIMANTAN BARAT
TANGGAL 28 JANUARI 1991 DI PONTIANAK

Saudara Gubernur,
Saudara-saudara Kakanwil,
Saudara-saudara Bupati,
Saudara-saudara Kepala Dinas,
Saudara-saudara anggota Satpem Bimas,
Saudara-saudara anggota Satpel Bimas dan hadirin sekalian yang
terhormat,

Assalamu'alaikum Warokhmatullohi Wabarokatuh,

Pada kesempatan ini, marilah pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wataala, karena atas rahmat dan karunia NYA lah hari ini kita bisa berkumpul dalam pertemuan yang penting ini untuk bersama-sama melakukan evaluasi terhadap posisi kita bersama dalam mengupayakan lestarinya swasembada pangan. Kita bersyukur bahwa selama ini kita selalu mendapat berkah dan Ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga sampai saat ini kita tetap dapat mempertahankan swasembada beras yang sudah kita raih sejak tahun 1984 itu. Disamping untuk mengevaluasi posisi kita masing-masing serta posisi kita bersama, pertemuan inipun dimaksudkan sebagai suatu pertemuan untuk mengkonsolidasi segenap aparatur dan kekuatan masyarakat yang terkait dengan kiprah produksi pangan, agar tantangan dan peluang tahun ini serta tahun-tahun yang akan datang dapat selalu kita respons dengan melakukan/melaksanakan tindakan operasional yang

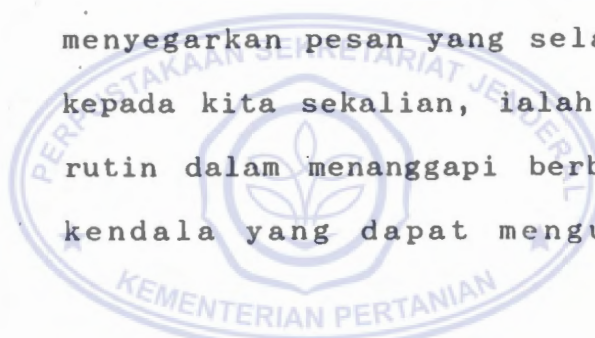
Dengan iringan ucapan Selamat Tahun Baru 1991, saya ingin menyampaikan beberapa informasi dan beberapa pesan dalam menyongsong tahun 1991 ini.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Swasembada pangan adalah tekad atau komitmen nasional yang terus-menerus harus kita amankan dan kita jamin realisasinya dengan mengerahkan pikiran, perhatian serta segala potensi sumber daya (manusia, alam, daya dan dana) secara optimal sesuai dengan kebutuhan operasional disetiap lokasi. Pangan adalah hasil kegiatan petani, yang berada menyebar diseluruh pelosok wilayah tanah air kita yang luas dan beraneka ragam ini. Oleh karena itu program peningkatan produksi pangan, khususnya usaha pokok intensifikasi dan diversifikasi, merupakan program yang keberhasilannya ditentukan oleh tekad, semangat, kegairahan, dan kemampuan petani diseluruh wilayah pedesaan.

Pengalaman kita selama ini menunjukkan bahwa tekad, semangat, gairah, dan kemampuan petani untuk berpartisipasi dalam gerakan peningkatan produksi pangan dengan menerapkan sapta usaha, adalah refleksi dari tekad, semangat, gairah, dan kemampuan aparatur pengaturan, pelayanan, pembinaan, dan kepemimpinan yang digelar dipedesaan dibawah pembinaan jajaran instansi pemerintah maupun badan usaha yang simpul-simpul koordinasinya berada diberbagai tingkat administrasi pemerintahan.

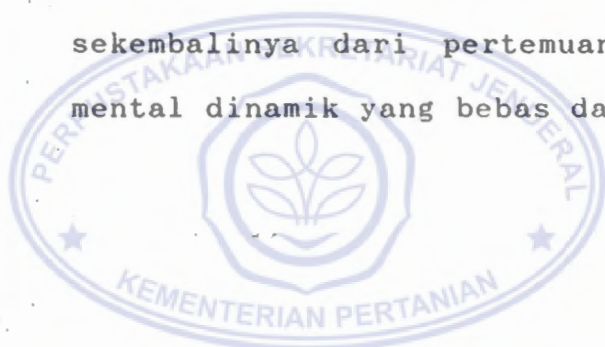
Sehubungan dengan kenyataan itu, maka sebagai pesan inti untuk pertemuan ini saya ingin sekali lagi menyampaikan dan menyegarkan pesan yang selalu ditekankan oleh Bapak Presiden kepada kita sekalian, ialah agar kita tidak dan jangan bersikap rutin dalam menanggapi berbagai gejala hambatan, gangguan, dan kendala yang dapat mengurangi peluang keberhasilan kita



melestarikan swasembada pangan. Karena secara operasional tolok ukur dari pelestarian swasembada pangan itu adalah tercapainya sasaran produksi musiman dan tahunan (baik areal tanam / panen maupun hasil per hektarnya), pesan Bapak Presiden itu berarti bahwa kita harus selalu mencari dan menemukan jalan dan langkah, kiat atau jurus yang tepat untuk memecahkan segala masalah yang dihadapi di lapangan. Kita tidak bisa bersikap rutin apalagi berpuas diri, karena setiap masalah yang tidak terpecahkan akan merupakan ancaman potensial yang berbahaya bagi kelestarian swasembada pangan.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Bertolak dari sikap dinamik yang saya percaya kita miliki, maka segala gejala rutinitas yang selama ini masih sering kita jumpai perlu benar-benar kita waspadai agar jangan sampai menjadi penyakit kronis yang membuat masyarakat kita statik. Dan gejala statik ini secara nalar sederhana tercermin dari rendahnya laju peningkatan produksi beras kita pada tahun yang lalu, yang menurut ramalan III hanya naik 0,54 % dibanding tahun 1989. Oleh karena itu kami benar-benar prihatin dan kepercayaan diri serta optimisme kami menjadi goyah, khawatir kalau-kalau penyakit rutinitas yang membuat statik itu benar-benar sudah mulai melanda pribadi kita. Maka melalui pertemuan ini saya ingin berbagi rasa dan berbagi tanggung jawab dengan saudara-saudara sekalian dan saya akan sangat berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa apabila setelah dari pertemuan ini apa yang saya khawatirkan itu ternyata tidak benar. Saya ingin agar kita semua sekembalinya dari pertemuan ini benar-benar mempunyai kondisi mental dinamik yang bebas dari penyakit rutinitas.



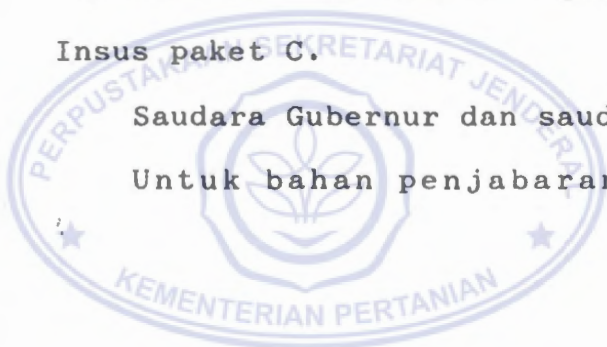
Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Gejala menguatnya rutinitas yang mengakibatkan perkembangan statik dan melemahnya sikap dinamik kreatif yang tahun-tahun sebelumnya telah berhasil kita gelarkan, merupakan kondisi awal yang harus segera kita koreksi kalau kita memang bertekad untuk melestarikan swasembada pangan. Menghadapi tugas tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang sebagaimana sudah dicantumkan dalam buku Repelita V, yang khusus untuk kedelai ditambah lagi dengan sasaran khusus percepatan peningkatan produksi kedelai, karena importnya terus meningkat, kita benar-benar dihadapkan dengan misi yang berat dan pelik. Secara kuantitatif dan kualitatif sasaran yang harus kita capai tahun 1991 ini, hanya mungkin dapat kita capai apabila kita mampu memanfaatkan peluang yang sempit MT.1990/1991 ini dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya dan MT. 1991 berhasil kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin, dengan sasaran ganda (padi dan kedelai) yang kita utamakan.

Sebagaimana sudah kita ketahui dan kita alami bersama MT.1990/1991 ini di beberapa daerah hujannya terlambat satu sampai dua bulan. Ini berarti bahwa kita tidak bisa mengharapkan produksi dari tambahan areal (karena kemungkinan besar malahan areal panennya akan lebih kecil dari tahun yang lalu dan dari sasaran). Peningkatan produksi padi MT. 1990/1991 hanya mungkin kita capai dari peningkatan mutu intensifikasi yang akan memberikan hasil perhektar yang lebih tinggi. Ini berarti tambahan produksi itu harus kita capai dari peningkatan mutu intensifikasi di daerah Supra Insus, Insus paket D dan perluasan Insus paket C.

Saudara Gubernur dan saudara-saudara sekalian.

Untuk bahan penjabaran rencana operasional yang dapat



memanfaatkan sumber daya lahan dan iklim secara optimal dalam tahun 1991 ini, pada kesempatan ini saya sampaikan informasi yang kita dapat dari BMG tentang perkiraan sifat hujan diberbagai wilayah Indonesia dalam MT.1990/1991 dan MT.1991 yang akan datang. Dari informasi itu dapat kita simpulkan bahwa pada umumnya curah hujan itu secara kualitatif dan kuantitatif kondisinya lebih kurang menguntungkan (kemarau lebih kering, lebih panjang) dibandingkan dengan tahun 1989 dan tahun 1990 yang lalu. Ditinjau dari sudut inipun maka jawaban yang harus kita tampilkan sebagai respon terhadap kondisi lingkungan iklim yang kurang menggembirakan itu adalah ilmu dan teknologi tepat guna yaitu penerapan sapta usaha secara penuh dan disiplin. Sekali lagi peluang bagi padi dari segi areal makin terbatas, tapi bagi kedelai dan tanaman palawija lainnya dalam rangka diversifikasi akan makin besar peluang perluasannya, asal dapat dilakukan tepat waktu.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Propinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan program pangan produksi padi tahun 1990 berdasarkan angka ramalan III Biro Pusat Statistik telah mencapai 654.990 ton yang menunjukkan adanya penurunan sebesar 34.059 ton atau 4,94 % bila dibandingkan dengan produksi tahun 1989. Secara Nasional kenaikan produksi padi hanya mencapai 241 ton atau 0,54 %. Pelaksanaan opsus Sutera II sampai dengan akhir tahun 1990 belum dapat terlihat dampaknya sehingga realisasi intensifikasi baik untuk komoditi tanaman padi, jagung maupun kedelai realisasinya masih kecil. Demikian juga sasaran produksi Kalimantan Barat tahun 1990 menurut SK. Menteri Pertanian sebesar 974.730 ton, sedangkan produksi yang dicapai sebesar 654.990 ton atau hanya 67,2 %. Keadaan ini



terutama disebabkan karena mutu pelaksanaan intensifikasi belum sesuai seperti yang diharapkan.

Dalam upaya untuk tetap melestarikan swasembada beras yang sekaligus upaya untuk berswasembada pangan pada tahun 1991 ini, kelihatannya tugas kita semakin berat.

Beberapa faktor yang menghadang upaya kita didalam meningkatkan produksi pangan khususnya beras pada tahun 1991 ini antara lain adalah :

1. Mekanisme kerja berbagai Pos Simpul Koordinasi (POSKO) belum berfungsi secara mantap.
2. Fasilitas KUT yang disediakan Pemerintah untuk mendukung kegiatan petani tidak dapat dimanfaatkan karena KUD tidak memenuhi persyaratan untuk menyalurkan KUT. Demikian pula peran KUD sebagai penyalur/pengecer pupuk belum mampu melayani kebutuhan petani sesuai dengan prinsip 6 tepat, serta kelompok tani belum seluruhnya ditetapkan sebagai TPK.

Menghadapi keadaan demikian jelaslah tidak dapat diatasi secara rutin saja, tetapi memerlukan tindakan pemecahan yang lebih konkrit. Jika perlu dengan tindakan terobosan untuk menjamin terwujudnya penerapan teknologi, sekaligus produktivitas. Untuk mengoperasionalkannya peranan Posko disemua tingkat penting artinya sehingga setiap masalah yang timbul dapat dipecahkan secara dini selagi masalahnya belum terlalu berat.

Pelaksanaan program intensifikasi yang memerlukan kesempurnaan dan pengamalan teknologi produksi dengan tepat hanya mungkin dilaksanakan dengan sempurna bila unsur-unsur pelayanan (delivery system) dan unsur-unsur penerima (receiving system) dapat berfungsi secara baik.



Tugas utama Satuan Pembina Bimas dan Satuan Pelaksana Bimas adalah untuk menggerakkan unsur-unsur pelayanan. Pembinaan KUD bertujuan agar KUD mampu mengamalkan kerjasama yang melembaga dengan kelompok tani dan mampu memanfaatkan peluang kemudahan-kemudahan ekonomi yang disediakan pemerintah maupun swasta dalam bentuk KUT atau kredit lainnya, sarana produksi pertanian dan pemasaran hasil untuk kepentingan masyarakat petani. Meskipun tantangan demi tantangan akan kita hadapi, namun kita harus tetap dapat mempertahankan swasembada beras pada tahun 1991 ini yang akan ditentukan oleh pelaksanaan intensifikasi MT. 1990/1991 dan MT. 1991 mendatang.

Oleh karena itu kita harus bekerja lebih keras lagi dibandingkan dengan tahun yang lalu. Pola kerja yang selama ini telah terbina dengan menerapkan pola Opsus, sudah mulai mengendor lagi ke arah rutin. Kita membutuhkan upaya-upaya terobosan untuk mengatasi permasalahan yang semakin berat. Kegiatan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok tani dan KUD sebagai wadah kerjasama "Pelaku Utama Pembangunan", harus selalu didukung dan dipantau secara cermat oleh Bupati KDH Tingkat II selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten dengan dukungan Sekretariat Satuan Pelaksana Bimas, sehingga Bupati/Ketua Satuan Pelaksana Bimas selalu memperoleh informasi yang aktual untuk dapat melaksanakan tindakan koreksi secara dini. Ditingkat petani, pembinaan kelompok tani dalam melaksanakan kegiatan musyawarah untuk menetapkan dan menyusun RDK/RDKK yang digerakkan oleh Kepala Desa serta perangkat teknis dalam Satuan Pelaksana Bimas di tingkat desa.



Dari laporan-laporan yang saya terima khususnya dalam pelaksanaan Insus, masalah yang selalu dihadapi adalah penyaluran sarana produksi yang terlambat, penyaluran KUT tidak dapat direalisir oleh KUD karena tunggakan kredit pada KUD maupun pada petani, Posko-posko yang tidak atau belum berfungsi dan penyuluhan yang masih perlu ditingkatkan dalam upaya membina kelompok tani.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Untuk itulah saya utus para eselon I dari anggota Badan pengendali Bimas untuk mengadakan rapat Koordinasi secara lengkap bersama-sama dengan Saudara-saudara sehingga melalui rapat ini akan dapat disimpulkan langkah-langkah operasional nyata mengatasi permasalahan-permasalahan secara lokal dan spesifik.

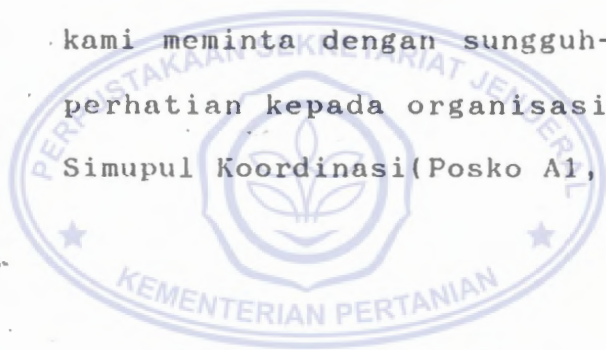
Berdasarkan data keragaan di Kalimantan Barat perkembangan produksi tanaman padi perlu mendapat perhatian secara khusus. Produktivitas rata-rata propinsi dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1990 cenderung menurun. Komoditi ini disebabkan oleh kurangnya mutu intensifikasi bila dibandingkan dengan rata-rata Nasional. Untuk komoditi jagung, produktivitas berada dibawah rata-rata produktivitas Nasional dan untuk kedelai juga mulai menurun. Realisasi intensifikasi khusus komoditi padi MT. 1989/1990 mencapai 52.968 hektar atau 30,1 %. Pada Periode yang sama MT. 1990/1991 realisasi Insus tanam padi mencapai 34.647 hektar atau 35,92 %. Realisasi pelaksanaan intensifikasi khusus jagung pada MT. 1989/1990 mencapai 537 hektar atau 3,71 %. dan MT. 1990/1991 pada periode yang sama mencapai 534 hektar atau 5,13 %. Realisasi intensifikasi khusus kedelai MT. 1989/1990



mencapai 43 hektar atau 3.31 % dan MT. 1990//1991 pada periode yang sama mencapai 109 hektar atau 3,89 %.

Saudara Gubernur dan Saudara-saudara sekalian.

Produksi pangan adalah hasil dari sistem produksi pangan Nasional, yang pada saat ini sudah mencapai bentuk dan formatnya yang cukup handal. Ini berarti berbagai sub sistem sudah bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam suatu tatanan dan tata hubungan kerja yang menjamin sinkronisasi dan koordinasi yang serasi. Perangkat kebijakan politik, ekonomi, teknologi, prasarana dan administrasi benar-benar telah ada dalam kondisi yang dibutuhkan dan menggerakkan para petani. Tetapi sistem ini tidak sama kehandalannya diberbagai sub sistem wilayah karena itu kita saksikan sekarang masih terdapat variabilitas produktivitas antara wilayah yang cukup tinggi. Karena proses pemantapan pengembangan sistem ini wilayah demi wilayah sangat tergantung dari unsur manusia dan kegiatannya yang khas harus dikembangkannya sendiri setempat (karena kepemimpinan dan kualitas manusia tidak bisa didatangkan dari luar), maka pada saat ini keberhasilan program pangan tidak lagi ditentukan oleh aktivitas kepemimpinan pada eselon kepemimpinan nasional dan propinsi, tetapi ditentukan oleh dinamika kepemimpinan dan sistem ditingkat kabupaten kebawah. Oleh karena itu pada tempatnyalah apabila kami saat ini kami minta Saudara-saudara Bupati untuk memimpin aparatur Satuan Pelaksana Bimas didaerah secara dinamik dan sistematik. Agar makin lama keberhasilan program itu makin ditentukan oleh sistem dan bukan oleh orang-orangnya semata-mata kami meminta dengan sungguh-sungguh agar para Bupati memusatkan perhatian kepada organisasi dan mekanisme kerja berbagai Pos Simumpul Koordinasi (Posko A1, A2, A3, B1, B2, I, II dan III). Maka



metode Opsus kami minta agar benar-benar diamalkan sebagai normalisasi ketatalaksanaan dan kepemimpinan operasional lapangan. Pengamatan kami selama ini menunjukkan bahwa para Bupati yang selalu memantau dan sering berada dilapangan sangat besar peluangnya untuk berhasil memimpin rakyatnya berpartisipasi dalam program pangan Nasional.

Demikian upaya-upaya yang perlu kita laksanakan sesuai dengan amanat Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, yaitu :

- a. Swasembada beras harus dipertahankan dan dilestarikan.
- b. Produksi kedelai agar ditingkatkan baik melalui perluasan areal tanam maupun melalui peningkatan penerapan teknologi.
- c. Kredit usahatani sebagai salah satu sumber modal usahatani harus disalurkan secara intensif, demikian juga pengembaliannya sehingga tidak mengganggu penyaluran untuk musim tanam berikutnya.

Atas perhatian Saudara-saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warokhmatullohi Wabarokatuh.

Menteri Pertanian


Ir. Wardjo



24





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTER OF AGRICULTURE, REPUBLIC OF INDONESIA
AT THE OPENING CEREMONY OF THE INTERNATIONAL COURSES
ON AGRICULTURAL EXTENSION METHODOLOGY AND
PEST SURVEILLANCE AND FORECASTING
JAKARTA, JANUARY 28, 1991

Your Excellency Mr. Ambassador

Honorable Representative of JICA

Distinguished Participants, Ladies and Gentlemen.

On behalf of the Government of Indonesia, it is my privilege and pleasure to extend to you, a very warm welcome to these courses on agricultural extension methodology and pest surveillance and forecasting. We appreciate your presence here, since we know that some of you have travelled a long way to be with us in Indonesia. We do hope, you will feel at home during your stay in Indonesia. I am particularly pleased to be with you on this occasion. The Ministry of Agriculture, in cooperation with JICA, is happy to host these important courses because they are greatly demanded by developing countries especially countries in the Asian and Pacific region.



These two courses are held in compliance with the outcome of the First Summit Meeting of Group - 15 held in Kualalumpur last year. The Meeting had given a new momentum to implement technical cooperation among developing countries in general and cooperation in agricultural development in particular. It is also held, to share with the developing countries the results of technical cooperation between the Government of Indonesia and the Government of Japan in developing extension methodology and pest surveillance and forecasting technology.

Ladies and gentlemen,

Allow me to brief you the agricultural development in Indonesia. Agriculture is the most important sector of the economy of Indonesia. Agricultural development plays a focal role and it acts as a prime mover for developing other sectors of the economy.

The main goal of agricultural development is to improve income and prosperity of the farming community through increasing the quantity and improving the quality of agricultural products.

As you might know, Indonesia has succeeded in achieving self-sufficiency in rice since 1984. This success can only

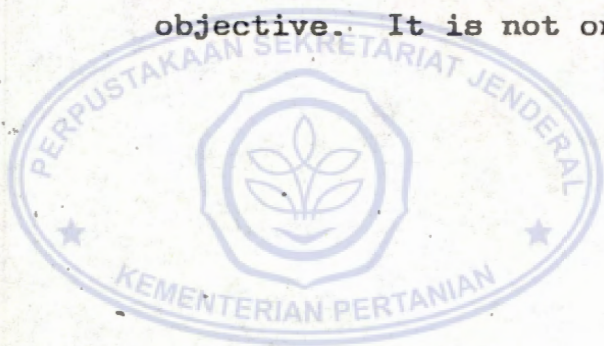


be reached after several decades of hard work. Indonesia which some years ago was the biggest rice-importing country in the world, with a total import of 2 million tons a year, has now become self-sufficiency in rice. What we have achieved indeed requires a hard and concerted effort.

The success of self-sufficiency in rice is one step toward the prosperity of farmers. However, to feed a population of 180 million generates another great challenge to our future development. Therefore, increasing rice and other food crops production is a must in bringing agriculture into a sustainable development. For this purpose, an increasing concerted effort in agricultural extension and plant protection is inevitable.

Ladies and gentlemen,

Agricultural extension is a non-formal education system for farmers and their families; it is a link between research and farming; it is a bridge between findings and application; it is a leader of behavioral development; and it is a partnership between the government and the people. Agricultural extension in Indonesia is important in view of long and medium-term development. It is also important because agricultural extension itself is a development objective. It is not only teaching people, at the same time



it is also in the process of development. Agricultural extension endeavors to build itself and to create better farming, better bussiness, and better living for better community.

Pest surveillance is also an important aspect for the implementation of integrated pest management concept. This activity should be able to provide timely pest information in the field, such as time of occurence, tendency of population build-up, and biotype shifting, so that a proper pest control can be done prior to aggravating pest infestation. The pest surveillance and forcasting coupled with properly and timely supply of production inputs and agricultural extension efforts will result in a significant increase of agricultural production.

Ladies and Gentlemen,

I would like to take this opportunity to express my sincere thanks to the Government of Japan for the generous funding and assistance to these courses. I also wish to extend my thanks to the committee for their excellent efforts in making this occassion possible.

Last but not least, the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia hopes that your stay in Indonesia will



be another enjoyable and fruitfull one. Please accept our best wishes for a smooth progress in your exchange of views and experiences toward a succesfull conclusion of these courses.

Bismillahirohmanirrohim, I herewith declare the International Courses on Agricultural Extension Methodology and Pest Surveillance and Forcasting are officially opened.

Thank you.

Minister of Agriculture

Wardoyo



25





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

**MENGELOLA
SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
DALAM USAHA
PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DI INDONESIA**

**Prasaran Menteri Pertanian
Pada Seminar Agronomi Nasional
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Di Padang, 4-6 Februari 1991**



MENGELOLA SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM USAHA PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DI INDONESIA

I. PENDAHULUAN

Pembangunan Pertanian merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dalam mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam jiwa Pancasila dan UUD 45 untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Sasaran pembangunan nasional dalam jangka panjang ialah terciptanya struktur ekonomi yang seimbang, dengan menciptakan kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh yang mendukung perkembangan sektor industri.

Secara umum, sumbangan utama sektor pertanian terhadap Pembangunan Nasional diwujudkan dalam bentuk menghasilkan bahan pangan bagi penduduk, menciptakan kesempatan kerja, menyediakan faktor produksi dalam bentuk tenaga kerja dan pembentukan modal investasi, mendukung sektor non pertanian melalui penyediaan bahan baku industri dan pasar bagi produksi dalam negeri, dan menghasilkan devisa melalui kegiatan ekspor hasil pertanian. Peran seperti tersebut di atas, selama Pelita I sampai Pelita IV telah dilaksanakan oleh sektor pertanian dengan cukup berhasil.

Dalam Pembangunan Nasional tahap selanjutnya, baik dalam Pembangunan Lima Tahun Kelima (Repelita V) maupun dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua, peran dan sumbangan sektor pertanian seperti tersebut di atas masih tetap dibutuhkan. Dalam Repelita V, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menetapkan, bahwa titik berat pembangunan ekonomi pada sektor pertanian dan industri, dalam upaya mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang

Prasaran Menteri Pertanian pada Seminar Agronomi Nasional (HIMAGRON) Fakultas Pertanian Universitas Andalas, pada tanggal 4 sampai dengan 6 Februari 1991 di Padang, Sumatera Barat.



antara industri dan pertanian, baik dari segi nilai tambah maupun kesempatan kerja. Secara rinci GBHN menggariskan tujuan pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan produksi dan memperluas penganekaragaman hasil pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan, bahan baku industri, meningkatkan penerimaan ekspor; meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, peternak, nelayan; mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha serta lapangan kerja; dan mendukung kegiatan pembangunan wilayah dan transmigrasi.

Sejalan dengan tahapan dan keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dicapai, proses transformasi struktur perekonomian nasional berjalan secara berlanjut dan akan terus terjadi mengarah kepada struktur ekonomi berimbang seperti yang dicita-citakan. Terjadinya transformasi struktural tersebut dicirikan oleh:

- (1) Peran relatif sektor pertanian dalam sumbangannya atas produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan angkatan kerja semakin menurun;
- (2) Pangsa ekspor bahan setengah jadi dan bahan jadi semakin besar;
- (3) Keterkaitan antar berbagai sektor ekonomi semakin tinggi;
- (4) Daerah pedesaan semakin terbuka, baik berupa hubungan antar desa serta antar desa dan kota maupun berupa arus informasi, sehingga meningkatkan pola pikir petani menjadi semakin kritis dan rasional; dan
- (5) Terjadinya perubahan pola berusahatani dari orientasi atas peningkatan produksi semata-mata pada orientasi produksi yang lebih efisien dan pemanfaatan peluang meraih nilai tambah yang besar.

Kebijaksanaan pembangunan pertanian dalam Repelita V didasarkan wawasan pembangunan pertanian yang meliputi:

- (1) wawasan produksi,
- (2) wawasan pelestarian swasembada pangan,
- (3) wawasan ekonomi atau agribisnis,
- (4) wawasan keterpaduan dan saling keterkaitan, dan
- (5) wawasan lingkungan.



Wawasan produksi, adalah bahwa dalam pembangunan pertanian harus berorientasi kepada tujuan peningkatan produksi pertanian yang disesuaikan dengan peluang pasar, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan, pakan ternak, budidaya perikanan, bahan baku industri dan ekspor.

Wawasan pelestarian swasembada pangan, adalah upaya pembangunan tersebut harus dapat menciptakan suatu kerangka sistem pembangunan pertanian yang memberikan jaminan akan lestariannya swasembada pangan di masa mendatang. Sistem ini disusun berdasarkan semua subsistem yang berkaitan dengan perekonomian pangan, khususnya meliputi subsistem penyediaan lahan, penyediaan sarana dan prasarana produksi, pengadaan pangan, penanganan pasca-panen dan kebijaksanaan harga sarana dan hasil produksi.

Wawasan ekonomi atau agribisnis, adalah bahwa setiap kegiatan pembangunan pertanian harus ditujukan kepada tercapainya peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi para petani, peternak dan nelayan, serta masyarakat umumnya. Di samping terjadi peningkatan produksi harus pula tercipta perluasan kesempatan kerja, dalam hubungan ini maka para petani, peternak dan nelayan perlu terus dibina agar dapat mengembangkan usahatani dengan prinsip-prinsip agribisnis untuk lebih meningkatkan efisiensi, produktivitas usahatani dan peningkatan nilai tambah produksi pertanian.

Wawasan keterpaduan dan saling keterkaitan, adalah bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pertanian senantiasa berpegang pada prinsip keterpaduan dan keterkaitan, baik dalam hal komoditas, usahatani maupun wilayah pembangunan.

Wawasan lingkungan dalam pembangunan pertanian adalah untuk memberikan arah agar setiap kegiatan pertanian harus memperhatikan kondisi dan potensi sumberdaya alam dan lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan non-fisik. Hal ini bertujuan agar kelestarian sumberdaya alam dan kualitas hidup terjamin baik untuk menunjang upaya pembangunan yang berkelanjutan. Dalam wawasan ini, juga terkandung prinsip kebijaksanaan pengembangan pertanian wilayah didasarkan pada potensi dan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan wilayah yang bersangkutan.



Kegiatan pembangunan pertanian tersebut di atas, dijalankan melalui pendekatan terhadap fungsi-fungsi pokok pembangunan pertanian yang mencakup pengembangan produksi, pembinaan faktor produksi, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, pengembangan dan alih teknologi, pembinaan informasi pertanian, pembinaan pasca panen dan pemasaran, pembinaan pasar ekspor, pemantapan kelembagaan, pembinaan gizi masyarakat, pengembangan wilayah, pembinaan hubungan sektoral dan pembinaan kerjasama internasional.

II. PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan pertanian pada hakekatnya adalah suatu upaya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, yang bertujuan untuk memperoleh hasil-hasil biologik yang diperlukan guna mendukung hidup dan kehidupan manusia. Sumberdaya alam berfungsi sebagai faktor produksi dan sumber kesejahteraan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Dengan perkataan lain, pembangunan pertanian merupakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana, dalam menggunakan dan mengelola sumberdaya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Salah satu ciri pembangunan berwawasan lingkungan adalah pengelolaan lingkungan hidup yang dikembangkan dalam pembangunan yang merupakan upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup.

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pembangunan pertanian secara garis besar bertujuan untuk:

- (1) Meningkatkan pendapatan petani dan nelayan khususnya, masyarakat pada umumnya melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal untuk usaha pertanian;
- (2) Mempertahankan dan mengembangkan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan sebagai faktor produksi dan sumber kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya;



- (3) Mendorong pengembangan wilayah secara serasi dan terencana dengan wawasan lingkungan; dan
- (4) Mengembangkan sumberdaya manusia (petani dan nelayan) sehingga merupakan unsur pelaksana pembangunan pertanian yang tangguh sekaligus sebagai insan pembina lingkungan hidup.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas maka dalam Repelita V perlu ditempuh strategi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang meliputi:

- (1) Pelengkapan data dan informasi mengenai potensi, sifat dan sebaran sumberdaya alam pertanian dan tingkat pemanfaatannya;
- (2) Pemanfaatan berbagai sumberdaya alam, dan lingkungan hidup termasuk limbah pertanian secara optimal sesuai dengan daya dukung bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan;
- (3) Pemulihan dan peningkatan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan;
- (4) Pengembangan dan penerapan teknologi serta prosedur yang berwawasan lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan;
- (5) Pencegahan dan pengurangan tekanan ekologis terhadap sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- (6) Pemantapan sistem pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, mencakup segi perencanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- (7) Penerapan analisis mengenai dampak lingkungan;
- (8) Pemantapan tata ruang serta pencegahan perubahan fungsi dan fragmentasi pemilikan lahan;
- (9) Penangkaran spesies hewan dan tumbuhan sebagai kekayaan genetik; dan
- (10) Penetapan, penerangan dan pemantapan introduksi komoditas baru yang berasal dari luar negeri.

Dengan demikian maka pokok-pokok kegiatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam Repelita V adalah meliputi:

- (1) Melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisis potensi serta penyebaran sumberdaya alam dan agro-ekosistem;



- (2) Menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang, tentang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mencakup pewayalahan komoditas dan kegiatan agribisnis, rencana pemanfaatan, pelestarian dan pemulihan potensi sumberdaya alam dan lingkungan di setiap wilayah (propinsi);
- (3) Melakukan usaha-usaha pengembangan pola pemanfaatan berbagai sumberdaya alam secara optimal yang disesuaikan dengan sifat dan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan yang bersangkutan. Pola usahatani diarahkan kepada optimasi pemanfaatan sumberdaya baik ditinjau dari segi ekonomi (pendapatan petani) maupun segi kelestarian daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- (4) Melakukan pemantauan dan pemanfaatan sumberdaya alam, evaluasi dampak lingkungan dan pelaksanaan rencana tata ruang;
- (5) Mengurangi tekanan ekologi terhadap sumberdaya alam dan lingkungan hidup, antara lain dengan optimasi pengusahaan sumberdaya, mendorong pelaksanaan program transmigrasi yang dikaitkan dengan pola PIR di sektor pertanian;
- (6) Mencegah adanya fragmentasi pemilikan lahan yang berlanjut dengan lebih mengefektifkan pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria;
- (6) Melaksanakan proses AMDAL sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1986 tentang Analisis Dampak Lingkungan;
- (7) Melaksanakan kegiatan-kegiatan domestikasi fauna dan flora serta pengembangan manfaat sumberdaya alam;
- (8) Melakukan kegiatan-kegiatan rehabilitasi lahan dan perairan yang sudah kritis;
- (9) Mengembangkan karantina pertanian agar lebih memiliki kemampuan optimal untuk menangkal ancaman intervensi jasad pengganggu yang dapat membahayakan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup; dan
- (10) Menetapkan prosedur introduksi komoditas baru dari luar negeri.

Perhatian khusus pengelolaan berbagai sumberdaya alam ditujukan pada padang alang-alang, lahan kering, lahan pantai, daerah aliran sungai bagian hulu, tanah terlantar, rawa dan pasang surut, gambut, plasma nutfah, tumbuh-tumbuhan dan hewan langka, komoditas ekspor dan bahan pangan serta sumberdaya lautan.



Untuk menjamin keberlangsungan produksi pertanian, pengembangan teknologi di bidang budidaya pertanian harus terus digalakkan. Di sektor produksi ini tidak hanya dibutuhkan modal saja, tetapi juga sektor penelitian dan pengembangan pertanian. Pemerintah melalui berbagai lembaga-lembaga penelitian senantiasa berupaya memperkenalkan penemuan-penemuan baru di bidang perokayaan budidaya pertanian.

Peran swasta semakin terlihat dalam penanaman modal di bidang pertanian, sementara peran pemerintah semakin berkurang. Namun demikian, dalam bidang penelitian dan pengembangan budidaya pertanian, peran pemerintah masih cukup besar, walaupun dari pihak swasta pun mulai berminat dalam bidang ini. Peranan swasta dalam bidang penelitian dan pengembangan ini sebetulnya cukup besar dan potensi ini perlu dimanfaatkan dan diarahkan secara berencana.

III. RUANG LINGKUP PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

Ruang gerak agribisnis paling tidak meliputi tiga aspek, yaitu:

- (1) Aspek pengelolaan usaha pertanian yang meliputi pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
- (2) Aspek produk penunjang kegiatan pra dan pasca panen seperti industri penghasil pupuk dan alat mekanisme pertanian, pestisida, bibit unggul, konstibusi pasar; serta
- (3) Aspek sarana jasa penunjang seperti perbankan, sarana tataniaga, dan penyuluhan petani khususnya yang menopang kegiatan agribisnis.

Indonesia adalah negara agraris yang hampir 75 persen tanahnya dikelola untuk pertanian. Mengingat masih banyaknya masyarakat yang tinggal di pedesaan (\pm 80 persen) dan besarnya tenaga kerja yang bekerja di bidang pertanian ($>$ 50 persen), maka kebijaksanaan pembangunan yang berorientasi ke pedesaan merupakan kebijaksanaan sentral yang harus tetap dipertahankan.



Dengan proporsi petani yang cukup besar, Indonesia termasuk ke dalam kelompok negara yang pada tahap awal pembangunan perekonomian nasionalnya tertumpu pada sektor pertanian. Pada tahun 1988, misalnya, pangsa PDB sektor pertanian adalah sebesar 23,3 persen dan proporsi penduduk yang bergantung kepada sektor ini sekitar 54 persen. Dengan ciri seperti ini, jelas sekali bahwa penduduk pedesaan atau masyarakat tani merupakan pasar yang sangat potensial bagi produk industri nasional, baik untuk barang-barang modal maupun barang-barang konsumtif.

Kebijaksanaan lainnya yang terus diupayakan adalah melakukan deregulasi tataniaga komoditas pertanian/pemasaran hasil-hasil produksi, di dalam mata rantai agribisnis sektor pertanian. Tentu saja, dalam mengembangkan pasar potensial sehingga terjadi pasar riil perlu diawali dengan meningkatkan daya beli petani.

Dalam Repelita V telah digariskan bahwa sasaran pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah rata-rata sebesar 5 persen pertahun. Dari sasaran tersebut antara lain diharapkan sektor pertanian dapat tumbuh dengan laju 3,6 persen pertahun, sedangkan pertumbuhan dari sektor produksi dan pengolahan ditargetkan rata-rata 8,5 persen pertahun. Walaupun sasaran pertumbuhannya hanya 3,6 persen pertahun sektor pertanian masih tetap sangat strategis, bukan hanya karena secara langsung menyangkut kesejahteraan sebagian besar penduduk kita (54 persen), tetapi juga karena peranan dalam PDB masih cukup besar (23,3 persen). Oleh karena itu kenaikan/pertumbuhan pada sektor pertanian akan mempengaruhi pertumbuhan PDB.

Oleh karena itu, untuk mempertahankan momentum pertumbuhan perekonomian Indonesia, peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan petani dalam upaya pengembangan agroindustri dan agribisnis menjadi pilihan strategis untuk mencapai sasaran pertumbuhan perekonomian Indonesia sebesar rata-rata 5 persen pertahun.

Dalam struktur perekonomian nasional, sektor agribisnis memiliki jangkauan yang sangat luas, yaitu dari skala usahatani yang dikelola keluarga hingga skala usahatani di tingkat nasional. Laju pertumbuhan industri pengolahan yang cukup pesat selama ini,



yaitu sekitar 28,38 persen setahun, pasti membutuhkan bahan baku dalam jumlah yang sangat besar. Apalagi kalau diingat bahwa pada tahun 1987, nilai ekspor produk pertanian terolah, baru mencapai 1,5 persen ekspor komoditas pertanian kita. Dalam kondisi yang demikian, sektor pertanian diharapkan mampu merangsang pihak swasta untuk menanamkan modalnya, sehingga membangkitkan arus pendapatan tinggi dan menjangkau segala pelaku serta memiliki keunggulan bersaing yang tinggi pula. Di samping itu karena agribisnis dapat meningkatkan dan merangsang penanaman modal dan merupakan suatu usaha yang sumberdayanya dapat senantiasa diperbaharui (renewable), maka agribisnis merupakan salah satu sektor yang cukup menarik.

Agroindustri dan agribisnis yang akan dikembangkan perlu didasarkan atas:

- (1) Prinsip keunggulan komparatif;
- (2) Tingkat ketrampilan masyarakat setempat dalam memantapkan jenis industri pengolahan yang telah dikenal di lingkungannya;
- (3) Tersedianya bahan baku yang berkesinambungan;
- (4) Tersedianya fasilitas kredit dengan bunga ringan bagi masyarakat pedesaan;
- (5) Tersedianya prasarana dan fasilitas pelayanan di pedesaan;

IV. MATA RANTAI AGRIBISNIS DI INDONESIA

Pola dan hubungan keterkaitan seluruh mata rantai agribisnis di dalam negeri dewasa ini pada umumnya belum optimal dan masih dilandasi oleh ekonomi biaya tinggi. Keadaan ini antara lain disebabkan:

- (1) Pada sebagian besar komoditas pertanian pola produksi belum dalam satu areal yang kompak berkelompok sehingga skala ekonomi daerah belum efisien;
- (2) Sarana dan prasarana ekonomi yang belum memadai untuk daerah produksi tersebut;
- (3) Pola agroindustri yang terpusat bukan di sentra produksi di pedesaan tetapi di perkotaan;
- (4) Biaya transportasi yang relatif lebih tinggi; dan



- (5) Sistem kelembagaan yang belum mendukung dengan peranan petani produsen yang masih lemah dengan informasi pasar yang belum memadai.

Pola dan sifat keterkaitan seluruh mata rantai agribisnis ini belum berada dalam tingkat yang efisien dan optimal. Untuk menserasikan hubungan ini perlu dikembangkan paket teknologi spesifik untuk setiap wilayah/sentra produksi pertanian, disertai pengembangan wilayah sesuai dengan keunggulan komparatif dan asas skala ekonomi. Kemampuan dan ketrampilan petani untuk memanfaatkan kesempatan ekonomi perlu pula dikembangkan.

Pendekatan yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi keseluruhan mata rantai agribisnis pada waktu mendatang adalah dengan:

- (1) Meningkatkan ketrampilan dan kemampuan petani dalam berusaha tani secara ekonomis efisien;
- (2) Menyebarluaskan informasi pasar dan peluang pasar;
- (3) Menetapkan standarisasi mutu produksi pertanian secara tegas dan dapat dimengerti oleh birokrasi;
- (4) Mengembangkan kelembagaan berdasarkan keinginan yang dirasakan oleh birokrasi; dan
- (5) Konsolidasi kelembagaan pemasaran dan pengembangan market intelijen.

Khusus tentang kemampuan kita dalam "market intelijen" yang mencakup potensi dan prospek pasar serta prospek harga komoditas dan barang substitusinya harus di tingkatkan. Di samping itu perlu pula lebih meningkatkan kegiatan promosi komoditas pertanian kita di berbagai pasar di luar negeri. Kegiatan produksi di dalam negeri hendaknya kita kaitkan sesuai dengan prospek pasar luar negeri tersebut dan dikembangkan terbatas pada wilayah yang mempunyai keunggulan komparatif yang tinggi.

Sektor industri pengolahan yang relatif padat modal pada umumnya sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai pemasok bahan baku. Untuk dapat mendukung jenis industri ini, komoditas pertanian yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, antara lain dari segi kuantitas misalnya, harus terse-



dia secara kontinyu dari segi kualitas harus konsisten sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan industri.

Pengembangan agroindustri ini hanya mungkin terjadi apabila pengembangan komoditas pertanian dan pewilayahan komoditas di dasarkan atas asas keunggulan komparatif regional dan memenuhi skala ekonomi serta mampu mengendalikan produk secara kontinyu. Semua usaha ini diharapkan menimbulkan serangkaian dampak positif, antara lain seperti:

- (1) Percepatan pembangunan perekonomian pedesaan;
- (2) Penopangan penggeseran tata nilai masyarakat pedesaan menuju masyarakat industri dalam artian yang luas;
- (3) Terhimpunnya kemampuan agroindustri dalam negeri yang makin tangguh sehingga dapat baik mengaktualkan potensi pasar domestik maupun memanfaatkan peluang pasar ekspor;
- (4) Terciptanya momentum dan kemampuan nasional untuk lebih mempercepat proses industrialisasi sebagai akibat semakin meluasnya kesempatan kerja dan daya beli masyarakat pedesaan;
- (5) Meningkatkan ketahanan masyarakat pedesaan secara luas.

Agar semua tujuan dapat diraih melalui pengorbanan sekecil mungkin, pengembangan agroindustri perlu didasarkan atas:

- (1) Prinsip keunggulan komparatif, yang sangat ditentukan oleh komposisi sumber daya dan teknologi yang tersedia.
- (2) Tingkat ketrampilan masyarakat setempat dalam memanfaatkan jenis industri pengolahan yang telah dikenal di lingkungannya
- (3) Tersedianya bahan baku yang berkesinambungan tanpa mengganggu kelestarian lingkungan; dan
- (4) Tersedianya prasarana dan fasilitas pelayanan di pedesaan.

Industri pertanian umumnya merupakan industri padat karya, baik pengolahan hasil-hasil pertanian maupun budidaya pertanian. Dapat disimpulkan bahwa agroindustri menunjukkan, bahwa walaupun industri kecil dan rumah tangga, menyumbang nilai tambah yang relatif kecil akan tetapi peranannya dalam penyerapan tenaga kerja cukup besar dibandingkan dengan industri besar dan menengah. Dengan pertimbangan ekonomi dan ketenagaan kerja cukup besar, industri yang dirasakan perlu dikembangkan di Indonesia pada wak-



tu mendatang adalah antara lain jenis agroindustri, seperti industri kulit, industri makanan dan minuman, serta industri pengolahan dan pengemasan hasil pertanian lainnya. Sumbangan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja dari agroindustri ini dapat langsung dinikmati masyarakat pedesaan. Agar agroindustri ini dapat berkembang secara efisien di daerah pedesaan, diperlukan reorientasi program pengembangan komoditas, kearah pengembangan sentra (seluruh) komoditas pertanian dengan dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan.

Dengan demikian pengembangan agroindustri harus dapat menumbuhkan industri untuk pertumbuhan ekonomi pedesaan yang berimbang, meningkatkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja dengan memepersatukan tujuan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, pilihan lokasi industri yang efisien dan pilihan yang sesuai mengenai tipe serta ukuran industri. Selanjutnya pola dan struktur konsumsi masyarakat pedesaan juga akan berdiversifikasi.

Keterkaitan antar sektor-sektor belum seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu tekad untuk menempatkan pengembangan agroindustri dan agribisnis pada posisi sentral dalam pembangunan pertanian dan pedesaan menuntut kita untuk lebih mensesuaikan wilayah komoditas pertanian dengan zona industri.

Dalam meningkatkan daya saing agroindustri, perlu diterapkan kebijaksanaan harga yang dirancang khusus untuk menstabilkan harga-harga input yang dipakai sebagai masukan bagi pengembangan agroindustri, sebagai salah satu upaya untuk menekan resiko usaha.

Pada sisi yang lain, kebijaksanaan mikro perlu secara spesifik dirancang untuk mendorong dan memantapkan pengembangan agroindustri dan agrobisnis di pedesaan, melalui pemantapan pola pertanian (diversifikasi), skala usaha, pemakaian teknologi tepat-guna, dan standarisasi kualitas komoditas (baik untuk komoditas primer maupun untuk komoditas olahan).

Dalam mengembangkan agroindustri di lapangan, dilakukan dengan melaksanakan pendekatan melalui tiga jalur pembinaan:



- (1) pendekatan perusahaan inti rakyat (PIR),
- (2) pendekatan bapak angkat,
- (3) pendekatan kelembagaan pedesaan.

1. Pendekatan Perusahaan Inti Rakyat (PIR)

Pola ini telah berhasil dikembangkan oleh Departemen Pertanian dan secara relatif merupakan pola yang paling paripurna untuk mengembangkan agroindustri. Skala usaha dan hubungan antara petani plasma dengan perusahaan inti diatur secara jelas dalam pengembangan komoditas terpilih. Langkah yang masih diperlukan adalah memperluas cakupan agroindustri dengan integrasi vertikal yang mencakup industri hilir dengan diversifikasinya. Kegiatan ini diharapkan dapat memanfaatkan semua kemungkinan yang ada pada usaha industri yang bersangkutan dan dapat mengembangkan industri sampingan, termasuk dari bahan limbahnya. Rangsangan untuk berinvestasi, baik oleh perusahaan inti yang telah ada maupun oleh perusahaan baru, perlu terus digalakkan. Sangat diharapkan bahwa koperasi akan dapat mengantarkan petani plasma menjadi pemegang saham, baik dari agroindustri hilir maupun perusahaan pengolah limbah yang didirikan. Keterkaitan kelembagaan dan pembagian resiko yang seimbang antar berbagai kelembagaan yang terkait dalam PIR ini perlu lebih disempurnakan.

2. Pendekatan Bapak Angkat

Pola yang relatif paling siap untuk dikembangkan dan telah dirintis oleh Departemen Perindustrian. Pola ini akan segera diperluas melalui pengikutsertaan Badan Usaha Milik Negara di bawah binaan Departemen Pertanian dengan menyusun program terpadu mencakup wilayah serta komoditas terpilih. Beberapa hal yang masih perlu dikaji lebih lanjut dalam mengoperasionalkan pendekatan ini adalah:

- (1) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan dana BUMN yang disediakan untuk program ini.
- (2) Rincian peran perusahaan bapak angkat baik terhadap perusahaan anak angkat, koperasi maupun perusahaan swasta.
- (3) Tolok ukur untuk memilih anak angkat.
- (4) Tolok ukur untuk menilai keberhasilan program.



3. Pendekatan Kelembagaan Pedesaan

Pola ini merupakan yang paling kompleks karena mencakup penggeseran seluruh tata nilai masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, oleh karenanya, juga merupakan pola yang mempunyai dampak paling nyata terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan kita.

Pendekatan ini memerlukan langkah pematapan lebih lanjut dengan melakukan, antara lain:

- (1) Kajian mendalam mengenai ekonomi pedesaan khususnya yang menyangkut kendala yang membatasi perkembangan industri pedesaan di berbagai agro-ekosistem.
- (2) Rekayasa pertanian baik mengenai kelembagaan tani maupun pola pertanaman dan pola pertanian yang menunjang timbulnya industri pengolahan.
- (3) Penyediaan teknologi tepat guna untuk setiap tahap produksi.
- (4) Kehadiran lembaga koperasi maupun swasta yang mau serta mampu bertindak sebagai perusahaan pembina

Kita sudah bertekad menjadikan pembangunan pedesaan sebagai pusat perhatian pembangunan nasional, oleh karena itu dukungan Pemerintah Daerah terhadap program pengembangan agroindustri ini mutlak diperlukan.

Perkembangan ekspor komoditas pertanian Indonesia dipengaruhi oleh keadaan pasar internasional, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi persaingan negara pemasok lainnya. Karena itu, dukungan sektor pertanian terhadap kegiatan ekspor tidak cukup dipandang dari sisi peningkatan produksi domestik saja, tetapi juga sisi perkembangan pasar internasional senantiasa perlu turut diperhatikan. Dengan demikian, pengembangan ekspor komoditas pertanian harus dilihat tidak hanya dalam peningkatan volume dan nilainya saja, reorientasi dalam pengembangan ekspor komoditas pertanian perlu dilakukan, yaitu antara lain mencakup:

- (1) Ekspor komoditas pertanian harus dapat meningkatkan nilai tambah dari komoditas tersebut di pedesaan. Selama ini komposisi ekspor hasil pertanian masih lebih berat kepada ekspor



bahan mentah. Dengan mengembangkan teknologi pengolahan, baik yang berskala besar maupun yang mempergunakan teknologi pengolahan yang tepat guna bagi industri kecil di pedesaan, maka akan tercipta mata rantai industri pengolahan di dalam negeri yang dapat memberikan dampak positif terhadap usaha peningkatan nilai tambah, pendapatan petani, nelayan dan pengrajin, perluasan kesempatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja.

- (2) Peningkatan ekspor komoditas pertanian perlu juga dicapai melalui diversifikasi komoditas ekspor. Saat ini ekspor komoditas pertanian tertumpu pada beberapa komoditas tertentu. Dengan diversifikasi komoditas, maka mata dagangan ekspor komoditas pertanian diperluas, baik dengan munculnya komoditas baru yang selama ini belum dikembangkan maupun dengan menganeekaragamkan jenis produk-produk ekspor dari komoditas ekspor tradisional yang biasanya diekspor dalam satu bentuk mata dagangan, yaitu bahan mentah.

Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa dalam usaha menggalang kekuatan agribisnis agar mampu mengatasi berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi di pasar internasional, sebaiknya dengan memanfaatkan wadah-wadah yang telah ada yang ditunjang oleh suatu sistem keterkaitan kerja yang saling mendukung antar berbagai sektor.

V. PENUTUP

Keberhasilan dari agroindustri dan agrobisnis akhirnya akan berdampak positif terhadap:

- (1) penyerapan tenaga kerja;
- (2) peningkatan nilai tambah;
- (3) peningkatan devisa negara melalui reorientasi ekspor (dari ekspor komoditas primer ke ekspor komoditas sekunder);
- (4) memperkuat perekonomian pedesaan;
- (5) memperbaiki distribusi pendapatan antara masyarakat desa dan kota.



Keberhasilan tersebut di atas, secara makro juga akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

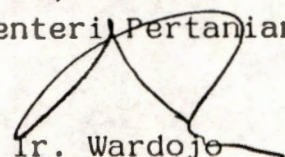
Tercapainya semua tujuan di atas akan lebih terjamin apabila diperoleh dukungan berupa kerjasama dan koordinasi yang luwes dan dinamik antar berbagai instansi yang terkait. Instansi-instansi yang diharapkan secara intensif mendukung pengembangan agroindustri dan agrobisnis antara lain adalah Departemen Perdagangan, Departemen Tenaga Kerja, Lembaga Perbankan, Lembaga-lembaga Pendidikan dan Penelitian serta Pemerintah Daerah pada setiap tingkatan.

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud dan sejalan dengan karakteristik struktur perekonomian kita di masa depan, sementara keterlibatan pemerintah semakin berkurang, pada saat yang sama investasi pihak swasta diharapkan dapat mengisi peran pemerintah tersebut. Untuk itu dibutuhkan kondisi yang mampu menciptakan mitra kerja yang serasi antara swasta dan petani. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

- (1) Aturan main yang disepakati oleh kedua pelaku ekonomi ini harus transparan;
- (2) Adanya kejelasan serta kepastian mengenai pembagian hasil maupun dalam menanggung resiko; dan
- (3) Kerjasama yang mampu mendorong kemandirian petani.

Hubungan dua arah yang serasi akan lebih mendorong perkembangan agribisnis yang optimal, apabila juga dilandaskan pada pola pemikiran yang senantiasa mengacu kepada keunggulan komperatif yang berakar kuat kepada kekuatan komposisi serta kualitas sumberdaya kita sendiri, sehingga keberlanjutannya dapat terus terjamin.

Jakarta, Februari 1991
Menteri Pertanian,


Ir. Wardojo



26





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN PADA PELANTIKAN
DIREKTUR JENDERAL PERTANIAN TANAMAN PANGAN
SEKRETARIS BADAN PENGENDALI BIMAS
STAF AHLI MENTERI PERTANIAN
ESELON II DAN DIREKSI BUMN
LINGKUP DEPARTEMEN PERTANIAN
JAKARTA, 7 FEBRUARI 1991

Saudara Menteri Muda Pertanian yang Saya Hormati,
Saudara-saudara Para Pejabat Eselon I Lingkup Pertanian,
Ibu-ibu dan Pimpinan Unit dan Sub Unit Dharma Wanita,
Hadirin yang Saya Hormati.

Assalamu 'Alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh,

Kita panjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat sejahtera. Pada hari ini kita menyaksikan pelantikan para pejabat eselon I, eselon II, dan Direksi BUMN lingkup Departemen Pertanian. Sungguh suatu peristiwa yang sangat penting dalam perjalanan upaya membangun negara kita ini khususnya dalam sektor pertanian, yang keterkaitannya dengan hajat hidup masyarakat banyak sangat tinggi.

Sehubungan dengan pentingnya peristiwa inilah saya ingin menyetengahkan beberapa hal mendasar, yang sedikit banyak dapat menentukan keberhasilan kita dalam membangun pertanian menjadi tangguh, dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang sebagian terletak pada pundak kita untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tantangan demi tantangan telah kita lalui dengan berhasil, namun bukan jaminan bahwa pada masa yang akan datang kita akan berhasil pula melaluinya, jika kita tidak membekali diri dengan berbagai kemampuan, kemauan, ketrampilan, dan dedikasi yang setinggi-tingginya.



Saudara-saudara Sekalian yang Saya Hormati,

Swasembada pangan adalah tekad kita semuanya untuk mempertahankannya, suatu komitmen nasional yang harus kita hormati dengan jalan mengamankan dan menjamin realisasinya. Itulah sebabnya dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak seluruh jajaran pertanian untuk mengerahkan pikiran, perhatian serta segala potensi sumberdaya secara optimal sesuai dengan kebutuhan operasional dari upaya kita untuk melestarikan swasembada pangan/beras tersebut. Program peningkatan produksi pangan, khususnya usaha pokok intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi, merupakan program yang keberhasilannya ditentukan oleh tekad, semangat, kegairahan, dan kemampuan petani yang tersebar di seluruh wilayah, dan oleh berbagai sarana dan prasarana pendukungnya yang juga harus merata tersebar untuk dapat memberikan pelayanan yang setepat-tepatnya bagi petani yang tersebar itu.

Pengalaman kita selama ini menunjukkan bahwa tekad, semangat, gairah, dan kemampuan petani untuk berpartisipasi dalam gerakan peningkatan produksi pertanian, khususnya pangan, merupakan refleksi dari hal yang sama pada aparatur pengaturan, pelayanan, dan pembinaan yang digelar sampai di pedesaan. Pengalaman juga menunjukkan bahwa tingkat kegairahan kerja para petani itu harus dipelihara sebaik-baiknya pada tiap keadaan, juga pada keadaan yang tidak dapat kita kuasai sepenuhnya, seperti pada saat keadaan iklim kurang mendukung. Gejala-gejala menurunnya kenaikan produksi (leveling-off), yang disebabkan oleh mandeknya tingkat produksi, baik karena tidak berfungsinya berbagai sarana dan prasarana pendukung, maupun karena kejenuhan aparat dalam membina dan memberikan lingkungan yang merangsang petani untuk memproduksi perlu dipantau secara jeli dan terus-menerus. Semuanya itu merupakan tantangan yang sangat potensial untuk menjadi besar dan yang akhirnya bisa saja tidak terkendali apabila tidak kita tangani sejak dini.



Saudara-saudara Sekalian yang Saya Hormati,

Itulah sebabnya dalam kita mengabdikan diri sebagai pembina, sebagai petugas, sebagai pelaksana dari berbagai segi pembangunan pertanian, kita tidak saja dituntut untuk bekerja keras, namun juga dituntut untuk dapat berfikir kreatif, tidak terjebak dalam kegiatan yang rutin, dan mengembangkan kemampuan mengantisipasi setiap keadaan yang tidak kita inginkan (adverse condition). Berbagai tantangan swasembada pangan dan upaya peningkatan produksi pertanian pada umumnya, kini sedang menghadapi ujian yang berat, tantangan yang rumit dan kendala yang potensial, yang dapat berkembang menjadi gangguan yang dapat mengurangi keberhasilan tercapainya tujuan kita.

Tantangan berat yang berasal dari iklim telah kita rasakan sekarang ini. Untuk MT 1990/1991 ini saja datangnya curah hujan dapat dikatakan terlambat satu sampai dua bulan. Sifat hujan di berbagai wilayah tanah air pada umumnya secara kualitatif dan kuantitatif dapat dikatakan kurang menguntungkan bagi terlaksananya pola tanam yang longgar. Karena itu pada kesempatan yang baik ini saya ingin menekankan bahwa kita sudah harus siap, harus mempunyai wawasan yang antisipatif terhadap setiap kemungkinan yang bakal terjadi. Kemajuan teknologi tepatguna, baik yang sudah dikembangkan, maupun yang sedang dalam uji coba, harus ditujukan kepada dan dapat kita manfaatkan demi terselenggaranya penanaman yang dapat memberikan jaminan panen yang berhasil. Mengantisipasi akibat dari iklim yang kering adalah kesiapan dengan jadwal penanaman yang ketat, penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan tepat waktu, serta pembinaan yang memberikan keyakinan bagi para petani pelaksana.

Saudara-saudara Sekalian yang Saya Hormati,

Kerja keras dibarengi dengan pola pikir yang kreatif dan antisipatif juga diperlukan dalam menangani permasalahan yang ditimbulkan karena menciutnya areal persawahan di Pulau Jawa yang sampai saat ini masih memberikan pangsa yang besar dalam produksi beras nasional. Kita sepakat bahwa berkurangnya areal panen di Jawa hendaknya dapat diimbangi dengan perluasan areal pertanian,



khususnya pesawahan, di luar Pulau Jawa. Kita juga sepakat, untuk mengimbangi berkurangnya kemampuan produksi dari pemanfaatan areal di Jawa hendaknya diimbangi dengan makin sempurnanya pencapaian tingkat intensifikasi di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa, terutama untuk mengantisipasi kendala pelaksanaan perluasan areal khususnya pencetakan sawah. Namun kenyataan tidak dapat dipungkiri, bahwa tingkat yang ingin kita capai itu sekarang belum handal, belum memberikan jaminan yang kuat bagi tercapainya tujuan program pembangunan.

Kita telah mendapat dukungan pembiayaan yang kita perlukan untuk program pencetakan sawah tersebut. Oleh karena itu kita harus bertekad untuk dapat merealisasinya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk masa mendatang hal ini perlu kita waspadai, dan ini tentunya memerlukan kemampuan antisipatif kita dalam menghadapi berbagai kendala yang hampir selalu kita jumpai dalam upaya pencetakan sawah ini.

Kesulitan yang telah kita kenal menghambat pelaksanaan pencetakan sawah seperti (1) design (rekayasa) yang memerlukan waktu, (2) biaya satuan pekerjaan -- land clearing dan leveling -- yang belum sesuai dengan kebutuhan riil, (3) data lokasi pencetakan sawah yang tidak didasarkan atas areal fungsional tetapi atas dasar areal potensial, (4) lamanya proses tender, dan (5) keterbatasan perusahaan yang bergerak di bidang pembukaan lahan dengan kualifikasi yang disyaratkan, sudah seharusnya dapat diantisipasi dan kemudian diselesaikan tepat waktu, sehingga target pelaksanaan pencetakan sawah tersebut dapat dicapai.

Saudara-saudara Sekalian yang Saya Hormati,

Tantangan lain yang juga besar potensinya terhadap kelangsungan swasembada pangan adalah serangan hama penyakit yang akhir-akhir ini terjadi pada beberapa sentra produksi padi. Saya percaya, setiap serangan secara baku telah ada sistem penanggulangannya, namun toh saya mengharapkan bahwa setiap gejala serangan hendaknya dapat dilihat dengan kritis, karena setiap serangan dapat meluas dan mengurangi atau menggagalkan produksi padi.



khususnya pesawahan, di luar Pulau Jawa. Kita juga sepakat, untuk mengimbangi berkurangnya kemampuan produksi dari pemanfaatan areal di Jawa hendaknya diimbangi dengan makin sempurnanya pencapaian tingkat intensifikasi di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa, terutama untuk mengantisipasi kendala pelaksanaan perluasan areal khususnya pencetakan sawah. Namun kenyataan tidak dapat dipungkiri, bahwa tingkat yang ingin kita capai itu sekarang belum handal, belum memberikan jaminan yang kuat bagi tercapainya tujuan program pembangunan.

Kita telah mendapat dukungan pembiayaan yang kita perlukan untuk program pencetakan sawah tersebut. Oleh karena itu kita harus bertekad untuk dapat merealisasinya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk masa mendatang hal ini perlu kita waspadai, dan ini tentunya memerlukan kemampuan antisipatif kita dalam menghadapi berbagai kendala yang hampir selalu kita jumpai dalam upaya pencetakan sawah ini.

Kesulitan yang telah kita kenal menghambat pelaksanaan pencetakan sawah seperti (1) design (rekayasa) yang memerlukan waktu, (2) biaya satuan pekerjaan -- land clearing dan leveling -- yang belum sesuai dengan kebutuhan riil, (3) data lokasi pencetakan sawah yang tidak didasarkan atas areal fungsional tetapi atas dasar areal potensial, (4) lamanya proses tender, dan (5) keterbatasan perusahaan yang bergerak di bidang pembukaan lahan dengan kualifikasi yang disyaratkan, sudah seharusnya dapat diantisipasi dan kemudian diselesaikan tepat waktu, sehingga target pelaksanaan pencetakan sawah tersebut dapat dicapai.

Saudara-saudara Sekalian yang Saya Hormati,

Tantangan lain yang juga besar potensinya terhadap kelangsungan swasembada pangan adalah serangan hama penyakit yang akhir-akhir ini terjadi pada beberapa sentra produksi padi. Saya percaya, setiap serangan secara baku telah ada sistem penanggulangannya, namun toh saya mengharapkan bahwa setiap gejala serangan hendaknya dapat dilihat dengan kritis, karena setiap serangan dapat meluas dan mengurangi atau menggagalkan produksi padi.



Berbagai upaya telah dilakukan dengan baik, namun misalnya serangan penggerek batang padi di Jalur Pantura sejak tahun yang lalu sampai saat ini selalu saja terus mengancam. Hal ini merupakan peringatan kepada kita untuk terus dan lebih waspada.

Berbagai tindakan seperti (1) mengintensifkan pengamatan organisme pengganggu, (2) menerapkan sistem pengendalian yang baik, (3) meningkatkan program penyuluhan kepada petani, (4) mengadakan surveillance, (5) melakukan latihan-latihan kilat bagi petani maju, (6) mengamati populasi kelompok telur, larva, maupun ngengat, (7) mengamati penerbangan ngengat pada malam hari, (8) melakukan pengumpulan kelompok telur dan melepas parasitoid, serta (9) mengadakan pertemuan koordinasi dengan para pelaksana, itu semuanya merupakan penanggulangan yang cukup berarti. Dukungan para ahli berikut gerakan latihan I.P.M. serta pembiayaannya harus dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya.

Saudara-saudara Sekalian yang Saya Hormati,

Dengan penanganan pasca panen seperti yang dilakukan oleh sebagian besar petani kita, susut/kehilangan hasil masih besar. Oleh karena itu gerakan penanganan pasca panen untuk menekan susut/kehilangan hasil harus terus kita tingkatkan dan kita perluas.

Saudara-saudara yang Saya Hormati,

Usaha kita untuk mendiversifikasikan produksi pertanian mendorong kita untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kedelai. Perkembangan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Produksi Kedelai pada tahun anggaran 1990/1991 telah memberikan pengalaman yang berharga. Senjang antara sasaran dan realisasi dari areal panen, produktivitas, penyaluran benih dan rhizogin, betapapun kecilnya sejang itu belum menunjukkan keberhasilan dari upaya peningkatan produksi kedelai. Keberhasilan dari suatu upaya baru berhasil apabila keberhasilan sasaran fisik diiringi oleh tercapainya tujuan dari upaya itu secara melembaga dan mapan (institutionalized and established). Jika pada suatu saat program pemerintah ditiadakan atau dikurangi, maka upaya peningkatan pro-



duksi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari usahatani. Mungkin kita harus sudah melihat secara lebih kritis lagi sejauh mana dampak upaya itu selain bagi produksi nasional, juga bagi usahatani para petani kedelai kita.

Terkait dengan diversifikasi usahatani, kita juga ingin melihat berhasilnya usaha meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang bergizi tinggi dan sesuai keperluan kesehatan tubuh dalam rangka meningkatkan kualitas manusia dan tingkat hidup masyarakat Indonesia. Peningkatan produksi diupayakan agar selalu berorientasi kepada konsumsi masyarakat dengan lebih meningkatkan konsumsi protein dan unsur gizi lainnya, agar diperoleh kecukupan gizi yang seimbang dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Saudara-saudara Sekalian yang Saya Hormati,

Sebagai konsekuensi dari dirampingkannya organisasi Departemen Pertanian, juga sebagai pelaksanaan dari berbagai kesepakatan antar instansi, kita saat ini sedang mengusahakan meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penyuluhan pertanian, dengan mengaktifkan kembali dari berbagai simpul organisasi yang diharapkan dapat memberikan iklim yang dapat mendorong partisipasi petani dalam pembangunan pertanian. Kita selalu tanggap terhadap setiap kenyataan yang hidup dalam masyarakat petani, karena itu kita sangat menghargai setiap pendapat yang dapat menjadi masukan bagi suatu keputusan yang paling tepat, keputusan yang motivasinya adalah untuk meningkatkan pengejawantahan diri petani (self-actualization).

Setiap daerah tentu mempunyai sifat yang khas (special) dan yang khusus (specific) yang berbeda satu sama lain. Namun semuanya itu merupakan ragam kekayaan persada kita yang perlu diperhitungkan setiap kita melontarkan gagasan. Penyuluhan pertanian harus merupakan kegiatan yang tangguh, dapat menyesuaikan dengan setiap lingkungan dan tantangan. Penyelenggaraan suatu urusan seperti penyuluhan pertanian yang sudah seyogyanya diserahkan kepada daerah, karena meningkatnya kemampuan daerah dalam mengelola urusan tersebut, tentunya harus dapat disambut dengan



positif, dan karenanya kitapun sepakat untuk melaksanakan setiap keputusan bersama antara Departemen Pertanian dan Departemen Dalam Negeri. Pada kesempatan yang baik ini, saya minta agar kita semuanya dapat mengikuti perubahan kebijakan penyuluhan pertanian itu dengan kesadaran dan partisipasi yang maksimal.

Saudara-saudara Sekalian yang Saya Hormati,

Tidak berlebihan kiranya apabila dalam setiap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen Pertanian kita berlandaskan prinsip efektif dan efisien dalam penggunaan sumberdaya. Kita semua dituntut untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja kita. Kita sekarang sedang giat-giatnya menggalakkan GKM, bahkan pada instansi pemerintah lingkup pertanian. Namun gerakan itu hendaknya dapat diterapkan lebih luas lagi bagi pada setiap BUMN lingkup pertanian. Sehubungan dengan ini saya ingin mengingatkan keterkaitan gerakan ini dengan peningkatan kesehatan BUMN sebagai perusahaan.

Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menekankan bahwa PT Bina Mulya Ternak yang merupakan satu-satunya BUMN subsektor peternakan, perlu berbenah diri. Memang tidak gampang menerapkan dasar kewiraan pada suatu upaya seperti BUMN yang berpeodman kepada Tri Dharma dalam kiprahnya, yang dharma ketiganya adalah sebagai "agent of development", namun tokh kita sudah sepantasnya meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan yang dapat memberikan nilai lebih, sehingga BUMN kita itu dapat dikategorikan ke dalam perusahaan yang sehat.

Berbagai kendala yang dihadapi oleh PT Bina Mulya Ternak seperti (1) produktivitas yang masih rendah, (2) kualitas pakan dan mutu genetik yang perlu ditingkatkan, (3) adanya penyakit yang dapat merupakan wabah, (4) masih tingginya tingkat kematian dan kehilangan ternak hendaknya dapat diselesaikan dengan tindakan manajemen yang tepat. Rendahnya produktivitas mengakibatkan pula biaya-biaya pengelolaan perusahaan tidak dapat ditutup dari hasil penjualan ternak dan berakibat pula kepada kondisi perusahaan. Semua kendala itu sudah kita yakini. Itulah sebabnya kita mengharapkan agar Direksi yang baru dapat



mengusahakan penyelesaian yang tuntas, yang dapat meningkatkan citra PT Bina Mulya Ternak sebagai BUMN Peternakan. Upaya restrukturisasi modal memang diharapkan dapat memperbaiki kondisi perusahaan, namun toh tetap, bahwa Direksi mempunyai peranan penting dalam menyukseskan upaya penyehatan BUMN ini. Kembali ingin saya tekankan perlunya kita berfikir kreatif, melihat kedepan dengan penuh antusiasme, menilai setiap kejadian masa kini dengan wawasan yang lebih luas, antisipatif terhadap kemungkinan masa depan, dan tentu dengan sifat kewiraan yang tinggi.

Demikian juga kepada jajaran PT Perkebunan, saya perlu mengingatkan bahwa kita dihadapkan kepada berbagai tantangan bahkan yang sifatnya global, yang tidak mudah dapat kita atasi, tanpa merusak sistem dan tatanan yang lainnya dalam perekonomian kita. Kita dihadapkan kepada akibat Perang Teluk dengan kemungkinan resesi ekonominya, kita dihadapkan kepada tembok kuat proteksionisme berbagai negara maju dengan belum berhasilnya Pertemuan Putaran Uruguay mengenai GATT. Tidak ada yang dapat kita rumuskan kecuali menerima tantangan itu dengan kesungguhan memecahkannya, melalui tindakan yang tepat, kreatif, penuh inisiatif, ke dalam: memperbaiki kinerja perusahaan kita, dan ke luar: tindakan ekonomi yang kompetitif dalam meluaskan jaringan pasar komoditas pertanian kita.

Hadirin Sekalian yang Saya Hormati,

Pada alih tugas sekarang ini, yang tercermin dengan adanya pelantikan beberapa pejabat eselon I, eselon II, dan Direksi BUMN, hendaknya diartikan sebagai penyegaran kembali dan upaya pemanfaatan pengalaman yang perlu kita timba dari setiap pejabat yang potensial. Kepada Saudara yang memasuki masa pensiun dan Saudara-saudara yang beralih tugas, saya sampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi dan jasa-jasanya selama mengemban tugas pada pos yang lama. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada para ibu yang mendampingi, yang selama ini telah ikut bersusah payah membantu para suami dalam menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal perbuatan Saudara.



Kepada para Pejabat yang baru dilantik, saya menyampaikan selamat, semoga tugas yang dipercayakan kepada Saudara-saudara sekalian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sepenuh hati dengan dedikasi yang tinggi, penuh daya kreasi, berwawasan yang luas yang memberikan kemampuan mengantisipasi setiap gejolak masa depan, sehingga misi unit kerja Saudara, bersama-sama unit kerja lainnya dalam konteks keseluruhan Departemen Pertanian, dapat berhasil dengan baik. Amin ya Robbul Alamin.

Wabillahi Taufik Walhidayah,

Wassalamu 'Alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh.

Menteri Pertanian,

Ir. Wardoyo.



27





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

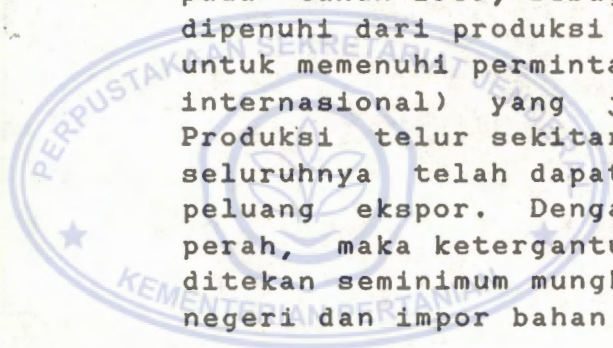
KATA SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA PAMERAN "SEAFOOD AQUATECH & POULTRY
INTERNATIONAL 1991"

Program pembangunan pertanian ditujukan untuk tercapainya peningkatan produksi pangan, pelestarian swasembada beras, peningkatan ekspor dan pengurangan impor, perluasan lapangan kerja dan pelestarian sumberdaya alam. Dalam menyongsong era tinggal landas, maka pengembangan produksi pertanian sebagai salah satu sumber komoditi non migas terus dipacu sehingga dapat menjadi sumber pendapatan negara khususnya melalui kegiatan ekspor. Ekspor pertanian sebagian besar berasal dari perkebunan dan perikanan, namun ekspor dari pangan dan peternakan-pun sudah mulai menunjukkan peningkatan.

Potensi ekspor perikanan di masa mendatang mempunyai peluang yang cukup besar, mengingat potensi sumberdaya ikan cukup besar, sedangkan tingkat eksploitasinya masih relatif rendah khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Luas perairan Indonesia diperkirakan 5,8 juta km² yang terdiri dari 2,8 juta km² perairan Nusantara, 0,3 juta km² perairan laut teritorial dan 2,7 juta km² perairan ZEEI. Potensi sumberdaya ikan sekitar 6,6 juta ton per-tahun dengan tingkat pemanfaatannya baru sekitar 33 %. Selain itu terdapat pula sumberdaya ikanlainnya seperti perairan umum dengan potensi 0,7 juta ton per-tahun dan baru dimanfaatkan 40 %. Potensi lain berupa sumberdaya budidaya ikan berupa budidaya laut, air payau, air tawar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Dalam hubungan dengan pengembangan ekspor, usaha diversifikasi komoditas yang banyak permintaan dan atau bernilai tinggi di pasaran Internasional seperti rumput laut, teripang, kerapu, kakap, kepiting, kodok, ikan hias dan nila merah akan terus dikembangkan. Demikian pula usaha diversifikasi vertikal seperti ikan kaleng dan olahan yang mempunyai nilai strategis akan dikembangkan.

Pengembangan peternakan sebagai sumber bahan pangan hewani terus meningkat. Dengan produksi sekitar 1 juta ton pada tahun 1989, sebagian besar kebutuhan daging telah dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Hanya daging berkualitas untuk memenuhi permintaan konsumen khusus (hotel dan restoran internasional) yang jumlahnya sekitar 0,2 % masih diimpor. Produksi telur sekitar 0,5 juta ton sehingga kebutuhan telur seluruhnya telah dapat dipenuhi, bahkan telah mulai dirintis peluang ekspor. Dengan meningkatnya populasi ternak sapi perah, maka ketergantungan impor bahan baku susu telah dapat ditekan seminimum mungkin, sehingga rasio produksi susu dalam negeri dan impor bahan baku susu tahun 1989 sudah menjadi 1:2.



Dengan berkembangnya produksi, maka ekspor produk peternakan semakin meningkat, khususnya mata dagangan baru seperti ternak babi, produk unggas antara lain bibit anak ayam, telur tetas, telur konsumsi, daging kambing/domba, produk susu olahan dan lain-lain. Walaupun nilainya relatif masih kecil, namun mempunyai dampak yang luas untuk mendorong gairah memproduksi para peternak.

Perkembangan ekspor dewasa ini mengalami persaingan yang semakin ketat dalam dunia internasional. Oleh karena itu kita harus mampu melakukanantisipasi yang tepat. Untuk itulah Pemerintah mengeluarkan berbagai langkah deregulasi untuk menciptakan iklim investasi yang mendorong pengembangan ekspor.

Di sub sektor perikanan, sebagai pelaksanaan UU No.9/1975 tentang Perikanan, telah diterbitkan PP No. 15 tahun 1990 tentang perizinan perikanan. PP ini ditindak lanjuti dengan SK Mentan tentang Perizinan Usaha Perikanan dan Penggunaan Kapal Perikanan Berbendera Asing. Demikian pula untuk meningkatkan daya saing perikanan di pasaran internasional telah diterbitkan Inpres No. 2 tahun 1990 tentang Penyederhanaan Tatacara Pengujian Mutu Ikan Segar dan Ikan Beku.

Di sub sektor peternakan, dalam Paket Kebijakan 28 Mei 1990, telah ditetapkan Keppres No. 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Peternakan Ayam Ras dan di bidang perizinan telah pula ditetapkan SK Menteri Pertanian No. 362/1990 yang memberikan kemudahan dalam perizinan dan investasi peternakan.

Dalam serangkaian deregulasi ini, diharapkan para pengusaha akan mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat itu. Untuk itu perlu dilakukan perluasan pasar ekspor dengan berbagai promosi, pendekatan bilateral maupun multilateral.

Saya menaruh harapan bahwa penyelenggaraan pameran semacam "Sea Food Aquatech & Poultry Internasional '91" oleh PT Primaoriental Abadi ini dapat berfungsi sebagai salah satu sarana untuk merangsang dan mengembangkan potensi ekspor perikanan dan peternakan ini.

Semoga pameran ini berhasil dengan sukses.

Menteri Pertanian



Ir. Wardoyo



28





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA PAMERAN "INDONESIA TODAY" DI SINGAPURA
(untuk Buku Panduan)

Upaya peningkatan ekspor non migas menjadi salah satu kebijaksanaan pemerintah dalam memantapkan ketangguhan perekonomian nasional. Ekspor pertanian sebagian besar berasal dari sub sektor perkebunan dan perikanan, diantaranya komoditi karet, kopi, teh, kelapa sawit, udang, tuna dan cakalang. Dari kedua sub sektor ini rata-rata selama tujuh tahun terakhir masing-masing menyumbang 85,14 % dan 12,90 % terhadap total ekspor hasil pertanian. Beberapa komoditi dari sub sektor pangan dan peternakan juga turut diekspor seperti gapek, hortikultura, kulit, babi dan produk unggas mempunyai potensi untuk diekspor.

Perkembangan ekspor komoditas pertanian Indonesia dipengaruhi oleh keadaan pasar internasional, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi persaingan negara pemasok lainnya. Karena itu, dukungan sektor pertanian terhadap kegiatan ekspor harus dilihat dari sisi peningkatan produksi domestik dan perkembangan pasar internasional yang senantiasa harus diperhatikan.

Pengembangan ekspor komoditas pertanian harus memperhatikan reorientasi yang mencakup berbagai aspek. Pertama, ekspor komoditas pertanian harus dapat meningkatkan nilai tambah dari komoditi tersebut. Selama ini komposisi ekspor hasil pertanian masih lebih berat kepada ekspor bahan mentah. Selama 7 tahun terakhir, dari total nilai ekspor sebesar 45,35 % dalam bentuk belum diolah dan sekitar 54,65 % berupa bahan olahan. Namun, tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun untuk komoditas pertanian olahan meningkat yaitu lebih pesat (28,36 %) dibandingkan dengan bukan olahan yang hanya sekitar 9,5 %. Hal ini memberikan optimistik bahkan pada tahun-tahun mendatang pola ekspor ke arah bentuk olahan akan meningkat. Kedua, peningkatan ekspor komoditas pertanian perlu juga dicapai melalui diversifikasi komoditi ekspor berdasarkan keunggulan komparatif. Saat ini ekspor komoditas pertanian bertumpu pada beberapa komoditas tertentu saja. Dengan diversifikasi komoditi, mata dagangan ekspor komoditas

selama ini belum dikembangkan maupun dengan menganekaragamkan jenis produk ekspor.

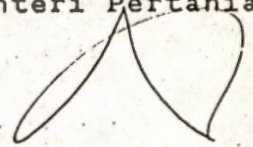
Ketiga, peningkatan ekspor komoditas pertanian perlu disertai dengan pengembangan diversifikasi pasar ekspor.

Kegiatan reorientasi ekspor ini perlu dilandasi oleh kajian keunggulan komparatif komoditi, dan telaahan peluang pasar internasional, sehingga pengembangan komoditi ekspor tersebut dapat berwawasan jangka panjang.

Kegiatan pameran "INDONESIA TODAY" yang diselenggarakan "Sinar Cakra Sakti" ini sangat bermanfaat untuk menyebarkan informasi mengenai produksi ekspor Indonesia, ajang promosi maupun pertemuan para eksportir untuk meningkatkan ekspor.

Semoga sukses.

Menteri Pertanian



Ir. Wardoyo



29





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA PAMERAN "INDONESIA TODAY 1991"
(Show Directory)

Salah satu peranan utama sektor pertanian terhadap perkembangan ekonomi nasional adalah meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian untuk menunjang ekspor non-migas untuk penyediaan devisa. Peningkatan penghasilan devisa melalui ekspor hasil produksi pertanian, memiliki keuntungan-keuntungan tertentu. Pertama, ekspor hasil produksi pertanian tidak membutuhkan investasi besar-besaran karena tanaman ekspor seperti kopi, kakao, dan tanaman lainnya dapat langsung ditambahkan oleh petani pada tanaman yang sudah ada. Kedua, walaupun suatu investasi baru dibutuhkan, jumlah modal yang diperlukan tidak terlalu besar karena sifat umum produksi pertanian adalah ratio kapital-output yang kecil. Ketiga, karena kebanyakan produk pertanian bersifat homogen, permintaan yang dihadapi seorang eksportir produk pertanian sangat elastis sifatnya, berarti peningkatan jumlah ekspor tidak akan terlalu mempengaruhi harga.

Indonesia memiliki komoditas yang potensial untuk ekspor yang berasal dari tanaman pangan, perikanan, peternakan dan perkebunan.

Potensi hortikultura mempunyai keunggulan komparatif yang tinggi untuk dikembangkan, karena lahan yang masih cukup luas dengan curah hujan yang tergolong basah maupun kering dengan dataran tinggi maupun dataran rendah merupakan potensi yang sangat memungkinkan untuk pengembangan aneka jenis tanaman buah-buahan, sayuran dan tanaman hias seperti mangga, nenas, markisa, pisang, rambutan, kubis, bawang merah, cabe dan angrek.

Potensi sumberdaya ikan Indonesia masih cukup besar sedangkan tingkat eksploitasinya masih relatif rendah. Luas perairan Indonesia 5,8 juta km² dengan potensi sumberdaya ikan di laut tidak kurang dari 6,6 juta ton per-tahun. Produksi perikanan laut pada tahun 1990 baru sekitar 2,374 juta ton. Dengan demikian tingkat pemanfaatan baru 33 %. Disamping itu masih tersedia potensi perairan 0,7 juta ton per-tahun. Disamping udang, tuna/cakalang komoditi perikanan yang mempunyai potensi ekspor di pasaran internasional dimasa

datang antara lain rumput laut, teripang, kerapu, kakap, kepiting, kodok, ikan hias dan nila merah.

Produksi peternakan mempunyai potensi sebagai komoditas ekspor yang baru. Kalau selama ini hanya kulit, tulang dan tanduk, maka dimasa datang antara lain komoditi ternak babi, produk unggas antara lain bibit ayam, telur tetas, telur konsumsi, daging kambing/domba, produk susu olahan dan sebagainya.


Selama bertahun-tahun Indonesia merupakan pengeksport komoditas perkebunan tradisional seperti karet, kelapa sawit, kopi, teh, lada, pala, cassiavera, vanili, kakao, tembakau, serih wangi dan jambu mete, yang pengembangannya akan terus dimantapkan.

Hasil-hasil dari sektor pertanian yang tersedia ini akan ditingkatkan derajat pengolahannya sehingga dapat memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi, menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi bagi mereka yang berusaha di bidang ini, makin luas jangkauan pasarnya serta diharapkan akan menciptakan lapangan kerja baru. Peningkatana nilai tambah sektor pertanian ini juga untuk lebih mampu bersaing di pasaran Internasional.

Melalui pameran "INDONESIA TODAY 1991" ini, mudah-mudahan para pengusaha dari mancanegara mendapatkan informasi mengenai potensi ini.

Semoga sukses.

Menteri Pertanian


Ir. Wardoyo



30





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN RI
PADA ACARA SYUKURAN PERINGATAN 1/3 ABAD AMBIL-ALIH PERKEBUNAN
DAN SEMINAR PENINGKATAN PERAN PERKEBUNAN PADA
ERA TINGGAL LANDAS PEMBANGUNAN NASIONAL
TANGGAL 20 FEBRUARI 1991

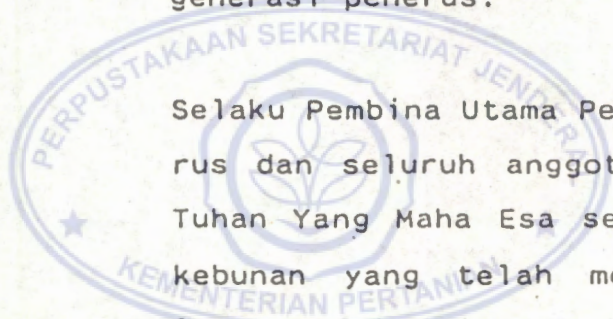
Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarokatuh,

Hadirin dan peserta seminar yang saya hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat dan karunianya kita dapat hadir pada Upacara Syukuran Memperingati 1/3 Abad Pengambil-alihan Perkebunan dan Penutupan Seminar Peningkatan Pembangunan Perkebunan Pada Era Tinggal Landas yang dilakukan selama 2 hari di gedung ini.

Saya berbahagia pada malam ini dapat berada ditengah-tengah Saudara. Dengan memperingati 1/3 Abad Pengambil-alihan Perkebunan kita dapat memetik pengalaman-pengalaman berharga yang dapat kita jadikan modal dalam membangun perkebunan dimasa yang akan datang, berupa besarnya semangat dalam membangun, rela berkorban, kepercayaan diri dalam kemampuan membangun dan lainnya yang perlu terus kita miliki dan kita tularkan kepada generasi penerus.

Selaku Pembina Utama Perkappen saya dan saudara-saudara Pengurus dan seluruh anggota Perkappen memanjatkan doa kehadiran Tuhan Yang Maha Esa semoga terhadap pembangun-pembangun perkebunan yang telah mendahului kita diberikan tempat yang lapang oleh Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan amal baiknya



Dalam mewujudkan cita-cita bangsa kita harus senantiasa konsisten terhadap komitmen nasional mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam kaitan mengisi kemerdekaan dan mensukseskan pembangunan nasional, Depipus Perkappen selaku penyelenggara seminar telah mengambil bagian yang berguna dalam menyumbangkan buah-buah pikiran bagi peningkatan pembangunan perkebunan, dalam era tinggal landas khususnya dan pembangunan perkebunan di masa-masa yang akan datang; untuk ini saya mengucapkan terima kasih.

Hadirin yang berbahagia, saya malam ini sungguh sangat berbahagia sekali dapat berkumpul dan bertatap muka bersama para senior perkebunan dari berbagai daerah, sebagai suatu kesempatan yang amat baik untuk menggali berbagai pengalaman sebagai bahan masukan untuk peningkatan peran perkebunan dalam pembangunan nasional, yang untuk ini jelas diperlukan peningkatan kemampuan profesionalisme manajemen dan segala tingkatan.

Kalau dahulu pada waktu pengambil-alihan keputusan-keputusan/tindakan-tindakan lebih banyak dilandasi pertimbangan-pertimbangan yang bersifat politis; maka sekarang adalah amat diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang benar-benar akurat baik dari segi ekonomi, keuangan, teknik, manajemen, pemasaran, sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan setempat, dan yang berwawasan global/internasional; baik yang menyangkut kebijaksanaan jangka pendek, maupun jangka panjang, atau yang dewasa ini dikenal dengan sebutan "Mega Manajemen" menghadapi era trend tahun 2000.



Untuk keberhasilan management mencapai tujuannya, adalah amat diperlukan keikut-sertaan seluruh karyawan. Untuk ini adalah amat diharapkan agar keputusan-keputusan prinsipil yang menyangkut masalah Sumber Daya Manusia diambil manfaat dengan mengikut sertakan organisasi karyawan seperti Perkappen;

Kita jangan hanya terpukau upaya memperluas produksi bahan baku saja tetapi juga jeli mengembangkan bahan baku tersebut menjadi bahan setengah jadi, mempercepat pengembangan industri hilir/ agro industri serta menguasai tata niaganya; agar nilai tambah yang sebesar-besarnya dari hasil perkebunan tersebut dapat kita raih.

Mengenai adanya pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam seminar, ini untuk menyempurnakan organisasi PTP dengan merger, dan membentuk holding company, dalam rangka efisiensi dan efektifitas secara menyeluruh, kami akan mempelajarinya secara sungguh-sungguh serta menyeluruh, dari berbagai segi, agar benar-benar dapat mencapai tujuannya.

Hasil-hasil seminar saudara sebagaimana yang telah dilaporkan oleh saudara Ketua Panitia Seminar, maupun bahan-bahan tertulis yang dilampirkan saya terima sebagai masukan-masukan, untuk bahan pertimbangan guna kebijakan-kebijakan pembangunan perkebunan/pertanian.

Kepada koperasi karyawan yang telah hidup dan berkembang di kebun-kebun saya harapkan agar terus dibina dan ditingkatkan/dikembangkan kegiatannya, dalam rangka meningkatkan penghasilan karyawan.



Kepada saudara-saudara Senior perkebunan, para Direksi, para Pengurus Perkappen, para wakil-wakil instansi-instansi terkait, para anggota panitia seminar saya ucapkan terima kasih semoga jerih payah dan sumbangsih saudara diberkahi Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan ini seminar saya tutup dan pada seluruh hadirin saya minta turut memekikkan salam perjuangan Perkappen dengan gegap gembita

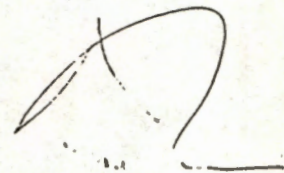
M a j u t e r u s ,

(dijawab hadirin : p a n t a n g m u n d u r)

Wabillahi taufik wal hidayah, Wassalamualaikum warakhmatullahi wabarokatuh.

Jakarta, 20 Pebruari 1991

Menteri Pertanian RI



Ir. Wardoyo



31





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
DALAM MENYAMBUT TERBITNYA BUKU PEDOMAN PENERANGAN
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh.

Saudara-saudara pembaca yang saya hormati,

Saya sangat bergembira karena dapat turut memberikan sambutan dalam rangka menyambut terbitnya buku PEDOMAN PENERANGAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP yang diharapkan akan dapat dipergunakan oleh Juru Penerang sebagai salah satu bahan pemandu di daerah-daerah. Saya menganggap upaya untuk memasyarakatkan dan memberikan pengertian yang menyeluruh dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat luas mengenai pelestarian lingkungan hidup sangat penting.

Sebagai salah satu sektor andalan di dalam pembangunan ekonomi nasional kita, sektor pertanian sangat berkepentingan dan sekaligus dapat turut menyumbangkan andilnya dalam mensukseskan pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN 1988. Sebagian besar masyarakat kita di seluruh pelosok tanah air yang tercinta ini masih mendapatkan nafkahnya dan berkecimpung serta hidup di sektor pertanian. Oleh karena itu keberhasilan kita untuk memasyarakatkan pengertian mengenai pelestarian lingkungan hidup juga tergantung kepada sejauh mana kita telah berhasil menanamkan dengan baik pengertian tersebut kepada jutaan anggota masyarakat petani tersebut.



Dalam pada itu sayapun berkeyakinan bahwa aparat dan segenap jajaran pemerintah yang berkecimpung dalam lingkup pertanian sebenarnya mempunyai "keunggulan komparatif" untuk turut mensukseskan upaya memasyarakatkan pengertian mengenai pelestarian lingkungan hidup kepada masyarakat. Bisa dikatakan bahwa sebagian besar petugas dan aparat Departemen Pertanian bekerja dan berada dilapangan serta akrab bersama kehidupan masyarakat petani di pedesaan. Para penyuluh pertanian kita di seluruh pelosok pedesaan selama ini merupakan bagian yang penting dari ujung tombak kita dalam mencapai sasaran pembangunan di sektor pertanian. Tidak dapat dipungkiri bahwa merekalah, para penyuluh pertanian beserta seluruh kontak tani dan nelayan, turut memberikan andil yang besar dalam memperkenalkan teknologi pertanian yang lebih baik kepada petani kita. Karena akrab dan sehari-hari bergaul dengan masyarakat petani, melalui merekapun kita bisa menyampaikan dan menterjemahkan pesan-pesan pembangunan yang berwawasan lingkungan dalam bahasa yang mudah difahami oleh para petani.

Saudara-Saudara Pembaca Yang Budiman.

Dimensi pembangunan yang berwawasan lingkungan memang sangat luas, mencakup landasan konsepsional, dampak pembangunan itu sendiri terhadap lingkungan, serta permasalahannya. Dengan meningkatnya kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat sebagai hasil dari pembangunan yang telah kita capai selama ini, meningkat pula aspirasi dan kesadaran mereka terhadap kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan terhadap lingkungan, khususnya harapan terhadap kualitas kehidupan yang lebih baik. Disamping itu, besarnya jumlah penduduk dan terbatasnya sumberdaya alam yang kita miliki menyebabkan proses pembangunan itu sendiri harus bisa kita pelihara agar senantiasa berkelanjutan.



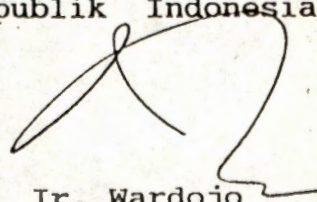
Sebagai sektor yang diharapkan dapat menyediakan kebutuhan pangan dan bahan baku industri bagi hari ini dan hari esok, bagi generasi kini dan generasi esok, maka tuntutan masyarakat terhadap lingkungan dan kualitas kehidupan yang lebih baik tersebut harus kita perhatikan karena memberikan konsekuensi kepada sektor pertanian. Konsekuensi ini semakin nyata mengingat sebagian dari produksi pertanian yang kita hasilkan harus dapat pula kita pasarkan ke pasaran internasional yang dalam masa depan ini semakin menuntut hasil-hasil pertanian yang bebas terhadap pencemaran. Oleh karena itu pula kesadaran pelaku-pelaku ekonomi, termasuk pelaku ekonomi di dalam sektor pertanian terhadap pelestarian lingkungan hidup harus senantiasa ditanamkan agar dampak negatif yang tidak kita ingini dapat kita hindarkan.

Saudara-Saudara Yang Saya Hormati.

Akhirnya, pada kesempatan ini saya ingin mengajak semua pihak, khususnya kepada segenap aparat dalam jajaran instansi Departemen Pertanian untuk turut berperan aktif dalam menanamkan pengertian dan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Mudah-mudahan dengan terbitnya buku PEDOMAN PENERANGAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP ini, upaya bersama yang selama ini telah kita lakukan, dapat kita laksanakan secara lebih efektif lagi.

Wassalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pertanian
Republik Indonesia



Ir. Wardoyo



32





**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA UPACARA PENANDATANGANAN
PERJANJIAN KERJASAMA DEPARTEMEN PERTANIAN
DENGAN
BANK RAKYAT INDONESIA, BANK BUMI DAYA DAN
BANK NEGARA INDONESIA 1946**

1. Yth. Sdr. Menteri Muda Pertanian.

Yth. Sdr. Para Pejabat Eselon I Departemen Pertanian

Yth. Sdr. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia

Yth. Sdr. Direktur Utama Bank Bumi Daya

Yth. Sdr. Direktur Utama Bank Negara Indonesia 1946

Saudara-Saudara peserta Rakernas Departemen Pertanian
beserta hadirin lainnya yang saya hormati.

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,
karena pada malam hari ini kita dapat hadir dan baru -
saja menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama
antara Departemen Pertanian dengan beberapa Bank Peme-
rintah yakni Bank Rakyat Indonesia, Bank Bumi Daya -
dan Bank Negara Indonesia 1946.



2. Adapun yang mendasari kerjasama ini antara lain adalah:

- Selama ini kita merasakan bahwa laporan pelaksanaan proyek baik laporan fisik dan keuangan, kecermatan, kecepatan dan kedisiplinan penyampaiannya belum sesuai dengan yang diharapkan.

Hal ini antara lain disebabkan karena kegiatan proyek-proyek lingkup Departemen Pertanian tersebar diseluruh pelosok tanah air, yang pada umumnya masih menghadapi masalah transportasi dan komunikasi sehingga penyampaian pelaporan melalui pos sering terlambat bahkan tidak jarang yang salah alamat.

- Untuk pengendalian pelaksanaan proyek setiap bulan diperlukan laporan perkembangan pelaksanaan fisik dan keuangan proyek secara tepat, cermat dan akurat.

- Selama ini memang sebagian besar proyek-proyek lingkup Departemen Pertanian dananya sudah disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia, Bank Bumi Daya dan Bank Negara Indonesia 1946, sehingga dalam rangka memanfaatkan teknologi yang dimiliki oleh ketiga Bank tersebut, saya menetapkan ketiga Bank Pemerintah tersebut sebagai mitra kerjasama untuk menyalurkan dan melaporkan setiap penggunaan dana



Anggaran Proyek dari APBN Murni dilingkungan Departemen Pertanian baik yang berada di Pusat maupun di Daerah.

3. Tujuan kerjasama ini semata-mata dalam rangka menyempurnakan sistim pelaporan proyek yang ada saat ini, - sehingga Departemen Pertanian setiap saat dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan proyek secara - tepat, cepat dan akurat.

Dengan demikian pembinaan dan pengendalian pelaksanaan proyek dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

4. Pembidangan kerjasama tersebut diatur sebagai - berikut:

- Bank Rakyat Indonesia menyalurkan dana APBN Murni dari KPKN dan menangani pelaporan proyek lingkup Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan dan Sekretariat Badan Pengendali Bimas.
- Bank Bumi Daya menyalurkan dana APBN Murni dari KPKN dan menangani pelaporan proyek lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perikanan, Direktorat Jenderal Perkebunan dan Badan Pendidikan Latihan Pertanian.

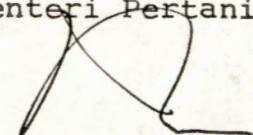


- Bank Negara Indonesia 1946 menyalurkan dana APBN Murni dari KPKN dan menangani pelaporan proyek lingkup - Direktorat Jenderal Peternakan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

5. Akhirnya pada kesempatan yang baik ini perkenallah - saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direksi Bank Rakyat Indonesia, Bank Bumi Daya dan Bank Negara Indonesia 1946 atas kesediaannya - bekerjasama dengan Departemen Pertanian dengan harapan agar semangat kerjasama yang saling menguntungkan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.
6. Terimakasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Menteri Pertanian


Ir. Wardoyo



33





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

THE ROLE OF AGRIBUSINESS IN AGRICULTURAL DEVELOPMENT ¹⁾

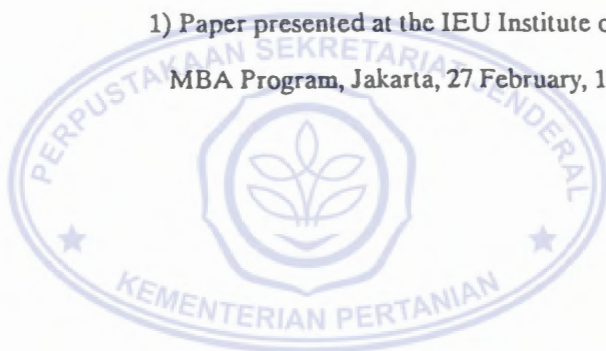
By : Ir. Wardoyo

Minister of Agriculture

**Graduating Students, Distinguished Professors,
Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen,**

It is a great pleasure to be standing here today and addressing the IEU Institute of Management's graduating class at their commencement. May I use this opportunity to congratulate the graduating students for all they have accomplished through incessant hard work. I would also like to recognize the impressive contributions that this Institute has made to the development of management education in Indonesia. It is a great honor for me to deliver a speech about Agribusiness in Agricultural Development in this occasion. I consider this is the best opportunity, not only because agribusiness development play an important role in agricultural advancement but also I have the opportunity deliver this to the right person who will deeply involve in the development process, and have important roles in accelerating and directing the agribusiness development strategy to achieve the greatest share to the national economy.

1) Paper presented at the IEU Institute of Management, at the Fifth Graduation Ceremony of its MBA Program, Jakarta, 27 February, 1991.



Distinguished Guests,

The Guidelines of State Policy 1988 has determined that economic development is directed to more industrialized economy supported by a strong, efficient and resilience agricultural sector. Therefore, agricultural and industrial sectors are necessary to grow at sufficiently high growth rate. At the end of Pelita V, Indonesian economy is expected to be ready for take off to more industrialized economy. This structural transformation will be characterized by (a) a decrease in relative share of agriculture to the PDB; (b) increase in the export share of semi- finished and finished product; (c) stronger relationship between sectors; (d) rural areas become more access to information; and (e) a substantial shift of traditional agriculture to a more market oriented agriculture.

In Pelita V the target of economic growth is 5 percent annually, consist of 3.6 percent in agricultural and 8.5 percent in industrial sector. Although its growth rate is only 3.6 percent annually, agriculture is still strategic and regarded first priority in economic development because it is the source of income of most Indonesian people.

The objectives of agricultural development as stated in Repelita V are to increase production, to sustain self-sufficiency in food, to provide raw materials for industrial sector, more export and foreign exchange earning, and enhance farmer's income and income distribution. To achieve those objectives, a great amount of support from other sectors is required, and the role of agribusiness becomes very important. Agribusiness refers to the interrelated operations in vertical commodity structure, from inputs to farm production and downstream to the processing and distribution operations until the transformed product reaches the final consumers. Agroindustry, on the other hand, means the segment of the agribusiness sub-sector which process and transform raw agricultural food and fiber products into intermediate and finished consumer products. The interrelated and complex activities of agribusiness indicate that integrated plan, program, and project between agriculture and other sectors is necessary in economic development in agriculture-based country like Indonesia.



Conceptually, one indicator of the level of development of an agricultural nation is the extent and vigor of the linkages between agriculture and industry sectors. The linkages is essentially via agroindustrial processing of raw materials.

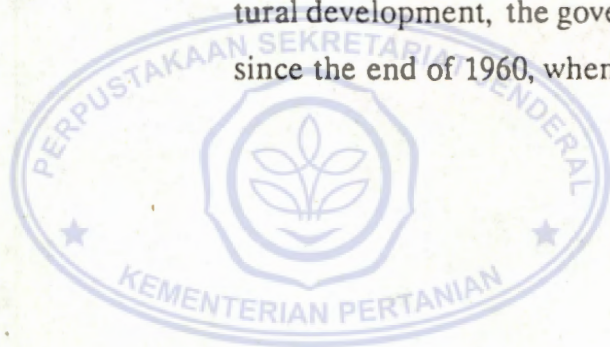
In accordance with interrelated activities in agribusiness, our agricultural development strategy is based on Trimatra Pembangunan Pertanian, i.e., integrated regional development, integrated commodity development, and integrated farm development, and to be implemented through Catur Usaha Pokok, namely, diversification, intensification, extensification and rehabilitation.

With Trimatra, there is a dynamic interrelation and interdependency between region between sectors of the economy, commodities and farms, which in turn will increase the whole economic activities, labor absorption and added value. Catur Usaha is an operational strategy which focuses on production, optimal resource utilization, and sustain ability of natural resources.

At the national level, diversification means an expansion of basis and spectrum of agricultural development, including the expansion of market both domestic and international. At production center, diversification is a development of agroindustry and agribusiness, including the utilization of by-product in a commodity system. This effort will increase interdependency between industry and agriculture sectors. Within a farm unit, diversification is an optimalization of resource use, including labor, energy, technology, and farming pattern. It is clear that under the above three definitions, diversification is consistent with Trimatra Pembangunan Pertanian.

Distinguished Guests,

I would like to show you how well we have done in the past in conducting the agricultural development in our country. To provide infrastructure to support agricultural development, the government has mobilized a large amount of funds, especially since the end of 1960, when Bimas program was initiated. Our success in sustaining

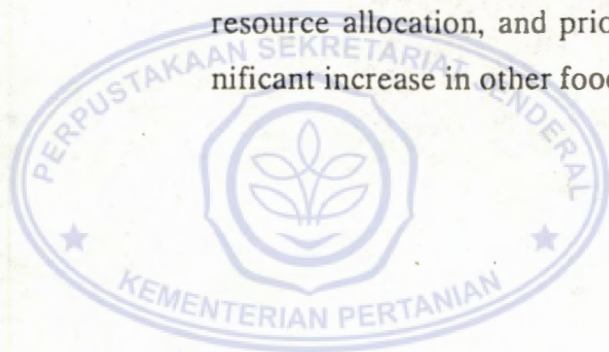


self-sufficiency on foodstuff is partly due to our success in preparing supporting activities. The required supporting facilities for agricultural development are not only physical inputs such as irrigation, transportations or technological packages, but also the well-functioning agribusiness activities which provide agricultural equipment, seed multiplication, input distribution, agricultural credits and others. Efficient economic activities in this segment, will promote technological adoption and the development as a whole.

In the last two decades, such activities are performed mainly by the government with a high rate of subsidy. Irrigation development, irrigation channels rehabilitation, road and new paddy field construction are carried out by the government using development fund. However, the government role in distributing production input and providing seed have been taken over gradually by private companies, among others by village unit cooperative which are owned and operated by farmers. Seed multiplication is carried out by Perum Sanghyang Seri, The role of private sector in supporting agricultural development activities continuously increase. Farmer independency will be strengthened in accordance with the effort to shift traditional farming practices to market oriented farming which responsive toward price changes, able to see and anticipate market opportunity. The role of village unit cooperative is increasing not only in input provision but also in output marketing.

In general, agribusiness activities in supporting rice production have been sufficient both in quantity and in its distribution system. The improved distribution of input has enable farmers to use the required inputs. For other agricultural products we need to improve the system including improvement of farming system.

On the production side, our success in rice self-sufficiency in 1984 has built our confidence on our capability to solve our food problems. Our intention to maintain self-sufficiency requires hard work and carefully planned program on investment, resource allocation, and priority setting. This success has been followed by a significant increase in other food crops production. In the period of Pelita I to Pelita IV



corn production increased from 2.3 to 5.2 million tons; cassava from 10.9 to 14.4 million tons, soybeans from 0.38 to 1.16 million tons.

Beside traditional food crops, livestock and fish production has also increased significantly. In 1971 the population of egg layer chicken were 1.8 million then increased to 31.8 million in 1985. During the same period, broiler population increased from a negligible number to 143.7 million. In addition, fish production increased at a growth of 4.8 percent in Pelita IV, of which caught fish 4.8 percent and fresh water fish 4.7 percent. Estate crops production especially the export crops, increased substantially. During Pelita IV rubber production increased by 2.9 percent, palm oil 11.3 percent, palm kernel 19.1 percent, coconut/copra 6.9 percent, coffee 6.2 percent, tea 3.7 percent, pepper 2.0 percent, tobacco 7.6 percent, and sugar 6.6 percent.

However, the impressive production growths have not matched with a sufficient growth in agro industry. The share of processed commodities to total production is still low, and our commodities export are still dominated by raw agricultural commodities. Economically, we have good market opportunity and competitive advantage compared to neighboring countries in Asia. Some constraints has limited us to develop post harvest activities. The mentioned problems among other things are :

- a. Agribusiness involves several related institutions, therefore, planning on agribusiness requires synchronization and harmonization program among institution/department. For example, data collection and monitoring activities usually go through bureaucratic channel/department, but information stream usually go through product stream and market signal.

To construct agribusiness development plan in Indonesia or in each region, we have to check the reliability of the data from various related institution, such as Ministry of Agriculture, Trade, Industry, and Transportation.



- b. Currently, agroindustry development varies in technology level, productivity, processing, form of final products, quality etc. In general, agroindustry is left far behind compared to the other middle income countries in Asia.
- c. Insufficient post harvest facilities and harvesting methods has caused a large during post harvest activities, ranged between 20-50 percent depends on type of commodity and regions.
- d. Based on loss rate in post harvest period and production, and compared to the current processing activities, agroindustry in Indonesia is highly potential, especially in rural areas, where raw materials are available for various post harvest activities which create value added through grading, sorting, and processing.

Our agribusiness activities are still biased to production. Post harvest and agroindustry, although still left behind compared to neighboring countries, but it is highly potential and has a good prospect. Indonesia has competitive advantages since raw materials which are processed are produced domestically, which enable agroindustry product competitive in price in the world market, but also support upstream sector, i.e., agricultural sector.

Ladies and Gentlemen,

After I discussed current agribusiness performance, I will try to discussed the constraints, prospect and opportunities which are available in the future.

We realize that in the future, problems in development process will be much different from 10 - 20 years ago. The shift which need to take into account covers :

- a. More complex interaction in cross sectoral policy and related to globalization and regionalization of world economy.
- b. Agricultural development will no more rely on funds from oil and gas sectors
- c. Deregulation will promote optimalization in resource allocation.

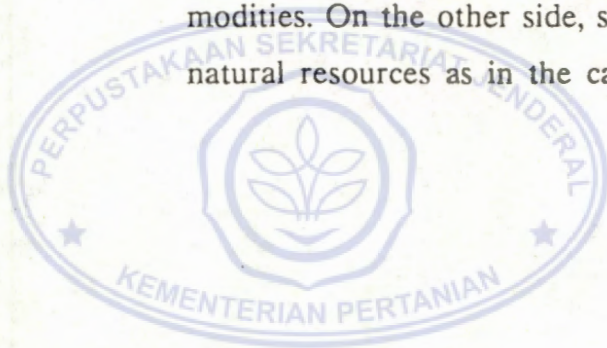


Agriculture will remain an important sector contributing to the national economy, in particular its role on income promotion and poverty alleviation, job opportunity for rural labor, provision of raw material for the industry, export earning as well as in regional development. However, in realizing the expected future role of this sector long term policies are essentially needed with regard to natural resource development, institutional and human resource development, environmental conservation and extension of resource base development.

The increasingly complex interaction and dependency among sectors in the economy have placed agriculture an upstream industry, which has to be developed in accordance with market advancement brought up by derived industrial demand as well as the growing consumption demand and preference. At the same time, the awareness of environmental quality requires agriculture to continuously seek sustainable development pattern for the sake of natural resource conservation. It is the responsibility of the government and every institution concern to develop market oriented and commercial agriculture enterprises, also responsive toward improved technology and market opportunities.

International movement on trade liberalization suggests that chances are higher for Indonesia to take a larger part in the international market. International trade restructurization, especially the multilateral cooperation through GATT negotiations, aimed at facilitating free international trade. It is estimated that such movement might raise commodity prices, which implies higher export opportunity for Indonesian agricultural commodities.

In the meantime, economic structure within Indonesian neighboring countries and countries producing similar commodities, has gradually moved toward higher technology, leaving primary commodities and looking upon secondary commodities. This situation could be seen as opportunities for Indonesia to supply those commodities. On the other side, several countries are facing the problems of limited natural resources as in the case of Dutch and other European countries. This



circumstances call for agricultural policies emphasized on high marginal value commodities. Investment for commodity with lower value will then be directed to other countries.

Subsequently, by looking at the market demand and potential for producing agroindustrial commodities, the government policy formulation will consider the following conditions; (a) For particular commodities, the country has been able to meet the domestic demand as in the case of rice, to penetrate export markets of rubber, tobacco, coffee, palm oil, tuna fish and other commodities (b) Several commodities are still imported for direct consumption as well as industrial inputs such as cotton, soybeans and wheat (c) There are potential commodities with a substantial domestic demand and export, but they have not been optimally developed as sago, asparagus, bamboo shoot, mushrooms, cassava and poultry (d) Demand for fresh product exports particularly tropical flower and foliage, vegetables and fruits.

The above conditions show that agribusiness and export opportunities are for commodities which require intensive farming and large capital as well. Fresh products marketing need a careful and rapid handling and therefore appropriate packaging is necessary. Unfortunately, handling equipments and transportation cost are relatively high, so does the cost of working capital. For these reasons, capital investment become an important component in agribusiness development.

It has to be admitted that in spite of the deregulation series which continuously carried out by the government, the investment sector is still facing several constraints. One of them is the investment priority which has been emphasized on food crops especially rice and more in the production level. Less attention has been given to the post production activities. Another constraint which discourage investment will be the business environment. Inadequacy of infrastructures, credit facilities and skilled labor in post harvest handling are disincentives for enterprises. Moreover, the heterogeneity, low quality and discontinuity of products have become problems to the processing industry. Not least important constraint is the long bureaucracy and



administrative procedures in obtaining investment license. This condition, coupled with the problems in accessing land, caused agribusiness less attractive to the investor.

There is no doubt that agribusiness involves a significant risk as it depends highly upon the natural resource and climatic condition, easily affected by pests and diseases, also the risk of highly fluctuates market prices.

Bearing that in mind, supportive efforts to accelerate investment in agribusiness have been and will continuously made by the government, with the following approaches; (1) regional development through the enhancement of agribusiness program in rural areas, (2) formulation of resource based agribusiness development strategy, (3) establishment of regional commodity priority and (4) institutional approach.

Agribusiness development in rural areas is considered an important strategy for the following reasons. First, the growing laborforce, which is estimated at 1.5 - 1.7 million, need to be accommodated while agriculture could absorb only 25%. It is expected that rural agribusiness development will help solving this problem by providing job opportunities. Second, it is a mean to increase value added enjoyed by the farmer through elimination of inefficient processing and marketing process. Third, to improve the quality of processed product and meet consumer preference. Fourth, by developing rural agribusiness, opportunities for economic growth with equity as well as distribution of development achievements, especially for outer islands will be enhanced. Fifth, diversification of rural economy could be promoted through agribusiness and sixth, higher opportunities to increase exports earnings.

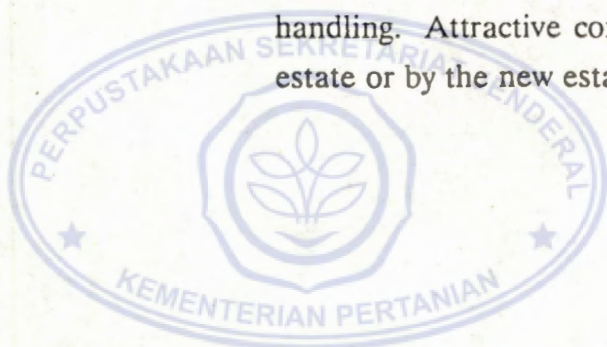
Agribusiness development strategy serves as the basis for planning formulation, program and project, which enable integrated rural development based on regional and commodity priority. The development strategy will involve the following three elements;



1. Policies to enhance rural private entrepreneurship, supportive business environment both for national and regional level. Procedure simplification, simplification and improvement of government services. In this case, deregulation in the banking system, investment and trade which are being carried out are examples.
2. Suitable incentive system for private entrepreneur and investor. The role of private sector and cooperative have become more important in regional and rural development, hence, the development of small and medium scale enterprise should be supported by several effective and efficient policies that can be easily understood by entrepreneur. Incentive for the entrepreneur such as reduced tax burden for capital goods, imported or domestically purchased equipment, protection and patent, marketing assistance, interest rate subsidy etc.
3. Commodities and regional priority system based on rural requirement, the amount of processable commodities, loss at post harvest, consumption level and nutrition condition, dependability on commodities and stage of development of the region. Agro-industry development should be based on competitive advantage principle, skill of the labor, type and familiarity of processing industries, the continuity of raw materials and subsidized credit provision.

Social engineering has been implemented to develop agribusiness and agro industry in technological transfer, capital assistance and marketing. In its implementation, Ministry of Agricultural has formulated three approaches which are elaborated as follow :

- a. Nucleus Estate Smallholder System, this approach has been successfully developed and relatively the most appropriate method in agribusiness development. The economic of scale and the relationship between the farmers as plasma and the enterprises have been clearly regulated for selected commodity. Effort to broaden the scope of agro industry which vertically integrated including down stream industry is still needed. It is expected that this activities could utilize all opportunities in industry and develop other industries including waste product handling. Attractive condition for investment either by the existing nucleus estate or by the new estate needs to be developed further. It is expected that



the role of cooperatives increase, and lead the farmers to become the share holders.

- b. Foster parent approach. This is relatively the most prepared pattern initiated by the Ministry of Industry. This pattern will be soon developed by involving Government Owned Enterprise (BUMN), under the management of the Ministry of Agriculture, formulate integrated program covering the selected region and commodity. Several aspects are needed to be assessed further in the implementation of this approach, among other things are : (i) procedure on the use of BUMN budget available for this program, (ii) description of cooperative relationship among foster parent enterprises, foster children enterprises, cooperative as well as private enterprises, (iii) indicators to select foster children enterprises and (iv) indicators to measure the success of the program.
- c. Rural Institutional Approach. This approach is one of the most complicated because includes transformation of the social value from agricultural society to industrial society. The following are several requirements needed in its implementation, (i) indepth study on the existing rural situation particularly on the constraints limiting the development of rural industries, in various agro ecosystem, (ii) in depth study on agricultural engineering which support the establishment of agro industry; (iii) provision of appropriate production technology; (iv) establishment of financial institution which is capable in mobilizing rural capital; (v) existence of cooperatives, individual, and private sector who will supervise rural industries.

Ladies and gentlemen,

The efforts to develop agribusiness and agroindustry require the support of all parties and institutions such as trade, transportation, banking, financial etc. Therefore, the availability of integrated program, harmony and mutual supporting of each institution is very important.

Development of agribusiness and agro-industry, will create positive impacts such as :



1. Accelerate rural development.
2. Enhance in social value towards industrial society
3. Increase the ability in agro-industrial strategy and capability identifying domestic and foreign market.
4. Create national momentum to accelerate the industrialization process, as a result of increase in job opportunity and income and purchasing power of rural society.
5. Strengthening the rural economy as a whole.

Agro industrial development should be able to promote industries for balanced rural economics growth, to increase value added and labor absorption, and locate the efficient industrial location which is suitable to the type and size of those industries. In turn, it will a diversified agricultural structure. Value added and labor force absorption derived from those agro- industries is expected to be enjoyed by rural society. In addition, these industries in principle have a high multiplier effect which benefit the peoples at the surrounding areas.

Graduating Students,

In conclusion, I would like to emphasize that there are no quick fixes and simple solutions to the problems that this country has to face in the years to come. At the same time, it would be a big mistake to assume that we can do nothing within the vast and almost unlimited potential of resources granted to us by Almighty God.

As new members of our highly educated society, you also represent the best and brightest human resources that this country possesses. Your fellow countrymen, of which the majority are hard-working people living in rural areas, including the farmers with their families, are looking up to you for your talents, wisdom, and leadership. It is our task together - yours, mine, and ours all - to ascertain that in the process of making Indonesian agriculture stronger in the future; that "they" are not left behind.



Recognizing the dedication with which you have applied yourself to your studies, and the moral values which the founders of this institution wish to inculcate, I rest confident that you will construe threats as opportunities, and respond adequately to the challenges the Indonesian people are facing.

Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen,

In closing my remarks, let me say again, what pleasure it has been to be honored to address this distinguished gathering. May I wish you all the best.

Thank you.

Minister of Agriculture

Ir. Wardoyo



34





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN ¹⁾

Saudara-saudara pengurus IEU Institute of Management yang terhormat, para mahasiswa yang diwisuda yang berbahagia dan hadirin sekalian yang saya hormati,

Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarrakatuh.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmatNya sehingga kita dapat berkumpul pada suasana yang berbahagia pada hari ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada para Wisudawan dan Wisudawati, juga kepada IEU Institute of Management yang merayakan Hari Ulang Tahun ke V dan telah menghasilkan sejumlah Sarjana di bidang bisnis. Saya merasa berbahagia berada diantara saudara-saudara pertama karena dapat menyaksikan keberhasilan saudara-saudara dalam menempuh pendidikan, dan yang kedua karena saya memperoleh kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang Pengembangan Agribisnis dalam

¹⁾ Bahan ceramah Menteri Pertanian dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun V IEU Institute of Management, Jakarta, 27 Pebruari 1991.



Pembangunan Pertanian di negara kita. Kesempatan ini saya nilai sangat tepat, karena bukan saja pada saat ini sedang digalakkan pembangunan agribisnis, tetapi juga dapat saya sampaikan langsung kepada calon-calon pelaksana pembangunan yang mendalami permasalahan manajemen yang sangat diperlukan untuk memacu dan mengarahkan strategi pengembangan agribisnis, sehingga dapat memberikan sumbangan maksimal dalam pembangunan ekonomi nasional.

Garis-Garis Besar Haluan Negara 1988 telah mengamanatkan bahwa pembangunan ekonomi diarahkan untuk menumbuhkan industri yang kuat didukung oleh sektor pertanian yang maju, efisien dan tangguh. Sejalan dengan itu maka sektor pertanian dan sektor industri dituntut untuk berkembang pada laju pertumbuhan yang cukup tinggi dan sekaligus memecahkan masalah ekonomi nasional yang dihadapi, yaitu meningkatkan penerimaan devisa, meningkatkan pendapatan masyarakat yang berpenghasilan rendah, memacu pertumbuhan wilayah yang kurang berkembang dan menyeimbangkan pertumbuhan antara pedesaan dan perkotaan. Pada akhir Pelita V diharapkan perekonomian Indonesia sudah mencapai suatu kondisi untuk mulai lepas landas yang dicirikan oleh struktur ekonomi yang berimbang, dengan sektor industri sebagai tulang punggung ekonomi yang didukung oleh kemampuan dan kekuatan pertanian yang tangguh. Proses transformasi struktural ini dicirikan oleh (a) peran relatif sektor pertanian dalam sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto dan penyerapan tenaga kerja semakin menurun, (b) pangsa ekspor setengah jadi dan bahan jadi semakin besar, (c) keterkaitan antar sektor semakin tinggi, (d) daerah pedesaan



semakin terbuka dan arus informasi semakin lancar, (e) terjadi perubahan pola berusaha ke arah yang semakin efisien dan peningkatan nilai tambah yang semakin besar.

Atas dasar GBHN tersebut, dalam Pelita V telah ditentukan sasaran pertumbuhan perekonomian Indonesia secara rata-rata sebesar 5 persen per tahun. Dari sasaran tersebut antara lain diharapkan sektor pertanian dapat tumbuh dengan laju 3,6 persen per tahun, dan pertumbuhan sektor industri ditingkatkan menjadi 8,5 persen per tahun. Walaupun sasaran pertumbuhannya hanya 3,6 persen per tahun, sektor pertanian masih tetap strategis dan menempati prioritas utama dalam pembangunan perekonomian, karena secara langsung menyangkut kesejahteraan sebagian besar penduduk kita (51 persen), dan karena keberhasilan pembangunan di sektor pertanian di Indonesia akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

Tujuan pembangunan pertanian seperti yang tercantum dalam Repelita V Pertanian adalah untuk meningkatkan produksi, mencapai swa sembada pangan, menghasilkan bahan baku industri, meningkatkan perolehan devisa ekspor, dan meningkatkan pendapatan petani. Aspek produksi, pendapatan dan distribusi ditegaskan sebagai sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan pertanian. Kesemuanya itu merupakan komponen strategis dalam memelihara stabilisasi dan memperkuat landasan untuk meningkatkan ketahanan nasional.



Dalam pelaksanaannya dukungan dan keserasian program antar sektor merupakan hal yang penting.

Pembangunan pertanian merupakan satu rangkaian kegiatan yang saling berinteraksi dalam satu sistem agribisnis, yang perlu ditunjang oleh sektor-sektor lain. Agribisnis diartikan sebagai semua kegiatan di sektor pertanian, mulai dari penyediaan peralatan dan input pertanian, produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran sehingga produk tersebut sampai kepada konsumen. Sedangkan agroindustri adalah satu segmen agribisnis, yaitu kegiatan yang mentransformasikan bahan baku dari sektor pertanian menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Peranan agribisnis yang demikian kompleks dan saling terkait mengisyaratkan kepada kita, bahwa keterpaduan antar aktivitas didalam sistem agribisnis adalah syarat mutlak dalam pembangunan perekonomian yang bertitik tolak dari sektor pertanian seperti di Indonesia. Perkembangan suatu negara pertanian dicirikan oleh sejauh mana keterkaitan antara sektor pertanian dan industri. Keterkaitan tersebut adalah melalui jembatan agroindustri terutama yang berlokasi di daerah pedesaan. Keuntungan ekonomik yang dapat diciptakan dari agroindustri adalah meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan, meningkatkan nilai tambah, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan ekspor dan menghemat devisa, meningkatkan kualitas produk yang dikonsumsi konsumen, dan terciptanya keseimbangan didalam sektor pertanian dan antara sektor



pertanian, perdagangan, dan industri didalam perekonomian nasional.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, kita menggunakan strategi dasar pembangunan pertanian yang dinamakan Tri Matra Pembangunan Pertanian, yaitu wilayah terpadu, komoditi terpadu dan usahatani terpadu, yang dilaksanakan melalui Catur Sarana Pokok, yaitu diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi. Makna keterpaduan adalah adanya saling ketergantungan dinamis antar wilayah, antar komoditas dan antar kegiatan dalam usahatani, sehingga tercipta satu kesatuan ekonomi yang didukung oleh berbagai kegiatan yang saling menunjang. Dengan meningkatnya ketergantungan demikian, maka perkembangan satu aktivitas akan memerlukan dukungan aktivitas lain, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan keseluruhan aktivitas ekonomi, ketenagakerjaan dan nilai tambah. Sedangkan catur sarana menunjukkan strategi pelaksanaan pembangunan pertanian yang mengacu pada peningkatan produksi, pemanfaatan seluruh sumberdaya secara optimal, dan penganekaragaman pemanfaatan sumberdaya dalam upaya meningkatkan produksi yang sejalan dengan pelestarian sumberdaya.

Diversifikasi mempunyai pengertian yang luas mencakup keseluruhan aktivitas agribisnis. Diversifikasi pertanian dapat dilihat pada berbagai tingkat. Pada tingkat nasional diversifikasi berarti perluasan dan pendalaman basis dan spektrum pembangunan pertanian serta perluasan pasar di dalam dan di luar



negeri. Pada tingkat sentra produksi komoditas, diversifikasi pertanian berarti pengembangan agro industri dan agribisnis dengan serangkaian produk beserta produk sampingan dari satu sistem komoditas. Upaya demikian akan meningkatkan ketergantungan antara kegiatan pertanian sebagai sektor hulu yang menyediakan bahan baku dengan sektor industri sebagai sektor hilir. Sedangkan pada tingkat usahatani dan petani, diversifikasi pertanian berarti optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pertanian termasuk lembaga, energi serta paket teknologi, pola usahatani. Dengan pengertian ini ketiga tingkat diversifikasi pertanian konsisten dengan Trimatra Pembangunan Pertanian seperti disebutkan di atas. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat kembali apa yang telah kita capai dalam pembangunan pertanian sampai saat ini pada aktivitas penunjang, aktivitas produksi, penanganan pasca panen termasuk agroindustri.

Dalam penyediaan sarana pembangunan pertanian, pemerintah telah mengerahkan dana yang besar, terutama sejak akhir tahun 60-an, sejak dimulainya program Bimas untuk tanaman padi. Keberhasilan kita dalam penyediaan pangan utama tidak terlepas dari keberhasilan dalam penyediaan sarana penunjang. Sarana penunjang pembangunan pertanian yang diperlukan tidak hanya sarana fisik seperti bangunan irigasi, transportasi, paket teknologi dan lain-lain, tetapi juga berfungsinya dengan baik berbagai kegiatan



agribisnis seperti penyediaan peralatan pertanian, penangkaran benih, distribusi dan penyaluran sarana produksi, kredit pertanian dan lain-lain. Tidak tersedianya aktivitas ekonomi yang efisien pada bidang tersebut akan menghambat adopsi teknologi dan perkembangan pertanian secara keseluruhan.

Pada dua dekade yang lalu, kegiatan tersebut dilaksanakan terutama oleh pemerintah dengan tingkat subsidi yang besar. Pembangunan irigasi, jalan, rehabilitasi saluran irigasi dan pencetakan sawah baru dilaksanakan oleh pemerintah dengan menggunakan dana pembangunan. Akan tetapi peranan pemerintah dalam penyaluran sarana produksi dan penyediaan benih secara bertahap telah diambil alih oleh swasta, antara lain oleh Koperasi Unit Desa (KUD) yang merupakan koperasi milik petani. Penangkaran benih tidak lagi dilakukan oleh lembaga pemerintah, tetapi oleh Perusahaan Umum Sanghyang Sri. Peranan swasta dalam kegiatan penunjang pembangunan pertanian terus meningkat dan upaya untuk meningkatkan peranan swasta tersebut akan terus dilanjutkan, serta kemandirian petani akan ditingkatkan sejalan dengan upaya untuk mengubah pola usahatani tradisional menjadi usahatani yang berorientasi pasar yang tanggap terhadap perubahan harga, dan mampu melihat peluang dan mengantisipasi pasar. Peranan Koperasi Unit Desa semakin besar, tidak hanya dalam penyediaan sarana produksi tetapi juga dalam memasarkan hasilnya. Pembenahan dalam manajemen dan permodalan masih terus dilakukan.



Secara umum kegiatan agribisnis penunjang kegiatan produksi pertanian khususnya padi dapat dikatakan sudah memadai baik dalam kuantitas maupun dalam sistem pendistribusiannya. Distribusi sarana produksi tidak mengalami hambatan, dan sudah mampu mencapai semua lokasi daerah produksi di seluruh Indonesia. Penyaluran pupuk dan benih melalui KUD dan agen-agennya telah mengakibatkan petani akses terhadap sarana produksi yang diperlukan.

Pada kegiatan produksi, kita sudah merasa bangga akan keberhasilan kita dalam meningkatkan produksi beras sehingga mampu berswasembada mulai tahun 1984. Keberhasilan ini penting artinya tidak hanya dari segi penyediaan pangan, tetapi kebanggaan kita sebagai bangsa bahwa kita telah mampu untuk mengatasi masalah pangan di dalam negeri. Tekad kita untuk melestarikan swasembada memerlukan kerja keras dan program yang terencana dengan baik dalam hal investasi, alokasi sumberdaya lain, dan skala prioritas. Keberhasilan ini diikuti oleh peningkatan produksi tanaman bahan makanan lain. Pada periode Pelita I dan Pelita IV produksi jagung meningkat dari 2,3 menjadi 5,2 juta ton; produksi ubikayu meningkat dari 10,9 menjadi 14,4 juta ton; kedelai dari 0,38 menjadi 1,16 juta ton.

Selain komoditas pangan tradisional, perkembangan produksi ternak dan hasil perikanan juga meningkat dengan cepat. Pada tahun 1971 produksi daging 332.000 ton naik menjadi 1.09 juta ton tahun 1990, produksi telur tahun 1971 sebesar 68.400 ton naik



menjadi 486.000 ton tahun 1990, dan produksi susu 36 juta liter tahun 1971 naik menjadi 355 juta liter tahun 1990. Demikian juga produksi ikan meningkat dengan cepat, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,8 persen selama Pelita IV, dengan pertumbuhan produksi ikan laut sebesar 5,7 persen dan ikan darat 6,8 persen. Hasil tanaman perkebunan meningkat terutama pada tanaman yang mempunyai nilai strategik dalam perdagangan. Selama Pelita IV produksi karet meningkat sebesar 4,1 persen, minyak sawit 11,1 persen, inti sawit 10,5 persen, kelapa/kopra 5,9 persen, kopi 7,1 persen, teh 4,5 persen, lada 5,5 persen, tembakau 10,0 persen, dan gula 2,5 persen.

Pertumbuhan produksi yang mengesankan tersebut masih belum cukup diimbangi oleh pertumbuhan kegiatan agroindustri yang memadai. Pangsa komoditas yang diolah terhadap total produksi masih rendah, dan komoditas ekspor kita masih didominasi oleh komoditas pertanian yang belum diolah. Sementara itu peluang pasar makin terbuka, dan kita mempunyai keuntungan komparatif dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia, akan tetapi beberapa kendala masih membatasi kita untuk mengembangkan dengan cepat aktivitas pasca panen dan agroindustri. Apabila ditelaah, maka ada beberapa masalah yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Agribisnis melibatkan beberapa instansi terkait, sehingga Perlu adanya sinkronisasi dan keserasian program antar instansi/ departemen. Misalnya pengumpulan data dan aktivitas monitoring



biasanya melalui jalur birokrasi/departemen, sedangkan arus informasi biasanya melalui arus produk dan isyarat pasar (market signal). Untuk dapat menyusun perencanaan perkembangan agroindustri dan agribisnis di Indonesia atau di masing-masing wilayah, harus dilakukan berdasarkan data di beberapa instansi terkait, misalnya Departemen Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, dan Perhubungan.

- b. Pada saat ini perkembangan agroindustri beberapa komoditas penting sangat bervariasi dalam hal tingkat teknologi, produktivitas, pengolahan, bentuk akhir produk, kualitas dan sebagainya. Pada umumnya kegiatan agroindustri masih pada tingkat yang rendah dibandingkan dengan kebanyakan negara dikawasan ASEAN.
- c. Ketidacukupan fasilitas pasca panen dan ketidak memadainya metoda pemanenan telah mengakibatkan kehilangan yang cukup besar, dengan kisaran antara 20-50 persen tergantung jenis komoditas dan daerah.
- d. Berdasarkan tingkat kehilangan pada periode pasca panen dan besarnya produksi, dan dibandingkan dengan keadaan kapasitas pengolahan sekarang, agroindustri di Indonesia masih sangat potensial untuk dikembangkan, terutama di pedesaan, dimana bahan baku tersedia untuk macam-macam kegiatan yang menghasilkan nilai tambah melalui grading, sorting dan processing.



Kegiatan agribisnis kita masih terfokus pada aktivitas produksi. Kegiatan pasca panen dan agroindustri, walaupun masih ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara tetangga, tetapi sangat potensial dan mempunyai prospek yang baik. Indonesia mempunyai keuntungan komparatif karena bahan baku yang diolah dihasilkan di dalam negeri, sehingga pengembangan agroindustri tidak hanya akan menghasilkan harga di pasar internasional yang bersaing, tetapi juga menunjang sektor hulu, yaitu sektor pertanian.

Saudara-saudara yang terhormat,

Setelah saya mengulas keragaan agribisnis saat ini, saya akan mencoba melihat peluang-peluang yang tersedia di masa yang akan datang.

Kita menyadari bahwa pada kurun waktu jauh kedepan, situasi permasalahan dalam proses pembangunan yang akan terjadi sangat berbeda dengan gambaran 10-20 tahun yang lalu. Pergeseran-pergeseran yang perlu diperhitungkan meliputi (a) interaksi yang makin kompleks dalam kebijaksanaan lintas sektoral dan yang menyangkut ekonomi dunia, (b) pengembangan program petanian akan lebih banyak melibatkan dan inisiatif swasta dimana pemerintah lebih banyak berperan dalam unsur pelayanan, (c) kebijaksanaan deregulasi mempunyai arti akan makin berperannya mekanisme pasar dalam pengalokasian sumberdaya.



Sumbangan sektor pertanian akan tetap penting terhadap perekonomian nasional dalam hal peningkatan pendapatan dan penanggulangan masalah kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan baku industri dan pengembangan wilayah. Dengan gambaran peran sektor pertanian yang diharapkan dimasa datang, realisasinya akan memerlukan kebijaksanaan jangka panjang terutama yang mencakup (a) pengembangan sumberdaya alam, (b) pengembangan sumberdaya insani dan kelembagaan, (c) lingkungan hidup, (d) pengembangan teknologi, (e) struktur ekonomi, dan (f) perluasan basis sumberdaya pembangunan.

Interaksi yang makin kompleks dan ketergantungan yang makin tinggi antar sektor mengakibatkan sektor pertanian sebagai industri hulu berkembang mengikuti permintaan pasar akibat turunan permintaan sektor industri maupun perubahan permintaan akibat meningkatnya permintaan masyarakat. Sementara itu pada saat yang sama masalah pengelolaan sumberdaya alam, kualitas lingkungan untuk berproduksi perlu mendapat perhatian agar kelestariannya tetap terjaga. Dalam memenuhi permintaan tersebut usahatani harus diarahkan pada bentuk usahatani yang respon terhadap permintaan pasar, atau dengan kata lain harus berupa usahatani komersial, yang tanggap terhadap teknologi baru, berorientasi pada keuntungan dan selalu memanfaatkan peluang pasar.

Pada umumnya perkembangan perekonomian dunia diperkirakan akan semakin membuka kesempatan bagi kita untuk lebih berperan di



pasar internasional dan lebih mengembangkan agribisnis kita. Penataan perdagangan internasional antara lain melalui kerjasama multilateral yang dikembangkan dalam GATT (General Agreement on Tariff and Trade), akan mendorong terjadinya perdagangan bebas yang mengakibatkan naiknya harga komoditi di pasar internasional. Implikasi dari keadaan ini terhadap Indonesia adalah terbukanya peluang untuk meningkatkan ekspor komoditi-komoditi pertanian. Selain itu pada dekade ini sudah terlihat gejala pergeseran struktur perekonomian negara-negara tetangga dan negara sesama produsen komoditi pertanian, yang bergerak kearah teknologi yang lebih maju yang lebih mengandalkan produk-produk sekunder dan meninggalkan produk primer. Keadaan ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mengisi supply komoditas tersebut. Selain kedua hal diatas, ada keterbatasan sumberdaya yang melanda beberapa negara maju saat ini, misalnya Belanda. Keadaan tersebut memaksa mereka untuk menitikberatkan kebijaksanaannya pada komoditas yang mempunyai nilai marginal yang lebih tinggi. Sebagai akibatnya, komoditas yang nilai marginalnya lebih rendah dialihkan investasinya ke negara lain.

Di fihak lain, apabila dilihat permintaan pasar dan tingkat kemampuan penyediaan produk agroindustri, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dalam beberapa jenis komoditas, kemampuan produksi dalam negeri telah dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, misalnya beras,



dan andalan ekspor misalnya karet, tembakau, kopi, CPO, ikan tuna, udang dan lain-lain

- b. Beberapa jenis komoditas hasil pertanian masih harus diimpor, baik untuk konsumsi langsung maupun untuk bahan baku industri, misalnya kapas, kedelai, gandum, dan gula.
- c. Beberapa jenis komoditas sangat potensial untuk dikembangkan dan permintaannya di dalam maupun di luar negeri cukup tinggi, tetapi pemanfaatannya belum optimal, misalnya sagu, sayur-sayuran, buah-buahan, ternak unggas, dan hasil peternakan lainnya.
- d. Adanya potensi permintaan pasar yang sangat potensial terhadap beberapa produk tertentu, tetapi komoditas tersebut belum dikembangkan secara baik di Indonesia, misalnya asparagus, rebung, jamur dan cassiavera.
- e. Permintaan pasar yang khusus ekspor hasil-hasil pertanian dalam keadaan segar, misalnya buah-buahan, sayuran dan bunga.

Dari uraian di atas terlihat bahwa peluang yang tersedia untuk ekspor dan pengembangan agribisnis, terutama untuk komoditas potensial, adalah pada komoditas yang memerlukan proses produksi selanjutnya. Permintaan akan buah, sayuran dan bunga dalam keadaan segar memerlukan metoda pemasaran yang cepat, kemasan yang memadai dan alat angkutan yang relatif mahal per satuan berat.



Demikian juga proses memproduksi asparagus, rebung, jamur perlu penanganan yang intensif dan keahlian yang khusus. Oleh sebab itu investasi menjadi sangat penting dalam upaya pengembangan agribisnis dan agroindustri komoditas tersebut. Dalam kaitannya dengan investasi, beberapa kendala yang penting untuk diungkapkan di sini adalah:

- a. Masalah prioritas pengembangan. Selama ini pengembangan agroindustri masih bias ke arah tanaman pangan terutama beras, dan produksi pada tingkat usahatani. Upaya kearah pengembangan agroindustri dan agribisnis akan mulai mengarah pada komoditas lain dan pada aktivitas pasca produksi, seperti pengolahan, grading, sortasi dan pemasaran.
- b. Iklim usaha di sektor agribisnis di pedesaan yang belum memberikan insentif kepada entrepreneur akibat (i) kurangnya infrastruktur, (ii) fasilitas kredit, (iii) tenaga terlatih di bidang penanganan pasca panen, (iv) bahan yang kurang memenuhi syarat dalam hal kuantitas, kualitas, dan kontinuitas, dan (v) masalah administrasi dan birokrasi dan kendala lain yang menghalangi entrepreneur untuk memulai usaha agribisnis.
- c. Resiko pada kegiatan agribisnis yang pada umumnya tinggi akibat ketergantungan pada musim, alam, pengaruh hama dan penyakit, dan fluktuasi harga yang besar.



Untuk memberikan dukungan guna pengembangan agribisnis dan agroindustri, maka kendala-kendala pada sektor pertanian maupun pada agroindustri harus segera dapat diatasi. Pendekatan yang dilakukan secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam (a) pembangunan wilayah melalui pengembangan agribisnis di pedesaan, (b) memformulasikan strategi pengembangan agribisnis, (c) penyusunan suatu sistem prioritas komoditas dan wilayah, dan (d) pendekatan kelembagaan.

Pengembangan agribisnis di pedesaan menjadi satu strategi yang penting karena berbagai alasan, antara lain (1) untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja baru yang jumlahnya antara 1,5-1,7 juta orang, yang hanya sekitar 25 persen yang dapat dtampung di sektor pertanian; (2) menciptakan nilai tambah dan pangsa penerimaan bagi petani yang selama ini sangat rendah akibat inefisiensi dalam tahap pengolahan dan pemasaran; (3) untuk memenuhi permintaan konsumen akan kualitas dan produk olahan; (4) untuk memperluas pengembangan dan pertumbuhan di luar Jawa dan Bali, dan untuk lebih pemeratakan pembangunan; (5) untuk meningkatkan diversifikasi ekonomi pedesaan; dan (6) meningkatkan perolehan devisa.

Strategi untuk pengembangan agribisnis harus merupakan basis bagi formulasi perencanaan, program dan proyek, dan memungkinkan kebijaksanaan bagi pengembangan agroindustri pedesaan dan sistem



agribisnis terpadu pengembangan komoditas prioritas. Strategi pembangunan mencakup tiga elemen sebagai berikut:

1. Kebijakan yang mendorong entrepreneurship sektor swasta di pedesaan. Lingkungan yang pada level nasional maupun regional mendorong perkembangan agribisnis. Kebijakan ini memberikan keringanan, penyederhanaan aturan dan peningkatan pelayanan pemerintah. Dalam hal ini deregulasi dalam hal perbankan, investasi, dan perdagangan yang sedang berlangsung sekarang ini sudah menunjukkan adanya "political will" dalam mendorong perkembangan sektor swasta.
2. Sistem insentif yang memadai untuk entrepreneur swasta dan investor. Peranan sektor swasta dan koperasi semakin besar dalam pembangunan regional dan pedesaan, sehingga perkembangan usaha skala kecil dan menengah perlu ditunjang dengan berbagai kebijakan yang efektif dan sederhana sehingga mudah diterjemahkan oleh pengusaha. Insentif yang diberikan kepada entrepreneur termasuk antara lain kelonggaran pajak untuk barang modal, peralatan yang diimpor, maupun yang dibeli di dalam negeri, proteksi dan hak paten, bantuan dalam pemasaran, subsidi bunga pinjaman dan sebagainya.
3. Sistem prioritas komoditas dan wilayah pengembangan, yang didasarkan atas kebutuhan di pedesaan, besarnya komoditas yang dapat diolah, besarnya kehilangan pada pasca panen, tingkat



konsumsi dan kebutuhan gizi masyarakat, tingkat ketergantungan masyarakat pedesaan akan komoditas dan tingkat perkembangan suatu daerah. Pengembangan agroindustri perlu didasarkan atas prinsip keunggulan komparatif, tingkat keterampilan masyarakat setempat dalam memantapkan jenis industri pengolahan yang telah dikenal lingkungan, ketersediaan bahan baku yang berkesinambungan dan fasilitas kredit dengan bunga rendah.

Rekayasa kelembagaan mencakup berbagai upaya yang dilakukan untuk terlaksananya pengembangan agribisnis dan agroindustri dalam alih teknologi, bantuan kapital dan pemasaran. Dalam penerapannya di lapangan, Departemen Pertanian telah merumuskan pendekatan melalui tiga jalur pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Pola PIR (Perusahaan Inti Rakyat). Pola ini telah berhasil dikembangkan oleh Departemen Pertanian dan secara relatif merupakan pola yang baik untuk mengembangkan agroindustri. Skala usaha dan hubungan antara petani dengan perusahaan inti telah diatur secara jelas dalam pengembangan komoditas terpilih. Langkah yang masih diperlukan adalah memperluas cakupan agroindustri dengan integrasi vertikal yang mencakup industri hilir. Kegiatan ini diharapkan dapat memanfaatkan semua peluang yang ada pada usaha industri yang bersangkutan dan dapat mengembangkan industri sampingan, termasuk dari bahan limbahnya. Rangsangan untuk berinvestasi baik oleh perusahaan inti yang sudah ada, maupun oleh perusahaan



baru, perlu terus digalakkan. Sangat diharapkan peran perkoperasian yang terus meningkat dalam mengantarkan petani peserta menjadi pemegang saham/pemilik perusahaan inti.

b. Pendekatan bapak angkat. Pola yang relatif paling siap untuk dikembangkan ini dirintis oleh Departemen Perindustrian. Pola ini akan segera diperluas melalui pengikutsertaan Badan Usaha Milik Negara dibawah pembinaan Departemen Pertanian dengan menyusun program terpadu mencakup wilayah serta komoditi terpilih. Beberapa hal yang masih akan dikaji lebih lanjut dalam mengoperasionalkan pendekatan ini adalah (i) ketentuan mengenai tatacara penggunaan dana BUMN yang disediakan untuk program ini, (ii) rincian peran perusahaan Bapak Angkat baik terhadap perusahaan Anak Angkat, Koperasi maupun perusahaan swasta, (iii) tolok ukur memilih anak angkat, dan (iv) tolok ukur untuk menilai keberhasilan program.

c. Pendekatan Kelembagaan Pedesaan. Pola ini termasuk yang paling kompleks karena mencakup seluruh pergeseran tata nilai masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, tetapi oleh karenanya, juga merupakan pola yang mempunyai dampak paling nyata terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan kita. Pendekatan ini memerlukan langkah pemantapan lebih lanjut dengan melakukan antara lain (i) kajian mendalam mengenai pedesaan khususnya yang menyangkut kendala yang membatasi perkembangan industri pedesaan di



berbagai agro-ekosistem, (ii) rekayasa pertanian baik mengenai kelembagaan tani maupun pola pertanaman dan pola pertanian yang menunjang timbulnya industri pengolahan, (iii) penyediaan teknologi tepat guna untuk tahap produksi, (iv) kehadiran lembaga keuangan yang mampu memobilisasi modal pedesaan dan melengkapinya dengan modal dari luar, (v) kehadiran lembaga koperasi maupun swasta yang mau serta mampu bertindak sebagai perusahaan pembina.

Saudara-saudara peserta seminar yang saya hormati,

Upaya untuk mengembangkan agribisnis dan agroindustri tersebut memerlukan dukungan semua pihak dan instansi terkait, seperti perdagangan, perhubungan, perbankan, keuangan dan lain-lain. Oleh karena itu tersedianya program yang terpadu, harmonis dan saling menunjang pada masing-masing instansi adalah sangat penting.

Dengan pengembangan agribisnis dan agroindustri, akan tercipta mata rantai yang memberikan dampak positif, antara lain seperti:

1. Percepatan pembangunan pedesaan
2. Penopangan tata nilai masyarakat pedesaan menuju masyarakat industri dalam arti luas



3. Terhimpunnya kemampuan agroindustri dalam negeri yang makin tangguh, sehingga dapat mengaktualkan potensi pasar baik domestik maupun ekspor
4. Terciptanya momentum dan kemampuan nasional untuk lebih mempercepat proses industrialisasi sebagai akibat semakin meluasnya kesempatan kerja dan daya beli masyarakat pedesaan
5. Meningkatkan ketahanan masyarakat pedesaan secara luas.

Pengembangan agro industri harus pula mampu menumbuhkan industri untuk pertumbuhan ekonomi pedesaan yang berimbang, meningkatkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja, serta pilihan lokasi industri yang efisien dan sesuai dengan tipe dan ukurannya industri yang dimaksud. Dengan demikian diharapkan muncul suatu pola dan struktur produksi pertanian yang berdiversifikasi. Sumbangan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja agroindustri tersebut diharapkan dapat langsung dinikmati oleh masyarakat pedesaan. Selain itu, sifat industri demikian pada dasarnya mempunyai efek ganda (multiplier effect) yang besar, yang akan dinikmati oleh masyarakat atau wilayah yang bersangkutan.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Saya akan mengakhiri penjelasan singkat tentang perkembangan agribisnis di negara kita, dengan mengingatkan saudara-saudara, bahwa apa yang saya uraikan adalah bagian dari upaya meningkatkan kehidupan bangsa untuk menciptakan tujuan luhur bangsa kita



mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan mulai bergesernya fungsi pemerintah dari pelaku utama pembangunan menjadi perakit iklim yang menggairahkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, maka sudah sewajarnya apabila kita berupaya keras untuk membangkitkan kreativitas dan kewiraswastaan masyarakat pedesaan. Oleh sebab itu saya berharap agar Wisudawan dan Wisudawati bersedia untuk berpartisipasi dalam usaha mengembangkan agribisnis ini. Kepada IEU Institute of Management saya berharap agar dapat terus menghasilkan tenaga terdidik di bidang agribisnis yang sangat kita perlukan dalam mensuksaskan pembangunan.

Saya akhiri penjelasan saya, dengan ucapan Wassalamu'alaikum Warrakhmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pertanian

Ir. Wardoyo



35





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

**PENGARAHAN MENTERI PERTANIAN
DALAM
RAPAT KERJA NASIONAL DEPARTEMEN PERTANIAN
Jakarta, 25 Pebruari - 1 Maret 1991**

**Saudara Menteri Muda Pertanian yang saya hormati;
Saudara-saudara peserta Rapat Kerja Nasional yang saya hormati.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita dalam perjalanan pembangunan bangsa sampai pada akhir tahun kedua Pelita V saat ini. Kita patut pula mengucapkan syukur atas kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga memungkinkan terselenggaranya rapat kerja hari ini.

Satu hal lagi yang menambah kegembiraan kita adalah bahwa pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan rapat kerja lengkap di mana rekan-rekan kita dari daerah ikut berpartisipasi. Hal ini menjadi sangat penting karena sesuai dengan upaya pemerintah dalam melibatkan daerah lebih banyak lagi sehingga tercipta suatu proses perencanaan dan pelaksanaan yang tidak hanya satu arah (**top-down**) tapi juga turut memperhatikan aspirasi dari daerah (**bottom-up**).

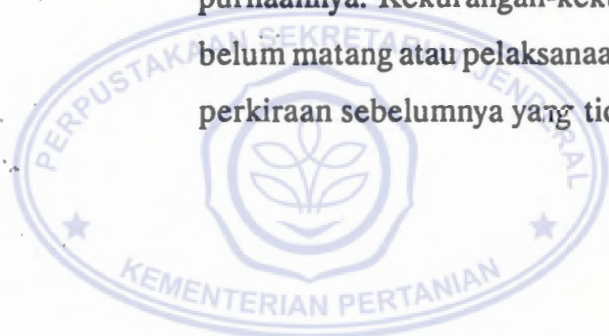


Pada kesempatan rapat kerja kali ini, kita akan mengadakan evaluasi atas hasil pelaksanaan dua tahun pertama pembangunan pertanian Pelita V serta mencoba melihat berbagai issue dan kendala yang ditimbulkannya dalam rangka menetapkan langkah yang perlu diambil pada tiga tahun terakhir sisa Pelita V. Di samping itu akan dibahas pula langkah-langkah persiapan untuk memasuki Repelita VI dan Pembangunan Jangka Panjang tahap II nanti.

Tidak dapat disangkal bahwa memasuki tahun ketiga Repelita V ini, telah banyak yang kita capai yang sekaligus merupakan landasan kokoh sebagai modal dasar dalam melanjutkan pelaksanaan pembangunan pertanian berikutnya sebagai suatu proses yang berkesinambungan Pelita demi Pelita. Kita telah menciptakan dan memiliki sistem produksi yang semakin mantap, yang didukung oleh aparat penyuluhan dan kelompok tani yang dapat diandalkan. Keberhasilan kita mencapai serta memelihara swasembada beras merupakan pencapaian yang patut dibanggakan. Kita telah pula melihat makin maju dan berkembangnya penelitian dan pengembangan pertanian sebagai salah satu sarana yang mutlak diperlukan dalam pembangunan pertanian.

Belum lama ini kita telah mengadakan suatu reorganisasi di departemen dalam upaya meningkatkan efisiensi aparat, administrasi serta manajemen pelaksanaan pembangunan. Sudah barang tentu administrasi serta pengelolaan pembangunan yang lebih professional dan efisien merupakan salah satu prasyarat penting yang tetap harus diupayakan penyempurnaannya. Tenaga-tenaga perencana, pemikir, serta pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, baik ditingkat pusat maupun daerah, tetap dan akan terus ditingkatkan dan dimantapkan.

Namun demikian, kita harus dengan jujur serta berjiwa besar mengakui bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian khususnya dua tahun pertama Pelita V yang perlu mendapat perhatian serta penyempurnaannya. Kekurangan-kekurangan ini bisa saja disebabkan oleh perencanaan yang belum matang atau pelaksanaan yang kurang mengena di samping faktor-faktor diluar perkiraan sebelumnya yang tidak diharapkan. Oleh karena itulah pada kesempatan



rapat kerja seperti ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk duduk sejenak, melihat kembali kebelakang, mengevaluasi pelaksanaan serta merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menyelesaikan sisa Repelita V untuk kemudian menyiapkan diri masuk kepada Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua nanti.

Apabila kita lihat kembali kebelakang pada awal Pelita IV, meskipun selama Pelita III sudah banyak sasaran-sasaran dari pembangunan pertanian yang telah dicapai, namun masih banyak masalah-masalah yang dalam Pelita III belum sepenuhnya dipecahkan. Diantaranya adalah usaha untuk mempertahankan peningkatan produksi beras dan peningkatan produksi pangan lainnya. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana mempertahankan hasil-hasil yang telah dicapai serta meningkatkan produksi tanaman pangan non padi sebagai sumber bahan makanan dan sebagai sumber pendapatan petani, terutama petani-petani di lahan kering dan wilayah yang tidak terkena jangkauan irigasi. Usaha peningkatan produksi palawija dalam menantapkan swasembada pangan menghadapi masalah efisiensi produksi, masalah keberhasilan paket teknologi, masalah teknis agronomis, distribusi serta pemasaran. Dalam hal ini pengembangan dan penerapan paket teknologi maju, pelayanan angkutan dan sistem tataniaga sangat diperlukan guna merangsang petani dalam usaha meningkatkan produksinya.

Sudah barang tentu masih banyak masalah-masalah lain yang dihadapi pada waktu itu, diantaranya masalah-masalah di sub-sub sektor pertanian, masalah-masalah penanganan pasca panen serta penyaluran dan penyediaan prasarana input di samping masalah harga yang selalu berfluktuasi. Akan tetapi, dengan penuh tekad dan kemauan keras, pada waktu itu kita memasuki Pelita IV dengan mencoba melengkapai kekurangan-kekurangan pada Pelita III serta pada waktu yang sama melihat kedepan dengan penuh harapan.



Hadirin yang saya hormati,

Pada akhir Pelita IV, kita semua menjadi saksi hidup akan berbagai kemajuan-kemajuan yang telah dicapai. Tercatat misalnya sumbangan terbesar sektor pertanian dan pengairan selama Pelita IV adalah tercapainya swasembada beras, di samping sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi, penerimaan ekspor, dan peningkatan kesempatan kerja. Kemampuan mencapai dan mempertahankan swasembada beras tersebut merupakan hasil dari usaha-usaha pembangunan di sektor pertanian dan pengairan yang ditunjang oleh perhubungan, perindustrian, koperasi, serta lembaga dan sarana penunjang lainnya, di samping berbagai upaya kebijaksanaan yang ditempuh dalam bidang harga, perkreditan dan lain-lain.

Selama periode Pelita IV, sektor pertanian tumbuh dengan rata-rata 3,4 persen per tahun. Jumlah tenaga kerja yang diserap sektor ini rata-rata meningkat sebesar 1,9 persen per tahun. Sedangkan pada akhir Pelita IV sumbangan pertanian dalam produk domestik bruto nasional mencapai sebesar 24,0 persen dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 57,0 persen.

Pada kurun waktu yang sama, kita saksikan pula berbagai kemajuan di sub-sektor lainnya. Seperti sub-sektor perikanan misalnya, selama Pelita IV menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi dengan kenaikan rata-rata sekitar 4,8 persen. Sub-sektor peternakan menunjukkan hasil yang menggembirakan di mana produksi daging, telur dan susu mengalami kenaikan masing-masing sebesar 7,0, 9,3, dan 7,7 persen. Demikian pula dengan sub-sektor perkebunan sebagai pemasok utama devisa sektor pertanian, menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Produksi karet misalnya mengalami kenaikan sebesar 3,0 persen, minyak sawit 11,3 persen, inti sawit 19,0 persen, kelapa/kopra 6,9 persen, kopi 6,2 persen, tembakau 7,6 persen, serta gula tebu sebesar 6,6 persen. Yang cukup tinggi adalah kenaikan produksi kakao sebesar 27,0 persen, dan serat karung sebesar 19,9 persen.



Berbagai keberhasilan tersebut adalah sebagai akibat upaya kita bersama yang merupakan keinginan luhur untuk membangun sektor pertanian melalui beragam kegiatan mulai dari perluasan areal, rehabilitasi, peremajaan tanaman serta peningkatan produktivitas sebagai hasil penerapan teknologi baru. Yang tidak kalah pentingnya adalah kerja keras dari aparat mulai dari tingkat daerah sampai tingkat pusat, para penyuluh serta para peneliti yang tidak henti-hentinya menumpahkan perhatian demi tercapainya tujuan pembangunan pertanian.

Saudara-saudara para peserta rapat kerja yang saya hormati,

Keberhasilan-keberhasilan tersebut bukan tidak dibarengi dengan hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian secara khusus. Sampai dengan akhir Pelita IV, masih banyak diantara saudara-saudara kita yang masih berada dibawah kemiskinan bahkan yang masih belum terjangkau oleh upaya pembangunan tersebut. Tercatat misalnya sekitar 30 juta penduduk kita masih berada dibawah garis kemiskinan yang diperkirakan sekitar 75 % dari mereka secara langsung walaupun tak langsung memperoleh pendapatan dari sektor pertanian dan yang tersebar diseluruh pelosok tanah air kita tercinta. Pada waktu yang sama kita saksikan pula adanya ketimpangan regional di mana sebagian daerah masih relatif jauh tertinggal dari daerah lainnya. Ada kalanya kita harus menerima begitu saja pendapatan yang rendah dari ekspor komoditas primer pertanian kita sebagai akibat fluktuasi harga yang tidak menentu di pasar dunia.

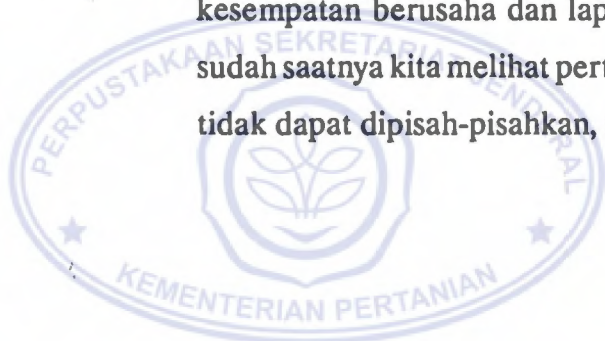
Di samping itu, potensi sumber daya alam kita masih banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal. Tingkat produksi perikanan misalnya, baru merupakan sekitar 30 persen dari potensi lestari lautan yang ada. Khusus untuk wilayah Indonesia Bagian Timur, potensi pertanian tanaman keras, tanaman pangan serta peternakan dan perikanan masih belum dimanfaatkan sepenuhnya. Sudah barang tentu dalam upaya mendayagunakan sumber-sumber seperti ini berbagai sarana dan pra-sarana harus pula tersedia dan kita semua tahu bahwa hal ini masih jauh dari sempurna.



Dalam keadaan seperti inilah, tepatnya dua tahun yang lalu, Pelita V kita mulai. Komitmen kita tetap yaitu bahwa swasembada pangan khususnya swasembada beras harus tetap dipertahankan. Kemudian kita gariskan pula sesuai dengan GBHN bahwa titik berat pembangunan ekonomi pada sektor pertanian dan industri adalah mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang antara sektor pertanian dan industri baik dari segi nilai tambah maupun kesempatan kerja. Secara rinci telah ditetapkan pula bahwa tujuan pembangunan pertanian pada Pelita V adalah untuk meningkatkan produksi dan memperluas penganekaragaman hasil pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan, bahan baku industri, dan meningkatkan penerimaan ekspor; meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, peternak dan nelayan; mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja; serta mendukung kegiatan pembangunan wilayah dan transmigrasi.

Dalam Repelita V telah digariskan bahwa sasaran pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah rata-rata sebesar 5 persen per tahun. Diharapkan sektor pertanian dapat tumbuh dengan laju 3,6 persen per tahun, sedangkan pertumbuhan dari sektor industri dan pengolahan ditargetkan mencapai rata-rata 8,5 persen per tahun. Walaupun sasaran pertumbuhannya hanya 3,6 persen per tahun, sektor pertanian masih tetap sangat strategis, bukan hanya secara langsung menyangkut kesejahteraan 55,3 persen angkatan kerja kita yang bekerja disektor pertanian, tetapi juga karena peranan PDB masih cukup besar (21,6%). Oleh karena itu, kenaikan/pertumbuhan pada sektor pertanian akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data tersebut juga menggambarkan sangat rendahnya produktivitas tenaga kerja yang bekerja disektor pertanian yang sudah sangat mendesak kita perbaiki untuk mencapai tujuan pemerataan.

Pada saat itu kita sadari pula bahwa apabila kita ingin meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, peternak dan nelayan; mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja; serta meningkatkan pendapatan ekspor; sudah saatnya kita melihat pertanian sebagai suatu kesatuan mata rantai agibisnis yang tidak dapat dipisah-pisahkan, mulai dari kegiatan berproduksi ditingkat petani, pen-



golahan, pemasaran, sampai kepada konsumen pada hilir dari mata rantai. Dengan pemikiran seperti ini kita ingin memperkenalkan nilai tambah (**added value**) kepada hasil-hasil pertanian, dan membawa agro-industri kepedesaan sehingga kesempatan kerja dan pendapatan dapat meningkat. Secara khusus Saudara Menteri Muda Pertanian telah banyak menumpahkan perhatian terhadap upaya pengembangan agro-industri ini.

Berbagai usaha pokok pembangunan pertanian Repelita V telah kita jabarkan yang merupakan kelanjutan dari usaha (1) diversifikasi, (2) intensifikasi, (3) ekstensifikasi, dan (4) rehabilitasi. Usaha tersebut dilaksanakan secara terpadu, serasi dan merata disesuaikan dengan keunggulan komparatif wilayah dengan tetap memelihara kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta memperhatikan pola kehidupan masyarakat.

Dibidang pangan, peningkatan produksi bertujuan untuk memantapkan swasembada pangan secara efisien dan memperbaiki mutu gizi masyarakat yang sekaligus juga meningkatkan pendapatan petani. Dibidang perkebunan, peningkatan produksi ditujukan untuk meningkatkan penerimaan devisa non-migas dan memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, dengan perhatian khusus pada usaha pembangunan perkebunan rakyat.

Dibidang perikanan, peningkatan produksi bertujuan untuk meningkatkan nilai gizi masyarakat dan peningkatan ekspor. Perhatian khusus diberikan pada pengembangan perikanan rakyat untuk meningkatkan taraf hidup nelayan serta memajukan desa pantai. Dibidang peternakan, peningkatan produksi terutama untuk kebutuhan pangan dan peningkatan gizi masyarakat. Perhatian khusus juga diberikan pada pengembangan peternakan rakyat dengan meningkatkan produktivitas sumberdaya peternakan dan mengurangi angka kematian ternak.

Untuk mendukung pembangunan maka kualitas sumberdaya manusia pertanian dikembangkan disertai dengan penelitian dan pengembangan serta penerapan paket



teknologi maju secara serasi dan seimbang serta berkelanjutan untuk dapat mempercepat perluasan dan pendalaman spektrum pembangunan pertanian. Dilain pihak, pembangunan kelembagaan pertanian dilaksanakan dengan adanya keserasian dan keseimbangan pembagian resiko dan keuntungan dalam sistem kekeluargaan, di mana petani dengan koperasinya, BUMN dan swasta berkembang saling menunjang dan saling menghidupi. Ketiga lembaga perekonomian tersebut dibina secara serasi dalam sistem kekeluargaan, sehingga yang menjadi pegangan adalah saling ketergantungan bukan berkompetisi. Mekanisme ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara efektif dalam pembangunan berkelanjutan serta kemandirian.

Disadari pula bahwa perlu adanya reorientasi pembangunan pertanian dari strategi yang didasarkan atas komoditas (*commodity base*) ke strategi yang didasarkan atas sumber-sumber yang ada (*resource base*). Kita melihat bahwa dalam struktur produksi pertanian masih terdapat kelemahan, di mana Jawa yang hanya merupakan 7 persen dari luas daratan Indonesia menghasilkan 60 persen lebih komoditas tanaman pangan (beras, gula, jagung, ubikayu dan kedelai) dan pangsa ini relatif konstan selama 20 tahun terakhir. Sedangkan Sumatera masih tetap sebagai sumber devisa pertanian dengan pangsa produksi kopi, kelapa sawit, lada dan karet masing-masing sebesar 62 persen, 89 persen, 82 persen dan 72 persen. Pangsa kedua pulau ini untuk produksi peternakan dan perikanan juga sangat menonjol yaitu di atas 80 persen. Pada waktu yang sama, wilayah Indonesia bagian Timur masih memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan sesuai dengan keadaan sumber daya yang dimiliki.

Oleh karena itu, untuk mempertahankan momentum pertumbuhan perekonomian Indonesia, peningkatan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan petani, upaya diversifikasi pertanian menjadi pilihan strategis. Dalam hal ini diversifikasi pertanian didefinisikan sebagai suatu upaya untuk memeperluas dan memperdalam spektrum pembangunan pertanian.



Di sinilah saya menginginkan peranan daerah, khususnya kanwil dan dinas-dinas untuk mengenali daerahnya masing-masing, mempelajari potensi sumber-sumber yang ada serta mengidentifikasi keunggulan kompetitif daerahnya. Di sini pula saya harapkan peranan Badan Litbang kita sebagai ujung tombak dan "leading agency" untuk membantu daerah dalam mengidentifikasi sumber-sumber tersebut.

Peserta rapat kerja yang saya hormati,

Kini tibalah saatnya bagi saya untuk secara khusus mengajak saudara-saudara mencoba melihat perkembangan masing-masing sub-sektor selama dua tahun pertama Repelita V yang telah berlalu.

Kita semua tahu bahwa mata rantai kegiatan pembangunan pertanian mencakup (1) penelitian dan pengembangan paket teknologi, (2) penyediaan sarana dan prasarana produksi, (3) budidaya pertanian berteknologi maju, (4) pengolahan hasil, dan (5) pemasaran hasil pertanian.

Semua mata rantai tersebut harus dirakit sedemikian rupa sehingga merupakan satu sistem agribisnis yang efisien dan utuh. Keberhasilan kita mencapai dan mempertahankan swasembada beras adalah dengan pengelolaan seutuhnya agribisnis komoditi padi sawah yang didukung oleh pengembangan kelembagaan pedesaan, kebijaksanaan investasi sarana dan prasarana, kebijaksanaan harga dan subsidi serta penyempurnaan perdagangan. Demikian pula pada sistim PIR, sistim agribisnis komoditi ini juga diterapkan seutuhnya guna mempercepat alih teknologi dan kesenangan produktivitas.

Pencapaian tingkat produksi beberapa komoditi pertanian disajikan dalam Tabel 1. Secara umum data ini menggambarkan perkembangan produksi tanaman pangan dalam dua tahun PELITA V belum begitu menggembirakan. Perkembangan produksi peternakan dan perikanan pada umumnya dapat mencapai sasaran,



sedangkan sasaran produksi komoditi utama perkebunan (karet, kelapa, kelapa sawit, kopi dan teh) belum begitu menggembirakan dan sedikit dibawah sasaran.

Dalam Tabel 2 disajikan perkembangan indeks harga yang diterima dan dibayar petani. Sebagai contoh diambil Jawa Timur, karena secara relatif pertanian Jawa Timur lebih berdiversifikasi dari propinsi lainnya. Tampak bahwa ada kecenderungan menurunnya nilai tukar petani dalam tiga tahun terakhir ini. Produktivitas tanaman pangan meningkat sekitar 1,0 % setahun dalam periode tersebut, sedangkan perkebunan rakyat sedikit menurun. Perikanan dan peternakan relatif konstant. Dengan demikian ada kemungkinan pendapatan riil (nyata) petani belum berhasil kita tingkatkan. Keadaan ini dapat diperbaiki melalui peningkatan efisiensi produksi dengan penerapan paket teknologi maju secara lebih cepat lagi serta mempercepat diversifikasi pertanian atau pendalaman dan perluasan spektrum pembangunan pertanian.

Dalam Grafik 1 - 4 disajikan perkembangan produktivitas karet, kelapa, kopi, dan teh perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Dari grafik tersebut terlihat adanya kesenjangan hasil yang cenderung membesar. Kenyataan ini menggambarkan masih lambannya penerapan paket teknologi maju perkebunan rakyat. Peningkatan produksi perkebunan rakyat masih didominasi oleh perluasan areal dengan menggunakan teknologi yang belum memadai. Untuk itu perlu reorientasi dan percepatan rehabilitasi perkebunan rakyat dengan paket teknologi maju sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani pekebun.

Mungkin kita telah berhasil meningkatkan pendapatan petani melalui pola PIR dan UPP. Akan tetapi, jangkauan program ini terhadap pekebun kecil masih sangat terbatas sebagaimana terlihat dari gambaran rata-rata produktivitas komoditi perkebunan rakyat. Kita juga telah berhasil meningkatkan taraf hidup petani dengan pengembangan kakao dan jambu mete di daerah marjinal. Pola dan pendekatan ini perlu kita perluas untuk menjangkau lebih banyak lagi petani pekebun rakyat.



Dualisme yang sama juga terlihat pada pengembangan perikanan dan pertambakan intensif modal oleh pemodal menengah dan besar ataupun oleh peternak intensif modal. Dalam hal inipun kita perlu mempercepat penerapan paket teknologi maju oleh nelayan dan peternak kecil. Berat karkas sapi potong misalnya masih belum berhasil kita tingkatkan dalam hal ini menggambarkan belum berkembangnya produktivitas ternak sapi potong.

Tabel 3 mengungkapkan perkembangan sumbangan devisa sektor pertanian selama tiga tahun terakhir, sedangkan perkembangan ekspor semenjak tahun tujuh puluhan disajikan dalam Tabel 4 dan Tabel 5. Peranan devisa sektor pertanian adalah positif, akan tetapi memperlihatkan kecenderungan menurun. Hal ini disebabkan antara lain oleh penurunan harga beberapa komoditi utama dan belum begitu berhasilnya program import substitusi kita dengan baik terutama kedelai, gula dan susu. Di samping itu laju perkembangan produksi dalam negeri beberapa komoditi masih lambat seperti terlihat pada Tabel 1.

Data pada Tabel 5 juga memperlihatkan telah mulai berdiversifikasinya ekspor hasil pertanian yang terlihat dari meningkatnya peranan komoditi perikanan, dan mulai berkembangnya ekspor kakao, produk peternakan, buah-buahan dan sayuran. Kecenderungan ini perlu kita percepat perkembangannya dimasa depan dengan pengembangan seluruh mata rantai agribisnis sistem komoditi pertanian secara terpadu dengan efisiensi yang tinggi.

Dalam Tabel 6 disajikan perbandingan konsumsi per kapita Indonesia dengan beberapa negara di Asia. Terlihat bahwa secara keseluruhan nilai konsumsi kalori penduduk kita cukup baik dan di atas standar kecukupan kalori. Akan tetapi konsumsi kalori kita belum berimbang karena masih sangat didominasi oleh sumber kalori dari padi-padian, sedangkan pangsa kalori dari sumber protein dan lemak masih sangat rendah. Demikian pula dengan konsumsi protein dari sumber hewani (ternak dan ikan) termasuk golongan terendah di Asia, di mana hanya sedikit lebih baik dari



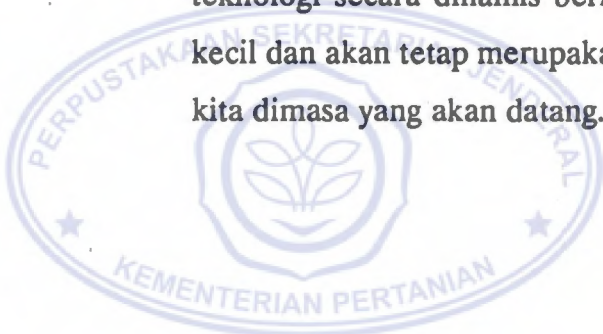
Bangladesh. Dilain pihak kita memiliki sumber daya laut dan perairan umum serta sumber daya peternakan yang cukup besar.

Kenyataan di atas memberikan indikasi belum berhasilnya kita meningkatkan produktivitas dan paket teknologi maju di sub-sektor perikanan dan peternakan, terutama usaha rakyat. Kalau kita lihat perkembangan rasio harga hasil peternakan dan perikanan dengan harga beras akan dapat kita mengerti kenapa konsumsi beras kita per kapita cukup tinggi. Pada tahun 1976 rasio harga daging sapi dengan harga beras per kilo misalnya untuk Jawa Timur adalah 7. Rasio ini meningkat menjadi 9,45 pada tahun 1988. Dalam periode yang sama rasio harga daging ayam ras sedikit menurun dari 6,20 pada tahun 1976 menjadi 5,20 pada tahun 1988. Sedangkan rasio harga ikan tongkol dengan harga beras tetap sekitar 2,6, demikian juga dengan rasio harga telur sekitar 3,6, susu segar sekitar 1,6 selama periode tersebut. Untuk ayam ras memang kita telah berhasil menerapkan paket teknologi maju dan pangsa daging ayam terhadap konsumsi daging memang meningkat.

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa meningkatnya konsumsi beras penduduk antara lain disebabkan oleh menurunnya secara relatif harga beras, yang disebabkan keberhasilan mamacu penggunaan paket teknologinya. Implikasinya adalah bahwa upaya diversifikasi pangan dan gizi serta peningkatan nilai gizi masyarakat akan sangat tergantung pada keberhasilan kita mempercepat laju pengembangan dan penerapan teknologi maju pada sub-sektor perikanan dan peternakan. Hal ini merupakan tantangan yang harus dan segera kita cari pemecahannya. Dalam jangka panjang keberhasilan ini akan berpengaruh pula pada pemantapan upaya swasembada pangan kita.

Hadirin yang saya hormati,

Seperti telah kita saksikan bersama, pengembangan dan penerapan paket teknologi secara dinamis berkelanjutan telah menunjukkan peranan yang tidak kecil dan akan tetap merupakan faktor utama keberhasilan pembangunan pertanian kita dimasa yang akan datang. Dengan jalur utama pembangunan pertanian adalah



diversifikasi pertanian, maka program penelitian dan pengembangan pertanian perlu direorientasikan untuk mendukung percepatan proses diversifikasi.

Demikian pula dengan kegiatan penyuluhan pertanian sebagai sarana utama dalam penyampaian hasil-hasil teknologi yang langsung menjangkau petani telah banyak memberikan sumbangan kepada berbagai keberhasilan yang kita capai dimasa lalu. Namun demikian masih dirasakan kebutuhan akan penyempurnaan dibidang ini. Sebagai tindak lanjut dari penyempurnaan organisasi Departemen pertanian yang telah kita lakukan, saat ini kita sedang menata kembali penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaannya, dengan mengaktifkan kembali berbagai simpul organisasi yang diharapkan dapat memberikan iklim yang dapat mendorong partisipasi petani dalam pembangunan pertanian.

Kita mengetahui bahwa kegiatan penyuluhan pertanian, termasuk sebagian dari urusan Pemerintah Pusat yang telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, oleh karena itu sejalan dengan meningkatnya kemampuan daerah dalam mengelola urusan tersebut, dan sesuai pula dengan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian, maka Departemen Pertanian telah memutuskan untuk memperbantukan penyuluh pertanian non-sarjana dan menyerahkan pengelolaan BPP kepada Pemerintah Daerah.

Dalam rangka penataan kembali penyelenggaraan penyuluhan pertanian, telah diambil langkah-langkah seperti pengalihan pengurusan administrasi tenaga penyuluh dari Badan Pengendali Bimas ke Sekretariat Jenderal, penyempurnaan koordinasi penyuluhan pertanian, penetapan jumlah BPP dan penyuluh pertanian menurut sub-sektor yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, penyempurnaan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian, serta penyempurnaan SK-SK Menteri Pertanian yang menyangkut penyuluhan pertanian.



Untuk ini saya minta agar kita semua dapat mengikuti perubahan penyuluhan pertanian ini dengan kesadaran dan kebijakan yang maksimal.

Secara konsisten APBN Departemen Pertanian selalu meningkat dalam tiga tahun terakhir. APBN murni dalam Satuan 3 Departemen Pertanian untuk tahun pertama Pelita V 1989/1990 sebesar Rp. 86,696,- milyar naik sebesar 61,5 persen terhadap Satuan 3 kita tahun 1988/1989. Tahun kedua Pelita V 1990/1991 APBN Satuan 3 kita mencapai Rp. 250,313,- milyar suatu kenaikan sebesar 188,72 persen terhadap anggaran 1989/1990. Untuk tahun 1989/1990 realisasi anggaran hanya mencapai 85,0 persen, sedangkan untuk tahun yang sedang berjalan ini sampai dengan 31 Desember 1990 realisasi keuangan kita baru mencapai 29,0 persen saja. Terlihat betapa masih sangat rendahnya kemampuan kita untuk dapat memanfaatkan anggaran pembangunan yang sudah dengan susah payah kita perjuangkan. Untuk tahun ketiga Pelita V tahun 1991/1992 dalam Satuan 3 kita memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 383,028,- milyar suatu kenaikan sebesar 53,0 persen terhadap tahun anggaran yang sekarang sedang berjalan. Beberapa kemungkinan penyebab rendahnya kemampuan daya serap anggaran antara lain (1) perencanaan proyek yang kurang matang, (2) tenaga pelaksana yang kurang trampil, (3) administrasi proyek yang masih belum rapih, (4) anggaran yang semakin bertambah, (5) pengawasan yang semakin intensif, (6) adanya temuan-temuan oleh Inspektorat Jenderal, BPKP dan BPK yang semakin banyak, (7) adanya kegiatan tindak lanjut temuan yang harus ditingkatkan. Melalui rapat kerja ini, saya minta agar hal-hal tersebut di atas lebih disempurnakan lagi untuk sisa tiga tahun Pelita V yang akan datang.

Demikianlah secara ringkas telah saya ulas keragaan pelaksanaan pembangunan pertanian sampai dengan tahun kedua Pelita V sebagai bahan acuan bagi saudara-saudara dalam sidang-sidang selajutnya selama rapat kerja ini.



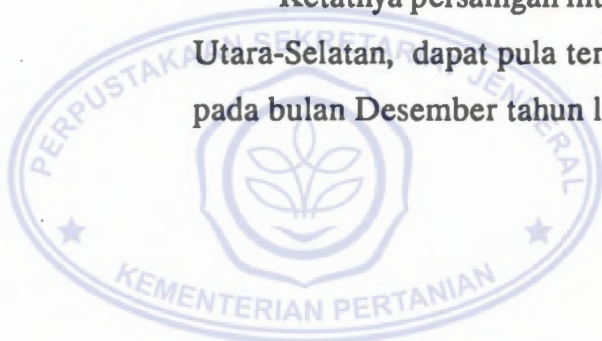
Saudara-saudara para peserta rapat kerja yang saya hormati,

Pembangunan pertanian pada periode Pelita I sampai Repelita V adalah merupakan langkah pembangunan yang dipersiapkan untuk menghadapi era tinggal landas pada periode Repelita VI dan memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengemukakan beberapa perkembangan dunia dan dalam negeri yang berkaitan dengan pertanian yang perlu kita antisipasi bersama yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan sidang-sidang berikutnya.

Dalam dua atau tiga dasawarsa yang akan datang tampak bahwa perekonomian dunia akan semakin kompleks. Globalisasi perekonomian dunia dirasakan bergerak dengan cepat sehingga guncangan atau pertumbuhan ekonomi pada suatu belahan dunia dengan segera memberikan dampak pada belahan lainnya. Kita lihat bersama misalnya, bagaimana krisis Teluk telah dengan cepat mempengaruhi perekonomian dunia yang pada gilirannya mempengaruhi perekonomian kita sendiri. Cepat atau lambat, dampak dari krisis seperti ini akan pula dirasakan disektor pertanian. Jelas bahwa hampir tidak ada lagi yang membatasi globalisasi ekonomi dunia kecuali batas-batas kedaulatan suatu negara.

Perekonomian dunia yang semakin kompleks dan kompetitif menuntut tingkat efisiensi yang tinggi. Yang tidak efisien akan secara alamiah tergeser atau paling tidak akan kalah bersaing secara internasional. Pergerakan kearah tingkat efisiensi menuntut penggunaan teknologi tinggi yang semakin intensif serta kemampuan manajerial dan profesionalisme yang semakin meningkat pula. Dampak lain dari perkembangan seperti ini adalah persaingan ketat dalam hal kualitas produk yang dalam hal ini termasuk produk-produk pertanian.

Ketatnya persaingan internasional, terutama yang berkaitan dengan hubungan Utara-Selatan, dapat pula terlihat dari gagalnya putaran Uruguai-GATT di Brussel pada bulan Desember tahun lalu. Mengendornya perang dingin tidak berarti men-

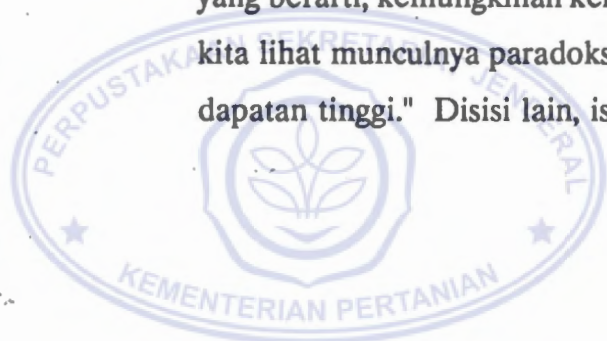


gendornya persaingan ekonomi. Sebaliknya membaiknya hubungan Utara-Utara (Sovyet - Amerika) justru dapat menyebabkan memburuknya hubungan Utara - Selatan.

Disisi lain, kita melihat pula munculnya kawasan Asia-Pasifik sebagai kekuatan ekonomi baru dunia. Bangkitnya kawasan ini sebagai satu kekuatan baru harus dilihat sebagai peluang dan bukan sebagai kendala, di mana ia merupakan potensi pasar bagi hasil-hasil pertanian kita dimasa yang akan datang. Secara geografis, Indonesia berada pada posisi strategis yang menguntungkan dibandingkan dengan negara-negara pemasok lainnya untuk kawasan ini. Agaknya peningkatan kemampuan teknologi dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan berdasarkan sumberdaya domestik yang ada agar dapat meningkatkan daya saing perlu mendapat sorotan kita bersama.

Meskipun selama kurun waktu 1988-1990, pembangunan pertanian secara kontinu telah membawa sektor pertanian ke dalam keadaan yang lebih baik, disadari pula bahwa keberhasilan tersebut juga diikuti oleh semakin luasnya masalah dan tantangan yang dihadapi baik sebagai akibat daripada keberhasilan pembangunan pertanian itu sendiri maupun oleh beberapa masalah yang belum dapat diselesaikan. Kebutuhan akan berbagai produksi pertanian akan semakin meningkat baik ragam, kualitas beserta kuantitasnya, sejalan dengan semakin beragamnya permintaan sebagai dampak dari pertumbuhan jumlah penduduk, naiknya pendapatan, tingginya tingkat pendidikan, semakin lancarnya pengangkutan dan perdagangan serta semakin majunya industri pengolah hasil pertanian di dalam negeri merupakan sebagian dari tantangan yang akan kita hadapi bersama.

Hal ini berkaitan dengan timbulnya "**rising demand**" dan "**rising expectation**" yang akan berakibat bahwa ketidakpuasan tidak semata-mata bisa diukur dengan statistik formal. Meskipun satu kelompok sudah mengalami kenaikan pendapatan yang berarti, kemungkinan kenaikan ini masih jauh dibawah "**rising demand**." Disini kita lihat munculnya paradoks : "manusia merasa semakin miskin pada tingkat pendapatan tinggi." Disisi lain, issue pemerataan akan semakin tajam, sehingga segala



bentuk ketimpangan dan dualisme perekonomian perlu diperkecil serta pengalihan aset produktif dari pengusaha kecil perlu dihindari.

Belum berhasilnya konferensi putaran Uruguay dalam rangka GATT yang bahkan mungkin menghadapi kegagalan menciptakan pasar yang semakin terbuka bagi komoditi pertanian, pecahnya perang di Timur Tengah, serta resesi yang sudah mulai melanda beberapa negara akan mempengaruhi pasaran maupun harga komoditi ekspor pertanian kita. Demikian pula akan dapat meningkatkan harga impor pupuk khususnya pupuk fosfat dan kalium yang berarti memerlukan subsidi yang lebih besar lagi.

Disamping itu, ketidak berhasilan putaran Uruguay dalam rangka perundingan GATT akan menimbulkan pula dampak yang cukup berarti dalam perdagangan internasional komoditi pertanian. Tampaknya masing-masing negara peserta menunjukkan kecenderungan mempertahankan subsidi pertanian masing-masing. Hal ini akan mempersulit lagi upaya kita untuk secara bertahap mengurangi subsidi pupuk yang telah mulai diupayakan.

Perang Teluk secara langsung maupun tak langsung berpengaruh pula pada ekspor komoditi pertanian. Ekspor komoditi pertanian utama ke Timur Tengah adalah, teh, kopi, karet dan bahan dari karet, ikan, daging, buah-buahan serta sayuran sedikit banyak akan mengalami kemacetan. Memang nilai ekspor hasil pertanian Indonesia ke Timur Tengah relatif kecil atau hanya sekitar 3.0 persen dari total nilai ekspor hasil pertanian. Akan tetapi pengaruh tak langsung lainnya seperti meningkatnya biaya pengangkutan dan asuransi pelayaran serta transportasi ke dan dari Eropa yang berpengaruh pada ekspor hasil pertanian kita ke Eropa tidak boleh diabaikan begitu saja. Nilai ekspor pertanian ke Eropa adalah sekitar 15-25 persen dari total ekspor pertanian. Dampak tak langsung untuk jangka panjang adalah kemungkinan terjadinya resesi perekonomian dunia yang akan sangat berpengaruh pada pasar ekspor kita. Oleh karena itu kita perlu paling tidak menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan seperti disebut di atas.



Masalah kelestarian sumber daya alam sangat berpengaruh terhadap usaha-usaha peningkatan produksi pertanian dewasa ini maupun masa mendatang. Menjaga kelestarian sumber daya alam berarti juga menyediakan modal bagi generasi mendatang. Penggunaan sumber daya alam yang melebihi potensi lestari yang ada dengan tidak mengikuti pola tata ruang perlu mendapat perhatian kita secara khusus. Apabila hal ini tidak ditangani secara terpadu antar berbagai instansi terkait tidak mustahil bahwa kemerosotan kualitas sumber daya alam akan menjadi masalah yang lebih rawan di masa mendatang.

Pemantapan swasembada pangan terutama beras untuk tahun 1991/1992 menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan data dari Direktorat Meteorologi dan Geofisika, tahun 1991 ini ada kecenderungan musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering. Dalam ramalan I BPS, musim kemarau yang lebih panjang tersebut tergambar dari menurunnya ramalan I produksi padi tahun 1991 dibandingkan angka sementara produksi padi 1990 sebesar - 1,68 persen. Disamping itu upaya pencetakan sawah baru berjalan sangat lamban, konversi lahan sawah kepenggunaan lainnya masih terus berlanjut, dan laju kenaikan produktivitas padi sudah mulai menurun. Dari segi penggunaan pupuk selama tiga tahun terakhir kelihatan cenderung menurun (Tabel 7). Dibandingkan dengan realisasi penyaluran pupuk tahun 1988, maka realisasi penyaluran pupuk tahun 1989 adalah 97,15 persen untuk pupuk urea, 96,36 persen untuk pupuk TSP dan 95,86 persen untuk pupuk KCL, sedangkan untuk tahun 1990 realisasi penyalurannya adalah 99,04 persen, 94,82 persen dan 107,19 persen masing-masing untuk pupuk urea, TSP dan KCL. Menurunnya penggunaan pupuk perlu dikaji lebih cermat, apakah karena adanya upaya efisiensi atau sebab lainnya. Luas areal panen padi tahun 1989 adalah naik 3,88 persen terhadap luas panen 1988, sedangkan luas areal panen 1990 (angka sementara) adalah turun 0,50 persen terhadap tahun 1989. Sedangkan ramalan I luas panen tahun 1991 turun 2,89 persen dibandingkan angka sementara tahun 1990.



Saudara peserta raker yang saya hormati,

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan berbagai peluang yang kita hadapi sekarang dan dimasa yang akan datang yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Dengan semakin mantapnya pelaksanaan demokrasi ekonomi saat ini, diharapkan akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan pertanian akan semakin meningkat dan mandiri. Demikian pula dengan pemerataan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, hubungan saling ketergantungan dan saling menghidupi antar lembaga ekonomi serta berfungsinya pengawasan secara baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif yang harus kita lihat sebagai peluang.

Saya kira kita semua sependapat bahwa masih terdapat peluang perluasan areal pertanian di luar Jawa di lahan kering, rawa dan pasang surut, sekalipun barangkali memerlukan paket teknologi maju yang sesuai. Pengembangan kompleks industri hilir di sentra produksi pertanian merupakan suatu peluang untuk meningkatkan efisiensi sistim komoditi dalam kaitannya dengan globalisasi seperti yang telah saya kemukakan terdahulu.

Kita lihat pula bahwa pengembangan pertanian lahan kering dengan paket teknologi mekanis disertai dengan teknologi budidaya maju serta pengembangan pengairan non konvensional yang ditargetkan pada pertanian berkelompok dengan skala ekonomi yang efisien diharapkan merupakan peluang untuk meningkatkan pendapatan petani. Demikian pula dengan diversifikasi komoditi gula melalui pengembangan tebu lahan kering, gula palma, dan pengembangan kompleks industri hilir gula diharapkan dapat memecahkan keseimbangan permintaan gula dalam negeri.

Konsep Trimatra Pembangunan Pertanian, yaitu wilayah terpadu, komoditi terpadu dan usahatani terpadu, sudah sejak lama kita sepakati bersama sebagai acuan dalam setiap perencanaan dan perumusan program kita. Kini adalah saatnya untuk melaksanakan konsep tersebut secara konsisten yang akan kita mulai melalui program terobosan penanggulangan kemiskinan. Saya melihat bahwa program ini merupakan



peluang bagi kita untuk meningkatkan pendapatan petani secara cepat dan nyata serta dapat mendorong bertumbuhnya setiap mata rantai agribisnis secara efisien dan efektif. Hanya dengan kerjasama saling mendukung diantara seluruh subsektor pertanian dan seluruh jajaran pertanianlah penerapan Trimatra Pembangunan Pertanian berpeluang mewujudkan pertanian tangguh dan efisien.

Saudara-saudara Peserta Rapat Kerja yang saya hormati,

Tahun anggaran 1991/1992 kenaikan anggaran sebesar 53 persen bertujuan untuk melaksanakan beberapa upaya khusus sebagai berikut :

1. Program terobosan penanggulangan kemiskinan melalui program usahatani terpadu penerapan secara utuh strategi Trimatra Pembangunan Pertanian. Program akan dilaksanakan di 17 propinsi dengan kelompok sasaran 65.000 rumah tangga miskin. Jumlah dana yang disediakan untuk ini sebesar Rp. 45,- milyar. Ketujuh belas program tersebut adalah : Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, NTB, NTT, Timor Timur, Maluku dan Irian Jaya.
2. Program diversifikasi pangan dan gizi melalui pengembangan usahatani pekarangan secara terpadu dengan kelompok sasaran 16,000 keluarga miskin di 10 propinsi yaitu : Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.
3. Upaya khusus peningkatan produksi kedelai melalui perluasan areal tanam seluas 414.000 Ha, tersebar di 19 propinsi, dengan pertanian terkonsentrasi sehamparan dimana satu unit areal perluasan minimal 500 Ha. Dan harus dilaksanakan dengan paket teknologi maju secara konsisten, tidak diperkenankan adanya areal yang menyebar dibawah luasan minimal tadi. Dana yang disediakan sebesar Rp. 29,98 milyar.

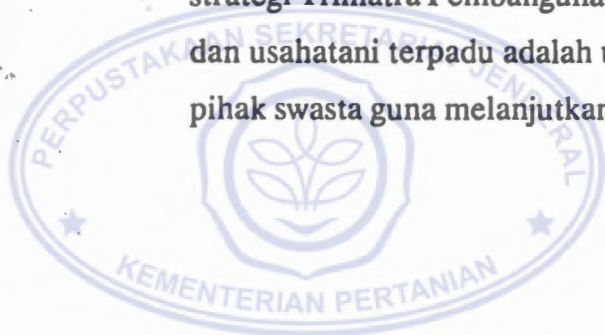


4. Pencetakan sawah seluas 75.000 Ha. Sasaran ini hendaknya dapat dicapai dengan memuaskan tidak seperti tahun-tahun yang lalu yang selalu jauh dibawah sasaran. Dana yang disediakan sebesar Rp. 51,98 milyar.
5. Program penelitian dan pengembangan pertanian disediakan dana Rp. 25,12 milyar suatu kenaikan sebesar 185,0 persen. Dana ini akan digunakan untuk lebih mendukung upaya pembangunan pertanian.
6. Program inseminasi buatan (IB) dengan penyediaan 2,5 juta dosis dan penyediaan obat-obatan sebanyak 36,6 juta dosis. Penyediaan dana untuk program peternakan naik 92,15 persen.

Sasaran-sasaran program pembangunan pertanian secara terperinci disajikan dalam lampiran 1. Rinciannya nanti akan dikemukakan oleh Saudara Sekretaris Jenderal.

Dalam pelaksanaan upaya terobosan penanggulangan kemiskinan dengan penerapan strategi Trimatra Pembangunan Pertanian secara utuh pendekatannya diawali dengan identifikasi wilayah dan sumberdaya, penentuan komoditi utama sesuai dengan potensi wilayah, penentuan komoditi pendukung dan fasilitas prasarana seperti pengairan. Program ini dilaksanakan dengan pertanian berkelompok sehamparan dengan luasan minimum 500 Ha. Paket teknologi tanaman pangan dan paket ternak berupa ayam buras atau domba pada umumnya untuk semua rumah tangga baik sebagai komoditi utama maupun sebagai komoditi pendukung. Hanya di empat propinsi yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur dan Sulawesi Tengah peternakan sebagai komoditi utama dengan pengembangan 1.000 Ha padang penggembalaan berteknologi maju hijauan makanan ternak.

Dalam setiap propinsi dari 17 propinsi sasaran hanya diambil dua kabupaten dan dalam setiap kabupaten ini hanya dipilih dua kecamatan. Penerapan seutuhnya strategi Trimatra Pembangunan Pertanian berupa wilayah terpadu, komoditi terpadu dan usahatani terpadu adalah untuk lebih menjamin keberhasilan dan keikutsertaan pihak swasta guna melanjutkan dan memperluas program ini sehingga keberlanjutan



keberhasilan program ini pada masa datang lebih terjamin, serta seluruh mata rantai agribisnis dapat dikembangkan secara efektif dan efisien.

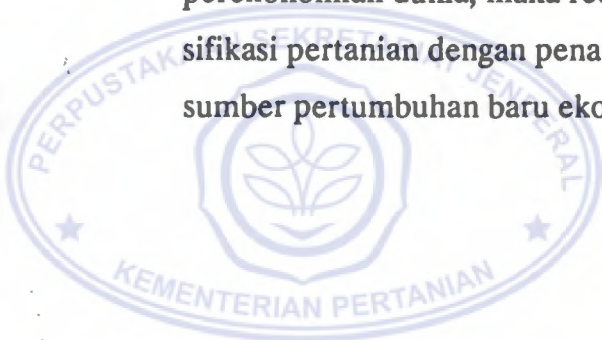
Untuk lebih menjamin keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan saya minta agar dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tiga bulanan. Dan segera dilakukan perbaikan pelaksanaan, ataupun realokasi anggaran dari program (proyek) yang kurang mampu memanfaatkan anggaran kepada program/proyek yang lebih mampu. Kebijakan ini akan mulai kita terapkan untuk menjamin pemanfaatan anggaran dengan efektif dan efisien.

Dalam pembangunan pertanian komplementaritas antar subsektor perlu diperhatikan jadi bukan kompetisi dalam pemanfaatan sumberdaya dan dana yang terbatas. Dengan azas komplementaritas inilah bias komoditi atau supereoritas komoditi dapat dihindari dan dengan demikian pula koordinasi dapat ditingkatkan yang selanjutnya strategi Trimatra Pembangunan Pertanian dengan empat usaha pokok diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi yang juga merupakan usaha pokok yang saling komplementer dapat kita terapkan. Dengan cara ini pula setiap program pembangunan pertanian dan setiap unit kerja lingkup Departemen Pertanian akan dapat saling tergantung dan saling mendukung untuk tujuan mensukseskan tujuan pembangunan.

Saudara-saudara peserta rapat kerja yang saya hormati,

Berikut ini saya kemukakan perkiraan strategi pembangunan sektor pertanian jangka pendek, 1991-1993 dan sedang periode 1993-1998 yang akan datang.

Karena besarnya potensi dan diversifikasi sumberdaya pertanian kita, disertai dengan keunggulan kompetitif berkelanjutan dalam alam globalisasi dan regionalisasi perekonomian dunia, maka reorientasi investasi pembangunan nasional pada diversifikasi pertanian dengan penanganan setiap mata rantai agribisnis akan merupakan sumber pertumbuhan baru ekonomi nasional. Di samping itu komponen impor dari



sektor pertanian adalah sangat rendah, maka peningkatan pendapatan sektor pertanian akan dapat menarik dan mendorong pertumbuhan selanjutnya dari sektor ekonomi lainnya (**agriculture led development** atau strategi dorong gelombang).

Kunci dari keberhasilan strategi baru ini adalah regionalisasi atau pewilayahan komoditi pertanian serta pengintegrasian subsektor industri pengolahan hasil pertanian atau agro-industri dalam pertanian sebagai konsekuensi logis dari usaha pokok diversifikasi pertanian. Dengan kebijaksanaan ini, pengembangan komoditi pertanian dan efisiensi sistim komoditi dapat ditingkatkan dan Indonesia akan berkembang menjadi Negara Industri Pertanian baru (**New Agriculture Industrialized Country**).

Salah satu implikasi logis penerapan kebijaksanaan diversifikasi pertanian adalah desentralisasi pembangunan pertanian. Dengan pola pikir seperti ini, mekanisme perencanaan "**bottom up**" lebih diutamakan, terutama mulai dari daerah otonomi tingkat dua sebagai basis perencanaan. Setiap wilayah dan daerah dibangun sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada, direncanakan dengan partisipasi masyarakat dan pengembangan sumberdaya manusia pelaksana pembangunan, khususnya pembangunan pertanian.

Sekali lagi, kebijaksanaan pembangunan pertanian masa datang akan tetap secara konsisten melaksanakan Trimatra Pembangunan Pertanian didukung oleh pengembangan setiap mata rantai agribisnis secara terpadu sekaligus mempercepat proses diversifikasi pertanian. Secara khusus saya ingin agar beberapa butir di bawah ini mendapat perhatian saudara-saudara dalam sidang-sidang selanjutnya :

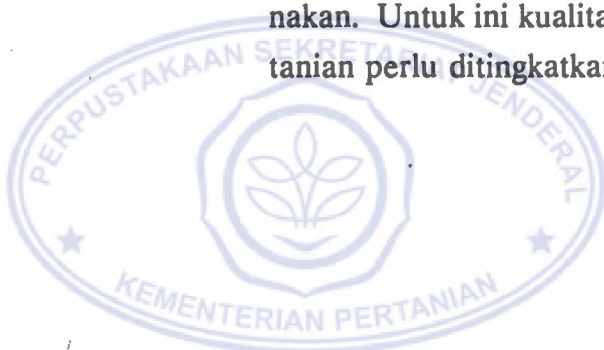
1. Pengembangan pola PIR dan UPP agar disempurnakan dengan tetap memperhatikan Trimatra secara konsisten berencana disamping pengembangan kompleks agro-industri disentra produksi.



2. Dimensi pembangunan pertanian difokuskan pada pemanfaatan optimal sumberdaya pertanian sesuai dengan keunggulan kompetitif komoditi pertanian. Untuk ini peran Kanwil Departemen Pertanian perlu ditingkatkan.
3. Pelestarian swasembada pangan selama tiga tahun mendatang adalah cukup berat, karenanya memerlukan upaya perluasan areal panen sebesar 150.000 - 170.000 ha rata-rata per tahun dan kenaikan produktivitas rata-rata sekitar 1,0 - 1,5 % per tahun. Untuk itu manajemen dan efektifitas pencetakan sawah perlu ditingkatkan disamping mempercepat pengembangan dan penerapan teknologi maju.
4. Untuk Jawa, karena peranannya dalam memantapkan swasembada beras dalam tiga tahun mendatang, maka penggunaan lahan sawah beririgasi teknis diprioritaskan untuk usaha tani padi sawah.
5. Tanaman tebu di lahan sawah beririgasi secara bertahap perlu dikurangi. Perluasan areal tebu diupayakan dilahan kering baik di Jawa dan terutama di luar Jawa. Untuk ini perlu dipercepat laju pengembangan dan penerapan teknologi maju tebu lahan kering.
6. Difersifikasi pemanis lainnya berupa gula kelapa, gula nipah, siwalan, dll., perlu ditingkatkan. Untuk ini teknologi baru pengolahan dan produksi nira sudah saatnya dikembangkan.
7. Pengembangan dan penerapan paket teknologi maju sistim komoditi hortikultura perlu dipercepat untuk mendukung program trobosan penanggulangan kemiskinan dengan secara konsisten terpadu menerapkan Trimatra Pembangunan Pertanian.
8. Kesenjangan produktifitas dan kualitas antara perkebunan rakyat dan perkebunan besar perlu segera diperkecil dengan memfokuskan program peningkatan produksi perkebunan pada rehabilitas dan peremajaan perkebunan rakyat berteknologi maju, dan dengan secara konsisten terpadu menerapkan Trimatra Pembangunan Pertanian, yang berarti meningkatkan partisipasi semua sub-sektor dan jajaran pertanian dalam program ini.



9. Kebijakan substitusi impor komoditi pertanian terutama gula tebu, kedelai dan susu harus disertai dengan percepatan peningkatan produktifitas melalui percepatan pengembangan dan penerapan paket teknologi maju, agar dapat kompetitif dalam alam globalisasi, regionalisasi dan deregulasi perekonomian.
10. Agar pengembangan ekspor dapat meningkatkan pendapatan petani maka efisiensi seluruh mata rantai agribisnis harus ditingkatkan didukung dengan penerapan paket teknologi maju.
11. Ekpor perikanan, sayuran dan buah-buahan serta hasil peternakan masih perlu dipacu. Oleh karena itu sentra produksi hortikultura dan peternakan serta kawasan perairan Indonesia Timur perlu segera dikembangkan.
12. Dalam kebijakan dan pengembangan sentra produksi, azas pertanian berkelompok sehamparan mencapai skala ekonomi yang efisien perlu diterapkan secara konsisten untuk mendorong pengembangan setiap mata rantai agribisnis yang efisien.
13. Dalam pelaksanaan program terobosan penanggulangan kemiskinan berupa pengembangan usahatani terpadu dan diversifikasi pangan dan gizi melalui pengembangan usahatani pekarangan secara terpadu, supaya diterapkan dengan azas pengembangan usahatani berkelompok sehamparan dengan luas minimum 500 Ha dikelola secara terpadu dengan Kanwil sebagai simpul koordinasi.
14. Dalam pengembangan kelembagaan ekonomi, saling ketergantungan dan saling menghidupi antar lembaga ekonomi petani dengan koperasi/keompok tani, BUMN dan swasta perlu ditata sehingga terdapat keserasian pembagian resiko dan keuntungan antara semua pelaku ekonomi. Ini perlu untuk menjamin pelaksanaan demokrasi ekonomi dibidang pertanian.
15. Agar dapat memanfaatkan sumber daya dan dana pembangunan secara efektif dan efisien, mekanisme perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian program pembangunan pertanian perlu lebih disempurnakan. Untuk ini kualitas sumber daya pelaksana program pembangunan pertanian perlu ditingkatkan terutama kemampuan manajerial. Dalam kaitan ini



pendidikan dan latihan kepada para perencana, maupun para pelaksana perlu terus ditingkatkan.

16. Monitoring dan evaluasi secara cermat dan berkala program pembangunan pertanian perlu diterapkan. Dengan demikian tindakan perbaikan secara lebih dini untuk menjamin tercapainya sasaran dengan baik dapat segera dilakukan.
17. Kepada saudara Sekretaris Jenderal saya minta untuk mulai mempersiapkan materi dan perkiraan strategi nasional jangka sedang (Kerstranas Kadang) 1993-1998 dengan melaksanakan pembahasan yang intensif dengan unit Eselon I lingkup Departemen Pertanian. Dalam hal ini sekaligus supaya dirumuskan alternatif kelembagaan pelaksanaannya.
18. Kepada setiap unit Eselon I saya mintakan pula untuk melaksanakan analisa dan perkiraan parameter pembangunan pertanian menurut bidang tugas unitnya masing-masing. Badan Litbang Pertanian diharapkan dapat memberikan masukan dalam perkiraan parameter dan analisa sumberdaya pembangunan sektor pertanian ini. Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian diharapkan selalu meningkatkan pendidikan dan latihan bagi aparat maupun pelaksana pembangunan pertanian yaitu petani, kelompok tani dan koperasi Unit Desa.
19. Keterpaduan kelompok tani dan Koperasi Unit Desa secara menyeluruh harus semakin kita wujudkan.

Para peserta rapat kerja yang saya hormati,

Saya percaya bahwa rapat kerja kali ini akan menghasilkan rumusan serta pikiran-pikiran yang berharga bagi penyempurnaan pelaksanaan sisa tiga tahun Pelita V yang akan datang serta dalam rangka mempersiapkan diri menyongsong pembangunan jangka panjang tahap kedua nanti. Saya minta agar rapat kerja ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai sumbangan kita bersama kepada bangsa dan negara tercinta.




Akhirnya saya ucapkan selamat mengikuti Rapat Kerja Nasional ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita dengan memberikan petunjuk dan perlindunganNya kepada kita semua.

Wassallamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 25 Februari 1991

Menteri Pertanian



Ir. Wardjo



36





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA ACARA PENGUKUHAN PIMPINAN SAKA TARUNABUMI
TINGKAT NASIONAL

Jakarta, 1 Maret 1991

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yang terhormat, Saudara Menteri Muda Pertanian beserta Ibu,
Yang terhormat Saudara Ketua Kwartir Nasional Gerakan
Pramuka,

Yang terhormat Para anggota Pimpinan Saka Tarunabumi Tingkat
Nasional, Para peserta Rakernas Departemen
Pertanian, Kakak-kakak Pembina Pramuka, Adik-
adik Penegak dan Pandega serta hadirin
sekalian,

Salam Pramuka,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan rahmat dan
karunia-Nya telah memperkenankan kita berkumpul di tempat
ini, dalam rangka Pengukuhan anggota Pimpinan Satuan Karya
Pramuka Tarunabumi Tingkat Nasional dan kursus Orientasi
Singkat Gerakan Pramuka.

Kita mengadakan pergantian dan penambahan Pimpinan Saka
dan Kursus Orientasi ini, karena adanya alih tugas di
lingkungan Departemen Pertanian yang secara ex officio
menjadi anggota Pimpinan Saka Tarunabumi Tingkat Nasional.
Selanjutnya kita merasa masih perlu menambah pengetahuan dan
pengalaman kita di bidang kepramukaan untuk lebih mempunyai
gambaran tentang Gerakan Pramuka dan tentang pendidikan
Kepramukaan. Dengan gambaran yang lebih luas ini maka kita
dapat menggugah dan mendorong seluruh jajaran pertanian di
daerah untuk lebih aktif dan berprestasi dalam membina dan membantu

Mudah-mudahan dengan penyempurnaan susunan Pimpinan Saka Tarunabumi dan kursus orientasi ini, dukungan serta kegiatan pembinaan Saka Tarunabumi dapat lebih ditingkatkan.

Kepada Saudara-saudara yang purna tugas di Pimpinan Saka Tarunabumi ini, saya atas nama Departemen Pertanian menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dharma bhakti yang telah diberikan kepada Gerakan Pramuka, khususnya kepada Saka Tarunabumi. Kepada Saudara-saudara yang baru dilantik yang sebelumnya saya tahu juga telah banyak berkecimpung dan membantu Saka Tarunabumi, dengan ini mengucapkan Selamat semoga dapat bahu membahu bersama dengan anggota pimpinan Saka Tarunabumi yang lain.

Dengan telah ditetapkan dan dikukuhkannya Saudara-saudara sebagai anggota Pimpinan Saka Tarunabumi Tingkat Nasional, berarti satu kepercayaan tugas telah dilimpahkan lagi kepada Saudara. Kita sama-sama mengetahui dan menyadari bahwa Gerakan Pramuka pada hakekatnya merupakan wadah dan wahana pendidikan generasi muda bangsa kita untuk dapat membangun dirinya sendiri dan mampu menyelenggarakan pembangunan bangsa dan negara. Tugas ini merupakan suatu tugas yang amat berat apabila hanya ditangani oleh satu unit kerja semata-mata tanpa didukung oleh pihak-pihak lain yang ada keterkaitannya.

Departemen Pertanian sejak tahun 1966 telah melakukan kerjasama dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka melalui pembentukan KOMPI-kOMPI Pramuka Tarunabumi yang sekarang disebut Satuan Karya Pramuka Tarunabumi.

Kegiatan Pramuka bukan sekedar baris berbaris saja, akan tetapi jauh dibalik itu, mendidik serta menyiapkan tunas-tunas bangsa sebagai pewaris kepemimpinan dan pelanjut pembangunan di masa yang akan datang. Kepada kita diharapkan untuk dapat membina dan membimbing generasi muda khususnya Pramuka Tarunabumi tersebut agar mereka mempersiapkan diri untuk berusaha tani sendiri atau mandiri dalam berusaha.



Ibu-ibu, kakak-kakak dan Saudara-saudara sekalian yang terhormat,

Kita sama-sama menyadari bahwa ada beberapa persamaan dasar tugas-tugas yang diemban oleh Gerakan Pramuka dan yang diemban oleh Departemen Pertanian. Persamaan dasar yang utama adalah membentuk kepribadian generasi muda melalui pendidikan luar sekolah (non formal).

Sehubungan dengan itu, kami telah menginstruksikan kepada para Pimpinan Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) untuk menjadikan lembaga pendidikan tersebut sebagai basis kegiatan kepramukaan bukan saja untuk siswa sekolah akan tetapi juga untuk generasi muda di sekitar sekolah. Bagi para anggota pramuka usia penggalang (11 - 16 tahun) kegiatan ini merupakan ajang untuk menumbuhkan minat mereka akan bidang pertanian.

Selanjutnya perlu saya ingatkan kembali akan adanya Instruksi Bersama Menteri Pertanian dengan Ka Kwarnas Gerakan Pramuka No. B/Inst/D1.110/9/1988, yang mana,

02 Tahun 1988

diantara isinya yang ditujukan kepada seluruh jajaran pertanian, adalah sebagai berikut:

1. Membantu dan memberi fasilitas yang diperlukan kepada Kwartir Gerakan Pramuka di semua tingkatan.
2. Memperbantukan tenaga/personil yang diperlukan Kwartir.
3. Menjadikan Unit-unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah sebagai pangkalan kegiatan pembinaan Saka Tarunabumi.
4. Bersama dengan Kwartir Gerakan Pramuka menciptakan kondisi sehingga Pimpinan Saka Tarunabumi dapat melaksanakan tugasnya.

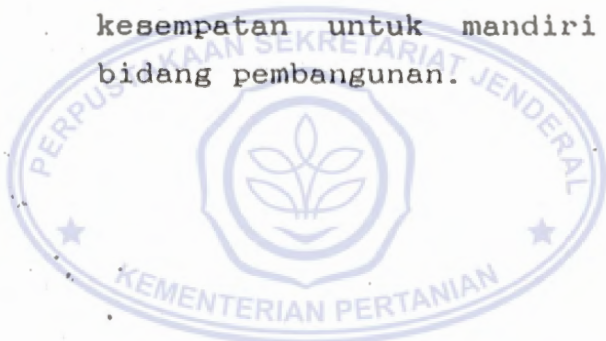


Sejalan dengan Instruksi Bersama tersebut diharapkan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) selain merupakan Pusat kegiatan penyuluhan pertanian dapat berperan sebagai pusat kegiatan pembinaan Saka Tarunabumi. Dengan dijadikannya BPP sebagai sanggar kegiatan Saka Tarunabumi tingkat ranting, maka para Penyuluh Pertanian baik yang ada di BPP maupun yang bertugas di WKPP dapat bekerjasama dengan para anggota Saka Tarunabumi dalam menggerakkan masyarakat pedesaan.

Ibu-ibu, Kakak-kakak dan Saudara-saudara yang terhormat,

Sesuai dengan acara yang disusun oleh Panitia Rakernas, selesai acara pelantikan Pimpinan Saka Tarunabumi ini, kita sama-sama akan mengikuti Kursus Orientasi Singkat Gerakan Pramuka. Bagi Saudara-saudara yang sudah pernah mengikuti Kursus Orientasi di daerah masing-masing, maka Kursus saat ini diharapkan merupakan pendalaman agar dapat mengkaitkan antara prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan dengan program pembinaan generasi muda di sektor pertanian. Bagi Saudara-saudara yang belum pernah mengikuti Kursus Orientasi, kesempatan ini merupakan momentum yang baik untuk mengenal Gerakan Pramuka lebih dekat lagi dan bagi semuanya, kesempatan ini merupakan ajang bagi kita untuk menyatukan pengertian, pemikiran dan gerak pelaksanaan pembinaan Saka Tarunabumi di wilayah kerja kita masing-masing.

Kita menyadari bahwa kemajuan pertanian di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari para generasi muda, baik yang sudah menekuni usaha di bidang pertanian maupun yang belum. Pemuda adalah generasi penerus Pembangunan Nasional, Pramuka Tarunabumi juga merupakan penerus pembangunan. Oleh karena itu mereka perlu dibekali berbagai pengetahuan dan ketrampilan baik di bidang teknologi produksi dan pasca panen, teknologi ekonomi maupun teknologi sosial sehingga mereka dengan mudah mendapatkan peluang-peluang dan kesempatan untuk mandiri dalam berperan aktif di segala bidang pembangunan.



Akhirnya kepada Saudara-saudara yang baru dikukuhkan menjadi Pimpinan Saka Tarunabumi Tingkat Nasional, sekali lagi saya mengucapkan "Selamat bertugas". Kepada para peserta Rakernas Departemen Pertanian dan ibu-ibu Dharma Wanita mari kita ikuti Kursus Orientasi Gerakan Pramuka dengan seksama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian.

Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 1 Maret 1991

Menteri Pertanian



(Ir. Wardoyo)



37





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN PENGARAHAN MENTERI PERTANIAN RI
DALAM KONVENSI GUGUS KENDALI MUTU
KE-2 JAJARAN PT PERKEBUNAN VII
DI BAH JAMBI, TANGGAL 4 MARET 1991

Assalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh.

Saudara-saudara Hadirin Yang Kami Hormati,

Puja dan puji syukur terlebih dahulu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wataala yang hanya atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, pada hari yang berbahagia ini kita mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Konvensi Gugus Kendali Mutu yang kedua bagi jajaran PT Perkebunan VII yang Insya Allah akan berlangsung sampai dengan tanggal 5 Maret 1991.

Pertemuan Konvensi semacam ini, khususnya pula bagi PT Perkebunan VII yang untuk kedua kalinya diselenggarakan, kami nilai penting, karena Konvensi tingkat manajemen tertinggi dari sesuatu unit/perusahaan secara formal merupakan pengakuan resmi dari pucuk pimpinannya akan adanya suatu sistem Pengendalian Mutu Terpadu (PMT) dengan Gugus Kendali Mutu (GKM) di lingkungan unit/perusahaan yang dipimpinnya. Secara aktual, adanya Konvensi ini menunjukkan terdapatnya kesepakatan yang positif, dari seluruh unsur pimpinan perusahaan atas keinginan terselenggaranya sistem PMT/GKM. Konvensi ini pula menandakan terjadinya suatu keterlibatan langsung para pemimpin perusahaan demi berhasilnya tujuan yang ingin dicapai oleh sistem PMT/GKM.



Selain itu Konvensi merupakan suatu ajang pagelaran, yang akan membeberkan hasil gugus-gugus yang terpilih dan terbaik di antara seluruh jajaran dari perusahaan. Dengan pagelaran-pagelaran yang caranya sudah dibakukan, ringkas dan jelas, maka akan terjadi saling tukar pendapat dan informasi yang bermanfaat, bagi kemajuan dan perkembangan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Lebih jauh dari itu Konvensi semacam ini, barangkali akan dapat pula melahirkan gagasan-gagasan yang berguna bagi perusahaan lainnya.

Demikianlah, aktivitas Gugus-gugus Kendali Mutu dari bawah dipadu dengan kesepakatan positif dan keterlibatan langsung para pimpinannya, akan sangat mendukung penerapan dan pengembangan sistem PMT/GKM. Untuk itu, kepada segenap jajaran PT Perkebunan VII kami sampaikan penghargaan dan terima kasih, karena dengan terselenggaranya Konvensi kedua yang dimulai hari ini, kami menilai bahwa PT Perkebunan VII telah mau dan mampu menyambut komitmen kami akan terselenggaranya sistem PMT/GKM di seluruh jajaran Departemen Pertanian, terutama Badan-badan Usaha Milik Negara sebagaimana Surat Edaran kami No. 210/459/1989, tertanggal 17 Juli 1989.

Saudara-saudara Yang Kami Hormati

Sebagaimana kita maklum, sistem PMT adalah suatu sistem manajemen yang disempurnakan dari sistem Manajemen Partisipatif dan sistem Management by Objective, berasaskan kebersamaan, partisipasi aktif semua pihak, penggunaan data, orientasi mutu pelayanan maupun mutu produksi, mengutamakan kepuasan pelanggan dan lain-lain. Dengan asas tersebut, maka pada pola pikir dan perilaku manajemen yang otoriter dan individual kita buang jauh-jauh, dan menggantikannya dengan cara-cara yang mengutamakan kebersamaan dalam keterbukaan, persuasif dan komunikatif sehingga dengan demikian PMT senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat semua pihak dalam manajemennya sebagai manusia. Dengan menghargai harkat dan martabat karyawan/pegawai sedemikian ini, mereka akan merasakan "diwongke" (dimanusiakan) dan karenanya diharapkan akan tumbuh kemauan, kemampuan dan pengabdianya sehingga produktivitas kerja, efektivitas dan efisiensi perusahaan akan



lebih meningkat. Apabila perusahaan telah mampu menghargai karyawannya sebagaimana harkat dan martabat manusia dan bukan sebagai alat seperti mesin, maka bukan mustahil akan terjadinya rasa saling memiliki dan saling ketergantungan yang erat di antara semua karyawan dengan perusahaannya. Jatuh-bangunnya perusahaan adalah juga tanggung jawab mereka dan kesejahteraan mereka tergantung pada hidup matinya perusahaan.

Bagian atau metoda dari sistem PMT adalah GKM yaitu sekelompok karyawan dari suatu unit kerja yang sama, yang dengan aktivitas rapat atau pertemuan di antara sesama anggota berusaha untuk meningkatkan mutu kerja, mutu pelayanan dan mutu produksinya. Kelompok karyawan ini dalam GKM tidak semata-mata kelompok yang mengadakan rapat-rapat, akan tetapi merupakan kelompok yang mampu senantiasa mencatat dan mendata dalam melakukan identifikasi, analisa dan mencari pemecahan masalah yang dihadapi dalam pekerjaannya dalam meningkatkan mutu dengan berasaskan kebersamaan dalam keterbukaan tadi.

Walaupun sistem PMT dengan metoda GKM ini bukan satu-satunya alat yang mampu memecahkan masalah, namun berdasarkan pengalaman dari mereka yang telah lama menerapkan sistem ini, bahkan juga pengalaman beberapa PTP, ternyata telah dapat dibuktikan bahwa sistem PMT/GKM cocok sekali dengan budaya dan falsafah bangsa Indonesia. Kegotongroyongan, saling menghormati pendapat orang lain, bertanggung jawab atas apa yang dikemukakan dalam rapat-rapat, rasa ikut memiliki dan memiliki rasa diri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perusahaannya dalam mencapai tujuan bersama, senantiasa mewarnai aktivitas dan kehidupan GKM. Hal itu pulalah yang mendorong kami berkeinginan untuk menerapkan, melaksanakan dan mengembangkan sistem PMT/GKM dalam lingkungan Departemen Pertanian.

Saudara-saudara Yang Kami Hormati,

Sebagaimana sering kami kemukakan bahwa pembangunan pertanian yang telah, sedang dan akan kita laksanakan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional dalam amanat GBHN



sebagai pengamalan dari Pancasila dan UUD'1945. Tujuan pembangunan pertanian yang ingin kita capai yaitu menciptakan suatu kondisi pertanian yang maju, efisien dan tangguh dalam mendukung kemampuan sektor industri yang kuat, sasarannya adalah meningkatkan produksi dan kualitas hasil produksi pertanian yang senantiasa harus berperan dalam penyerapan angkatan kerja sebanyak 4.016 juta orang dalam Pelita V, jelaslah semakin tidak sepi dari berbagai hambatan, tantangan dan masalah. Dalam mengatasi semua ini dituntut adanya semangat kerja dan kerjasama yang harus semakin meningkat. Semua lapisan, dari teratas sampai terbawah, dari mereka yang bekerja di bidang pengaturan, pelayanan, penyuluhan, perusahaan pertanian, baik milik negara maupun milik swasta, para petani, peternak dan nelayan diharapkan dapat memberi sumbangan karya nyata secara produktif dan efisien. Di segala bidang kerja tersebut dikehendaki tingginya produktivitas, sehingga menghasilkan mutu yang sesuai dengan keinginan pelanggan, baik mutu layanan maupun mutu produksinya

Pertanian yang maju, efisien dan tangguh dalam mendukung kemampuan sektor industri yang kuat sebagaimana amanat GBHN tersebut, berarti pula menuntut adanya sumberdaya manusia pertanian yang maju, efisien dan tangguh, yang selalu siap dan terbuka akan segala perubahan permintaan layanan maupun permintaan atau peluang pasar serta pelbagai peluang teknologi maju. Dengan demikian di sektor pertanian selain penyerapan angkatan kerja, juga perlu terus diusahakan terciptanya tenaga kerja yang semakin terdiri dari tenaga kerja berketrampilan menengah dan tinggi dan profesional. Dalam kaitannya dengan pelayanan masyarakat yang semakin kritis, menuntut adanya pengabdian dan jasa pelayanan yang semakin meningkat, sedangkan dalam hubungannya dengan pemasaran hasil-hasil pertanian, kita sadari bahwa pasar luar negeri semakin menuntut mutu yang lebih tinggi dari produksi yang saat ini kita hasilkan. Karenanya, baik layanan maupun produksi tersebut, perlu senantiasa kita tingkatkan. Meningkatkan mutu layanan maupun mutu produksi, adalah mustahil apabila kita tidak tingkatkan kemauan dan kemampuan sumberdaya manusianya. Pendidikan dan latihan merupakan salah satu upaya peningkatan sumberdaya manusia, sedangkan PMT dengan metoda GKM dapat merupakan aplikasinya dalam bentuk kelompok kerja pelaksanaannya.



Upaya-upaya peningkatan mutu tersebut haruslah dilaksanakan secara terpadu di setiap tahap pekerjaan, dan karenanya maka sistem PMT/GKM merupakan alat bantu sintesis atau katalisator dalam suatu organisasi struktural yang telah ada untuk mengisi usaha peningkatan prestasi kerja sekaligus menciptakan suasana kerja yang aman, nyaman, tertib, bersemangat, berprestasi, produktif, efisien dan tentunya manusiawi.

Saudara-saudara Yang Kami Hormati.

Penerapan sistem PMT/GKM memang tidak bisa serta-merta sekali jadi. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dan diselesaikan, karena mentalitas dasar dalam penerapan sistem PMT/GKM memerlukan perubahan sikap dan perilaku manajemen. Sikap dan perilaku terkadang lama sulit diubah, namun yang tersulit di antaranya adalah mengubah pola pikir para pimpinan untuk dapat bersikap dan berperilaku tidak otoriter menjadi terbuka, persuasif dan komunikatif.

Secara umum tahapan-tahapan itu berawal dari tahap pengenalan kepada pimpinan, tahap orientasi, tahap pengorganisasian, tahap penerapan, tahap penguasaan dan kemudian tahap pelestarian. Lama waktu pentahapan dapat cepat, dapat pula lambat, dan semua itu tergantung kepada kesepakatan positif dan keterlibatan langsung para pimpinan yang berpadu dengan semangat dan aktivitas seluruh karyawan, sedangkan tahap pelestarian merupakan tahapan yang panjang bersamaan dengan lamanya kehidupan perusahaan itu sendiri.

Pada hari ini PT Perkebunan VII menyelenggarakan Konvensi yang kedua kalinya. Ini berarti bahwa PT Perkebunan VII sedang menginjak pada tahapan Pelestarian. Berarti pula bahwa tahap pengenalan, tahap orientasi, tahap penerapan dan tahap penguasaan sudah Saudara-saudara jalani dengan baik. Dengan Konvensi inipun, kami menilai bahwa sikap dan perilaku manajemen para pimpinan PT Perkebunan VII sudah berubah menjadi kebersamaan dalam keterbukaan, tidak otoriter, persuasif dan komunikatif. Sebaliknya, di semua lapisan karyawan mudah-mudahan sudah tercipta suasana kerja yang nyaman, terbuka, gotong-royong, tahu akan hak dan kewajiban,



disiplin dan patuh akan tugas tetapi kritis dan teliti dalam pelaksanaannya, serta berdinamika dalam memecahkan masalah dengan senantiasa memelihara komunikasi timbal balik dengan pimpinannya.

Saudara-saudara Yang Kami Hormati,

Berkenaan dengan Konvensi yang untuk kedua kalinya diselenggarakan oleh PT Perkebunan VII hendaknya kami minta perhatian Saudara-saudara terhadap hal sebagai berikut:

1. Agar seluruh peserta Konvensi, dapat melaksanakan pagelarannya sebaik mungkin, efektif dan efisien.
2. Dari pagelaran-pagelaran dan ceramah-ceramah dalam Konvensi hendaknya dapat dipetik manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kegiatan GKM dan produktivitas usaha PT Perkebunan VII khususnya dan PT Perkebunan Aneka Tanaman umumnya.
3. Agar para pimpinan PT Perkebunan VII dapat menarik hal-hal yang penting dalam Konvensi untuk dapat dijadikan bahan peningkatan produktivitas PT Perkebunan VII, peningkatan kesejahteraan karyawan PT Perkebunan VII dan lebih dari itu, juga kesejahteraan para petani yang termasuk mitra kerja PT Perkebunan VII.
4. Sampai saat ini PT Perkebunan VII telah mempunyai 315 gugus dengan 3.220 anggota dari 27.850 karyawan; berarti baru 10% karyawan terlibat dalam GKM. Untuk itu diharapkan agar PT Perkebunan VII dapat lebih meningkatkan lagi gugusnya baik kuantitas maupun kualitasnya. Dalam Meningkatkan kualitas GKM kiranya dapat dipedomani Surat Edaran kami nomor TU.210/41/Mentan/I/1991, tertanggal 23 Januari 1991.

Saudara-saudara Yang Kami Hormati,

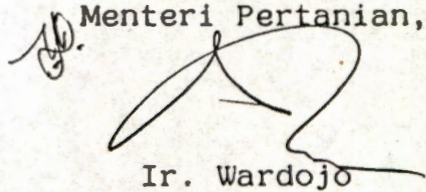
Demikianlah sekedar sambutan kami dalam mengantarkan Saudara-saudara pada Konvensi yang kedua PT Perkebunan VII di Bah Jambi ini. Seraya memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami



sampaikan ucapan selamat berkonvensi dan semoga pula Konvensi yang kedua ini akan memberikan manfaat bagi PT Perkebunan VII. Kami yakin, Saudara-saudara tidak akan ketinggalan oleh PTP lainnya yang telah berkali-kali berkonvensi, apalagi Konvensi yang Saudara-saudara selenggarakan ini merupakan awal tahap pelestarian dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas GKM di PT Perkebunan VII.

Wassalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh.

Menteri Pertanian,



Ir. Wardoyo



38





**MINISTER OF AGRICULTURE
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**ADDRESS BY THE MINISTER OF AGRICULTURE
AT
THE CLOSING CEREMONY OF TECHNICAL COOPERATION
ON VETERINARY DRUG CONTROL PROJECT, ATA - 297
AT
PRESIDENT HOTEL, JAKARTA
ON
MARCH 6, 1991**

- Your Excellency the Ambassador of Japan.
- Honorable Representative of Japan International Cooperation Agency to Indonesia.
- Honorable Director of National Veterinary Assay Laboratory, MAFF, Japan.
- Distinguished Ladies and Gentlemen.

1. First of all let us pray the God All mighty that on his blessing, all of us could get together on this day to attend the closing ceremony of Technical Cooperation on Veterinary Drug Control Project.

It is therefore on this occasion on behalf of the Government of the Republic of Indonesia through His Excellency the Ambassador of Japan I extend my sincere gratitude and appreciation to the Government of Japan for having cooperated with the the Government of Indonesia in successful establishment of Veterinary Drug Assay Laboratory at Gunung Sindur, Bogor. Hope fully that what has been established could serve as one of the monuments of friendship of the two countries.



Distinguished Ladies and Gentlemen.

2. In the process of our long term national development planning, we are now reaching the Fifth Five Year Development plan, which has a very strategic position. In addition to serve for the final stage of the first era of the twenty five year development, this Fifth Five Year Development Plan, should also be the periode for strengthening the development platform, that will make the forthcoming Sixth Five Year Development Plan ready for "take off".

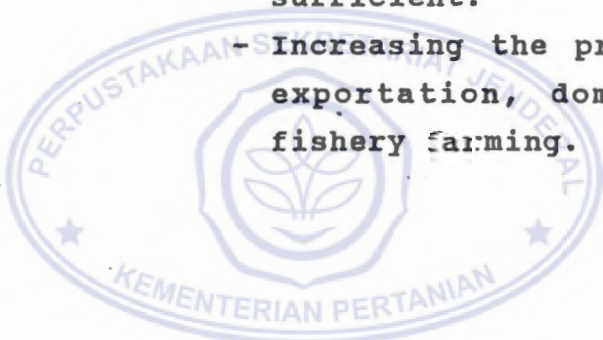
In the field of the agricultural sector, since 1984 we have succeeded in rice self sufficiency; in the area on the livestock products, so far we have succeeded in increasing supply of animal origin foodstuff such as meat, milk and eggs.

In spite of the mentioned success story, we have to face our national challenges such as :

- Creating new job opportunity,
(within the fifth five years development plan should be available the job opportunity for 11,9 millions people, in which the agricultural sector contributes for 4 millions)
- Promoting exports,
(to increase devisa earning, reducing Debt Service Ratio from 35% to 25%)

By concidering present condition and capability, the course of the development of agricultural sector in Fifth Five Year Development Plan, directed to achieve several objectives as follows :

- Strenghtening the quality and stability of food self sufficient.
- Increasing the products of agricultural comodities for exportation, domestic industry, livestock feed and fishery farming.



- Increasing the productivity of farming business and added value of agricultural commodities.
- Increasing farmers' income.
- Promoting regional development as well as preserving natural resources and improving environment quality.

Distinguished Ladies and Gentlemen,

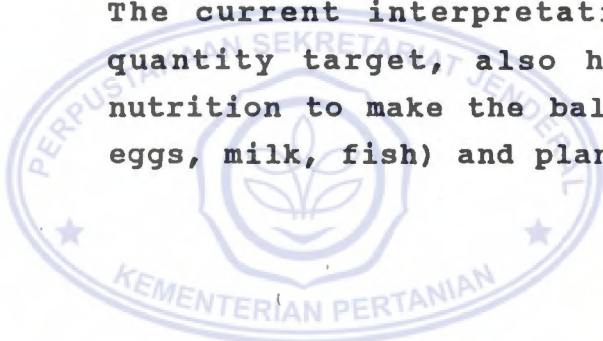
3. As it has been known in 1984 Indonesia has a great achievement to change from largest rice importer nation to be self sufficient nation. Food self sufficientcy is really a dynamic condition which represents the capability to produce foodstuff to meet the requirement for food, seed, feed, industrial raw material and reserve food which is produced with reasonable price, reached by consumers as well as profitable to the producers, and spread throughout the country in the whole year.

In other sense, the condition of food self sufficientcy in the long range is the balance between rate of growth of production and demand which could be change every moment.

The knowledge on new potential food resources is really very important because the possibility of saturation of traditional food technology, the limited natural resources would be constraints to increase food production in the future.

In other hand, the change of preference caused by increasing public income also acting as pushing factor to search new food resources or to process new products which is accepted by consumers.

The current interpretation of food self sufficientcy beside quantity target, also having to improve the quality of our nutrition to make the balance between animal origin food (meat, eggs, milk, fish) and plant origin food.



Distinguished Ladies and Gentlemen,

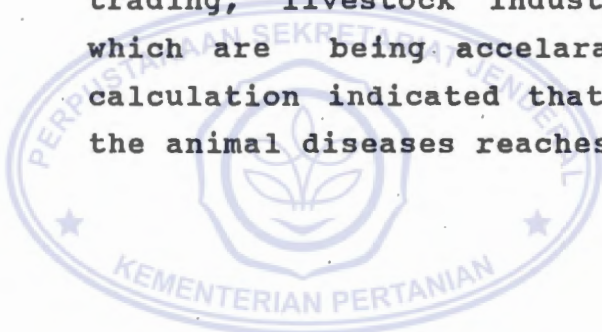
4. The demand of animal origin food would be higher in line with the increasing public income as the result of successful national development. Based on the projection of annual growth of population 1,9 %, economic 5% and demand elasticity to income for meat 1,3, eggs 1,2, fresh milk 1,3, processed milk 1,0 and consumption standard on animal origin protein 4,5 gram/capita/daily, the projection of consumption each capita annually on meat, eggs and milk would be increasing approximately 4% annually.

It is really relevant with theme of the last World Food Day, "Food for the Future" on October 17, 1990 as already announced by Ibu Suharto to mobilize national movement in serving high nutritious food for human in development.

Distinguished Ladies and Gentlemen,

5. To meet the demand on animal origin foodstuffs (meat, eggs, milk) various efforts have been conducted such as : increasing livestock population, reducing mortality rate as well as accelerating livestock productivity through intensification.

One of the important aspects of the effort for increasing livestock production is the problem of animal health services. The existence of animal disease menace or the attack of animal disease outbreak will have an extensive effect such as the death of animal, the decrease of the productivity , reproduction, working capacity and the quality of livestock products. The problem of animal disease menace will not only effect directly to the livestock business itself but also effect to livestock trading, livestock industry and export of livestock products which are being accelerated at the present moment. From the calculation indicated that the average annual economic loss of the animal diseases reaches at amount of around Rp. 100 billions.



This total will increase if the cases of animal disease manaces will not be able to be coped with immediately. Even more extensive effect will occur in zoonotic diseases, the transmittable diseases from animal to human being such as rabies.

The worriness and restlessness of the people which might occur will certainly threaten the stability and the course of the development.

Distinguished ladies and gentlemen,

6. If we really learnt some efforts have been carried out in coping with animal diseases, we have successfully eradicated Food and Mouth Disease in 1986, the Declaration of FMD Free in Indonesia had been oficially announced on the 12th meeting of Asean Ministries of Agriculture and Forestry (AMAF) in Manila, October 1990.

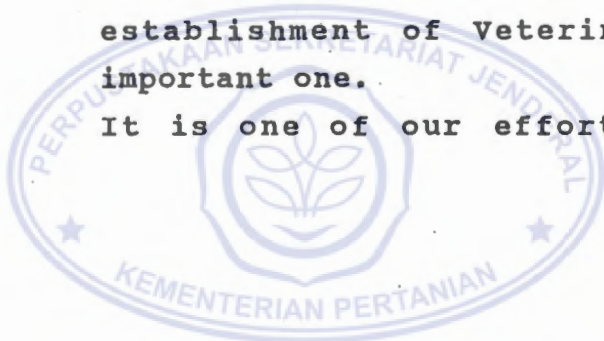
Although some efforts have been carried out, however there will not close the possibility of the occurence of animal disease outbreak as we have experienced recently. It is therefore we should keep vigilance in monitoring, evaluating and taking early steps to press the greater loss.

In line with our intensified animal health services (to support livestock development) the use of veterinary drugs has been continously increasing.

To guarantee the quality of veterinary drugs used in the field, it is an essential measure to encourage the implementation of veterinary drug control.

In relation with the improvement of veterinary drug control, the establishment of Veterinary Drug Assay Laboratory is very important one.

It is one of our efforts to make "consumer" safe in using



veterinary drugs available in the market and to make our farmers rely on veterinary products used in their farming business.

Distinguished Ladies and Gentlemen,

7. The technical cooperation between the Government of Indonesia and the Government of Japan within Ministries of Agriculture is increasing year by year, the total number of JICA Technial Cooperation in Agricultural Sector are 33 projects.

The presence of Veterinary Drug Assay Laboratory which was supported by Grant Aid and Technical Cooperation of the Government of Japan, really very beneficial to strengthen veterinary drug control and having significant impact in facilitating agricultural development mainly livestock subsector.

We are really proud that this laboratory is widely recognized internationally, and already utilized for FAO - APHCA Workshop in October 1990.

It means that the establishment of the laboratory is very useful not only for Indonesia but also for other developing contries in Asia - Pacific region.

Distinguished Ladies and Gentlemen.

8. As the Conclusion of this address, on behalf of the Government of Indonesia I express my highest appreciation to the Government of Japan through His Excellency the Ambassador of Japan for having provided generous cooperation to make Veterinary Drug Control Project a successfull one.

Thank you.



Minister of Agriculture

Ir. Wardoyo.

39





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGARAHAN MENTERI PERTANIAN
D A L A M
RAPAT KERJA NASIONAL DEPARTEMEN KOPERASI
JAKARTA, TANGGAL 7 - 9 MARET 1991

Bapak Menteri Koperasi, yang terhormat.

Saudara-Saudara peserta Rapat Kerja Nasional yang saya hormati

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya ingin mengajak Saudara-Saudara sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya telah memperkenankan kita semua berkumpul di tempat ini, dalam rangka Rapat Kerja Departemen Koperasi Tahun 1990/1991, guna mengevaluasi dan merumuskan pemantapan program pembenaan Koperasi/KUD tahun ke 3 Pelita V.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Departemen Koperasi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk turut mengikuti Raker 1990/1991 ini, dengan tema "Peningkatan Daya Guna dan Hasil Guna Aparatur Departemen Koperasi dan Gerakan Koperasi Dalam Pembangunan KUD Mandiri". Menurut hemat saya tema ini adalah sangat tepat bila dikaitkan dengan upaya pemerintah dewasa ini, untuk lebih meningkatkan efisiensi aparat, administrasi serta management pelaksanaan pembangunan. Sudah barang tentu administrasi serta pengelolaan pembangunan yang lebih profesional dan efisien merupakan salah satu prasyarat penting dalam rangka meletakkan landasan yang kokoh bagi pembangunan nasional guna menyongsong era lepas landas Repelita VI yang akan datang, dan Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun tahap II.



Sudah menjadi tekad bangsa Indonesia agar dalam Pelita VI yang akan datang, Pembangunan Nasional yang dilaksanakan akan mampu tinggal landas. Untuk tahapan yang penting itu, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sisa Pelita V, kita harus betul-betul mempersiapkan dan memantapkan kerangka landasan yang diperlukan untuk mampu tinggal landas. Kerangka landasan tersebut di antaranya adalah organisasi, kelembagaan, aparat dan mekanisme pembangunan yang mantap, dinamis dan tangguh. Dengan kerangka landasan yang kuat seperti itu maka kita akan mampu mendorong laju pembangunan untuk mencapai cita-cita Pembangunan Nasional yaitu masyarakat yang adil, makmur dan merata lahir bathin.

Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati,

Proses pembangunan yang sedang berlangsung dalam masyarakat Indonesia menggambarkan suatu perubahan kearah industri yang didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Hal ini berarti bahwa kita perlu memahami pola pertanian yang ada dan mengerti perubahan yang terjadi, khususnya pada masyarakat pedesaan, karena kenyataannya sebagian besar penduduk (80 persen) tinggal di pedesaan dan bekerja di berbagai bidang nafkah yang berhubungan dengan sektor pertanian yaitu tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, agro industri dan sebagainya. Oleh karena itu meskipun peranan sektor pertanian dalam product domestic bruto (PDB) hanya mencapai 21,6 persen dalam Pelita V, sektor ini masih tetap sangat strategis, karena secara langsung menyangkut kesejahteraan sebagian besar penduduk kita (53,3 persen).

Selama periode Pelita IV, sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 3,4 persen pertahun. Jumlah tenaga kerja yang diserap sektor ini, rata-rata meningkat 1,9 persen pertahun. Sedangkan peranannya dalam produk domestik bruto Nasional mencapai 24,0 persen.



Pertumbuhan yang dicapai selama Pelita IV itu, tentunya tidak terlepas dari kemajuan-kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai melalui upaya peningkatan produksi dan produktivitas dari berbagai komoditas Pertanian yang ditunjang oleh sektor-sektor terkait antara lain koperasi, perindustrian, perhubungan, perkreditan, kebijaksanaan harga dan sarana penunjang lainnya.

Kemampuan mencapai dan mempertahankan swasembada beras dalam Pelita IV, merupakan upaya dan sumbangan nyata dari hasil pembangunan di sektor pertanian dan pengairan. Dalam kurun waktu yang sama kemajuan-kemajuan di sub sektor lainnya juga menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Sub sektor perikanan sebagai salah satu andalan sektor pertanian di masa datang mengalami kenaikan rata-rata 4,8 persen pertahun. Sementara itu, sub sektor peternakan khususnya dalam produksi daging, telur dan susu juga mengalami kenaikan masing-masing 7,0 persen, 9,3 persen dan 7,7 persen. Demikian pula halnya sub sektor perkebunan sebagai pemasok utama devisa sektor pertanian, mengalami kenaikan hasil yang menggembirakan. Produksi karet mengalami kenaikan 3 persen, minyak sawit 11,3 persen, inti sawit 19,0 persen, kelapa/kopra 6,9 persen, kopi 6,2 persen, tembakau 7,6 persen, serat gula tebu 6,6 persen, serat karung 19,9 persen dan kakao sebesar 27,0 persen.

Saudara-Saudara Peserta Raker yang saya hormati.

Dalam Repelita V telah digariskan bahwa sasaran pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah rata-rata 5 persen pertahun. Dari sasaran tersebut diharapkan sektor pertanian dapat tumbuh dengan laju 3,6 persen pertahun, sedangkan pertumbuhan sektor industri dan pengolahan ditargetkan 8,5 persen pertahun. Untuk mewujudkan sasaran pertumbuhan sektor pertanian tersebut, berbagai upaya telah dilakukan selama 2 tahun pertama Pelita V ini guna mendorong laju pertumbuhan produksi pertanian baik dalam jumlah maupun kualitasnya.



Sebagai gambaran, dapat saya kemukakan kebijakan peningkatan produksi komoditas pertanian pada Pelita V, sebagai berikut :

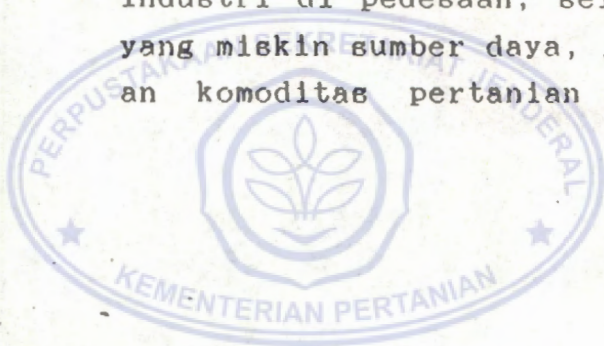
Produksi padi dengan sasaran untuk bisa mencapai 48,7 juta ton pada akhir Repelita V, diperlukan kenaikan rata-rata pertahunnya sebesar 3,2 persen. Begitu pula dalam kurun waktu yang sama produksi palawija seperti jagung diharapkan akan naik 3,0 persen, ubi kayu 1,5 persen, ubi jalar 1,4 persen, kacang tanah 1,3 persen dan kedelai sebanyak 3,4 persen pertahunnya. Khusus mengenai kedelai peningkatan produksinya diarahkan kepada tercapainya swasembada kedelai paling lambat pada akhir Pelita V.

Produksi sub sektor perikanan dalam kurun waktu Repelita V diharapkan mampu meningkat dengan rata-rata 4,8 persen untuk perikanan laut, 2,4 persen perikanan perairan umum dan 9,0 persen perikanan budi daya.

Sama halnya dengan produksi sub sektor lain, sub sektor peternakan juga akan mengalami kenaikan rata-rata pertahun yang cukup tinggi, yaitu produksi daging meningkat rata-rata 6,2 persen, telur 5,2 persen dan susu 12,9 persen. Disamping itu, produksi sub sektor perkebunan juga diharapkan mengalami peningkatan. Kenaikan rata-rata pertahun diharapkan sebesar 22,3 persen bagi komoditas kapas; 21,1 persen produksi kakao; 19,3 persen minyak sawit; 19 persen inti sawit; 7,8 persen tembakau; 5,4 persen karet dan 5,0 persen kelapa.

Saudara-Saudara peserta Raker yang saya hormati.

Proses peningkatan produksi tersebut akan berjalan lancar apabila didukung oleh sistim agribisnis dan agroindustri yang kuat dan optimum dengan pembinaan keseluruhan mata rantai praproduksi, proses produksi dan pasca panen. Dengan berkembangnya agroindustri di pedesaan, selain akan membantu petani nelayan kecil yang miskin sumber daya, juga akan tercipta mata rantai pengolahan komoditas pertanian didalam negeri secara kontinyu yang



memberi dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan nilai tambah pendapatan petani nelayan, perluasan kesempatan berusaha serta menciptakan tambahan lapangan kerja.

Upaya pengembangan sistim agrobisnis dan agroindustri ini, hanya mungkin terjadi apabila pengembangan dan pemwilayahan komoditas pertanian didasarkan atas azas keunggulan komparatif regional dan memenuhi skala ekonomi serta pengendalian produksi secara tertib. Untuk itu, langkah-langkah yang perlu diambil dalam mengarahkan pengembangan sistim agrobisnis dan agroindustri adalah:

1. Memantapkan keterkaitan antara sektor industri dan sektor pertanian.
2. Meningkatkan nilai tambah dengan mengembangkan industri pengolahan hasil, industri alat dan mesin dan industri jasa pertanian dan mendorong sejauh mungkin kemampuan penganeakara - gaman produksinya.
3. Memanfaatkan dan mengembangkan tehnologi tepat guna yang lebih produktif dan efisien.
4. Membina sumber daya manusia khususnya para pengusaha agroindue ti skala kecil dan menengah.

Dalam kaitannya dengan pengembangan agribisnis dan agroindue tri ini, peranan Koperasi Unit Desa (KUD) yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia adalah sangat besar, mengingat kelembagaan ekonomi ini mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan merupakan salah satu kelembagaan pedesaan yang dapat mendorong tumbuhnya kondisi saling menunjang dan keterkaitan yang saling menguntungkan antara pelaku ekonomi , baik usaha negara maupun usaha swasta dengan para petani nelayan selaku produsen utama hasil-hasil komoditas pertanian.



Peserta Raker yang saya hormati.

Arah dan kebijaksanaan pembangunan pertanian ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan meningkatkan ekspor terutama untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat pedesaan sehingga masyarakat pedesaan merasa dan menyadari bahwa pembangunan pertanian adalah dari oleh dan untuk mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan 4 langkah utama dalam Pelita V ini, yang merupakan usaha pokok yaitu : diversifikasi; intensifikasi; ekstensifikasi dan rehabilitasi.

Keempat usaha pokok tersebut dilaksanakan secara terpadu, serasi dan merata disesuaikan dengan keunggulan komperatif wilayah dengan tetap memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta memperhatikan pola kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan arah dan kebijaksanaan yang saya sebutkan tadi, pembangunan sektor pertanian dalam Repelita V mempunyai strategi dasar yaitu .

- a. peningkatan produksi yang berorientasi pada perluasaan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan nilai tambah, efisiensi usaha dan peningkatan pendapatan usahatani-nelayan.
- b. peningkatan kerjasama yang saling mendukung dan saling mendorong untuk maju antara sektor pertanian dan sektor-sektor lainnya.
- c. peningkatan peranan pertanian untuk terwujudnya pembangunan wilayah yang utuh, serasi dan terpadu.

Untuk mendukung terlaksananya strategi dasar tersebut, Departemen Pertanian telah merumuskan kebijaksanaan dan pola pendekatan pengembangan komoditas pertanian berdasarkan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan sektor pertanian. Pola pendekatan tersebut antara lain:



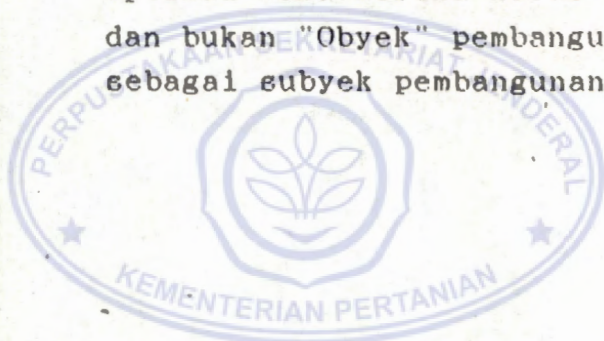
1. Pola Unit Desa
2. Pola Unit Pelayanan Pengembangan (UPP).
3. Pola Perusahaan Pembimbing yang terdiri.
 - a. Perusahaan Inti Rakyat (PIR)
 - b. Perusahaan Pengelola
 - c. Perusahaan Penghela
4. Pola Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN).

Pola Unit Desa dan Pola UPP diterapkan pada tanaman pangan, peternakan dan perkebunan untuk skala usahatani yang kecil. Khususnya di bidang tanaman pangan, penerapan pola Unit Desa dilakukan melalui intensifikasi khusus (insus) sejak tahun 1979, yang telah membuat kita berhasil swasembada beras pada tahun 1984. Untuk memantapkan dan melestarikan swasembada beras dalam Pelita V ini, sejak tahun 1987 telah dikembangkan suatu rekayasa teknis, ekonomi dan sosial dalam skala yang lebih luas dari Insus yaitu Supra Insus dan Insus paket D.

Pola Perusahaan Pembimbing dan Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) adalah pola kerjasama antara perusahaan berskala menengah dan besar dengan petani-nelayan. Dengan kerjasama tersebut golongan kuat membantu golongan lemah baik dalam penyediaan atau pelayanan kemudahan sarana produksi, peralatan dan kredit usahatani maupun pemasaran hasil produksi. Pola ini dimaksudkan untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial di kalangan masyarakat pertanian.

Saudara-Saudara sekalian.

Penerapan keempat pola tersebut di atas adalah sangat tergantung kepada kemampuan dan partisipasi para pelaku pembangunan pertanian, yakni para petani-nelayan beserta keluarganya. Agar para petani-nelayan tersebut dapat berpartisipasi aktif secara optimal maka mereka harus ditempatkan sebagai "Subyek" pembangunan dan bukan "Obyek" pembangunan. Untuk menempatkan petani-nelayan sebagai subyek pembangunan berbagai upaya yang telah dikembangkan



diantaranya dengan cara menghasilkan petani-nelayan terdidik di masa depan yang diharapkan mampu menggerakkan pembangunan di pedesaan secara efisien dan produktif.

Petani-nelayan terdidik yang saya maksudkan itu, bercirikan:

1. Mampu berbicara dalam arti mengemukakan pendapat.
2. Mampu mengambil keputusan sendiri.
3. Mampu membiayai usahatani-nelayan dengan upaya sendiri baik dari dana sendiri maupun dari sumber kredit yang sehat sehingga dapat mengembangkan usaha yang menguntungkan dan tumbuh berkesinambungan.
4. Mampu berperan dalam berbagai kegiatan masyarakat di pedesaan.

Salah satu upaya yang telah dikembangkan sejak Pelita I, II, III, IV sampai sekarang adalah penyertaan secara aktif para petani-nelayan dalam wadah kelompok petani-nelayan. Pembinaan petani-nelayan melalui kelompok ini dimaksudkan agar kelompok petani-nelayan tersebut dapat melaksanakan "tri-fungsi" kelompok petani-nelayan yaitu sebagai kelas belajar, sebagai unit produksi dan sebagai wahana kerjasama antar anggota kelompok. Dengan terlaksananya ketiga fungsi tersebut, diharapkan tercipta suatu iklim keserasian, keakraban, kesamaan kepentingan dan saling percaya mempercayai antara sesama anggota kelompok guna mewujudkan tujuan bersama yaitu peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan para petani-nelayan beserta keluarganya.

Saudara-Saudara sekalian.

Dewasa ini, kelompok petani-nelayan di seluruh Indonesia telah mencapai \pm 248.000 kelompok dengan jumlah anggota \pm 13.800.000 orang atau rata-rata 56 anggota setiap kelompok. Bila jumlah anggota kelompok ini dibandingkan dengan jumlah Kepala Keluarga tani yang mencapai 21 juta, maka ini berarti partisipasi petani-nelayan dalam kelompok petani-nelayan telah mencapai 66 persen.



Sementara itu, pertumbuhan KUD sampai saat ini telah mencapai 8.049 KUD dengan jumlah anggota \pm 8.797.800 orang atau rata-rata 1.093 anggota setiap KUD. Dari jumlah anggota KUD tersebut, sekitar \pm 44 persen atau 3.885.500 orang berasal dari petani/kontaktani-nelayan. Angka-angka ini memberi gambaran kepada kita semua, bahwa setiap KUD telah mampu mengorganisir rata-rata 30 kelompoktani-nelayan jumlah dengan rata-rata anggota 448 orang petani nelayan per KUD.

Kondisi yang cukup menggembirakan dewasa ini, adalah keterlibatan anggota kelompok/kontaktani-nelayan dalam kepengurusan KUD. Data per 30 September 1990 menunjukkan bahwa dari 61.910 orang pengurus KUD, 63 persen diantaranya atau 38.938 orang berasal petani-nelayan dengan rincian; 41 persen (16.033 orang) berasal dari kontaktani-nelayan dan 59 persen (22.905 orang) berasal dari anggota kelompoktani-nelayan.

Saudara-Saudara sekalian.

Kelompoktani-nelayan dan KUD mempunyai tugas, fungsi dan skala yang berbeda. Meskipun keduanya berbeda tetapi dalam melaksanakan fungsinya masing-masing mempunyai keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain serta membutuhkan kerjasama yang saling membutuhkan karena keduanya mempunyai tujuan dan sasaran yang sama yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani-nelayan beserta keluarganya. Untuk itu dalam rangka meningkatkan hubungan yang melembaga antar kelompoktani-nelayan dan KUD telah dikembangkan dan dibina hubungan kerjasama, baik dalam bentuk "mitra kerja" maupun dalam bentuk "mitra usaha".

Kelompoktani-nelayan sebagai mitra kerja KUD, merupakan wadah terjadinya proses kerjasama yang saling mendukung dan menunjang, terutama dalam kerjasama pemupukan modal melalui tabungan kelompoktani-nelayan, guna memperkuat modal usaha KUD. Data yang tersedia menunjukkan bahwa mobilisasi dana kelompoktani-nelayan cenderung meningkat dengan jumlah tabungan yang cukup menggembira



kan. Total tabungan kelompok tani-nelayan sampai saat ini mencapai \pm Rp 16,1 milyar dengan jumlah kelompok tani-nelayan penabung sebanyak 152.932 kelompok. Dari total tabungan tersebut, tercatat \pm 54 persen (Rp 8,78 milyar) di simpan pada KUD di seluruh Indonesia, baik dalam bentuk uang tunai (96 persen) maupun dalam bentuk natura (4 persen).

Selanjutnya, sebagai mitra usaha KUD, kelompok tani-nelayan ditunjuk sebagai alat perpanjangan tangan KUD dalam rangka pengembangan usaha, guna mendekatkan pelayanan sarana produksi dan kredit bagi kelompok beserta keluarganya. Sampai saat ini, tercatat 16.600 kelompok (6,7 persen) dari total kelompok tani-nelayan atau 72 persen dari jumlah kelompok tani-nelayan Kelas Madya dan Utama yang telah ditunjuk sebagai Tempat Pelayanan Koperasi (TPK). Meskipun TPK-TPK tersebut masih berstatus non organik, tetapi diharapkan pada tahun mendatang peranannya dapat lebih ditingkatkan sehingga keberadaan TPK-TPK tersebut dapat memberi andil yang lebih besar dalam memperkuat pengembangan usaha KUD, utamanya dalam meningkatkan pelayanan kepada petani-nelayan.

Saudara-Saudara Peserta Raker yang saya hormati.

GBHN tahun 1988 telah mengamanatkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pertanian, keikutsertaan petani perlu lebih ditingkatkan melalui Koperasi Unit Desa dan Kelompok tani, sedangkan usaha pertanian yang besar didorong agar dapat membantu pengembangan usaha pertanian rakyat antara lain, melalui pola perusahaan inti rakyat. Selanjutnya disebutkan pula perlunya peran serta KUD terutama dalam pemasaran hasil.

Bertolak dari amanat GBHN 1988 tersebut Departemen Pertanian dan Departemen Koperasi mengeluarkan serangkaian kebijaksanaan masing-masing dalam bentuk Instruksi Menteri Pertanian No.4 tahun 1988 dan Instruksi Menteri Koperasi No.2 tahun 1988. Inti dari kedua instruksi tersebut adalah menjalin dan meningkatkan



hubungan kerjasama yang melembaga antara kelompok tani-nelayan dan KUD, agar tercipta rasa saling menguntungkan, saling memerlukan dan saling percaya satu sama lain yang berorientasi kepada norma, obyektifitas, kebersamaan dan ketergantungan guna penetapan tujuan bersama yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan petani-nelayan pada khususnya.

Disamping kedua instruksi diatas telah diterbitkan pula Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi Nomor 571/Kpts/Kb. 510/8/1988 dan 03/SKB/M/VIII/1988 yang menyangkut tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) di wilayah Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) dan Unit Pelaksana Proyek (UPP). Tujuan dari Surat Keputusan Bersama (SKB) ini, adalah meningkatkan produktivitas dan nilai tambah usaha petani peserta PIR-BUN dan UPP guna memperkuat kerangka dasar dan arah pengembangan KUD sebagai wadah ekonomi petani sekaligus mitra kerja perusahaan inti pada pola PIR-BUN dan UPP sehingga merupakan satu kesatuan utuh dalam berupaya mewujudkan tujuan bersama yaitu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya.

Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati,

Satu hal yang menggembirakan sejak diterbitkan SKB ini adalah telah terbentuknya 164 buah KUD di wilayah PIR-BUN dan 14 buah di wilayah UPP. Dari jumlah tersebut, 12 KUD di antaranya telah meningkat statusnya menjadi KUD Mandiri, yaitu 10 buah KUD di wilayah PIR-BUN yang berlokasi di Propinsi Jambi dan Riau dan 2 buah KUD di wilayah UPP yang berlokasi di Propinsi Sumatera Selatan. Meskipun partisipasi aktif petani di wilayah PIR-BUN dan UPP ini masih rendah atau hanya mencapai 8 persen (187.200 orang) dari anggota yang terdaftar di KUD sebanyak 2,3 juta orang, tetapi upaya kita selama ini, saya anggap telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran petani beserta keluarganya untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi pedesaan melalui peransertanya dalam KUD.



Dalam peningkatan produksi gula peranan KUD tidak kurang pentingnya, terutama dalam mendukung pelaksanaan program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Data per 31 Desember 1990 menunjukkan bahwa 659 buah KUD telah berperan aktif dalam penyaluran sarana produksi dan kredit program TRI. KUD-KUD tersebut berhasil menyalurkan kredit sebesar l.k. Rp. 152,25 milyar untuk pengembangan areal TRI seluas 165.560 Ha pada musim tanam tebu 1990/1991.

Di bidang sub sektor perikanan sampai saat ini telah terbentuk 659 buah KUD Mina dengan anggota 280.125 orang nelayan. KUD-KUD Mina ini berperan aktif dalam pengadaan dan penyaluran sarana kebutuhan nelayan serta pemasaran hasil yang meliputi kegiatan-kegiatan antara lain : penangkapan ikan, pengadaan dan penyaluran sarana perikanan serta kebutuhan pokok anggota, usaha simpan pinjam, penyaluran bahan bakar dan menyelenggarakan pelelangan ikan. Khusus kegiatan terakhir ini tercatat 170 buah KUD (25,28 %) telah menangani pelelangan ikan di Tempat Pengadaan Pendaratan ikan (TPI) yang tersebar di 14 propinsi. Jumlah TPI yang telah dibangun pemerintah (Pusat dan Daerah) sampai saat ini telah mencapai 519 buah dan 25 buah Pelabuhan Perikanan yang sudah operasional.

Di bidang sub sektor peternakan, KUD-pun mempunyai peranan yang sangat penting, terutama dalam penanganan hasil-hasil usahatani peternak. Sejak berdirinya Koperasi-Koperasi di daerah penghasil susu, rantai tata niaga susu semakin baik karena hubungan kerjasama antara penghasil susu (peternak sapi perah), Koperasi dan pabrik-pabrik pengolahan susu semakin baik pula. Sampai sekarang ini terdapat 181 koperasi/KUD yang bergerak dalam pemasaran produksi susu dengan anggota sebanyak l.k. 74.000 peternak.



Dewasa ini pengembangan sapi perah ditempuh dengan pola pengembangan keluarga melalui PIR Persusuan dan pengorganisasian Koperasi. Disamping itu juga ditempuh pengembangan wilayah persusuan yang didukung oleh agro-industri. Dengan upaya pengembangan ini diharapkan Koperasi/KUD di wilayah penghasil susu dapat berperan lebih aktif terutama dalam penyediaan pakan untuk sapi perah, sarana kebutuhan peternak dan pemasaran susu sehingga pelayanan peternak akan lebih terjamin pemasaran produksi dan sarana produksinya.

Saudara-Saudara yang saya hormati,

Dengan adanya berbagai kebijaksanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Departemen Pertanian dan Departemen Koperasi sependapat untuk meningkatkan hubungan kerjasama yang melembaga. Kelompok-tani-nelayan dan KUD dengan menitik beratkan kesadaran insan petani-nelayan untuk menjadi anggota KUD yang aktif berperan dalam mengembangkan organisasi, menjadi Pengurus dan Badan Pemeriksa guna mempercepat terwujudnya KUD Mandiri dalam Pelita V. Oleh karena itu untuk mewujudkan kelembagaan ekonomi yang tangguh di pedesaan, perlu dibina dan ditingkatkan azas keterbukaan dan kesamaan pandangan baik oleh kelompok-tani-nelayan dan KUD maupun aparat pembina di daerah. Dengan cara demikian saya kira harapan kita untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan antara kelompok-tani-nelayan dan KUD dapat terwujud secepatnya.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembangkan hubungan kerjasama yang melembaga antara kelompok-tani-nelayan dengan KUD. Salah satu upaya untuk mempercepat terwujudnya hubungan melembaga tersebut adalah dikembangkannya "Sistem Dorong" dan "Sistem Tarik". Sistem Dorong dilaksanakan melalui peningkatan penyelenggaraan pelatihan bagi aparat dan kursus perkoperasian bagi kontaktani-nelayan.



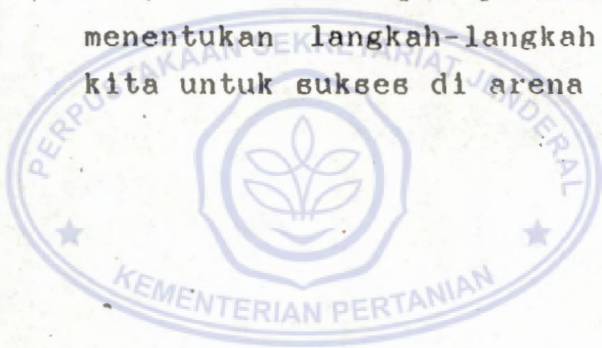
Sedangkan Sistem tarik mengupayakan agar KUD dapat meningkatkan mutu pelayanan bagi anggota, baik dalam bentuk pengadaan sarana produksi yang memenuhi 5 tepat maupun penyaluran kredit serta pelayanan pengolahan hasil dan pemasaran.

Selama kurun waktu dua tahun (Tahun Anggaran 1988/1989 dan 1989/1990), Departemen Pertanian melalui Balai Balai Latihan yang ada di daerah telah melaksanakan kursus perkoperasian bagi aparat (Penyuluh Pertanian dan Widyaiswara) sebanyak 1.439 orang, dan Kepala Desa sebanyak 900 orang. Dalam waktu yang sama juga telah dilakukan kursus perkoperasian bagi kontaktani-nelayan sebanyak 8.583 orang. Pelaksanaan pelatihan dan kursus perkoperasian ini terutama dimaksudkan untuk lebih meningkatkan motivasi petani-nelayan dalam berperan serta secara aktif dan memperkuat serta mengembangkan KUD.

Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati,

Upaya pemerintah selama ini untuk mendorong dan memotivasi petani-nelayan melalui kegiatan penyuluhan pertanian, telah menunjukkan hasil yang menggembirakan; walaupun disadari masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar kelompok-tani-nelayan mampu membina hubungan kerjasama yang serasi dan selaras dengan KUD.

Tantangan koperasi sebagai organisasi secara makro adalah globalisasi ekonomi yang antara lain terdapat kecenderungan pergeseran dalam faktor-faktor keuntungan komparatif dalam perekonomian Internasional. Dengan berkembangnya barang-barang sintetis, komoditi yang tadinya memiliki keuntungan komparatif menjadi tidak lagi. Dengan perkembangan teknologi (robot-robot), tenaga kerja yang banyak di Indonesia tak lagi merupakan faktor yang memiliki keuntungan komparatif yang menentukan dalam produksi sesuatu komoditi. Kondisi-kondisi ekonomi Internasional demikian itu, harus mendapat pemikiran yang matang dari kita semua dalam menentukan langkah-langkah yang tepat guna mendorong koperasi kita untuk sukses di arena percaturan perekonomian dunia.



Secara mikro, dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya koperasi, misalnya KUD, telah dilibatkan dalam "bisnis" penyediaan sarana produksi dan peralatan disatu pihak dan dalam pemasaran hasil-hasil pertanian dilain pihak. Dorongan demikian itu, hendaknya menimbulkan dinamika partisipasi masing-masing anggota, sehingga secara bertahap dapat tumbuh dan berkembang bukan saja menjadi organisasi ekonomi yang mandiri, tetapi secara efektif mampu meningkatkan peranannya dalam perekonomian, seperti menguasai pangsa pasar yang pada gilirannya akan membawa anggota-anggotanya ketingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.

Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati.

Keberhasilan pembangunan pertanian diantaranya tercermin dalam perubahan perilaku para petani/kelompoktani-nelayan dalam bentuk sikap yang dinamis, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan, khususnya dalam memperkuat posisi KUD di pedesaan dan sekaligus mendorong dan mengembangkan lembaga ekonomi pedesaan tersebut menjadi mandiri dan berakar dalam masyarakat. Namun demikian, mengingat semakin beratnya tantangan dalam pembangunan pertanian, maka peranan KUD masih perlu terus dipacu agar tetap dapat memenuhi kebutuhan pembangunan yang semakin pesat.

Beberapa masalah yang terbentang luas dihadapan kita, masih memerlukan perhatian dan upaya pemecahan yang konkrit, antara lain:

1. Menurut ramalan Biro Pusat Statistik (ramalan 1) produksi padi tahun 1991 dibandingkan dengan angka-angka sementara 1990, turun 1,68 persen. Hal ini berkaitan dengan ramalan musim kemarau yang akan lebih panjang dan kering.



2. Peningkatan produksi melalui program diversifikasi belum menunjukkan hasil yang memuaskan akibat belum tersedianya prasarana paket teknologi, kegiatan agrobisnis dan sistem pemasaran yang efisien. Selain itu pola diversifikasi belum memanfaatkan sumberdaya secara optimal yaitu penyebaran pengembangan pertanian yang belum sepenuhnya berdasarkan "resource based".
3. Pola konsumsi kalori masyarakat masih terlalu didominasi oleh padi-padian dengan pangsa sebesar 66,0 persen sedangkan dari sumber protein hewani (ternak dan ikan) hanya mencapai 2,6 persen, sumber lemak dan minyak sebesar 12,0 persen, gula 5,4 persen, sayuran dan buah-buahan 2,0 persen.
4. Kurangnya keterpaduan program dan pelaksanaan pembangunan pertanian antar sektor, antar sub sektor, antar wilayah maupun antar kegiatan dalam sistem agribisnis, antar industri hulu dan industri hilir. Kontribusi agro industri terhadap total nilai tambah sektor industri menurun dengan cepat misalnya industri makanan, minuman dan tembakau, menurun dari 48,5 persen pada tahun 1974 menjadi 17,8 persen pada tahun 1988. Sedangkan ekspor masih didominasi oleh bahan mentah.
5. Secara umum pengembangan di bidang agro-industri terhambat sebagai akibat perhatian yang relatif kecil oleh berbagai sub sektor terhadap upaya pengembangan dibidang ini. Disamping itu iklim untuk investasi juga belum kondusif yang terlihat dari kendala-kendala dibidang peraturan perundang-undangan seperti ketentuan hak guna usaha, perpajakan, peraturan impor-ekspor disamping undang-undang dan peraturan penanaman modal. Selanjutnya paket teknologi maju masih belum berkembang dalam masyarakat. Demikian pula dengan informasi pasar yang masih lemah.
6. Masalah kelestarian sumber daya alam sangat berpengaruh terhadap usaha-usaha peningkatan produksi pertanian dewasa ini maupun masa mendatang. Menjaga kelestarian sumber daya alam berarti juga menyediakan modal bagi generasi mendatang. Penggunaan sumber daya alam yang melebihi potensi lestari yang ada dengan tidak mengikuti pola tata ruang perlu mendapat perhatian kita secara khusus.



Apabila hal ini tidak ditangani secara terpadu antar berbagai instansi terkait tidak mustahil bahwa kemerosotan kualitas sumber daya alam akan menjadi masalah yang lebih rawan di masa mendatang.

Saudara-Saudara peserta Raker yang saya hormati.

Pemerintah secara konsisten berusaha menumbuh kembangkan koperasi khususnya KUD di pedesaan. Dengan berbagai upaya, pemerintah berusaha agar alokasi sumber daya dalam perekonomian Indonesia ini berlangsung secara demokratis sehingga bukan saja mendapat efisiensi setinggi-tingginya, tetapi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat sebesar-besarnya. Oleh karena itu beberapa hal yang perlu mendapat perhatian di dalam dukungan KUD terhadap pembangunan pertanian adalah :

1. KUD yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai penyalur pupuk bersubsidi sejumlah \pm 3.000 buah sangat ikut menentukan keberhasilan intensifikasi. Diharapkan agar KUD tersebut seluruhnya aktif dan dinamis menebus dan menyalurkan pupuk sesuai alokasi yang diberikan PT. Pusri.
2. Dalam rangka penebusan dan penyaluran saprodi, agar KUD dapat dibina untuk bekerja secara lebih aktif sehingga petani dapat membeli sarana produksi dengan tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga dan tepat mutu.
3. Untuk melayani para petani yang memerlukan kredit melalui KUT maupun bentuk kredit lainnya KUD diharapkan dapat membantu. Hendaknya para petani yang secara baik telah mengembalikan kreditnya kepada KUD dapat dilayani kembali dengan sebaik-baiknya pula.
4. Kedudukan KUD sebagai Pos Simpul Kordinasi (Posko) A3, agar tetap diperkuat dengan senantiasa melaksanakan pertemuan dan musyawarah dengan pengurus Kelompok tani dalam rangka menyusun



rencana kebutuhan, melaksanakan penyaluran (sebagai TPK), melakukan pemasaran hasil dan gerakan pengembalian kredit. Jika Posko A3 ini bisa berjalan secara tetap dan berkesinambungan, maka keterpaduan KUD - Kelompok tani akan lebih cepat terwujud.

5. KUD dapat bertindak sebagai mitra kerja para penyuluh pertanian, yaitu dengan membantu memberikan penjelasan tentang perlunya menggunakan/menerapkan anjuran teknologi sesuai dengan penyuluhan yang dilakukan oleh para penyuluh. Demikian pula dalam penjualan sarana produksi supaya sekaligus membantu proses alih teknologi.
6. Untuk mengantisipasi semakin sulitnya memperoleh kredit bank, KUD sejak dini perlu menggiatkan tabungan anggota atau tabungan Kelompok tani. Tabungan ini dimanfaatkan terutama untuk membeli sarana produksi yang dibutuhkan petani setiap musim tanam.
7. Meningkatkan pembinaan terhadap KUD-KUD yang belum mempunyai klasifikasi baik dari segi kepengurusan dan usaha maupun pelayanan terhadap anggota/ petani-nelayan. Berdasarkan data yang ada sampai saat ini tercatat 26 persen dari jumlah keseluruhan KUD belum mempunyai klasifikasi.

Selain dari pembinaan kepada KUD, kiranya aparat Departemen Koperasi yang ada di daerah juga diminta dukungannya dalam meningkatkan pembangunan pertanian melalui :

1. Peningkatan peranan Kanwil Koperasi sebagai salah satu unsur Satuan Pembina Bimas ditingkat Propinsi, terutama dalam rangka memonitor dan mengevaluasi berbagai sarana produksi dan kredit. Demikian pula peranannya sebagai Ketua Tim Interdep Penyalur pupuk, supaya selalu melakukan langkah-langkah koordinatif memecahkan permasalahan di daerahnya.



2. Peningkatan peranan para Kandep Koperasi di tingkat Kabupaten. Hal ini sangat penting karena mereka langsung membina KUD di wilayahnya. Kandep Koperasi melalui wadah Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten supaya tetap melakukan musyawarah dengan unsur/instansi terkait dilingkup Kabupaten, untuk mengidentifikasi permasalahan, mencari upaya pemecahan dan melakukan tindak lanjut/gerakan penanggulangan permasalahannya.

Saudara-Saudara Peserta Raker yang saya hormati.

Demikianlah uraian dan harapan saya, diiringi doa kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, semoga upaya kita selalu diridhoiNya. Selamat melaksanakan Rapat Kerja, mudah-mudahan dapat menghasilkan rumusan yang konkrit guna kepentingan Pembangunan Nasional.

Wabillahi Taufik Walhidayah.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, M a r e t 1991.

MENTERI PERTANIAN

Ir. Wardoyo

PENG. KRN/SUR



40





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN

pada

PERESMIAN SELESAINYA REHABILITASI SOSIAL
DAERAH KUMUH DALAM RANGKA PERINGATAN HKS^N 1990
DAN PENCANANGAN DIMULAINYA GERAKAN NASIONAL
PENINGKATAN PENGGUNAAN ASI

Tanggal: 11 Maret 1991

Saudara Gubernur KDH Tingkat I Sulawesi Selatan yang terhormat,
Saudara Walikotamadya dan Saudara-Saudara para undangan yang
terhormat,

Assalamu'alaikum Warochmatullahi Wabarokatuh,

Pertama-tama pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah
kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berkat perkenannya, pada hari ini kita dapat berkumpul
bersama-sama pada Peresmian selesainya Rehabilitasi Sosial Daerah
Kumuh dalam rangka Peringatan HKS^N 1990 dan ^{Alkoholan} Peneanangan dimulai-
nya Gerakan Nasional Peningkatan Penggunaan ASI.

Sekitar dua setengah bulan yang lalu, pada Peringatan
Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKS^N) tanggal 20 Desember
1990, ^{Saya mewakili} Saudara Menteri Sosial telah datang ke kota ini untuk
meresmikan dimulainya kegiatan rehabilitasi sosial daerah kumuh.
Hari ini tanggal 11 Maret 1991, saya berada disini untuk meresmikan
dan sekaligus menyaksikan hasil-hasil kegiatan tersebut.



Peresmian selesainya rehabilitasi sosial daerah kumuh hendaknya tidak ditafsirkan sebagai dihentikannya upaya untuk memperbaiki semua segi kehidupan masyarakat di daerah kumuh. Dalam pembangunan tidak dikenal istilah berhenti. Makna kegiatan kita hari ini adalah diakhirinya suatu tahap awal dari serangkaian proses panjang pembangunan daerah kumuh di seluruh Indonesia sebagai bagian tak terpisahkan dari Pembangunan Nasional.

Saudara-Saudara sekalian,

Rehabilitasi sosial daerah kumuh merupakan upaya untuk menyentuh, merangsang dan memancing peran serta masyarakat dengan dilandasi jiwa dan semangat kesetiakawanan sosial. Melalui rehabilitasi sosial daerah kumuh potensi seluruh lapisan masyarakat digugah dan digerakkan untuk memantapkan, mengembangkan serta melestarikan nilai kesetiakawanan sosial sebagai warisan budaya bangsa guna kepentingan pembangunan.

Keberhasilan rehabilitasi sosial daerah kumuh ditentukan oleh ketepatan dan keterpaduan kegiatan-kegiatan sebelum, selama dan sesudahnya. Upaya pokok sebelum dilaksanakannya kegiatan berupa persiapan dan penyusunan rencana-rencana yang diperlukan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kumuh serta kemampuan wilayah setempat. Kegiatan selama rehabilitasi sosial dititik beratkan pada menggerakkan daerah kumuh dalam membangun daerahnya secara bergilir dengan dukungan serta unsur-unsur masyarakat lainnya (ABRI/Karya Bhakti ABRI, Generasi Muda, Organisasi Sosial Masyarakat, Pemuka Masyarakat, Pengusaha dan sebagainya).

Selanjutnya upaya untuk menindak-lanjuti apa yang telah dicapai hari ini merupakan inti rehabilitasi sosial daerah kumuh yang pelaksanaannya diawali pada Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Adanya tindak lanjut yang sinambung merupakan bukti berfungsinya mekanisme peran serta masyarakat diwilayah ini.



Saya mengharapkan kiranya hal ini benar-benar diperhatikan dan menjadi tantangan semua pihak dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Saya juga mengharapkan kiranya pengalaman-pengalaman dalam rehabilitasi sosial daerah kumuh dalam rangka peringatan HKSNI tahun 1990 dapat dijadikan pedoman dalam menentukan serta melaksanakan gerak langkah pembangunan selanjutnya.

Di sektor pertanian, mulai tahun anggaran 1991/1992 akan diadakan program terobosan penanggulangan kemiskinan. Program ini akan memberikan paket-paket bantuan disertai dengan teknologi yang tepat sehingga potensi yang terbatas yang dimiliki oleh para petani dapat dikembangkan. Proyek ini akan tersebar di 17 Propinsi dengan kelompok sasaran 65.000 rumah tangga miskin.

Saudara-Saudara sekalian,

Pada acara puncak Peringatan Hari Ibu ke-62 di Balai Sidang Senayan pada tanggal 22 Desember 1990 yang lalu, Bapak Presiden telah mengajak bangsa Indonesia untuk melaksanakan upaya peningkatan penggunaan ASI sebagai suatu gerakan nasional. Pencanangan Gerakan Nasional ini menunjukkan betapa pentingnya upaya peningkatan penggunaan ASI dalam rangka pembangunan Nasional, khususnya dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas manusia Indonesia, yang harus dimulai sedini mungkin dalam kehidupan seseorang.

Di Indonesia usaha-usaha untuk menggalakkan pemberian ASI dalam rangka meningkatkan status kesehatan dan gizi bayi dan anak telah lama dilaksanakan. Namun kesadaran masyarakat, utamanya Ibu hamil, bersalin dan menyusui tentang pentingnya Air Susu Ibu (ASI) sebagai makanan bayi yang terbaik dan manajemen laktasi



masih perlu ditingkatkan. Walaupun sebagian besar Ibu-Ibu di Indonesia menyusui bayinya namun berbagai studi dan pengamatan menunjukkan bahwa selama dasa warsa terakhir ini terdapat kecenderungan peningkatan penggunaan pengganti air susu ibu atau susu formula terutama di perkotaan.

ASI sangat bermanfaat untuk menurunkan kematian bayi dengan mengurangi diare, infeksi saluran pernafasan akut, penghematan pengeluaran keluarga, menjarangkan kelahiran dan meningkatkan keakraban ibu-anak yang berefek positif terhadap perkembangan kepribadian anak di kemudian hari.

Dari aspek sektor pertanian, maka yang terkait langsung dengan masalah ASI ini adalah pengadaan atau produksi berbagai komoditas pertanian, utamanya hortikultura, yang sangat dibutuhkan oleh setiap ibu pada menjelang dan selama masa menyusui bayinya. Untuk ini Departemen Pertanian dewasa ini telah mulai dan akan terus ditingkatkan upaya memacu produk-produk yang diperlukan oleh para Ibu sejak dari telur, susu, daging, ikan sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya.

Saudara-Saudara hadirin yang saya hormati,

Gerakan Nasional Peningkatan Penggunaan ASI dilaksanakan melalui berbagai program, proyek dan kegiatan, baik yang khusus maupun yang terintegrasi dalam program, proyek dan kegiatan lain, seperti UPGK, pelatihan kader Posyandu, 10 Program PKK, BKB, Perkumpulan Peminat kesejahteraan Ibu dan Anak, Kejar Paket A, dan sebagainya. Mengingat bahwa upaya peningkatan penggunaan ASI bersifat multi-sektoral dan multi-disiplin maka diperlukan pengkoordinasian yang mantap sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pemantauan dan penilaian, guna mencegah terjadinya tumpang tindih program.



Gerakan Nasional Peningkatan Penggunaan ASI dilaksanakan melalui :

- a. Meningkatkan dan memantapkan kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) tentang ASI yang ditujukan kepada berbagai kelompok sasaran secara lebih efektif.
- b. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas kesehatan tentang manajemen laktasi sehingga mereka lebih mampu memberikan bimbingan teknis kepada para kader, ibu hamil, ibu menyusui, dan masyarakat luas.
- c. Pengadaan fasilitas pelayanan sosial dan dukungan bagi wanita bekerja untuk menyusui bayinya terutama menyusui secara eksklusif, antara lain dengan pengadaan Tempat Penitipan Anak (TPA), cuti hamil dan bersalin yang lebih luwes dan lain-lain.
- d. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan dari perundang-undangan dan peraturan yang berhubungan dengan upaya peningkatan penggunaan ASI.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang dengan kerelaan dan kesetiakawanan sosial telah bersama-sama memberikan sumbangan guna berhasilnya daerah kumuh. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat-NYA kepada kita sekalian.

Wassalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh.

Menteri Pertanian,

Ir. Wardoyo



41





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA ACARA WISUDA ANGKATAN KE-2 PROGRAM DIPLOMA III
AHLI PENYULUHAN PERTANIAN (D3 APP)
12 MARET 1991

Assalamu'alaikum Warokhmatullohi Wabarokatuh,
Saudara Rektor Universitas Gadjah Mada Yang terhormat,
Kepala Diklat APP Yang terhormat,
Saudara-Saudara Dosen Yang terhormat,
Para Wisudawan dan Keluarganya Yang terhormat, serta
Para undangan dan hadirin yang saya hormati.

Pertama-tama marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama untuk menyaksikan acara wisuda yang kedua kalinya pada Program D3 APP Departemen Pertanian. Mudah-mudahan rahmat dan hidayah-Nya akan selalu menyertai kita semua, baik selama berlangsungnya acara ini, maupun pada masa-masa yang akan datang.

Para hadirin Yang terhormat,

Kiranya tidaklah berlebihan bila pada kesempatan ini, saya mengutarakan rasa bahagia dan bangga sekaligus penghargaan kepada para pelaksana program D3 APP Departemen Pertanian, baik yang ada di daerah maupun di Pusat.



Oleh karena adanya acara wisuda ini tidak hanya membuktikan kemampuan dari para wisudawan, tetapi juga merupakan bukti kemampuan dari lembaga yang menghasilkannya. Perlu diketahui bersama bahwa program D3 APP Departemen Pertanian dilaksanakan di enam Propinsi; Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Pada tahun akademik 1990/1991 ini akan diwisuda untuk kedua kalinya sebanyak 598 orang lulusan. Dari 598 lulusan tersebut terperinci :

299 dari Program Studi Pertanian,
181 dari Program Studi Peternakan, dan
118 dari Program Studi Perikanan.

Para hadirin yang terhormat,

Program D3 APP diselenggarakan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan pertanian, terutama dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di sektor pertanian yang menunjang tercapainya pertanian maju, efisien dan tangguh yang kita idam-idamkan. Sebagaimana sudah menjadi tekad kita bersama untuk tetap melestarikan swasembada pangan, bahkan mengembangkan diversifikasi pangan, agroindustri dan agrobisnis. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka usahatani harus meninggalkan pola usaha yang hanya berdasarkan pada perkembangan sumber daya alam, dan mengalihkannya pada perkembangan teknologi dan industri.

Pengembangan agroindustri ini tidak saja perlu dilakukan dalam bentuk industri-industri besar di kota-kota, tetapi juga industri-industri rumah tangga di pedesaan. Banyak manfaat dapat diperoleh dalam pengembangan agroindustri di pedesaan. Disamping meningkatkan nilai tambah dan menjamin pemasaran hasil-hasil pertanian, pengembangan agroindustri dapat membuka lapangan-lapangan kerja baru di pedesaan, dan dengan demikian akan menghambat arus urbanisasi dari desa ke kota-kota besar.



Pola usahatani berdasarkan perkembangan teknologi dan industri menuntut kepekaan kita terhadap hasil-hasil penelitian terbaru dan menuntut kemampuan kita mengaplikasikannya di lapang. Namun dari kenyataan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan arus informasi teknologi antara lembaga-lembaga ilmiah dan riset dengan para pelaksana di lapangan, terutama di daerah pedesaan yang merupakan basis kegiatan usahatani. Kesenjangan tersebut dapat dipersempit apabila kemampuan para Penyuluh Pertanian Lapangan, sebagai aparat pertanian terdepan mampu menyerap teknologi yang cepat dan mampu menyebarluaskan secara cepat pula kepada masyarakat tani. Untuk maksud tersebut dasar pendidikan para penyuluh pertanian lapangan perlu ditingkatkan melalui jenjang pendidikan formal, yaitu pendidikan profesional pada Program Diploma selama tiga tahun.

Program D3 APP Departemen Pertanian telah dirancang sedemikian rupa untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut di atas. Kurikulum yang digunakan saat ini disusun dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Ditjen Pendidikan Tinggi dan Konsorsium Ilmu-Ilmu Pertanian, serta Bimas dan telah disempurnakan sesuai dengan kebutuhan. Kurikulum dirancang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga mengembangkan sikap profesional Kepemimpinan serta kepribadian yang tinggi yang dilandasi nilai-nilai luhur dan Moral Pancasila. Dengan demikian diharapkan melalui program ini akan dihasilkan lulusan dengan profil kemampuan sebagai berikut :

- Memahami pengetahuan psikologi sosial, komunikasi massa dan teknologi usahatani sehingga mampu melaksanakan tugas penyuluhan secara tepat sesuai dengan perubahan kemajuan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
- Mampu menerapkan teknologi produksi, ekonomi dan rekayasa sosial sehingga dapat melaksanakan tugas penyuluhan secara efektif-efisien sesuai dengan sistem usahatani yang dibina.



- Memiliki pengetahuan sistem dan metoda penyuluhan pertanian yang cukup luas sehingga mampu merancang/mempergunakan metoda alih teknologi dan pembinaan kelembagaan sosial ekonomi secara tepat guna dan efisien.

Program D3 APP Departemen Pertanian yang telah berdiri empat tahun yang lalu, secara bertahap terus mengembangkan sarana akademik, diantaranya telah didirikan Pusat Pelayanan pada Masyarakat Tani dan Nelayan (Farm Service Centre). Mahasiswa disamping belajar juga mengabdikan pada masyarakat disekitar kampus dengan memberikan pelayanan terhadap perkembangan teknologi pertanian. Demikian pula mereka diwajibkan mengikuti Kuliah Kerja Lapangan (KKL) selama dua bulan bekerjasama dengan Balai Penyuluhan Pertanian untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh langsung pada masyarakat tani dan nelayan di pedesaan. Pada saat ini Kelembagaan D3 APP Departemen Pertanian dipersiapkan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu dari DIKLAT menjadi AKADEMI dan akan diupayakan tenaga pengajar menjadi jabatan fungsional. Dengan demikian setiap tenaga pengajar dengan mantap melaksanakan tugasnya sebagai tenaga fungsional dan dituntut untuk terus mengembangkan diri dalam profesinya secara konsisten.

Para hadirin Yang terhormat,

Khususnya kepada para wisudawan, Saya berpesan agar rasa syukur, rasa bahagia dan kebanggaan yang ada pada diri Saudara saat ini, hendaknya disertai pula tekad yang kuat untuk terus mengembangkan kemampuan yang telah dimiliki dalam menjalankan tugas-tugas yang akan dihadapi nanti. Pendidikan di D3 APP Departemen Pertanian adalah suatu "nilai tambah" yang melekat pada diri Saudara masing-masing. Arti dari "nilai tambah" tersebut akan tergantung dari kadar aktifitas Saudara dalam pengamalannya kepada masyarakat tani-nelayan di tempat Saudara bekerja.



Apabila aktifitas Saudara setelah kembali dari sini sama dengan sebelum berangkat, maka nilai tambah tersebut tidak akan berarti. Terlebih lagi apabila predikat yang melekat dalam diri masing-masing hanya sekedar kebanggaan yang membebani instansi masing-masing, karena harus mengeluarkan tambahan anggaran sebagai konsekuensi bertambahnya nilai tambah Saudara. Sekali lagi saya tekankan bahwa nilai tambah Saudara bukan terletak dari Status dan Predikat tetapi lebih dititik beratkan pada karya nyata yang dihasilkan. Investasi untuk memberikan nilai tambah tersebut bagi masing-masing individu tidaklah kecil. Apabila dinilai dalam rupiah nilainya akan berkisar sebesar Rp.6.000.000 per mahasiswa. Selama ini pembiayaan program tersebut masih sepenuhnya tergantung dari anggaran proyek bantuan luar negeri (NAEP). Dan baru pada tahun akademik 1991/1992 sebagian beralih pada anggaran APBN. Keragaan para Alumni program ini selama bertugas nanti akan turut membetuk pola pembiayaan dan perkembangan program D3 APP untuk masa-masa berikutnya. Hal tersebut berarti apabila para alumni program D3 APP Departemen Pertanian mampu menunjukkan prestasi yang membanggakan, maka tidak hanya dirasakan oleh yang bersangkutan dan keluarganya, namun dampaknya akan dirasakan pula oleh lembaga pendidikan darimana alumni tersebut berasal dan secara lebih luas lagi akan dirasakan pula oleh masyarakat pertanian. Demikian pula sebaliknya apabila alumni tersebut dinilai tidak mampu dalam menjalankan tugas, maka dampaknya akan dapat menurunkan citra lembaga pendidikan pertanian darimana dia berasal.

Para hadirin Yang terhormat,

Pemanfaatan wisudawan perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari instansi yang mengirimkan wisudawan belajar di lembaga ini. Saya mengharapkan kepada instansi terkait, terutama dalam hal ini Kantor Wilayah Departemen Pertanian dan Dinas Dinas lingkup Pertanian selaku Induk Organisasi mereka, agar secepatnya memanfaatkan wisudawan tersebut sebelum kualitasnya menurun karena terlalu lama menunggu.



Dengan menempatkan mereka kembali secepatnya, pada posisi yang sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki mereka, akan dapat meningkatkan daya guna "nilai tambah" yang telah dimilikinya dengan cepat. Apabila proses penempatan kembali telah dilaksanakan, selanjutnya saya mengharapkan kepada para pejabat yang berkompeten untuk bersama-sama memikirkan dan mengupayakan konsekuensi dari penempatan tersebut, yaitu menyediakan fasilitas yang memungkinkan mereka untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, antara lain berupa penyesuaian kepangkatan, penetapan angka kredit untuk jenjang jabatan fungsional yang bersangkutan dan lain-lain. Hal tersebut merupakan sebagian upaya pembinaan sumberdaya manusia yang telah kita miliki agar dapat mendatangkan manfaat seoptimal mungkin.

Para hadirin Yang terhormat,

Kepada para pelaksana program D3 APP, hendaknya terus memantau para lulusannya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik sebagai bahan evaluasi bagi program yang telah dilaksanakan. Selain itu juga terus memperhatikan pola kecenderungan yang terjadi di dunia usaha sektor pertanian. Kedua faktor tersebut sangat diperlukan bagi pengembangan kurikulum dan pola pelaksanaan program D3 APP dimasa-masa yang akan datang. Oleh karena itu saya beranggapan bahwa salah satu ciri pokok pendidikan yang mengarah kepada profesionalisme adalah berorientasi kepada "kebutuhan", dan tidak semata-mata kepada pengembangan disiplin ilmu.

Salah satu jabatan fungsional yang telah diakui pemerintah di Departemen Pertanian adalah Jabatan Penyuluh Pertanian. Seorang pejabat fungsional dituntut untuk terus mengembangkan kemampuan profesionalnya, melalui berbagai kegiatan yang akan dihitung melalui angka kredit. Pendidikan baik formal maupun non-formal merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk keperluan tersebut.



Dengan demikian sudah selayaknya perlu dipikirkan dari sekarang jenjang pendidikan yang berkesinambungan, dan tidak hanya terbatas sampai program D3 APP saja. Berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan dimuka, maka tugas Departemen Pertanian dalam mempersiapkan tenaga Penyuluh Pertanian masa depan dalam era pembangunan yang berdasarkan pada perkembangan teknologi, tidaklah ringan. Dari data kepegawaian saat ini Departemen Pertanian memiliki lebih 29.407 penyuluh tingkat lapangan, yang dengan cara bertahap perlu ditingkatkan mutunya menjadi kualifikasi Diploma III. Apabila jumlah tersebut dianggap tetap, dengan daya tampung sebanyak 700 orang per-tahun maka misi peningkatan mutu penyuluh di lapangan baru dapat diselesaikan dalam jangka waktu cukup lama. Dengan mengandalkan kemampuan dan pola pelaksanaan yang ada sekarang, saya khawatir pada kurun waktu sepuluh tahun mendatang kita tertinggal lagi dari negara-negara lain. Oleh sebab itu, saya mengharapkan peran serta Saudara-saudara dari instansi yang terkait untuk bersama-sama memikirkan pemecahan kendala yang kita hadapi tersebut. Khusus kepada pelaksana program D3 APP di Pusat dan Daerah, hendaknya fenomena ini dapat dijadikan rujukan dalam upaya-upaya pengembangan program-program selanjutnya antara lain program pendidikan lapangan D3.

Para hadirin Yang terhormat,

Sebagai akhir dari sambutan ini, atas nama pemerintah saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan. Saya juga mengucapkan selamat kepada keluarga wisudawan yang telah dengan rela mengizinkan suami atau istri untuk meninggalkan keluarganya guna menjalankan butir ketujuh Sapta Prasetya KORPRI yakni "Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas". Oleh sebab itu saya berpesan kepada para wisudawan, setelah kembali kerumah masing-masing hendaknya berupaya pula mengembangkan kehidupan keluarga yang lebih harmonis. Kehidupan yang harmonis di keluarga menyumbangkan kehidupan masyarakat yang harmonis pula.



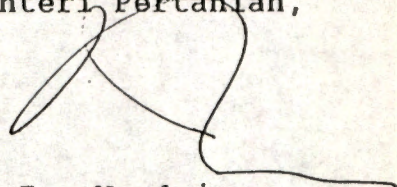
Akhirnya sekali lagi kepada para wisudawan saya ucapkan selamat atas keberhasilannya, selamat bertugas, selamat berjuang ditempat masing-masing.

Akhirnya kita do'akan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu"alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh.

Jakarta, 12 Maret 1991

Menteri Pertanian,



Ir. Wardojo



42





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA ACARA WISUDA ANGKATAN KE-2 PROGRAM DIPLOMA III
AHLI PENYULUHAN PERTANIAN (D3 APP)
12 MARET 1991

Assalamu'alaikum Warokhmatullohi Wabarokatuh,
Saudara Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sul. Selatan Yang terhormat,
Saudara Rektor Universitas Hasanuddin Yang terhormat,
Kepala Diklat APP Yang terhormat,
Saudara-Saudara Dosen Yang terhormat,
Para Wisudawan dan Keluarganya Yang terhormat, serta
Para undangan dan hadirin yang saya hormati.

Pertama-tama marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama untuk menyaksikan acara wisuda yang kedua kalinya pada Program D3 APP Departemen Pertanian. Mudah-mudahan rahmat dan hidayah-Nya akan selalu menyertai kita semua, baik selama berlangsungnya acara ini, maupun pada masa-masa yang akan datang.

Para hadirin Yang terhormat,

Kiranya tidaklah berlebihan bila pada kesempatan ini, saya mengutarakan rasa bahagia dan bangga sekaligus penghargaan kepada para pelaksana program D3 APP Departemen Pertanian, baik yang ada di daerah maupun di Pusat.



Oleh karena adanya acara wisuda ini tidak hanya membuktikan kemampuan dari para wisudawan, tetapi juga merupakan bukti kemampuan dari lembaga yang menghasilkannya. Perlu diketahui bersama bahwa program D3 APP Departemen Pertanian dilaksanakan di enam Propinsi; Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Pada tahun akademik 1990/1991 ini akan diwisuda untuk kedua kalinya sebanyak 598 orang lulusan. Dari 598 lulusan tersebut terperinci :

299 dari Program Studi Pertanian,
181 dari Program Studi Peternakan, dan
118 dari Program Studi Perikanan.

Para hadirin yang terhormat,

Program D3 APP diselenggarakan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan pertanian, terutama dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di sektor pertanian yang menunjang tercapainya pertanian maju, efisien dan tangguh yang kita idam-idamkan. Sebagaimana sudah menjadi tekad kita bersama untuk tetap melestarikan swasembada pangan, bahkan mengembangkan diversifikasi pangan, agroindustri dan agrobisnis. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka usahatani harus meninggalkan pola usaha yang hanya berdasarkan pada perkembangan sumber daya alam, dan mengalihkannya pada perkembangan teknologi dan industri.

Pengembangan agroindustri ini tidak saja perlu dilakukan dalam bentuk industri-industri besar di kota-kota, tetapi juga industri-industri rumah tangga di pedesaan. Banyak manfaat dapat diperoleh dalam pengembangan agroindustri di pedesaan. Disamping meningkatkan nilai tambah dan menjamin pemasaran hasil-hasil pertanian, pengembangan agroindustri dapat membuka lapangan-lapangan kerja baru di pedesaan, dan dengan demikian akan menghambat arus urbanisasi dari desa ke kota-kota besar.



Pola usahatani berdasarkan perkembangan teknologi dan industri menuntut kepekaan kita terhadap hasil-hasil penelitian terbaru dan menuntut kemampuan kita mengaplikasikannya di lapang. Namun dari kenyataan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan arus informasi teknologi antara lembaga-lembaga ilmiah dan riset dengan para pelaksana di lapangan, terutama di daerah pedesaan yang merupakan basis kegiatan usahatani. Kesenjangan tersebut dapat dipersempit apabila kemampuan para Penyuluh Pertanian Lapangan, sebagai aparat pertanian terdepan mampu menyerap teknologi yang cepat dan mampu menyebarkan secara cepat pula kepada masyarakat tani. Untuk maksud tersebut dasar pendidikan para penyuluh pertanian lapangan perlu ditingkatkan melalui jenjang pendidikan formal, yaitu pendidikan profesional pada Program Diploma selama tiga tahun.

Program D3 APP Departemen Pertanian telah dirancang sedemikian rupa untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut di atas. Kurikulum yang digunakan saat ini disusun dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Ditjen Pendidikan Tinggi dan Konsorsium Ilmu-Ilmu Pertanian, serta Bimas dan telah disempurnakan sesuai dengan kebutuhan. Kurikulum dirancang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga mengembangkan sikap profesional Kepemimpinan serta kepribadian yang tinggi yang dilandasi nilai-nilai luhur dan Moral Pancasila. Dengan demikian diharapkan melalui program ini akan dihasilkan lulusan dengan profil kemampuan sebagai berikut :

- Memahami pengetahuan psikologi sosial, komunikasi massa dan teknologi usahatani sehingga mampu melaksanakan tugas penyuluhan secara tepat sesuai dengan perubahan kemajuan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
- Mampu menerapkan teknologi produksi, ekonomi dan rekayasa sosial sehingga dapat melaksanakan tugas penyuluhan secara efektif-efisien sesuai dengan sistem usahatani yang dibina.



- Memiliki pengetahuan sistem dan metoda penyuluhan pertanian yang cukup luas sehingga mampu merancang/mempergunakan metoda alih teknologi dan pembinaan kelembagaan sosial ekonomi secara tepat guna dan efisien.

Program D3 APP Departemen Pertanian yang telah berdiri empat tahun yang lalu, secara bertahap terus mengembangkan sarana akademik, diantaranya telah didirikan Pusat Pelayanan pada Masyarakat Tani dan Nelayan (Farm Service Centre). Mahasiswa disamping belajar juga mengabdikan pada masyarakat disekitar kampus dengan memberikan pelayanan terhadap perkembangan teknologi pertanian. Demikian pula mereka diwajibkan mengikuti Kuliah Kerja Lapangan (KKL) selama dua bulan bekerjasama dengan Balai Penyuluhan Pertanian untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh langsung pada masyarakat tani dan nelayan di pedesaan. Pada saat ini Kelembagaan D3 APP Departemen Pertanian dipersiapkan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu dari DIKLAT menjadi AKADEMI dan akan diupayakan tenaga pengajar menjadi jabatan fungsional. Dengan demikian setiap tenaga pengajar dengan mantap melaksanakan tugasnya sebagai tenaga fungsional dan dituntut untuk terus mengembangkan diri dalam profesinya secara konsisten.

Para hadirin Yang terhormat,

Khususnya kepada para wisudawan, Saya berpesan agar rasa syukur, rasa bahagia dan kebanggaan yang ada pada diri Saudara saat ini, hendaknya disertai pula tekad yang kuat untuk terus mengembangkan kemampuan yang telah dimiliki dalam menjalankan tugas-tugas yang akan dihadapi nanti. Pendidikan di D3 APP Departemen Pertanian adalah suatu "nilai tambah" yang melekat pada diri Saudara masing-masing. Arti dari "nilai tambah" tersebut akan tergantung dari kadar aktifitas Saudara dalam pengamalannya kepada masyarakat tani-nelayan di tempat Saudara bekerja.



Apabila aktifitas Saudara setelah kembali dari sini sama dengan sebelum berangkat, maka nilai tambah tersebut tidak akan berarti. Terlebih lagi apabila predikat yang melekat dalam diri masing-masing hanya sekedar kebanggaan yang membebani instansi masing-masing, karena harus mengeluarkan tambahan anggaran sebagai konsekuensi bertambahnya nilai tambah Saudara. Sekali lagi saya tekankan bahwa nilai tambah Saudara bukan terletak dari Status dan Predikat tetapi lebih dititik beratkan pada karya nyata yang dihasilkan. Investasi untuk memberikan nilai tambah tersebut bagi masing-masing individu tidaklah kecil. Apabila dinilai dalam rupiah nilainya akan berkisar sebesar Rp.6.000.000 per mahasiswa. Selama ini pembiayaan program tersebut masih sepenuhnya tergantung dari anggaran proyek bantuan luar negeri (NAEP). Dan baru pada tahun akademik 1991/1992 sebagian beralih pada anggaran APBN. Keragaan para Alumni program ini selama bertugas nanti akan turut membetuk pola pembiayaan dan perkembangan program D3 APP untuk masa-masa berikutnya. Hal tersebut berarti apabila para alumni program D3 APP Departemen Pertanian mampu menunjukkan prestasi yang membanggakan, maka tidak hanya dirasakan oleh yang bersangkutan dan keluarganya, namun dampaknya akan dirasakan pula oleh lembaga pendidikan darimana alumni tersebut berasal dan secara lebih luas lagi akan dirasakan pula oleh masyarakat pertanian. Demikian pula sebaliknya apabila alumni tersebut dinilai tidak mampu dalam menjalankan tugas, maka dampaknya akan dapat menurunkan citra lembaga pendidikan pertanian darimana dia berasal.

Para hadirin Yang terhormat,

Pemanfaatan wisudawan perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari instansi yang mengirimkan wisudawan belajar di lembaga ini. Saya mengharapkan kepada instansi terkait, terutama dalam hal ini Kantor Wilayah Departemen Pertanian dan Dinas-dinas lingkup Pertanian selaku Induk Organisasi mereka, agar secepatnya memanfaatkan wisudawan tersebut sebelum kualitasnya menurun karena terlalu lama menunggu.



Dengan menempatkan mereka kembali secepatnya, pada posisi yang sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki mereka, akan dapat meningkatkan daya guna "nilai tambah" yang telah dimilikinya dengan cepat. Apabila proses penempatan kembali telah dilaksanakan, selanjutnya saya mengharapkan kepada para pejabat yang berkompeten untuk bersama-sama memikirkan dan mengupayakan konsekuensi dari penempatan tersebut, yaitu menyediakan fasilitas yang memungkinkan mereka untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, antara lain berupa penyesuaian kepangkatan, penetapan angka kredit untuk jenjang jabatan fungsional yang bersangkutan dan lain-lain. Hal tersebut merupakan sebagian upaya pembinaan sumberdaya manusia yang telah kita miliki agar dapat mendatangkan manfaat seoptimal mungkin.

Para hadirin Yang terhormat,

Kepada para pelaksana program D3 APP, hendaknya terus memantau para lulusannya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik sebagai bahan evaluasi bagi program yang telah dilaksanakan. Selain itu juga terus memperhatikan pola kecenderungan yang terjadi di dunia usaha sektor pertanian. Kedua faktor tersebut sangat diperlukan bagi pengembangan kurikulum dan pola pelaksanaan program D3 APP dimasa-masa yang akan datang. Oleh karena itu saya beranggapan bahwa salah satu ciri pokok pendidikan yang mengarah kepada profesionalisme adalah berorientasi kepada "kebutuhan", dan tidak semata-mata kepada pengembangan disiplin ilmu.

Salah satu jabatan fungsional yang telah diakui pemerintah di Departemen Pertanian adalah Jabatan Penyuluh Pertanian. Seorang pejabat fungsional dituntut untuk terus mengembangkan kemampuan profesionalnya, melalui berbagai kegiatan yang akan dihitung melalui angka kredit. Pendidikan baik formal maupun non-formal merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk keperluan tersebut.



Dengan demikian sudah selayaknya perlu dipikirkan dari sekarang jenjang pendidikan yang berkesinambungan, dan tidak hanya terbatas sampai program D3 APP saja. Berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan dimuka, maka tugas Departemen Pertanian dalam mempersiapkan tenaga Penyuluh Pertanian masa depan dalam era pembangunan yang berdasarkan pada perkembangan teknologi, tidaklah ringan. Dari data kepegawaian saat ini Departemen Pertanian memiliki lebih 29.407 penyuluh tingkat lapangan, yang dengan cara bertahap perlu ditingkatkan mutunya menjadi kualifikasi Diploma III. Apabila jumlah tersebut dianggap tetap, dengan daya tampung sebanyak 700 orang per-tahun maka misi peningkatan mutu penyuluh di lapangan baru dapat diselesaikan dalam jangka waktu cukup lama. Dengan mengandalkan kemampuan dan pola pelaksanaan yang ada sekarang, saya khawatir pada kurun waktu sepuluh tahun mendatang kita tertinggal lagi dari negara-negara lain. Oleh sebab itu, saya mengharapkan peran serta Saudara-saudara dari instansi yang terkait untuk bersama-sama memikirkan pemecahan kendala yang kita hadapi tersebut. Khusus kepada pelaksana program D3 APP di Pusat dan Daerah, hendaknya fenomena ini dapat dijadikan rujukan dalam upaya-upaya pengembangan program-program selanjutnya antara lain program pendidikan lapangan D3.

Para hadirin Yang terhormat,

Sebagai akhir dari sambutan ini, atas nama pemerintah saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan. Saya juga mengucapkan selamat kepada keluarga wisudawan yang telah dengan rela mengizinkan suami atau istri untuk meninggalkan keluarganya guna menjalankan butir ketujuh Sapta Prasetya KORPRI yakni "Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas". Oleh sebab itu saya berpesan kepada para wisudawan, setelah kembali kerumah masing-masing hendaknya berupaya pula mengembangkan kehidupan keluarga yang lebih harmonis. Kehidupan yang harmonis di keluarga menyumbangkan kehidupan masyarakat yang harmonis pula.



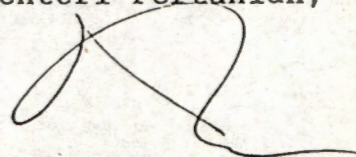
Akhirnya sekali lagi kepada para wisudawan saya ucapkan selamat atas keberhasilannya, selamat bertugas, selamat berjuang ditempat masing-masing.

Akhirnya kita do'akan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu"alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh.

Jakarta, 12 Maret 1991

Menteri Pertanian,



Ir. Wardoyo



43





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA ACARA WISUDA ANGKATAN KE-2 PROGRAM DIPLOMA III
AHLI PENYULUHAN PERTANIAN (D3 APP)
12 MARET 1991

Assalamu'alaikum Warokhmatullohi Wabarokatuh,
Saudara Rektor Universitas Brawidjaja Yang terhormat,
Kepala Diklat APP Yang terhormat,
Saudara-Saudara Dosen Yang terhormat,
Para Wisudawan dan Keluarganya Yang terhormat, serta
Para undangan dan hadirin yang saya hormati.

Pertama-tama marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama untuk menyaksikan acara wisuda yang kedua kalinya pada Program D3 APP Departemen Pertanian. Mudah-mudahan rahmat dan hidayah-Nya akan selalu menyertai kita semua, baik selama berlangsungnya acara ini, maupun pada masa-masa yang akan datang.

Para hadirin Yang terhormat,

Kiranya tidaklah berlebihan bila pada kesempatan ini, saya mengutarakan rasa bahagia dan bangga sekaligus penghargaan kepada para pelaksana program D3 APP Departemen Pertanian, baik yang ada di daerah maupun di Pusat.



Oleh karena adanya acara wisuda ini tidak hanya membuktikan kemampuan dari para wisudawan, tetapi juga merupakan bukti kemampuan dari lembaga yang menghasilkannya. Perlu diketahui bersama bahwa program D3 APP Departemen Pertanian dilaksanakan di enam Propinsi; Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Pada tahun akademik 1990/1991 ini akan diwisuda untuk kedua kalinya sebanyak 598 orang lulusan. Dari 598 lulusan tersebut terperinci :

299 dari Program Studi Pertanian,
181 dari Program Studi Peternakan, dan
118 dari Program Studi Perikanan.

Para hadirin yang terhormat,

Program D3 APP diselenggarakan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan pertanian, terutama dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di sektor pertanian yang menunjang tercapainya pertanian maju, efisien dan tangguh yang kita idam-idamkan. Sebagaimana sudah menjadi tekad kita bersama untuk tetap melestarikan swasembada pangan, bahkan mengembangkan diversifikasi pangan, agroindustri dan agrobisnis. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka usahatani harus meninggalkan pola usaha yang hanya berdasarkan pada perkembangan sumber daya alam, dan mengalihkannya pada perkembangan teknologi dan industri.

Pengembangan agroindustri ini tidak saja perlu dilakukan dalam bentuk industri-industri besar di kota-kota, tetapi juga industri-industri rumah tangga di pedesaan. Banyak manfaat dapat diperoleh dalam pengembangan agroindustri di pedesaan. Disamping meningkatkan nilai tambah dan menjamin pemasaran hasil-hasil pertanian, pengembangan agroindustri dapat membuka lapangan-lapangan kerja baru di pedesaan, dan dengan demikian akan menghambat arus urbanisasi dari desa ke kota-kota besar.



Pola usahatani berdasarkan perkembangan teknologi dan industri menuntut kepekaan kita terhadap hasil-hasil penelitian terbaru dan menuntut kemampuan kita mengaplikasikannya di lapang. Namun dari kenyataan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan arus informasi teknologi antara lembaga-lembaga ilmiah dan riset dengan para pelaksana di lapangan, terutama di daerah pedesaan yang merupakan basis kegiatan usahatani. Kesenjangan tersebut dapat dipersempit apabila kemampuan para Penyuluh Pertanian Lapangan, sebagai aparat pertanian terdepan mampu menyerap teknologi yang cepat dan mampu menyebarluaskan secara cepat pula kepada masyarakat tani. Untuk maksud tersebut dasar pendidikan para penyuluh pertanian lapangan perlu ditingkatkan melalui jenjang pendidikan formal, yaitu pendidikan profesional pada Program Diploma selama tiga tahun.

Program D3 APP Departemen Pertanian telah dirancang sedemikian rupa untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut di atas. Kurikulum yang digunakan saat ini disusun dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Ditjen Pendidikan Tinggi dan Konsorsium Ilmu-Ilmu Pertanian, serta Bimas dan telah disempurnakan sesuai dengan kebutuhan. Kurikulum dirancang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga mengembangkan sikap profesional Kepemimpinan serta kepribadian yang tinggi yang dilandasi nilai-nilai luhur dan Moral Pancasila. Dengan demikian diharapkan melalui program ini akan dihasilkan lulusan dengan profil kemampuan sebagai berikut :

- Memahami pengetahuan psikologi sosial, komunikasi massa dan teknologi usahatani sehingga mampu melaksanakan tugas penyuluhan secara tepat sesuai dengan perubahan kemajuan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
- Mampu menerapkan teknologi produksi, ekonomi dan rekayasa sosial sehingga dapat melaksanakan tugas penyuluhan secara efektif-efisien sesuai dengan sistem usahatani yang dibina.



- Memiliki pengetahuan sistem dan metoda penyuluhan pertanian yang cukup luas sehingga mampu merancang/mempergunakan metoda alih teknologi dan pembinaan kelembagaan sosial ekonomi secara tepat guna dan efisien.

Program D3 APP Departemen Pertanian yang telah berdiri empat tahun yang lalu, secara bertahap terus mengembangkan sarana akademik, diantaranya telah didirikan Pusat Pelayanan pada Masyarakat Tani dan Nelayan (Farm Service Centre). Mahasiswa disamping belajar juga mengabdikan pada masyarakat disekitar kampus dengan memberikan pelayanan terhadap perkembangan teknologi pertanian. Demikian pula mereka diwajibkan mengikuti Kuliah Kerja Lapangan (KKL) selama dua bulan bekerjasama dengan Balai Penyuluhan Pertanian untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh langsung pada masyarakat tani dan nelayan di pedesaan. Pada saat ini Kelembagaan D3 APP Departemen Pertanian dipersiapkan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu dari DIKLAT menjadi AKADEMI dan akan diupayakan tenaga pengajar menjadi jabatan fungsional. Dengan demikian setiap tenaga pengajar dengan mantap melaksanakan tugasnya sebagai tenaga fungsional dan dituntut untuk terus mengembangkan diri dalam profesinya secara konsisten.

Para hadirin Yang terhormat,

Khususnya kepada para wisudawan, Saya berpesan agar rasa syukur, rasa bahagia dan kebanggaan yang ada pada diri Saudara saat ini, hendaknya disertai pula tekad yang kuat untuk terus mengembangkan kemampuan yang telah dimiliki dalam menjalankan tugas-tugas yang akan dihadapi nanti. Pendidikan di D3 APP Departemen Pertanian adalah suatu "nilai tambah" yang melekat pada diri Saudara masing-masing. Arti dari "nilai tambah" tersebut akan tergantung dari kadar aktifitas Saudara dalam pengamalannya kepada masyarakat tani-nelayan di tempat Saudara bekerja.



Apabila aktifitas Saudara setelah kembali dari sini sama dengan sebelum berangkat, maka nilai tambah tersebut tidak akan berarti. Terlebih lagi apabila predikat yang melekat dalam diri masing-masing hanya sekedar kebanggaan yang membebani instansi masing-masing, karena harus mengeluarkan tambahan anggaran sebagai konsekuensi bertambahnya nilai tambah Saudara. Sekali lagi saya tekankan bahwa nilai tambah Saudara bukan terletak dari Status dan Predikat tetapi lebih dititik beratkan pada karya nyata yang dihasilkan. Investasi untuk memberikan nilai tambah tersebut bagi masing-masing individu tidaklah kecil. Apabila dinilai dalam rupiah nilainya akan berkisar sebesar Rp.6.000.000 per mahasiswa. Selama ini pembiayaan program tersebut masih sepenuhnya tergantung dari anggaran proyek bantuan luar negeri (NAEP). Dan baru pada tahun akademik 1991/1992 sebagian beralih pada anggaran APBN. Keragaan para Alumni program ini selama bertugas nanti akan turut membetuk pola pembiayaan dan perkembangan program D3 APP untuk masa-masa berikutnya. Hal tersebut berarti apabila para alumni program D3 APP Departemen Pertanian mampu menunjukkan prestasi yang membanggakan, maka tidak hanya dirasakan oleh yang bersangkutan dan keluarganya, namun dampaknya akan dirasakan pula oleh lembaga pendidikan darimana alumni tersebut berasal dan secara lebih luas lagi akan dirasakan pula oleh masyarakat pertanian. Demikian pula sebaliknya apabila alumni tersebut dinilai tidak mampu dalam menjalankan tugas, maka dampaknya akan dapat menurunkan citra lembaga pendidikan pertanian darimana dia berasal.

Para hadirin Yang terhormat,

Pemanfaatan wisudawan perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari instansi yang mengirimkan wisudawan belajar di lembaga ini. Saya mengharapkan kepada instansi terkait, terutama dalam hal ini Kantor Wilayah Departemen Pertanian dan Dinas Dinas lingkup Pertanian selaku Induk Organisasi mereka, agar secepatnya memanfaatkan wisudawan tersebut sebelum kualitasnya menurun karena terlalu lama menunggu.



Dengan menempatkan mereka kembali secepatnya, pada posisi yang sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki mereka, akan dapat meningkatkan daya guna "nilai tambah" yang telah dimilikinya dengan cepat. Apabila proses penempatan kembali telah dilaksanakan, selanjutnya saya mengharapkan kepada para pejabat yang berkompeten untuk bersama-sama memikirkan dan mengupayakan konsekuensi dari penempatan tersebut, yaitu menyediakan fasilitas yang memungkinkan mereka untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, antara lain berupa penyesuaian kepangkatan, penetapan angka kredit untuk jenjang jabatan fungsional yang bersangkutan dan lain-lain. Hal tersebut merupakan sebagian upaya pembinaan sumberdaya manusia yang telah kita miliki agar dapat mendatangkan manfaat seoptimal mungkin.

Para hadirin Yang terhormat,

Kepada para pelaksana program D3 APP, hendaknya terus memantau para lulusannya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik sebagai bahan evaluasi bagi program yang telah dilaksanakan. Selain itu juga terus memperhatikan pola kecenderungan yang terjadi di dunia usaha sektor pertanian. Kedua faktor tersebut sangat diperlukan bagi pengembangan kurikulum dan pola pelaksanaan program D3 APP dimasa-masa yang akan datang. Oleh karena itu saya beranggapan bahwa salah satu ciri pokok pendidikan yang mengarah kepada profesionalisme adalah berorientasi kepada "kebutuhan", dan tidak semata-mata kepada pengembangan disiplin ilmu.

Salah satu jabatan fungsional yang telah diakui pemerintah di Departemen Pertanian adalah Jabatan Penyuluh Pertanian. Seorang pejabat fungsional dituntut untuk terus mengembangkan kemampuan profesionalnya, melalui berbagai kegiatan yang akan dihitung melalui angka kredit. Pendidikan baik formal maupun non-formal merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk keperluan tersebut.



Dengan demikian sudah selayaknya perlu dipikirkan dari sekarang jenjang pendidikan yang berkesinambungan, dan tidak hanya terbatas sampai program D3 APP saja. Berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan dimuka, maka tugas Departemen Pertanian dalam mempersiapkan tenaga Penyuluh Pertanian masa depan dalam era pembangunan yang berdasarkan pada perkembangan teknologi, tidaklah ringan. Dari data kepegawaian saat ini Departemen Pertanian memiliki lebih 29.407 penyuluh tingkat lapangan, yang dengan cara bertahap perlu ditingkatkan mutunya menjadi kualifikasi Diploma III. Apabila jumlah tersebut dianggap tetap, dengan daya tampung sebanyak 700 orang per-tahun maka misi peningkatan mutu penyuluh di lapangan baru dapat diselesaikan dalam jangka waktu cukup lama. Dengan mengandalkan kemampuan dan pola pelaksanaan yang ada sekarang, saya khawatir pada kurun waktu sepuluh tahun mendatang kita tertinggal lagi dari negara-negara lain. Oleh sebab itu, saya mengharapkan peran serta Saudara-saudara dari instansi yang terkait untuk bersama-sama memikirkan pemecahan kendala yang kita hadapi tersebut. Khusus kepada pelaksana program D3 APP di Pusat dan Daerah, hendaknya fenomena ini dapat dijadikan rujukan dalam upaya-upaya pengembangan program-program selanjutnya antara lain program pendidikan lapangan D3.

Para hadirin Yang terhormat,

Sebagai akhir dari sambutan ini, atas nama pemerintah saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan. Saya juga mengucapkan selamat kepada keluarga wisudawan yang telah dengan rela mengizinkan suami atau istri untuk meninggalkan keluarganya guna menjalankan butir ketujuh Sapta Prasetya KORPRI yakni "Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas". Oleh sebab itu saya berpesan kepada para wisudawan, setelah kembali kerumah masing-masing hendaknya berupaya pula mengembangkan kehidupan keluarga yang lebih harmonis. Kehidupan yang harmonis di keluarga menyumbangkan kehidupan masyarakat yang harmonis pula.




Akhirnya sekali lagi kepada para wisudawan saya ucapkan selamat atas keberhasilannya, selamat bertugas, selamat berjuang ditempat masing-masing.

Akhirnya kita do'akan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu"alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh.

Jakarta, 12 Maret 1991

Menteri Pertanian,



Ir. Wardoyo



44





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA ACARA WISUDA ANGKATAN KE-2 PROGRAM DIPLOMA III
AHLI PENYULUHAN PERTANIAN (D3 APP)
12 MARET 1991

Assalamu'alaikum Warokhmatullohi Wabarokatuh,
Saudara Rektor Universitas Sumatera Utara Yang terhormat,
Kepala Diklat APP Yang terhormat,
Saudara-Saudara Dosen Yang terhormat,
Para Wisudawan dan Keluarganya Yang terhormat, serta
Para undangan dan hadirin yang saya hormati.

Pertama-tama marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama untuk menyaksikan acara wisuda yang kedua kalinya pada Program D3 APP Departemen Pertanian. Mudah-mudahan rahmat dan hidayah-Nya akan selalu menyertai kita semua, baik selama berlangsungnya acara ini, maupun pada masa-masa yang akan datang.

Para hadirin Yang terhormat,

Kiranya tidaklah berlebihan bila pada kesempatan ini, saya mengutarakan rasa bahagia dan bangga sekaligus penghargaan kepada para pelaksana program D3 APP Departemen Pertanian, baik yang ada di daerah maupun di Pusat.



Oleh karena adanya acara wisuda ini tidak hanya membuktikan kemampuan dari para wisudawan, tetapi juga merupakan bukti kemampuan dari lembaga yang menghasilkannya. Perlu diketahui bersama bahwa program D3 APP Departemen Pertanian dilaksanakan di enam Propinsi; Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Pada tahun akademik 1990/1991 ini akan diwisuda untuk kedua kalinya sebanyak 598 orang lulusan. Dari 598 lulusan tersebut terperinci :

299 dari Program Studi Pertanian,
181 dari Program Studi Peternakan, dan
118 dari Program Studi Perikanan.

Para hadirin yang terhormat,

Program D3 APP diselenggarakan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan pertanian, terutama dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di sektor pertanian yang menunjang tercapainya pertanian maju, efisien dan tangguh yang kita idam-idamkan. Sebagaimana sudah menjadi tekad kita bersama untuk tetap melestarikan swasembada pangan, bahkan mengembangkan diversifikasi pangan, agroindustri dan agrobisnis. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka usahatani harus meninggalkan pola usaha yang hanya berdasarkan pada perkembangan sumber daya alam, dan mengalihkannya pada perkembangan teknologi dan industri.

Pengembangan agroindustri ini tidak saja perlu dilakukan dalam bentuk industri-industri besar di kota-kota, tetapi juga industri-industri rumah tangga di pedesaan. Banyak manfaat dapat diperoleh dalam pengembangan agroindustri di pedesaan. Disamping meningkatkan nilai tambah dan menjamin pemasaran hasil-hasil pertanian, pengembangan agroindustri dapat membuka lapangan-lapangan kerja baru di pedesaan, dan dengan demikian akan menghambat arus urbanisasi dari desa ke kota-kota besar.



Pola usahatani berdasarkan perkembangan teknologi dan industri menuntut kepekaan kita terhadap hasil-hasil penelitian terbaru dan menuntut kemampuan kita mengaplikasikannya di lapang. Namun dari kenyataan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan arus informasi teknologi antara lembaga-lembaga ilmiah dan riset dengan para pelaksana di lapangan, terutama di daerah pedesaan yang merupakan basis kegiatan usahatani. Kesenjangan tersebut dapat dipersempit apabila kemampuan para Penyuluh Pertanian Lapangan, sebagai aparat pertanian terdepan mampu menyerap teknologi yang cepat dan mampu menyebarluaskan secara cepat pula kepada masyarakat tani. Untuk maksud tersebut dasar pendidikan para penyuluh pertanian lapangan perlu ditingkatkan melalui jenjang pendidikan formal, yaitu pendidikan profesional pada Program Diploma selama tiga tahun.

Program D3 APP Departemen Pertanian telah dirancang sedemikian rupa untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut di atas. Kurikulum yang digunakan saat ini disusun dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Ditjen Pendidikan Tinggi dan Konsorsium Ilmu-Ilmu Pertanian, serta Bimas dan telah disempurnakan sesuai dengan kebutuhan. Kurikulum dirancang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga mengembangkan sikap profesional Kepemimpinan serta kepribadian yang tinggi yang dilandasi nilai-nilai luhur dan Moral Pancasila. Dengan demikian diharapkan melalui program ini akan dihasilkan lulusan dengan profil kemampuan sebagai berikut :

- Memahami pengetahuan psikologi sosial, komunikasi massa dan teknologi usahatani sehingga mampu melaksanakan tugas penyuluhan secara tepat sesuai dengan perubahan kemajuan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
- Mampu menerapkan teknologi produksi, ekonomi dan rekayasa sosial sehingga dapat melaksanakan tugas penyuluhan secara efektif-efisien sesuai dengan sistem usahatani yang dibina.



- Memiliki pengetahuan sistem dan metoda penyuluhan pertanian yang cukup luas sehingga mampu merancang/mempergunakan metoda alih teknologi dan pembinaan kelembagaan sosial ekonomi secara tepat guna dan efisien.

Program D3 APP Departemen Pertanian yang telah berdiri empat tahun yang lalu, secara bertahap terus mengembangkan sarana akademik, diantaranya telah didirikan Pusat Pelayanan pada Masyarakat Tani dan Nelayan (Farm Service Centre). Mahasiswa disamping belajar juga mengabdikan pada masyarakat disekitar kampus dengan memberikan pelayanan terhadap perkembangan teknologi pertanian. Demikian pula mereka diwajibkan mengikuti Kuliah Kerja Lapangan (KKL) selama dua bulan bekerjasama dengan Balai Penyuluhan Pertanian untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh langsung pada masyarakat tani dan nelayan di pedesaan. Pada saat ini Kelembagaan D3 APP Departemen Pertanian dipersiapkan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu dari DIKLAT menjadi AKADEMI dan akan diupayakan tenaga pengajar menjadi jabatan fungsional. Dengan demikian setiap tenaga pengajar dengan mantap melaksanakan tugasnya sebagai tenaga fungsional dan dituntut untuk terus mengembangkan diri dalam profesinya secara konsisten.

Para hadirin Yang terhormat,

Khususnya kepada para wisudawan, Saya berpesan agar rasa syukur, rasa bahagia dan kebanggaan yang ada pada diri Saudara saat ini, hendaknya disertai pula tekad yang kuat untuk terus mengembangkan kemampuan yang telah dimiliki dalam menjalankan tugas-tugas yang akan dihadapi nanti. Pendidikan di D3 APP Departemen Pertanian adalah suatu "nilai tambah" yang melekat pada diri Saudara masing-masing. Arti dari "nilai tambah" tersebut akan tergantung dari kadar aktifitas Saudara dalam pengamalannya kepada masyarakat tani-nelayan di tempat Saudara bekerja.



Apabila aktifitas Saudara setelah kembali dari sini sama dengan sebelum berangkat, maka nilai tambah tersebut tidak akan berarti. Terlebih lagi apabila predikat yang melekat dalam diri masing-masing hanya sekedar kebanggaan yang membebani instansi masing-masing, karena harus mengeluarkan tambahan anggaran sebagai konsekuensi bertambahnya nilai tambah Saudara. Sekali lagi saya tekankan bahwa nilai tambah Saudara bukan terletak dari Status dan Predikat tetapi lebih dititik beratkan pada karya nyata yang dihasilkan. Investasi untuk memberikan nilai tambah tersebut bagi masing-masing individu tidaklah kecil. Apabila dinilai dalam rupiah nilainya akan berkisar sebesar Rp.6.000.000 per mahasiswa. Selama ini pembiayaan program tersebut masih sepenuhnya tergantung dari anggaran proyek bantuan luar negeri (NAEP). Dan baru pada tahun akademik 1991/1992 sebagian beralih pada anggaran APBN. Keragaan para Alumni program ini selama bertugas nanti akan turut membetuk pola pembiayaan dan perkembangan program D3 APP untuk masa-masa berikutnya. Hal tersebut berarti apabila para alumni program D3 APP Departemen Pertanian mampu menunjukkan prestasi yang membanggakan, maka tidak hanya dirasakan oleh yang bersangkutan dan keluarganya, namun dampaknya akan dirasakan pula oleh lembaga pendidikan darimana alumni tersebut berasal dan secara lebih luas lagi akan dirasakan pula oleh masyarakat pertanian. Demikian pula sebaliknya apabila alumni tersebut dinilai tidak mampu dalam menjalankan tugas, maka dampaknya akan dapat menurunkan citra lembaga pendidikan pertanian darimana dia berasal.

Para hadirin Yang terhormat,

Pemanfaatan wisudawan perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari instansi yang mengirimkan wisudawan belajar di lembaga ini. Saya mengharapkan kepada instansi terkait, terutama dalam hal ini Kantor Wilayah Departemen Pertanian dan Dinas Dinas lingkup Pertanian selaku Induk Organisasi mereka, agar secepatnya memanfaatkan wisudawan tersebut sebelum kualitasnya menurun karena terlalu lama menunggu.



Dengan menempatkan mereka kembali secepatnya, pada posisi yang sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki mereka, akan dapat meningkatkan daya guna "nilai tambah" yang telah dimilikinya dengan cepat. Apabila proses penempatan kembali telah dilaksanakan, selanjutnya saya mengharapkan kepada para pejabat yang berkompeten untuk bersama-sama memikirkan dan mengupayakan konsekuensi dari penempatan tersebut, yaitu menyediakan fasilitas yang memungkinkan mereka untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, antara lain berupa penyesuaian kepangkatan, penetapan angka kredit untuk jenjang jabatan fungsional yang bersangkutan dan lain-lain. Hal tersebut merupakan sebagian upaya pembinaan sumberdaya manusia yang telah kita miliki agar dapat mendatangkan manfaat seoptimal mungkin.

Para hadirin Yang terhormat,

Kepada para pelaksana program D3 APP, hendaknya terus memantau para lulusannya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik sebagai bahan evaluasi bagi program yang telah dilaksanakan. Selain itu juga terus memperhatikan pola kecenderungan yang terjadi di dunia usaha sektor pertanian. Kedua faktor tersebut sangat diperlukan bagi pengembangan kurikulum dan pola pelaksanaan program D3 APP dimasa-masa yang akan datang. Oleh karena itu saya beranggapan bahwa salah satu ciri pokok pendidikan yang mengarah kepada profesionalisme adalah berorientasi kepada "kebutuhan", dan tidak semata-mata kepada pengembangan disiplin ilmu.

Salah satu jabatan fungsional yang telah diakui pemerintah di Departemen Pertanian adalah Jabatan Penyuluh Pertanian. Seorang pejabat fungsional dituntut untuk terus mengembangkan kemampuan profesionalnya, melalui berbagai kegiatan yang akan dihitung melalui angka kredit. Pendidikan baik formal maupun non-formal merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk keperluan tersebut.



Dengan demikian sudah selayaknya perlu dipikirkan dari sekarang jenjang pendidikan yang berkesinambungan, dan tidak hanya terbatas sampai program D3 APP saja. Berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan dimuka, maka tugas Departemen Pertanian dalam mempersiapkan tenaga Penyuluh Pertanian masa depan dalam era pembangunan yang berdasarkan pada perkembangan teknologi, tidaklah ringan. Dari data kepegawaian saat ini Departemen Pertanian memiliki lebih 29.407 penyuluh tingkat lapangan, yang dengan cara bertahap perlu ditingkatkan mutunya menjadi kualifikasi Diploma III. Apabila jumlah tersebut dianggap tetap, dengan daya tampung sebanyak 700 orang per-tahun maka misi peningkatan mutu penyuluh di lapangan baru dapat diselesaikan dalam jangka waktu cukup lama. Dengan mengandalkan kemampuan dan pola pelaksanaan yang ada sekarang, saya kuatir pada kurun waktu sepuluh tahun mendatang kita tertinggal lagi dari negara-negara lain. Oleh sebab itu, saya mengharapkan peran serta Saudara-saudara dari instansi yang terkait untuk bersama-sama memikirkan pemecahan kendala yang kita hadapi tersebut. Khusus kepada pelaksana program D3 APP di Pusat dan Daerah, hendaknya fenomena ini dapat dijadikan rujukan dalam upaya-upaya pengembangan program-program selanjutnya antara lain program pendidikan lapangan D3.

Para hadirin Yang terhormat,

Sebagai akhir dari sambutan ini, atas nama pemerintah saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan. Saya juga mengucapkan selamat kepada keluarga wisudawan yang telah dengan rela mengizinkan suami atau istri untuk meninggalkan keluarganya guna menjalankan butir ketujuh Sapta Prasetya KORPRI yakni "Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas". Oleh sebab itu saya berpesan kepada para wisudawan, setelah kembali kerumah masing-masing hendaknya berupaya pula mengembangkan kehidupan keluarga yang lebih harmonis. Kehidupan yang harmonis di keluarga menyumbangkan kehidupan masyarakat yang harmonis pula.



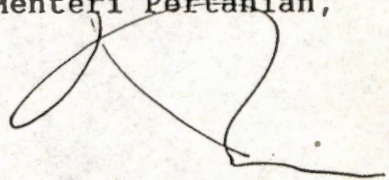
Akhirnya sekali lagi kepada para wisudawan saya ucapkan selamat atas keberhasilannya, selamat bertugas, selamat berjuang ditempat masing-masing.

Akhirnya kita do'akan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu"alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh.

Jakarta, 12 Maret 1991

Menteri Pertanian,



Ir. Wardojo



45





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA ACARA WISUDA ANGKATAN KE-2 PROGRAM DIPLOMA III
AHLI PENYULUHAN PERTANIAN (D3 APP)
13 MARET 1991

Assalamu'alaikum Warokhmatullohi Wabarokatuh,
Saudara Rektor Universitas Gadjah Mada Yang terhormat,
Kepala Diklat APP Yang terhormat,
Saudara-Saudara Dosen Yang terhormat,
Para Wisudawan dan Keluarganya Yang terhormat, serta
Para undangan dan hadirin yang saya hormati.

Pertama-tama marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama untuk menyaksikan acara wisuda yang kedua kalinya pada Program D3 APP Departemen Pertanian. Mudah-mudahan rahmat dan hidayah-Nya akan selalu menyertai kita semua, baik selama berlangsungnya acara ini, maupun pada masa-masa yang akan datang.

Para hadirin Yang terhormat,

Kiranya tidaklah berlebihan bila pada kesempatan ini, saya mengutarakan rasa bahagia dan bangga sekaligus penghargaan kepada para pelaksana program D3 APP Departemen Pertanian, baik yang ada di daerah maupun di Pusat.



Oleh karena adanya acara wisuda ini tidak hanya membuktikan kemampuan dari para wisudawan, tetapi juga merupakan bukti kemampuan dari lembaga yang menghasilkannya. Perlu diketahui bersama bahwa program D3 APP Departemen Pertanian dilaksanakan di enam Propinsi; Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Pada tahun akademik 1990/1991 ini akan diwisuda untuk kedua kalinya sebanyak 598 orang lulusan. Dari 598 lulusan tersebut terperinci :

299 dari Program Studi Pertanian,
181 dari Program Studi Peternakan, dan
118 dari Program Studi Perikanan.

Para hadirin yang terhormat,

Program D3 APP diselenggarakan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan pertanian, terutama dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di sektor pertanian yang menunjang tercapainya pertanian maju, efisien dan tangguh yang kita idam-idamkan. Sebagaimana sudah menjadi tekad kita bersama untuk tetap melestarikan swasembada pangan, bahkan mengembangkan diversifikasi pangan, agroindustri dan agrobisnis. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka usahatani harus meninggalkan pola usaha yang hanya berdasarkan pada perkembangan sumber daya alam, dan mengalihkannya pada perkembangan teknologi dan industri.

Pengembangan agroindustri ini tidak saja perlu dilakukan dalam bentuk industri-industri besar di kota-kota, tetapi juga industri-industri rumah tangga di pedesaan. Banyak manfaat dapat diperoleh dalam pengembangan agroindustri di pedesaan. Disamping meningkatkan nilai tambah dan menjamin pemasaran hasil-hasil pertanian, pengembangan agroindustri dapat membuka lapangan-lapangan kerja baru di pedesaan, dan dengan demikian akan menghambat arus urbanisasi dari desa ke kota-kota besar.



Pola usahatani berdasarkan perkembangan teknologi dan industri menuntut kepekaan kita terhadap hasil-hasil penelitian terbaru dan menuntut kemampuan kita mengaplikasikannya di lapang. Namun dari kenyataan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan arus informasi teknologi antara lembaga-lembaga ilmiah dan riset dengan para pelaksana di lapangan, terutama di daerah pedesaan yang merupakan basis kegiatan usahatani. Kesenjangan tersebut dapat dipersempit apabila kemampuan para Penyuluh Pertanian Lapangan, sebagai aparat pertanian terdepan mampu menyerap teknologi yang cepat dan mampu menyebarluaskan secara cepat pula kepada masyarakat tani. Untuk maksud tersebut dasar pendidikan para penyuluh pertanian lapangan perlu ditingkatkan melalui jenjang pendidikan formal, yaitu pendidikan profesional pada Program Diploma selama tiga tahun.

Program D3 APP Departemen Pertanian telah dirancang sedemikian rupa untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut di atas. Kurikulum yang digunakan saat ini disusun dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Ditjen Pendidikan Tinggi dan Konsorsium Ilmu-Ilmu Pertanian, serta Bimas dan telah disempurnakan sesuai dengan kebutuhan. Kurikulum dirancang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga mengembangkan sikap profesional Kepemimpinan serta kepribadian yang tinggi yang dilandasi nilai-nilai luhur dan Moral Pancasila. Dengan demikian diharapkan melalui program ini akan dihasilkan lulusan dengan profil kemampuan sebagai berikut :

- Memahami pengetahuan psikologi sosial, komunikasi massa dan teknologi usahatani sehingga mampu melaksanakan tugas penyuluhan secara tepat sesuai dengan perubahan kemajuan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
- Mampu menerapkan teknologi produksi, ekonomi dan rekayasa sosial sehingga dapat melaksanakan tugas penyuluhan secara efektif-efisien sesuai dengan sistem usahatani yang dibina.

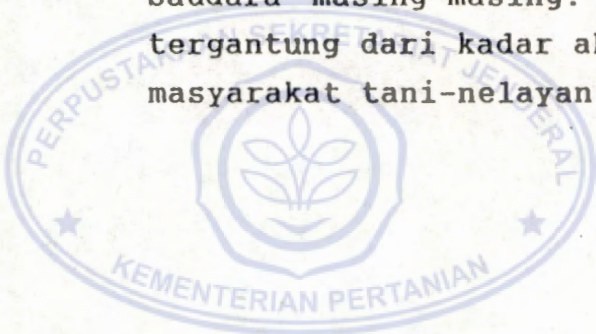


- Memiliki pengetahuan sistem dan metoda penyuluhan pertanian yang cukup luas sehingga mampu merancang/mempergunakan metoda alih teknologi dan pembinaan kelembagaan sosial ekonomi secara tepat guna dan efisien.

Program D3 APP Departemen Pertanian yang telah berdiri empat tahun yang lalu, secara bertahap terus mengembangkan sarana akademik, diantaranya telah didirikan Pusat Pelayanan pada Masyarakat Tani dan Nelayan (Farm Service Centre). Mahasiswa disamping belajar juga mengabdikan pada masyarakat disekitar kampus dengan memberikan pelayanan terhadap perkembangan teknologi pertanian. Demikian pula mereka diwajibkan mengikuti Kuliah Kerja Lapangan (KKL) selama dua bulan bekerjasama dengan Balai Penyuluhan Pertanian untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh langsung pada masyarakat tani dan nelayan di pedesaan. Pada saat ini Kelembagaan D3 APP Departemen Pertanian dipersiapkan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu dari DIKLAT menjadi AKADEMI dan akan diupayakan tenaga pengajar menjadi jabatan fungsional. Dengan demikian setiap tenaga pengajar dengan mantap melaksanakan tugasnya sebagai tenaga fungsional dan dituntut untuk terus mengembangkan diri dalam profesinya secara konsisten.

Para hadirin Yang terhormat,

Khususnya kepada para wisudawan, Saya berpesan agar rasa syukur, rasa bahagia dan kebanggaan yang ada pada diri Saudara saat ini, hendaknya disertai pula tekad yang kuat untuk terus mengembangkan kemampuan yang telah dimiliki dalam menjalankan tugas-tugas yang akan dihadapi nanti. Pendidikan di D3 APP Departemen Pertanian adalah suatu "nilai tambah" yang melekat pada diri Saudara masing-masing. Arti dari "nilai tambah" tersebut akan tergantung dari kadar aktifitas Saudara dalam pengamalannya kepada masyarakat tani-nelayan di tempat Saudara bekerja.



Apabila aktifitas Saudara setelah kembali dari sini sama dengan sebelum berangkat, maka nilai tambah tersebut tidak akan berarti. Terlebih lagi apabila predikat yang melekat dalam diri masing-masing hanya sekedar kebanggaan yang membebani instansi masing-masing, karena harus mengeluarkan tambahan anggaran sebagai konsekuensi bertambahnya nilai tambah Saudara. Sekali lagi saya tekankan bahwa nilai tambah Saudara bukan terletak dari Status dan Predikat tetapi lebih dititik beratkan pada karya nyata yang dihasilkan. Investasi untuk memberikan nilai tambah tersebut bagi masing-masing individu tidaklah kecil. Apabila dinilai dalam rupiah nilainya akan berkisar sebesar Rp.6.000.000 per mahasiswa. Selama ini pembiayaan program tersebut masih sepenuhnya tergantung dari anggaran proyek bantuan luar negeri (NAEP). Dan baru pada tahun akademik 1991/1992 sebagian beralih pada anggaran APBN. Keragaan para Alumni program ini selama bertugas nanti akan turut membetuk pola pembiayaan dan perkembangan program D3 APP untuk masa-masa berikutnya. Hal tersebut berarti apabila para alumni program D3 APP Departemen Pertanian mampu menunjukkan prestasi yang membanggakan, maka tidak hanya dirasakan oleh yang bersangkutan dan keluarganya, namun dampaknya akan dirasakan pula oleh lembaga pendidikan darimana alumni tersebut berasal dan secara lebih luas lagi akan dirasakan pula oleh masyarakat pertanian. Demikian pula sebaliknya apabila alumni tersebut dinilai tidak mampu dalam menjalankan tugas, maka dampaknya akan dapat menurunkan citra lembaga pendidikan pertanian darimana dia berasal.

Para hadirin Yang terhormat,

Pemanfaatan wisudawan perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari instansi yang mengirimkan wisudawan belajar di lembaga ini. Saya mengharapkan kepada instansi terkait, terutama dalam hal ini Kantor Wilayah Departemen Pertanian dan Dinas Dinas lingkup Pertanian selaku Induk Organisasi mereka, agar secepatnya memanfaatkan wisudawan tersebut sebelum kualitasnya menurun karena terlalu lama menunggu.



Dengan menempatkan mereka kembali secepatnya, pada posisi yang sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki mereka, akan dapat meningkatkan daya guna "nilai tambah" yang telah dimilikinya dengan cepat. Apabila proses penempatan kembali telah dilaksanakan, selanjutnya saya mengharapkan kepada para pejabat yang berkompeten untuk bersama-sama memikirkan dan mengupayakan konsekuensi dari penempatan tersebut, yaitu menyediakan fasilitas yang memungkinkan mereka untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, antara lain berupa penyesuaian kepangkatan, penetapan angka kredit untuk jenjang jabatan fungsional yang bersangkutan dan lain-lain. Hal tersebut merupakan sebagian upaya pembinaan sumberdaya manusia yang telah kita miliki agar dapat mendatangkan manfaat seoptimal mungkin.

Para hadirin Yang terhormat,

Kepada para pelaksana program D3 APP, hendaknya terus memantau para lulusannya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik sebagai bahan evaluasi bagi program yang telah dilaksanakan. Selain itu juga terus memperhatikan pola kecenderungan yang terjadi di dunia usaha sektor pertanian. Kedua faktor tersebut sangat diperlukan bagi pengembangan kurikulum dan pola pelaksanaan program D3 APP dimasa-masa yang akan datang. Oleh karena itu saya beranggapan bahwa salah satu ciri pokok pendidikan yang mengarah kepada profesionalisme adalah berorientasi kepada "kebutuhan", dan tidak semata-mata kepada pengembangan disiplin ilmu.

Salah satu jabatan fungsional yang telah diakui pemerintah di Departemen Pertanian adalah Jabatan Penyuluh Pertanian. Seorang pejabat fungsional dituntut untuk terus mengembangkan kemampuan profesionalnya, melalui berbagai kegiatan yang akan dihitung melalui angka kredit. Pendidikan baik formal maupun non-formal merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk keperluan tersebut.



Dengan demikian sudah selayaknya perlu dipikirkan dari sekarang jenjang pendidikan yang berkesinambungan, dan tidak hanya terbatas sampai program D3 APP saja. Berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan dimuka, maka tugas Departemen Pertanian dalam mempersiapkan tenaga Penyuluh Pertanian masa depan dalam era pembangunan yang berdasarkan pada perkembangan teknologi, tidaklah ringan. Dari data kepegawaian saat ini Departemen Pertanian memiliki lebih 29.407 penyuluh tingkat lapangan, yang dengan cara bertahap perlu ditingkatkan mutunya menjadi kualifikasi Diploma III. Apabila jumlah tersebut dianggap tetap, dengan daya tampung sebanyak 700 orang per-tahun maka misi peningkatan mutu penyuluh di lapangan baru dapat diselesaikan dalam jangka waktu cukup lama. Dengan mengandalkan kemampuan dan pola pelaksanaan yang ada sekarang, saya kuatir pada kurun waktu sepuluh tahun mendatang kita tertinggal lagi dari negara-negara lain. Oleh sebab itu, saya mengharapkan peran serta Saudara-saudara dari instansi yang terkait untuk bersama-sama memikirkan pemecahan kendala yang kita hadapi tersebut. Khusus kepada pelaksana program D3 APP di Pusat dan Daerah, hendaknya fenomena ini dapat dijadikan rujukan dalam upaya-upaya pengembangan program-program selanjutnya antara lain program pendidikan lapangan D3.

Para hadirin Yang terhormat,

Sebagai akhir dari sambutan ini, atas nama pemerintah saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan. Saya juga mengucapkan selamat kepada keluarga wisudawan yang telah dengan rela mengizinkan suami atau istri untuk meninggalkan keluarganya guna menjalankan butir ketujuh Sapta Prasetya KORPRI yakni "Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas". Oleh sebab itu saya berpesan kepada para wisudawan, setelah kembali kerumah masing-masing hendaknya berupaya pula mengembangkan kehidupan keluarga yang lebih harmonis. Kehidupan yang harmonis di keluarga menyumbangkan kehidupan masyarakat yang harmonis pula.



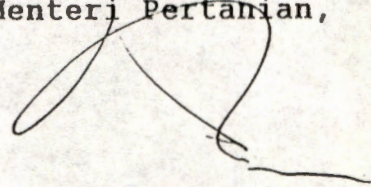
Akhirnya sekali lagi kepada para wisudawan saya ucapkan selamat atas keberhasilannya, selamat bertugas, selamat berjuang ditempat masing-masing.

Akhirnya kita do'akan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu"alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh.

Jakarta, 13 Maret 1991

Menteri Pertanian,



Ir. Wardoyo



46





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

pa

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN PADA PELANTIKAN
PEJABAT ESELON II, DEWAN KOMISARIS DAN
DIREKTUR PRODUKSI PTP XXXI,
BUMN LINGKUP DEPARTEMEN PERTANIAN
JAKARTA, 15 MARET 1991

Saudara Menteri Muda Pertanian Yang Saya Hormati,
Saudara-saudara Pejabat Eselon I dan Eselon II Lingkup
Departemen Pertanian,
Saudara-saudara Dewan Komisaris Serta Direksi BUMN Lingkup
Departemen Pertanian Yang Saya Hormati,
Ibu-ibu Dan Hadirin yang Saya Hormati.

Assalamu' Alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena ridho-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menyaksikan pelantikan pejabat eselon II dari Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian dan pelantikan Dewan Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Negara di lingkungan Departemen Pertanian.

Mutasi pejabat baik karena selesai masa jabatannya ataupun pengalihan tugas merupakan pergantian penugasan sumberdaya manusia, mengandung arti upaya peningkatan pemanfaatan dari sumberdaya manusia tersebut pada tempat, waktu, posisi, kewenangan yang lebih tepat pada kurun waktu tertentu. Jelas pergantian tersebut hendaknya dilihat sebagai



upaya rekayasa pengembangan tugas menjadi pimpinan dan anggota pimpinan, yang secara kolektif diharapkan lebih berdaya guna dan berhasil guna. Tim tersebut diharapkan akan dapat berfungsi lebih dapat meluruskan yang kurang lempang, mencari berbagai alternatif pemecahan permasalahan yang lain, yang mungkin tadinya sudah dikemukakan, namun dalam kurun waktu tertentu alternatif pemecahan itu menjadi lebih relevan.

Saudara-saudara Yang Saya Hormati,

Kita menyadari sepenuhnya betapa berat tugas dan fungsi yang dibebankan kepada jajaran pertanian dalam Repelita V ini. Sasaran pertumbuhan perekonomian Indonesia yang telah ditetapkan sebesar 5% setahun sebagian menjadi pangsa sektor pertanian dengan sasaran 3,6% setahun. Dibandingkan dengan sektor perindustrian dengan sasaran pertumbuhan 8,5% setahun, pangsa pertumbuhan sektor pertanian memang relatif kecil. Meskipun demikian, pangsa yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan perindustrian itu, masih mempunyai dampak yang luas sekali, karena menyangkut lebih dari 55,3% angkatan kerja. Peranan pertanian dalam PDB masih cukup besar. Adalah kewajiban kita untuk mengamankan setiap pelaksanaan pembangunan pertanian dengan tindakan manajemen yang tepat, yang mempunyai dampak paling besar bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pendekatan kita untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan tersebut mengacu kepada konsepsi TRIMATRA yang lebih menekankan kepada keterpaduan wilayah, komoditas, dan usaha-



tani. Untuk dapat melaksanakan konsepsi tersebut secara keseluruhan dan utuh, kita memerlukan suatu reevaluasi dari setiap asumsi kita secara lebih jeli. Hasil penilaian kembali itu kemudian dijabarkan ke dalam tindakan-tindakan untuk meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan dengan kesiapan yang tinggi, dengan mengantisipasi setiap sikon yang mungkin terjadi, yang dapat merubah pola pelaksanaan dari kegiatan pembangunan.

Kemampuan mengkoordinasi serangkaian kegiatan menuju tercapainya sasaran secara lebih efektif merupakan salah satu kualitas kepemimpinan yang sangat diinginkan. Kemampuan tersebut dimulai dari itikad untuk menghargai tugas orang lain, melihat keragaan pihak lain secara positif, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keragaan pembangunan nasional, dan memadukan kegiatan pihak lain dengan pelaksanaan dan kegiatan kita. Koordinasi adalah kerjasama yang tingkatannya lebih tinggi, menyangkut berbagai aspek tindakan manajerial.

Saudara-saudara Yang Saya Hormati,

Dalam kesempatan yang sangat baik ini ada beberapa hal yang perlu saya kemukakan sehubungan dengan pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan pertanian. Pertama, sehubungan adanya keluarnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional kita perlu merumuskan lebih tegas lagi partisipasi kita di sektor pertanian dalam pembinaan pendidikan nasional demi terciptanya keterpaduan dan keserasian antara pendidikan umum dan kejuruan, latihan kerja



serta keterampilan, dan pendidikan serta latihan kedinasan, dengan tetap memperhatikan peningkatan mutu pendidikan dari setiap jenjang. Rumusan penyuluhan pertanian pun hendaknya dapat selaras dengan Undang-undang tersebut.

Penyuluhan pertanian yang sedang kita tata kembali sebagai akibat dari Organisasi Baru yang dituangkan dalam Keppres Nomor 4 dan 5 Tahun 1990, hendaknya tidak saja dilihat dalam pelaksanaannya dari segi kelembagaan pendukungnya, tetapi juga dari segi sistem dan prosedurnya yang mapan, yang dapat diikuti dengan tepat-asas oleh semua pihak dengan itikad baik yang sama tinggi kadarnya. Kita hendaknya dapat melaksanakan dengan baik sesuai dengan pola pikir yang baru.

Saudara-saudara Yang Saya Hormati,

Masalah kedua yang ingin saya kemukakan adalah mengenai pengawasan Badan Usaha Milik Negara. Dari hasil pengamatan permasalahan yang dialami oleh BUMN selama ini dirasakan masih perlu diambil langkah-langkah meningkatkan perbaikan di bidang pengelolaan dan pengawasan BUMN dalam Repelita V ini. Dalam melaksanakan tugas ini BUMN lingkup pertanian tetap harus meningkatkan hasil guna dan daya guna. BUMN lingkup pertanian mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam upaya mewujudkan pembangunan pertanian yang maju, efisien dan tangguh. Sangat diharapkan agar Dewan Komisaris dapat berperan dalam memapankan kondisi perusahaan khususnya dalam pembayaran pajak secara berdisiplin, pembagian deviden yang tepat waktu, dan upaya-upaya lainnya dalam meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Dengan adanya beberapa peng-



gantian Dewan Komisaris adalah perlu sekali kita menyamakan persepsi mengenai fungsi pengawasan untuk memahami peranan Dewan Komisaris selaku aparat pengawasan pengelolaan perusahaan.

Saudara-saudara Yang Saya Hormati,

Pada dasarnya dalam mewujudkan pengawasan BUMN diperlukan kemauan dan usaha yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak yang berkepentingan. Keberhasilan usaha ini tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak, melainkan ditentukan oleh berbagai pihak dalam suatu kerjasama yang terencana. Dalam hal ini Dewan Komisaris perlu secara jelas memahami peranannya dalam usaha memantau setiap langkah yang diambil hal ini perlu karena tuntutan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris (dan Dewan Pengawas) hendaknya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983, dan juga didasarkan atas hasil pengamatan kegiatan BUMN itu sendiri.

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan hendaknya dapat memperdalam keahliannya baik teori maupun praktek mengenai pengelolaan perusahaan, serta meningkatkan kemampuan mengidentifikasi secara dini apakah perusahaan mengalami kemajuan atau kemunduran. Dewan Komisaris hendaknya dapat:

- memberikan pendapat dan saran dalam rapat umum pemegang saham selaku wakil kuasa pemegang saham mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan, laporan berkala dan laporan lainnya;



- mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, termasuk kondisi perusahaan;
- memberikan pendapat atas persoalan penting lainnya dalam pengelolaan perusahaan baik kepada Menteri Pertanian maupun kepada Direksi.

Saudara-saudara Sekalian yang Saya Hormati

Ketiga, saya juga ingin menekankan pentingnya pengelolaan yang utuh dari suatu PTP, khususnya PTP XXXI yang pada saat ini memang memerlukan pengelolaan secara menyeluruh dan peningkatan upaya penerapan teknologi yang dikaitkan dengan produksi, dimulai dari pra-panen, panen, dan pengelolaan hasil. Untuk itu anggota direksi PTP XXI dilengkapi dengan direktur produksi.

Saudara-saudara Yang Saya Hormati,

Berbekal apa yang saya kemukakan tersebut tadi, saya titipkan kegiatan dari setiap tugas yang Saudara laksanakan pada waktu yang akan datang, semoga menjadi kinerja Saudara yang positif, yang menyumbang kepada keberhasilan tercapainya sasaran-sasaran pembangunan pertanian pada Pelita V ini.

Akhirnya saya menyampaikan terima kasih saya yang setulus-tulusnya kepada mereka yang pada hari ini menyerahkan jabatannya kepada penjabat yang baru, kepada para ibu yang dengan setia telah mendampingi suami dalam meniti

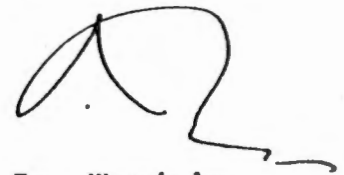


jenjang karier, dan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya pembangunan pertanian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat menerima amal bakti Saudara-saudara.

Kepada Saudara-saudara yang dilantik hari ini, saya menyampaikan selamat memperoleh kepercayaan menduduki jabatan, selamat bekerja, semoga kita diberi petunjuk dan ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Wabillahi Taufik Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warokhmatullohi Wabarokatuh.

Menteri Pertanian,



Ir. Wardojo



47





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
DALAM RANGKA PERESMIAN BEBERAPA PROYEK PU
DI SULAWESI SELATAN
TANGGAL, 26 MARET 1991

Saudara Gubernur yang saya hormati,
Para Pejabat Tingkat I Sulawesi Selatan,
Hadirin dan hadirat yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warokhmatullohi Wabarokatuh,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat limpahan rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul dalam rangka peresmian Proyek-proyek PU yang telah selesai dibangun pada tahun anggaran 1990/1991.

Telah banyak hasil yang kita capai dalam rangka pembangunan selama ini, namun kita menyadari bahwa masih banyak pula hal-hal yang perlu kita raih dan sempurnakan untuk mencapai sasaran pembangunan yang kita inginkan.



Bahwa banyak hal telah kita capai, dapat disimak dari yang kita saksikan hari ini yaitu diresmikannya beberapa proyek PU yang meliputi : Bidang pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya berupa pembangunan irigasi, ~~rawa, sungai,~~ jalan, jembatan, ~~perumahan, lingkungan pemukiman~~ dan penyediaan air bersih. Dengan selesainya pembangunan prasarana dan sarana ke PU an yang kita resmikan hari ini tidak berarti bahwa penanganan proyek-proyek tersebut telah berhenti, karena selanjutnya kita ditantang untuk mampu memelihara dan mengoperasikan bangunan-bangunan tersebut agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya.

Pembangunan bidang pengairan diarahkan kepada usaha perluasan areal pertanian dalam rangka menunjang peningkatan produksi pangan. ~~Bidang kegiatan pembangunan pengairan antara lain meliputi perbaiki dan peningkatan jaringan irigasi yang telah ada, pembangunan irigasi baru, pembangunan daerah rawa, pengembangan wilayah sungai, pengendalian dan pengamanan pantai serta pengendalian endapan, erosi dan tanah longsor.~~

Jany

Pembangunan jaringan irigasi meliputi pembangunan baru dan rehabilitasi dalam rangka mempertahankan swasembada pangan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat petani. Selesainya tahap pembangunan, diikuti tahap pengaturan dan pengelolaan serta pemeliharaan jaringan irigasi yang umumnya disebut dengan istilah operasi dan pemeliharaan irigasi.



~~Pengembangan daerah rawa meliputi usaha reklamasi rawa untuk irigasi dan perluasan areal pertanian untuk menunjang program transmigrasi.~~

~~Persungai, meliputi pengembangan wilayah sungai, pengaturan sungai dan pengendalian banjir untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi sungai : perbaikan dan pemeliharaan sungai untuk mengatasi masalah-masalah persungai.~~

~~Pengendalian dan pengamanan pantai untuk memelihara dan mengendalikan garis pantai dengan memperhatikan kelestarian tata air disekitarnya:~~

~~Pengendalian endapan, erosi dan tanah longsor berupa usaha-usaha teknis dalam rangka pengendalian material gunung berapi dan tanah longsor.~~

Hadirin yang berbahagia,

Pembangunan dibidang Bina Marga diarahkan pada pembinaan jaringan jalan dalam rangka meningkatkan kemampuan pengangkutan barang serta jasa dan mobilitas manusia atau menunjang tuntutan kebutuhan pertumbuhan wilayah untuk tujuan pemerataan.

Penanganan jalan didasarkan pada sistem pelayanan yang saling menunjang sehingga merupakan jaringan yang tidak terputus dan saling mendukung. Pengembangan jaringan jalan diwilayah Indonesia ditujukan pada usaha untuk menunjang sektor-sektor strategis dalam usaha meningkatkan



pertumbuhan ekonomi serta membuka daerah terpencil dan terisolasi. Selain itu juga diarahkan untuk menghubungkan daerah produksi dengan daerah pemasaran terutama produksi non migas (industri, perdagangan, pariwisata dll).

Penanganan pembangunan jalan dan jembatan meliputi usaha-usaha :

- a) Pemeliharaan jalan dan jembatan baik rutin maupun berkala yang dikembangkan secara terus-menerus, meluas dan intensif. Usaha ini dilaksanakan melalui program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan,
- b) Peningkatan kondisi jalan sesuai dengan tuntutan pertumbuhan lalu-lintas dengan penajaman kaidah-kaidah efisiensi. Usaha ini dilaksanakan melalui program peningkatan jalan dan penggantian jembatan.
- c) Bagi daerah dengan kepadatan lalu-lintas tinggi diupayakan alternatif lain dengan dibangun jalan, tol.

Saudara-saudara hadirin yang berbahagia,

~~Pembangunan dibidang pemukiman bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup manusia melalui pengadaan dan perbaikan prasarana pemukiman didaerah perkotaan dan pedesaan dengan standar kebutuhan dasar yang memberi kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan pokok penduduk. Terwujudnya kesehatan lingkungan yang memenuhi persyaratan aman, nyaman, tertib, dan sehat merupakan usaha yang erat kaitannya dengan peningkatan taraf kesehatan dan produktivitas penduduk serta penurunan tingkat kematian bayi akibat muntaber/diare.~~



Program perumahan rakyat mencakup pembangunan rumah sederhana pemugaran perumahan dan lingkungan desa, perbaikan kampung dan kawasan/lingkungan pasar, peremajaan dan pengembangan pemukiman kota, penataan dan pengawasan bangunan.

Pembangunan rumah sederhana ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan didaerah perkotaan. Sasarannya dititik beratkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, baik dalam lingkungan sektor formal maupun informal.

Pembangunan rumah tersebut tetap memperhatikan persyaratan minimum bagi perumahan yang layak, sehat, aman dan serasi. Pemugaran perumahan dan lingkungan desa ditujukan untuk membantu dan mendorong masyarakat desa memperbaiki rumah dan lingkungan desa sesuai persyaratan teknis dan kesehatan.

Perbaikan kampung bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat melalui penataan lingkungan dan penyediaan prasarana umum. Perbaikan lingkungan pasar mencakup perbaikan pembuangan sampah, perbaikan saluran drainase dan saluran limbah, penyediaan air bersih, perbaikan jalan lingkungan dan pembuangan MCK.

Program penyediaan air bersih bertujuan untuk meningkatkan penyediaan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan bagi seluruh masyarakat pedesaan maupun perkotaan Pada Repelita V diperkirakan 80% penduduk perkotaan dan 60% penduduk pedesaan memperoleh pelayanan air bersih. Kegiatan penyediaan air bersih meliputi peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan pelayanan air bersih. Peningkatan pelayanan air bersih meliputi kegiatan perluasan jaringan



distribusi, perbaikan jaringan pipa, penambahan sambungan rumah dan hidran umum serta penyediaan sambungan khusus untuk pelabuhan, industri, rumah sakit, pusat pendidikan, pariwisata dan sebagainya.

~~Program penyehatan lingkungan pemukiman bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan lingkungan pemukiman penduduk baik didaerah perkotaan maupun pedesaan melalui penanganan air limbah, persampahan dan drainase. Penanganan air limbah terpusat mencakup daerah pemukiman yang lebih luas diutamakan dikota-kota besar sehingga dapat melaksanakan sistem pemulihan kembali biaya investasi. Kegiatan penanganan persampahan meliputi pengumpulan pengangkutan dan pembuangan sampah ditempat-tempat pembuangan akhir. Kegiatan penanganan drainase diutamakan untuk daerah perkotaan yang sering mengalami banjir akibat letaknya yang rendah atau topografinya datar.~~

Hadirin yang berbahagia,

Dengan selesainya beberapa proyek tersebut diatas, satu hal yang perlu diingatkan disini bahwa membangun prasarana secara fisik biasanya jauh lebih menarik dibandingkan dengan upaya memeliharanya. Karena membangun fisik lebih menarik, maka perhatian kita biasanya hanya tertuju pada pembangunan, tetapi sering lupa kepada upaya lebih lanjut, yaitu memelihara bangunan tersebut. Oleh karena itu kita sering mendengar adanya ucapan bahwa kita dapat membangun tapi tidak bisa memelihara. Dalam kaitan ini saya

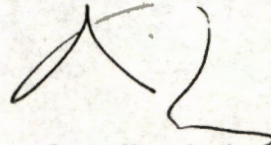


minta perhatian Saudara baik aparatur Pemerintah maupun masyarakat pemakai untuk memelihara dan memanfaatkan secara optimal proyek yang telah selesai dibangun tersebut.

Akhirnya dengan ucapan "ALHAMDULILLAH" dengan ini saya resmikan proyek-proyek dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum di Sulawesi Selatan yang telah selesai dibangun tahun 1990/1991.

Wassalamu'alaikum Warokhmatullohi. Wabarokatuh'

Menteri Pertanian,



Ir. Wardoyo



48





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN PADA PERESMIAN
PELUNCURAN DAN PENGOPERASIAN KAPAL KAYU LAMINASI
TIPE TUNA LONG LINE 45 GT MILIK PT. PERIKANAN SAMODRA DESAR

TANGGAL 26 MARET 1991

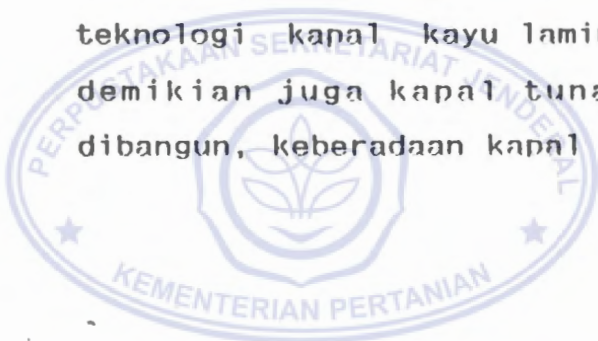
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Saudara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan yang saya hormati

Saudara Direksi PT. Perikanan Samodra Besar, dan para undangan yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri acara peresmian peluncuran dan pengoperasian dua kapal kayu laminasi tipe long line yang dibangun di galangan milik PT. Perikanan Samodra Besar di Ujungpandang ini.

Berhasilnya pembangunan dua kapal kayu laminasi tipe long line ini mempunyai arti yang cukup penting dalam pembangunan perikanan, karena selain merupakan kapal tuna long line yang pertama dibangun di Indonesia juga merupakan sarana produksi yang sangat penting dalam meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang masih cukup tersedia di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Kami berkeyakinan kendatipun teknologi kapal kayu laminasi relatif masih baru di Indonesia demikian juga kapal tuna long line baru yang pertama kali dibangun, keberadaan kapal yang akan diresmikan peluncurannya ini



akan lebih sesuai dan memenuhi persyaratan teknis maupun ekonomis untuk dioperasikan di perairan Indonesia, karena dalam design bangunan tersebut telah dipadukan antara pengalaman PT. Perikanan Samodra Besar yang selama 18 tahun bergerak di bidang pengoperasian kapal tuna long line dengan pengalaman Lembaga Kewiraswastaan Industri - Integrated Boat Building Project (LKI-IBP) yang memiliki keahlian khusus di bidang industri perkapalan.

untuk meningkatkan daya dukung kapal kayu di sektor.
Hadirin yang saya hormati!

Sebagaimana telah saya singgung sebelumnya, potensi sumberdaya perikanan di perairan Indonesia dan ZEEI masih cukup besar. Hal tersebut merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang perlu dimanfaatkan untuk menyediakan bahan pangan hewani, sumber devisa negara, penyediaan bahan baku industri dan meningkatkan pendapatan para nelayan. Berdasarkan perkiraan, potensi lestari ikan jenis tuna (tidak termasuk ikan cakalang) yang menjadi sasaran penangkapan tuna long line di perairan Indonesia dan ZEEI sekitar 166 ribu ton/tahun. Dari potensi lestari tersebut dewasa ini baru dimanfaatkan sekitar 30% atau kurang lebih 49 ribu ton/tahun. Sebagian besar potensi tersebut terdapat di wilayah Indonesia Bagian Timur (IBT) seperti di perairan sekitar Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya.

Untuk menggali potensi sumber perikanan yang masih cukup tersedia tersebut, di samping diperlukan pembangunan sarana penunjang seperti pelabuhan perikanan, juga yang paling pokok perlu adanya percepatan penambahan kapal-kapal penangkap yang sesuai dilihat dari segi teknis, kapasitas dan ekonomisnya.



Percepatan penambahan kapal tersebut hanya mungkin terjadi apabila semua pihak seperti swasta, BUMN dan para nelayan semakin meningkatkan partisipasinya untuk membangun kapal-kapal baru seperti yang dilakukan PT. Perikanan Samodra Besar atau cara sewa kapal-kapal berbendera asing sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku.

Khusus mengenai pemanfaatan sumberdaya perikanan di perairan ZEEI, pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan tentang cara sewa terhadap penggunaan kapal-kapal perikanan berbendera asing sebagai pengganti sistem licensing yang selama ini berlaku dan diterapkan sejak tahun 1986. Dengan cara sewa ini, selain seluruh hasil tangkapan dapat dikuasai perusahaan Indonesia, juga diharapkan agar pengalaman, ketrampilan dan kemampuan perusahaan Indonesia lebih meningkat lagi yang pada gilirannya pemanfaatan ZEEI sepenuhnya dilaksanakan oleh perusahaan Indonesia.

Hadirin yang saya hormati!

Demikianlah sambutan dan pengarahan saya. Pada kesempatan ini saya minta perhatian Direksi dan seluruh karyawan PT. Perikanan Samodra Besar akan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar kedua kapal kayu laminasi tipe long liner 45 GT yang telah berhasil dibangun, supaya dipelihara dan dioperasikan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang serta dapat menambah kemampuan perusahaan untuk melanjutkan replacement secara bertahap terhadap kapal-kapal perusahaan yang semakin tua umurnya.



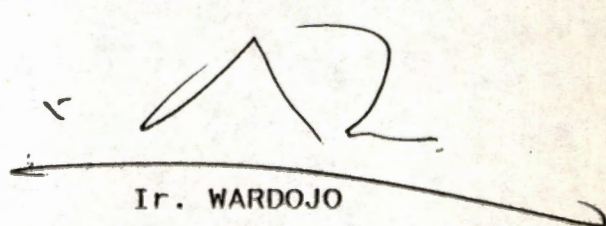
2. Supaya berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh pesanan pembangunan kapal jenis tuna long line baik dari pihak swasta, koperasi maupun dari perusahaan perikanan BUMN, sehingga kegiatan yang telah dimulai dalam pembangunan kapal ini dapat berkelanjutan yang berarti kegiatan perusahaan khususnya Kantor Cabang PT. Perikanan Samodra Besar Ujungpandang dapat semakin berkembang. Manfaatkan sebaik-baiknya pengalaman yang diperoleh selama pembangunan kapal kayu laminasi ini, demikian juga keunggulan komperatif yang ada di daerah ini seperti, tersedianya bahan baku kayu untuk pembangunan kapal dan tersedianya tenaga pengrajin yang mempunyai ketrampilan di bidang pembangunan kapal-kapal kayu.

Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa saya meresmikan peluncuran dan pengoperasian dua kapal kayu laminasi yaitu masing-masing KM. SAMODRA 30 dan KM. SAMODRA 31.

Terima kasih atas perhatian Saudara-Saudara sekalian.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

MENTERI PERTANIAN



Ir. WARDOJO



49





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA UPACARA APEL BENDERA
TANGGAL 18 APRIL 1991

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

- Yang terhormat para Pejabat Eselon I
- Saudara-Saudara anggota KORPRI yang saya hormati,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, maka pada pagi yang berbahagia ini, kita dapat menghadiri upacara bendera yang penting ini dalam keadaan sehat walafiat.

Saya katakan penting karena upacara ini merupakan salah satu cara memelihara dan meningkatkan semangat juang, motivasi kerja, keiklasan kita mau berkorban dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan negara sebagai pengamalan Pancasila.

Saudara-Saudara sekalian

Pada akhir-akhir bulan ini rupanya terjadi hari-hari penting bagi umat beragama di Indonesia yaitu umat Hindu dengan hari raya Nyepinya. Umat Kristen dengan hari raya Paskahnya serta umat Islam dengan bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitrianya. Untuk itu semua saya ucapkan Selamat Nyepi Tahun Saka 1913, Selamat



Paskah dan Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mengampuni segala kesalahan, maupun dosa-dosa yang kita perbuat.

Kalau kita ambil makna dari hari-hari besar yang saya sebut tadi yaitu kita semua telah mendapatkan kemenangan berupa pembersihan diri dari dosa, sehingga kembali sebagai manusia yang baru lahir. Maka untuk seterusnya kita harus mengisi kemenangan itu dengan segala perbuatan yang lebih baik, dengan lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdisiplin, bertanggung jawab, berjiwa sosial, jujur, hemat serta melakukan perbuatan/sifat-sifat terpuji lainnya. Hasilnya menimbulkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial keluarga besar bangsa Indonesia yang majemuk ini pada umumnya dan keluarga besar Departemen Pertanian. Dengan demikian dapat memantapkan semangat persatuan dan kesatuan yang merupakan salah satu unsur utama dan mutlak bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan Indonesia pada umumnya dan pembangunan pertanian pada khususnya. Mempertebal solidaritas sosial serta memperkuat kepekaan dan kepedulian terhadap kepentingan bersama seluruh bangsa dalam rangka mengatasi kendala pembangunan yang berupa kecemburuan sosial dan lain sebagainya.



Saudara-saudara sekalian,

Bulan ini adalah awal tahun anggaran 1991/1992, merupakan awal tahun ke 3 Repelita V. Berarti 3 tahun lagi kita akan menyelesaikan pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama (Bangkajang I). Dalam waktu 3 tahun mendatang kita harus benar-benar bekerja keras, agar landasan yang kita bangun benar-benar kuat dan kukuh untuk tinggal landas. Departemen Pertanian telah mendapatkan anggaran tahun 1991/1992 lebih kurang 378 milyar rupiah, yang berarti mengalami kenaikan 52 % dari anggaran tahun yang lalu (1990/1991) sebesar 248,79 milyar rupiah.

Sampai dengan akhir tahun anggaran 1991 pelaksanaan program/proyek pembangunan pertanian, realisasi fisik nya mencapai 78,34 persen dan realisasi keuangan mencapai 68,87 persen. Sedangkan pada tingkat program, realisasi fisik berkisar antara 100 persen tertinggi, hingga 71,86 persen terendah, sementara realisasi keuangan berkisar antara 99,55 persen tertinggi, hingga 61,29 persen terendah. Kalau kita melihat realisasi seperti yang saya sebut tadi, masing-masing unit kerja harus dapat mengevaluasi dan mentelaah apa penyebab-penyebabnya, sehingga realisasi mencapai dibawah target, dan langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk meningkatkan keberhasilannya. Bagi yang telah memenuhi target harus mencari jalan untuk mempertahankan hasilnya bahkan meningkatkan kualitas maupun kuantitas hasilnya.

Dalam menyelesaikan 3 tahun sisa Pelita V ini kita harus terus



waspada dengan adanya tantangan-tantangan baik dari sumber daya manusianya, antara lain rendahnya produktivitas tenaga kerja, dari sumberdaya alam dengan pelestariannya serta bencana alam yang mungkin terjadi seperti perkiraan musim kemarau panjang yang akan datang.

Dengan adanya kenaikan anggaran tahun 1991/1992 sebesar 52 persen ini, produktivitas kerja kita benar-benar harus kita pacu sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Saya harapkan dana yang ^{bersih} kita peroleh ini dapat dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin sehingga pelaksanaan proyek-proyek pembangunan disektor pertanian dapat benar-benar menopang keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Sudah dipesankan oleh Presiden Soeharto dalam pidato tertulisnya pada upacara penyerahan DIP 1991/1992 " bahwa kita semua harus memperhatikan dengan baik-baik aspek pengawasan sebab kegagalan sebuah proyek juga berarti pemborosan uang negara dan berarti pula pemborosan uang rakyat ". Apabila hal tersebut terjadi sia-sialah usaha kita selama ini untuk meningkatkan taraf hidup petani-nelayan khususnya dan taraf hidup masyarakat Indonesia pada umumnya.

Saudara-saudara sekalian,

Telah banyak hasil yang kita capai dalam pembangunan selama ini. Namun ada pula yang perlu diperhatikan lebih seksama lagi, yakni tertib administrasi, tertib anggaran, tertib teknis dan lain sebagainya.



Temuan BPKP untuk Deptan tahun 1990/1991 masih relatif cukup besar. Munculnya penyimpangan tersebut ini sebagai akibat kelemahan-kelemahan managerial dan operasional di lapangan. Saya harapkan untuk tahun anggaran ini dan seterusnya penyimpangan-penyimpangan dapat ditekan serendah-rendahnya.

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan yang dapat membawa kerugian negara, maka setiap satuan kerja agar menggunakan referensi yang telah kita tentukan. Oleh karena itu tindak lanjut pengawasan perlu kita tingkatkan. Pengawasan melekat (Waskat) harus selalu dijalankan sebaik-baiknya. Dengan demikian akan tercipta aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, efektif dan efisien, sehingga pada akhirnya tercipta disiplin nasional yang mantap.

Saudara-saudara sekalian,

Kita lihat sekarang ini petugas upacara apel bendera seluruhnya adalah karyawati. Rupanya tiga hari lagi, tepatnya tanggal 21 April nanti, bangsa kita khususnya kaum wanita akan memperingati Hari Kartini.

Kita semua mengetahui RA Kartini adalah figur wanita Indonesia. Ia tidak pernah memimpin pasukan gerilya untuk melawan tentara kolonial. Ia mewujudkan emansipasi wanita dalam arti yang sebenarnya, emansipasi yang tetap dengan kodratnya sebagai wanita.



Hidupnya yang singkat sarat dengan gejolak, Ia tidak sekedar resah atas nasib kaum wanita di lingkungannya, tapi lebih jauh bahwa kegelisahannya atas martabat bangsa Indonesia.

Kartini berjuang dengan sikap pasrahnya, tetapi kepasrahan itulah yang sekaligus menjadi ia kuat. Ia melawan sesuatu yang dikatakannya sebagai batu karang yang teramat sukar dirontokkan. Jalan perjuangan Kartini memang bukan jalan perjuangan politik yang gegap gempita.

Ia percaya jalan menuju kebebasan dan kemerdekaan hanya melalui jalan pendidikan. Tanpa pendidikan tak satupun tujuan bisa dicapai.

Jalan pikirannya yang universal melompat jauh melintasi tembok Kabupaten, meski raganya terkurung disana.

Pandangan Kartini bahwa pendidikan akan membuat kaum wanita mempunyai keahlian yang membuatnya mandiri, masih tetap relevan dengan zaman sekarang ini.

Saudara-Saudara sekalian,

Pada masa-masa mendatang nampaknya kaum Wanita Indonesia akan semakin banyak duduk dalam posisi strategi dalam pembangunan bangsa kita. Pembinaan wanita semakin intensif dan berencana, sehingga partisipasi wanita cukup besar pula dalam pembangunan.



Sensus Penduduk Indonesia tahun 1990, menunjukkan bahwa pria berjumlah 89.448.235 dan wanita 89.873.406 (50,1 %). Dari jumlah ini, sebanyak 62.125.610 wanita (69,12 %) berada di pedesaan dan lebih dari 58 % mempunyai lapangan usaha di sektor pertanian. Sensus tersebut juga mengungkapkan bahwa dari ± 19 juta rumah tangga petani, 10 % diantaranya adalah wanita yang menjadi kepala rumah tangga (female headed household).

Hampir seperlima kepala rumah tangga pedesaan di Jawa adalah wanita. Dengan demikian wanitatani-nelayan memegang peranan penting dalam pembangunan pertanian.

Untuk meningkatkan peranan wanita yang saya sebut tadi juga menjadi tanggung jawab kita di Departemen Pertanian. Mereka yang saya maksudkan adalah wanitatani-nelayan. Kita upayakan mereka dapat memainkan peranan penting dalam proses produksi pertanian, terutama pada fase-fase penanaman, penyiangan, panen dan pasca panen. Didalam usahatani peranan mereka sangat penting, tidak saja pada kegiatan fisik untuk usahatannya, tetapi mampu memberikan sumbangan didalam menambah penghasilan keluarga. Mereka bekerja dilahan sendiri atau sebagai buruh tani, bekerja diluar sektor pertanian seperti mengerjakan kerajinan, berusaha dagang kecil, berburuh musiman di kota, disamping berkecimpung dalam pekerjaan mengurus rumah tangga. Pengambilan keputusan baik dalam adopsi teknologi baru, maupun dalam penetapan jenis usaha/kegiatan keluarga, 62 % dilakukan oleh wanitani.



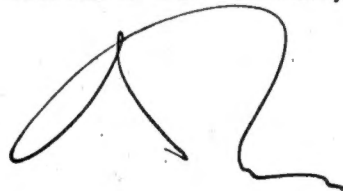
Saudara-saudara sekalian,

Demikian sambutan saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasanya memberkahi setiap langkah yang kita tempuh.

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan Selamat ber - Idul Fitri 1 Syawal 1411 H. Saya minta maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan yang mungkin terjadi diantara kita. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Menteri Pertanian,



Ir. Wardoyo



50





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PIDATO MENTERI PERTANIAN
PADA UPACARA PENYERAHAN KAPAL PENANGKAP IKAN
DARI PT. DJAYANTI GROUP KEPADA NELAYAN ANGGOTA KUD MINA ILHAM
DALAM RANGKA POLA PIR

- =====
- Yang Terhormat Saudara Menteri Koperasi ;
 - Yang Terhormat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Dati I Sulawesi Tenggara ;
 - Saudara Pimpinan PT. Djayanti Group yang saya hormati ;
 - Saudara para nelayan yang tergabung dalam KUD Mina ILHAM dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warochmatullahi Wabarokatuh.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas rahmatNya maka pada hari ini kita semua dapat bersama-sama menghadiri dan menyaksikan upacara penyerahan kapal penangkap ikan cakalang dari PT. Teluk Bintuni Mina Agro Karya sebagai anak perusahaan dari PT. Djayanti Group kepada nelayan anggota KUD Mina ILHAM yang menjadi plasma dalam rangka kerjasama pola PIR.

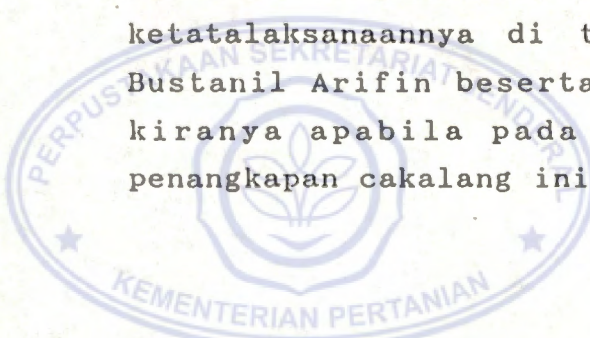
Peristiwa ini tentu membanggakan hati kita semua oleh karena kita telah maju selangkah lagi dalam upaya mengembangkan para nelayan kita yang sebahagian besar masih bergerak dalam usaha yang berskala kecil dan bersifat tradisional. Melalui kerjasama pola PIR dimana perusahaan berskala industri yang memiliki keunggulan permodalan, keterampilan dalam penggunaan teknologi maju serta pengelolaan usaha bertindak sebagai inti dalam memajukan usaha para nelayan yang menjadi plasmanya. Diharapkan dengan pola PIR ini para nelayan tersebut dapat keluar dari pola-pola tradisional dan mampu mengembangkan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat yang berarti terbuka peluang bagi peningkatan penghasilan mereka.

Khususnya bagi pengembangan pola PIR antara perusahaan Djayanti Group dengan nelayan yang tergabung dalam KUD Mina ILHAM yang berlokasi di Kendari ini saya harapkan benar-benar dapat berjalan dengan baik dan semakin berkembang di masa-masa mendatang oleh karena keberhasilan kerjasama ini akan memberikan dukungan yang berarti bagi pelaksanaan kebijaksanaan dan Program Pemerintah di bidang pembangunan Sub Sektor Perikanan. Hal ini dapat kita lihat antara lain :

a. Dukungan terhadap kebijaksanaan pengembangan wilayah Indonesia Bagian Timur dimana kapal-kapal penangkap ikan cakalang yang digunakan akan beroperasi di Perairan Timur Sulawesi Tenggara sampai ke Laut Banda. Sebagaimana kita maklumi, perairan laut di Indonesia Bagian Timur ini masih cukup potensial dan mengandung jenis-jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi di pasar manca negara seperti tuna dan cakalang. Dengan beroperasinya kapal-kapal penangkap ikan cakalang ini yang direncanakan akan mencapai 500 buah maka ekspor komoditi hasil perikanan kita, khususnya cakalang akan bertambah lebih kurang 5.000 ton/tahun yang berarti tambahan devisa negara yang cukup berarti.

b. Pengembangan usaha penangkapan ikan cakalang melalui pola PIR ini dimaksudkan pula untuk membina dan mengembangkan KUD Mina agar mampu menjalankan usahanya secara mandiri dan lebih ekonomis.

Sebagaimana kita ketahui KUD adalah merupakan unit ekonomi yang paling tepat bagi masyarakat yang keadaan ekonominya masih lemah seperti petani nelayan. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya untuk mengembangkannya. Menteri Pertanian beserta segenap aparatur pertanian di pusat dan di daerah mempunyai tanggung jawab di bidang pembinaan teknis sesuai bidang usahanya sedangkan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaannya di tangani oleh Menteri Koperasi, Bapak Bustanil Arifin beserta segenap jajarannya. Maka tepatlah kiranya apabila pada peresmian beroperasinya pola PIR penangkapan cakalang ini hadir kedua pejabat pembina tersebut.

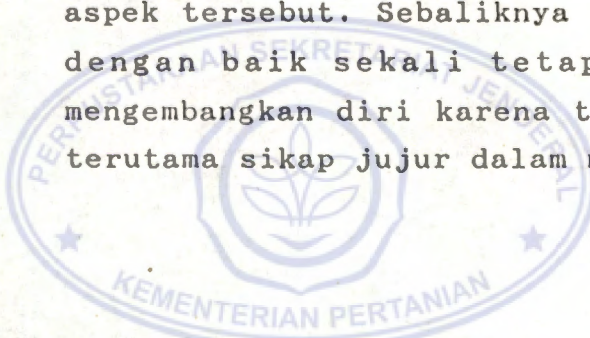


c. Hal lain yang juga sangat penting dengan beroperasinya usaha penangkapan ikan cakalang dengan pola PIR ini adalah semakin berfungsinya Prasarana Perikanan berupa Pelabuhan Perikanan Samudera yang baru saja selesai pembangunannya di Kendari ini. Kita semua memaklumi bahwa Pemerintah dalam mengembangkan perekonomian masyarakat berusaha menciptakan iklim usaha yang semakin menggairahkan.

Melalui Pelabuhan Perikanan ini akan dapat diberikan pelayanan kepada masyarakat nelayan dan pengusaha perikanan lainnya yang terkait mulai dari proses produksi sampai pasca panen. Bahkan Pelabuhan Perikanan ini akan berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat setempat karena disamping diperuntukkan bagi kegiatan usaha perikanan juga memberi peluang bagi berkembangnya usaha-usaha lainnya yang dilaksanakan oleh masyarakat luas.

- Saudara Menteri Koperasi dan Saudara Gubernur serta hadirin yang saya hormati,

Berbagai keuntungan dalam rangka pengembangannya pola PIR seperti saya kemukakan tadi akan dapat diwujudkan apabila kita semua, baik yang terkait langsung dalam usaha pola PIR tersebut maupun aparatur pembinaan di Pusat dan Daerah dapat secara bersama-sama, bahu membahu memberikan dukungannya sesuai dengan fungsinya masing-masing sehingga kendala-kendala yang mungkin timbul akan dapat diatasi. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan yang berharga ini saya meminta kepada saudara-saudara para nelayan, khususnya anggota KUD Mina ILHAM agar benar-benar memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dengan bekerja lebih tekun dan disiplin disertai dengan kejujuran. Pengalaman menunjukkan bahwa keberhasilan suatu usaha ditentukan oleh ketiga aspek tersebut. Sebaliknya tidak sedikit usaha yang direncanakan dengan baik sekali tetapi setelah beroperasi tidak mampu mengembangkan diri karena tidak disertai sikap mental yang baik, terutama sikap jujur dalam mengelola usaha kerjasama tersebut.



Kepada Perusahaan PT. Teluk Bintuni Mina Agro Karya, yang bertindak sebagai inti saya mengharapkan agar benar-benar melaksanakan fungsinya sebagai inti pengembangan melalui pola kerjasama harus dapat berlangsung proses alih teknologi dan alih keterampilan manajerial sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama KUD ini yang menjadi plasmanya mampu bekerja mandiri mengembangkan usahanya sehingga memberikan keuntungan bagi kedua pihak.

Akhirnya kepada Saudara Gubernur Kepala Daerah tertumpu harapan kita semua agar tidak jemu-jemunya memberikan bimbingan dan pembinaan kepada usaha ini. Insya Allah dengan kerjasama yang sebaiknya dari semua pihak yang terkait harapan keberhasilan usaha ini akan dapat terwujud.

Demikianlah sambutan saya pada upacara penyerahan kapal penangkap ikan cakalang dalam rangka Pola PIR antara PT. Teluk Bintuni Mina Agro Karya dengan KUD Mina ILHAM pada hari ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan taufiq dan hidayahnya kepada usaha kita semua.

Terima kasih atas perhatian Saudara.

Wassalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh.

Menteri Pertanian



Ir. WARDOJO



51





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN
MENTERI PERTANIAN
PADA KONGRES V
IKATAN AHLI GULA INDONESIA

Assalamu alaikum warohmatullahi wabarokaantuh

Saudara-saudara peserta kongres dan para hadirin yang saya hormati.

Sungguh merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, dapat hadir dan berkumpul disini bersama-sama para ahli dan profesional dibidang pergulaan. Untuk itu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Taulla atas segala limpahan Rakhmat dan Rakhm Nya serta Taufik dan Hidayah Nya, terutama juga karena kita diberi karunia menyangkut keahlian itu sehingga kita dapat berperan mengamalkannya dalam membangun Bangsa dan Negara menuju masyarakat adil dan makmur.

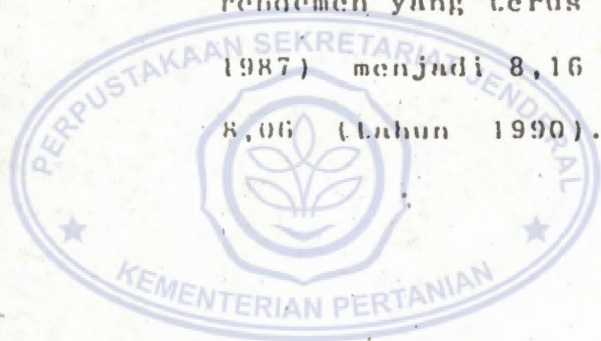
Saudara-saudara yang saya hormati.

Kongres kelima IKAGI yang diselenggarakan bertepatan dengan usianya yang ke tujuh belas, saya pandang tepat sekali waktunya menghadapi tantangan industri gula dalam era tinggal landas yang akan berlangsung dua tahun yang akan datang.



Tema Kongres yang ditetapkan yaitu "Kepeloporan Ahli Gula dalam Pengembangan Agro Industri" tepat sekali karena para ahli gula yang sehari-hari bekerja di perusahaan, lembaga penelitian, instansi pemerintah dan di lembaga-lembaga lainnya merupakan asset nasional yang ikut menentukan pasang surutnya industri gula nasional. Kepeloporan tadi dewasa ini sangat diperlukan untuk membangkitkan gairah kerja dalam mengatasi masalah-masalah produksi gula yang berkembang selama ini. Saya merasakan terdapatnya gejala mengendurnya upaya peningkatan produktivitas terutama dalam Program TRI dan pengembangannya ke lahan kering.

Mengikuti perkembangan rata-rata produktivitas industri gula selama 4 tahun terakhir nampak adanya gejala penurunan terus-menerus dari 6,32 ton/ha hablur tahun 1987 menjadi 5,84 ton/ha pada tahun 1990. Rendahnya rata-rata produktivitas tersebut karena saham produktivitas tebu lahan kering yang masih rendah yaitu antara 4,34 ton/ha (tahun 1988) - 4,86 ton/ha (tahun 1987), dan saham tebu lahan sawah dengan produktivitas hablur antara 7,50 ton/ha (tahun 1990) - 7,99 ton/ha (tahun 1987). Rendahnya produktivitas di lahan sawah ini terjadi karena rata-rata rendemen yang terus menerus merosot dari 8,74 persen (tahun 1987) menjadi 8,16 persen (1988), 8,11 persen (1989) dan 8,06 (tahun 1990).



Upaya peningkatan produktivitas ini menuntut perhatian khusus terutama pada lahan sawah, karena apabila kita tidak mampu mendayagunakan lahan sawah untuk tebu, lahan sawah dapat dipergunakan untuk tujuan yang lebih mendesak dalam rangka mempertahankan swasembada pangan khususnya beras.

Dalam skala yang lebih luas tantangan bagi para ahli gula adalah memecahkan permasalahan-permasalahan yang menyangkut antara lain :

Pertama : Sejak berlakunya Inpres Nomor 9/1975, struktur industri gula mengarah pada penyertaan petani pemilik lahan menjadi mitra kerja, dan melibatkan KUD sebagai lembaga ekonomi pedesaan dalam kegiatan pelayanan proses produksi.

Dengan demikian industri gula harus ikut berupaya meningkatkan pendapatan petani melalui pembinaan dan bimbingan serta melindungi hak-hak petani dari kemungkinan perlakuan yang tidak adil dan oknum-oknum yang beritikad tidak baik. Membantu pembinaan KUD agar dapat berperan sesuai fungsinya secara efektif dan efisien.

Kedua : Perusahaan Gula harus mempertahankan eksistensinya secara lestari dengan menjaga rentabilitas, solvabilitas dan likuiditas yang sehat. Kemudian demikian menuntut terus menerus dilakukannya upaya efisiensi yang meliputi efisiensi produksi, efisiensi biaya, efisiensi tenaga yang akhirnya mewujudkan efisiensi usaha secara menyeluruh.



Ketiga : Upaya pemerintah untuk mencapai swasembada gula menghadapi kenyataan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (1981-1990), konsumsi gula terus menerus meningkat dengan laju kenaikan 4,86 persen setahun, sedangkan pertumbuhan produksi gula dalam kurun waktu yang sama hanya dengan laju kenaikan 3,58 persen setahun. Apabila selisih laju kenaikan tersebut tidak dapat kita atasi, impor gula pasti akan semakin besar.

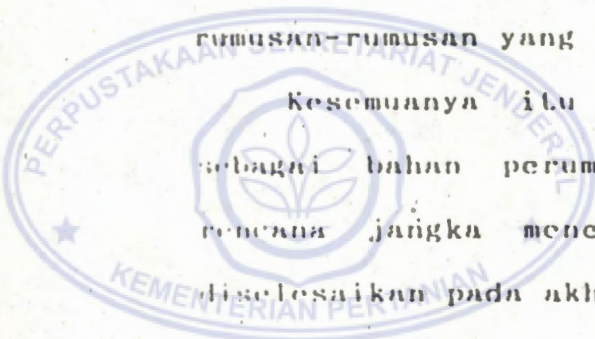
Saudara-saudara sekalian

Untuk mencapai swasembada gula pada akhir Pelita V (1993) saya mengharap agar selisih laju kenaikan sebesar 1,28 persen setahun ini dapat diatasi dengan upaya peningkatan produktivitas. Karena dengan peningkatan produktivitas tersebut kita dapat mengatasi ketiga masalah yang saya sebutkan tadi, yaitu peningkatan pendapatan petani, peningkatan efisiensi pengolahan dan rentabilitas perusahaan dan pencapaian swasembada gula itu sendiri.

Saudara-saudara peserta kongres yang saya hormati.

Dalam Kongres V IKAGI ini saya harapkan dapat dirumuskan bagaimana sistem pembinaan dan peningkatan keahlian para anggota, kearah keahlian yang profesional dan selanjutnya dapat dikembangkan dalam menghasilkan rumusan-rumusan yang konseptual.

Kesemuanya itu untuk disumbangkan kepada Pemerintah sebagai bahan perumusan kebijaksanaan dalam penyusunan rencana jangka menengah dan jangka panjang yang harus diselesaikan pada akhir Pelita V (1993).



IKAGI hendaknya dapat menyelenggarakan forum-forum pengkajian, forum-forum diskusi untuk menelaah peluang-peluang dan kecenderungan pergulaan dunia yang dewasa ini masih diwarnai dengan kebijaksanaan tarif dan subsidi di negara-negara produsen dan konsumennya. Selanjutnya dapat dirumuskan sebagai saran-saran kebijaksanaan pergulaan di Indonesia menghadapi globalisasi ekonomi dunia yang tengah berlangsung.

Akhirnya saya sampaikan selamat berkongres dan dirgahayu IKAGI pada usianya yang ketujuh belas.

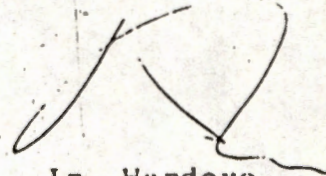
Dan dengan ini dengan ucapan :

Bismillah hirakhman nirakhim

Kongres V IKAGI saya nyatakan dibuka.

Surabaya, 29 April 1991

Menteri Pertanian



Ir. Wardoyo



52





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN PADA
UPACARA WISUDA PROGRAM DIPLOMA III AKADEMI PERIKANAN
YOGYAKARTA, 30 APRIL 1991**

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh;
Saudara saudara sekalian yang saya hormati;

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkah dan ridho Nya kita dapat bersama-sama berkumpul untuk menghadiri upacara Wisuda Program Diploma III Akademi Perikanan Yogyakarta di Aula APP ini.

Pada kesempatan yang berbahagia ini yang masih diliputi suasana Idul Fitri, saya ingin menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri, Minal Aidzin Wal Faidzin mohon maaf lahir bathin.

Upacara wisuda pada suatu lembaga pendidikan saya nilai sebagai suatu acara yang penting oleh karena itu saya selalu berupaya untuk dapat hadir dan memberikan pengarahan pada setiap upacara wisuda seperti halnya kali ini.

Saudara - saudara yang berbahagia,

Pembangunan Pertanian yang termasuk didalamnya pembangunan sub sektor perikanan dilaksanakan dalam rangka pengamalan Pancasila menuju tercapainya kesejahteraan petani-nelayan beserta keluarganya.



Pembangunan sub sektor perikanan yang dilaksanakan dalam Repelelita V ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan dari Pelita IV. Sebagai kelanjutan dari Pelita IV pembangunan sub sektor perikanan tetap diarahkan pada peningkatan kontribusi sub sektor perikanan dan menunjang tercapainya pertanian yang maju, efisien dan tangguh, sehingga mampu menjamin tersedianya bahan pangan protein hewani dan bahan baku industri didalam negeri, meningkatkan ekspor, mendorong kesempatan kerja serta menunjang pembangunan daerah.

Dengan bertitik tolak pada pemikiran diatas maka tujuan pembangunan perikanan dalam REPELITA V adalah :

1. Meningkatkan produksi perikanan, baik kuantitas maupun kualitas untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, industri dalam negeri, serta peningkatan ekspor hasil perikanan;
2. Meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan nilai tambah serta meningkatkan pendapatan petani nelayan;
3. Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta menunjang pembangunan daerah; dan
4. Meningkatkan pembinaan kelestarian sumberdaya perikanan dan lingkungan hidup.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh pembangunan perikanan menggunakan parameter pertumbuhan sektor lain seperti pertumbuhan penduduk sebesar 1,9% per tahun maupun pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi akan tumbuh sebesar 5% per tahun.

Untuk menjawab parameter tersebut telah disusun proyeksi konsumsi total perikanan dengan kenaikan 4,1% per tahun sedangkan konsumsi perkapita akan meningkat sebesar 2,1% per tahun, sedimana diharapkan pada akhir Repelita V konsumsi



perikanan adalah sebanyak 16,78 kg per kapita per tahun. Hal ini berarti terjadi peningkatan konsumsi perkapita sebesar 11% dibandingkan dengan angka konsumsi pada akhir Pelita IV yang tercatat sebesar 15,12 kg per orang per kapita.

Proyeksi volume ekspor perikanan pada kurun waktu yang sama akan meningkat masing masing untuk komoditas udang sebesar 11%, Tuna/cakalang 12% dan lainnya sebesar 9%.

Sedangkan penyerapan tenaga kerja yang dapat diserap oleh sub sektor perikanan akan meningkat sebesar 4,1% pertahun dari jumlah 2,2 juta tenaga kerja pada akhir Repelita IV menjadi hampir 2,8 juta pada ahir Repelita V.

Saudara - saudara sekalian ;

Tujuan pembangunan perikanan dengan angka proyeksi yang saya kemukakan diatas dalam pelaksanaannya cukup menampakan hasil yang menggembirakan,walaupun demikian masih menghadapi masalah yang perlu kita pecahkan,antara lain pemamfaatan sumberdaya ikan dilaut belum merata dengan konsentrasi pada perairan-perairan pantai padat penduduk seperti pantai utara Jawa, selat Bali dan Selat Malaka.

Disamping itu tantangan baru yang timbul dihadapan kita adalah dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Luas perairan Indonesia berdasarkan UU No. 5 th. 1983 ini diperkirakan 5,8 juta km² dengan potensi perikanan tidak kurang dari 6,6 juta ton per tahun. Padahal pada tahun 1988 produksi perikanan laut baru mencapai sekitar 2,18 juta ton yang artinya tingkat



pemanfaatannya baru mencapai 33%. Faktor penting lainnya adalah iklim tropis yang kita miliki merupakan keunggulan komparatif tersendiri karena iklim dan cuacanya sangat cocok untuk mendukung perbiakan ikan dan pertumbuhan berat ikan yang lebih cepat, ini juga adalah tantangan bagi kita. Selain itu perairan umum baru dimanfaatkan sekitar 40%.

Untuk mengantisipasi tantangan dan kendala yang saya kemukakan tadi sekaligus memperlancar keberhasilan pembangunan sub sektor perikanan termasuk menjamin proyeksi-proyeksinya, adalah mutlak diperlukan dukungan sumberdaya manusia perikanan yang berkemampuan.

Salah satu upaya dalam menyediakan tenaga sub sektor perikanan tangguh itu adalah melalui upaya pendidikan yang berencana dan berkelanjutan baik yang dikelola langsung oleh pemerintah maupun oleh swasta, seperti halnya Akademi Perikanan Yogyakarta ini.

Upaya pendidikan sub sektor perikanan sangat strategis bagi keberhasilan pembangunan perikanan. Momentum ini dapat diantisipasi dengan tepat oleh masyarakat Yogyakarta dengan lahirnya Akademi Pendidikan Perikanan Yogyakarta pada Tahun 1986, dan pada hari ini kita sama-sama menyaksikan Wisuda pertamanya.

Saya katakan sangat tepat karena potensi perikanan yang kita miliki masih sangat kekurangan tenaga terampil, terdidik yang diharapkan mampu menggali sumberdaya perikanan. Terlebih lagi lembaga ini adalah lembaga pendidikan perikanan yang menghasilkan tenaga D III Perikanan yang kehadirannya saat ini



memang paling sesuai dengan tuntutan dan tantangan pembangunan sub sektor perikanan. Saya mengharapkan agar Akademi Perikanan Yogyakarta yang relatif masih muda ini dapat terus megembangkan program program pendidikannya sesuai dengan kemajuan IPTEK dan tuntutan pembangunan, baik yang bersifat pendidikan Diploma, maupun pendidikan latihan ketrampilan yang sifatnya jangka pendek, sehingga keberadaan lembaga ini lebih dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat perikanan secara lebih luas lagi.

Sebagai lembaga pendidikan yang bergerak dalam sektor pertanian Akademi Perikanan Yogyakarta harus selalu berinteraksi dan berkonsultasi baik dengan lembaga lembaga pendidikan sejenis khususnya lembaga pendidikan yang dimiliki oleh pemerintah seperti Diklat AUP, Diklat APP, maupun Fakultas Perikanan dan berbagai Universitas negeri yang ada, sehingga program pengembangan Akademi ini selalu selaras dan serasi dengan tuntutan kemajuan Iptek maupun program pembangunan nasional.

Saudara - saudara sekalian ;

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan selamat kepada saudara saudara yang baru saja diwisuda dengan harapan saudara dapat membaktikan diri kepada negara dan bangsa ini sesuai dengan keahlian saudara. Saya juga perlu mengajak saudara agar dalam saudara berkiprah nanti, bertekad untuk menjadi pengabdian pembangunan mandiri artinya bekal D.III akan saudara jadikan untuk lebih percaya diri, berusaha sendiri dan lebih mandiri.



Kepada para dosen dan pembimbing saya mengharapkan agar saudara-saudara dapat lebih mengembangkan diri, baik melalui pendidikan formal maupun melalui upaya lainnya, jadilah dosen profesional supaya dapat menghasilkan lulusan yang profesional. Kepada para dosen dan pembimbing saya ucapkan selamat atas bimbingannya sehingga dapat menghasilkan lulusan pertama ini.

Kepada orang tua maupun kerabat para wisudawan saya ucapkan selamat atas keberhasilan putra/putrinya.

Hadirin yang saya hormati;

Demikianlah beberapa hal yang ingin saya kemukakan pada kesempatan wisuda ini, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para wisudawan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan Taufik dan Hidayah serta bimbinganNya kepada kita dalam melanjutkan upaya pembangunan ini, amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Menteri Pertanian,



Ir. Wardoyo



53





**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA UPACARA PENANDATANGANAN
PERJANJIAN KERJASAMA DEPARTEMEN PERTANIAN
DENGAN
BANK RAKYAT INDONESIA, BANK BUMI DAYA DAN
BANK NEGARA INDONESIA 1946**

1. Yth. Sdr. Menteri Muda Pertanian.

Yth. Sdr. Para Pejabat Eselon I Departemen Pertanian

Yth. Sdr. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia

Yth. Sdr. Direktur Utama Bank Bumi Daya

Yth. Sdr. Direktur Utama Bank Negara Indonesia 1946

Saudara-Saudara peserta Rakernas Departemen Pertanian
beserta hadirin lainnya yang saya hormati.

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,
karena pada malam hari ini kita dapat hadir dan baru -
saja menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama
antara Departemen Pertanian dengan beberapa Bank Peme-
rintah yakni Bank Rakyat Indonesia, Bank Bumi Daya -
dan Bank Negara Indonesia 1946.



2. Adapun yang mendasari kerjasama ini antara lain adalah:

- Selama ini kita merasakan bahwa laporan pelaksanaan proyek baik laporan fisik dan keuangan, kecermatan, kecepatan dan kedisiplinan penyampaiannya belum sesuai dengan yang diharapkan.

Hal ini antara lain disebabkan karena kegiatan proyek-proyek lingkup Departemen Pertanian tersebar disu-
luruh pelosok tanah air, yang pada umumnya masih meng-
hadapi masalah transportasi dan komunikasi sehingga
penyampaian pelaporan melalui pos sering terlambat
bahkan tidak jarang yang salah alamat.

- Untuk pengendalian pelaksanaan proyek setiap bulan di-
perlukan laporan perkembangan pelaksanaan fisik -
dan keuangan proyek secara tepat, cermat dan akurat.

- Selama ini memang sebagian besar proyek-proyek -
lingkup Departemen Pertanian dananya sudah disalur-
kan melalui Bank Rakyat Indonesia, Bank Bumi Daya -
dan Bank Negara Indonesia 1946, sehingga dalam rangka
memanfaatkan teknologi yang dimiliki oleh ketiga
Bank tersebut, saya menetapkan ketiga Bank Peme-
rintah tersebut sebagai mitra kerjasama untuk me-
nyalurkan dan melaporkan setiap penggunaan dana -



Anggaran Proyek dari APBN Murni dilingkungan Departemen Pertanian baik yang berada di Pusat maupun di Daerah.

3. Tujuan kerjasama ini semata-mata dalam rangka menyempurnakan sistim pelaporan proyek yang ada saat ini, - sehingga Departemen Pertanian setiap saat dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan proyek secara - tepat, cepat dan akurat.

Dengan demikian pembinaan dan pengendalian pelaksanaan proyek dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

4. Pembidangan kerjasama tersebut diatur sebagai - berikut:

- Bank Rakyat Indonesia menyalurkan dana APBN Murni dari KPKN dan menangani pelaporan proyek lingkup Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan dan Sekretariat Badan Pengendali Bimas.
- Bank Bumi Daya menyalurkan dana APBN Murni dari KPKN dan menangani pelaporan proyek lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perikanan, Direktorat Jenderal Perkebunan dan Badan Pendidikan Latihan Pertanian.



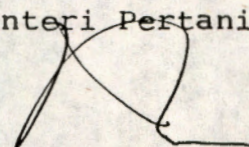
- Bank Negara Indonesia 1946 menyalurkan dana APBN Murni dari KPKN dan menangani pelaporan proyek lingkup - Direktorat Jenderal Peternakan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

5. Akhirnya pada kesempatan yang baik ini perkenanlah - saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direksi Bank Rakyat Indonesia, Bank Bumi Daya dan Bank Negara Indonesia 1946 atas kesediaannya - bekerjasama dengan Departemen Pertanian dengan harapan agar semangat kerjasama yang saling menguntungkan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

6. Terimakasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Menteri Pertanian


Ir. Wardoyo



54





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA RAPAT KERJA NASIONAL/HUT KE-18 HKT
TANGGAL 3 MEI 1991
CIAWI - BOGOR

-
- Saudara Menteri yang terhormat,
 - Saudara Ketua Umum dan para anggota DPP HKT yang terhormat
 - Saudara-Saudara peserta Rakernas, serta
 - Saudara-Saudara para undangan lainnya

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama menghadiri Rakernas HKT pagi ini.

Karena kita masih berada dalam suasana hari raya Idul Fitri, maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan Selamat ber-Idul Fitri 1 Syawal 1411 H. Saya minta maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan yang mungkin terjadi diantara kita, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mengampuni segala kesalahan, maupun dosa-dosa yang kita perbuat.



Saudara-Saudara sekalian,

Suatu kehormatan bagi saya untuk dapat hadir dan bertemu dengan Saudara-Saudara sekalian, pada Rakernas HKTI untuk memberikan sambutan dan uraian sedikit tentang pembangunan sektor pertanian.

Rapat kerja HKTI sekarang ini saya harapkan dapat mengevaluasi atas pelaksanaan program hasil Munas yang lalu dan dapat betul-betul menghasilkan suatu Rencana kerja dan kegiatan yang nyata dan dapat dilaksanakan, sehingga peranan dan fungsi HKTI betul-betul dirasakan oleh para petani dan penduduk pedesaan.

Pada waktu Munas III HKTI 2 tahun yang lalu telah saya sampaikan program pembangunan pertanian dalam Repelita V. Dalam Repelita V tersebut digariskan bahwa sasaran pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah rata-rata sebesar 5 persen pertahun. Sasaran tersebut antara lain diharapkan sektor pertanian dapat tumbuh dengan laju 3,6 persen pertahun dan sektor industri ditingkatkan menjadi 8,5 persen pertahun. Walaupun sasaran pertumbuhannya hanya 3,6 persen, sektor pertanian masih tetap strategis dan menempati prioritas utama dalam pembangunan perekonomian karena secara langsung menyangkut kesejahteraan sebagian besar penduduk kita (51 persen). Keberhasilan pembangunan di sektor pertanian di Indonesia akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

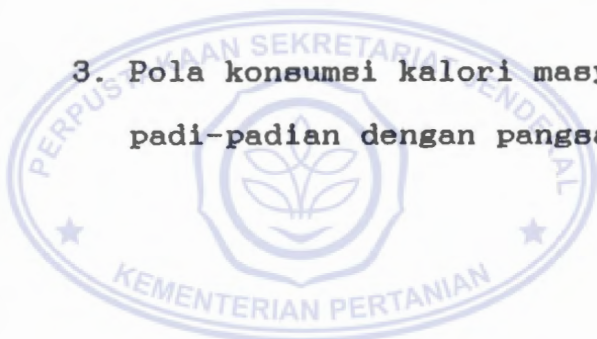


Saudara-Saudara sekalian,

Kerja keras yang kita lakukan sejak Pelita I sampai pertengahan Pelita V ini, telah banyak hasil yang kita capai. Namun masih banyak pula tantangan dan masalah yang perlu kita pecahkan bersama. Saya katakan kita pecahkan bersama, didalamnya termasuk warga HKTI yang tersebar diseluruh Indonesia.

Tantangan dan masalah tersebut adalah :

1. Peningkatan produksi melalui program diversifikasi belum menunjukkan hasil yang memuaskan akibat belum tersedianya prasarana, paket teknologi, kegiatan agribisnis dan sistem pemasaran yang efisien. Selain itu pola diversifikasi belum memanfaatkan sumberdaya secara optimal, yaitu penyebaran pembangunan pertanian yang belum sepenuhnya berdasarkan "resource based".
2. Kurangnya keterpaduan program dan pelaksanaan pembangunan pertanian antar sektor, antar sub sektor, antar wilayah maupun antar kegiatan dalam sistem agribisnis, antar industri hulu dan industri hilir. Kontribusi agro industri terhadap total nilai tambah sektor industri menurun dengan cepat misalnya industri makanan, minuman dan tembakau menurun dari 48,5 persen pada tahun 1974 menjadi 17,8 persen pada tahun 1988. Sedangkan ekspor masih didominasi oleh bahan mentah.
3. Pola konsumsi kalori masyarakat masih terlalu didominasi oleh padi-padian dengan pangsa sebesar 66,0 persen, sedangkan dari



sumber protein hewani (ternak dan ikan) hanya mencapai 2,6 persen, sumber lemak dan minyak sebesar 12,0 persen, gula 5,4 persen, sayuran dan buah-buahan 2,0 persen.

4. Secara umum pengembangan dibidang agro-industri terhambat sebagai akibat perhatian yang relatif kecil oleh berbagai sub sektor terhadap upaya pengembangan dibidang ini.

Disamping itu iklim untuk investasi juga belum kondusif yang terlihat dari kendala-kendala dibidang pelaksanaan ketentuan hak guna usaha, perpajakan, peraturan impor-ekspor disamping ketentuan di bidang perkreditan. Selanjutnya paket teknologi maju masih belum berkembang dalam masyarakat. Demikian pula dengan informasi dan intelegen pasar masih lemah.

Saudara-Saudara sekalian,

Tantangan dan masalah yang dikemukakan tadi tidak ringan, namun ada peluang yang akan dapat diraih, sehingga menambah optimisme dalam melancarkan pembangunan, yakni :

1. Perluasan areal pertanian diluar Jawa yaitu ; a) 0,69 juta hektar potensial untuk sawah berpengairan di luar Jawa; b) 1,08 juta hektar lahan kering potensial dikembangkan untuk tanaman pangan di luar Jawa; c) 4,40 juta hektar lahan kering untuk lahan perkebunan di luar Jawa; d) 0,54 juta hektar lahan cocok untuk usaha campuran.



2. Terdapatnya 30 juta ha hutan produksi yang dapat dikonversikan menjadi usaha lain. Peluang ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) karet, dengan tanaman sela tanaman bahan makanan (jagung, kedelai dll).
3. Tingkat pemanfaatan sumber daya laut masih dibawah 30 persen dari potensi lestari. Oleh karena itu pengembangan industri maritim terutama di Indonesia Bagian Timur dapat lebih dikembangkan lagi dengan memanfaatkan teknologi maju, pola PIR dengan seluruh aspek agribisnisnya.
4. Terdapat peluang pengembangan agribisnis peternakan menekankan pada peningkatan daya dukung lahan hijauan pakan ternak di NTT dan Timor-Timur.
5. Di Irian Jaya terdapat sekitar 1,0 juta hektar pertanaman / hutan sagu yang dapat dimanfaatkan untuk sumber bahan pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri lainnya.
6. Untuk memperbaiki efisiensi perkebunan besar, perlu dikembangkan komplek industri hilir sektor perkebunan di daerah pedesaan. Misal Perkebunan tebu diizinkan dan didorong untuk memproduksi gula, alkohol, tetes, kertas, dan industri lainnya.
7. Masih besar peluang untuk meningkatkan produksi perkebunan rakyat melalui program peremajaan dan rehabilitasi menggunakan teknologi maju dan pertanian berkelompok sehamparan. Pola pengembangan dengan pola UPP (Unit Pelayanan Pengembangan) dan PIR. Seluruh mata rantai agribisnis harus dibina dan dikembangkan.



8. Masih terbuka peluang untuk meningkatkan diversifikasi komoditi gula dengan memanfaatkan lahan kering di luar Jawa untuk tebu, gula aren, gula kelapa dan sumber pemanis lainnya.
9. Dan sebagainya.

Saudara-saudara sekalian,

Tahun 1991/1992 adalah tahun ketiga Repelita V. Departemen Pertanian memilih strategi yang dapat dikembangkan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, antara lain :

1. Memperhatikan peluang untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dan didasarkan atas asas kekeluargaan dan ketergantungan yang saling menguntungkan, adalah ;
 - a) Mengembangkan agribisnis dengan setiap mata rantainya, dan dengan menyusun ulang orientasi investasi secara terpadu sekaligus mempercepat proses diversifikasi pertanian. Model program yang dipilih didasarkan pada potensi sumberdaya yang ada, direncanakan dengan mengikutsertakan masyarakat dan dengan mengembangkan sumberdaya manusia pelaksana pembangunan;
 - b) Dalam kaitan ini penyuluhan dititikberatkan pada penyaluran berbagai informasi seperti informasi pasar sarana produksi, informasi teknologi, dan informasi terkait lainnya. Dalam hal ini para penyuluh harus memanfaatkan dan bekerjasama secara sebaik-baiknya dengan BPP dan BIP di wilayah pengembangan;
 - c) Menganekaragamkan pola konsumsi pangan guna mengurangi ketergantungan kepada beras, sekaligus meningkatkan mutu pangan dan gizi rakyat dengan tetap mempertahankan pola



konsumsi setempat; d) Melestarikan swasembada beras pada tahun 1991 dengan cara : 1) meningkatkan produktivitas sumberdaya pertanian, 2) memprioritaskan penggunaan lahan sawah di Jawa untuk areal intensifikasi padi, 3) memanfaatkan lahan tidur di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat untuk areal intensifikasi padi dan, 4) mengoptimalkan upaya perluasan areal tanam.

2. Kebijakan usahatani terpadu untuk penanggulangan kemiskinan adalah ; a) membuat model progam usahatani terpadu; b) membuat model program parsial dan c) membuat model program penganekaragaman pangan dan gizi.

Pendekatan usahatani secara terpadu dilaksanakan dengan menetapkan komoditi utama yang didasarkan pada potensi sumberdaya setempat (lahan kering, rawa dan pasang surut, waduk, pantai). Pengembangan komoditi ini ditunjang dengan komoditi lainnya yang didukung oleh prasarana penunjang. Skala usaha merupakan suatu hamparan dengan luas minimum 500 ha di kecamatan-kecamatan yang terpilih.

Pendekatan usahatani parsial dilaksanakan tidak secara terpadu karena keadaan lokasinya yang spesifik.

Lahan ini mencakup wilayah-wilayah miskin seperti wilayah perbatasan, wilayah IBT, wilayah DAS, wilayah terpencil dan wilayah pantai. Pendekatan kegiatan penganekaragaman pangan dan gizi dilaksanakan melalui peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan petani di lokasi miskin. Tujuan kegiatan ini



adalah mencukupi penyediaan pangan ditingkat keluarga pemilik pekarangan agar dapat memenuhi kebutuhan gizinya, dengan tetap mempertahankan pola konsumsi setempat. Sasaran kegiatan ini adalah kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tergolong dalam keluarga yang menderita kerawanan gizi yang memiliki pekarangan secara teknis budidaya masih dapat dimanfaatkan.

Tujuan kegiatan penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan produktivitas sumberdaya pertanian melalui investasi di sektor pertanian dan yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Program tersebut langsung ditujukan kepada kelompok masyarakat miskin di kecamatan miskin, di kabupaten miskin untuk berbagai potensi sumberdaya pertanian.

Dengan upaya terobosan tersebut, diharapkan mereka yang belum beruntung dengan jumlah 30 juta orang dapat dinaikkan tarap hidupnya secara bertahap dan berkesinambungan.

Saudara-Saudara sekalian,

Tantangan, masalah dan peluang serta strategi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sektor pertanian telah saya jelaskan secara singkat. Dengan demikian maka Saudara-Saudara sebagai anggota teras HKTI, baik sebagai pengurus DPP maupun DPD telah memahami. Pertanyaan selanjutnya adalah kegiatan apa dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang tersebut diatas; bagaimana



langkah-langkah nyata yang diambil agar peluang tersebut tidak mubasir. Karena diyakini, bila peluang tersebut dimanfaatkan, Insya Allah taraf hidup dan kehidupan petani dan penduduk pedesaan akan meningkat.

HKTI akan banyak berbuat bila organisasi dan personalianya terbina dengan baik. Konsolidasi organisasi dalam segala tingkatan (DPP, DPD, DPC, DPAC dan DP Ranting) adalah keharusan. Pengembangan sumber daya manusia harus dijalankan sekaligus pada dua lini, yakni personalia pengurus dan kader organisasi serta Kader proffesi. Kepengurusan tingkat cabang, anak cabang dan Ranting sudah sampai saatnya untuk memberi peluang kepada para Kontak Tani yang bertebaran di seluruh Indonesia sekitar 250.000 orang. Kader profesi dan organisasi, sejak saat ini sudah perlu dibina dari kalangan pemuda tani dan taruna tani serta Saka taruna bumi. Mereka penuh dinamika yang perlu disalurkan secara berencana dan berkesinambungan.

Program dan kegiatan di pedesaan banyak dilakukan oleh Ibu-ibu Tani. Peranan wanita tani cukup besar dalam meningkatkan pendapatan keluarganya. Data pada sensus penduduk Indonesia tahun 1990, menunjukkan bahwa pria berjumlah 89.448.235 dan wanita 89.873.406 (50,1 %). Dari jumlah ini, sebanyak 62.125.610 wanita (69,12 %) berada di pedesaan dan lebih dari 58 % mempunyai lapangan usaha di sektor pertanian. Sensus tersebut juga mengungkapkan bahwa dari ± 19 juta rumah tangga petani, 10 %



diantaranya adalah wanita yang menjadi kepala rumah tangga (female headed household). Hampir seperlima kepala rumah tangga pedesaan di Jawa adalah wanita. HKTI khususnya Departemen Kewanitaannya harus lebih memacu lagi pembinaan dimasa-masa mendatang.

Demokrasi ekonomi yang kita dambakan bersama akan tercapai dengan cepat bila koperasi, BUMN dan pengusaha swasta bekerja sama saling mengisi, saling mendukung, saling memperkuat atas dasar kekeluargaan dan kesetiakawanan.

Koperasi khususnya KUD yang saat ini telah ada di pedesaan 8.726 buah perlu dan sangat mendesak untuk kita perkuat, sehingga dapat menjalankan peranan dan fungsinya sesuai sendi dasar koperasi. HKTI mendapat peluang emas untuk berperan dalam arena KUD ini adalah sangat ideal manakala pada seorang aktivis HKTI, dia juga Kontak Tani serta dia pula pengurus KUD. Pada diri seorang menyatu tiga peranan. Alhamdulillah bila hal tersebut akan banyak terwujud sampai akhir Repelita V, sehingga kita dengan lega dan penuh optimisme memasuki pembangunan jangka panjang 25 tahun tahap kedua (bangkajang II).

Saudara-Saudara sekalian,

Demikianlah harapan-harapan saya disertai doa kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, semoga HKTI dan kita sekalian selalu mendapat petunjuk dan ridha-Nya dalam meneruskan perjuangan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.



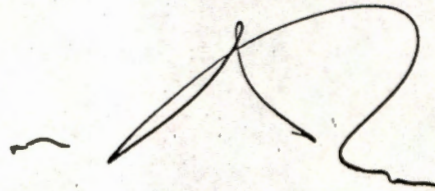
Dan dengan mengucapkan " Bismillaahirrahmaanirrahim " Rapat Kerja Nasional Himpunan Kerukunan tani Indonesia dengan resmi saya buka.

Terima kasih.

Wassalamu`alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Ciawi, 3 Mei 1991

Menteri Pertanian,



Ir. Wardoyo



55





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA PERESMIAN MESJID JAMI "NURUL FALAAH"
KOMPLEKS PERUMAHAN BALITTRO BOGOR
3 MEI 1991

Saudara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat,
Saudara Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor,
Saudara Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bogor,
Saudara Panitia Pembangunan Mesjid dan
Saudara-saudara Sekalian, Para Hadirin Kaum Muslimin dan Muslimat
Yang Saya Hormati,

Assalamu 'Alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat rahmat dan inayah-Nya, pada pagi hari Jum'at tanggal 3 Mei 1991, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1411-H, kita semua berada dalam keadaan sehat wal'afiat, dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan acara peresmian penggunaan mesjid bantuan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YAMP) pada kompleks Perumahan Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (BALITTRO) termasuk Mesjid desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Saudara-saudara Sekalian Yang Saya Muliakan,

Adalah merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya selaku Menteri Pertanian, dipercaya oleh Bapak Soeharto, Ketua Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila untuk meresmikan penggunaan Mesjid yang berada di dalam kompleks Perumahan BALITTRO. Untuk



terselenggaranya pelaksanaan pembangunan Mesjid Jami "Nurul Falaah" ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Panitia Pembangunan Mesjid ini. Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas dukungan dari dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Tingkat I, serta berbagai instansi terkait lainnya. Saya menghimbau agar Saudara-saudara dapat membina dan meningkatkan kerjasama yang baik tersebut yang memang sudah ditunjukkan selama ini, terutama dalam menghadapi berbagai kegiatan pembangunan lainnya. Lebih-lebih lagi kita menghadapi tahap-tahap akhir dari Pembangunan Nasional Jangka Panjang 25 Tahun Tahap Pertama, dan permulaan pelaksanaan Pembangunan Nasional Jangka Panjang 25 Tahun Tahap Kedua.

Saudara-saudara Yang Saya Hormati,

Pada saat banyak negara di dunia ini dilanda berbagai kesulitan dan kendala perkembangan ekonomi, negara kita tetap tegar menunjukkan perkembangan yang meyakinkan, dan telah mempersiapkan diri untuk lepas landas memasuki era industrialisasi, untuk mewujudkan industri yang kuat didukung pertanian yang tangguh. Kita bersiap-siap untuk memulai masa lepas landas kita dengan berhasil di bawah kepemimpinan nasional Orde Baru.

Saat dunia menghadapi berbagai kesulitan ekonomi yang salah satu sebabnya adalah Perang Teluk yang baru saja usai, kita akan memasuki masa Pembangunan Nasional Jangka Panjang 25 Tahun Tahap Kedua dengan masa-masa yang berat dan serba tidak menentu. Betapa beratnya tantangan yang harus kita hadapi dalam keadaan perekonomian dunia seperti sekarang ini, untuk mempertahankan swasembada beras dan untuk mengurangi ketergantungan kepada pendapatan ekspor minyak dan gas bumi. Perkembangan ekonomi dunia yang menuju ke arah globalisasi masih diwarnai oleh berbagai



ketidakpastian dan ditandai oleh persaingan yang semakin ketat yang dapat menyebabkan melemahnya permintaan terhadap produk primer ekspor kita.

Meskipun demikian, dengan penuh keyakinan, kita akan memasuki masa tinggal landas itu dalam keadaan yang relatif cukup berat. Dalam menghadapi keadaan itu, saya yakin kita semakin memerlukan kepemimpinan nasional yang mapan, yang dapat membawa kita dengan berhasil memulai pelaksanaan Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahap Kedua. Pimpinan nasional Orde Baru sangat kita perlukan terutama untuk meningkatkan persatuan, kesatuan dan stabilitas nasional, yang masih tetap harus kita jadikan dasar keberhasilan pembangunan itu. Oleh karenanya Saudara-saudara sekalian pada kesempatan hari baik, bulan baik ini, saya ingin mengajak untuk tetap mempertahankan Pembangunan Nasional dan menjaga kesinambungan pelaksanaannya.

Hadirin Sekalian Yang Saya Hormati,

Pelaksanaan pembangunan Mesjid, tempat beribadat Umat Islam, merupakan tambahan sarana keagamaan di Daerah Kabupaten dan Kodya Bogor. Sampai saat ini Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila untuk Propinsi Jawa Barat saja telah berhasil memberikan sumbangan membangun sarana keagamaan sebanyak 78 buah Mesjid. Untuk seluruh Indonesia telah dibangun tidak kurang dari 1000 buah Mesjid, sejak YAMP didirikan sekitar 15 tahun yang lalu.

Prakarsa Bapak Soeharto yang mencoba menghimpun dana dan daya dengan mendirikan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila telah menunjukkan hasil-hasil yang besar dalam memenuhi kebutuhan sarana peribadatan Umat Islam. Ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan sasaran Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya. Dalam pembangunan yang demikian ini, kita berusaha untuk selalu



mencapai keselarasan dan keseimbangan antara pembangunan fisik dan ekonomi dengan pembangunan mental dan spiritual. Pembangunan mental dan spiritual ini diharapkan dapat kita bina dan kembangkan melalui pembangunan dan pengadaan tempat-tempat peribadatan seperti Mesjid yang dilengkapi perpustakaan dan lain sebagainya.

Saudara-saudara Yang Saya Hormati,

Saya berharap agar tujuan mulia kita membangun tempat peribadatan ini betul-betul dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah mesjid ini dengan sebaik-baiknya untuk membina kerukunan hidup beragama dalam uchuwah Islamiah, dan dalam rangka kita hidup bernegara. Dengan demikian tentunya tidak terbatas untuk keluarga kompleks BALITTRO saja, tetapi termasuk juga untuk warga lainnya yang berdekatan. Gunakanlah mesjid jami "Nurul Falaah" ini, tidak hanya untuk kegiatan shalat fardhu, tetapi juga untuk pengajian serta pendidikan agama Islam bagi para remaja dan anak-anak. Tentunya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kodya Bogor dapat membantu mewujudkan pemanfaatan mesjid ini dengan sebaik-baiknya, harapan yang sama, saya tujukan kepada MUI Kabupaten Bogor untuk pemanfaatan mesjid di desa Bojong Gede.

Saudara-saudara Sekalian, Keluarga Mesjid Nurul Falaah Yang Saya Hormati,

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada saudara-saudara sekalian, bahwa mesjid yang didirikan dengan dana sumbangan YAMP, kelihatannya telah difungsikan sebagaimana mestinya. Saya berbangga hati karena YAMP hanya membantu memberikan sumbangan dalam bentuk bangunan fisik tidak termasuk fasilitas dan sarana penunjang lainnya.



Pembangunan fisik mesjid jami ini diharapkan dapat mendorong terkumpulnya dana swadaya dan dana masyarakat yang dapat melengkapi bangunan fisik yang telah didirikan. Saya mengharapkan agar rasa memiliki dari masyarakat jamaah mesjid Jami ini dapat ditumbuhkembangkan. Keinginan untuk tetap dapat memelihara mesjid ini sebagaimana mestinya, diharapkan dapat ditumbuhkan dan dipertahankan, penyediaan dana rutin untuk pemeliharaan dan perawatan selanjutnya dapat dikumpulkan dari dana swadaya masyarakat anggota jamaah mesjid ini.

Kaum Muslimin dan Muslimat Yang Berbahagia,

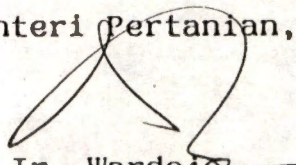
Akhirnya berdasarkan perkembangan dan ujud mesjid ini, Saya yakin Saudara-saudara sekalian Dewan Kerukunan Mesjid dan Jamahnya akan dapat memelihara mesjid ini sebaik-baiknya, dalam rangka meningkatkan ibadah kita, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wata'ala dan meningkatkan peranserta kita dalam pembangunan nasional.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberi petunjuk, taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, bangsa, rakyat dan negara Republik Indonesia ini sehingga tercapailah negara yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang penuh dengan ridho dan keampunan dari Allah Subhanahu Wata'ala.

Wabillahitaufiq Walhidayah,

Wassalamu 'Alaikum Warokhmatullohi Wabarokatuh.

Menteri Pertanian,


Ir. Wardjo



56





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA PELANTIKAN ESELON II, DEWAN PENGAWAS, DAN
DEWAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK NEGARA
JAKARTA, 4 MEI 1991

Saudara Menteri Muda Pertanian beserta Ibu Syarifudin
Baharsjah,
Saudara-saudara para Pejabat Eselon I lingkup Pertanian
beserta Isteri,
Ibu-ibu, hadirin yang saya hormati,

Assalamu'alaikum Warokhmatullohi Wabarokatuh,

Kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha
Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam
keadaan sehat sejahtera. Pada hari ini kita menyaksikan
pelantikan pejabat eselon II, Dewan Pengawas dan Dewan
Komisaris Badan Usaha Milik Negara lingkup Departemen
Pertanian. Sungguh suatu peristiwa yang sangat penting dalam
perjalanan upaya membangun negeri kita ini khususnya dalam
sektor pertanian, yang keterkaitannya dengan hajat hidup
masyarakat banyak sangat tinggi.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Swasembada pangan adalah tekad kita semuanya untuk
mempertahkannya, suatu komitmen nasional yang harus kita
hormati dengan jalan mengamankan dan menjamin realisasinya.



Itulah sebabnya dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak seluruh jajaran pertanian untuk mengerahkan fikiran perhatian serta segala potensi sumberdaya secara optimal sesuai dengan kebutuhan operasinal dari upaya kita untuk melestarikan swasembada pangan tersebut. Program peningkatan produksi pangan, khususnya usaha pokok intensifikasi dan diversifikasi, merupakan program yang keberhasilannya ditentukan oleh tekad, semangat, kegairahan, dan kemampuan petani yang tersebar di seluruh wilayah, dan oleh berbagai sarana dan prasarana pendukungnya yang juga harus merata tersebar untuk dapat memberikan pelayanan yang setepat-tepatnya bagi petani yang tersebar itu.

Dalam rangka pencapaian swasembada pangan khususnya beras, penyediaan benih unggul oleh Perum Sang Hyang Seri perlu terus ditingkatkan. Benih palawija yang sekarang ini belum berkembang seperti halnya benih padi, perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan produksi palawija. Khusus untuk benih kedele dalam rangka Upsus kedele, diharapkan Perum Sang Hyang Seri dapat memenuhi kebutuhan benih petani dengan tepat dan cepat. Begitu pula halnya terhadap benih hortikultura.

Disamping upaya keras untuk melestarikan swasembada pangan, pada tahun anggaran 1991/1992 Departemen Pertanian melaksanakan program terobosan pembangunan pertanian di-daerah miskin. Sasaran dari kegiatan ini adalah kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tergolong dalam keluarga yang menderita kerawanan gizi.



Tujuan dari kegiatan penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan produktivitas sumberdaya pertanian yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Program tersebut langsung ditujukan kepada kelompok masyarakat miskin di Kecamatan ^{Bukit Raya, Tanah} ~~miskin, di Kabupaten miskin~~ ^{dan} untuk berbagai potensi sumberdaya pertanian yang tersebar di 17 Propinsi.

Itulah sebabnya dalam kita mengabdikan diri sebagai pembina, sebagai petugas, sebagai pelaksana dari berbagai segi pembangunan pertanian, kita tidak saja dituntut untuk bekerja keras, namun juga dituntut untuk dapat berpikir kreatif, tidak terjebak dalam kegiatan yang rutin, dan mengembangkan kemampuan mengantisipasi setiap keadaan yang tidak kita inginkan.

Keberhasilan dari suatu upaya baru berhasil apabila keberhasilan sasaran fisik diiringi oleh tercapainya tujuan dari upaya itu secara melembaga dan mapan (institutionalized and established). Jika pada suatu saat program pemerintah ditiadakan atau dikurangi, maka kegiatan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha tani.

Terkait dengan diversifikasi usahatani di daerah miskin kita juga ingin melihat berhasilnya usaha meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang bergizi tinggi dan sesuai keperluan kesehatan tubuh dalam rangka meningkatkan kualitas manusia dan tingkat hidup masyarakat Indonesia. Peningkatan produksi diupayakan agar selalu berorientasi kepada konsumsi masyarakat dengan lebih meningkatkan konsumsi protein dan unsur gizi lainnya, agar diperoleh kecukupan gizi yang seimbang dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sejalan dengan itu upaya untuk meningkatkan produksi perikanan menjadi sangat penting.



Hadirin yang berbahagia,

Walaupun hasil-hasil pembangunan perikanan selama ini cukup menggembirakan, namun kita masih menghadapi beberapa masalah yang perlu kita pecahkan. Pemanfaatan sumberdaya ikan dilaut belum merata dengan konsentrasi pada perairan-perairan pantai padat penduduk seperti pantai utara Jawa, Selat Bali dan Selat Malaka. Daerah-daerah perairan pantai padat penduduk ini telah menunjukkan adanya gejala tangkap lebih. Sementara itu jumlah nelayan dengan skala kecil pada daerah-daerah perairan pantai cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya penduduk. Pembinaan perikanan rakyat termasuk pembinaan desa pantai, yang selama ini telah mendapat perhatian pemerintah, tetap memerlukan perhatian kita. Dalam kaitan ini Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan diminta perhatian akan peranannya.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Pembangunan perikanan sebagai bagian dari pembangunan nasional, perlu memperhatikan aspek pemerataan pembangunan wilayah. Di perairan wilayah Indonesia Bagian Timur dan perairan ZEEI sumberdaya ikannya lebih luas dan kaya, namun tingkat pemanfaatannya relatif masih sangat rendah. Oleh karena itu dalam usaha mempercepat pengembangan perikanan di Indonesia Bagian Timur, perlu lebih ditingkatkan lagi upaya-upaya pengembangan PIR Penangkapan serta mendorong sektor swasta untuk berperan serta dalam pelaksanaan program transmigrasi. Dalam hubungan ini pembangunan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan sebagai pusat-pusat produksi dan kegiatan ekonomi perlu terus dikembangkan. Demikian pula kegiatan agro-industri merupakan kegiatan yang perlu dikembangkan di wilayah tersebut.



Saudara-saudara yang saya hormati,

Pemerintah sejak Pelita V membangun pelabuhan perikanan yang berfungsi sebagai pusat pengembangan ekonomi perikanan dan pusat pengembangan masyarakat nelayan dan pengusaha perikanan. Untuk itu, pelabuhan perikanan dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memperlancar kegiatan produksi pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan seperti dermaga dan alur pelayaran, gedung pelelangan, bengkel dan slipway, gudang pendingin, pabrik es dan sebagainya.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1990, telah didirikan Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera yang diberi tugas dan wewenang menyelenggarakan pengusahaan terhadap sembilan pelabuhan perikanan.

Sifat usaha dari Perum Prasarana Perikanan Samudera adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip perusahaan.

Dalam hal BUMN dibidang perkebunan, saya perlu mengingatkan bahwa saat ini kita dihadapkan kepada tantangan yang sifatnya global. Kita menghadapi tembok proteksionisme dari negara-negara maju. Kita menghadapi berbagai rintangan akibat perang teluk. Kita juga menghadapi perkembangan ekonomi dunia yang belum menentu. Semuanya tidak dapat kita elakkan. Sebaliknya kita harus hadapi dengan penuh kesungguhan untuk memecahkannya, melalui tindakan yang tepat dan cermat serta penuh inisiatif dan kreatif. Kita harus mampu memperbaiki kinerja perusahaan agar mempunyai daya saing yang kuat sehingga pasaran produksi hasil perkebunan kita tetap terjamin.



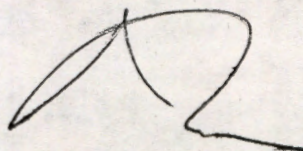
Hadirin sekalian yang saya hormati,

Pada alih tugas sekarang ini, yang tercermin dengan adanya pelantikan pejabat eselon II, dan Dewan Pengawas serta Dewan Komisaris BUMN, hendaknya diartikan sebagai upaya pemanfaatan pengalaman yang perlu kita timba dari setiap pejabat yang potensial. Kepada Saudara yang segera akan memasuki masa pensiun dan Saudara-saudara yang beralih tugas, saya sampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi dan jasa-jasanya selama mengemban tugas pada pos yang lama. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada para ibu yang mendampingi, yang selama ini telah ikut bersusah payah membantu para suami dalam menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima amal perbuatan Saudara.

Kepada para pejabat yang baru dilantik, saya sampaikan selamat, semoga tugas yang dipercayakan kepada Saudara-saudara sekalian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sepenuh hati dengan dedikasi yang tinggi, penuh daya kreasi, berwawasan yang luas yang memberikan kemampuan mengantisipasi setiap gejolak masa depan, sehingga misi unit kerja saudara, bersama-sama unit kerja lainnya dalam konteks keseluruhan Departemen Pertanian, dapat berhasil dengan baik. Amin ya Robbul Alamin.

Wabillahit Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warokhmattullahi Wabarokatuh.

Menteri Pertanian,



Ir. Wardoyo



57





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA UPACARA BENDERA UNTUK MEMPERINGATI
ULANG TAHUN KE 20 BERDIRINYA
PERUSAHAAN UMUM SANG HYANG SERI
JAKARTA, 5 MEI 1991

Assalamu'alaikum Warokhmatullohi Wabarokatuh,

Segala puji dan syukur, marilah kita panjatkan bersama kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada kita bersama-sama untuk mengadakan Upacara Bendera dalam rangka memperingati 20 tahun berdirinya Perum Sang Hyang Seri.

Pada kesempatan ini saya atas nama seluruh jajaran Departemen Pertanian ingin mengucapkan Selamat kepada Saudara Direksi dan seluruh Karyawan/karyawati Perum Sang Hyang Seri yang ada di Pusat maupun daerah dan saya ucapkan terima kasih atas segala sumbangsih yang telah Saudara-saudara berikan selama ini dalam menunjang tugas-tugas Departemen Pertanian dalam ikut membantu mensukseskan program Pem-bangunan Pertanian pada umumnya dan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan pada khususnya.



Dalam GBHN disebutkan bahwa salah satu tujuan pembangunan pertanian adalah memantapkan swasembada pangan. Swasembada pangan dirumuskan sebagai kondisi dinamis yang menggambarkan kemampuan bangsa Indonesia dalam menghasilkan bahan tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan, benih, pakan, bahan industri dan cadangan nasional dengan harga yang terjangkau oleh konsumen, menggairahkan produsen dan tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia.

Indonesia telah mencapai swasembada pangan, khususnya beras sejak tahun 1984.

Program swasembada pangan yang ditangani dalam Pelita V ini secara sistematis memekarkan cakupan komoditi yang ditangani atau dengan kata lain program ini merupakan upaya pelestarian dan peningkatan produksi pangan non beras, yang diikuti dengan upaya menuju swasembada jagung dan kedele.

Salah satu strategi peningkatan produksi pangan dalam pembangunan pertanian adalah dengan cara intensifikasi pertanian, yaitu peningkatan produksi per satuan luas lahan dengan cara menerapkan/aplikasi teknologi dalam usaha tani yang optimal.

Kita semua telah mengetahui bahwa peranan benih Unggul bermutu tinggi dalam proses peningkatan produksi merupakan syarat mutlak dan penentu, karena benih unggul yang bermutu tinggi itu merupakan wahana teknologi maju yang mampu memanipulasi kondisi lingkungan yang memadai untuk menghasilkan out-put/produksi yang maksimal.

Tersedianya benih varietas unggul yang bermutu tinggi harus memenuhi kriteria 7 (tujuh) tepat, yaitu tepat jumlah, tepat varietas, tepat mutu, tepat harga, tepat waktu, tepat tempat dan tepat pelayanan.



Sejalan dengan program pembangunan pertanian tersebut, guna menjamin penyediaan benih unggul bermutu tinggi, maka Pemerintah dengan PP Nomor 22 tahun 1971 tanggal 5 Mei 1971 yo. PP Nomor 44 tahun 1985 tanggal 22 Nopember 1985 membangun Perum Sang Hyang Seri sebagai perusahaan industri benih yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Departemen Pertanian, yang mempunyai tugas-tugas pokok untuk menyelenggarakan kegiatan produksi dan pemasaran benih unggul bermutu tinggi atau bersertifikat tanaman pangan.

Dengan demikian kita menyadari bahwa tugas-tugas yang dibebankan oleh Pemerintah/Departemen Pertanian pada Perum Sang Hyang S Eri, adalah merupakan tugas yang berat tapi mulia.

Selama 20 tahun perkembangan Perum Sang Hyang Seri, saya telah melihat banyak kemajuan-kemajuan yang telah Saudara capai dan dampaknya terhadap masyarakat tani cukup besar antara lain :

1. Masyarakat tani kita, telah meningkat persepsinya terhadap arti pentingnya menggunakan benih varietas unggul yang bermutu tinggi, yaitu benih yang berlabel/bersertifikat, baik untuk padi, palawija maupun sayur-sayuran;
2. Adanya peningkatan yang terus menerus dalam produksi benih bersertifikat, serta pemasarannya dari tahun ke tahun;
3. Adanya diversifikasi usaha yang telah Saudara-saudara lakukan dari semula hanya menangani benih padi, sekarang telah menangani pula : benih-benih jagung komposit, jagung hibrida, kedele, sayuran dan kacang-kacangan.



Namun saya masih tetap mengharapkan agar pelayanan kepada petani serta pengelolaan BUMN ini berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi dapat Saudara tingkatkan, sehingga Perum Sang Hyang Seri harus dapat masuk dalam katagori SEHAT.

Untuk itu kepada Saudara Direksi dan seluruh karyawan-karyawan Perum Sang Hyang Seri, saya minta :

1. Untuk terus menerus meningkatkan mutu benih yang Saudara produksi, mutu pelayanan dan mutu pekerjaan, dengan memanfaatkan Gugus Kendali Mutu yang ada, sehingga tercapai tingkat efisiensi dan produktivitas yang kita harapkan;
2. Untuk terus menegakkan Disiplin Kerja dalam rangka pelaksanaan Disiplin Nasional, agar dapat melaksanakan Disiplin Target yang telah ditetapkan dalam anggaran Perusahaan;
3. Untuk terus menerus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat petani dengan melaksanakan secara sungguh-sungguh prinsip Sapta Usaha Benih (7 tepat) yang telah Saudara canangkan, yaitu :
 - Tepat jumlah
 - Tepat varietas
 - Tepat mutu
 - Tepat waktu
 - Tepat tempat
 - Tepat harga
 - Tepat pelayanan
4. Agar selalu menjaga dan memelihara asset negara yang dipercayakan pada Saudara dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu dimanfaatkan lebih lama dan lebih efisien;



5. Untuk memperluas dan meningkatkan usaha produksi dan pemasaran benih ke Propinsi Indonesia Bagian Timur dengan tetap menjalin kerjasama yang sebaik-baiknya dengan instansi yang terkait di daerah-daerah.
6. Meningkatkan kerjasama penangkaran dengan Kelompok Petani penangkar dalam pola PIR, dimana kelompoktani sebagai plasma dan Perum Sang Hyang Seri sebagai intinya, sehingga setiap kehadiran Perum Sang Hyang Seri disuatu daerah diharapkan mampu memberikan stimulan bagi tumbuh dan berkembangnya usaha perbenihan di daerah yang bersangkutan.

Sekali lagi saya ucapkan Selamat Berulang Tahun yang ke 20, semoga kesejahteraan dan keselamatan selalu menyertai kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Warokhmatullohi Wabarokatuh,

Sekian dan terima kasih.

Menteri Pertanian,



Ir. Wardoyo



58





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN PERTANIAN
DALAM ERA LEPAS LANDAS**

Oleh : Ir. Wardoyo
Menteri Pertanian RI

I. PENDAHULUAN

Pembangunan Pertanian merupakan bagian integral dari Pembangunan nasional dalam mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam jiwa Pancasila dan UUD 45 untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Sasaran pembangunan nasional dalam jangka panjang ialah terciptanya struktur ekonomi yang seimbang, dengan menciptakan kekuatan dan kemampuan pertanian tangguh yang mendukung perkembangan sektor industri.

Secara umum sumbangan utama sektor pertanian terhadap pembangunan nasional diwujudkan dalam bentuk menghasilkan bahan pangan bagi penduduknya, menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, menyediakan faktor produksi dalam bentuk tenaga kerja dan pembentukan modal investasi, mendukung sektor non pertanian melalui penyediaan bahan baku industri dan pasar bagi produksi



dalam negeri, dan menghasilkan devisa melalui kegiatan ekspor hasil pertanian. Peran seperti tersebut di atas, selama Pelita I sampai Pelita IV telah dilaksanakan oleh sektor pertanian dengan cukup berhasil.

Dalam Pembangunan Nasional tahap selanjutnya, baik dalam pembangunan Lima Tahun Kelima (Repelita V) maupun dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua, peran dan sumbangan sektor pertanian seperti tersebut di atas masih tetap dibutuhkan. Dalam Repelita V, Garis-Garis Besar haluan negara (GBHN) menetapkan bahwa titik berat pembangunan ekonomi pada sektor pertanian dan industri dalam upaya mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian, baik dari segi nilai tambah maupun kesempatan kerja. Secara rinci, GBHN menggariskan tujuan pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan produksi dan memperluas penganekaragaman hasil guna memenuhi kebutuhan pangan, bahan baku industri, dan meningkatkan penerimaan ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, peternak dan nelayan, mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, serta mendukung kegiatan pembangunan wilayah dan transmigrasi.

Sejalan dengan tahapan dan keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dicapai, proses transformasi struktural perekonomian nasional berjalan secara berlanjut dan akan terus terjadi mengarah kepada struktur ekonomi berimbang seperti yang dicita-citakan. Terjadinya transformasi struktural tersebut dicirikan oleh (a) peran relatif sektor pertanian dan sumbangannya atas Produk domestik Bruto (PDB) dan penyerapan angkatan kerja semakin menurun; (b) pangsa ekspor bahan setengah jadi dan jadi semakin besar; (c) keterkaitan antar berbagai sektor ekonomi akan semakin tinggi; (d) daerah pedesaan semakin terbuka, baik berupa hubungan antar desa serta antar desa dan kota, maupun berupa arus informasi sehingga meningkatkan pola pikir petani menjadi semakin kritis dan rasional, dan (e) terjadinya perubahan pola berusaha tani dari orientasi atas peningkatan produksi semata-mata pada orientasi peningkatan produksi yang lebih efisien dan pemanfaatan peluang meraih nilai tambah yang lebih besar.



II. PERKEMBANGAN PERANAN SEKTOR PERTANIAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa peran relatif pertanian terhadap ekonomi nasional menurun selaras dengan peningkatan pendapatan per kapita. Pangsa sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto dan penyerapan tenaga kerja akan menurun terus pada tahap-tahap pembangunan, dan pada tahap-tahap lanjutan nanti jumlah penyerapan tenaga kerjapun akan menurun pula. Pada tahap ini tenaga kerja pedesaan diharapkan dapat mengisi kesempatan kerja yang lebih menarik di sektor agroindustri dan jasa, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Transformasi struktural tersebut merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pola seperti diatas juga terungkap dalam pengalaman pembangunan kita. Pangsa sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menurun terus, dari 45,5 persen pada tahun 1970 menjadi 30,7 persen pada tahun 1980. Selanjutnya, penurunan tersebut berjalan agak lamban : pangasanya yang pada tahun 1985 masih sebesar 24,0 persen menurun menjadi 22,0 persen pada tahun 1988. Pada akhir Pelita V, sektor pertanian diproyeksikan menyumbang 21,6 persen terhadap PDB. Walaupun pangsa tersebut terus menurun, namun nilai absolut (atas dasar harga konstan) PDB sektor pertanian masih meningkat.

Demikian pula halnya dengan penyediaan kesempatan kerja. Secara absolut, selama 25 tahun terakhir jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian meningkat terus, walaupun secara relatif jumlahnya menurun. Pada tahun 1971 jumlah tenaga kerja yang bergerak di sektor pertanian sebanyak 24,8 juta (63 persen dari total angkatan kerja). Pada tahun 1980, jumlah tersebut naik menjadi 28,8 juta (56 persen) dan pada tahun 1988 meningkat lagi menjadi 39,0 juta (54 persen). Penurunan pangsa relatif ini memang sesuai dengan makin berkembangnya sektor-sektor non pertanian menuju perekonomian yang lebih berimbang.



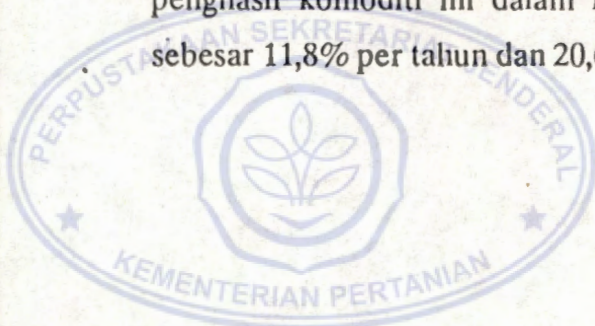
Lebih lanjut, kalau ditilik dari keragaan ekspornya, diungkapkan bahwa dominasi dari ekspor hasil pertanian adalah dari subsektor perkebunan dan perikanan. Dalam Pelita IV (1983 - 1987) kedua sektor tersebut masing-masing menyumbang 81,5% dan 13,7% terhadap total nilai ekspor hasil pertanian. Pada periode tersebut rata-rata nilai ekspor hasil pertanian sebesar US \$ 2,34 milyar per tahun. Ditinjau dari pertumbuhannya, nilai ekspor subsektor perkebunan tumbuh sebesar 2,8% per tahun, sementara sektor-sektor lainnya meningkat dengan rata-rata lebih dari 15% tahun.

Komoditi penting subsektor perkebunan yang diekspor adalah karet, kopi, teh, kelapa sawit dan lada. Dari subsektor perikanan komoditi ekspor utama adalah udang, tuna dan cakalang. Bagian terbesar dari ekspor hasil pertanian tersebut masih berupa bahan baku yang belum secara optimal memanfaatkan peluang yang ada untuk memperbesar nilai tambah dalam upaya meningkat perekonomian nasional.

Dalam Pelita V dari subsektor perkebunan diproyeksikan kenaikan produksi per tahun cukup pesat. Pertumbuhan produksi komoditi minyak dan inti sawit sebesar 19,3% per tahun dan kakao 21,1% per tahun. Sementara pertumbuhan produksi untuk komoditi lainnya relatif lamban, yaitu karet (5,4%), kelapa (5,0%), kopi (2,8%), teh (4,0%) dan lada (2,3%).

Pertumbuhan produksi yang pesat tersebut menghasilkan pertumbuhan volume ekspor yang pesat pula, kecuali untuk kelapa nyiur yang sebagian besar produksinya masih akan diserap pasar dalam negeri. Dalam Pelita V ini diproyeksikan pertumbuhan per tahun ekspor hasil-hasil perkebunan adalah sebagai berikut: minyak sawit (23,1%), kakao (22,1%), tembakau (27,9%), karet (5,5%), kopi (3,1%) dan teh (4,7%).

Pertumbuhan produksi dan ekspor yang sangat pesat setelah Pelita V diproyeksikan akan terjadi pula pada komoditi minyak sawit dan kakao. Luas tanaman kedua penghasil komoditi ini dalam Pelita V diproyeksikan meningkat masing-masing sebesar 11,8% per tahun dan 20,6% per tahun.



Dari subsektor perikanan dalam Pelita V diproyeksikan volume ekspor meningkat dengan pertumbuhan 12,7% per tahun. Volume ekspor udang meningkat dengan 14,2% per tahun, tuna dan cakalang 13,5% per tahun.

Komoditas lain seperti casiavera, tembakau, jarak, sereh wangi diharapkan dapat pula menunjang perkembangan ekspor. Sedang dari sub sektor peternakan ekspor ternak babi mempunyai prospek untuk mengisi pasaran di Singapura dan domba/kambing ke pasaran Malaysia dan Timur Tengah, sedang dari sub sektor pertanian tanaman pangan meliputi komoditas gapek dan hortikultura.

Sasaran ekspor yang hendak dicapai dari sektor pertanian berikut hasil olahannya dalam akhir Repelita V adalah sebesar 6.893,0 juta US \$, atau dengan perkembangan rata-rata sebesar 11,7 persen. Dengan rincian dari komoditas perkebunan 5.213,6 juta US\$, perikanan 1.192,0 juta US\$, peternakan 285,7 juta US\$ dan tanaman pangan 201,7 juta US\$.

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut perlu dihimpun dan digerakkan baik potensi Pemerintah maupun masyarakat luas. Untuk mencapai sasaran Nasional Pelita V diperlukan investasi Nasional sebesar 239 trilyun rupiah, dimana 45 persen investasi oleh Pemerintah dan 55 persen diharapkan investasi oleh masyarakat, terutama dunia usaha (Swasta dan Koperasi). Di sektor pertanian untuk mencapai sasaran pertumbuhan dan sasaran penyerapan tenaga kerja, diperlukan investasi 28 trilyun rupiah yang tentunya sebagian besar diharapkan berasal dari dana masyarakat baik petani maupun dunia usaha.



III. TANTANGAN DAN PROSPEKTIF PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN DALAM ERA LEPAS LANDAS

Beberapa hal penting yang perlu dicatat dalam dua atau tiga dasawarsa yang akan datang antara lain adalah semakin kompleksnya perekonomian dunia. Globalisasi perekonomian dunia tampak bergerak dengan cepat sehingga guncangan atau pertumbuhan ekonomi pada suatu belahan dunia dengan segera memberikan dampak pada belahan lainnya. Hampir tidak ada lagi yang membatasi globalisasi ini kecuali batas-batas kedaulatan suatu negara.

Perekonomian yang semakin kompleks dan kompetitif menuntut tingkat efisiensi yang tinggi. Sehingga yang tidak efisien, secara alamiah akan tergeser atau paling tidak akan kalah bersaing secara internasional. Pergerakan ke arah efisiensi menuntut penggunaan teknologi serta kemampuan manajerial dan profesionalisme yang semakin meningkat. Dampak lain dari perkembangan seperti ini adalah persaingan yang ketat dari segi kualitas produk dari setiap kegiatan.

Munculnya kawasan Asia-Pasifik sebagai kekuatan ekonomi baru merupakan potensi pasar bagi produk-produk pertanian kita di masa yang akan datang. Secara geografis Indonesia berada pada posisi strategis yang menguntungkan dibandingkan dengan negara-negara pemasok lainnya untuk kawasan ini. Dalam hal ini agaknya peningkatan kemampuan teknologi dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan berdasarkan sumberdaya domestik menjadi penting dan merupakan strategi pembangunan masa datang.

Dalam situasi seperti yang telah dikemukakan di atas, jelas peranan teknologi dan informasi menjadi sangat penting. Teknologi dan informasi dengan berbagai karakteristiknya menjadi suatu komponen dalam fungsi produksi/pemasaran mulai dari tingkat makro sampai tingkat mikro. Informasi pasar internasional untuk komoditas pertanian mengenai jumlah serta mutu yang diminta, harga yang berlaku,



lokasi, transportasi, dukungan finansial, nilai tukar, dan negara-negara pesaing tentunya sangat diperlukan baik oleh orang-orang yang terlibat di dalam pengambilan keputusan, perencanaan maupun eksportir. Turun ke tingkat mikro, informasi mengenai jumlah, waktu, tempat maupun mutu produk, disamping informasi manajerial dalam melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan administrasi serta biaya produksi semakin diperlukan untuk dapat mencapai tingkat efisiensi yang tinggi.

Di sisi domestik, meskipun selama kurun waktu Pembangunan Jangka Panjang Tahap I pembangunan pertanian telah berhasil membawa sektor ini ke dalam keadaan yang lebih baik, disadari pula bahwa keberhasilan pembangunan tersebut diikuti pula oleh semakin luasnya masalah dan tantangan yang dihadapi sebagai akibat baik dari keberhasilan pembangunan itu sendiri, sesuai dengan dinamika proses pembangunan maupun beberapa masalah yang belum terselesaikan. kebutuhan akan hasil-hasil pertanian yang semakin meningkat jumlah dan ragam, kualitas dan kuantitasnya sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, naiknya tingkat pendidikan, meningkatnya pendapatan dan semakin majunya industrinya. Pada pihak lain terdapat keterbatasan-keterbatasan dalam penyediaan sumberdaya untuk mendukung peningkatan produksi selanjutnya.

Dalam keadaan seperti itu persaingan antar komoditi dalam perebutan sumberdaya baik lahan, tenaga dan modal maupun pasar menjadi semakin keras. Peningkatan produksi komoditi yang satu akan mempengaruhi tersedianya pasar dan sumberdaya untuk komoditi yang lain. Pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan efisiensi menjadi semakin penting.

Di sisi domestik, suatu trend yang akan menjadi ciri dari pertanian pada dasawarsa-dasawarsa yang akan datang adalah industrialisasi di sektor pertanian. Agro-industri sebagai upaya meningkatkan nilai tambah atas komoditas pertanian yang sekaligus merubah pertanian tradisional menjadi pertanian yang lebih profesional, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan serta lapangan kerja di pedesaan



selanjutnya menuntut skala usaha tani yang ekonomis serta efisien. Belakangan ini dapat dilihat adanya pergeseran dalam kebijakan pemerintah dari keterlibatan langsung dalam pengaturan jalannya pembangunan pertanian ke arah lebih memberikan peran yang lebih besar kepada pasar. Kalaupun intervensi harus dilakukan maka ia diberlakukan melalui kontrol akan variabel-variabel pasar.

Sejalan dengan kebijakan pengembangan agro-industri, terlihat pula keinginan pemerintah untuk melibatkan swasta lebih banyak lagi di sektor pertanian. Ini berarti bahwa pada dasa warsa yang akan datang akan ditandai oleh meningkatnya kehadiran serta peran swasta di sektor pertanian. Hal ini akan membawa dampak terhadap pola skala usaha pertanian dimana operasional efisiensi (produk per tenaga kerja) diharapkan akan meningkat da yang akan datang.

Lebih lanjut, meningkatnya pendapatan sebagai akibat keberhasilan pembangunan selama ini sedikit banyak akan mempengaruhi permintaan domestik akan produk-produk pertanian. Kiranya, di masa yang akan datang, permintaan cenderung akan bergeser ke arah kualitas sebagai akibat meningkatnya pendapatan penduduk. Pada sisi lain, pulau Jawa yang selama ini merupakan pemasok sebagian besar hasil-hasil pertanian (terutama pangan) mulai menunjukkan tingkat kejenuhan, sedangkan pada waktu yang sama masih banya daerah lain yang dirakan memiliki potensi untuk dikembangkan. Sejalan dengan hal ini, reorientasi pembangunan dengan penekanan investasi pada diversifikasi pertanian yang merupakan usaha perluasan dan pendalaman basis pembangunan pertanian tampak menjadi semakin penting.



IV. KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERTANIAN DI MASA YANG AKAN DATANG

Pada era tinggal landas, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditempuh akan bersifat mempertahankan hal-hal yang telah berhasil dicapai selama lima Pelita Petama, disamping semakin memperkuat posisi sektor pertanian dalam keseluruhan proses pembangunan. Secara khusus kebijaksanaan-kebijaksanaan yang perlu mendapat perhatian utama antara lain sebagai berikut :

1. Swasembada Pangan.

Beras masih tetap merupakan bahan pangan pokok yang total konsumsinya akan cenderung meningkatkan sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan pendapatan masyarakat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mempromosikan diversifikasi pangan dan gizi, namun masih terlihat kecenderungan naiknya konsumsi beras apabila terjadi kenaikan pendapatan khususnya pada golongan pendapatan rendah. Pada golongan pendapatan menengah ke atas mulai terlihat adanya kecenderungan menurunnya konsumsi beras. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan diversifikasi pada tingkat pendapatan tersebut.

Swasembada beras yang telah kita capai dan mampu dipertahankan sampai saat ini perlu terus dilanjutkan, karena beras merupakan komoditas paling strategis. Di masa datang kebijaksanaan swasembada beras ini perlu diletakkan pada perspektif pemenuhan pangan dan peningkatan keseimbangan konsumsi gizi. Karena itu upaya diversifikasi produksi dalam rangka penyediaan pangan dan diversifikasi konsumsinya melalui pengembangan proses pengolahan menjadi lebih penting. Peningkatan produksi pangan bukan beras seyogyanya mendapat perhatian lebih besar lagi, seperti untuk produk hortikultura, peternakan dan perikanan.



Dalam kerangka swasembada pangan (beras) ini perlu disepakati bahwa perngertiannya adalah pada skala nasional dan dalam periode pembangunan lima tahunan. Ini berarti bahwa tidak perlu setiap wilayah dan daerah harus mencapai swasembada, dan tidak perlu pula setiap tahun kita secara absolut perlu berswasembada.

Swasembada pangan, diupayakan pula melalui perbaikan nilai gizi dengan meningkatkan konsumsi protein hewani (produk peternakan dan perikanan) dan konsumsi vitamin dengan meningkatkan konsumsi buah-buahan dan sayuran. Upaya ini dilakukan melalui percepatan peningkatan produktivitas dan produksi peternakan, perikanan dan hortikultura. Dengan kebijaksanaan ini harga relatif produk peternakan, perikanan dan hortikultura ini terhadap harga beras akan terus menurun, dengan disertai peningkatan pendapatan masyarakat maka diversifikasi pangan dan gizi berkembang dan ketergantungan sumber kalori dan protein pada beras akan menurun.

2. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja.

Bila kita melihat perkembangan kependudukan dan struktur perekonomian nasional sampai pertengahan Pelita V ini, jelas sekali bahwa sebagian besar penduduk dan angkatan kerja Indonesia masih menggantungkan kehidupannya dan beberapa di sektor pertanian. Oleh karena itu, dalam pembangunan jangka panjang berikutnya mutu/kualitas manusia Indonesia perlu terus ditingkatkan. Persoalan utama yang dihadapi adalah bagaimana menyiapkan kualitas angkatan kerja dalam suatu phase dimana proses transformasi struktur perekonomian kita ke dalam era industrialisasi akan semakin cepat, juga sekaligus memperhatikan agar kualitas angkatan kerja yang memilih untuk tetap tinggal di sektor pertanianpun mampu secara dinamis menyesuaikan diri dalam perimbangan struktur perekonomian yang dinamik yang dicirikan dengan produktivitas angkatan kerja yang lebih tinggi pada setiap sektor. Penyiapan kualitas angkatan kerja yang sesuai pada periode transisi tersebut



sangat penting agar proses transformasi yang terjadi tidak malah menimbulkan dampak negatif dan masalah sosial lainnya.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sektor pertanian dilakukan secara simultan dengan upaya meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan penggunaan barang modal berupa alat dan mesin pertanian dalam keseluruhan kegiatan produksi pertanian. Kebijakan ini disertai dengan kebijaksanaan pengembangan seluruh mata rantai agribisnis dan pengembangan sentra produksi pertanian dalam skala ekonomi yang efisien, untuk mendorong pertumbuhan agro-industri.

3. Pengembangan Agro-industri.

Agar sektor pertanian secara berkesinambungan dapat menyumbang secara optimal kepada peningkatan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta peningkatan pendapatan petani, upaya diversifikasi untuk mencari sumber pertumbuhan baru dan pengembangan agro-industri untuk meraih nilai tambah yang lebih besar dapat menjadi pilihan strategis guna mencapai sasaran pertumbuhan perekonomian secara merata.

Seperti diketahui, pengembangan diversifikasi vertikal bertujuan untuk memperkenalkan tambahan kegiatan atau perlakuan terhadap komoditas setelah dipanen. Dengan demikian para petani/pedesaan yang bersangkutan dapat memperoleh nilai tambah dari komoditas yang dihasilkan. Melalui kegiatan ini (penyimpanan, pengeringan, pengolahan, pengangkutan dan seterusnya), maka nilai tambah yang semula dinikmati oleh pihak lain (prosesor, pedagang) berangsur-angsur akan beralih kepada petani produsen yang bersangkutan, sehingga dengan demikian pendapatan petani dapat ditingkatkan. Kegiatan agribisnis dan agro-industri ini dikembangkan di pedesaan disentra produksi.



Lebih lanjut, agar pengembangan agro-industri tersebut dapat meraih manfaat yang optimal, maka dalam pengembangannya perlu didasarkan atas keunggulan komparatif yang dimiliki, karena ini akan menjamin pasar untuk produk yang dihasilkan. Untuk itu perlu diteliti secara seksama dimana letak keunggulan komparatif tersebut dan dalam bentuk apa. Keunggulan tersebut perlu pula dikaji dari waktu ke waktu karena keunggulan ini berubah dengan adanya perubahan teknologi, struktur ekonomi, struktur pasar internasional dan sebagainya.

Berangkat dari uraian di atas, Pengembangan agro-industri sebagai fokus sentral pembangunan perekonomian untuk memacu pertumbuhan ekonomi khususnya di pedesaan, senantiasa tidak terlepas dari upaya pengoptimalan daya guna potensi sumberdaya di masing-masing wilayah. Sejalan dengan hal tersebut, pola usaha yang dikembangkan guna mendukung pengembangan agro- industri ini juga akan diselaras-kan dengan kondisi dan potensi sumberdaya spesifik dari tiap-tiap wilayah.

4. Upaya Kelembagaan

Untuk mengoptimalkan efek ganda sebagai dampak positif dari pengembangan agribisnis, selain iklim harga yang cukup merangsang bagi industri pengolah melalui promosi ekspor, juga yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai kemungkinan dorongan investasi kepada sub sektor agro-industri. Selain itu usaha yang dapat ditempuh untuk meningkatkan stabilitas dan kontinuitas produksi, antara lain dapat didekati dengan : (a) upaya-upaya kelembagaan (institusional) didalam mendorong dan mengusahakan kerjasama mutual antara petani dengan pabrik pengolah melalui pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR); (b) Mendorong dan mengusahakan terjadinya spesialisasi produksi berdasarkan keuntungan komparatif baik dilihat dari sisi masyarakat petani maupun wilayah, dan (c) Usaha untuk memperoleh iklim harga yang merangsang dengan stabilitas yang mantap baik ditingkat petani maupun konsumen. Dengan cara ini, pada gilirannya tentu akan merangsang para petani untuk melakukan kegiatan pasca panen, sehingga stabilitas suplai dan harga produk senantiasa terjamin.



Faktor kunci dari aspek kelembagaan yang terkait sebagai salah satu rekayasa sosial antara lain dapat berupa pengejawantahan dari transformasi kelompok tani sehamparan dalam wadah Koperasi (KUD) kepada masalah-masalah yang tidak hanya sekedar dalam lingkup produksi saja, akan tetapi lebih dari mengkait kepada lingkup agro-industri. Selain itu, "mutual benefit" antara industri "besar" dengan petani "kecil" dengan KUD nya perlu didorong ke suatu arah, dimana di satu sisi kendala-kendala petani (akses terhadap teknologi dan kapital mampu dilonggarkan, akan tetapi di lain sisi, skala komersialisasi tetap mampu untuk ditangkap secara optimal. Dengan pembinaan kelompok tani seperti ini pada akhirnya kita dapat membina mereka dalam wadah koperasi yang tangguh yang selama ini terus kita kembangkan bersama.

Dalam pengembangan kelembagaan pertanian akan diupayakan adanya keseimbangan dan pembagian resiko dan keuntungan antar kelembagaan petani dengan Koperasi KUD nya dengan swasta dan BUMN. Ketiga lembaga ekonomi ini harus dikembangkan agar saling menguntungkan dan saling menghidupi. Dengan demikian antara KUD (koperasi petani), dengan BUMN dan swasta akan terjalin kerjasama dan saling ketergantungan yang serasi.

5. Melestarikan Lingkungan

Masalah kelestarian lingkungan akhir-akhir ini sudah mulai menjadi masalah sejalan dengan perkembangan sektor industri. Walaupun keluhan terhadap pencemaran lingkungan selama ini terutama ditujukan kepada industri-industri pengolahan, tidak mustahil pada waktu yang akan datang akan terjadi hal yang sama pada sektor pertanian apabila tidak diambil tindakan pencegahan sejak sekarang. Di negara-negara maju umpamanya, penggunaan bahan-bahan kimia dosis tinggi untuk pemupukan secara berkepanjangan tanpa usaha-usaha penangkalan secara khusus akan dampak negatifnya telah menyebabkan pencemaran lingkungan. Selain itu, penggunaan sumber daya alam secara berlebihan ("over exploitation") perlu diwaspadai. Oleh karena itu pemanfaatan sumber daya alam perlu disertai dengan usaha-usaha untuk melestarikannya.



Wawasan lingkungan dalam pembangunan pertanian adalah untuk memberikan arah agar setiap kegiatan pertanian haruslah memperhatikan kondisi dan potensi sumberdaya alam dan lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan non fisik. Hal ini bertujuan agar kelestarian sumberdaya alam dan kualitas hidup terjamin baik untuk menunjang upaya pengembangan yang berkelanjutan. Dalam wawasan lingkungan juga terkandung prinsip bahwa kebijaksanaan pengembangan pertanian wilayah didasarkan kepada potensi dan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan wilayah yang bersangkutan.

Kegiatan pembangunan pertanian tersebut dijalankan melalui pendekatan terhadap fungsi-fungsi pokok pembangunan pertanian yang mencakup pengembangan produksi, pembinaan faktor produksi, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, pengembangan dan alih teknologi, pembinaan informasi pertanian, pembinaan pasca panen dan pemasaran, pembinaan pasar ekspor, pemantapan kelembagaan, pembinaan gizi masyarakat, pengembangan wilayah, pembinaan hubungan sektoral, dan pembinaan kerjasama internasional.

6. Otonomi Daerah

Dalam era lepas landas pembangunan pertanian akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang semakin kompleks dan terciptanya sektor pertanian yang tangguh, maju, serta efisien merupakan suatu keharusan. Salah satu upaya meningkatkan efisiensi adalah penerapan prinsip keunggulan komparatif wilayah, yang berarti corak dan kegiatan pembangunan pertanian wilayah antar daerah berbeda sesuai dengan potensi sumberdaya dan keunggulan yang dimilikinya. Dengan demikian, peran pemerintah daerah akan semakin besar, karena pemerintah daerah yang paling mengetahui mengenai potensi dan kendala yang ada di masing-masing wilayahnya. Sejalan dengan itu, koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah harus semakin didorong ke arah desentralisasi perencanaan pembangunan pertanian berdasarkan daerah otonomi yang ditunjang dengan upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan investasi sarana dan prasarana serta perangkat lemahnya.



Dalam rangka memantapkan pelaksanaan otonomi daerah akan dibina dan dikembangkan kemampuan sumberdaya pelaksana pembangunan untuk dapat menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian sesuai dengan keunggulan komparatif sumberdaya pertanian di wilayah dan daerahnya. Dengan kebijaksanaan ini maka perencanaan dari bawah ("bottom up planning") benar-benar dapat diefektifkan. Sesuai dengan pengembangan ini desentralisasi pembangunan pertanian akan semakin dimantapkan.

Dalam penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pertanian dalam negara kesatuan yang memberikan hak otonomi kepada Daerah, maka tepat sekali prinsip yang dianut di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dimana azas desentralisasi dilaksanakan secara bersama-sama dan seimbang dengan pelaksanaan azas dekonsentrasi. Prinsip ini sesuai dan sebagai konsekuensi daripada penerapan prinsip yang lebih mendasar yaitu penyelenggaraan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Sehingga dengan pelaksanaan kedua azas tersebut secara bersama dan seimbang, akan lebih mendorong kepada penyelenggaraan otonomi oleh Daerah secara wajar dan terarah sesuai dengan arah kebijaksanaan nasional yaitu pengembangan wawasan Nusantara dalam wujud negara kesatuan RI.

Berbagai tugas dekonsentrasi yang perlu dilaksanakan di tingkat Daerah secara prinsip antara lain meliputi aspek-aspek penyelenggaraan teknis terhadap perangkat pertanian di daerah, menyelaraskan program Pemerintah Pusat dengan program Pemerintah Daerah di bidang pertanian, menterpadukan program-program pertanian lintas sub sektoral maupun sektoral dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya, dan pengendalian tugas-tugas Departemen di daerah.

Terhadap berbagai urusan di bidang pertanian yang akan diserahkan kepada Daerah, dalam rangka pengembangan wawasan Nusantara dalam negara kesatuan Republik Indonesia, aspek-aspek tertentu misalnya yang menyangkut kebijaksanaan nasional, bimbingan teknik dan pengendalian/pengawasan serta pemberian perijinan



dan hal-hal yang bersifat langsung operasional tertentu, yang sifatnya sangat strategis tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pada saat ini, tugas-tugas dekonsentrasi yang berkaitan dengan aspek penyelarasan program Pusat dan Daerah, penterpaduan program lintas sub sektoral dan/atau lintas sektoral serta pengembangan operasional dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Pertanian yang pada saat sekarang sudah dibentuk di semua propinsi/Dati I. Sedangkan tugas-tugas dekonsentrasi yang bersifat operasional tertentu dilakukan oleh berbagai Unit Pelaksanaan Teknis Departemen Pertanian di daerah yang secara organisatoris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang membawahnya, dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari secara administratif operasional berada di bawah Kantor Wilayah Departemen Pertanian.

Dengan mengembangkan produksi pertanian sesuai dengan keunggulan komparatif daerah sebagai penerapan salah satu usaha pokok pembangunan pertanian berupa diversifikasi pertanian maka saling mendukung dan saling ketergantungan antar wilayah nusantara semakin mantap. disamping itu kebijaksanaan ini juga mendorong dan memperlancar arus perdagangan antar wilayah sehingga aspek pemerataan pembangunan betul-betul terlaksana. Hal ini juga berarti memantapkan wawasan nusantara dan kesatuan ekonomi nasional.



V. Penutup

Dengan upaya pokok pembangunan pertanian adalah diversifikasi maka orientasi kebijaksanaan pembangunan beralih dari orientasi komoditas kepada berorientasi optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pertanian dengan agro-ekosistemnya. Dengan strategi ini pengembangan sentra produksi komoditas disesuaikan dengan keunggulan komparatifnya pada suatu agro-ekosistem wilayah tersebut. Sumberdaya alam direncanakan tata ruangnya dan ditingkat kualitasnya untuk pengembangan komoditas yang paling menguntungkan dan sesuai dengan prospek pemasarannya. Kesenjangan pembangunan sebagai akibat bias sub-sektor atau komoditas dapat dihilangkan. Reorientasi kebijaksanaan pembangunan pertanian ini menghendaki pula penataan kembali institusi pengelola pembangunan pertanian.

Diversifikasi pertanian berarti pula pendalaman dan perluasan basis sumberdaya pembangunan. Basis pembangunan pertanian selama ini sangat didominasi oleh Sumatera, Jawa termasuk Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Spektrum komoditi yang dikembangkan juga terbatas pada komoditas pertanian yang sesuai dengan dan dominan pada ekosistem daerah tersebut. Basis sumberdaya pertanian di daerah tersebut sebagian besar sudah dimanfaatkan, hanya saja belum optimal. Keberlanjutan pembangunan pertanian menghendaki kita memperluas dan memperdalam basis sumberdaya pembangunan pertanian ini ke wilayah lainnya, dan meningkatkan optimalisasi pengelolaan sumberdaya pertanian secara lestari. Dengan strategi ini kesatuan ekonomi nasional dapat diwujudkan.

Kebijaksanaan pembangunan produksi pertanian di Indonesia Bagian Barat yang didukung oleh upaya intensifikasi beserta kebijaksanaan subsidi harga faktor produksi, harga produk pangan, subsidi tingkat bunga kredit, investasi prasarana, dan kebijaksanaan pemasaran dan perdagangan telah berhasil memacu pertumbuhan pertanian. Akan tetapi semua kebijaksanaan tersebut bersifat komoditas spesifik.



Dalam tingkat perkembangan ekonomi saat ini dan mendatang, kebijaksanaan tersebut dirasakan sudah tidak memadai lagi. Petani saat ini sudah mempunyai tingkat ketrampilan dan kemampuan yang cukup. Karenanya kebijaksanaan peningkatan kesejahteraan petani dengan diversifikasi pertanian sudah masanya lebih banyak menggunakan mekanisme pasar berupa kebijaksanaan harga relatif sektor pertanian, penemuan dan pengembangan serta penyediaan paket teknologi secara dinamis berkelanjutan ditingkat petani untuk setiap agro-ekosistem sesuai dengan keunggulan komparatif komoditas di wilayah ini yang ditopang oleh pengadaan sarana produksi, sarana dan prasarana ekonomi, kebijaksanaan fiskal dan moneter yang sesuai, dan pengembangan lembaga perkreditan dan keuangan pedesaan.

Pelestarian swasembada pangan (beras) hanya dapat dilaksanakan melalui perluasan basis produksi beras atau peningkatan pangsa produksi beras luar Jawa. Melalui investasi pada pengembangan irigasi dengan pencetakan sawah di luar Jawa, pemanfaatan lahan pasang surut, rawa dan lahan kering. disamping itu untuk jangka panjang menemukan dan mengembangkan paket teknologi padi termasuk irigasi modern untuk lahan kering, pasang surut dan rawa.

Perubahan pola konsumsi masyarakat dan diversifikasi vertikal komoditi pertanian serta prospek pengembangan ekspor khususnya bahan makanan, memerlukan perlindungan konsumen terhadap mutu bahan makanan, dengan demikian hal ini perlu mendapat penanganan yang optimal. Sanitasi dan phitosanitasi perlu mendapat perhatian melalui kontrol terhadap kualitas dan standarisasi dari produk. Dalam hal ini mendesak diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah produksi, pengolahan dan distribusi, kontrol kualitas, standarisasi dan mengatur kelembagaan yang bertanggungjawab dalam masalah ini. Tanpa kebijaksanaan dan pengaturan yang ketat mengenai masalah mutu bahan makanan khususnya dan produk pertanian umumnya akan merugikan masyarakat konsumen. Konsumen perlu mendapat perlindungan untuk mendapatkan produk yang bernilai tinggi terutama dari segi gizi dan membayar dengan harga yang layak.



Dipemahaminya semua strategi di atas belum akan menjamin tercapainya tujuan apabila tidak diperoleh dukungan dari berbagai instansi terkait. Karena itu, koordinasi subsektoral dan lintas sektoral mutlak diperlukan. Selain itu, basis kegiatan pertanian secara umum ada di pedesaan, karena itu dukungan Pemerintah Daerah mutlak diperlukan. Dukungan ini sekaligus diperlukan dalam rangka peningkatan pengembangan pembangunan yang berlandaskan kepada keunggulan komparatif regional.

Jakarta, 8 Mei 1991

Menteri Pertanian

Ir. Wardoyo



59





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA PAMERAN INDO-INVEST FAIR '91
10 - 14 Mei 1991

Saya menyambut baik penyelenggaraan Pameran "INDO-INVEST FAIR '91 ini. Karena melalui pameran ini akan dipromosikan hasil produksi sektor pertanian yang mempunyai peluang ekspor serta tersebarnya informasi kebijaksanaan Penanaman Modal di sektor pertanian yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan PMDN, PMA maupun non PMDN/PMA.

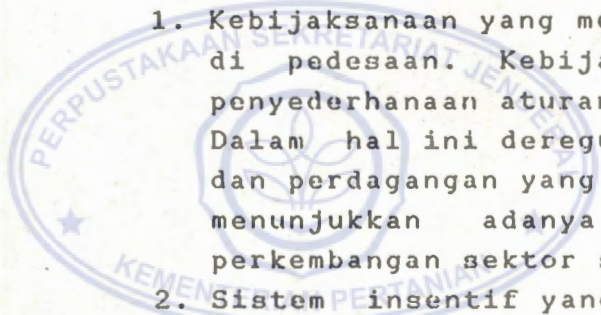
Dalam menunjang pengembangan perekonomian, Pemerintah mengembangkan agribisnis dengan setiap mata rantainya. Pengembangan agribisnis ini mempunyai nilai-nilai positif karena (a) memungkinkan perluasan ekspor yang lebih besar dengan variasi komoditi yang luas, (b) dapat menyediakan lapangan kerja yang besar dengan penggunaan lahan yang luas, (c) memerlukan dana investasi yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan dana untuk industri di luar agribisnis, (d) merupakan usaha yang cukup mempunyai daya tarik bagi swasta nasional maupun asing untuk bergerak di bidang agribisnis.

Selama ini, ekspor hasil pertanian sebagian besar masih dalam bentuk bahan mentah, sedangkan dalam bentuk komoditas hasil industri pengolahan baru mulai berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan agroindustri sangat potensial dan mempunyai prospek yang baik. Indonesia mempunyai keuntungan komparatif karena bahan baku yang diolah dihasilkan di dalam negeri, sehingga pengembangan agroindustri akan menghasilkan harga di pasaran Internasional yang bersaing.

Oleh sebab itu investasi menjadi sangat penting dalam upaya pengembangan agribisnis dan agroindustri komoditas tersebut.

Dalam kaitannya dengan investasi, beberapa strategi untuk pengembangan agribisnis antara lain :

1. Kebijakan yang mendorong entrepreneurship sektor swasta di pedesaan. Kebijakan ini memberikan keringanan, penyederhanaan aturan dan peningkatan pelayanan pemerintah. Dalam hal ini deregulasi dalam hal perbankan, investasi, dan perdagangan yang sedang berlangsung sekarang ini sudah menunjukkan adanya "political will" dalam mendorong perkembangan sektor swasta
2. Sistem insentif yang memadai untuk entrepreneur swasta dan investor. Peranan sektor swasta dan koperasi semakin besar

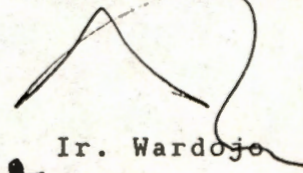


diberikan kepada entrepeneur termasuk antara lain kelong-
garan pajak untuk barang modal, peralatan yang diimpor,
maupun yang dibeli di dalam negeri, proteksi dan hak paten,
bantuan dalam pemasaran, subsidi bunga pinjaman dan
sebagainya

3. Pengembangan agroindustri perlu didasarkan atas prinsip
keunggulan komparatif, tingkat keterampilan masyarakat
setempat dalam memantapkan jenis industri pengolahan yang
telah dikenal lingkungan, ketersediaan bahan baku yang
berkesinambungan dan fasilitas kredit dengan bunga rendah.

Semoga pameran ini berhasil dengan sukses.

Menteri Pertanian



Ir. Wardoyo



60





MINISTER OF AGRICULTURE
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

KEYNOTE ADDRESS
BY
THE MINISTER OF AGRICULTURE
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AT THE SECOND WORLD TUNA TRADE CONFERENCE
BALI, 13 - 15 MAY 1991

Distinguished Delegates,
Honorable Guests,
Ladies and Gentlemen,

I hardly welcome the invitation of INFOFISH through Director General of Fisheries to deliver an address and at the same time to open this conference officially, for which I would like to express my thanks. Furthermore we thank INFOFISH which has appointed Indonesia to host this conference.

I believe that this Tuna Trade Conference will be of great meaning for us where we from various countries coming here together to talk and discuss about tuna trade and others related. We hope from this opportunity this conference will attempt to have some commitment of tuna transaction among who are now with us and for those who being absent through telecommunication.



Distinguished Delegates,
Ladies and Gentlemen,

Tuna fish which internationally migrates in the seas actually belong to all countries especially for those owning seawater, consequently it is wise for the countries all over the world to discuss it as to find out its utility as natural living resources and simultaneously think about its conservation. It has shown that tuna become a world-wide consumption commodity wherein demand for it increased year by year.

Distinguished Delegates,
Ladies and Gentlemen,

Indonesia as an archipelagic country, has just achieved export of tuna in 1989 with the amount of 56,678 tons, consisting 8,630 tons fresh, 27,426 tons frozen, and 20,621 tons canned. The average price of the tuna mentioned above (i.e. 1989) recorded US\$ 3.09/kg as fresh, US\$ 1.34/kg as frozen, and US\$ 1.91/kg canned.

In fact Indonesia waters (included Indonesia's Exclusive Economic Zone) has a potency of large pelagic fishes (tuna and skipjack tuna) in the total 197,348 tons/year of which 87,123 tons are tuna and 110,225 tons/year are skipjack.

We realized that tuna export from Indonesia mostly (48%) in frozen, canned 36% and fresh 16%. Those figures were of 1989.



Distinguished Delegates,

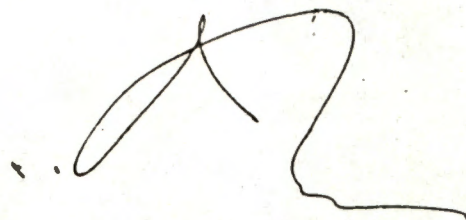
Ladies and Gentlemen,

We are here gathering now talking and discussing about Tuna Trade and others related. I fully hope this conference could afford the marketing efficiency of tuna, in order to bring the benefit/satisfaction for all who are involved in the marketing of tuna as well as fishermen who are doing primary production, and keeping the principle of conservation of resources and environment.

Last but not least, I do hope you'll find it a nice conference and please have a time to enjoy the scenery around you and our cultures.

May I now, with my great pleasure to declare the Second World Tuna Conference officially open.

Thank you



Wardojo



61





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA ACARA SEMINAR SEHARI IKA-SPP DAERAH DKI JAKARTA
18 MEI 1991

Assalamu'alaikum Wr Wb

Saudara para alumni SPP Daerah DKI yang terhormat

Para peserta seminar yang berbahagia

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas berkat rahmat dan perkenan Nya kita dapat berkumpul bersama pada acara seminar Ikatan Keluarga Alumni SPP Daerah DKI Jakarta pagi ini.

Seminar kali ini yang bertema, "Peluang dan langkah berwiraswasta Bagi Kader Pertanian", saya anggap sangat tepat karena dilaksanakan menjelang tahun ajaran baru bagi Sekolah Pertanian Pembangunan. Saya berharap hasil-hasil dari pembahasan dalam seminar ini merupakan masukan yang berharga tidak saja bagi para alumni SPP DKI terlebih lagi bagi guru SPP yang hadir, para pimpinan SPP maupun para pelaksana pendidikan pertanian di Pusat. Dengan demikian segala upaya yang telah dilakukan oleh Panitia Pelaksana akan mendatangkan manfaat bagi semua kita yang hadir disini.

Atas upaya yang telah dilakukan oleh penyelenggara



seminar ini saya menyampaikan penghargaan atasnya. Mudah-mudahan seminar ini dapat dijadikan langkah awal bagi Ikatan Alumni SPP DKI untuk lebih berperan serta dalam menggugah sesama alumni SPP umumnya, dan juga para calon alumni, yang saat ini masih menimba ilmu di SPP masing-masing, untuk lebih meyakini akan besarnya peluang berusaha mandiri sebagai wiraswastawan.

Saudara-saudara yang terhormat,

Dalam Pembangunan Nasional Jangka Panjang, sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya struktur ekonomi yang seimbang. Dalam struktur yang demikian sektor pertanian diharapkan masih mampu berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi, disamping sebagai penyedia pangan bagi rakyat, penghasil komoditi non migas dan bahan baku industri, serta sebagai sumber mata pencaharian pokok maupun penyedia lapangan kerja.

Sebagai penyedia lapangan kerja, dalam era menjelang tinggal landas ini, sektor pertanian diharapkan mampu menampung hampir 35 % dari 11,9 juta angkatan kerja baru atau sekitar 4,05 juta. Berarti setiap tahun selama Pelita V harus tersedia kesempatan kerja bagi 810 ribu orang, termasuk didalamnya para lulusan SPP yang berjumlah lebih dari 10 ribu orang.

Sasaran sumber lapangan kerja di sektor pertanian pada Pelita V terbanyak pada sub sektor Pertanian Tanaman Pangan (40,60 %), kemudian pada sub sektor Perkebunan (35,26%), sub sektor Perikanan (12,60%), dan yang terkecil adalah sub sektor Perternakan (11,40%). Sudah barang tentu kesempatan kerja tersebut bukan dilingkungan pemerintahan, tetapi terbuka pada



usaha-usaha swasta, usaha koperasi dan usaha mandiri.

Saudara-saudara yang terhormat,

Oleh karena penyerapan angkatan kerja yang menjadi tanggung jawab sektor Pertanian berada pada kegiatan usaha-usaha swasta, koperasi dan mandiri, maka dalam kesempatan ini saya mengajak saudara-saudara yang hadir khususnya para pengusaha dan calon-calon pengusaha untuk bersama-sama memikirkan dan mengupayakan terciptanya peluang-peluang usaha baru di sektor pertanian. Seminar ini hendaknya dapat pula digunakan sebagai ajang timbulnya kesepakatan-kesepakatan diantara para penghasil angkatan kerja yaitu, SPP, dan para pemakai tenaga kerja, yaitu para pengusaha.

Seperti diketahui bersama kesempatan kerja di pemerintahan semakin sempit. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah melancarkan berbagai program kemudahan dalam berusaha. Departemen Pertanian bahkan mendorong setiap upaya terciptanya lapangan kerja di sektor swasta baik yang bersifat formal maupun in formal. Kegiatan Agrobisnis untuk berbagai komoditas pertanian akan terus dikembangkan, terutama kegiatan yang bersifat agroindustri yang memberikan nilai tambah pada setiap komoditas yang ditangani.

Saudara-saudara yang terhormat,

Apabila dikaitkan dengan nilai tambah, agroindustri



merupakan kelompok industri yang cukup dominan dalam sektor industri. Dari segi penyerapan tenaga kerja, kegiatan agroindustri juga memberikan peluang yang relatif tinggi yaitu sekitar 36 % seluruh tenaga kerja yang diserap sektor industri. Kegiatan agro industri dapat dilakukan secara skala besar maupun pada tingkat skala rumah tangga. Bahkan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan yang berimbang. Dengan berkembangnya agroindustri di pedesaan, diharapkan masyarakat pedesaan dapat :

1. meningkatkan nilai tambah hasil-hasil pertaniannya,
2. meningkatkan pemasaran produksi pertanian,
3. menciptakan lapangan kerja baru,
4. meningkatkan penghasilannya.

Pemerintah juga telah memikirkan langkah-langkah maju untuk pengembangan agrobisnis dan agroindustri. Deregulasi di bidang pertanian memungkinkan petani dan pengusaha tani mempunyai kesempatan yang lebih luas dalam mengembangkan komoditas yang lebih menguntungkan.

Strategi Pemerintah dalam pengembangan agroindustri selalu terkait dengan tujuan pembangunan wilayah pedesaan dalam arti luas. Faktor landasan untuk itu adalah :

1. memperhatikan keunggulan komparatif,
2. menggunakan tingkat teknologi yang sesuai dengan ketrampilan masyarakat serta lingkungan setempat,
3. ketersediaan bahan baku yang berkesinambungan,
4. terciptanya perangkat institusi atau kelembagaan yang mendorong iklim kegiatan agrobisnis.



Pengembangan agrobisnis dan agroindustri akan berkembang dengan baik jika para pelaku mulai di tingkat dasar, yaitu para petani, sampai di tingkat atas mempunyai kemampuan yang memadai. Oleh karena itu menjadi tugas SPP untuk menghasilkan angkatan kerja menengah yang memiliki wawasan budidaya dan teknologi yang lebih luas dan mempunyai sikap mandiri.

Para peserta seminar yang terhormat,

Kegiatan pertanian sejak tahun 1984 telah mengantisipasi peluang kesempatan kerja di sektor Pertanian yaitu dengan diperbaharunya kurikulum SPP. Kemudian untuk lebih memperluas cakrawala lulusan SPP, kurikulum tersebut disempurnakan lagi pada tahun 1989. Ada beberapa kegiatan pendidikan di SPP yang dirancang untuk mengasah kemampuan lulusan kearah kemandirian, yaitu :

1. Kegiatan swakarya wirausaha merupakan wadah bagi siswa berlatih memberanikan diri berwirausaha di bidang pertanian. Para siswa diperkenalkan segala seluk beluk pemasaran sejak dini. Disamping itu juga dilatih untuk membiasakan diri menganalisa setiap usaha yang dilakukan melalui penghitungan unsur-unsur masukan (input) dan keluaran (output). Dalam hal produksi, mereka dilatih untuk mampu memilih dan menghasilkan komoditas secara efisien. Untuk melengkapi kemampuan produksi, mereka juga didorong untuk terus meningkatkan kemampuan dan kemauan menjual hasil produksinya. Dengan demikian diharapkan



setelah mereka lulus telah mempunyai kemampuan memasarkan produksi secara efisien dan efektif.

2. Program pemantapan belajar di unit usaha (PPU), merupakan wadah bagi siswa dalam meng"apresiasikan" kegiatan usaha tani di sekolah dalam konteks yang sebenarnya. Para siswa selama satu semester bekerja dan belajar di unit usaha milik perusahaan maupun perseorangan atau petani maju. Mereka dapat melihat dan menghayati kehidupan petani maju, sehingga dapat menyerap pengalaman kerja disamping mempertebal keyakinan bahwa kehidupan petani maju lebih baik dari rata-rata pegawai negeri. Dengan demikian akan timbul motivasi yang kuat dari para siswa untuk meniru dan mau menjadi petani atau nelayan yang mandiri. Bagi siswa yang melaksanakan PPU di perusahaan-perusahaan, diharapkan akan timbul interaksi yang positif, sehingga terjadi negosiasi dan transaksi kesempatan kerja.

3. Penanaman nilai-nilai, merupakan program yang dilaksanakan disetiap kegiatan SPP. Penanaman nilai-nilai baru kearah kemandirian diharapkan mampu menghasilkan para lulusan dengan pola pikir yang berorientasi kepada penciptaan lapangan kerja, bukan sekedar pencari kerja. Disamping itu unsur-unsur nilai-nilai luhur yang telah ada, penanamannya tidak hanya terbatas pada mata-mata pelajaran tertentu, tetapi juga pada setiap mata pelajaran dan pada setiap kegiatan. Dengan demikian dalam



kurun waktu mendatang akan dihasilkan wirausahawan-wirausahawan yang mempunyai etika dan berbudi luhur serta integritas moral yang mulia.

Para peserta seminar yang terhormat,

Dari data lulusan SPP dari tahun ke tahun, diketahui bahwa komposisi terbesar ($\pm 90\%$) berasal dari SPP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Swasta. Oleh karena itu, saya harapkan perhatian para penyelenggara SPP tersebut, untuk turut mendukung program pendidikan pertanian yang telah dicanangkan Pemerintah. Sedangkan bagi beberapa SPP negeri, Departemen Pertanian telah memberikan tugas baru sebagai pelaksana pendidikan program Diploma III Penyuluhan Pertanian yang telah berhasil meluluskan 884 orang dalam dua angkatan. Program ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kualifikasi penyuluh pertanian yang mampu mengantisipasi perkembangan agrobisnis dan agroindustri. Upaya ini dilakukan pemerintah dalam mewujudkan terciptanya perangkat kelembagaan yang mampu mendorong iklim kegiatan agrobisnis.

Peserta Program D3 Penyuluh Pertanian adalah para penyuluh pertanian lapangan (PPL). Pemerintah menyadari adanya keterbatasan sumber dana dan sumber daya manusia. Oleh karena itu sumber-sumber daya yang terbatas perlu ditingkatkan kualitasnya. Dalam program tersebut, para PPL tidak saja dididik untuk mampu mengadopsi perkembangan teknologi produksi dan mampu meneruskannya kepada para petani yang telah maju, tetapi juga diperkaya dengan metode-metode yang terbaru dan etika penyuluhan. Penanaman etika



penyuluhan dilakukan melalui program penanaman nilai-nilai pada setiap kegiatan pendidikan di D3 APP.

Para Peserta seminar dan hadirin yang terhormat,

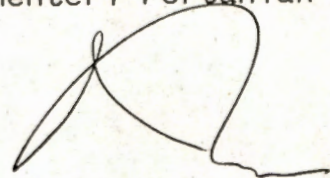
Demikian arahan saya, mudah-mudahan apa yang telah saya kemukakan dapat menjadi bahan pemikiran dalam seminar yang akan saudara laksanakan. Kepada para peserta seminar, saya mengucapkan selamat bekerja dan berharap dapat menghasilkan rumusan yang bermanfaat bagi kemajuan pendidikan pertanian di Indonesia.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrohmanirrohim" maka seminar Ikatan Alumni SPP DKI tahun 1991, secara resmi saya nyatakan dibuka.

Wassalamuala'ikum Wr Wb

Jakarta 18 Mei 1991

Menteri Pertanian



Ir. Wardoyo



62





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PERTANIAN
KEPADA DAERAH *)

B A B I
Pendahuluan

Tugas Pokok Departemen Pertanian adalah melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintahan dan tugas pembangunan bidang pertanian dalam arti luas yang meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan perkebunan.

Lingkup sasaran tugas Departemen Pertanian adalah seluruh petani-nelayan termasuk pula pengusaha yang bergerak dibidang pertanian, yang tersebar di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Tugas Departemen Pertanian adalah bersifat pembinaan terhadap petani-nelayan serta pengusaha pertanian, sedangkan pelaku kegiatan adalah petani-nelayan serta pengusaha pertanian itu sendiri.

Tugas Departemen Pertanian selaras dengan tugas Menteri Pertanian sebagai pembantu Presiden, adalah melakukan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pertanian.

*) *Ceramah Menteri Pertanian dalam forum Penataran Sistem dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.*



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Departemen Pertanian akan selalu berorientasi pada :

- a) pencapaian tujuan negara sebagaimana dituangkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945;
- b) arah pembangunan pertanian sebagaimana yang dicantumkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, yaitu pertanian yang maju, efisien dan tangguh;
- c) pencapaian tujuan dari pembangunan pertanian itu sendiri yaitu peningkatan hasil dan mutu produksi pertanian meningkatkan taraf hidup petani-nelayan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menunjang pembangunan industri serta meningkatkan ekspor hasil pertanian, dengan tetap mempertahankan kelestarian sumberdaya alam.

Sesuai dengan tugas-tugas Departemen Pertanian sebagaimana tersebut diatas, dan sesuai pula dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka sebagai pelaksanaan asas desentralisasi, telah diserahkan sebagian urusan dibidang pertanian kepada daerah sebagai urusan otonomi, bahkan untuk urusan tertentu penyerahannya sudah sampai ke Dati II.

Penyerahan sebagian urusan dibidang pertanian dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk peraturan, terutama didalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penyerahan sebagian urusan dibidang pertanian kepada Daerah, yang kebanyakan dilakukan pada sekitar tahun 1951. Ketentuan penyerahan sebagian urusan dibidang pertanian kepada daerah tersebut pada saat sekarang ditinjau dari segi kemajuan dan perkembangan keadaan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan.



Prinsip-prinsip dan asas yang menjadi dasar di dalam penyerahan sebagian urusan dibidang pertanian kepada daerah yang dikembangkan pada saat itu juga tidak sesuai lagi dengan asas dan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, terutama prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dan prinsip titik berat otonomi pada Dati II.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas Departemen Pertanian pada saat sekarang sedang menata kembali pengaturan penyerahan sebagian urusan Pemerintah kepada Daerah di bidang pertanian, ke arah tercapainya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas-tugas di bidang pertanian dengan tetap mendasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.



B A B II

Kondisi Pada Saat Sekarang

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dikenal adanya 3 asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (medebewind).

Ketiga asas tersebut diatas mewarnai pula di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas-tugas di bidang pertanian di Indonesia, walaupun dalam pelaksanaannya hal-hal yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan yang telah ada, tidak selalu sama dengan kenyataan di lapangan.

Sebagai gambaran secara kongkrit akan kami ungkapkan kondisi pelaksanaan ke tiga asas tersebut diatas secara satu-persatu dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas di bidang Pertanian di Indonesia selama ini.

A. Pelaksanaan Asas Desentralisasi.

1. Pengertian Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah, menjadi urusan rumah tangganya.

Pelaksanaan asas desentralisasi ini apabila dikaitkan dengan pelaksanaan tugas-tugas di bidang pertanian di Indonesia, ternyata sebagian dari urusan pertanian tersebut telah diserahkan kepada Daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya.



Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan di bidang pertanian kepada Daerah sebagai pelaksanaan asas desentralisasi, sebagian besar dilakukan pada sekitar tahun 1951, namun untuk beberapa hal baru dilakukan setelah itu. Prinsip yang digunakan pada saat itu adalah sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Undang-undang yang mengatur pemerintahan di Daerah pada saat itu, yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, yaitu prinsip otonomi yang riil dan seluas-luasnya.

2. Cara Pengaturan Penyerahan :

Cara penyerahan sebagian urusan dibidang pertanian dituangkan di dalam berbagai bentuk peraturan, yaitu sebagai berikut :

- a. Penyerahan sebagian urusan di bidang pertanian kepada Daerah, dicantumkan di dalam Undang-undang pembentukan Daerah yang bersangkutan, yang sering disebut dengan pemberian kewenangan pangkal. Didalam Undang-undang pembentukan Daerah yang bersangkutan kadangkala menyebutkan bahwa kepada Daerah yang bersangkutan, diserahkan urusan-urusan dengan cara memberlakukan secara mutatis mutandis Peraturan Pemerintah yang mengatur penyerahan sebagian urusan kepada daerah yang telah ada sebelumnya. Misalnya dalam Undang-undang Pembentukan Propinsi/Dati I Sumatera Barat, Jambi, Riau, memberlakukan secara mutatis mutandis Peraturan Pemerintah penyerahan urusan dibidang pertanian untuk Propinsi/Dati I (eks) Sumatera Tengah.



Ada pula yang dalam Undang-undang pembentukan Daerah tersebut telah dicantumkan secara rinci berbagai urusan yang diserahkan kepada Daerah yang bersangkutan, misalnya dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

b. Penyerahan sebagian urusan di bidang pertanian kepada Daerah dilakukan/diatur dalam Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur pelaksanaan penyerahan sebagian urusan dibidang pertanian kepada Daerah Tingkat I. Dalam peraturan penyerahan sebagian urusan dibidang pertanian dalam bentuk ini, dilakukan dengan beberapa pendekatan, sebagai berikut :

1). Satu Peraturan Pemerintah, khusus mengatur penyerahan sebagian urusan dari Sub Sektor (pertanian pangan/peternakan/perikanan/perkebunan) kepada satu Propinsi/Dati I, misalnya :

a). PP 29 Tahun 1951, mengatur penyerahan sebagian urusan Pertanian Rakyat (pangan/perkebunan), kepada Dati I Jawa Barat;

b). PP 30 Tahun 1951, mengatur penyerahan sebagian urusan Kehewanian kepada Dati I Jawa Barat;

c). PP 31 Tahun 1951, mengatur penyerahan sebagian urusan perikanan darat kepada Dati I Jawa Barat.



2). Satu Peraturan Pemerintah mengatur penyerahan sebagian urusan dari beberapa Sub Sektor (pertanian rakyat, peternakan, perikanan dan perkebunan) kepada satu Dati I tertentu, misalnya :

a). PP 48 Tahun 1958, mengatur penyerahan sebagian urusan pertanian rakyat, kehewananan dan perikanan darat kepada Dati I DKI.

b). PP 5 Tahun 1973, mengatur penyerahan sebagian urusan pertanian rakyat, kehewananan dan perikanan darat kepada Dati I Irian Jaya;

c). PP 19 Tahun 1976, mengatur penyerahan sebagian urusan pertanian rakyat, kehewananan dan perikanan darat kepada Dati I Timor-Timur.

3). Satu Peraturan Pemerintah mengatur penyerahan sebagian urusan suatu sub sektor kepada semua Dati I, misalnya :

PP 22 Tahun 1975, mengatur penyerahan sebagian urusan Perkebunan Besar kepada Dati I.

4). Satu Peraturan Pemerintah mengatur penyerahan sebagian urusan dari beberapa sub sektor, untuk semua Dati I, misalnya :



PP 64 Tahun 1957, mengatur penyerahan sebagian urusan perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat kepada Dati I;

Sebagai akibat dari cara pengaturan seperti tersebut di atas pada saat sekarang jumlah PP yang mengatur tentang penyerahan sebagian urusan Pusat kepada Daerah ± ada 24 PP, seperti tersebut dalam Lampiran 1.

c. Penyerahan sebagian dari suatu urusan di bidang pertanian dilakukan dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur suatu substansi tertentu, atau dalam Keputusan Menteri, misalnya :

- 1). Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan, menyerahkan kewenangan pemberian Ijin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat penangkapan Ikan (SPI) dengan kriteria tertentu kepada Dati I.
- 2). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971, menyerahkan kewenangan pemberian ijin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras dengan kriteria tertentu kepada Dati II.
- 3). Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/-TN.240/9/1986, dan Nomor 557/Kpts/TN.520/9/1987 menyerahkan sebagian urusan pemotongan hewan dan unggas dengan skala tertentu kepada Dati I dan Dati II.



3. Materi Urusan Yang Diserahkan :

Dengan berbagai bentuk peraturan terutama di dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur penyerahan sebagian urusan di bidang pertanian kepada Daerah, maka urusan untuk masing-masing sub sektor yang diserahkan kepada Daerah secara rinci adalah seperti tersebut dalam lampiran 2.a., 2.b., 2.c. dan 2.d.

4. Penyerahan Sebagian Urusan Di Bidang Pertanian Kepada Dati II :

Penyerahan sebagian urusan di bidang Pertanian (pertanian rakyat, perikanan, peternakan dan perkebunan) kepada Dati II dilakukan secara bertingkat, dalam arti Pemerintah menyerahkan sebagian urusan kepada Dati I, dan dari sebagian urusan yang telah diserahkan kepada Dati I tersebut, Dati I dengan Perda menyerahkan lebih lanjut kepada Dati II. Namun dalam kenyataannya belum semua Dati I pada saat sekarang telah menyerahkan sebagian dari urusan di bidang pertanian (sub sektor tertentu) kepada Dati II, pada umumnya dengan alasan Dati II yang bersangkutan belum mampu. Kriteria untuk menentukan kemampuan suatu Daerah secara baku belum ada, sehingga akibatnya dapat terjadi bahwa Dati II dalam suatu Dati I yang secara obyektif lebih mampu dibandingkan dengan Dati II dalam suatu Dati I yang lain, belum mendapatkan penyerahan sebagian urusan bidang pertanian dari Dati I atasannya, sedangkan Dati II yang tersebut dibelakang sudah mendapat penyerahan sebagian urusan di bidang pertanian dari Dati I atasannya.



Sebagai konsekuensi dari telah diserahkannya sebagian urusan bidang pertanian (sub sektor tertentu) kepada Dati II oleh Dati I atasannya, maka dengan Perda Dati II yang bersangkutan membentuk Dinas Daerah Tingkat II.

Bagi Dati II yang belum memperoleh penyerahan sebagian urusan bidang pertanian (sub sektor tertentu), penyelenggaraan urusan dilakukan oleh Cabang Dinas dari Dati I atasannya.

B. Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi.

1. Pengertian Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah (Pusat) atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di Daerah.

2. Pelaksanaan Asas Dekonsentrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas-Tugas Pertanian :

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pertanian dalam wadah negara kesatuan yang memberikan hak otonomi kepada Daerah, maka tepat sekali prinsip yang dianut di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dimana azas desentralisasi dilaksanakan secara bersama-sama dan seimbang dengan pelaksanaan azas dekonsentrasi. Prinsip ini sesuai dan sebagai konsekuensi daripada penerapan prinsip yang lebih mendasar yaitu penyelenggaraan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.



Sehingga dengan pelaksanaan kedua azas tersebut secara bersama dan seimbang, akan lebih mendorong kepada penyelenggaraan otonomi oleh Daerah secara wajar dan terarah sesuai dengan arah kebijaksanaan nasional yaitu pengembangan wawasan nusantara dalam wujud negara kesatuan R.I.

Berbagai tugas dekonsentrasi yang perlu dilaksanakan di tingkat Daerah secara prinsip antara lain meliputi aspek-aspek penyelenggaraan pembinaan teknis terhadap perangkat pertanian di Daerah, menyelaraskan program Pemerintah Pusat dengan program Pemerintah Daerah di bidang pertanian, menterpadukan program-program pertanian lintas sub sektoral maupun sektoral dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya, dan pengendalian tugas-tugas Departemen di Daerah.

Tugas-tugas dekonsentrasi yang berkaitan dengan aspek penyelarasan program Pusat dan Daerah, penterpaduan program lintas sub sektoral dan/atau lintas sektoral serta pengendalian operasional dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Pertanian yang pada saat sekarang sudah dibentuk disemua Propinsi/Dati I.

Sedangkan tugas-tugas dekonsentrasi yang bersifat teknis operasional tertentu dilakukan oleh berbagai Unit Pelaksana Teknis Departemen Pertanian di Daerah yang secara organisatoris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang membawahnya, dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari secara administratif operasional berada di bawah Kantor Wilayah Departemen Pertanian.



C. Pelaksanaan Tugas Pembantuan (Medebewind).

1. Pengertian Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

2. Pelaksanaan Tugas Pembantuan :

Pelaksanaan tugas-tugas di bidang pertanian, selain yang dilaksanakan atas dasar pelaksanaan azas desentralisasi dan dekonsentrasi, maka terdapat beberapa hal yang dilaksanakan berdasarkan tugas pembantuan.

Beberapa contoh tugas pembantuan di bidang Pertanian antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah membantu Pemerintah mengumpulkan angka-angka statistik pertanian.
- b. Pemerintah Daerah membantu pemerintah melakukan pengujian adaptasi teknologi, dalam rangka rekomendasi (release).
- c. Pemerintah Daerah membantu Pemerintah melakukan pengawasan teknis tertentu (Pengawasan Obat Hewan dan lain-lain), yang kewenangannya masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- d. Pemerintah Daerah membantu Pemerintah dalam hal sertifikasi mutu hasil perikanan yang diperdagangkan (ekspor).



e. Pemerintah Daerah melaksanakan secara operasional proyek-proyek Departemen Pertanian (Pusat) di Daerah.

Dasar hukum atas pelaksanaan tugas-tugas pembantuan, ada yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah dan ada yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian.



B A B III

Hasil Yang Dicapai Dengan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Tugas Pertanian Selama Ini

Dalam kurun waktu sejak sekitar Tahun 1951 sampai sekarang (\pm 40 tahun), dimana pengaturan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas-tugas di bidang pertanian diatur secara relatif memadai (walaupun masih atas dasar pola dan prinsip-prinsip lama). Beberapa hal telah dapat dicapai dan dirasakan hasilnya secara kongkrit dan positif, antara lain :

1. Berbagai urusan tertentu walaupun rumusnya sudah tidak memadai lagi dengan keadaan dan kebutuhan sekarang, telah diserahkan kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga (otonomi), bahkan berbagai urusan sudah diserahkan sampai ke Dati II.
2. Sudah tercipta perangkat aparatur diberbagai tingkat yang merupakan sarana dan/atau jalur dalam pelaksanaan sistem pemerintahan yang berkaitan dengan penyerahan tugas-tugas dibidang pertanian baik dalam kaitan pelaksanaan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yaitu :
 - a. Kantor Wilayah Departemen Pertanian disetiap Propinsi/Dati I;
 - b. Berbagai UPT Departemen Pertanian di Daerah;
 - c. Dinas Tingkat I lingkup Pertanian (Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan);



- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tingkat I, walaupun statusnya sampai sekarang belum disahkan;
 - e. Dinas Tingkat II lingkup Pertanian (Pertanian Pangan, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan);
 - f. Cabang Dinas Tingkat I di Dati II, bagi Dati I yang belum menyerahkan sebagian urusannya ke Dati II;
 - g. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Dati II dengan para penyuluhnya;
 - h. Petugas Pertanian (Mantri-mantri) di tingkat Kecamatan.
3. Sebagai hasil penerapan sistem penyelenggaraan pertaniannya sendiri, telah dapat mengubah sikap mental atau pola pikir petani-nelayan dari pola bertani secara tradisional ke arah pola bertani yang lebih maju dengan menerapkan berbagai inovasi teknologi.
4. Sebagai konsekuensi dari angka 3 tersebut di atas, telah dicapai peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian, bahkan dapat dicapai tingkat keadaan swasembada beras dan semakin meningkatnya ekspor berbagai komoditas hasil pertanian.
5. Secara tidak langsung selaras dengan hasil yang dicapai pada angka 3 dan 4, maka semakin meningkat pula taraf hidup petani-nelayan pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.



B A B IV

Berbagai Masalah Dalam Pelaksanaan

Walaupun ketentuan-ketentuan yang mengatur penyerahan sebagian urusan Pusat kepada Daerah di bidang Pertanian relatif sudah lengkap, namun di dalam pelaksanaannya masih timbul berbagai masalah, sebagai berikut :

1. Dari segi materi dan rumusan :

- a. materi dan rumusan berbagai urusan yang diserahkan kepada Daerah yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan yang ada secara umum sudah tidak sesuai dalam arti tidak dapat mengakomodasikan atau menampung berbagai perkembangan atau kebutuhan pada saat sekarang;
- b. pendekatan yang dilakukan dalam merinci suatu urusan dalam hal-hal tertentu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, misalnya pembagian urusan perikanan laut dan perikanan darat, pada saat sekarang akan lebih relevan apabila dibedakan menjadi urusan penangkapan dan budidaya;
- c. terdapat urusan yang diserahkan kepada Daerah yang dirumuskan dengan bunyi kalimat yang sangat umum (tidak kongkrit/jelas), sehingga menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda. Misalnya kepada Daerah disertai urusan ikut serta memajukan pertanian, peternakan atau perikanan. Rumusan tersebut dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan tarik-tarikan atau tumpang tindih (duplikasi) antara Pusat dengan Daerah.



- d. Dalam menyerahkan sebagian urusan kepada Dati I dan Dati II, belum mendasarkan pada suatu tolok ukur yang menetapkan sifat-sifat urusan yang bagaimana yang harus diserahkan kepada Dati I/Dati II, dan belum mengarah pada titik berat otonomi pada Dati II.
2. Sebagaimana yang dapat kita rasakan bahwa intensitas penyelenggaraan kegiatan pertanian pada saat sekarang tertumpu atau titik beratnya masih berada pada Dati I. Hal ini dapat dicirikan dengan perbandingan kekuatan Dinas Tingkat I dan Tingkat II, besarnya alokasi dana, kualitas dan kuantitas sarana dan personil.
 3. Kekuatan/kemampuan Daerah pada umumnya masih sangat belum memadai dengan urusan otonomi yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh sebab itu kadang-kala walaupun suatu urusan telah diserahkan kepada Daerah, dalam pelaksanaannya masih ditangani oleh Pusat.

Kondisi Dinas Dati II lingkup pertanian, pada saat sekarang pada umumnya masih memprihatinkan ditinjau dari segi prasarana dan sarana yang dimiliki, personil dan keuangannya. Dalam kondisi sekarang, jalannya otonomi di Dati II dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas di bidang pertanian sangat tersendat-sendat, apalagi jika titik berat otonomi benar-benar diletakkan pada Dati II. Oleh karena itu dalam rangka menuju titik berat otonomi berada di Dati II tersebut, perlu dilakukan pembenahan terhadap Dinas Dati II lingkup pertanian secara proporsional.

4. Beberapa Dati I sampai saat sekarang belum menyerahkan sebagian urusan di bidang Pertanian kepada Dati II. Yang dijadikan alasan belum diserahkannya sebagian urusan tersebut, kebanyakan masalah kemampuan Daerah Tingkat II.



Alasan tersebut tidak seluruhnya tepat, mengingat ada Dati II yang secara obyektif cukup mampu (misalnya : Dati II di pulau Jawa) yang sampai sekarang ada yang belum menerima penyerahan urusan dari Dati I. Sebaliknya Dati II di luar pulau Jawa yang relatif kurang mampu dibandingkan dengan Dati II di pulau Jawa justeru sudah menerima penyerahan urusan dari Dati I.

Jadi dalam hal ini Dati I perlu memandang secara obyektif tentang kemampuan Dati II, sehingga pada saatnya urusan tertentu harus secepatnya sudah diserahkan sebagai urusan otonomi kepada Dati II. Contoh Dati I yang sampai saat sekarang belum menyerahkan sebagian urusan di bidang Pertanian kepada Dati II adalah :

- Dati I Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, untuk sub sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan.
- Dati I Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, untuk sub sektor perkebunan.
- Dati I Maluku, untuk sub sektor perikanan.
- Dati I Kalimantan Selatan, untuk semua sub sektor.

5. Sehubungan dengan permasalahan tersebut pada angka 1.c., dan dengan adanya tumpang-tindih penanganan suatu urusan antara Pusat dengan Daerah, maka tidak mustahil apabila di dalam pelaksanaannya urusan (kegiatan) tertentu ditangani dalam arti diprogramkan dan dialokasikan pembiayaannya baik oleh Pusat maupun Daerah secara bersama-sama dalam suatu waktu yang bersamaan. Hal ini jelas tidak efisien.



Langkah-Langkah Yang Perlu Dilakukan

1. Peninjauan Kembali dan Penyempurnaan Peraturan yang ada.

Atas dasar berbagai masalah yang kita hadapi di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas-tugas dibidang pertanian, maka dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan dan perkembangan keadaan, dengan tetap mengacu pada jiwa dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Departemen Pertanian sedang mengadakan langkah-langkah peninjauan kembali dan penyempurnaan Peraturan-Peraturan Pemerintah yang mengatur penyerahan sebagian urusan Pemerintah kepada Daerah.

Pada tahun 1988/1989 Departemen Pertanian telah melakukan pengkajian terhadap Peraturan Pemerintah yang mengatur penyerahan sebagian urusan Pusat kepada Daerah di bidang pertanian dan pelaksanaannya, dalam rangka mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi. Hasil pengkajian dijadikan salah satu bahan didalam menata kembali/menyempurnakan ketentuan tentang penyerahan sebagian urusan Pusat kepada Daerah tersebut.

Pola pemikiran yang dikembangkan didalam menyempurnakan Peraturan Pemerintah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan kesepakatan secara lisan dengan pihak Departemen Dalam Negeri dan Kantor Menpan, maka Departemen Pertanian akan merumuskan pengaturan penyerahan sebagian urusan Pusat kepada Daerah, baik kepada Dati I maupun Dati II secara langsung dalam satu Peraturan Pemerintah.



- b. Didalam menentukan urusan-urusan dibidang pertanian yang akan diserahkan kepada Dati I dan Dati II, terlebih dahulu dipertimbangkan atau diperhitungkan dari berbagai aspek, yang didalam pelaksanaannya nanti diperkirakan dapat lebih menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Disamping hal tersebut pada huruf b, didalam merumuskan substansi Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan mengganti Peraturan Pemerintah yang lama sekaligus telah dipertimbangkan kearah meletakan titik berat otonomi di Dati II, dan dalam rangka mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
- d. Dari segi materi diupayakan adanya suatu rumusan urusan-urusan yang akan diserahkan kepada Daerah secara lebih rinci, konkrit, mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan, sekaligus menghilangkan rumusan yang sifatnya umum, tidak jelas dan dapat menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda.
- e. Oleh karena hanya akan ada satu Peraturan Pemerintah yang mengatur penyerahan sebagian urusan dibidang pertanian baik kepada semua Dati I dan Dati II, maka urusan-urusan yang diserahkan kepada semua Dati I dirumuskan seragam (sama), begitu pula urusan-urusan yang diserahkan kepada Dati II. Sehingga kemampuan masing-masing Dati I dan Dati II pada saat sekarang yang sangat bervariasi tidak terlalu dijadikan kendala, bahkan kemampuan semua Dati I dan Dati II nantinya diasumsikan akan dibuat sama.



Dalam pada itu Departemen Pertanian telah mencoba merumuskan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyerahan Sebagian Urusan di Bidang Pertanian kepada Daerah, yang akan menggantikan Peraturan-peraturan Pemerintah yang lama, dan setelah dimantapkan diberbagai tingkat akan disampaikan kepada Bapak Presiden melalui Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

2. Permasalahan Yang Djumpai Dalam Perumusan.

Didalam perumusan RPP tentang Penyerahan Sebagian Urusan di Bidang Pertanian Kepada Daerah, cukup memakan waktu. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala atau permasalahan yang dijumpai. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah :

- a. Belum adanya atau belum dibakukannya tolok ukur yang dapat dijadikan pegangan secara umum tentang porsi-porsi apa saja yang harus/dapat ditangani oleh Pusat, Dati I dan Dati II terhadap penanganan suatu urusan. Untuk itu dicari berbagai referensi, yang akhirnya dapat ditemukan ukuran-ukuran sementara yang kemudian dijadikan pegangan dalam proses perumusan RPP (seperti tersebut dalam lampiran 3).
- b. Idealnya, Peraturan Pemerintah tentang Tittik Berat Otonomi pada Dati II sebagai pelaksanaan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 seharusnya ada/lahir lebih dahulu. Sehingga dengan demikian ada peraturan yang jelas dan mendasar tentang arah pengaturan kembali penyerahan urusan Pemerintah kepada Daerah.



c. Kemampuan masing-masing Daerah baik Dati I maupun Dati II yang sangat bervariasi sering dimunculkan sebagai masalah, mengingat bahwa urusan yang akan diserahkan kepada semua Dati I dan Dati II adalah seragam atau sama.

Pada akhirnya masalah kemampuan masing-masing Daerah ditinggalkan lebih dahulu, dan lebih dipentingkan pada perumusan sistemnya yang diperkirakan dalam pelaksanaannya akan lebih efektif dan efisien. Sedangkan kemampuan Daerah nanti dibicarakan secara tersendiri, dan harus dibuat mampu.

d. Dari berbagai Undang-undang yang mengatur tentang Pembentukan Daerah, terutama pembentukan Dati I, telah mencantumkan urusan-urusan yang diserahkan kepada Daerah. Ada yang mencantumkan secara rinci seperti halnya yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah, ada yang penetapannya dengan klausula memberlakukan secara mutatis mutandis Peraturan Pemerintah yang berlaku untuk Daerah lain. Pertanyaannya adalah apakah ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tersebut nantinya akan dapat dicabut oleh ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang akan dikeluarkan. Kalau tidak dapat, berarti untuk Daerah tertentu Peraturan Pemerintah yang baru nanti tidak akan dapat berlaku secara efektif. Contoh Undang-undang yang mengatur demikian adalah :

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 jo Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Dati I Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Selatan dan Timur;

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 jo Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Dati I Lampung dan Bengkulu.

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dati I Aceh.



B A B VI

Langkah-langkah Lain Yang Perlu Dilakukan

Untuk mewujudkan kemauan politik nasional yang dasarnya telah dicanangkan didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, maka dalam rangka menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, disamping pembaharuan sistem penyerahan urusannya juga perlu diikuti secara serentak atau simultan dari peyempurnaan sistem lainnya yang terkait. Tanpa diikuti dengan langkah-langkah yang lain tersebut, pembaharuan sistem penyerahan urusan kepada Daerah tersebut akan tidak ada artinya, bahkan dapat menimbulkan permasalahan baru.

Langkah-langkah lain yang perlu dilakukan menurut hemat saya adalah sebagai berikut :

1. Untuk menunjang pelaksanaan sistem penyerahan urusan Pemerintah kepada Daerah (yang baru), yang mengarah pada realisasi titik berat otonomi pada Dati II dan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan adanya tekad, arah, pola dan keterpaduan dalam pembinaan kemampuan Daerah, oleh atau dari berbagai instansi yang terkait.
2. Peraturan atau Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah nampaknya sudah tidak dapat ditawar lagi dan harus segera dikeluarkan.
3. Perlu memberikan kemungkinan peluang yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan/menggali sumber-sumber pendapatan Daerah.



4. Sebelum peraturan yang mengatur tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dapat diwujudkan, perlu adanya ketentuan tentang pedoman pengalokasian dana yang semula berada di Pusat dan atau Dati I dialihkan kepada Dati II untuk melaksanakan urusan rumah tangganya.
5. Bagi suatu Daerah yang tidak memungkinkan lagi dipertahankan sebagai Daerah otonomi karena sulit untuk dikembangkan, sebaiknya dipikirkan untuk digabungkan dengan Daerah lain.
6. Diadakan pengaturan lebih lanjut secara nasional dan lebih rinci tentang hal-yang menyangkut aspek kepegawaian, prasarana dan sarana serta pembiayaan, kearah pengembangan pola/standar dan pembakuan yang lebih mantap, selaras dengan atau sebagai konsekuensi dari isi Peraturan Pemerintah yang mengatur penyerahan sebagian urusan di bidang pertanian kepada Daerah, yang baru.
7. Perlu adanya pengaturan pola pengembangan institusi atau perangkat aparatur kelembagaan yang dapat menunjang penyelenggaraan sistim pemerintahan yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas-tugas dibidang pertanian secara proposional, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan azas desentralisasi maupun dekonsentrasi.



B A B V I I
P e n u t u p

Sebagai penutup dari berbagai hal yang kami kemukakan diatas, maka perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Terhadap berbagai urusan di bidang pertanian yang akan diserahkan kepada Daerah, dalam rangka pengembangan wawasan nusantara dalam negara kesatuan Republik Indonesia, aspek-aspek tertentu misalnya yang menyangkut kebijaksanaan nasional, bimbingan teknik dan pengendalian/pengawasan serta pemberian perijinan dan hal-hal lain yang bersifat langsung operasional tertentu, yang sifatnya sangat strategis tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Perlu dikembangkan suatu persepsi yang sama bahwa semua Departemen dan Lembaga non Departemen di tingkat Pusat, mempunyai kedudukan yang sama/sejajar dalam mengadakan hubungan secara timbal balik dengan Pemerintah Daerah, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
3. Mudah-mudahan langkah-langkah penyempurnaan Peraturan Pemerintah tentang Penyerahan Sebagian Urusan Di Bidang Pertanian kepada Daerah yang dilakukan oleh Departemen Pertanian ini atas bantuan dan dukungan semua pihak, segera dapat diselesaikan.
4. Kami harapkan langkah yang ditempuh oleh Departemen Pertanian ini akan merupakan sub sistem yang sejalan dan selaras dengan rangkaian satu kesatuan sistem secara nasional dan tidak bertentangan dengan arah kebijaksanaan dari aspek-aspek yang lain.



5. Dengan pola penyerahan sebagian urusan di bidang pertanian kepada Daerah yang baru nanti, diharapkan akan dapat lebih cepat memacu perkembangan dan atau kemajuan di bidang pertanian melalui terobosan-terobosan/lompatan tertentu, karena intensitas penyelenggaraan tugas-tugas pertanian sudah didekatkan pada masyarakat (petani-nelayan) yaitu di Dati II. Dengan demikian diharapkan sektor pertanian akan dapat lebih memberikan sumbangan terhadap pembangunan bangsa dan negara dibandingkan dengan sumbangan yang dapat diberikan pada waktu-waktu sebelumnya.

Jakarta, Mei 1991

Menteri Pertanian,

" Ir. Wardoyo



63



64





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PIDATO PENGARAHAN MENTERI PERTANIAN RI
PADA PEMBUKAAN KONVENSI KE-1 GKM
GRUP CHAROEN POKPHAND INDONESIA DI JAKARTA
TANGGAL 18 MEI 1991

Assalamu'alaikum Warohkmatullahi Wabarakatuh,

Saudara-saudara pimpinan Grup Charoen Pokphand Indonesia yang kami hormati,
Para peserta Konvensi Gugus Kendali Mutu serta hadirin yang berbahagia,

Terlebih dahulu perkenankan kami mengajak hadirin sekalian untuk sejenak memanjatkan puji syukur dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan rachmat-Nya kita semua diberikan berkah untuk berkumpul pada pagi ini. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian program peningkatan produktivitas dan efisiensi nasional, yaitu penerapan Pengendalian Mutu Terpadu (PMT) dengan Gugus Kendali Mutu (GKM). Bagi Grup Charoen Pokphand, pada hari ini pula penerapan PMT/GKM akan merupakan suatu momentum yang mempunyai nilai tersendiri, karena Saudara-saudara akan menyelenggarakan suatu Konvensi.

Saudara-saudara Yang Kami Hormati,

Pertemuan atau Konvensi semacam ini, khususnya pula bagi Grup Charoen Pokphand yang untuk pertama kalinya diselenggarakan, kami nilai penting karena suatu Konvensi tingkat manajemen dari suatu kelembagaan secara formal merupakan pengakuan resmi dari pucuk pimpinannya akan adanya suatu sistem PMT/GKM di lingkungan



seminar ini saya menyampaikan penghargaan atasnya. Mudah-mudahan seminar ini dapat dijadikan langkah awal bagi Ikatan Alumni SPP DKI untuk lebih berperan serta dalam menggugah sesama alumni SPP umumnya, dan juga para calon alumni, yang saat ini masih menimba ilmu di SPP masing-masing, untuk lebih meyakini akan besarnya peluang berusaha mandiri sebagai wiraswastawan.

Saudara-saudara yang terhormat,

Dalam Pembangunan Nasional Jangka Panjang, sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya struktur ekonomi yang seimbang. Dalam struktur yang demikian sektor pertanian diharapkan masih mampu berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi, disamping sebagai penyedia pangan bagi rakyat, penghasil komoditi non migas dan bahan baku industri, serta sebagai sumber mata pencaharian pokok maupun penyedia lapangan kerja.

Sebagai penyedia lapangan kerja, dalam era menjelang tinggal landas ini, sektor pertanian diharapkan mampu menampung hampir 35 % dari 11,9 juta angkatan kerja baru atau sekitar 4,05 juta. Berarti setiap tahun selama Pelita V harus tersedia kesempatan kerja bagi 810 ribu orang, termasuk didalamnya para lulusan SPP yang berjumlah lebih dari 10 ribu orang.

Sasaran sumber lapangan kerja di sektor pertanian pada Pelita V terbanyak pada sub sektor Pertanian Tanaman Pangan (40,60 %), kemudian pada sub sektor Perkebunan (35,26%), sub sektor Perikanan (12,60%), dan yang terkecil adalah sub sektor Perternakan (11,40%). Sudah barang tentu kesempatan kerja tersebut bukan dilingkungan pemerintahan, tetapi terbuka pada



usaha-usaha swasta, usaha koperasi dan usaha mandiri.

Saudara-saudara yang terhormat,

Oleh karena penyerapan angkatan kerja yang menjadi tanggung jawab sektor Pertanian berada pada kegiatan usaha-usaha swasta, koperasi dan mandiri, maka dalam kesempatan ini saya mengajak saudara-saudara yang hadir khususnya para pengusaha dan calon-calon pengusaha untuk bersama-sama memikirkan dan mengupayakan terciptanya peluang-peluang usaha baru di sektor pertanian. Seminar ini hendaknya dapat pula digunakan sebagai ajang timbulnya kesepakatan-kesepakatan diantara para penghasil angkatan kerja yaitu, SPP, dan para pemakai tenaga kerja, yaitu para pengusaha.

Seperti diketahui bersama kesempatan kerja di pemerintahan semakin sempit. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah melancarkan berbagai program kemudahan dalam berusaha. Departemen Pertanian bahkan mendorong setiap upaya terciptanya lapangan kerja di sektor swasta baik yang bersifat formal maupun informal. Kegiatan Agrobisnis untuk berbagai komoditas pertanian akan terus dikembangkan, terutama kegiatan yang bersifat agroindustri yang memberikan nilai tambah pada setiap komoditas yang ditangani.

Saudara-saudara yang terhormat,

Apabila dikaitkan dengan nilai tambah, agroindustri



merupakan kelompok industri yang cukup dominan dalam sektor industri. Dari segi penyerapan tenaga kerja, kegiatan agroindustri juga memberikan peluang yang relatif tinggi yaitu sekitar 36 % seluruh tenaga kerja yang diserap sektor industri. Kegiatan agro industri dapat dilakukan secara skala besar maupun pada tingkat skala rumah tangga. Bahkan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan yang berimbang. Dengan berkembangnya agroindustri di pedesaan, diharapkan masyarakat pedesaan dapat :

1. meningkatkan nilai tambah hasil-hasil pertaniannya,
2. meningkatkan pemasaran produksi pertanian,
3. menciptakan lapangan kerja baru,
4. meningkatkan penghasilannya.

Pemerintah juga telah memikirkan langkah-langkah maju untuk pengembangan agrobisnis dan agroindustri. Deregulasi di bidang pertanian memungkinkan petani dan pengusaha tani mempunyai kesempatan yang lebih luas dalam mengembangkan komoditas yang lebih menguntungkan.

Strategi Pemerintah dalam pengembangan agroindustri selalu terkait dengan tujuan pembangunan wilayah pedesaan dalam arti luas. Faktor landasan untuk itu adalah :

1. memperhatikan keunggulan komparatif,
2. menggunakan tingkat teknologi yang sesuai dengan ketrampilan masyarakat serta lingkungan setempat,
3. ketersediaan bahan baku yang berkesinambungan,
4. terciptanya perangkat institusi atau kelembagaan yang mendorong iklim kegiatan agrobisnis.



peningkatan prestasi kerja sekaligus menciptakan suasana kerja yang aman, nyaman, tertib, bersemangat, berprestasi, produktif, efisien dan manusiawi.

Penerapan sistem PMT/GKM memang tidak bisa serta merta sekali jadi. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dan diselesaikan, karena sebagaimana kami kemukakan di atas sistem PMT/GKM memerlukan perubahan sikap dan perilaku manajemen. Sikap dan perilaku lama terkadang sulit untuk diubah, dan yang tersulit di antaranya adalah mengubah pola pikir para pimpinan untuk dapat bersikap dan berperilaku demokratis, tidak otoriter, terbuka, persuasif dan komunikatif.

Secara umum tahapan-tahapan itu berawal dari tahap pengenalan kepada pimpinan; tahap orientasi, tahap pengorganisasian, tahap penerapan, tahap penguasaan dan berakhir dengan tahap pelestarian. Waktu yang dibutuhkan untuk setiap pentahapan dapat cepat, dapat pula lambat dan semua itu tergantung kepada kesepakatan posoitif dan keterlibatan langsung para pimpinan yang terpadu dengan semangat dan aktivitas seluruh karyawan.

Pada hari ini Grup Charoen Pokphand telah menyelenggarakan Konvensi yang pertama kalinya. Ini berarti bahwa Grup Charoen Pokphand sedang menginjak pada tahapan penguasaan. Berarti pula bahwa tahap pengenalan, tahap orientasi dan tahap penerapan sudah Saudara-saudara jalani dengan baik. Dengan Konvensi inipun, kami menilai bahwa sikap dan perilaku manajemen para pimpinan Grup Charoen Pokphand sudah berubah menjadi kebersamaan dalam keterbukaan, tidak otoriter, persuasif dan komunikatif. Sebaliknya, di semua lapisan karyawan, mudah-mudahan sudah tercipta suasana kerja yang nyaman, terbuka, gotong royong, tahu akan hak dan kewajiban, disiplin dan patuh akan tugas tetapi kritis dan teliti dalam pelaksanaannya, serta berdinamika dalam memecahkan masalah dengan senantiasa memelihara komunikasi timbal baik dengan pimpinannya.



Saudara-saudara Yang Kami Hormati,

Dalam kesempatan yang sebaik dan sebahagia hari ini beserta Saudara-saudara, pada acara Konvensi GKM Saudara yang ke-1 seluruh Indonesia yang juga pada hari jadi Grup Charoen Pokphand yang ke-20, perkenankan pula kami mengemukakan hal lainnya yang kami nilai sangat penting.

Sebagaimana kita semua maklum, perekonomian bangsa Indonesia diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Dalam Bab Penjelasan dari Pasal 33 tersebut dikemukakan tentang pokok-pokok pikiran Demokrasi Ekonomi. Karena hal tersebut merupakan amanat Konstitusi maka ketiga pelaku ekonomi bangsa Indonesia yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Swasta dan Koperasi hendaknya secara betul-betul dapat memegang peranannya masing-masing.

BUMN merupakan unsur dari kelembagaan pemerintahan yang tunduk kepada peraturan di bidang tata pemerintahan yang berkaitan dengan penguasaan dan pengurusan kekayaan negara yang dilimpahkan kepadanya untuk pembangunan perekonomian. BUMN juga berperan sebagai perintis dalam rangka melengkapi kegiatan sektor Swasta dan sektor Koperasi.

Badan-badan usaha milik Swasta merupakan unsur kelembagaan perorangan atau badan hukum milik Swasta yang tunduk kepada peraturan di bidang tata hukum perusahaan swasta dalam penguasaan dan pengaturan kekayaannya untuk perekonomian.

Koperasi adalah sarana untuk menghimpun sebagian terbesar rakyat yang kecil-kecil baik kekuatan modalnya maupun manajemennya dalam suatu wadah usaha perekonomian. Karena sebagian terbesar rakyat Indonesia masih dalam keadaan yang sedemikian lemah dan 60% penduduk tinggal di desa-desa yang jumlahnya 67.000 desa dengan segala masalah dan konsekuensinya dalam urbanisasi, maka sudah sewajarnya Koperasi sebagai wadah perekonomian rakyat ini harus dibangun. Membangun koperasi bertujuan agar mereka yang kecil-kecil dan mereka yang di desa-desa dapat mengatur perekonomiannya sendiri, menjadi kuat dan memegang peranan yang



sama dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya yaitu BUMN dan Swasta. Apabila kedudukan Koperasi diarahkan agar sama dengan BUMN dan Swasta sebagai pelaku ekonomi bangsa, ini bukanlah diukur dari besar kecilnya modal usaha namun dari kedudukan dan fungsinya. Fungsi Koperasi, fungsi Swasta maupun fungsi BUMN adalah sama pentingnya sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi.

BUMN maupun Swasta dalam mengembangkan dirinya telah diberi kesempatan untuk berusaha sehingga memiliki dan menguasai serta mengelola perusahaan/industri yang besar yang besar pula modalnya dalam menghasilkan jasa dan barang-barang baik memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Dari hal ini nampak betapa pentingnya fungsi BUMN dan Swasta dalam pembangunan perekonomian. Namun sebaliknya Koperasi juga mempunyai fungsi yang sama pentingnya karena ia merupakan wadah berhimpunnya kekuatan ekonomi dari masyarakat yang kecil-kecil itu tadi yaitu masyarakat karyawan di kota-kota dan masyarakat di pedesaan.

Karenanya pula sudah menjadi kebijaksanaan Mandataris MPR bahwa ketiga pelaku ekonomi tersebut tugas dan fungsinya masing-masing ditingkatkan dan harus saling mengisi dalam menghidupkan prinsip demokrasi ekonomi berdasarkan atas asas usaha bersama dan kekeluargaan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945.

Dengan penjelasan tadi, ingin saya sampaikan himbauan kami kepada Saudara-saudara sekalian, yaitu apabila nanti Grup Charoen Pokphand melepaskan sahamnya hendaknya Koperasi Karyawan diberikan kesempatan untuk ikut memiliki saham perusahaan. Bahkan lebih jauh dari itu agar Koperasi Unit Desa (KUD) juga memperoleh kesempatan yang serupa. Dengan ikut sertanya Koperasi ini memiliki saham perusahaan berarti Saudara-saudara telah membantu meningkatkan kemampuan dan ketahanan Koperasi agar eksistensinya sebagai rekan pelaku ekonomi dapat tumbuh. Tumbuh dan mampunya BUMN, Swasta dan Koperasi merupakan bagian dari ketahanan nasional bangsa dan cita-cita kita bersama yang senantiasa kita dambakan.



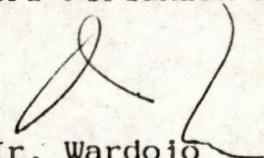
Saudara-saudara Yang Kami Hormati,

Demikian pengarahan dan himbauan kami dalam menyambut baik diselenggarakannya Konvensi oleh Saudara-saudara. Saya berharap agar langkah yang telah diambil oleh Grup Charoen Pokphand ini dapat diikuti dan dikembangkan oleh perusahaan di sektor pertanian lainnya termasuk mengikutsertakan koperasi karyawan dan KUD dalam pemilikan saham.

Selamat berkonvensi. Kami harapkan semoga Konvensi ke-1 ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Saudara-saudara. Semoga pula Konvensi ke-1 ini akan berlanjut dengan Konvensi berikutnya di tahun-tahun yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warohkmatullahi Wabarokatuh.

Menteri Pertanian RI,



Ir. Wardoyo



65





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL
JAKARTA, 20 MEI 1991

Saudara Menteri Muda Pertanian yang saya hormati,
Saudara-saudara pejabat Eselon I lingkup Dep. Pertanian serta
para karyawan-karyawati Departemen Pertanian yang terhormat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Karunia-Nya,
sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat
untuk bersama-sama mengikuti upacara peringatan Hari
Kebangkitan Nasional.

Tepat pada hari ini, tanggal 20 Mei delapan puluh tiga
tahun yang lalu, DR. Wahidin Soediro Hoesodo dan DR. Soetomo
telah merintis babak baru sejarah perjuangan bangsa Indonesia
dengan memprakasai dan membentuk suatu gerakan yang diberi
nama "Boedi Oetomo".

Gerakan yang dibentuk oleh tokoh-tokoh pemuda pada masa
itu merupakan strategi baru perjuangan melawan penjajah
Belanda, sebagai peningkatan dan kesinambungan perjuangan
melawan penjajah yang dilakukan oleh pejuang-pejuang
terdahulu, seperti Teuku Umar, Hasanuddin, Tuanku Imam
Bondjol, Pangeran Diponegoro, Pattimura dan para pejuang
pahlawan bangsa Indonesia lainnya yang relatif belum
bersekala nasional dan masih cenderung bersifat kedaerahan.
Dengan lahirnya gerakan Boedi Oetomo pada tahun 1908, bangsa
Indonesia telah memasuki suatu zaman baru, yaitu zaman
pergerakan kemerdekaan yang bersifat modern dan nasional. Ini
adalah suatu bukti bahwa generasi muda pada masa itu telah
menyadari dan menghayati betapa pentingnya semangat persatuan
dan kesatuan nasional untuk mencapai kemerdekaan, dan apabila
kita kaji secara seksama, maka organisasi tersebut mulai
menanamkan semangat kebangsaan dan cita-cita kemerdekaan.

Saudara-saudara sekalian,

Persatuan dan kesatuan bangsa adalah kunci keberhasilan
perjuangan dalam memerangi kebodohan, kemiskinan dan
keterbelakangan rakyat Indonesia. Selain dari pada itu
sekaligus merupakan jawaban bahwa dengan pemupukan seluruh



kekuatan lahir bathin bisa menghasilkan suatu gerakan yang mampu mendobrak berbagai penghalang cita-cita perjuangan dan tradisi yang kurang menguntungkan bagi kepentingan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.

Penggalangan semangat persatuan dan kesatuan nasional secara estafet terus berkembang seiring dengan derap, langkah dan pemikiran rakyat Indonesia. Proses pendewasaan organisasi "BOEDI OETOMO" turut melahirkan tokoh-tokoh pergerakan Sumpah Pemuda dan pergerakan lain yang non-kooperatif dengan pihak penjajah. Puncak dari pergerakan tersebut tercermin dari keberhasilan bangsa Indonesia merebut dan memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.

Proklamasi kemerdekaan telah menetapkan secara de facto dan de jure eksistensi Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Etos perjuanganpun dengan sendirinya bergeser menjadi upaya yang berkesinambungan mengisi kemerdekaan sebagaimana diisyaratkan dalam pembukaan UUD 1945 dengan berbagai kegiatan pembangunan baik mental spiritual maupun fisik material melalui tahapan Pelita demi Pelita. Tekad tersebut harus senantiasa dibarengi dengan jiwa dan semangat yang mengarah kepada berbagai kesepakatan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Saudara-saudara sekalian,

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia banyak hal-hal yang telah berhasil kita capai, disamping kitapun mencatat pula pengalaman pasang surutnya perjuangan bangsa kita. Dengan segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita telah berhasil mempertahankan kemerdekaan, persatuan dan kedaulatan terhadap rong-rongan penjajah. Juga terhadap gerakan ekstrim kiri dan kanan yang telah mencoba merusak semangat persatuan dan kesatuan serta integrasi nasional dengan cara menghidupkan kembali sentimen-sentimen kedaerahan, keagamaan, dan ideologi asing yang telah dapat kita atasi dan kita patahkan. Bangsa dan Negara Indonesia tetap tegak berdiri, bersatu dan berdaulat, baik di masa kini maupun di masa mendatang.

Gerakan "Boedi Oetomo" lahir lebih dari delapan dasawarsa yang lalu, akan tetapi semangat Kebangkitan Nasional masih tetap berkobar di hati sanubari setiap manusia Indonesia. Semangat Kebangkitan ini juga kami yakin akan tetap berkobar pada waktu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan Jangka Panjang 25 tahun tahap kedua yang dimulai pada Pelita VI yang akan datang untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sejak awal pemerintahan Orde Baru kita telah menetapkan kebijaksanaan pembangunan nasional jangka panjang I. Melalui program Pelita I sampai dengan Pelita V yang kemudian akan dilanjutkan dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun tahap



II nanti, bangsa Indonesia akan memasuki era proses tinggal landas yang oleh Bapak Presiden Soeharto telah disebutkan sebagai momentum Kebangkitan Nasional II.

Saudara-saudara sekalian,

Dalam Repelita V digariskan bahwa sasaran pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah rata-rata sebesar 5 persen pertahun. Sasaran tersebut antara lain diharapkan sektor pertanian dapat tumbuh dengan laju 3,6 persen per tahun dan sektor industri ditingkatkan menjadi 8,5 persen pertahun. Walaupun sasaran pertumbuhannya hanya 3,6 persen, sektor pertanian masih tetap strategis dan menempati prioritas utama dalam pembangunan perekonomian karena secara langsung menyangkut kesejahteraan sebagian besar penduduk kita (51 persen). Keberhasilan pembangunan di sektor pertanian di Indonesia akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

Kerja keras yang kita lakukan sejak Pelita I sampai pertengahan Pelita V ini, telah memberikan hasil yang banyak dan nyata. Khusus untuk tahun 1991/1992 ini kita lakukan program penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan produktivitas sumber daya pertanian melalui investasi di sektor pertanian dan yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kegiatan penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan produktivitas sumberdaya pertanian melalui investasi di sektor pertanian dan yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin di kecamatan miskin, di kabupaten miskin untuk berbagai potensi sumberdaya pertanian.

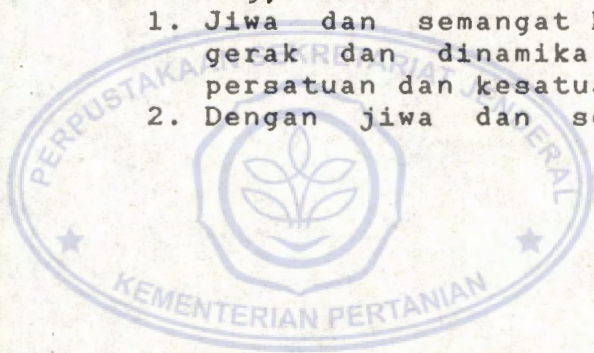
Dengan upaya terobosan tersebut, diharapkan mereka yang masih belum beruntung sampai saat ini sejumlah +30 juta orang itu dapat dinaikkan tarap hidupnya secara bertahap dan berkesinambungan.

Saudara-saudara sekalian,

Pembangunan nasional memerlukan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas agar dapat memelihara dan meningkatkan produktivitas nasional. Oleh sebab itu hendaknya jiwa dan semangat Kebangkitan Nasional dapat mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia di berbagai sektor, baik pemerintah, swasta maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.

Dalam rangka mengaktualisasikan semangat Kebangkitan Nasional, dan menyongsong era tinggal landas yang akan datang, marilah kita sama-sama kembangkan, agar :

1. Jiwa dan semangat Kebangkitan Nasional dapat mendorong gerak dan dinamika pembangunan, sekaligus meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Dengan jiwa dan semangat Kebangkitan Nasional, kita



mempertebal rasa kesetikawanan sosial dan memotivasikan prakarsa dan kreativitas masyarakat, khususnya generasi muda.

Dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional, marilah kita tingkatkan disiplin dan pengabdian terhadap bangsa dan negara, antara lain dengan mengembangkan kemampuan diri kita masing-masing agar dapat lebih produktif, terampil, dan mampu meningkatkan profesionalisme untuk mewujudkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya.

Di sektor pertanian, peningkatan mutu akan kita lakukan sedemikian rupa sehingga akan terwujud petani yang maju, efisien dan tangguh. Para petani yang subsisten akan kita tingkatkan mutunya menjadi petani yang berwawasan pasar dan industri. Upaya ini akan ditempuh melalui sistem pendidikan di pedesaan, pengembangan usaha bersama, pengembangan industri pedesaan yang mengelola produk usaha tani dan mendorong tumbuh dan berkembangnya industri kecil dan rumah tangga pedesaan.

Dalam kaitan ini penyuluhan dititik beratkan pada penyaluran berbagai informasi seperti informasi pasar, sarana produksi, informasi teknologi, dan informasi terkait lainnya.

Saudara-saudara sekalian,

Demikianlah sambutan saya dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional kali ini, semoga semangat perjuangan untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional tetap kita gelorakan, demi suksesnya pembangunan nasional.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan ridho-Nya bagi kekuatan Bangsa dan Negara Indonesia.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

MENTERI PERTANIAN,



IR. WARDOJO



66





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PIDATO SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA RESEPSI HUT KE XVIII HNSI TAHUN 1991

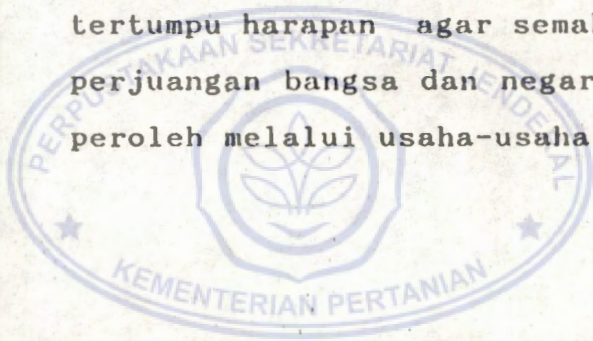
- Saudara Ketua Umum DPP HNSI yang saya hormati,
- Saudara-Saudara Segenap warga HNSI dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warochmatullahi Wabarokatuh.

Sungguh merupakan kebahagiaan bagi saya mendapat kesempatan menghadiri dan sekaligus memberikan sambutan pada resepsi HUT HNSI yang ke XVIII pada malam hari ini. Untuk itu, pertama-tama perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada Saudara Ketua Umum DPP HNSI atas undangannya.

Sebagaimana lazimnya, memperingati hari ulang tahun adalah merupakan saat yang penuh kebahagiaan bukan saja karena berhasil melewati tahun-tahun yang silam dengan selamat akan tetapi lebih penting lagi karena dengan bertambahnya usia seseorang atau suatu organisasi senantiasa disertai dengan pengharapan semakin dewasa dan matangnya seseorang dan atau organisasi organisasi tersebut dalam mengarungi masa-masa yang akan datang yang semakin penuh tantangan.

Demikian pula halnya dalam memperingati HUT ke XVIII HNSI yang merupakan satu-satunya wadah profesi bagi para nelayan kita, tertumpu harapan agar semakin dewasa dan matang dalam menghadapi perjuangan bangsa dan negara mengisi kemerdekaan yang telah kita peroleh melalui usaha-usaha pembangunan.



Sikap mental yang demikian dalam perwujudannya adalah sikap mental yang suka bekerja keras, jujur, tekun dan bersikap proaktif sehingga mampu bekerja bersama dalam suatu kelompok kerja. Sikap mental yang demikian itulah yang dapat melahirkan tenaga kerja yang mampu bekerja secara produktif dan profesional sehingga barang dan jasa yang dihasilkannya bermutu tinggi.

Pemerintah sangat mendambakan terciptanya tenaga kerja yang demikian, oleh karena itu dalam dasa warsa yang terakhir ini mulai digalakkan gerakan produktivitas nasional.

Saudara Ketua DPP HNSI dan segenap hadirin yang berbahagia.

Dalam memperingati HUT HNSI yang ke XVIII ini saya berharap kiranya masalah peningkatan mutu sumber daya manusia dapat dijadikan salah satu titik sentral perhatian dalam melaksanakan program-program kerja organisasi dimasa mendatang. Banyak hal yang bisa dilakukan melalui wadah profesi HNSI dalam membina warganya yaitu para nelayan. Pembinaan sikap mental agar para nelayan dapat responsip terhadap pembangunan pasti akan sangat berguna, misalnya sikap mental yang gandrung akan perkembangan teknologi maju, disiplin dan taat terhadap aturan-aturan dalam menjalankan usahanya, menghindarkan diri dari sikap hidup boros, dan sebagainya. Demikian pula pembinaan profesionalisme melalui pendidikan keterampilan dan kewiraswastaan perlu semakin digalakkan. Pemerintah dewasa ini terus berusaha menciptakan iklim bagi kemampuan para nelayan kita itu. Antara lain semakin mengembangkan pola kerjasama Perusahaan INTI dimana para nelayan diharapkan dapat memperoleh kesempatan mengambil alih keterampilan tersebut di atas.



Kemasyarajaan

Sebagai salah satu kekuatan sosial ~~politik~~, HNSI seyogyanya berperanan aktif dalam proses pembangunan itu sejalan dengan misi yang diembannya. Sebagai wadah profesi, HNSI diharapkan dapat membawa warganya yaitu para nelayan pada kondisi yang siap secara phisic dan mental phsichologis berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan nasional. Lebih-lebih dalam era pelaksanaan Repelita V sekarang ini, dimana saat yang sangat penting dan strategis dalam mempersiapkan diri memasuki tahap pembangunan jangka panjang tahap ke II yang diharapkan merupakan tahapan berlangsungnya proses tinggal landas menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Didalam pembangunan jangka panjang tahap kedua nanti perhatian akan lebih banyak diarahkan pada peningkatan mutu sumber daya manusia agar benar-benar dapat menjadi modal dasar pembangunan. Sebagaimana kita maklumi, sumber daya manusia yang kita miliki sungguh sangat besar namun mutunya, dalam arti produktivitasnya, masih sangat rendah, utamanya para petani nelayan kita. Sehingga belum dapat memberikan kontribusinya secara optimal dalam mensukseskan pembangunan bangsa. Saya berpendapat hal ini merupakan masalah utama yang kita hadapi dewasa ini dan harus dapat kita atasi secepatnya. Untuk itu perlu disusun suatu program yang jelas dan menyeluruh serta mengarah kepada peningkatan mutu sumber daya manusia tersebut.

Dalam hubungan ini saya ingin mengingatkan bahwa peningkatan mutu sumber daya manusia menyangkut perubahan sikap mental dari sikap mental nerimo menjadi sikap mental yang selalu memandang hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini.



Demikian pula Pemerintah terus melanjutkan pembangunan prasarana-prasarana perikanan yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha mereka. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya mengajak kepada segenap pengasuh HNSI di Pusat dan di daerah untuk bersama-sama dengan Pemerintah memanfaatkan momentum yang sangat baik ini demi mempersiapkan diri sebaik-baiknya menyongsong pembangunan jangka panjang tahap ke II yang akan datang yang pasti akan dirancang sebaik-baiknya setelah kita menyelesaikan pesta demokrasi tahun 1992 nanti.

Saudara-Saudara hadirin yang saya hormati.

Demikianlah sambutan saya pada resepsi peringatan HUT ke XVIII HNSI ini, selamat ulang tahun, dirgahayu HNSI semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga mencapai sukses dimasa-masa mendatang.

Sekian dan terima kasih atas perhatian Saudara-saudara.

Wassalamu'alaikum Warochmatullahi Wabarokatuh.

MENTERI PERTANIAN

Ir. WARDOJO



67





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

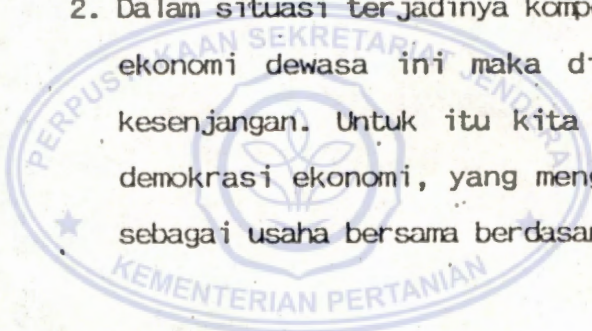
PERANAN BUMN DALAM JAJARAN DEPARTEMEN PERTANIAN
DALAM MEMBINA PENGUSAHA EKONOMI LEMAH

I. PENDAHULUAN.

1. Panitia Rapat Kerja Nasional ke-II Himpunan Pengusaha Ekonomi Lemah Indonesia (HIPLI) meminta saya untuk memberikan ceramah pada hari ini, dengan topik "Peranan BUMN Dalam Jajaran Departemen Pertanian Dalam Membina Pengusaha Ekonomi Lemah". Dari topik diatas pertama-tama yang menarik perhatian saya, adalah perkataan "Pengusaha Ekonomi Lemah" karena saya harus menjawab pertanyaan bagaimana BUMN di Sektor Pertanian dapat membantu pengusaha ekonomi lemah. Saya kira tidak mudah menjawab masalah tersebut mengingat bukan Pengusaha Ekonomi Lemah saja yang memerlukan perhatian, tetapi golongan ekonomi lemah termasuk karyawan dan petani peserta Perkebunan Inti Rakyat (PIR) maupun petani Tebu Rakyat, mereka memerlukan pembinaan, dalam arti peningkatan pendapatannya. Bidang pertanian memang masih mempunyai peranan yang sangat penting baik untuk pendapatan negara (Devisa) maupun untuk memberikan penghidupan bagi masyarakat banyak, mengingat usaha di sektor ini bersifat padat karya.

Tugas-tugas pembinaan dimaksud sudah merupakan tugas yang melekat bagi BUMN Sektor Pertanian, terutama bagi petani yang bekerja sekitar kawasan areal-areal Pertanian/Perkebunan maupun budidaya lain dimana BUMN Sektor Pertanian menjalankan usahanya.

2. Dalam situasi terjadinya kompetisi untuk meraih berbagai peluang di bidang ekonomi dewasa ini maka dirasakan adanya kecenderungan melebarnya kesenjangan. Untuk itu kita harus mendorong terus berlangsungnya proses demokrasi ekonomi, yang mengarahkan penyusunan perekonomian nasional sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.



Proses perubahan sosial yang dibawa oleh pembangunan, haruslah mendorong terwujudnya susunan ekonomi dimana "alat produksi dikuasai oleh semua, untuk semua dibawah penilikan anggota masyarakat (Pasal 33 UUD 1945 dan Penjelasannya). Azas ini harus tetap merupakan prinsip dalam menata perekonomian kita, agar pengusaha besar tidak sampai mematikan pengusaha lemah bahkan bergandengan bersama berpartisipasi merajukan pembangunan Indonesia.

3. Gejolak harga komoditi pertanian khususnya perkebunan, tetap merupakan faktor luar yang sangat mengganggu kemantapan usaha.

Hal ini sangatlah mempengaruhi pendapatan BUMN Sektor Pertanian, sehingga menyebabkan beberapa BUMN berkurang kemampuannya untuk memberikan bantuan kepada golongan ekonomi lemah. Perlu diketahui bahwa Keputusan Menteri Keuangan No. 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 merupakan dasar bagi perusahaan (BUMN) untuk menyisihkan sebagian (1-5%) dari laba bersih yang diperoleh untuk pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi. Dasar itulah tentunya yang menjadi salah satu pedoman bagi BUMN untuk membina Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi. Berdasarkan petunjuk diatas sebenarnya kewajiban BUMN Jajaran Departemen Pertanian dalam membina pengusaha ekonomi lemah sudah cukup jelas.

II. KEDUDUKAN BUMN DALAM EKONOMI NASIONAL

Dalam pendahuluan sudah saya kemukakan bahwa BUMN lingkup Departemen Pertanian, mempunyai kedudukan penting bagi perekonomian negara, antara lain : sebagai sumber Pendapatan/Devisa Negara, Pajak Perseroan/Pajak Pendapatan, Perluasan Lapangan Kerja dan lain sebagainya. Arti penting perusahaan dibidang pertanian, makin menonjol dengan tumbuhnya perusahaan-perusahaan swasta di sektor ini, yang kemampuannya sudah makin berkembang dan memberi petunjuk kepada kita bahwa sektor agribisnis sudah semakin memberi peluang usaha baru bagi perusahaan besar.

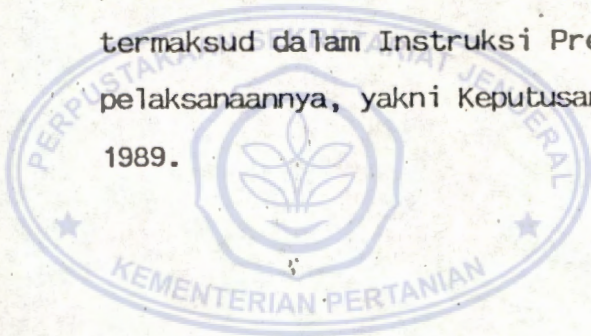


Dalam perjalanan yang panjang, BUMN Jajaran Departemen Pertanian Khususnya Perkebunan adalah berasal dari Perusahaan Belanda yang dinasionalisasi kemudian menjadi Perusahaan Perkebunan Negara, diubah menjadi Perusahaan Negara Perkebunan dan sekarang ini menjadi Persero. Dalam perkembangan lebih lanjut BUMN akan dimungkinkan menjual sahamnya kepada Publik, sehingga modal tidak lagi seluruhnya dimiliki negara. Hal ini diharapkan akan dapat memberikan dampak sosial ekonomi dikemudian hari namun hal itu akan dapat teratasi apabila prinsip demokrasi ekonomi tetap dapat dijaga kelestariannya sehingga pertumbuhan usaha tidak saling mendesak, atau saling mematikan yakni yang kecil tergusur oleh perusahaan besar.

III. PERKEMBANGAN BUMN SEKTOR DEPARTEMEN PERTANIAN.

Perkembangan BUMN Jajaran Departemen Pertanian sebagian besar berasal dari Perusahaan Belanda yang dinasionalisasi sekitar tahun 1958.

Memang ada yang baru berdiri sesudah orde baru, artinya bukan berasal dari nasionalisasi seperti BUMN dibidang Perikanan, bidang Peternakan dan bidang Pangan. Dewasa ini khususnya bidang BUMN sektor perkebunan seluruhnya sudah dalam bentuk Persero, sebanyak 29 buah Sektor Perkebunan dan 9 buah Non Perkebunan. Ditinjau dari segi permodalan BUMN di sektor pertanian ini tentunya tidak lagi digolongkan Pengusaha Lemah, namun tidak berarti semua BUMN tersebut tergolong sangat sehat atau sehat. Ada yang tergolong kurang sehat atau tidak sehat akibat menderita rugi beberapa tahun, sehingga untuk pertumbuhannya perlu mendapat bantuan tambahan modal ataupun fasilitas perkreditan. Tetapi dewasa ini bantuan tersebut sudah sangat sulit diperoleh. Tidak ada kemudahan-kemudahan lagi diberikan kepada BUMN seperti yang sudah-sudah. Kalau tidak mampu menghidupkan usahanya harus dicari jalan lain, misalnya dengan usaha patungan dengan perusahaan lain baik BUMN maupun Perusahaan Swasta. Kalau merugi terus-menerus dan tidak ada prospeknya dapat dilikwidasi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan termaksud dalam Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 1988 dan ketentuan pelaksanaannya, yakni Keputusan Menteri Keuangan No. 740 dan No. 741 Tahun 1989.



Dengan demikian terlihat jelas bahwa kehadiran BUMN dewasa ini di Sektor Pertanian maupun sektor lainnya yang sudah berbentuk Persero dituntut untuk mampu hidup secara mandiri dan mampu bersaing secara sehat dengan Perusahaan Swasta sejenis yang akhir-akhir ini mulai tumbuh subur di sektor ini.

IV. PENGUSAHA EKONOMI LEMAH

1. Perkataan Pengusaha Ekonomi Lemah dapat memberikan konotasi mengenai dua hal yakni :

Pertama Pengusaha yang tidak cukup kuat untuk tumbuh dan Kedua Pengusaha yang modalnya kecil dan umumnya dimiliki oleh lapisan rakyat tingkat bawah. Kedua-dua konotasi ini memberikan isi/arahan seperti Saudara cantumkan pada kerangka acuan rapat kerja ini, yang berbunyi : "Pengusaha Ekonomi Lemah Indonesia meliputi sebagian besar jumlah Pengusaha Indonesia yang merupakan obyek dan sekaligus subyek dari Pembangunan Ekonomi Indonesia dan oleh karena itu perlu digerakkan dan dibina untuk tumbuh dan berkembang dst".

2. Kedudukan Ekonomi Lemah menjadi strategis karena keberadaannya ada di semua sektor usaha dan menjadi ajang kehidupan bagi sebagian besar rakyat Indonesia.

Ada bukti bahwa kelompok Ekonomi Lemah ini, dengan ketekunan dan kerja keras dapat bertumbuh menjadi pengusaha kuat yang besar. Apa resepnya, jawabannya terpulang kepada Saudara-saudara sendiri, terletak pada kemampuan Saudara untuk meningkatkan kewiraswastaan, serta mengembangkan pengalaman sehingga cukup potensial menjadi pengusaha besar dan mandiri. Iklim yang baik yang dapat membantu usaha ekonomi lemah, agar dapat tumbuh kuat memang harus diciptakan oleh Pemerintah. Namun perkembangan usaha ekonomi lemah menjadi kuat tergantung pada resep yang saya kemukakan diatas. Resep itu berlaku juga pada subyek ekonomi yang bergerak pada sektor-sektor informal dan tradisional.



3. Beberapa kendala pengembangan Pengusaha Ekonomi Lemah dapat timbul karena sifat-sifatnya sendiri antara lain :

- a. Sektor ini amat kecil dan lemah baik permodalan maupun dalam pemanfaatan dan penyerapan tenaga kerja lain. Hampir tidak memerlukan tenaga kerja lain, kebanyakan dikelola sendiri secara mandiri.
- b. Bentuk informal, sehingga sulit memperoleh bantuan dana besar.

V. PERANAN BUMN JAJARAN DEPARTEMEN PERTANIAN
DALAM MEMBINA PENGUSAHA EKONOMI LEMAH

1. Perlu dikemukakan fungsi BUMN sebagai agen pembangunan dapat terlihat secara jelas dalam pembangunan areal Perkebunan Inti Rakyat yang sampai akhir tahun 1990 sudah mencapai 382.050 Ha Kebun Plasma dan 158.969 Ha Kebun Inti. Semua areal Plasma tersebut diatas pada akhirnya akan diserahkan kepada petani PIR yang luasnya masing-masing 2 Ha, setelah tanaman mulai menghasilkan.
2. Areal Plasma yang sudah diserahkan kepada petani, perusahaan selanjutnya dilakukan oleh petani sendiri, (bekerja sama dengan Koperasi Unit Desa). Sedangkan BUMN tetap menjadi Pembina, melalui Kebun Inti yang ada disekitar Kebun Plasma. Hal tersebut diperlukan agar pengembangan Perkebunan Inti Rakyat lebih lanjut dapat berjalan sesuai dengan norma-norma yang diperoleh dari penyuluhan dan pelatihan yang diberikan oleh BUMN. Diharapkan dengan penyuluhan dan pelatihan tersebut ketrampilan petani menjadi semakin meningkat kearah kemandirian sehingga mampu memperoleh hasil setarap dengan Kebun Inti.
3. Gambaran diatas adalah untuk menunjukkan betapa besar pembinaan yang dilakukan oleh BUMN Sektor Pertanian kepada Golongan Ekonomi Lemah atau sektor informal sebagai salah satu usaha memperkecil kesenjangan sebagaimana diuraikan dimuka. Dari gambaran tersebut yang tampak sebagai sasaran pembinaan terbesar seolah-olah hanya petani peserta program PIR, tetapi dibalik itu sebenarnya cukup banyak pengusaha ekonomi lemah yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Banyak para pengusaha-pengusaha kecil yang terlibat dalam penyelenggaraan program PIR antara lain pengusaha-pengusaha yang bergerak dalam pembukaan lahan, pembangunan rumah petani, pembangunan jalan kebun, perdagangan umum untuk melayani kebutuhan perkebunan dan lain-lain.

4. Penyediaan dana yang secara khusus untuk pengusaha ekonomi lemah oleh BUMN lingkup Departemen Pertanian telah dimulai sejak keluarnya Surat Menteri Keuangan No. 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tersebut. Besarnya dana yang disisihkan ditetapkan setiap tahun dalam RUPS masing-masing BUMN.

Sebagaimana digariskan dalam SK Menteri Keuangan tersebut pembinaan terhadap pengusaha ekonomi lemah dan koperasi dilakukan dalam bentuk :

- a. peningkatan kemampuan manajerial.
 - b. peningkatan kemampuan dalam ketrampilan tehnik produksi.
 - c. peningkatan modal kerja (a.l. berupa pinjaman modal tanpa bunga).
 - d. peningkatan kemampuan pemasaran.
5. Sesuai dengan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab Menteri Pertanian, prioritas utama pembinaan memang diarahkan kepada pengusaha ekonomi lemah dan koperasi yang bergerak di lingkup pertanian, yang berada disekitar wilayah kegiatan BUMN yang bersangkutan.
 6. Hingga saat ini jumlah dana yang disisihkan untuk pembinaan pengusaha ekonomi lemah dan koperasi berjumlah sekitar Rp. 5,- milyar dan telah disalurkan sekitar Rp. 1,2 milyar. Dari data penerima dana tersebut dapat diketahui bahwa sebagian terbesar yang menerima adalah KUD dan Koperasi yang ada disekitar perkebunan.

Perlu diinformasikan bahwa dana yang disisihkan pengelolaannya tetap berada pada BUMN.



VI. PENUTUP.

1. Dari uraian tersebut diatas dapat dicatat bahwa BUMN di Sektor Departemen Pertanian mempunyai kedudukan strategis, sektor ini merupakan sumber devisa Negara yang dapat diandalkan. Disamping itu BUMN di Sektor Pertanian dikenal sebagai usaha yang padat karya. Sifatnya yang padat karya membawa misi pembinaan golongan Ekonomi Lemah di sektor ini sebagai suatu tugas yang melekat; sejak BUMN didirikan baik di sektor Perkebunan maupun sektor lainnya Jajaran Departemen Pertanian.
2. Dana Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi yang telah disisihkan sejak tahun 1989 di lingkungan BUMN Jajaran Departemen Pertanian yang besarnya ditetapkan oleh RUPS setiap tahunnya akan terus dikembangkan dan dimanfaatkan bagi program pembinaan yang akan terus disempurnakan.
3. Berhasilnya pembinaan Ekonomi Lemah, pada masa-masa mendatang terletak pada kemampuan semua pihak, untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan. Melalui penyuluhan dan pelatihan diharapkan dapat ditingkatkan kewiraswastaan para Pengusaha yang termasuk dalam golongan Ekonomi Lemah. Kemandirian Pengusaha Ekonomi Lemah sangat diperlukan sehingga tidak menjadi penerima bimbingan terus-menerus. Peningkatan ketrampilan berwiraswasta merupakan peluang bagi Pengusaha Ekonomi Lemah untuk menduduki derajat yang lebih tinggi dimasa mendatang.

Sebagai akhir kata saya mengharapkan Rakernas ini dapat mencapai hasil sebagai mana direncanakan.

Terima kasih.

Jakarta, 21 Mei 1991.

Menteri Pertanian,

Ir. Wardoyo.



68





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA PENERBITAN BUKU "GELORA PEMBANGUNAN DALAM PELITA V"

Saya menyambut gembira terbitnya buku dengan judul : GELORA PEMBANGUNAN DALAM PELITA V ini. Kepada penerbitnya Yayasan Warga Purnawirawan ABRI (YAWAPRI), saya menyampaikan penghargaan atas hasrat dan semangatnya untuk tetap ingin berperan serta dalam era pembangunan nasional saat ini dan masa mendatang.

Pembangunan pertanian merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional. Tujuan pembangunan pertanian ialah untuk terus menerus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani khususnya serta masyarakat pertanian pada umumnya dengan jalan terus menerus meningkatkan produksi pertanian baik kuantitas maupun kualitasnya untuk (a) memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat yang terus menerus meningkat, dalam upaya memantapkan swasembada pangan dan perbaikan gizi, (b) memenuhi kebutuhan bahan baku bagi industri di dalam negeri yang berkembang dengan pesat, (c) meningkatkan pendapatan devisa dari ekspor hasil-hasil pertanian.

Sejak Pelita I, sektor pertanian menunjukkan prestasi yang sangat baik dengan dicapainya swasembada beras pada pertengahan tahun delapan puluhan dan berkembangnya sektor perkebunan, perikanan dan peternakan. Pembangunan pertanian yang berhasil ini memberikan sumbangan pada pembangunan nasional antara lain melalui peningkatan konsumsi masyarakat karena memang sebagian terbesar sumber pendapatan masyarakat adalah pertanian atau yang berkaitan dengan sektor pertanian.

Dalam rangka pembangunan pertanian ini, saya mengajak para purnawirawan ABRI untuk terus ikut berjuang dengan memanfaatkan berbagai peluang dalam pembangunan pertanian mulai dari penyediaan peralatan dan input pertanian, produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran sehingga produk tersebut sampai kepada konsumen.

Melalui partisipasi purnawirawan ABRI pada pembangunan pertanian ini saya yakin akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan.

Selamat bekerja, semoga sukses, dan saya berharap buku "Gelora Pembangunan Dalam Pelita V" dapat lebih meningkatkan partisipasi masyarakat atas pelaksanaan pembangunan nasional kita.

MENTERI PERTANIAN

IR. WARDIJO



69





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA PAMERAN KERAJINAN INDONESIA DALAM INTERIOR IV
TANGGAL 23 MEI 1991, DI JAKARTA

Saya menyambut baik penyelenggaraan Pameran Kerajinan Indonesia Dalam Interior IV ini. Kepada penyelenggaranya, Yayasan Bhakti Nusantara Indah (Tiara Indah), saya menyampaikan penghargaan atas jerih payah dan upayanya dalam memacu laju pembangunan khususnya industri kecil dan industri kerajinan rakyat melalui pameran yang terus - menerus dan berkesinambungan setiap tahun.

Seperti diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 1988 bahwa pembangunan ekonomi diarahkan untuk tumbuhnya industri yang kuat yang didukung pertanian yang maju, efisien dan tangguh. Sejalan dengan itu maka sektor pertanian dan sektor industri sebagai bagian dari pembangunan ekonomi selain dituntut untuk berkembang pada laju pertumbuhan yang cukup tinggi juga sekaligus memecahkan masalah ekonomi nasional yang dihadapi seperti meningkatkan devisa, menciptakan lapangan kerja baru, memacu pertumbuhan wilayah yang kurang berkembang dan mengembangkan pertumbuhan yang serasi antara pedesaan dan perkotaan.

Pembangunan pertanian merupakan satu rangkaian kegiatan yang saling berintegrasi dalam satu sistem agribisnis yang perlu ditunjang oleh sektor-sektor lain. Di dalam agribisnis ini sedang dikembangkan agroindustri yang merupakan kegiatan yang mentransformasikan bahan baku dari sektor pertanian menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi.

Dalam upaya mengembangkan agroindustri di pedesaan yang bertujuan untuk menghasilkan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan industri untuk menambah lapangan kerja, meningkatkan ekspor, dan membangun ekonomi pedesaan dengan memperhatikan adanya peluang pasar yang sangat potensial, maka Departemen Pertanian dan Departemen Perindustrian telah merintis upaya-upaya melaksanakan kebijaksanaan dan program terpadu agroindustri di pedesaan.

Dalam pengembangan agroindustri ini secara bertahap didorong peningkatan kemampuan usaha industri kecil yang


struktur, serta penguasaan teknologi rancang bangun, rekayasa dan sumberdaya manusia.

Para pengusaha industri kecil ini diberi bimbingan dan penyuluhan serta pengembangan teknologi produksi dan peningkatan mutu serta desain produksi. Disamping itu pengembangan industri kecil akan terus didorong melalui program keterkaitan dengan pola PIR, dimana perusahaan itu mengadakan hubungan kerja yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan, memberikan bantuan persediaan bahan baku, peralatan, pendidikan ketrampilan, bantuan desain serta bantuan jaminan memperoleh kredit Bank.

Mudah-mudahan dengan melalui berbagai upaya yang lintas sektoral ini, kesejahteraan pengusaha kecil dan para petani akan semakin meningkat.

Semoga pameran ini sukses.

Menteri Pertanian


Ir. Wardoyo

